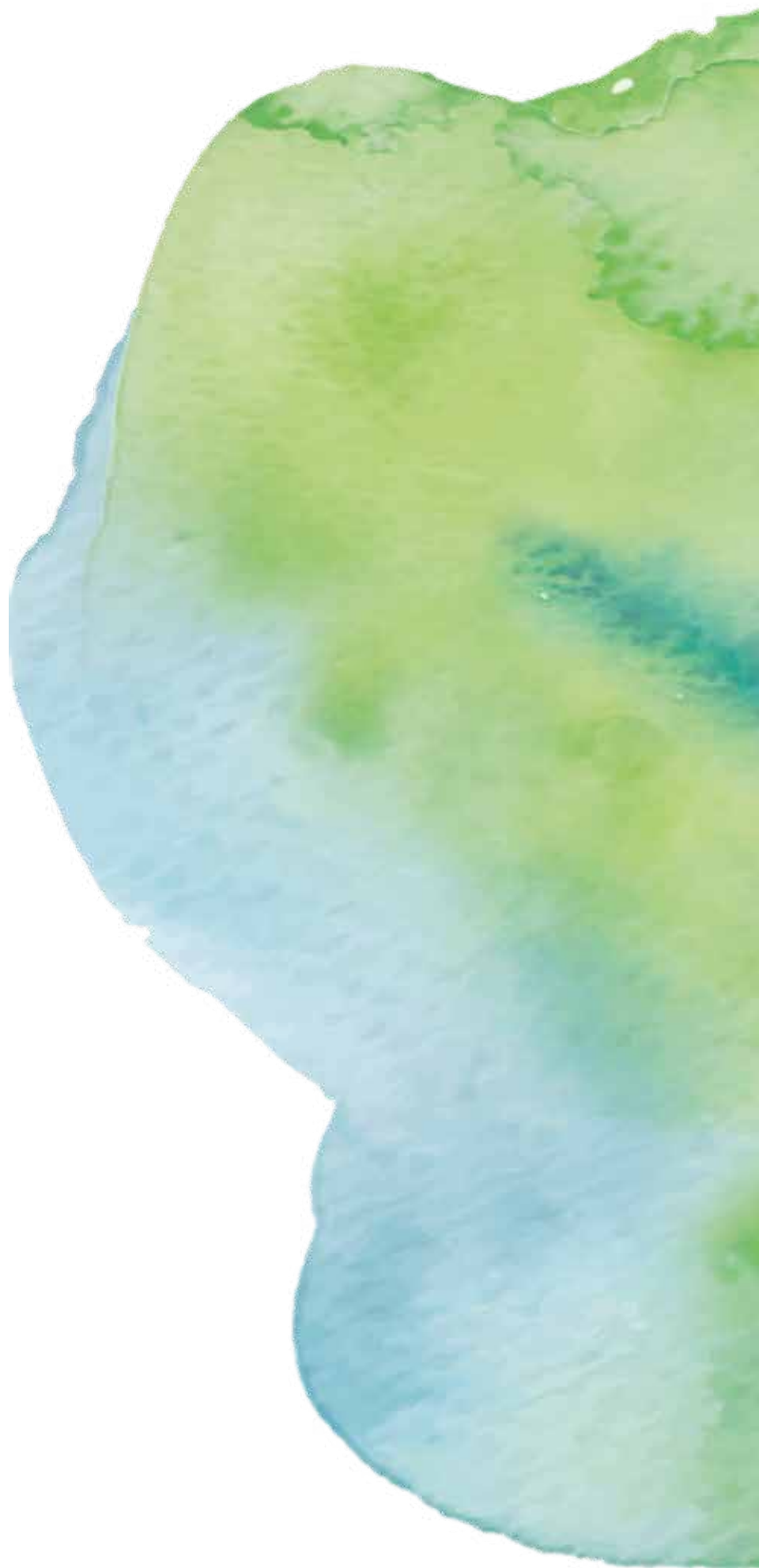








BIOTECH INNOVATION FOR A GLOBAL COMPETITIVENESS

Bio Farma memiliki keahlian dan pengalaman selama lebih dari 126 tahun, dengan sejarah panjang tersebut, Kami siap untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa di Indonesia dan dunia. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Bio Farma, kami telah menjadi produsen Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis pertahun.

Kami yakin akan terus dapat meningkatkan kinerja kini dan masa depan. Kami menyelaraskan seluruh proses produksi sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*).

Kami terus melakukan inovasi bioteknologi, berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin, untuk kebutuhan program imunisasi nasional dan menyelamatkan jutaan kehidupan manusia.

DAFTAR ISI



1 BIOTECH INNOVATION FOR A GLOBAL COMPETITIVENESS

7 PEMBUKA

- 8 Kesenambungan Tema
- 10 PROPER Emas
- 11 *The Best Sustainability Report*
- 12 *Contributed to the Health of Nation Trough the Years*
- 13 *Acces to Vaccine & Healthcare*
- 15 *Our Dedication to The World*
- 16 Keberhasilan Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal
- 17 Eradikasi Polio
- 18 Pencapaian Penting Bio Farma 2016
- 20 Posisi Keuangan Bio Farma selama 5 Tahun Buku
- 28 Prioritas Strategi 2016
- 29 Strategi 2017
- 30 Bisnis Proses Ramah Lingkungan
- 31 Siklus Pengembangan Vaksin
- 32 Komitmen Menjaga Kualitas Vaksin
- 33 Edukasi Media
- 34 Perjalanan Sebotol Vaksin
- 35 Sistem Rantai Dingin
- 36 Produk Kami
- 37 Pangsa Pasar
- 38 Sebaran Pelanggan

41 IKHTISAR KEUANGAN

- 42 Hasil Usaha Bio Farma Selama 5 Tahun Buku



45 LAPORAN MANAJEMEN

- 46 Sambutan Dewan Komisaris
- 52 Laporan Direksi
- 62 Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016



65 PROFIL PERUSAHAAN

- 68 Perubahan Logo
- 70 Sekilas Bio Farma
- 71 Sistem Manajemen Terintegrasi
- 72 Riwayat Singkat Perusahaan
- 74 Bidang Usaha
- 78 Struktur Organisasi
- 80 Filosofi, Visi, Misi, Kebijakan Perusahaan, Value (Budaya Perusahaan) dan Kompetensi Inti
- 82 Identitas & Riwayat Singkat Anggota Dewan Komisaris
- 88 Identitas & Riwayat Singkat Anggota Direksi
- 94 Sumber Daya Manusia
- 113 Testimoni Insan Bio Farma
- 116 Penghargaan dan Sertifikasi
- 124 Peristiwa Penting
- 135 Informasi Pada Website Perusahaan
- 136 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal (Pengawasan Internal)



147 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

- 148 Perkembangan Ekonomi Dunia
- 150 Perkiraan Ekonomi Dunia
- 153 Perkembangan Ekonomi Indonesia
- 154 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
- 159 Kinerja Per Segmen Usaha
- 162 Peningkatan/ Penurunan Kapasitas Produksi
- 162 Penjualan/ Pendapatan Usaha
- 176 Indikator Utama Perusahaan Tahun 2016
- 178 Kinerja Keuangan Perusahaan
- 204 Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Perusahaan
- 207 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
- 210 Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal pada Tahun Buku Terakhir
- 215 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada tahun Buku Terakhir



220	Perbandingan RKAP & Realisasi	279	Maksud dan Tujuan Pedoman GCG
237	Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	279	Pedoman dan Kebijakan Penerapan GCG di Bio Farma
237	Prospek Usaha Perusahaan	281	Tahap-Tahap Penerapan GCG
243	Kontribusi Bio Farma di Dunia	282	Membangun Kesadaran Mengenai Arti Penting GCG dan Komitmen Bersama dalam Penerapan GCG
246	Aspek Pemasaran	283	Roadmap GCG Bio Farma
253	Kebijakan Dividen & Jumlah Dividen	287	Kepatuhan Terhadap Hukum
255	Program Kepemilikan Saham Oleh dan/atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)	287	Keterbukaan Informasi
255	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (Dalam Hal Perusahaan Masih Diwajibkan Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana)	288	Pencegahan Benturan Kepentingan
255	Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	288	Penerimaan Hadiah, Cendera Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas Lainnya
256	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Signifikan Terhadap Perusahaan	289	Kesempatan Yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
257	Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir	290	Aktivitas Politik
265	Informasi Kelangsungan Usaha	291	Perlindungan Informasi Perusahaan
		292	Perlindungan Aset Perusahaan
		292	Penerimaan/ Pemberian Grafikasi Yang Dianggap Suap
		293	Perlindungan Konsumen
		293	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		294	Kebijakan Dividen
		295	Uraian Dewan Komisaris
		295	Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Dewan Komisaris
		300	Uraian Tanggung Jawab Dewan Komisaris
		300	Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma
		304	Pembagian Tugas Dewan Komisaris
		304	Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016
		312	Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Dewan Komisaris dan Program Orientasi Bagi Komisaris Baru
		317	Informasi Mengenai Komisaris Independen



271 TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 272 Arti Penting *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bio Farma
- 273 Pernyataan Tata Kelola Perusahaan
- 275 Tujuan Penerapan GCG
- 275 Dasar-Dasar Penerapan
- 276 Manfaat Penerapan GCG
- 276 Faktor Penerapan GCG
- 276 Struktur Tata Kelola



317	Kriteria Penentuan Komisaris Independen
320	Pernyataan Independensi Komisaris Independen
322	Uraian Direksi
322	Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Direksi
323	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
326	Susunan Direksi Bio Farma
348	Uraian Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
363	Rapat Dewan Komisaris
363	Rapat Dewan Komisaris Sebagaimana Diatur dalam <i>Board Manual</i> Dewan Komisaris dan Direksi
365	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
366	Tanggal, Agenda Rapat, Keputusan, Tempat dan Nama Peserta Rapat
372	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
372	Rapat Direksi Sebagaimana Diatur dalam (<i>Board Manual</i>) Direksi
375	Tanggal, Agenda Rapat, Keputusan, Tempat dan Nama Peserta Rapat Direksi
380	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
381	Tanggal, Agenda Rapat, Keputusan, Tempat dan Nama Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
384	Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali, Baik Langsung maupun Tidak Langsung, Sampai Kepada Pemilik Individu
384	Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
387	Komite Audit
389	Nama dan Jabatan Anggota Komite Audit
389	Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit
392	Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit
394	Independensi Anggota Komite Audit
397	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
398	Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Pada Tahun 2016



400	Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit
401	Remunerasi Komite Audit
403	Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Komite Audit
404	Komite Nominasi & Remunerasi
404	Komite Audit dan Remunerasi
404	Komite Risiko dan Nominasi
405	Komite-Komite Lain dibawah Dewan Komisaris Yang Dimiliki Oleh Bio Farma
405	Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
408	Nama, jabatan dan Riwayat Hidup Singkat Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
410	Kualifikasi Pendidikan Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
413	Independensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
414	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
415	Uraian Pelaksanaan Kegiatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
417	Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
418	Remunerasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
420	Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan
425	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
439	Uraian Mengenai Audit Internal
439	<i>Quality Assurance</i>
454	Akuntan Publik



- 457 Uraian Mengenai Manajemen Risiko
- 472 Uraian Mengenai Sistem Pengendalian Internal
- 479 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Perusahaan
- 480 Akses Informasi dan Data Perusahaan
- 487 Kode Etik (Pedoman Perilaku/*Code Of Conduct*)
- 498 Pengungkapan Mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblow System*)
- 510 Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi



519 TEKNOLOGI INFORMASI

- 520 Area Fokus Pengelolaan Teknologi Informasi
- 520 Pedoman Teknologi Informasi
- 521 Kebijakan Perusahaan Untuk Penerapan Teknologi Informasi
- 540 Master Plan (Roadmap) Teknologi Informasi
- 522 Pengembangan Teknologi Informasi
- 524 Infrastruktur Teknologi Informasi Tahun 2016
- 525 Tata Kelola Sistem Informasi
- 526 Pelatihan dan Pengembangan SDM Teknologi Informasi



529 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 530 CSR - Lingkungan Hidup
- 531 Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
- 532 CSR - Ketenagakerjaan, Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
- 534 CSR - Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan.
- 539 Biaya Yang Dikeluarkan
- 539 CSR - Tanggung Jawab Pada Kosumen



541 LAPORAN KEUANGAN

601 REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

COMPETENCE AND COMMITMENT FOR 126 YEARS

Dalam perjalanan panjang selama 126 tahun, Bio Farma senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan serta menerapkan Good Corporate Governance.



KESINAMBUNGAN TEMA



2016 BIOTECH INNOVATION FOR A GLOBAL COMPETITIVENESS

Bio Farma memiliki keahlian dan pengalaman selama lebih dari 126 tahun, dengan sejarah panjang tersebut, Kami siap untuk terus berkontribusi meningkatkan kualitas hidup bangsa di Indonesia dan dunia. Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Bio Farma, kami telah menjadi produsen Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis pertahun.

Kami yakin akan terus dapat meningkatkan kinerja kini dan masa depan. Kami menyelaraskan seluruh proses produksi sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*).

Kami terus melakukan inovasi bioteknologi, berperan aktif dalam menjaga ketersediaan dan kemandirian produksi vaksin, untuk kebutuhan program imunisasi nasional dan menyelamatkan jutaan kehidupan manusia.



2015 BIOTECH INNOVATION FOR A BETTER FUTURE

Dengan dedikasi dari seluruh insan Bio Farma, sejak tahun 2011 kami telah bertekad dan berkomitmen menghasilkan berbagai inovasi bioteknologi, karena Inovasi adalah budaya kami.

Implementasi Bisnis Proses Ramah Lingkungan serta Inovasi bidang lingkungan dan CSR, menjadikan Bio Farma satu-satunya industri Farmasi Indonesia yang meraih PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahun 2015 ini, Inovasi Bioteknologi telah membuahkan hasil yaitu pengembangan produk Biologi Eritopoetin (EPO) serta pengembangan produk *Life Science* lainnya. Kini saatnya Bio Farma terus berinovasi di bidang Bioteknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.



2014 BIO FOR LIFE

Didukung kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 125 tahun, kami hadir sebagai bagian dari perjuangan, dalam menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, berperan penting dalam membangun kesehatan bangsa, sehingga keberadaannya dipertahankan dari masa ke masa. Dengan filosofi "*Dedicated to Improve Quality of Life*" kami siap mendedikasikan kerja keras kami untuk keamanan kesehatan global (*Global Health Security*), sehingga melalui *Bio for Life* memberikan solusi untuk kemakmuran global.



2013 DEDICATED TO GLOBAL ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH

Dengan kompetensi, pengalaman dan proses pembelajaran selama lebih dari 123 tahun, kami terus berinovasi, dalam riset dan pengembangan produk untuk menemukan vaksin-vaksin baru, yang dapat mengatasi berbagai penyakit yang terus berkembang dan mengancam kesehatan manusia. Kami dedikasikan kerja keras kami untuk lingkungan global dan kesehatan masyarakat, memberikan solusi untuk kemakmuran global.



2012 TOWARDS LIFE SCIENCE INDUSTRY

Tahun 2012 Bio Farma melakukan peningkatan visi perusahaan, yaitu “menjadi Produsen vaksin dan antisera kelas dunia yang berdaya saing global.” Dengan semangat untuk memberikan solusi kemakmuran secara global, kini saatnya Bio Farma melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan *repositioning* Perusahaan

Produsen Vaksin menjadi *Life Science Industry*, melalui perubahan sistem budaya korporasi baru, efisiensi proses bisnis, pembaharuan teknologi serta peningkatan kualitas SDM kelas dunia.



2011 BIOTECHNOLOGY INNOVATION IS OUR FUTURE

Status sebagai satu-satunya produsen vaksin dan antisera di Indonesia tak membuat Bio Farma terlena. Untuk menghadapi persaingan di tingkat global yang semakin ketat, Bio Farma terus melakukan pembenahan dan inovasi di berbagai hal, termasuk menghasilkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pengembangan produk-produk yang berbasis bioteknologi menjadi kunci keberhasilan di masa mendatang.

PROPER EMAS

PENGHARGAAN ATAS PENERAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SECARA MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN



Untuk ketiga kalinya Bio Farma meraih penghargaan tertinggi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Direktur Produksi Bio Farma Juliman, dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Siti Nurbaya, bertempat di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

PROPER Emas adalah bukti upaya berkelanjutan dalam bidang lingkungan, efisiensi energi, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berhasil, hanya 13 perusahaan yang mampu meraih PROPER emas pada tahun 2016 dan salah satunya Bio Farma.

Kami terus melakukan inovasi dalam berbagai bidang, seperti program pemanfaatan sumber daya dan efisiensi energi, penanggulangan dampak lingkungan atas aktivitas operasional perusahaan, dan program pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk kembali meraih predikat PROPER Emas untuk ketiga kalinya.



**2016
PROPER Emas**



2011

PROPER Hijau



2012

PROPER Hijau



2013

PROPER Hijau



2014

PROPER Emas



2015

PROPER Emas



2016

PROPER Emas

THE BEST SUSTAINABILITY REPORT

Bio Farma meraih penghargaan *"Best Sustainability Report 2015 Category Manufactures"*. Ini penghargaan kedua dibidang Laporan Keberlanjutan dari NCSR. Penghargaan diserahkan langsung oleh Sarwono Kusumaatmadja selaku Ketua Dewan JURI SRA 2016 dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

Saat ini, Sustainability Report Bio Farma sudah merujuk pada panduan Global Reporting Initiative (GRI) G4 versi terakhir selain itu

Sustainability Report Bio Farma juga sudah menyelaraskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bio Farma sudah menjadi anggota Organizational Stakeholders (OS) GRI, ini mencerminkan komitmen penerapan keberlanjutan. Praktek sustainability Bio Farma dijadikan panduan dan pembelajaran anggota GRI dari negara negara lain yang tergabung dalam *Organization Stakeholder* GRI Internasional.



Bio Farma raih penghargaan *"Best Sustainability Report Category Manufactures"* Penghargaan diserahkan langsung oleh Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Juri SRA 2016 dan diterima oleh Juliman, Direktur Produksi Bio Farma.

Kami menyelaraskan seluruh proses produksi dan aktivitas korporasi sesuai dengan arah target pembangunan global yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) agar mampu bersaing di pasar global.



CONTRIBUTED TO THE HEALTH OF NATION THROUGH THE YEARS

AKSES KESEHATAN DAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI

Sesuai instruksi presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, Bio Farma senantiasa mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional;

Bio Farma berkomitmen meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor. Saat ini dengan sejumlah 13 produk yang telah mendapatkan pengakuan – Pra Qualifikasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) Lebih dari 130 negara telah menggunakan produk Bio Farma, kami telah menjadi produsen Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi lebih dari 3,2 miliar dosis pertahun. Namun demikian Kami senantiasa memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri.

Bio Farma mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan; dan mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.

Kami berkomitmen dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan terutama pengembangan ke arah Biopharmaceutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia. Melalui forum riset vaksin dan *Life Science* nasional kami mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan riset dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan.



ACCESS TO VACCINE & HEALTHCARE



Bio Farma berkomitmen meningkatkan layanan terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit melalui program *Access to Vaccine & Healthcare* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bertujuan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat khususnya di daerah terpencil yang sulit terjangkau dan masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemberian vaksin.

Peningkatan akses terhadap pemberian vaksinasi dan layanan kesehatan yang dimaksud memudahkan masyarakat luas mendapatkan vaksin, penyediaan pendidikan kesehatan, pelaksanaan program perbaikan gizi bayi dan balita, edukasi kesehatan bagi masyarakat, pembangunan taman vaksinasi serta pembangunan puskesmas pariwisata.



PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK NASIONAL CILETUH

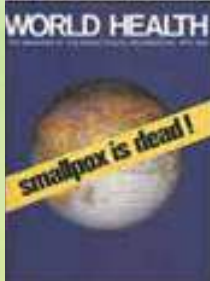
Tahun 2016, Kami fokus pada pengembangan kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu, bahkan kami menjadi satu satunya industri di dunia, yang terlibat sejak awal dalam pengembangan Geopark yang sedang dalam proses untuk diakui UNESCO, ditandai dengan diterimanya presentasi Tim Bio Farma pada Konferensi Internasional Global Geopark Network awal Oktober 2016 di English Riviera Torquay, Inggris.

Kami juga terus menerus memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar Geopark Ciletuh, dan mengembangkan masyarakat yang sebelumnya memiliki kegiatan penambang ilegal sekarang dikembangkan untuk menjadi kawasan geowisata.

Sejak 2013 kami aktif melakukan pendampingan di Geopark Ciletuh. Antara lain dengan memperkenalkan konsep Geopark kepada masyarakat setempat, peningkatan kapasitas masyarakat lokal, program pipanisasi air bersih bagi masyarakat, memberikan pelatihan dan pembinaan *homestay* dan wisata lokal. Selain itu, pengembangan dan promosi batik ramah lingkungan Batik Pakidulan, Dari aspek kelestarian lingkungan dilakukan juga pelestarian tanaman endemik, *mangrove* dan terumbu karang, serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan obat-obatan.

OUR DEDICATION TO THE WORLD

Dunia pernah terserang cacar api. Kami adalah bukti keberhasilan eradikasi berbagai penyakit menular, Dedikasi kami untuk menjadi inspirasi bagi produsen Vaksin negara berkembang.



VARIOLA ERADICATION

- 1967** Pencanangan Eradikasi oleh WHO melalui vaksinasi
- 1967** 10-15 juta kasus pada 44 Negara 2 juta kematian.
- 1976** 2 kasus
- 1977** 1 kasus terakhir di Somalia
- 1977** Eradikasi



1988

Bio Farma Ekspor 2/3 kebutuhan dunia

1988

125 negara

- ☒ Negara yang belum dinyatakan bebas polio.
- ☐ Negara yang sudah dinyatakan bebas polio.



2014*

3 negara, Nigeria Afganistan dan Pakistan

2016: 2 Negara
Pakistan dan India

- ☒ Negara yang belum dinyatakan bebas polio.
- ☐ Negara yang sudah dinyatakan bebas polio.

KEBERHASILAN ELIMINASI TETANUS MATERNAL DAN NEONATAL



Wilayah 1 Bali dan Jawa: Agustus 2010

Wilayah 2 Sumatra: 2010

Wilayah 3 Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi: Juli 2011

Wilayah 4 Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara: Mei 2016



ERADIKASI POLIO



Jumlah kasus penderita penyakit polio di dunia, telah terjadi penurunan lebih dari 99% sejak tahun 1988, turun dari sebanyak 350.000 kasus menjadi hanya 74 kasus yang dilaporkan pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pencanangan pekan imunisasi nasional dengan sukses dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Ini sebagai bukti komitmen dunia dalam mencegah penyebaran penyakit polio.

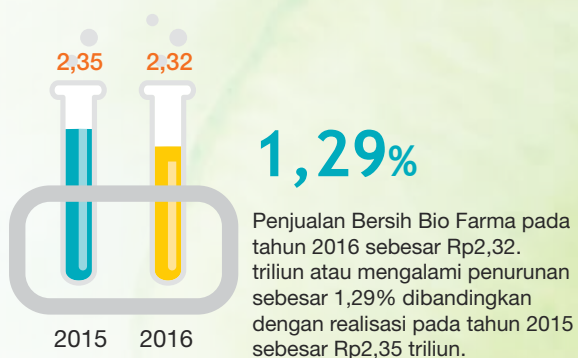
Bio Farma sebagai produsen Vaksin yang memiliki kapasitas yang besar telah berkontribusi dalam pencapaian eradikasi polio. Sampai saat ini, sebanyak

2/3 kebutuhan vaksin polio di dunia dipenuhi dari Bio Farma, bahkan Kami juga membantu negara-negara berkembang yang memiliki keinginan untuk mandiri dan memproduksi vaksin di negaranya dengan menggunakan *intermediate* produk (*bulk*) polio dari Bio Farma.

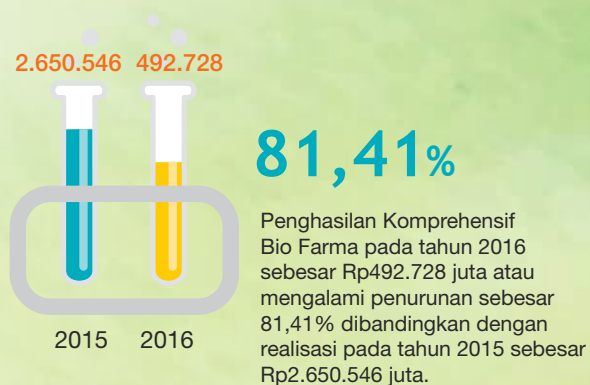
Kontribusi untuk pemenuhan vaksin polio baik nasional dan global sebagai bentuk perlindungan terhadap penyebaran penyakit menular khususnya mendukung eradikasi polio di dunia.

PENCAPAIAN PENTING BIO FARMA 2016

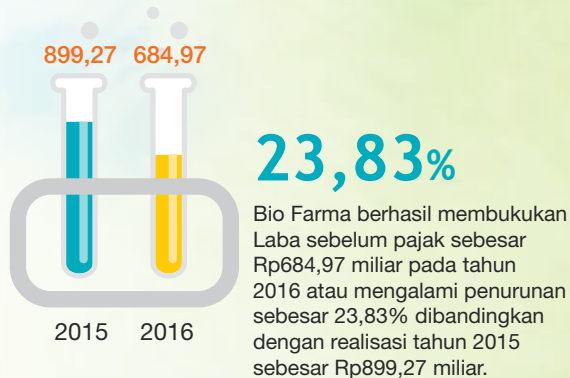
PENJUALAN BERSIH [dalam triliun]



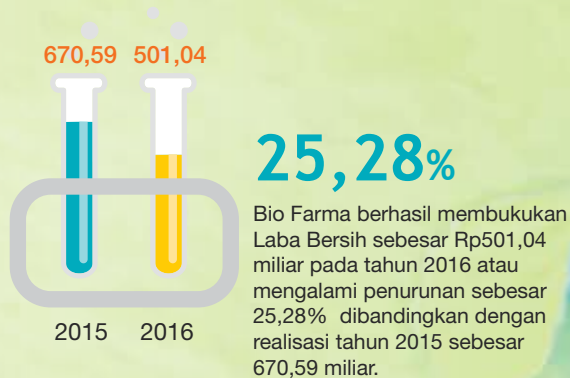
PENGHASILAN KOMPREHENSIF [dalam juta]



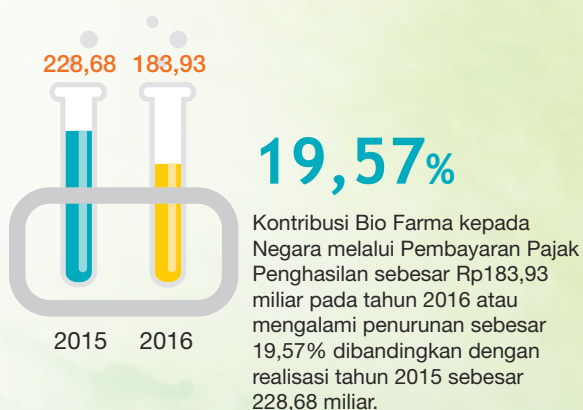
LABA SEBELUM PAJAK [dalam miliar]



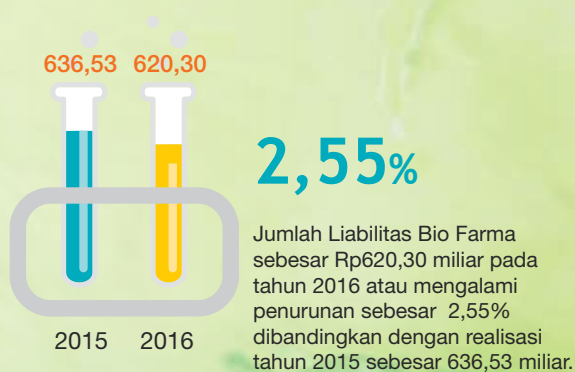
LABA BERSIH PERUSAHAAN [dalam miliar]



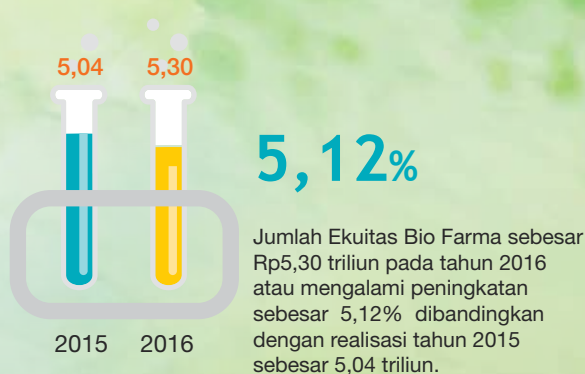
BEBAN PAJAK KINI [dalam miliar]

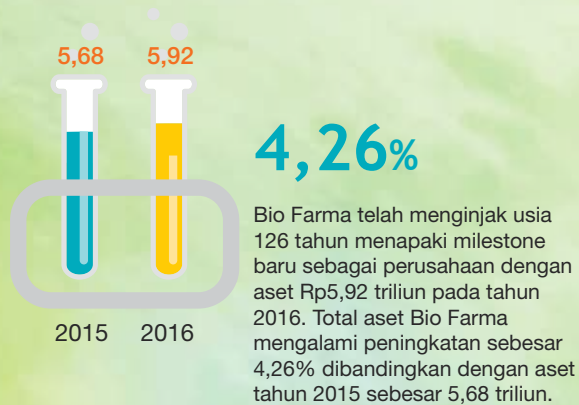
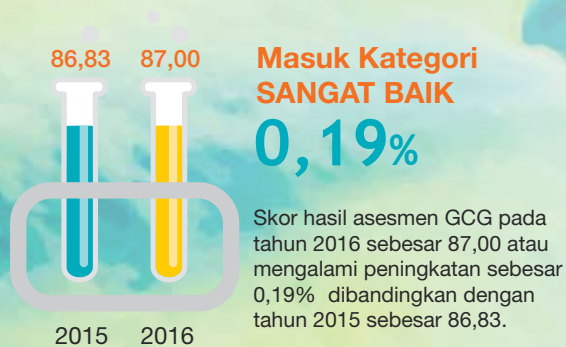
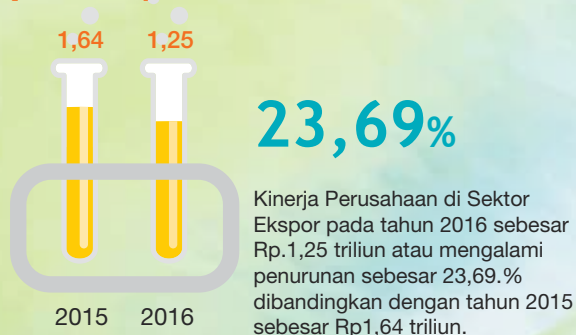
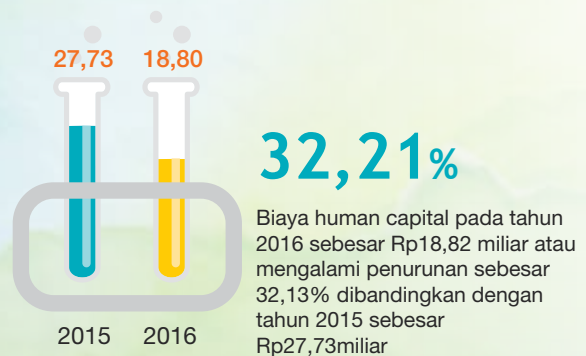


JUMLAH LIABILITAS [dalam miliar]



JUMLAH EKUITAS [dalam triliun]



JUMLAH ASET [dalam triliun]**JUMLAH INVESTASI [dalam juta]****SKOR ASESMEN GCG****SKOR KPKU****KINERJA SEKTOR EKSPOR [dalam triliun]****BIAYA HUMAN CAPITAL [dalam miliar]****KINERJA SEKTOR PEMERINTAH & SWASTA**

POSISI KEUANGAN BIO FARMA SELAMA 5 TAHUN BUKU

JUMLAH INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

INVESTASI BERDASARKAN PENGGUNAANNYA

Realisasi Investasi Berdasarkan Penggunaannya

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan [%]	Selisih 2015/2016
	1	2	3	4	5	5/4	5-4
RUTIN							
Jumlah Penilaian WHO & GMP	39.428	50.655	30.873	74.314	23.540	(68,32)	(50.774)
Jumlah Penggantian	18.592	44.814	29.889	23.735	33.555	41,38	9.820
Jumlah IPAL/K3/Lingkungan/ Quality Control	2.694	1.632	10.133	14.822	23.708	59,95	8.886
PENGEMBANGAN							
Jumlah Peningkatan Kapasitas	25.423	114.224	69.109	399.039	378.580	(5,13)	(20.459)
Jumlah LITBANG/Riset Dasar/ Development	9.107	24.690	12.984	9.971	71.491	616,97	61.519
Jumlah Produk Baru	80.878	12.262	21.636	23.093	11.797	(48,92)	(11.296)
Total	176.122	248.276	174.623	544.974	542.671	(0,42)	(2.303)

INVESTASI PER KELOMPOK

Realisasi Investasi Per Kelompok

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan [%]	Selisih 2015-2016
	1	2	3	4	5	5/4	5-4
Inventaris Kantor	7.110	11.504	32.554	13.842	18.324	32,38	4.482
Inventaris Pabrik	29.208	82.722	49.448	243.363	385.478	58,40	142.115
Inventaris Lainnya	108.384	31.958	32.018	53.807	14.351	(73,33)	(39.456)
Inventaris Bangunan	30.903	114.850	39.849	228.358	114.298	(49,95)	(114.061)
Inventaris Kendaraan Bermotor	-	-	750	384	30	(92,17)	(354)
Aset Tak Berwujud	518	7.242	20.004	5.219	10.189	95,22	4.970
Tanah	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah	176.122	248.276	174.623	544.974	542.671	(0,42)	(2.303)

ARUS KAS**Laporan Arus Kas**

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI										
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1.375.334	1.800.735	2.108.672	2.106.478	2.876.996	2.334.948	10,85	(18,84)	228.470	(542.048)
Penerimaan Pajak (Retribusi)	0	0	(314.959)	28.876	(458.463)	124.792	332,17	(127,22)	95.916	583.255
Penerimaan Bunga	3.138	12.823	35.395	37.422	15.000	7.960	(78,73)	(46,93)	(29.462)	(7.040)
Penerimaan Hibah/ Donasi WHO	1.767	1.278	4.989	800	2.918	13.588	1.598,50	365,71	12.788	10.670
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	2.405	(19.156)	11.673	(23.774)	4.517	1.238	(105,21)	(72,59)	25.012	(3.279)
Penerimaan Klaim Asuransi	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Bunga	-	-	-	-	(125)	(9.343)	-	7.374,00	(9.343)	(9.218)
Pembayaran Tantiem	(5.867)	(6.980)	(9.727)	(13.737)	-	(14.750)	7,38	-	(1.013)	(14.750)
Pembayaran Pajak	(139.777)	(151.969)	-	(326.409)	-	(391.829)	20,04	-	(65.420)	(391.829)
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(858.357)	(1.003.850)	(1.330.310)	(1.584.191)	(1.732.277)	(1.519.679)	(4,07)	(12,27)	64.512	212.597
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	378.642	632.880	505.839	225.465	708.566	546.926	142,58	(22,81)	321.461	(161.640)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI										
Pembelian Aset Tetap	(208.859)	(192.644)	(163.149)	(535.175)	(1.344.255)	(393.170)	(26,53)	(70,75)	142.005	951.085
Penempatan Jaminan Deposito	-	-	(25.000)	25.000	-	-	-	-	(25.000)	-
Pembelian Aset Takberwujud	(1.816)	(6.671)	(20.578)	(3.962)	(14.308)	(11.173)	181,97	(21,91)	(7.210)	3.135
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	20	138	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(210.655)	(199.177)	(208.727)	(514.137)	(1.358.563)	(404.343)	(21,36)	(70,24)	109.795	954.220

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN										
Penerimaan										
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	450.000	235.000	-	(47,78)	235.000	(215.000)
Pembayaran										
Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	(235.000)	-	-	(235.000)	(235.000)
Pembayaran Dividen	(57.460)	(113.938)	(228.987)	(145.015)	(203.434)	(234.707)	61,85	15,37	(89.692)	(31.273)
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-	(4.712)	-	-	-	-	4.712	-
Modal Donasi dari WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	-	-	-	-	(2.772)	-	-	-	-	2.772
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(57.460)	(113.938)	(228.987)	(149.727)	243.794	(234.707)	56,76	(196,27)	(84.980)	(478.501)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	110.527	319.765	68.125	(438.398)	(406.202)	(92.123)	(78,99)	(77,32)	346.275	314.079
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	16.100	72.988	12.341	22.621	-	(15.865)	(170,14)	-	(38.486)	(15.865)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	371.871	498.498	891.251	971.717	733.136	555.939	(42,79)	(24,17)	(415.778)	(177.196)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	498.498	891.251	971.717	555.939	326.933	447.950	(19,42)	37,02	(107.989)	121.017

ASET

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2015 - -2016	Selisih 2016 - RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Jumlah Aset Lancar	1.033.864	1.542.901	1.824.639	1.995.781	2.177.422	1.849.555	(7,33)	(15,06)	(146.226)	(327.866)	2.358.153
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.011.824	1.161.703	1.219.969	3.684.882	4.586.647	4.072.899	10,53	(11,20)	388.017	(513.748)	5.914.812
TOTAL ASET	2.045.688	2.704.604	3.044.607	5.680.663	6.764.069	5.922.454	4,26	(12,44)	241.791	(841.615)	8.272.965

LIABILITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Jumlah Jangka Pendek	197.714	389.637	339.668	456.663	527.731	453.169	(0,77)	(14,13)	(3.494)	(74.562)	737.577
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.441	48.371	161.250	179.868	662.389	167.133	(7,08)	(74,77)	(12.735)	(495.256)	1.485.333
JUMLAH LIABILITAS	239.155	438.008	500.919	636.532	1.190.121	620.302	(2,55)	(47,88)	(16.230)	(569.818)	2.222.910

EKUITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016 - RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
EKUITAS											
Modal Saham	750.000	750.000	1.250.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	21,21	-	350.000	-	-
Saldo Laba (Rugi)											
- Dicadangkan	670.641	941.919	786.075	816.422	881.101	899.824	10,22	2,12	83.402	18.723	-
- Belum Dicadangkan	-	675	-	(2484)	-	-	(100,00)	#DIV/0!	2.484	-	-
Laba Periode Berjalan	385.892	572.468	577.590	670.593	758.224	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.183)	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	(69.976)	1.909.600	1.934.623	1.901.287	(0,44)	(1,72)	(8.313)	(33.336)	-
Jumlah Ekuitas	1.806.533	2.265.062	2.543.689	5.044.132	5.573.948	5.302.152	5,12	(4,88)	258.021	(271.796)	6.070.005
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.045.688	2.703.069	3.044.608	5.680.663	6.764.069	5.922.454	4,26	(12,44)	241.791	(841.615)	8.292.915



RASIO KEUANGAN BIO FARMA

(Dalam Juta Rupiah)

Rasio Keuangan	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan [%]	Selisih 2015 -2016	Selisih 2016 -RKAP	
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Likuiditas [%]										
Rasio Kas	252,13	228,74	286,08	121,74	61,95	98,85	(18,80)	59,56	(22,89)	36,90
Rasio Lancar	522,91	395,98	537,18	437,04	412,60	408,14	(6,61)	(1,08)	(28,90)	(4,46)
Rentabilitas [%]										
Gross Profit Margin	59,38	60,96	61,84	63,02	61,80	56,59	(10,21)	(8,43)	(6,43)	(5,21)
Operating Margin	34,03	36,93	35,57	35,65	34,78	28,50	(20,07)	(18,05)	(7,15)	(6,28)
Net Profit Margin	26,84	30,88	28,48	28,59	25,98	21,64	(24,30)	(16,69)	(6,95)	(4,34)
Return on Equity (ROE)	29,36	37,81	31,93	17,14	18,79	12,47	(27,26)	(33,64)	(4,67)	(6,32)
Return on Investment (ROI)	31,22	34,81	31,15	20,27	20,04	16,53	(18,42)	(17,49)	(3,73)	(3,50)
Return on Assets (ROA)	20,42	24,11	20,26	15,37	12,30	8,80	(42,77)	(28,48)	(6,57)	(3,50)
Solvabilitas [%]										
Debt to Equity	13,24	19,34	19,69	12,62	21,35	11,70	(7,29)	(45,21)	(0,92)	(9,65)
Turnover [times]										
Turnover Persediaan	3,59	3,95	2,94	2,20	2,83	1,72	(21,91)	(39,24)	(0,48)	(1,11)
Turnover Piutang	7,80	7,29	7,54	6,17	9,50	5,87	(4,87)	(38,16)	(0,30)	(3,62)
Pertumbuhan [%]										
Penjualan	108,20	128,94	110,27	114,77	122,03	98,71	(13,99)	(19,10)	(16,05)	(23,31)
Laba Usaha	126,51	139,92	106,19	115,05	131,43	78,91	(31,41)	(39,96)	(36,14)	(52,53)
Laba Sebelum Pajak	127,79	149,41	99,65	115,90	120,56	76,17	(34,28)	(36,82)	(39,73)	(44,39)

RASIO LANCAR

↓ 6,61%

RETURN ON EQUITY
(ROE)

↓ 27,26%

RASIO KAS

↓ 18,80%

RETURN ON
INVESTMENT (ROI)

↓ 18,42%

RETURN ON ASSETS
(ROA)

↓ 42,77%

INFORMASI HARGA SAHAM DAN KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan Perusahaan Non Listed sehingga baik masyarakat, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

- c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
- d. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
- e. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

IKHTISAR SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan salah satu BUMN non listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak menyajikan informasi mengenai:

- a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
- b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan salah satu BUMN non listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai Kronologis Pencatatan Saham, aksi korporasi, perubahan jumlah saham dan nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

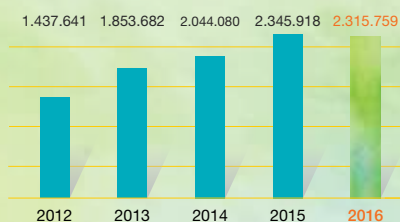
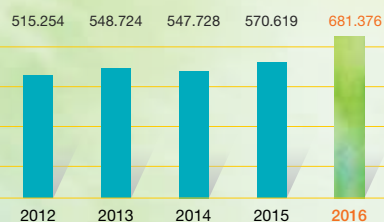
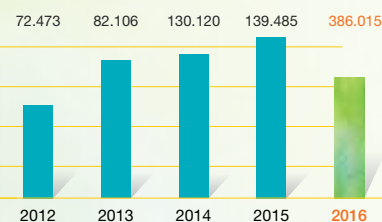
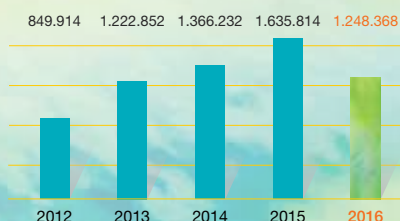
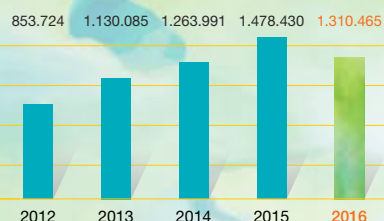
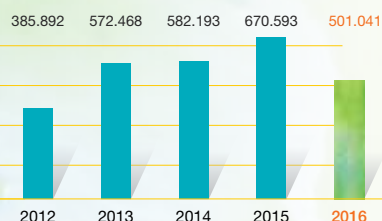
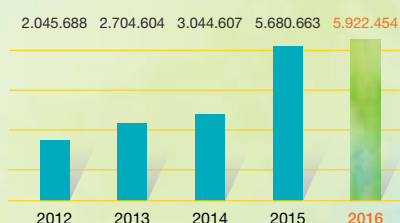
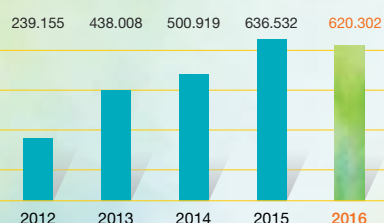
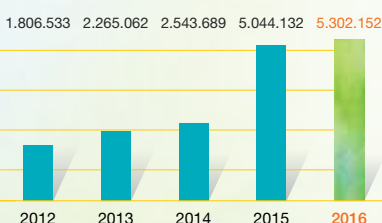
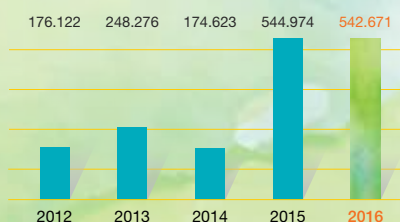
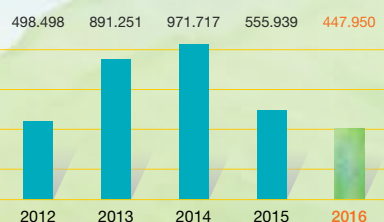
IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI DAN KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2016, Bio Farma tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*Outstanding*), tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

Bio Farma tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek lainnya, aksi korporasi, perubahan jumlah efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

Penjualan Produk Bersih
(Dalam Juta Rupiah)**Sektor Pemerintah**
(Dalam Juta Rupiah)**Sektor Swasta**
(Dalam Juta Rupiah)**Sektor Ekspor**
(Dalam Juta Rupiah)**Laba (Rugi) Kotor**
(Dalam Juta Rupiah)**Laba (Rugi) Bersih**
(Dalam Juta Rupiah)**Aset**
(Dalam Juta Rupiah)**Liabilitas**
(Dalam Juta Rupiah)**Ekuitas**
(Dalam Juta Rupiah)**Jumlah Investasi**
(Dalam Juta Rupiah)**Kas & Setara Kas**
(Dalam Juta Rupiah)

PRIORITAS STRATEGI 2016

1

Corporate Plan & Business Development Strategy

Strategi pengembangan bisnis dan perencanaan perusahaan diawali dengan Peningkatan aktivitas R&D kami fokuskan pada peningkatan portofolio produk,

2

Human Capital & Innovation Strategy

Strategi inovasi dan pengembangan SDM melalui penerapan inovasi untuk mendorong inovasi di berbagai lini perusahaan inovasi baik dari proses, produk maupun riset untuk mendorong inovasi di internal perusahaan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh *stakeholder* eksternal.

3

Manufacture & Supply Chain Strategy

Strategi ini untuk peningkatan kapasitas produksi dilakukan dengan penambahan mesin produksi terutama untuk proses *fill & finish*. Menggunakan teknologi informasi dan penerapan ERP untuk mendukung proses supply chain agar ketersediaan bahan baku dapat menjamin keberlangsungan proses produksi sesuai target, sehingga produk vaksin dapat memenuhi kebutuhan nasional dan global.

4

Investment & Asset Management Strategy

Strategi pengelolaan aset dan investasi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi dan menambah portofolio produk yang direalisasikan melalui investasi penambahan infrastruktur dan lahan untuk fasilitas produksi. Pemilihan lahan untuk fasilitas produksi senantiasa memperhatikan aspek pemenuhan ramah lingkungan sejak awal.

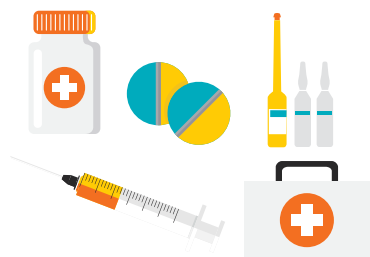
5

Financial Support Strategy

Strategi finansial dengan dukungan sistem IT terintegrasi di seluruh fungsi korporasi

STRATEGI 2017

STRATEGI PRODUK

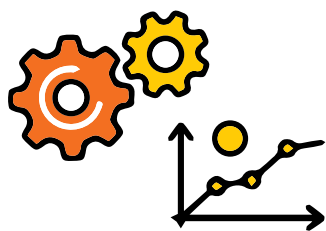


STRATEGI KEMITRAAN



Kini saatnya Bio Farma melakukan perubahan ke arah yang lebih baik menuju Inovasi bioteknologi berdaya saing global dengan menyusun Strategi 2017-2021

STRATEGI KEUANGAN



STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS



BISNIS PROSES RAMAH LINGKUNGAN



SIKLUS PENGEMBANGAN VAKSIN

Kegiatan Riset merupakan dasar dari pengembangan suatu produk. Kegiatan riset dimulai dengan tahap penelitian awal dimana dilakukan pengkajian terhadap pola suatu penyakit yang menjadi sasaran penelitian serta pemahaman. Identifikasi molekul/antigen yang akan menjadi bakal calon produk serta metode untuk menghasilkan/memurnikan antigen merupakan hal-hal yang kritis dalam pengembangan produk selanjutnya disamping perlunya informasi riwayat *seed* serta bahan baku yang terdokumentasi. *Output* dari kegiatan riset ini adalah pembuktian *Proof of Concept*.



Siklus Pengembangan vaksin ini merupakan ilustrasi dan gambaran secara umum, proses tersebut tidak menggambarkan pengembangan semua vaksin atau vaksin tertentu yang dilakukan oleh Bio Farma.

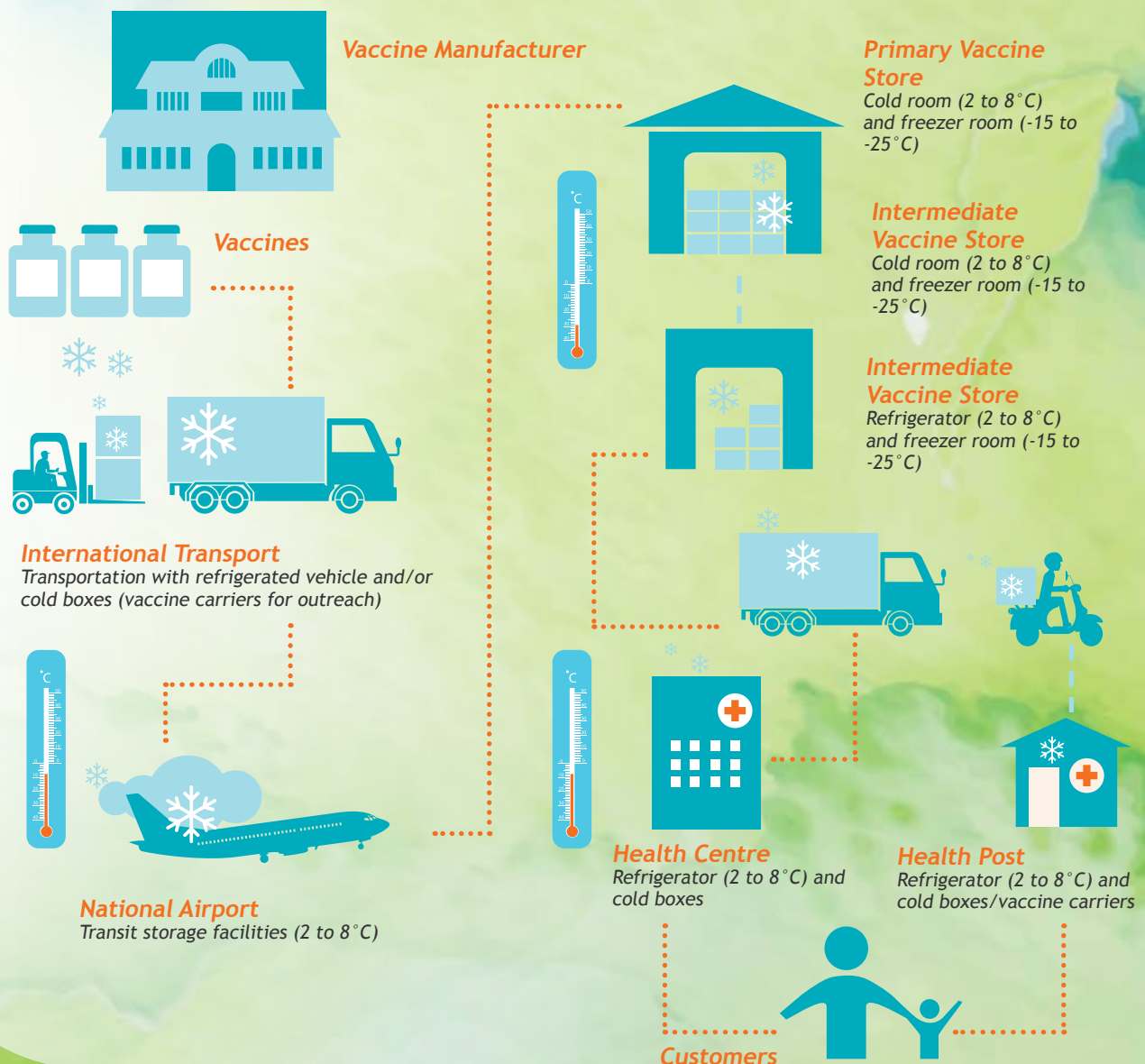
KOMITMEN MENJAGA KUALITAS VAKSIN

Vaksin merupakan produk Biologi yang memerlukan penanganan khusus dalam pendistribusiannya. Diperlukan suatu sistem khusus untuk pendistribusian vaksin yaitu *Cold Chain System* atau Sistem Rantai Dingin dimulai dari pabrik, saat pendistribusian, penyimpanan di tempat tujuan, penyimpanan selama vaksin belum digunakan hingga vaksin tersebut diberikan kepada pelanggan.

Suhu dari vaksin harus tetap terjaga pada suhu kisaran 2 sampai dengan 8 derajat Celsius untuk vaksin BCG, DTP, TT, DT, Td, DTP-HB-Hib, Campak, Hepatitis B, Influenza. Sedangkan untuk vaksin Polio harus disimpan pada suhu -20 (minus 20) derajat Celsius.

Sistem Rantai Dingin merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk tetap menjaga suhu vaksin dalam keadaan yang stabil, agar keefektifan, keamanan, keampuhan dan kualitas vaksin tetap terjaga, sehingga penerima mendapatkan manfaat perlindungan, serta pencegahan terhadap berbagai penyakit menular.

Batas waktu untuk seluruh pengiriman di atas tidak boleh melebihi 48 jam berdasarkan *guidelines WHO* dan dengan tetap memperhatikan sistem rantai dingin untuk setiap jenis vaksin.



EDUKASI MEDIA

Bio Farma secara rutin menyelenggarakan workshop, edukasi, sosialisasi kepada pihak media dari mulai level jurnalis, redaktur, sampai pemimpin redaksi, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Asosiasi Profesi IDAI serta berbagai media.

Edukasi tersebut penting mengingat pada tahun 2016 telah ditemukan adanya vaksin palsu.

Berdasarkan pengamatan fisik hasil uji laboratorium, vaksin Bio Farma yang diduga palsu adalah asli. Vaksin yang dipalsukan merupakan produk vaksin import.



PERJALANAN SEBOTOL VAKSIN

DISTRIBUSI VAKSIN SEKTOR PEMERINTAH



DISTRIBUSI VAKSIN SEKTOR SWASTA DAN EKSPOR





PRODUK KAMI

Bio Farma memproduksi vaksin dan antisera berkualitas tinggi untuk manusia, sebagai berikut:

VAKSIN VIRUS



1. Vaksin Oral Polio

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1, 2 dan 3.

2. Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1 & 3.

3. Vaksin Monovalent Oral Poliomyelitis

Tipe 1 (mOPV1) Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1.

4. Vaksin Campak (Beku Kering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Campak.

5. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

Untuk pencegahan terhadap penyakit Hepatitis B.

6. Vaksin Flubio

Untuk pencegahan influenza musiman.

VAKSIN BAKTERI



1. Vaksin TT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Tetanus Neonatal (Tetanus pada bayi baru lahir).

2. Vaksin DT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria (difteri) dan Tetanus.

3. Vaksin DTP

Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria, Tetanus dan Pertusis.

4. Vaksin BCG (Beku Kering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis.

5. Vaksin Td

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri untuk anak usia 7 tahun ke atas.

VAKSIN KOMBINASI



1. Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B & Haemophilus Influenza tipe B.



PANGSA PASAR

ANTISERA



1. Serum Anti Tetanus

Untuk pengobatan terhadap penyakit tetanus.

2. Serum Anti Difteri

Untuk pengobatan terhadap penyakit diphtheria.

3. Serum Anti Bisa Ular

Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa yang mengandung efek neurotoksik (Naja sputatrix/ ular kobra dan Bungarus fasciatus/ ular belang) dan efek hemotoksik (Ankistrodon rhodostoma/ ular tanah).

DIAGNOSTIKA



PPD RT 23 (Purified Protein Derivative)

Untuk pengujian kepekaan seseorang terhadap infeksi tuberkulosis.

Pelanggan merupakan yang terpenting dalam seluruh aspek bisnis kami. Bio Farma berkomitmen untuk terus mempertahankan dan membangun hubungan baik dengan pelanggan serta memberikan jaminan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan. Sampai saat ini Bio Farma belum secara langsung beroperasi di negara tertentu, namun produk vaksinnya telah digunakan di lebih dari 130 negara.

Sejak tahun 1997, 12 produk vaksin Bio Farma telah mendapatkan pengakuan prakualifikasi (PQ) dari WHO. Dengan kepercayaan tersebut hanya sedikit produsen vaksin yang memiliki kapasitas menyuplai vaksin untuk pencegahan penyakit menular di seluruh dunia dalam meningkatkan kualitas kesehatan global.

SEKTOR PEMERINTAH

Bio Farma memenuhi kebutuhan vaksin dalam rangka Program Imunisasi Nasional di Indonesia melalui Kementerian Kesehatan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui dinas kesehatan provinsi atau kabupaten, serta puskesmas, posyandu dan layanan kesehatan lainnya.

SEKTOR SWASTA

Bio Farma memenuhi kebutuhan vaksin untuk sektor swasta melalui distributor yang ditunjuk untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit, dokter, klinik, apotek dan lainnya.

INTERNASIONAL/PASAR LUAR NEGERI

Bio Farma memenuhi kebutuhan vaksin secara global melalui lembaga-lembaga internasional, antara lain *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *Global Alliance of Vaccines and Immunization* (GAVI) serta *Pan American Health Organization* (PAHO) untuk selanjutnya didistribusikan ke negara yang membutuhkan untuk mendukung program imunisasi nasional di negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor secara umum, Bio Farma memasok vaksin secara langsung, melalui kemitraan bilateral dengan beberapa agen pihak ketiga yang ditunjuk.

SEBARAN PELANGGAN



1. Afganistan	14. Bolivia	27. Cuba	40. Gambia
2. Albania	15. Bosnia Herzegovina	28. Curacao	41. Georgia
3. Algeria	16. Brazil	29. Djibouti	42. Germany
4. Angola	17. Burkina Faso	30. East Timor	43. Ghana
5. Argentina	18. Burundi	31. Ecuador	44. Guam
6. Australia	19. Cambodia	32. Egypt	45. Guatemala
7. Azerbaijan	20. Cameroon	33. El Salvador	46. Guinea
8. Bahama	21. Cape Verde	34. Equatorial Guinea	47. Guinea Bissau
9. Bangladesh	22. Central Africa	35. Eritrea	48. Haiti
10. Barbados	23. China	36. Ethiopia	49. Honduras
11. Belize	24. Colombia	37. Fiji	50. Hongkong
12. Benin	25. Comoros	38. France	51. India
13. Bhutan	26. Congo	39. Gabon	52. Iraq

**Produk Vaksin Bio Farma
telah mendapatkan
Pengakuan
Pra Kualifikasi dari
Badan Kesehatan
Dunia (WHO) sehingga
dipercaya memenuhi
kebutuhan Vaksin dilebih
dari 130 negara termasuk
49 negara Islam.**

53. Iran
54. Israel
55. Ivory Coast
56. Jamaica
57. Jordan
58. Kenya
59. Kosovo
60. Kuwait
61. Kyrgyzstan
62. Laos
63. Lebanon
64. Lesotho
65. Liberia

66. Libya
67. Macau
68. Madagascar
69. Malawi
70. Malaysia
71. Maldives
72. Mali
73. Mauritania
74. Mauritius
75. Mexico
76. Micronesia
77. Mongolia
78. Monserrat

79. Morocco
80. Mozambique
81. Myanmar
82. Namibia
83. Nepal
84. Netherland
85. New Zealand
86. Nicaragua
87. Niger
88. Nigeria
89. North Korea
90. Pakistan
91. Panama
92. Papua New Guinea
93. Paraguay
94. Peru
95. Philippines
96. Rep. Dominica
97. Rwanda
98. Sao Tome
99. Saudi Arabia
100. Senegal
101. Sierra Leone
102. Singapore
103. Solomon Island
104. Somalia
105. South Africa
106. South Korea
107. South Sudan

108. Srilanka
109. St. Lucia
110. Sudan
111. Suriname
112. Swaziland
113. Syria
114. T Chad
115. Tajikistan
116. Tanzania
117. Thailand
118. The British Virgin Island
119. The Netherlands
120. Togo
121. Trinidad
122. Tunisia
123. Turkey
124. Turkmenistan
125. Uganda
126. Uruguay
127. Uzbekistan
128. Vietnam
129. Yemen
130. Zambia
131. Zimbabwe
132. Antigua

* 49 negara Islam



HIGH-TECH MANUFACTURING

Bio Farma berkomitmen memproduksi dan menyediakan produk berstandar internasional, di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan menggunakan teknologi mutakhir.

IKHTISAR KEUANGAN



HASIL USAHA BIO FARMA SELAMA 5 TAHUN BUKU

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA, LABA (RUGI) & TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

Angka-angka pada seluruh tabel dan grafik dalam Laporan Tahunan ini menggunakan notasi Bahasa Indonesia

[Dalam Juta Rupiah]

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)
Barang Dagang	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)
Jasa	3.469	3.382	4.805	4.858	4.100	5.315	9,40	29,64	457	1.215
Jumlah Penjualan Bersih	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)
BEBAN POKOK PENJUALAN										
Produk Perusahaan	580.216	718.463	767.609	852.361	978.454	931.879	9,33	(4,76)	79.518	(46.575)
Barang Dagangan	518	1.148	8.827	11.165	133.957	68.454	513,12	(48,90)	57.289	(65.503)
Beban Jasa	3.183	3.986	3.654	3.962	2.605	4.962	25,23	90,43	1.000	2.356
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	583.917	723.596	780.090	867.488	1.115.016	1.005.294	15,89	(9,84)	137.806	(109.722)
LABA (RUGI) KOTOR	853.724	1.130.085	1.263.991	1.478.430	1.803.940	1.310.465	(11,36)	(27,36)	(167.966)	(493.475)
Penghasilan Lain-lain	53.159	152.838	118.630	129.064	18.110	164.728	27,63	809,58	35.664	146.617
Beban penjualan	(58.592)	(72.830)	(99.182)	(126.818)	(159.600)	(133.996)	5,66	(16,04)	(7.178)	25.604
Beban Administrasi dan Umum	(227.583)	(304.313)	(349.010)	(421.759)	(498.274)	(402.002)	(4,68)	(19,32)	19.758	96.273
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(78.262)	(68.318)	(88.779)	(93.443)	(130.896)	(114.481)	22,52	(12,54)	(21.039)	16.415
Beban Bunga Pinjaman	0	0	0	0	(125)	(9.343)	-	-	-	(9.218)
Beban Lain-Lain	(21.346)	(58.873)	(69.748)	(66.201)	(3.184)	(130.403)	96,98	40,96	(64.202)	(127.218)
Jumlah	(332.624)	(351.496)	(488.089)	(579.157)	(773.970)	(625.497)	8,00	(19,18)	(46.340)	148.473
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	521.100	778.589	775.902	899.274	1.029.970	684.968	(23,83)	(33,50)	(214.306)	(345.002)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak Kini	(137.261)	(207.288)	(197.136)	(232.893)	(275.614)	(185.425)	(20,38)	(32,72)	47.468	90.188
Pajak Tangguhan	2.053	1.166	3.427	4.213	3.871	1.498	(64,44)	(61,29)	(2.715)	(2.373)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(135.208)	(206.121)	(193.709)	(228.681)	(271.743)	(183.927)	(19,57)	(32,32)	44.754	87.816
Laba (Rugi) Bersih	385.892	572.468	582.193	670.593	758.227	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.186)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN										
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi										
Surplus Revaluasi Aset Tetap Net	0	0	0	1.980.782	0	0	-	-	(1.980.782)	0
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	0	0	(21.701)	(828)	(448)	(8.313)	903,70	1756,71	(7.485)	(7.865)
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Kepemilikan Efek Tersedia Untuk Dijual	0	0	377	0	0	0	-	-	0	0
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi										
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	0	0	(21.323)	1.979.954	(448)	(8.313)	(100,42)	1756,71	(1.988.267)	(7.865)
Total Penghasilan Komprehensif	385.892	572.468	560.870	2.650.546	757.779	492.728	(81,41)	(34,98)	(2.157.819)	(265.052)

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai

1. Laba (Rugi):
 - a. Didistribusikan kepada pemilik entitas induk
 - b. Didistribusikan kepada kepentingan non pengendali
2. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan:
 - a. Didistribusikan kepada pemilik entitas induk
 - b. Didistribusikan kepada kepentingan non pengendali

LABA (RUGI) PER SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan salah satu BUMN non listed no keuangan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai Laba (Rugi) Per Saham.



COLD-CHAIN SYSTEM

Distribusi vaksin memerlukan Cold-Chain System untuk tetap menjaga kestabilan suhu, sehingga kualitas vaksin tetap terjaga sampai tujuan.



LAPORAN MANAJEMEN





SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS



MENJADI PERUSAHAAN *LIFE SCIENCE* MERUPAKAN PILIHAN YANG TEPAT. KARENA DALAM *LIFE SCIENCE* MENCAKUP BIDANG - BIDANG YANG SUDAH BIO FARMA KUASAI, SEPERTI BIOTEKNOLOGI, BIO-DIVERSITY, FARMASI, BIOMEDIS, YANG DILANDASI DAN DIPERKUAT DENGAN RISET DAN PENGEMBANGAN, SERTA TRANSFER TEKNOLOGI DAN PEMILIHAN MITRA STRATEGIS BAIK YANG BERASAL DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI.

AHMAD M. RAMLI

Komisaris Utama

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI,

Izinkan kami Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), menyampaikan Laporan Tahunan Bio Farma Tahun 2016 kepada pemegang saham, atas pencapaian kegiatan perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kabar baik dari tahun 2016, bahwa industri farmasi Indonesia sebagai bagian dari industri manufaktur non-migas, memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia tahun 2016 sebesar 10,06%. Pencapaian ini memberikan sinyal bahwa industri farmasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya kesadaran penduduk Indonesia untuk menjaga kesehatan terjadi peningkatan.

Berbagai peristiwa ikut mengantar Bio Farma untuk mencapai usia yang ke 126 tahun. Diantara peristiwa yang terjadi, antara lain perubahan kebijakan global eradikasi polio, terungkapnya temuan vaksin palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, terbitnya Inpres No 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, yang memberikan sinyal kuat dukungan pemerintah kepada industri kesehatan nasional, dan transformasi trend bisnis global dari informasi dan digital menjadi bioteknologi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Pola penyebaran penyakit menular di dunia, sedikit banyak memberikan dampak atas kinerja penjualan Bio Farma. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya rencana eradikasi polio tahun 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada pertengahan Mei 2016. Kebijakan ini, memberikan dampak pada penurunan penjualan ekspor.

Penurunan penjualan vaksin ekspor sebesar 23,69% jika dibandingkan tahun 2015, dari Rp1,64 Triliun, menjadi Rp1,25 Triliun pada tahun 2016. Dan dari sisi anggaran 2016, penyerapan penjualan ekspor sebesar 69,72%.

Dewan Komisaris memahami, bahwa industri vaksin merupakan salah satu industri yang *highly regulated* dan kompleks. Oleh karenanya setiap keputusan korporasi yang diambil, harus memperhatikan kebijakan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), dan Manajemen Risiko Korporasi.

Pemegang saham yang kami hormati,

Penurunan pada penjualan bersih tahun 2016 sebesar 1,29% menjadi Rp2,32 triliun, jika dibandingkan realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp2,35 Triliun. Bila dilihat dari RKAP 2016, penjualan bersih tahun 2016, mencapai 79,34% dari anggarannya.

Sedangkan laba bersih Bio Farma pada tahun 2016, tercatat Rp501,04 miliar, menurun sebesar 25,28% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai Rp670,59 miliar, dan bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2016, laba bersih tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 33,92% dari yang diperkirakan akan diraih oleh perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi, yang telah berhasil untuk mengoptimalkan penjualan dalam negeri yang terdiri dari sektor pemerintah dan sektor swasta sehingga penjualan dalam negeri meningkat sebesar Rp357,29 miliar menjadi Rp1,07 Triliun pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 50,31% jika dibandingkan dengan tahun 2015.



Dari hasil penjualan dalam negeri tersebut, sektor swasta memberikan kontribusi terbesar untuk peningkatan penjualan dalam negeri, dengan pencapaian Rp386,02 miliar, atau meningkat sebesar 176,74% jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan jika dibandingkan anggarannya, penjualan sektor swasta menyerap 103,52% senilai Rp13,12 miliar dibandingkan dengan anggaran 2016.

Sedangkan untuk penjualan dalam negeri sektor pemerintah, tercatat sebesar Rp681,38 miliar atau meningkat sebesar 19,41% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan penjualan ini, didapat dari penjualan vaksin bOPV 20 ds, dan adanya penjualan *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) pada tahun 2016. Namun demikian jika dibandingkan dengan anggaran 2016, penjualan sektor pemerintah tahun 2016 hanya terserap 90,61%.

PEMEGANG SAHAM YANG KAMI HORMATI

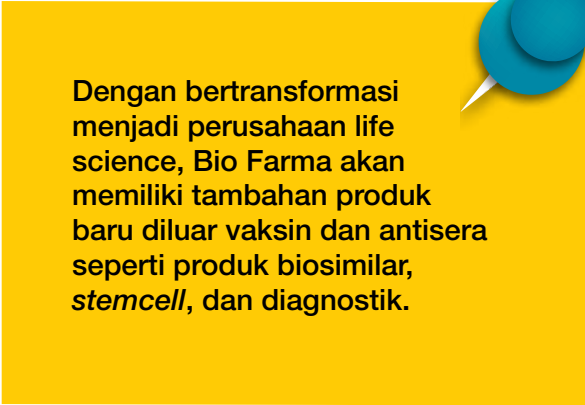
Sebagaimana yang kita ketahui, dunia kesehatan Indonesia pada pertengahan 2016, dikejutkan dengan adanya berita mengenai pemalsuan vaksin imunisasi dasar pada bayi dan balita, yang dilakukan oleh oknum tertentu. Walaupun secara medis vaksin palsu tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi tubuh, namun tetap saja pemalsuan vaksin merupakan tindakan kriminal yang tidak bisa dimaafkan karena menyangkut kehidupan seseorang dan berdampak pada masa depan anak dan balita. Adanya berita mengenai vaksin palsu harus dijadikan titik balik bagi perusahaan untuk merebut potensi pasar yang besar terutama kelas menengah keatas yang selama lima tahun terakhir terus meningkat.

Pencapaian kinerja yang baik, perlu didukung oleh instrumen – instrumen diluar instrumen finansial. Sudah dapat dipastikan setiap komponen dalam perusahaan sudah mengerti alur proses kerja, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan diraihnya skor GCG dari 86,83 pada tahun 2014, menjadi 87,00 pada tahun 2015. Hal ini memberikan gambaran bahwa, keputusan dari setiap aktivitas perusahaan, sudah menerapkan sistem keterbukaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan sistem perundangan yang berlaku, tanpa terbentur kepentingan – kepentingan pihak tertentu.

Hal lain yang patut dibanggakan adalah pencapaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2016 juga menunjukkan peningkatan skor dari 467.00 menjadi 520.25, yang meningkatkan status perusahaan dari *early improvement company* menjadi *good performance company*. Tetunya KPKU yang merupakan suatu sistem dan pedoman untuk penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) di BUMN, sesuai arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari, akan membawa perusahaan menjadi *world class company* dalam bidang *Life Science* sesuai dengan cita – cita dari visi dan misi.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Life Science is the next Big Thing. Setelah periode Digital dan Teknologi, dunia akan beralih ke periode *life science*. Periode ini akan menghasilkan inovasi – inovasi bersejarah dalam sejarah umat manusia terutama untuk bidang kesehatan, pertanian, industri dan energi, yang pada akhirnya akan membawa dunia kepada era *bioeconomy* 2030.



Dengan bertransformasi menjadi perusahaan life science, Bio Farma akan memiliki tambahan produk baru diluar vaksin dan antisera seperti produk biosimilar, stemcell, dan diagnostik.

Bagi Bio Farma, berinovasi untuk menjadi perusahaan *Life Science* merupakan pilihan yang tepat. Karena *Life science* merupakan cabang ilmu yang luar biasa. Ilmu ini tidak hanya memanfaatkan ilmu murni semata, tetapi memanfaatkan ilmu terapan lain seperti teknologi informasi termasuk didalamnya Bioteknologi, *Biodiversity*, Farmasi, *Bio-engineering*, Biomedis, yang dilandasi dengan riset dan pengembangan, serta transfer teknologi dan pemilihan mitra yang strategis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Transformasi menjadi perusahaan *Life Science* merupakan tantangan dan peluang bagi Bio Farma. Peluang datang dari sumberdaya alam Indonesia sendiri. Dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua didunia, baik untuk variasi spesies maupun DNA, akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (*green economy*).

Sebelum melangkah menuju perusahaan *life science*, Bio Farma harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di tingkat global. Karena berdasarkan data *IMS Health*, Indonesia merupakan salah satu pasar potensial untuk pasar ASEAN untuk produk farmasi. Fenomena ini sudah terasa, dengan meningkatnya jumlah industri farmasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing, yang pada tahun 2016 meningkat dari 24 industri menjadi 35 industri. Sudah dapat dipastikan masyarakat Indonesia akan dihadapkan dengan banyak pilihan produk *Life Science* yang sejenis dengan kualitas yang sama.



Oleh karenanya, Dewan Komisaris berharap, bahwa produk *Life Science Bio Farma*, bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, dan dapat diterima dengan tangan terbuka oleh rakyat Indonesia sendiri, sebagai produk kebanggaan nasional yang mempunyai kualitas dunia dengan harga yang terjangkau. Karena kami percaya dengan segala kompetensi yang Bio Farma miliki, Bio Farma bisa menjadi *world class life science company* yang berdaya saing global.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN/ PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Bio Farma selalu mengupayakan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, upaya pemberantasan KKN, dan upaya untuk menindak perbuatan yang melawan hukum, tidak etis, tidak bermoral atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan perusahaan. Oleh karenanya Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan, merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari.

Untuk mengimplementasikan GCG, diperlukan suatu sistem pelaporan internal, yang dikenal dengan nama *Whistleblowing System (WBS)*, yang memungkinkan setiap Insan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya, untuk dapat menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di perusahaan.

Dewan Komisaris secara berkala melakukan review atas pedoman WBS dan mengevaluasi penerapan pedoman WBS dengan mendasarkan informasi yang diperoleh dari Direksi dan/atau hasil Komisaris Auditor Internal dan/atau informasi dari pihak lain, serta menyampaikan secara tertulis kepada Direksi atau dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi atas hasil review dan evaluasinya.

Penerapan WBS yang sudah dimulai sejak tahun 2013, menjadi langkah positif bagi Bio Farma untuk tetap menjalankan bisnisnya secara baik dan benar, sehingga diharapkan tidak ada tindakan melawan hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh Direksi.

Kami memberikan apresiasi pada manajemen dan insan Bio Farma, yang telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan WBS, kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam bentuk video kreatif, edukatif yang ditayangkan di lingkungan internal perusahaan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2016 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma, kami berharap dengan komposisi Komisaris saat ini, dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan serta memberikan masukan pada Direksi untuk mendukung Bio Farma agar berkinerja dan berkontribusi positif pada tahun berikutnya.

APRESIASI

Akhir kata Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, kemudian penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Direksi, manajemen dan seluruh insan Bio Farma yang telah bekerja dengan penuh kesungguhan dan dedikasi.



Kiri → Kanan:

- H. Muhammad Subuh – Komisaris • Ihsan Setiadi Latief – Komisaris
- Ahmad M. Ramli – Komisaris Utama • Nizar Yamanie – Komisaris
- Heridadi – Komisaris • Paruli Lubis – Komisaris

Dewan Komisaris berpesan untuk mencapai visi misi perusahaan di tahun 2017, diperlukan pemahaman yang sama mengenai filosofi Bio Farma sebagai perusahaan *life science*. Pemilihan mitra strategis dengan *win-win solutions partnership* harus dijadikan landasan utama dan pengambilan setiap keputusan harus dilandasi dengan analisa manajemen risiko

yang memadai, sehingga cita-cita kita untuk membuat produk *Life Science* dapat terwujud.

Semoga Tuhan YME selalu memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, sehingga program kerja tahun 2016 dari Bio Farma, bisa berjalan dengan lancar dan berhasil, jaga selalu kekompakan dan selamat menjalankan Program Kerja Tahun 2017.

Atas nama Dewan Komisaris

AHMAD M. RAMLI
Komisaris Utama



LAPORAN DIREKSI

INSTRUKSI PRESIDEN NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MENJADI PIJAKAN KAMI UNTUK SELALU MELIHAT KEPENTINGAN NASIONAL. KAMI MEMANDANG BAHWA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN SESUAI DENGAN ARAHAN PRESIDEN YANG TELAH MENEKANKAN KEPADA PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA UNTUK DAPAT MEMBUAT BAHAN BAKU SENDIRI DAN BIO FARMA TELAH MANDIRI UNTUK BAHAN BAKU VAKSIN.

ISKANDAR

Direktur Utama

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PEMEGANG SAHAM YANG TERHORMAT,

Puji syukur kami panjatkan Kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, Alhamdulillah Bio Farma dapat melalui tahun 2016 dengan baik. Selanjutnya perkenalkan kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan Bio Farma yang berakhir pada 31 Desember 2016.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN

Tahun 2016 Industri Farmasi dan *Life Science* dihadapkan pada masalah rutin yang sudah cukup berat, untuk itu diperlukan strategi khusus dan menjaga keseimbangan untuk terus bertahan. Instruksi Presiden No 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat

Tantangan Kemandirian bahan baku dan tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi fokus kami dalam menentukan arah dan kebijakan strategis ke depan, kami produsen vaksin dalam negeri yang sebagian bahan bakunya sudah mandiri, saat ini harus mempersiapkan untuk produksi bahan baku untuk pasar global. Agar sejalan dengan keinginan pemerintah tahun 2025 dapat menjadi industri vaksin dunia dengan nilai Rp700 triliun termasuk didalamnya Bio Farma.

Kami berusaha membangun kedaulatan vaksin, kemandirian bahan baku obat, dan mendukung program kesehatan Pemerintah. Kami memimpin upaya-upaya membangun kemampuan riset nasional di bidang vaksin dan *Life Science*, antara lain dengan menginisiasi Forum Riset Vaksin Nasional (FRVN) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi *Forum Riset Life Science Nasional* (FRLN).



CITA-CITA KAMI MEMBANGUN KEDAULATAN LIFE SCIENCE DI INDONESIA, SEHINGGA KELAK INDONESIA MENJADI MAKMUR KARENA AMANAH MENGELOLA KEKAYAAN ALAMNYA YANG BEGITU BERLIMPAH

kesehatan menjadi pijakan kami untuk selalu melihat kepentingan nasional, menjamin ketersediaan farmasi; meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor ; mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan; serta mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/ utilisasi kapasitas industri.

Kami memandang bahwa menciptakan kemandirian sesuai dengan arahan Presiden yang telah menekankan kepada perusahaan Farmasi di Indonesia untuk dapat membuat bahan baku sendiri dan Bio Farma telah mampu dan mandiri untuk bahan baku Vaksin.

Pada tingkat global, kami bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, DCVMN (*Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*), OIC (*Organization of Islamic Cooperation*), GAVI (*Global Alliance for Vaccine and Immunization*), dan lembaga internasional lainnya untuk menyediakan vaksin berkualitas dengan harga terjangkau. Saat ini kami memimpin dengan ekspertis berkelas dunia yang kami miliki, kini produk vaksin kami telah dipasarkan dan digunakan di lebih dari 130 negara.

2015



Tantangan dan peluang vaksin di dunia, masih banyak populasi yang belum terpapar vaksinasi, data cakupan imunisasi dunia, sumber http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/

Tidak hanya itu, Bio Farma juga berkontribusi di tingkat global dalam membantu produsen vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam untuk bisa lebih maju dan mandiri. Kami berpartisipasi aktif untuk melakukan transfer pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, agar industri vaksin di negara-negara tersebut bisa memenuhi standar global.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Ditengah dorongan pemerintah untuk kemandirian farmasi dan alat kesehatan, belanja kesehatan Indonesia masih belum searah dengan harapan, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa belanja kesehatan Indonesia masuk pada jajaran yang terendah yaitu sebesar 3,6% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, belanja kesehatan Vietnam 7,1% dari PDB dan Filipina 4,7% dari PDB. Untuk belanja pemerintah, Indonesia tercatat merupakan yang terendah ketiga diantara negara lain yang berada pada level yang sama, dengan proporsi 41,4% dari APBN, jauh dari Thailand yang sudah mencapai

86%. Menurut data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa Industri Farmasi, Kimia dan obat tradisional tumbuh 5,46% , sedangkan menurut *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) mencatat pada 2016 industri farmasi tumbuh pada kisaran 7,49%.

Namun demikian, pada tataran kebijakan strategis, selain bidang farmasi, kami semakin mantap untuk memasuki industri *Life Science*, dengan menyediakan dan mengembangkan Produk *Life Science* yang berstandar Internasional untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sesuai dengan pencaangan visi, misi dan filosofi perusahaan yang saat ini sejalan dengan perkembangan dunia farmasi dan bioteknologi.

PERBANDINGAN HASIL DAN TARGET

Dampak perekonomian global yang cukup sulit serta persaingan yang ketat diantara produsen vaksin negara berkembang, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian laba perusahaan.

Pada tahun 2016 Berbagai penghargaan atas inovasi, prestasi dan dedikasi dari insan Bio Farma menghasilkan dampak yang positif. Kebajikan – kebajikan yang Bio Farma bagikan kepada masyarakat sekitar, juga turut memberikan dampak yang baik. Dari sisi bisnis, trend pertumbuhan usaha Bio Farma menunjukkan adanya beberapa peningkatan, beberapa pencapaian Bio Farma pada tahun 2016 antara lain:

1. Kinerja Perusahaan tahun 2016 dari sisi penjualan mencapai Rp2,32 triliun turun sebesar 1,29% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan mencapai 79,34% dari anggarannya, Penjualan ekspor tahun 2016 yang tercatat Rp1,25 Triliun, mengalami penurunan 23,69% jika dibandingkan tahun 2015, dan dari anggaran yang sudah diperkirakan pada tahun 2016 terserap sekitar 69,72%.
2. Penjualan dalam negeri yang terdiri dari sektor pemerintah dan sektor swasta sehingga penjualan dalam negeri meningkat sebesar Rp357,29 Miliar menjadi Rp1,07 Triliun pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 50,31% jika dibandingkan dengan tahun 2015.
3. Dari hasil penjualan dalam negeri tersebut, sektor swasta memberikan kontribusi terbesar untuk peningkatan penjualan dalam negeri, dengan pencapaian Rp386,02 Miliar, atau meningkat sebesar 176,74% jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan jika dibandingkan anggarannya, penjualan sektor swasta menyerap 103,52% senilai Rp13,12 Miliar dibandingkan dengan anggaran 2016.
4. Sedangkan untuk penjualan dalam negeri sektor pemerintah, tercatat penjualan sebesar Rp681,38 Miliar atau meningkat sebesar 19,41% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan penjualan ini, didapat dari penjualan vaksin bOPV 20 ds, dan adanya penjualan *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) pada tahun 2016. Namun demikian jika dibandingkan dengan anggaran 2016, penjualan sektor pemerintah tahun 2016 hanya terserap 90,61%.
5. Selain kinerja keuangan, Bio Farma juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dari kinerja lingkungan. Di dalam negeri menjadi satu-satunya Industri Farmasi yang meraih PROPER Emas untuk ketiga kali nya sejak 2014 dari

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta prestasi lainnya baik Nasional maupun Internasional.

6. Bio Farma juga meraih penghargaan “*Best Sustainability Report 2015 Category Manufactures*”, Sustainability Report Bio Farma sudah *comply* pada panduan *Global Reporting Initiative* (GRI) selain itu Sustainability Report (SR) Bio Farma juga sudah menyelaraskan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs, Kami sampaikan juga bahwa Bio Farma sudah menjadi anggota *Organizational Stakeholders* (OS) GRI, ini mencerminkan komitmen penerapan keberlanjutan.
7. *Bio Farma dipercaya untuk berbagi tentang penyusunan SR Bio Farma aspek Human Rights*, dengan Pihak GRI Belanda, dan selanjutnya sharing penyusunan SR Bio Farma akan dijadikan *study case* pembelajaran anggota GRI dari negara lain yang tergabung dalam Organization Stakeholder GRI Internasional



Keberhasilan Bio Farma untuk mencapai prestasi ini, merupakan dedikasi seluruh insan Bio Farma, yang sudah bekerja dalam sistem dan menerapkan kebijakan Manajemen Sistem yang terintegrasi dari semua lini. Untuk pengembangan produk sudah berjalan pada jalur yang tepat dengan dipercayanya Bio Farma untuk memproduksi vaksin Bio Farma saat ini dan masa yang akan datang, termasuk beberapa produk diluar vaksin atau produk *Life Science* antara lain Eritopoetin, Trastuzumab, serta beberapa produk yang sedang ada didalam *pipeline* riset sampai tahun 2022, seperti Rotavirus, Measles Rubella, SIPV, New TB, Tifoid Conjugat, Dengue.



8. Pada tahun 2016 Bio Farma juga dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan workshop vaksin dari anggota produsen vaksin negara Islam.

KENDALA YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Kendala utama kami, adalah menyesuaikan dengan arah kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Kecepatan perubahan regulasi vaksin internasional tersebut masih belum sejalan dengan kecepatan riset vaksin.

Belum terintegrasinya kegiatan riset vaksin, pelaku kegiatan riset vaksin di Indonesia antara lain Lembaga Riset Universitas, lembaga penelitian pemerintah sehingga hasil riset mengalami keterlambatan untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Bio Farma melakukan partnership dengan berbagai lembaga internasional seperti DCVMN, GAVI, OIC sehingga dapat mempersiapkan diri apabila terjadi perubahan kebijakan dan regulasi vaksin internasional. Selain itu, didalam negeri kami bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan Badan Litbang Kesehatan mampu mempertahankan dan mengembangkan Forum Riset Vaksin Nasional (FRVN) sejak tahun 2011. Pada tahun 2016 ini kami lakukan penyesuaian sejalan dengan visi dan kebutuhan global yang semula FRVN bergerak lebih maju menjadi Forum Riset Lifescience Nasiona (FRLN). Perubahan dari FRVN menjadi FRLN bertujuan memperluas cakupan pengembangan produk *Life Science* yaitu produk yang dihasilkan dari organisme hidup melalui proses bioteknologi.

FRLN bertujuan meningkatkan sinergi riset bidang *Life Science* antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, serta komunitas pendukung, untuk mempercepat hilirisasi serta tujuan akhir komersialisasi produk *Life Science* yang akan diakui sebagai produk nasional hasil kerja nyata putra-putri terbaik Bangsa Indonesia.

FRLN merupakan bagian dukungan terhadap Inpres No.6 tahun 2016, untuk percepatan pengembangan biofarmasetikal. Termasuk di dalamnya penguasaan teknologi dan inovasi bidang farmasi dan alat kesehatan, sehingga kemandirian bangsa bidang farmasi dan alat kesehatan dapat tercapai.

ANALISA TENTANG PROSPEK USAHA

PANDANGAN MASA DEPAN BIO FARMA

Analisa tentang prospek usaha ke depan Bio Farma adalah menumbuhkan pendapatan dengan diversifikasi produk sesuai roadmap 2017-2021, yaitu Produk Vaksin, Anti Sera, Biosimilar, blood product.

Tahun 2017 bagi insan Bio Farma adalah saatnya untuk mulai melakukan transformasi meninggalkan *comfort zone*, dengan target dan strategi Sektor Ekspor akan fokus pada produksi *bulk* dan peningkatan sektor dalam negeri harus ditargetkan melebihi sektor ekspor 5 tahun kedepan, baik yang dilakukan mandiri maupun melalui partnership dengan pihak lain.



Target kami kedepannya sinergi dengan berbagai pihak mengingat Bio Farma memiliki keahlian dan memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi WHO, sehingga dapat dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan pengujian vaksin dan obat-obat baru; dengan teknologi dan Energi terbarukan bekerjasama dengan beberapa negara-negara untuk riset, sesuai dengan partnership yang diamanahkan pada SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan hal ini menjadi sangat strategis untuk arah bisnis Bio Farma ke depan.

Produk *Life Science* nasional akan mendorong tersedianya Biofarmasetikal dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga, akan mendukung tujuan ke-3 SDG's yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

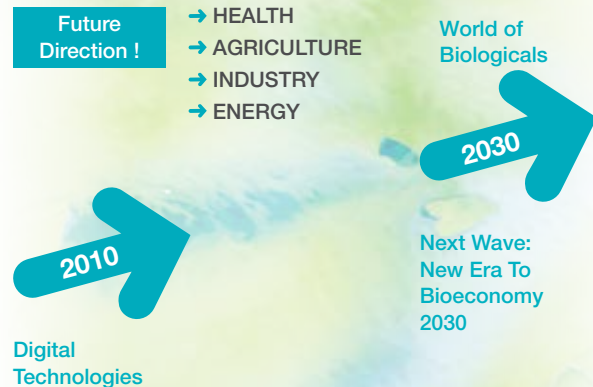
Konsorsium penelitian yang sudah terbentuk dalam enam tahun terakhir ini telah mendapat dukungan pendanaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi seperti 5 (lima) konsorsium penyakit Tuberkulosis, Hepatitis B, Dengue, HPV dan HIV. Disamping itu, juga telah terbentuk 7 (tujuh) *working group* : *Eritropoietin* (EPO), Rotavirus, Malaria, Influenza, *Stem cell*, *Delivery Systems & Adjuvant* dan *Pneumokokus*.

Riset *Life Science* yang bersifat inovatif dan implementatif di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Untuk itu, diperlukan program yang dibuat para pemangku kepentingan supaya peneliti dapat meningkatkan kemandirian penelitiannya, sehingga tujuan hilirisasi dan komersialisasi produk *Life Science* dapat diperoleh sesuai waktu yang ditetapkan. Upaya percepatan hilirisasi produk Nasional oleh Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan pengembangan program Hilirisasi dan Komersialisasi hasil penelitian di perguruan ini patut disambut hangat.

Melalui program ini, penelitian yang telah memiliki hak paten dan siap dikomersialisasi akan diupayakan kerjasama dengan pihak industri yang akan memanfaatkan hasil penelitian dengan tujuan komersialisasi. Dalam bidang pendanaan, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di Kementerian Keuangan diharapkan dapat mendorong riset strategis dan inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.

Sehingga pendanaan diharapkan dapat mempercepat berhasilnya suatu riset yang berkualitas dan meningkatkan daya saing bangsa dengan mengembangkan atau menghasilkan produk. Bio Farma masih mengandalkan terhadap produk yang ada yaitu *Bulk Polio*, Campak dan Hib, di Pemasaran akan mengejar produk-produk yang tidak diproduksi sendiri karena demannya ada termasuk *network* dan pada tahun ini Bio Farma dapat menyuplai vaksin meningitis untuk jemaah haji dan umroh pemerintah Indonesia.

The Life Sciences Could Produce The Next Wave Of Innovation In Products And Services, Across A Range Of Economic Activities In:



“Biotechnology menjadi gelombang masa depan yang paling menjanjikan setelah digital teknologi”

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

KINERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bio Farma terus berupaya untuk menyempurnakan dan melaksanakan praktik *Tata Kelola Perusahaan*, tidak hanya selaras dengan tuntutan regulasi namun juga sesuai dengan *best practices*. Bagi Kami, untuk bisa terus bertahan dan dipercaya oleh mitra nasional dan global, penerapan GCG merupakan sebuah keharusan dan bahkan penerapannya harus *beyond compliance* atau melebihi dari standar yang ditetapkan.

Kami menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan Insan Bio Farma dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai landasan utama dalam menjalankan Perusahaan harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh insan di Bio Farma. GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja kami, sejalan dengan penerapan budaya Perusahaan yaitu *Professional, Integrity, Team Work, Innovation, dan Customer Oriented*.

Pada tahun 2016, berbagai kebijakan mengenai penerapan tata kelola yang baik telah disempurnakan, disosialisasikan dan diimplementasikan. Beberapa Keputusan Direksi dan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi terkait perangkat kebijakan GCG telah disosialisasikan dan dikawal penerapannya dengan baik, antara lain Pedoman Perilaku, *Whistleblowing System* (WBS), Pengendalian gratifikasi dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).

Kami melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan GCG baik melalui pihak eksternal maupun secara *self assessment* oleh tim internal, agar tujuan dari penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 2016 *self assessment* penerapan GCG telah dilakukan oleh tim *counterpart*. Selain dengan melakukan penilaian, upaya peningkatan GCG dilakukan dengan adanya KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul).

Sesuai hasil penilaian tim evaluator KPKU melalui dua tahapan penilaian ondesk review dan site visit, berdasarkan penilaian tersebut kriteria penilaian kinerja unggul (KPKU) Bio Farma tahun 2016 mengalami peningkatan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2016 juga menunjukkan peningkatan skor dari 467,00 menjadi 520,25, yang meningkatkan status perusahaan dari *early improvement company* menjadi *good performance company*. penilaian penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan diraihnya skor GCG dari 86,83 pada tahun 2014, menjadi 87,00 pada tahun 2015.

KINERJA MANAJEMEN RISIKO

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan mengkombinasikan ISO 31000 (2009) dan COSO *Enterprise Risk Management* – Integrated Framework.

Pada tahun 2016 terdapat 6 (enam) risiko korporat, yang terbagi atas 4 (empat) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko aktivitas proyek. Risiko aktivitas rutin terdiri dari Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional, Fluktuasi Nilai Kurs Mata

Pada tahun 2016 juga telah dibuat sistem terintegrasi dengan menggunakan platform IT untuk lebih memudahkan insan Bio Farma dalam melakukan akses khususnya pelaporan pada whistleblowing system, gratifikasi serta edukasi dan sosialisasi dalam bentuk infografis dan video kreatif.

Uang Asing, Meningkatnya Persaingan Global, Keterlambatan dalam Supply Vaksin. Sedangkan Risiko aktivitas proyek Realisasi Investasi Tidak Sesuai Jadwal; Ketidaksiapan Produksi Vaksin Influenza untuk menghadapi *pandemic*.

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi Corporate and Risk Management (CRM) selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma.

SOSIALISASI TAX AMNESTY

Tahun 2016, merupakan tahun penegakan hukum pajak, Bio Farma mendukung program pemerintah dengan turut aktif lakukan sosialisasi seperti Amnesti Pajak, hal ini sebagai bentuk apresiasi dan keterlibatan terhadap program pemerintah dalam mendukung pembangunan bangsa. sosialisasi ini merupakan salah satu wujud kontribusi Bio Farma dalam mensukseskan program perpajakan, Bio Farma pun berperan aktif dalam repatriasi aset.

Sosialisasi amnesti pajak dihadiri oleh seluruh insan Bio Farma diawali komisaris, Direksi, dan Karyawan Bio Farma ini menghadirkan pula narasumber dari Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Barat I. Amnesti pajak yang tercantum dalam UU RI no 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dilatar belakangi dari situasi dunia yang sedang mengalami pelemahan

ekonomi, semua Negara sedang berfikir keras bahtera Negara dapat berlabuh dengan baik, tiada lain memerlukan dukungan ekonomi yang mapan. Peran BUMN untuk program ini perlu ditindaklanjuti dengan kerja nyata melalui peran seluruh insan Bio Farma.

KINERJA KEBERLANJUTAN

Dengan komitmen, ekspertis, dan infrastruktur yang dimiliki, Bio Farma terus berupaya berkontribusi memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Berkontribusi pada masyarakat lokal dan nasional adalah bentuk kepedulian kami kepada bangsa Indonesia. Sementara itu, berkontribusi kepada negara-negara berkembang dan negara Islam adalah bentuk kepedulian kami kepada dunia.

Di tingkat lokal kami berupaya membantu para petani Koi di Sukabumi, peternak domba Garut, pengembangan ikan Sidat di Ciletuh, atau masyarakat di sekitar kawasan wisata geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu. Dengan ekspertis bioteknologi yang dimiliki, kami berupaya membantu kelompok tani dan UKM untuk menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi tepat guna dan murah di bidang peternakan, pertanian, produk kebudayaan (batik ramah lingkungan), dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan hasil usaha mereka.

Kami meyakini prinsip dan filosofi “*dedicated to improve quality of life*”. Semakin banyak kami berkontribusi kepada *stakeholders*, maka akan semakin banyak pula manfaat yang kami dapatkan. Kemanfaatan yang seringkali berwujud *non-monetary* itu antara lain pengakuan dan kepercayaan dari seluruh *stakeholders*, relasi dan jejaring bisnis, kedekatan dan loyalitas konsumen, bisa juga berwujud *monetary* seperti akses pasar yang lebih luas.

PROGRAM BUMN HADIR UNTUK NEGERI

Pada tahun 2016, Kami juga turut terlibat aktif dalam program BUMN Hadir Untuk Negeri yang merupakan program dari Kementerian BUMN, bertujuan untuk menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia.

BUMN turut hadir sebagai bagian dari pembangunan Indonesia baik secara langsung melalui keterlibatan dalam proyek-proyek strategis nasional, kontribusi penerimaan negara seperti setoran dividen, setoran pajak maupun melalui Penerimaan Bukan Pajak Lainnya yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat.

Pada tahun 2016, Bio Farma telah melaksanakan program BUMN Hadir untuk negeri untuk wilayah Jawa Barat antara lain pembinaan mantan atlet, Direksi Mengajar, Bedah Rumah Veteran, Siswa Mengenal Nusantara, Rumah Kreatif BUMN, Elektrifikasi, Posko Tanggap Bencana dan sebagainya.

WORLD-CLASS CSR dan UNESCO

GEOPARK NASIONAL CILETUH

Salah satu fokus CSR Bio Farma tahun 2016 adalah program pengembangan kawasan GEOPARK Ciletuh Palabuhanratu yang telah mendapatkan predikat sebagai Geopark Nasional di Jawa Barat, dan mempersiapkan untuk visitasi UNESCO untuk masuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG). Dengan proses yang intensif, Bio Farma bersama Pemerintah kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Universitas Padjadjaran, Komunitas lokal seperti Persatuan Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI) dan PALAPAH



“Program siswa mengenal nusantara di Jawa Barat sinergi dengan BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat “



“Salah satu air terjun di kawasan Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu”

(Komunitas Budaya) serta Media terus bersinergi dengan untuk pengembangan kawasan agar berhasil menjadi UGG dan masuk kedalam destinasi wisata pilihan Indonesia dan dunia.

Pada 2016 Bio Farma juga turut serta dalam Konferensi UNESCO Global Geopark di Torquay Inggris dan menjadi satu-satunya perwakilan industri dan BUMN yang mempresentasikan CSR khususnya peran dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan geopark Ciletuh Palabuhanratu.

Kami memegang prinsip bahwa semakin kami beroperasi dan berwawasan global, namun harus lebih mengedepankan muatan lokal serta menjunjung kearifan lokal. Berbagai lembaga internasional seperti UGG, menyampaikan bahwa Bio Farma satu satunya korporasi yang sangat memberikan perhatian sehingga mendukung penuh terhadap proses pengakuan Geopark Ciletuh untuk diakui UNESCO.

Kami juga terus menerus membantu agar Wilayah Geopark Ciletuh memiliki keunggulan dari aspek *Bio-Diversity* dan *Geo-diversity*, adapun unsur *Cultural-Diversity* saat ini kami sedang menyeleksi seni dan budaya geopark serta kuliner khas yang bisa menambah daya tarik wisatawan nasional dan internasional serta mampu mengembangkan

perekonomian masyarakat, dengan selalu bersinergi dengan komunitas seperti PALAPAH serta Komunitas PAPSII.

ASPEK HUMAN RIGHTS

Selain pemenuhan aspek hak asasi manusia dilingkungan perusahaan, Bio Farma juga merealisasikan aspek hak asasi manusia terkait beberapa program CSR yang mengangkat hak hak penduduk asli dan dampak positif dengan mengangkat hak hak penduduk asli. Dalam program CSR yang dilaksanakan di wilayah sasaran program, pelibatan kaum perempuan yang merupakan komunitas lokal di wilayah tersebut sangat diperhatikan.

Pelibatan kaum perempuan ini dimulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program. CSR Bio Farma memfasilitasi kaum perempuan lokal dalam mengembangkan usaha untuk penghidupan berkelanjutan. Diantaranya adalah program pengembangan kuliner lokal di Geopark Ciletuh Palabuhanratu, pemberdayaan wanita untuk kampung batik pakidulan, program pengembangan bank limbah ternak dalam program pemuliaan Domba Garut di Kabupaten Garut yang melibatkan Kelompok Wanita Tani setempat, dan Program Pengembangan Produk Pangan olahan pertanian lokal di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.



Kiri → Kanan:

- Pramusti Indrascaryo – Direktur Keuangan • Andjang Kusumah – Direktur Sumber Daya Manusia
- Iskandar – Direktur Utama • Mahendra Suhardono – Direktur Pemasaran
- Juliman – Direktur Produksi • Sugeng Raharso – Direktur Perencanaan & Pengembangan

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2016 tidak ada perubahan komposisi Direksi Bio Farma, kami berharap dengan komposisi Direksi saat ini yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, kompetensi dan pengalaman yang tepat, dapat terus membawa Bio Farma untuk berkinerja dan berkontribusi yang positif pada tahun berikutnya, kami laporkan pula bahwa Direksi Bio Farma saat ini mampu dipercaya untuk berperan aktif baik di forum nasional maupun lembaga Internasional.

APRESIASI

Kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, Dewan Komisaris, mitra usaha atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan. Kami sampaikan penghargaan kepada seluruh insan Bio Farma yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam bekerja serta konsistensi dalam menjaga nilai-nilai perusahaan. Kami yakin dengan dukungan semua pihak, di masa mendatang Bio Farma semakin meningkatkan nilai bagi pemegang saham, memberi manfaat bagi masyarakat, mendorong solusi bagi kehidupan, untuk kemakmuran yang berkelanjutan.

Atas nama Direksi

ISKANDAR

Direktur Utama

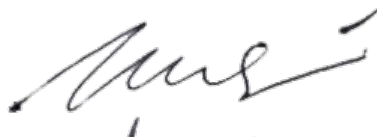
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016

Laporan Tahunan 2016 ini termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Dewan Komisaris yang bertanda tangan di bawah ini.

DEWAN KOMISARIS



Ahmad M. Ramli
Komisaris Utama



Muhammad Subuh
Komisaris



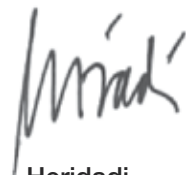
Nizar Yamanie
Komisaris



Paruli Lubis
Komisaris



Ihsan Setiadi Latief
Komisaris



Heridadi
Komisaris

Laporan Tahunan 2016 ini termasuk didalamnya Laporan Keuangan dan informasi terkait lainnya adalah merupakan tanggung jawab dari seluruh Direksi yang bertanda tangan di bawah ini.

DIREKSI



Iskandar
Direktur Utama



Andjang Kusumah
Direktur Sumber Daya
Manusia (SDM)



Mahendra Suhardono
Direktur Pemasaran



Pramusti Indrascaryo
Direktur Keuangan



Juliman
Direktur Produksi



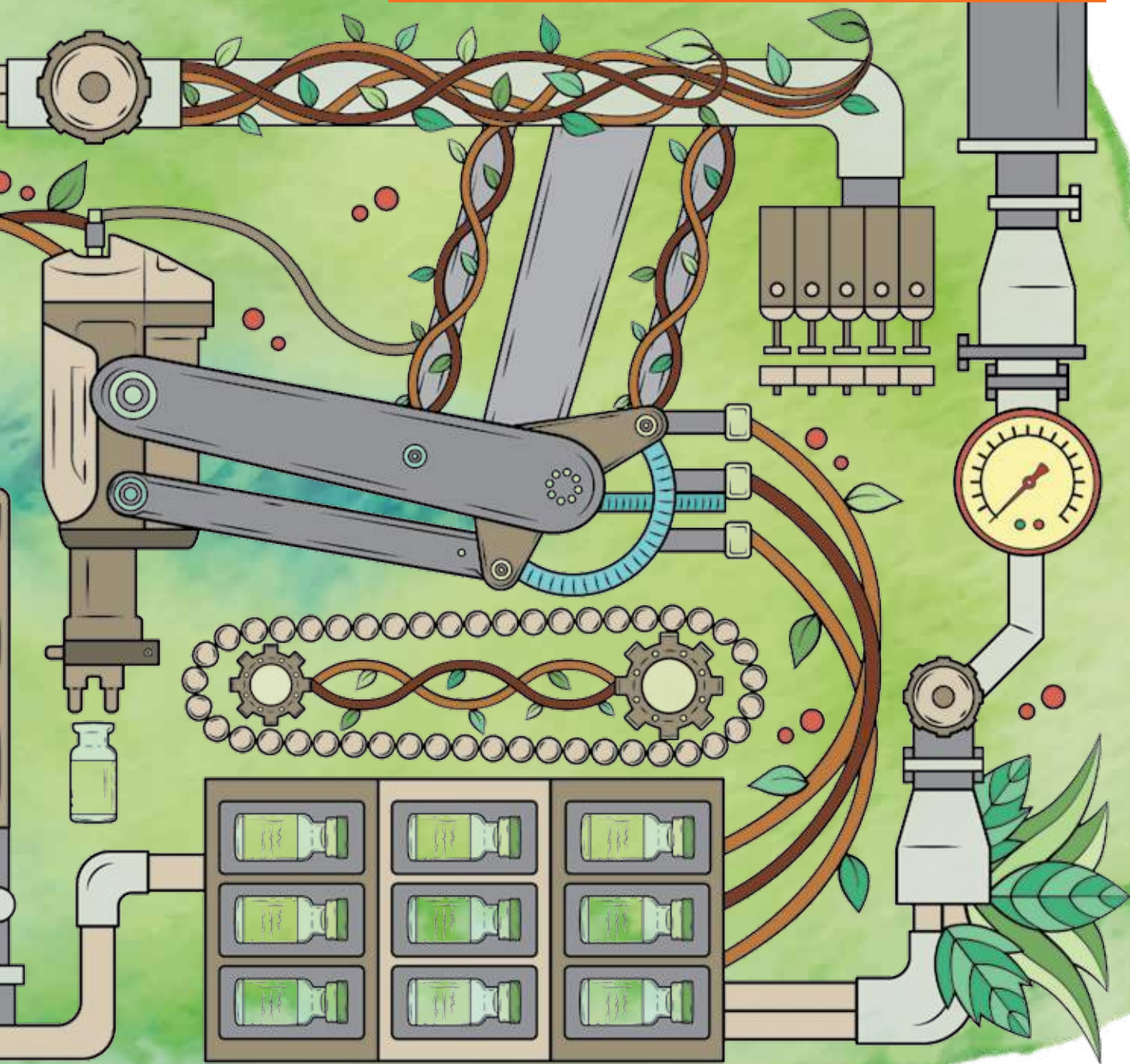
Sugeng Raharso
Direktur Perencanaan
& Pengembangan



OUR DEDICATION

Kami menerapkan bisnis proses ramah lingkungan sehingga produk kami di percaya untuk pasar nasional & global.

PROFIL PERUSAHAAN





PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan

PT Bio Farma (Persero)

Wilayah Operasi

Lokasi Pabrik: Bandung

Lokasi Fasilitas Produksi: Bandung

Lokasi Penunjang Produksi: Kab. Bandung Barat

Kantor Perwakilan: Jakarta

Wilayah Pemasaran-Marketer:

Seluruh Indonesia dan Luar Negeri

Bentuk Hukum dan Kepemilikan

- Akta Pendirian
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 Nomor 57, Tambahan Nomor 6884 dan akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016.
- Anggaran Dasar Perusahaan: perubahan terakhir disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 1998 dengan Nomor C2-1423HT.01.01.tahun 1998.
- Kepemilikan: Pemerintah Republik Indonesia 100%.

Kantor Pusat

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia.

Telp +62 22-2033755

Fax : +62 22 - 2041306

email : mail@biofarma.co.id

www.biofarma.co.id

Kantor Perwakilan:

Gedung Pakarti Centre

Jl. Tanah Abang III No 23-27

Jakarta - Indonesia

Tanggal Pendirian

6 Agustus 1890

Akta Pendirian

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
- Pada Tanggal 5 Maret 1998 Dengan
- Nomor C2-1423HT.01.01. Tahun 1998

Modal Dasar

- Modal Dasar
Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) terbagi atas 8.000.000 (delapan juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan
Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham.

Komposisi Kepemilikan Saham

Pemerintah Republik Indonesia 100%.

Tidak Memiliki Anak Perusahaan.

Non Listed

Ruang Lingkup Usaha

Kegiatan Usaha Utama PT Bio Farma (Persero) adalah sebagai berikut:

- Penelitian dan pengembangan produk *Life Science*, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- Produksi produk *Life Science*, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk *Life Science* dan alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri;
- Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik;
- Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c, dan d

Layanan Informasi

Tel.	: (62-22) 203-3755
Fax.	: (62-22) 204-1306
E-mail	: mail@biofarma.co.id
Website	: www.biofarma.co.id
Facebook	: Info Imunisasi, biofarmalD
Facebook	: biofarmalD
Instagram	: biofarmalD
Youtube	: biofarmalD
Twitter	: @infoimunisasi @biofarmalD
Blog	: www.infoimunisasi.com





PERUBAHAN LOGO

1955-1960



1961-2007



BIO FARMA

2008-sekarang



Tahun 2008, perubahan logo Bio Farma yang mencerminkan semangat dan optimisme untuk menuju industri vaksin kelas dunia.

DEFINISI LOGO

Bio Farma adalah sebuah Perusahaan yang adaptif dalam mengantisipasi *trend* bisnis dan teknologi di bidang vaksin dan antiserum. Salah satu bentuk antisipasinya adalah dengan memiliki logo yang merupakan identitas Perusahaan.

FILOSOFI LOGO

1. Logo merupakan adaptasi bentuk pencitraan dari "*Crystal Protein*" dan "*Glicoprotein*". Hal ini merefleksikan bahwa Bio Farma adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang vaksin dan serum.
2. Mencitrakan ilusi pendar bintang (*sparkling*) yaitu artinya sebagai semangat dan dinamika Bio Farma yang memiliki masa depan yang cemerlang.
3. Warna dominan hijau, secara psikologis menyiratkan suatu nilai higienitas dan kesehatan.
4. Warna jingga dan kuning, secara terpadu menyiratkan semangat progresif dan keberanian untuk berinovasi agar selalu menjadi yang terdepan



SEKILAS BIO FARMA

Perjalanan panjang Bio Farma hingga kini telah bertransformasi menjadi produsen vaksin dan antisera kelas dunia. Bermula ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan “Parc-vaccinogène” (Lembaga Pengembangan Vaksin Negara) pada tanggal 6 Agustus 1890. Lembaga tersebut menempati sebuah gedung di daerah Weltevreden - Batavia, yang kini menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta. Sejak awal berdirinya, Parc-vaccinogène fokus pada berbagai penelitian untuk memberantas penyakit menular hingga akhirnya Parc-vaccinogène menjalin kerja sama dengan Institut Pasteur untuk melakukan penelitian mengenai mikrobiologi, sehingga lembaga ini berubah nama menjadi Parc-vaccinogène en Institut Pasteur. Sejalan dengan perkembangan jaman, Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan badan hukum hingga pada tahun 1997 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1997 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama PT Bio Farma (Persero).

Akta pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah diaktakan dengan Akta Notaris Muhani Salim SH., No. 1 tanggal 3 Februari 1997, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1423HT.01.01. tanggal 5 Maret 1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2009 No. 65 Tambahan No. 21702. Susunan Direksi terakhir telah dimuat dalam Akta No. 45 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, SH., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum



Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.10-19828 tanggal 9 November 2009, dan perubahan modal disetor yang telah dimuat dalam Akta No. 26 tanggal 18 Juli 2012 tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah disahkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. Sampai hari ini, Bio Farma telah memainkan peran signifikan dalam sejarah pengembangan vaksin dan serum. Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memproduksi vaksin dan antisera. Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada standar internasional dan sistem manajemen mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan world class standard antara lain ISO 26000 *guidance for CSR*, *Enterprise Risk Management* ISO 31000, *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Kiprah Bio Farma telah diakui di tingkat global. Sejak tahun 1997, Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 29 produsen vaksin/22 negara di dunia yang telah mendapatkan Prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) sehingga dipercaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di lebih dari 130 negara. Bekerja sama dengan jaringan internasional berskala global, lembaga penelitian, organisasi profesional tingkat regional dan juga perusahaan multinasional, Bio Farma ikut aktif mengupayakan kesehatan masyarakat dunia, baik secara langsung dengan menyediakan vaksin,

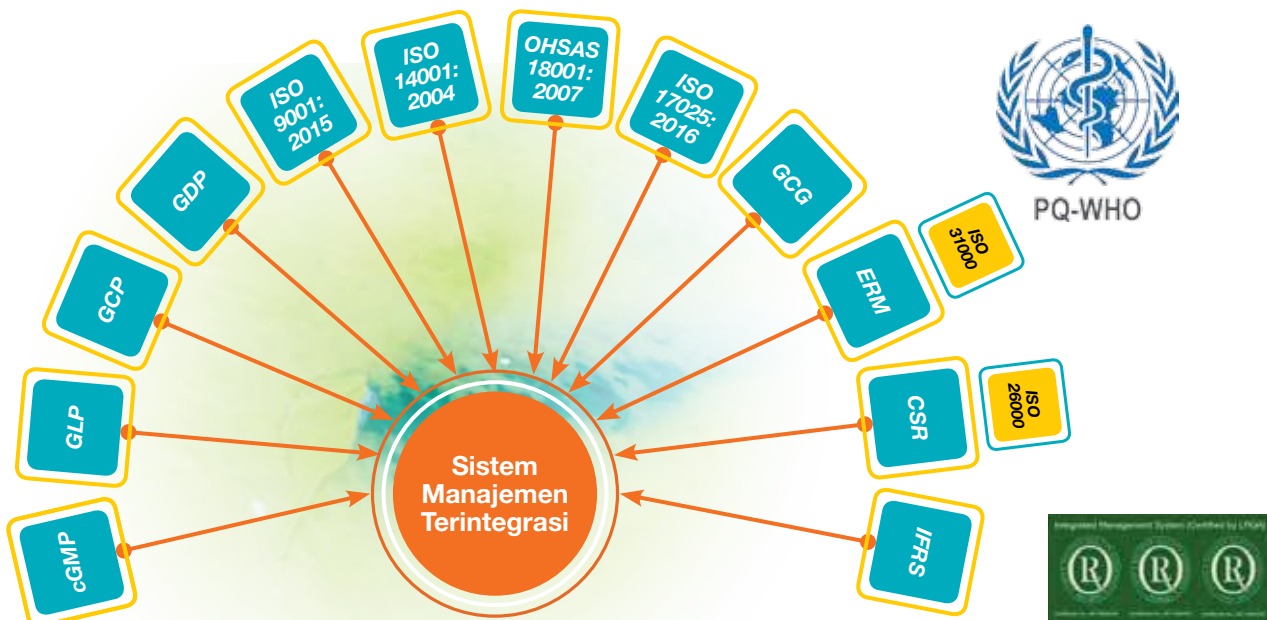
BIO FARMA MERUPAKAN SALAH SATU DARI SEKITAR 29 PRODUSEN VAKSIN/22 NEGARA DI DUNIA YANG TELAH MENDAPATKAN PRAKUALIFIKASI BADAN KESEHATAN DUNIA ATAU WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) SEHINGGA DIPERCAYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN VAKSIN DI LEBIH DARI 130 NEGARA

transfer teknologi, perusahaan dan pemerintahan yang menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Saat ini, kegiatan usaha Bio Farma berpusat di Jalan Pasteur No. 28 Bandung yang menempati lahan seluas 91.058 m2 yang digunakan untuk

fasilitas produksi, penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta administrasi. Disamping itu, Perusahaan memiliki fasilitas penunjang di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat di atas lahan seluas 282.441 m2 yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan di Gedung Pakarti Centre Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI



Komitmen untuk mempersembahkan produk yang berkualitas dan inovatif ditunjukkan dengan kinerja yang senantiasa mengacu pada Standar Internasional dan Sistem Manajemen Mutu terkini. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO),

Good Laboratory Practices (GLP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan akreditasi ISO 17025:2016. Serta panduan *world class standard* antara lain ISO 26000 *guidance for CSR*, *Enterprise Risk Management ISO 31000*, *International Financial Reporting Standard* (IFRS).



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

6 AGUSTUS 1890

Bio Farma berdiri dengan nama "Parc Vaccinogene" pada tanggal 6 Agustus 1890 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 14 tahun 1890 di Rumah Sakit Militer Weltevreden, Batavia, yang saat ini telah berubah fungsi menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto), Jakarta.

1895-1901

Perusahaan mengalami pergantian nama menjadi "Parc Vaccinogene en Instituut Pasteur."

1942-1945

Saat penjajahan Jepang, Bio Farma berganti nama kembali menjadi "Bandung Boeki Kenkyushoo" yang dipimpin oleh Kikuo Kurauchi.

1945-1946

Perusahaan kembali berganti nama menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur." Perusahaan ini dipimpin oleh R.M. Sardjito yang merupakan Pemimpin Indonesia pertama. Pada saat kepemimpinan R.M. Sardjito, lokasi sempat dipindahkan ke daerah Klaten.

1946-1949

Pada masa Agresi Militer, saat Bandung kembali diduduki oleh Belanda, perusahaan kembali berganti nama menjadi "Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur."

1950-1954

Perusahaan kembali berganti nama menjadi "Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur" yang merupakan salah satu jawatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

1902-1941

Perusahaan kembali mengalami perubahan nama menjadi "Landskoepoek Inrichting en Instituut Pasteur." Pada tahun 1923, Bio Farma mulai menempati lokasi di Jalan Pasteur No.28 Bandung yang dipimpin oleh L. Otten.

1955-1960

Pada masa nasionalisasi kepemilikan perusahaan Belanda di Indonesia, Perusahaan kemudian berganti nama kembali menjadi "Perusahaan Negara Pasteur." Perusahaan lebih dikenal dengan nama PN. Pasteur.

1978-1996

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1978, Perusahaan mengubah nama menjadi Perusahaan Umum Bio Farma yang lebih dikenal dengan nama Perum Bio Farma.

1961-1978

Perusahaan kembali mengubah nama menjadi "Perusahaan Negara Bio Farma" atau lebih dikenal dengan nama PN. Bio Farma.

1997-2011

Bio Farma berhasil mendapatkan Pra-Kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki pasar ekspor.

2008

Peluncuran logo baru mencerminkan semangat dan optimisme untuk menuju industri vaksin kelas dunia.

1997

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997, nama Perusahaan kembali berubah dari Perum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) atau lebih dikenal dengan nama PT Bio Farma (Persero) sampai dengan saat ini.

2009

Di bawah tim manajemen yang baru, Bio Farma melangkah menuju perusahaan vaksin kelas dunia yang berdaya saing global.

2013

Roadmap menuju industri Life Science dimulai. Peluncuran vaksin terbaru Pentavalent (Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B, HiB) dan pencanangan program imunisasi nasional.

2015

Peresmian Gedung Heritage dan Museum Bio Farma.

2014

Peningkatan Visi baru "Menjadi Perusahaan Life Science Kelas Dunia yang berdaya saing global."

2016

Transformasi Forum Riset Vaksin Nasional (FRVN) menjadi Forum Riset Life Science Nasional (FRLN)



BIDANG USAHA

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi, dan alat kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG DIJALANKAN

Kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan, meliputi:

- Penelitian dan pengembangan produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
- Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan klinik.
- Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c dan d.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk pendidikan dan pelatihan, pertanian, peternakan, pengembangbiakan hewan laboratorium, properti, perkantoran, pergudangan, dan pariwisata.

Sifat usaha Bio Farma adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global:

- Pasar Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan DTP-HB-Hib (pentaBio);
- Pasar swasta nasional, yaitu melayani para Distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)) dan PPD 2 TU;
- Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan negara lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO (*World Health Organization*) baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu Vaksin TT, Td, DTP, TOPV, BOPV (20 ds/vial), Campak (10 ds/vial), DTP HB HIB 5 ds, mOPV 1, DT dan DTP-HB.

PRODUK DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN BIO FARMA

WAKSIN, ANTISERA DIAGNOSTIKA

Produk yang dihasilkan terdiri dari vaksin dan antisera bagi manusia, sebagai berikut:

WAKSIN VIRUS



1. Vaksin Oral Polio

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1, type 2 dan tipe 3.



2. Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis

Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1 & 3.



3. Vaksin Campak (Beku Kering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Campak.



4. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

Untuk pencegahan terhadap penyakit Hepatitis B.



5. Vaksin Flubio

Untuk pencegahan influenza musiman.

WAKSIN BAKTERI



1. Vaksin TT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Tetanus Neonatal (Tetanus pada bayi baru lahir).



2. Vaksin DT

Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria (difteri) dan Tetanus.



3. Vaksin DTP

Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria, Tetanus dan Pertusis.



4. Vaksin BCG (Beku Kering)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis.



5. Vaksin Td

Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri untuk anak usia 7 tahun ke atas.



6. Bio TT

Untuk pencegahan terhadap penyakit tetanus dan perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita subur.

VAKSIN KOMBINASI



2. Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B & Haemophilus Influenza tipe B.

ANTISERA



1 BIOSAT (Serum Anti Tetanus)

Untuk pencegahan dan pengobatan terhadap tetanus yang disebabkan oleh ineksi *clostridium tetani*.



2. BIO ADS (Serum Anti Difteri)

Untuk pengobatan terhadap penyakit difteri.



3. BIOSAVE (Serum Anti Bisa Ular Polivalen)

Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa dari jenis ular kobra (*Naja sputatrix*), ular belang (*Bungarus fasciatus*) dan ular tanah (*Ankyrodon rhodostoma*).

DIAGNOSTIKA



TUBERCULIN PPD RT 23

Uji mantoux untuk menentukan apakah seseorang pernah terinfeksi oleh *Mycobacterium tuberculosis*.



KLINIK DAN IMUNISASI

Kegiatan Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu melakukan pelayanan jasa klinik kesehatan, vaksinasi, pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan mikrobiologi industri, penunjang medis non lab dan pelayanan apotik dengan memperhatikan aspek mutu, lingkungan dan K3. Disamping itu dalam rangka

pengembangan Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi menjadi anak perusahaan sudah dibuat kajian komprehensif yang didalamnya termasuk aspek operasional, finansial dan legal yang sudah dibahas dengan Komite Audit, Komite RPG, Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 belum ada keputusan dari Pemegang Saham.



STRUKTUR ORGANISASI



Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 03807/DIR/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.





FILOSOFI, VISI, MISI, KEBIJAKAN PERUSAHAAN, VALUE (BUDAYA PERUSAHAAN) DAN KOMPETENSI INTI

FILOSOFI

Mengabdikan Untuk
Meningkatkan Kualitas
Hidup Yang Lebih Baik
Adalah Filosofi Kami

VISI

Menjadi Perusahaan
Life Science Kelas
Dunia Yang Berdaya
Saing Global Adalah
VISI Kami.

MISI

Dan Untuk Mewujudkan Visi Tersebut, Kami
Menjalankan Satu Buah MISI

- Menyediakan dan Mengembangkan
Produk *Life Science* Berstandar
Internasional untuk Meningkatkan
Kualitas Hidup

BERPEGANG KEPADA VISI DAN MISI, BERIKUT INI ADALAH

Kebijakan Perusahaan Kami

1. Produk bermutu tinggi.
2. Produk ramah lingkungan.
3. Berdaya saing global.
4. Kepuasan pelanggan.
5. Perbaikan berkesinambungan.
6. Pengendalian pencemaran.
7. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
8. Penghematan energi dan sumber daya alam.
9. Patuh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya.

SETIAP ORGAN PERUSAHAAN BIO FARMA BERSIKAP DAN BERPIKIR SEJALAN DENGAN BUDAYA PERUSAHAAN, YAITU:

Setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen.

- **Profesional**
Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif berorientasi ke depan, dan taat prosedur.
- **Integritas**
Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.
- **Teamwork**
Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.
- **Innovation**
Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk menghasilkan gagasan baru.
- **Customer Oriented**
Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada *customer*.

Kompetensi Inti Perusahaan:

1. *Affordable
Life Science
(Biopharmaceutical)*
2. *Innovation*
3. *Employee
Engagement*
4. *Green Product/Green
Process*
5. *Global Marketing*

DASAR HUKUM FILOSOFI, VISI, MISI DAN VALUE (BUDAYA PERUSAHAAN)

Berdasarkan hasil review dari Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma maka pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma menyetujui perubahan Filosofi, Visi, Misi dan Value (Budaya Perusahaan) yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero), Nomor : KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor : 01024/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) PT Bio Farma (Persero) Pasal I Butir 1.5 dan 1.6.



Filosofi, Visi, Misi, Kebijakan Perusahaan, Value (Budaya Perusahaan) dan Kompetensi Inti Perusahaan sudah disosialisasikan oleh Perusahaan kepada karyawan melalui:

- Training-training yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 25 April 2014 di GH Universal Bandung, dengan Tema “ Internalisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan”.
- Acara pengarahan Direksi, pada tanggal 26 Mei 2014 di Gedung Serba Guna Bio Farma
- Melalui berbagai media internal pada tanggal 30 Juni 2014.
- Sampai saat ini masih disosialisasikan melalui Intranet Bio Farma, Website Bio Farma, Banner.
- Training yang diberikan kepada setiap karyawan baru Bio Farma.

Penjelasan Visi

Visi Bio Farma diatur dalam Dokumen: MBF-01 revisi 12, tanggal 30 Juni 2014. yaitu menjadi perusahaan *Life Science* kelas dunia yang berdaya saing global, visi tersebut menekankan peran Bio Farma dalam memenuhi ketersediaan vaksin nasional dan global, repositioning dari produsen vaksin ke *Life Science* merupakan perubahan ke arah yang lebih baik, penambahan kelas dunia diiringi dengan inovasi pada berbagai segmen, efisiensi proses bisnis yang ramah lingkungan, pembaharuan teknologi, penerapan CSR berkelas dunia serta peningkatan kualitas SDM kelas dunia.

Penjelasan Misi

Misi Bio Farma untuk mewujudkan visi, disusun dengan mempertimbangkan kompetensi utama Perusahaan dan tantangan strategis yang akan dihadapi, Bio Farma terus menerus melakukan inovasi dengan memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan vaksin dan antisera yang berkualitas internasional. Untuk menjaga kualitas Bio Farma menerapkan berbagai sistem secara terintegrasi seperti memenuhi persyaratan ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 17025: 2016, CPOB, ASEAN GMP, WHO GMP dan mengikuti perkembangan persyaratan cGMP secara global.

IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS



Ahmad M. Ramli
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2016 adalah 55 tahun. Lahir di Bandung, 4 Juli 1961, Ahmad M. Ramli meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung tahun 1985. Meraih gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Studi Hukum Internasional tahun 1992 dan Doktor dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Internasional Unpad, lulus dengan Predikat Cum Laude pada tahun 1999.

Mengawali karir sebagai Asisten Dosen di Fakultas Hukum Unpad tahun 1986, Sempat menjadi anggota Tim Penyusun RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan anggota Tim Penelaahan Perundang-undangan (Tim Reformasi Hukum) Departemen Kehakiman RI (1998-1999), Dosen Pascasarjana di Universitas Padjadjaran (1995-sekarang), Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Teknologi Sistem Informasi ITB (1998), pernah menjadi Pembantu Dekan II (1999-2001) dan Pembantu Dekan I (2001-2004), pakar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan cyber law (hukum siber) dan pemegang Certificate on Industrial Property Rights, Japan Institute of Invention and Innovation ini adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2002-sekarang). Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2004-2007), Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 2004 – sekarang), anggota Badan Regulasi Telekomunikasi – BRTI (2005-2007). Ketua Tim Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Departemen

Komunikasi dan Informatika – Departemen Hukum dan HAM (2006), Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum & HAM (2007-2010), Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (2010), Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (2010 – 2015), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkumham (2015 – 2016). Pada bulan Oktober 2016 dilantik sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo. Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma pada tanggal 8 Oktober 2007 hingga masa jabatan berakhir pada 5 November 2012, kemudian diangkat kembali sebagai Komisaris Bio Farma pada 12 April 2013-sekarang.

PENGHARGAAN/PRESTASI LAIN-LAIN

Penghargaan RI : Satya Lencana Karya Satya 10 tahun (2004) dan 20 tahun (2013), penghargaan Microsoft (sebagai Dirjen HKI) 2014, penghargaan Sayta Karya Bhakti kelas II dari Rektor Unpad (2003), Wisudawan Program Doktor dengan Predikat Cumlaude Unpad (2003), dinobatkan sebagai Mahasiswa Teladan oleh Menteri P&K RI tahun 1985.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-220/MBU/2013 Tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun pemegang saham.



Nizar Yamanie
Komisaris

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2016 adalah 63 tahun. Lahir di Surabaya, 23 Desember 1952, Nizar Yamani adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, menyelesaikan pendidikan Spesialis Saraf di Universitas Indonesia (1994) dan pendidikan Spesialis Saraf Konsultan di Universitas Indonesia (2003). Pernah kuliah di Oxford University-Inggris (1991-1992).

Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, dan Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. Anggota tim penasihat pada Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia (PERPEI). Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk. (2010-2012), Anggota Dewan Komisaris PT Surveyor Carbon Consulting (2011-2015), Anggota Komisaris Rumah Sakit Sanglah Bali (2011-2016). Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma sejak tanggal 28 Mei 2012.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan di luar RUPS Nomor: 204/ MBU/2012 tanggal 28 Mei 2012 Jo Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-81/ MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-11/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.



Ihsan Setiadi Latief
Komisaris

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 44 tahun. Lahir di Bandung, 14 Juli 1972, Ihsan Setiadi Latief menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1996. Kemudian mengambil Magister Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran tahun 2004. Meraih gelar Doktor pada Program Pascasarjana S3 Unpad Kajian Utama Ilmu Komunikasi dengan Predikat *Cum Laude* (2016).

Sejak menjadi mahasiswa hingga saat ini aktif berorganisasi diantaranya di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perhimpunan Masyarakat Madani, Komunitas Konsultasi Komunikasi (Konklusi) dan Persatuan Islam. Berkarir di lingkungan perguruan tinggi diantaranya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis), Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis) dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 dan

kemudian menjabat sebagai Ketua STKIP Persis sampai sekarang. Selain itu juga menjadi dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung, dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al- Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno. Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan. Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma sejak tanggal 1 Mei 2013.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.

Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham

IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA KOMISARIS

**Paruli Lubis**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2016 adalah 63 tahun, Lahir di Yogyakarta, 21 Januari 1953, Paruli Lubis menyelesaikan pendidikan di Insitutit Ilmu Keuangan Jakarta pada tahun 1980. Kemudian menyelesaikan program Master of Business Administration di Washington University – Saint Louis, Amerika Serikat tahun 1986.

Meniti karir di lingkungan Kementerian Keuangan RI dan pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Anggaran di Manado tahun 2002, Direktur Pelaksanaan Anggaran tahun 2004, Direktur Sistem Perbendaharaan tahun 2008 dan Direktur Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tahun 2009. Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma pada tanggal 5 November 2012.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: 392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012.

Dasar hukum penunjukan sebagai Ketua Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.



**Heridadi
Komisaris**

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta. Usia per 31 Desember 2016 adalah 64 tahun. Lahir di Tanjung Karang tanggal 24 Juli 1952. Heridadi memperoleh gelar Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1977), lalu mengikuti Sekolah Perwira Wajib Militer ABRI. Dinas pertama sebagai Perwira TNI AD di Kesdam II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur). Pada tahun 1985-1987 mengikuti pendidikan S-2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan pada Fakultas Pascasarjana UI dan setelah selesai ditempatkan di Direktorat Kesehatan TNI AD. Pada tahun 2013 meraih gelar Doktor pada program Pascasarjana S3 di Fakultas Kedokteran UGM di bidang Biodefense.

Tahun 1990-1992 menjadi Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad dan pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Seskoad. Selanjutnya mendapat jabatan sebagai Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad. Tahun 1994-1995 menjadi Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina. Jabatan militer selanjutnya sebagai Kepala Kesehatan Kostrad, Kepala Kesehatan Kodam Jaya dan Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD. Tahun 2004 menjadi Direktur Kesehatan TNI AD sampai dengan tahun 2008. Tahun 2007 mengikuti pendidikan Lemhannas dan tahun 2008 menjadi Kepala Pusat Kesehatan TNI sampai tahun 2010. Saat ini masih aktif sebagai

Dosen S2 di Universitas Pertahanan, Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta, Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD, Ketua Ikatan Alumni FKUI 1977. Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma sejak tanggal 23 Januari 2014.

PENGHARGAAN

Satya Lencana Kesetiaan 8, 16 & 24 tahun. Satya Lencana Dwidya Sista. Satya Lencana PBB, Satya Lencana Canti Dharma, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA KOMISARIS

**H.M. Subuh**
Komisaris

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta , Usia per 31 Desember 2016 adalah 54 tahun. Lahir di Pontianak, tanggal 19 Januari 1962. Mohamad Subuh menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta.(1988). Kemudian menyelesaikan S2, School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM) di University of Southern California (1999). Pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat (2004-2009), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (2009-2010), Direktur Pengendalian Penyakit Menular (2010-2013), Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2013-2014). Pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI (2014-2016). Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

(P2PL) Kementerian Kesehatan RI. Ditunjuk sebagai Komisaris Bio Farma sejak 22 Juni 2015.

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/VII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.



IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DIREKSI



Iskandar
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 61 tahun. Lahir di Sukabumi, 25 Desember 1955, Iskandar memperoleh gelar Sarjana Farmasi (1980) dan Profesi Apoteker (1981) dari Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Gelar Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan diperoleh dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2004.

Meniti karir di Bio Farma selama lebih dari 30 tahun. Telah menempati berbagai posisi manajerial seperti Kepala Bagian Produksi Infus (1988-1994), Kepala Bagian Produksi Lain (1994-2002), Kepala Divisi Logistik (2002-2005), Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (2005-2007), serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2007-2009). Menjabat sebagai Direktur Utama Bio Farma sejak tanggal 17 September 2009 dan diangkat kembali pada tanggal 12 April 2013 sampai dengan sekarang.

Aktif di berbagai forum industri vaksin dunia. Saat ini menjadi salah satu anggota Board of Trustees di International Vaccine Institute (IVI) Korea, sebagai Chairman program Self Reliance Vaccine Production – Islamic Development Bank (SRVP – IDB) dan Anggota Dewan Riset Vaksin Nasional.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Utama adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-285/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.



Mahendra Suhardono
Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 54 tahun. Lahir di Situbondo, 5 April 1962, Mahendra Suhardono memperoleh gelar Sarjana Farmasi (1986) dan Profesi Apoteker (1988) dari Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Gelar Magister Manajemen diperoleh dari Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB) tahun 2009.

Selama berkarir di Bio Farma, pernah menempati berbagai posisi diantaranya sebagai Kepala Bagian Pengemasan (1994-1997), dan Kepala Divisi Quality Assurance (2002-2007). Menjabat sebagai Direktur Produksi pada tahun 2007-2013 dan Direktur Pemasaran sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan sekarang. Aktif sebagai anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). Merupakan salah satu *key person* Bio Farma untuk berperan aktif di berbagai kegiatan *World Health Organization* (WHO).

Terpilih sebagai Presiden DCVMN (*Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*) untuk periode 2012-2014 dan 2014-2016, saat ini menjabat sebagai Executive Board DCVMN.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Pemasaran adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-285/MBU/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham.



Andjang Kusumah
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM)

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 63 tahun. Lahir di Cianjur, 8 Agustus 1953, Andjang Kusumah memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1979) dan Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan di Jakarta (2002).

Mengawali karir di lingkungan Kementerian BUMN dan pernah menempati berbagai posisi penting seperti Asisten Deputi Urusan Usaha Telekomunikasi (2007-2010), Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur (2010-2012) dan dipercaya menjadi Komisaris di beberapa BUMN seperti PT Kawasan Berikat Nusantara (2001-2007), PT Dahana (2007-2011), PT Jakarta Llyod (2007-2011) dan PT Sucofindo (2010-2012). Ditunjuk sebagai Direktur SDM Bio Farma pada tanggal 7 Maret 2012.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur SDM adalah Keputusan di Luar RUPS Nomor: SK-116/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012 Jo Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DIREKSI



Juliman
Direktur Produksi

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 54 tahun. Juliman, Lahir di Pangkalpinang pada 23 September 1962 yang memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Farmasi, Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988 dan gelar Apoteker pada tahun 1989 di almamater yang sama. Juliman melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister Bidang Manajemen Operasi di Universitas Padjajaran dan memperoleh gelar Master pada tahun 2005.

Produksi. Pengalaman Juliman di bidang produksi vaksin dan Good Manufacturing Practice (GMP) membuat beliau kerap kali menjadi nara sumber di acara seminar, wawancara dan audiensi.

Juliman juga sering terlibat diberbagai kegiatan tingkat Internasional, antara lain pernah aktif sebagai Trainer dalam program WHO Global Training Network (GTN) on Quality Assurance of Live Attenuated Poliomyelitis and Measles Vaccines dan menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk mengikuti Forum World Health Assembly yang diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO). Beliau juga aktif mengikuti Annual General Meeting yang diadakan oleh DCVMN (Developing Countries Vaccines Manufacturer Network), yaitu organisasi kerja sama para produsen vaksin dari negara-negara

berkembang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Board Alternate GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunisation) mewakili Organisasi DCVMN untuk hadir dalam GAVI Board Meeting yang rutin diadakan tiga kali dalam setahun untuk membahas dan memutuskan kebijakan-kebijakan yang diambil GAVI Board terkait program Imunisasi Global.

Sebelum menduduki posisi sebagai Direktur Produksi, Juliman telah mendedikasikan dirinya di Bio Farma di berbagai posisi seperti Kepala Bagian Penunjang Vaksin Polio dan Campak, Kepala Bagian Produksi Vaksin Campak, Kepala Divisi Teknik dan Pemeliharaan, Kepala Divisi Pemasaran Ekspor dan Kepala Divisi Logistik.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Produksi adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham



Pramusti Indrascaryo
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 51 tahun. Lahir di Semarang, 23 Agustus 1965, Pramusti Indrascaryo menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998.

Mengawali karir di Industri Perbankan. Pernah menjadi Kepala Cabang di Bank Ekspor Impor Indonesia sebelum penggabungan empat Bank Pemerintah menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. Setelah itu, Beliau pernah menempati berbagai posisi penting di Bank Mandiri seperti Senior Manager pada Corporate Risk Management dan Corporate Banking (2003), Assistant Vice President (2009) dan Vice President (2012). Menjabat sebagai Direktur Keuangan Bio Farma sejak tanggal 12 April 2013.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Keuangan adalah Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.

IDENTITAS & RIWAYAT SINGKAT ANGGOTA DIREKSI



Sugeng Raharso
Direktur Perencanaan & Pengembangan

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung, Usia per 31 Desember 2016 adalah 57 tahun. Lahir di Surabaya, 20 Desember 1959, Sugeng Raharso menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran Hewan pada tahun 1983 dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan tahun 1984 dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Memperoleh gelar Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Operasi dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Telah mengikuti berbagai program Workshop mengenai Biosimilar dan Vaccine Technology di Finlandia.

Meniti karir di Bio Farma sejak lulus kuliah dan pernah menempati posisi sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Hewan (1985-1989) dan Staff Direksi (2002-2007), Kepala Satuan Pengawasan Intern (2007-2010). Pada saat menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern pernah mendapat

Certified Professional Internal Auditor (CPIA) dari Center for Development of Accountancy and Finance – The Association of Internal Auditor. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hewan Laboratorium (2010-2012) dan diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bio Farma sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan adalah Keputusan Menteri BUMN: SK-221/ MBU/2013 tanggal 12 April 2013.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham.



SUMBER DAYA MANUSIA

Bagi Bio Farma, pengembangan SDM menjadi perhatian karena karyawan merupakan salah satu aset penting guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Kegiatan pengembangan SDM dilakukan dengan degnan perencanaan dan memerlukan koordinasi yang baik pada setiap unit kerja yang ada di Perusahaan dengan Divisi *Human Capital*.

Setiap divisi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis. Dan Divisi *Human Capital* memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan aktivitas tersebut guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknis karyawan pada tiap divisi.

Perusahaan memberikan kesempatan yang sama antar gender, untuk masing-masing level dalam program pembinaan, pengembangan dan peningkatan jenjang karir karyawan. Peningkatan kompetensi karyawan dilakukan melalui pengembangan solusi *learning & development*. Disamping itu Perusahaan juga melakukan transformasi pola pengelolaan SDM berbasis teknologi informasi. Tantangan kedepan bagi Bio Farma adalah merubah dan mendorong SDM dari kondisi *comfort zone* agar siap untuk bertransformasi dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

PEDOMAN TENTANG SDM

- UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara No. 4279).
- UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara No. 4297).
- PP No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556).
- UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Prseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756).
- PP No. 1 Tahun 1997 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 4).
- PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan(Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) pada Menteri Negara BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara No. 4305).
- Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Orgaisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011.
- Keputusan Presiden No. 59/P Tahun 2011.
- Surat Wakil Ketua DPR-RI No. PW/113/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
- Surat Edaran No. SE 06/MBU/2013 Tentang Kebijakan Ketenagakerjaan Di BUMN.
- Surat Edaran No. SE 02/MBU/2014 Tentang Kebijakan Penyerahan Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain (*Outsourcing*).
- Surat Edaran No. SE 01/MBU/2014 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG SDM

- Anggaran Dasar Perusahaan
- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 05586/DIR/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 tentang Bagan Organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2015
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 03940/DIR/VI/2007 Tanggal 4 Juni 2007 Tentang Sistem Perencanaan Karir Karyawan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 03195/DIR/V/2008 Tanggal 2 Mei 2008 tentang Sistem Perencanaan Karir Karyawan Dan Perubahan Kedua Dengan Keputusan Direksi No. 07968/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010 dan Perubahan Ketiga Dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 0382/DIR/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 Dan Perubahan Keempat Dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 03224/DIR/V/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dan Perubahan Kelima Dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 0585/DIR/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 serta Perubahan Kelima

Dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 00488/DIR/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016.

6. Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 01736/DIR/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012 tentang Peraturan Gaji Karyawan Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 02847/DIR/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dengan perubahan terakhir SK Direksi No. 00489/Dir dengan SK Direksi No. 00489/DIR/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016.

ROADMAP PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan SDM di Bio Farma mengacu pada konsep manajemen *Human Capital* (HC), dimana karyawan sebagai mitra Perusahaan didorong untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi individu agar mampu mencapai kinerja yang optimal. Bio Farma secara sistematis melakukan berbagai inisiatif untuk menyongsong era *Bioeconomy* atau *Life Science Industry* di tahun 2030 era dimana bioteknologi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi *Human Capital*, Perusahaan menyusun Roadmap Pengembangan *Human Capital* menuju *Life Science Industry* dengan tahapan sebagai berikut:

HCMS IMPLEMENTATION (2012-2014) & LEARNING ORGANIZATION BUILDING (2015)

Pengembangan SDM dari *Human Resource system* menjadi *Human Capital Management System* (HCMS) berbasis IT mulai diperkenalkan pada periode 2012-2013. Konsep ini meliputi *Performance Management System*, *Reward Management System*, *Talent Management System* dan *Knowledge Management System*. Implementasi HCMS mulai dilakukan pada tahun 2014-2015 sembari terus mendapat penyempurnaan. Pembangunan infrastruktur dan *Knowledge Management System* (KMS) dimulai pada tahun 2013. Pada tahun 2014 KMS dikembangkan menjadi sistem berbasis IT dan sistem tersebut berjalan dengan baik pada tahun 2015.

Dengan tersedianya infrastruktur *Knowledge Management* tersebut, kegiatan *learning* dan *knowledge sharing* menjadi tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga diharapkan budaya *learning* dan *knowledge sharing* di Bio Farma menjadi tumbuh subur dan terwujud *Learning Organization* (Organisasi Pembelajar). Selain itu *blue print* konsep dan sistem dalam rangka penguatan *Learning Organization*, mulai dirancang sebagai awal untuk membangun *Learning and Development Center* pada tahun 2017 yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi *Corporate University* di tahun 2018.

Roadmap Pengembangan SDM





TALENT & COMPETENCY BASED DEVELOPMENT (2016)

Pada tahun 2015, *Talent Management System* (TMS) dan *Competency Management* mulai dari penyusunan kamus kompetensi dirancang secara terintegrasi dengan sistem lain yang terkait. TMS difokuskan untuk lebih mengelola potensi karyawan bertalenta tinggi agar mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang bertalenta mediocre menggunakan pendekatan pelatihan reguler. TMS ditargetkan terimplementasi secara komprehensif tahun 2016 karena telah didukung dengan kelengkapan kompetensi dan Infrastruktur *Knowledge Management* yang baik. Dengan infrastruktur tersebut data kompetensi karyawan terkumpul lengkap dan mudah dianalisis, sehingga proses pengembangan karyawan dapat dilakukan secara unik-spesifik sesuai dengan $\pm$ kompetensi masing-masing karyawan – dampak dari itu semua, proses pengembangan karyawan menjadi lebih efektif dan efisien.

ORGANIZATION WITH EMBEDDED CORPORATE CULTURE (2017)

Tahun 2017 merupakan tahun penguatan nilai-nilai budaya perusahaan. Diawali dengan pengukuran nilai budaya (*Culture Value Assessment*) yang dilakukan tahun 2013, akan dirancang program internalisasi nilai-nilai perusahaan secara sistematis dan komprehensif dengan berlandaskan kepada nilai-nilai yang muncul dari internal organisasi. Dengan proses tersebut diharapkan nilai-nilai yang dibangun, mampu melekat kuat pada setiap pribadi karyawan dan menjadi budaya organisasi. Selain itu penguatan organisasi baik dari sisi nilai-nilai maupun kompetensi akan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan dampak yang bersifat lebih *massive* dengan rencana dibangun *Learning and Development Center* menuju *Bio Farma Corporate University*.

HC EXCELLENT INTEGRATED SYSTEM (2018)

Tahun 2018 ditargetkan semua *system Human Capital* – yang terdiri dari *Performance Management System*, *Reward Management System*, *Talent Management System*, *Knowledge Management System*, yang ditunjang dengan sistem teknologi informasi yang handal didukung oleh budaya organisasi sesuai nilai-nilai Perusahaan sehingga menjadi budaya organisasi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai sehingga menjadi sistem yang prima (*excellent*) menuju membangun perusahaan berkelas dunia.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SDM

1. Memberdayakan dan mendayagunakan karyawan sesuai dengan prinsip *Human Right*.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Memberikan perlindungan kepada karyawan untuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.

STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

Untuk mencapai sasaran pengembangan *Human Capital* sesuai *Roadmap* yang telah disusun, maka Perusahaan menetapkan Strategi Pengembangan SDM (*Human Capital*) Bio Farma sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem pengelolaan *Human Capital* dengan sistem remunerasi yang berbasis kompetensi dan kinerja.
2. Menyiapkan “*Multi Rater System*” untuk penilaian kinerja karyawan.
3. Menerapkan strategi “*Attract*” dalam merekrut calon karyawan bertalenta dengan kompetensi di atas rata-rata.
4. Menerapkan program *Work Life Balance* dalam berbagai aktivitas.
5. Membangun budaya *sharing* (berbagi ilmu) untuk percepatan proses belajar.
6. Menyiapkan aplikasi *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi dengan ERP.

SUMBER DAYA MANUSIA

KINERJA PENGEMBANGAN SDM BIO FARMA TAHUN 2016

Sesuai tahapan *HC Master Plan*, kegiatan di tahun 2016 masih sejalan dengan rencana program HRMP yaitu *Learning Organization Building*. Utamanya dalam program ini adalah pembinaan dan optimalisasi *knowledge sharing* melalui aplikasi *Knowledge Management System*. Di samping itu juga dilakukan kerja sama Program Pendidikan Formal Pasca Sarjana dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang difokuskan pada bidang *Biotechnology/Life Science* sesuai visi Perusahaan. Beberapa program tahun 2016 yang sudah dimulai di akhir tahun 2015 diantaranya rancangan penyusunan model dan kamus kompetensi baik untuk *soft* dan *hard competency*.

SEPANJANG TAHUN 2016, PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS SDM YANG TELAH TERCAPAI

1. Sistem Teknologi Informasi Perusahaan telah selesai dibangun sebagai pondasi penerapan HCMS di Bio Farma.
2. Mengirim karyawan terpilih untuk mengikuti program pendidikan formal pasca sarjana yang diarahkan pada kekhususan *Bio Technology* dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan baik *soft skill* maupun *hard-skill* yang mendukung rencana bisnis ke depan.
3. Proses optimalisasi kapasitas kerja individu dengan melaksanakan *work load analysis* terlebih dahulu untuk seluruh posisi yang diharapkan mampu memetakan posisi kerja dan kontribusi setiap karyawan terhadap hasil kerja.
4. Uji coba untuk seluruh sistem yang terkait dengan HCMS telah selesai dilaksanakan melalui *mini project*.
5. Pengembangan *core competency* Bio Farma yang terdiri dari: *Affordable Life Science product*, *green process/product*, *global marketing*, *employee engagement*, *innovation*.
6. Sosialisasi *Corporate Culture*, Visi, Misi dan *Values* kepada pihak internal dan eksternal secara berkelanjutan.
7. Pembiasaan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) diantara karyawan yang memiliki keahlian tertentu dan/atau karyawan yang telah mengikuti pelatihan.
8. *Knowledge Management System* melalui media TI

RENCANA PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2017

Rencana pengembangan SDM Bio Farma kedepan diarahkan untuk terintegrasi dengan seluruh lini usaha dan operasional Perusahaan. Pada tahun 2017, program-program pelatihan dan pengembangan SDM diorientasikan pada penguatan nilai-nilai budaya perusahaan untuk level personal maupun divisional.





MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DI BIO FARMA

MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM YANG DITERAPKAN DI BIO FARMA

1. PERENCANAAN

Karyawan bagi Bio Farma merupakan salah satu faktor penting dalam proses bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, Bio Farma membuat perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan kebutuhan karyawan itu sendiri.

Proses penyusunan rencana SDM secara sistematis dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan.

Perencanaan Pembangunan & Pengembangan SDM disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Penduduk dan tenaga kerja
- b. Kesempatan kerja
- c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja
- d. Produktivitas tenaga kerja
- e. Hubungan industrial
- f. Kondisi lingkungan kerja
- g. Remunerasi dan kesejahteraan tenaga kerja
- h. Jaminan sosial tenaga kerja.

Perencanaan SDM gunanya untuk mendapatkan sumber daya yang akan menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat sesuai kebutuhan Perusahaan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dimulai dari pengidentifikasian berbagai persoalan, ancaman, peluang baik dalam maupun luar Perusahaan.

Kegiatan yang Dilakukan untuk Perencanaan SDM

- a. Inventarisasi persediaan SDM
- b. Memprediksi kebutuhan SDM
- c. Menyusun rencana SDM
- d. Memonitor serta evaluasi SDM

Perencanaan ini diperlukan untuk membantu peningkatan kompetensi, pengembangan karier dan mendapatkan calon karyawan yang memenuhi kualifikasi.

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Perencanaan:

- a. **Faktor Internal:** rencana strategis Perusahaan, anggaran, estimasi produksi, perluasan usaha dan tugas-tugas pekerjaan Perusahaan.
- b. **Faktor Eksternal:** situasi ekonomi, social budaya, politik, Peraturan Perundang-Undangan, teknologi dan pesaing.

2. REKRUTMEN DAN SELEKSI

Rekrutmen dan seleksi merupakan upaya Perusahaan untuk mencari, menemukan dan menarik orang untuk dijadikan karyawan.

Perusahaan melaksanakan rekrutmen berdasarkan pada manajemen formasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) seiring dengan perkembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan. Bio Farma membuka kesempatan yang setara bagi para pelamar kerja, baik pria atau wanita.

Secara bertahap, mulai tahun 2014 Bio Farma telah membuka kesempatan kerja bagi penyandang difabel sesuai dengan Surat Edaran No. SE 01/MBU/2014 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA

Proses rekrutmen bersifat terbuka tanpa diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk menjangkau dan memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya, proses rekrutmen diumumkan secara terbuka melalui berbagai media cetak nasional dan lokal (Harian Pikiran Rakyat, Kompas, Media Indonesia), media elektronik (website Perusahaan, media sosial Facebook dan Twitter, portal BUMN, radio) serta melalui acara *job fair* serta *roadshow* ke beberapa perguruan tinggi.

Setelah calon tersedia, langkah berikutnya adalah penyeleksian. Jenis tes yang diberikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan pekerjaan yang dibutuhkan.

Prosedur Rekrutmen Karyawan Baru di Bio Farma

- Lowongan pekerjaan dipublikasikan di media massa.
- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga pendidikan.
- Pendaftaran kandidat dilakukan melalui website: www.biofarma.co.id pada menu tautan karier.
- Pemilihan kandidat terkait persyaratan akademis dilakukan oleh sistem secara otomatis.
- Verifikasi dan wawancara.
- Seleksi Tes Psikologi berupa psikotes dilakukan oleh pihak independen.
- Tes kesehatan yang komprehensif menjadi penentu akhir kelulusan kandidat.

Proses rekrutmen dan seleksi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan atau yang diinginkan Perusahaan dengan apa yang didapat secara tepat.

3. PENGEMBANGAN SDM BIO FARMA

Pengembangan SDM merupakan proses penyiapan karyawan-karyawan untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam Perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan. Sedangkan pelatihan membantu meningkatkan pengetahuan praktis dan penerapannya dalam tugas.

Tujuan Pengembangan SDM

Meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga terlaksananya tugas-tugas secara efisien, efektif dan produktif.

Sasaran Pengembangan SDM

Meningkatkan produktivitas, mutu kerja, moral kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kualitas pribadi karyawan.

Pelatihan dan Pendidikan

Perusahaan merancang program pelatihan dan pendidikan bagi karyawan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan kompetensi. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Perusahaan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara in-house maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar.

Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang Diterapkan oleh Bio Farma

- Pelatihan Kompetensi,
- Keterampilan Teknis/Fungsional, dan
- Sertifikasi Keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugasnya (*mandatory training*)
- Pelatihan Manajerial
- Berbagai Sesi Knowledge Sharing.
- Pendidikan Formal Pasca Sarjana



Realisasi Kegiatan Pelatihan, Beasiswa Pendidikan Formal Pasca Sarjana dan Knowledge Management Pada Tahun 2016

a. Pelatihan

- **Selama tahun 2016 Perusahaan** menyelenggarakan sebanyak 375 program pelatihan yang terdiri dari sebanyak 18 pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi saat ini dan rencana bisnis ke depan, dan sebanyak 365 pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi divisi yang terkait kebutuhan teknis.
- **Tema Program Pelatihan Tahun 2016**
 - *Update Good Manufacturing Practices (GMP),*
 - *Environment Health & Safety Behavior,*
 - *Character Building Training,*

- *Emotional Spiritual Quotient,*
- *Executive English Class with Native Speaker,*
- *Public Speaking, Career Transition Program,*
- *Team work,*
- *Communication Skill,*
- *Microsoft Office,*
- *Creative Design Presentation,*
- *Customer Service Orientation,*
- *Financial Planning,*
- *Problem Solving,*
- *Organization Management,*
- *Competency Management,*
- *ISO 27001: 2013,*
- *Tematik Public Training Lainnya.*

Jenis Pelatihan	Dasar Training	Jumlah Program Pelatihan	Jumlah Peserta
<i>Organizational Competency</i>	Kebutuhan Kompetensi Organisasi	18	1.524
<i>Divisional Competency</i>	Kebutuhan Kompetensi Divisi Yang Bersifat Teknis / <i>Hard Skill</i>	365	1.253

Total hari pelatihan terhadap total peserta adalah 8 hari. Artinya rata-rata partisipasi pelatihan setiap karyawan Bio Farma adalah 8 hari dalam setahun atau setara dengan 4 kali pelatihan (asumsi rata-rata pelatihan berdurasi 2 hari) 2.

Program Pelatihan Tahun 2016

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Tempat	Jenis Pelatihan
2 Juni 16	03 Juni 16	Akuntansi kombinasi & konsolidasi serta aspek perpajakannya	29	IAI	Hotel Aston Primera Pasteur	<i>Inhouse</i>
25 April 16	01 Mei 16	<i>Character building training (CBT)</i> angkatan 15& 16	28	Bio Farma	Pusdikajen Lembang	<i>Inhouse</i>
11 Agustus 16	12 Agustus 16	<i>Competency Based Leadership</i>	38	Kubik	Hotel Mercure Setiabudhi	<i>Inhouse</i>
5 Maret 16	05 Maret 16	<i>Customer satisfaction</i>	43	CV. Prima Berlian Lestari	Hotel Aston Primera Pasteur	<i>Inhouse</i>
13 Juli 16	14 Juli 16	<i>Effective communication skill for CSO</i>	73	WIBI	Hotel Grand Tjokro Cihampelas	<i>Inhouse</i>
4 Maret 16	04 Maret 16	Evaluasi & strategi PROPER	25	MUVI	Hotel Harris Tebet-Jakarta	<i>Inhouse</i>
1 Agustus 16	01 Agustus 16	<i>Financial Planning</i>	268	Widya Bhakti Inti	Hotel Harper Pasteur	<i>Inhouse</i>
5 April 16	5 April 16	Interpretasi Klausul ISO 27001	11	IT Bio Farma	Ruang Meeting TI	<i>Inhouse</i>
15 Agustus 16	16 Agustus 16	K3 lingkungan <i>behaviour safety</i>	76	WIBI	Hotel Regata & Ged.Adm Lt. 1	<i>Inhouse</i>

SUMBER DAYA MANUSIA

Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Topik Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Tempat	Jenis Pelatihan
5 September 16	6 September 16	<i>Leadership strategic thinking for leading corporate action</i>	56	Kubik	Hotel InterContinental Dago Pakar	<i>Inhouse</i>
18 Mei 16	19 Mei 16	<i>Microsoft Access</i>	100	HCSS	Hotel Grand Tjokro	<i>Inhouse</i>
25 April 16	25 April 16	<i>Microsoft Power Point</i>	96	HCSS	Hotel Grand Tjokro	<i>Inhouse</i>
24 Mei 16	25 Mei 16	<i>Microsoft Word</i>	86	Innov	Hotel Patra Jasa	<i>Inhouse</i>
18 Juli 16	19 Juli 16	<i>Ms. Visio & Ms. Project</i>	109	HCSS	Hotel Regata Setiabudhi	<i>Inhouse</i>
9 Mei 16	10-May-16	Office basic "Ms. Excel & Ms. Word"	73	Inov Training	Hotel Sensa Ciwalk	<i>Inhouse</i>
9 Februari 16	10 Februari 16	Pemetaan Minat & Bakat Aktivitas Produktif dalam Rangka Pemberdayaan & Diskusi Mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP)	100	MUVI	Hotel Grand Tjokro	<i>Inhouse</i>
2 Agustus 16	02 Agustus 16	Penataan sistem karir	36	Dunamis	Hotel Aston Tropicana Cihampelas	<i>Inhouse</i>
28 Juli 16	29 Juli 16	Pengembangan Kepemimpinan	40	Kubik	InterContinental Hotel	<i>Inhouse</i>
20 Juni 16	20 Juni 16	Persiapan & uji coba sertifikasi produk halal	21	LPPOM MUI	R. Rapat Gedung Heritage	<i>Inhouse</i>
15 Februari 16	16 Februari 6	<i>Public speaking</i>	36	Farhan Public Speaking Training	Hotel Serela Cihampelas	<i>Inhouse</i>
2 September 16	2 September 16	<i>Tax Amnesty</i>	111	Direktorat Jendral Pajak (DJP)	GSG PT. Bio Farma (Persero)	<i>Inhouse</i>
30 Maret 16	4, 6, 11 April 16	<i>TOEFL Preparation</i>	28	Ghania Berkah Utama, CV	Ruang Rapat SDM	<i>Inhouse</i>
4 Agustus 16	4 Agustus 16	<i>Vision and Portfolio</i>	36	PWC	Hotel Mandarin Oriental-Jakarta	<i>Inhouse</i>
		238 Tematik Divisional Training	582	Berbagai Provider	Dalam dan Luar Negeri	<i>Public Training</i>

b. Beasiswa Pendidikan Formal Pasca Sarjana.

Bio Farma memberikan bea siswa kepada karyawan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bio Farma untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-2 dan Strata-3. Penjurusan yang dipilih disesuaikan dengan rencana strategis Perusahaan baik dari sisi pengembangan organisasi, manajemen maupun rencana pengembangan produk sehingga tesis atau disertasi yang dihasilkan bukan bersifat riset dasar, tetapi sudah merupakan sebuah penelitian praktis yang bernilai bisnis.

Agar program Pendidikan formal sejalan dengan tuntutan dan strategi bisnis, Perusahaan mengirim karyawan untuk mengikuti program pascasarjana di perguruan tinggi yang menjalin kerja sama riset sehingga hasilnya memiliki nilai jual dan berkontribusi terhadap percepatan riset.

Pada tahun 2016 tercatat 1 (satu) orang karyawan menerima beasiswa pendidikan S-3 di University of Melbourne (kuliah dan kerja sama riset) dan 1 (satu) orang mengambil S-3 di Universitas Padjajaran serta 6 (enam) orang mengambil S-2 di Institut Teknologi Bandung (ITB).



c. **Knowledge Management**

Pengelolaan pengetahuan atau knowledge management dilakukan untuk mengamankan aset pengetahuan (*knowledge asset*) yang dimiliki Perusahaan. Proses ini meliputi pengidentifikasian sumber pengetahuan, penyimpanan dan diseminasi pengetahuan.

Kegiatan yang Dilakukan dalam Proses Knowledge Management

- **Knowledge Exchange**

Proses berbagi pengetahuan (*sharing*) antar karyawan dari suatu keahlian yang telah diterapkan di Perusahaan melalui sesi presentasi atau *coaching*. Dalam kegiatan ini juga ada *interview exit* bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerusnya. Selama tahun 2016, kegiatan *Knowledge Exchange* dilakukan sebanyak 19 event.

- **Community of Practice (CoP)**

Proses *sharing* di dalam komunitas praktisi internal untuk membahas suatu masalah teknis tertentu dengan tujuan menghimpun pengetahuan antar disiplin ilmu untuk merumuskan solusi. Selama tahun 2016, kegiatan CoP dilakukan sebanyak 1 event.

- **Lesson Learned Sharing**

Proses *sharing* pengetahuan pasca mengikuti suatu sesi pelatihan di luar Perusahaan (*Public Training*) atau *Benchmarking* agar terjadi distribusi atau pemerataan pengetahuan khususnya di unit kerja masing-masing. Partisipasi karyawan dalam program ini adalah sebanyak 65% dari realisasi *public training* atau sebanyak 476 kontributor.

Program Pengembangan dan Realisasi Program Selama 5 Tahun Terakhir

[Dalam juta rupiah]

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
I. Training Pimpinan					
Rencana	117	177	103	64	140
Realisasi	49	129	50	49	122
II. Training Non Pimpinan					
Rencana	64	148	139	432	725
Realisasi	51	87	30	375	642
III. Pendidikan Formal					
Anggaran					
Dalam Negeri	4.158	6.444	7.839	2.500	1.000
Luar Negeri	3.968	5.111	3.775	1.437	1.500
Jumlah Peserta					
Dalam Negeri	20	1	1	1	6
Luar Negeri	-	2	2	1	0

SUMBER DAYA MANUSIA

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Selama tahun 2016 biaya pengembangan kompetensi karyawan Bio Farma yang meliputi pendidikan formal dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- Program pendidikan formal dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar dan realisasinya sebesar Rp1.576 miliar 63% yang digunakan untuk membiayai program pendidikan pasca sarjana yang masih berjalan pada tahun 2016.
- Program pelatihan dianggarkan sebesar Anggaran 1Rp5.252.170.000 dan realisasinya sebesar 15.217.811.999 (99,77%) untuk membiayai kegiatan pelatihan, seminar, workshop pada tahun 2016.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Dan Jumlah Peserta Training Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan (Dalam Juta Rupiah)					
Dalam Negeri	1.594	5.237	4.026	12.000	9.430
Luar Negeri	1.050	1.630	1.689	8.000	4.957
Total	2.644	6.867	5.715	20.000	14.387
Jumlah Peserta Training (Orang)					
Dalam Negeri	182	196	-	1.147	905
Luar Negeri	38	40	-	141	82
Total	220	236	-	1.288	987

4. PENGELOLAAN

Dalam mengelola SDM, karyawan sebagai unsur produksi yang memiliki pikiran, perasaan, angan-angan/cita-cita. Sehingga memandang karyawan harus secara holistic dan manusiawi.

Pengelolaan SDM Di Bio Farma**a. Kepuasan Kerja**

Kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, imbalan kerja (remunerasi), hubungan antar karyawan dan Perusahaan dan hal-hal lain yang menyangkut factor fisik dan psikologis yang berwujud perasaan senang atau tidak senang, puas atau tidak puas.

Divisi SDM memperhatikan kepuasan pekerjaan karena alasan sebagai berikut: adanya hubungan kepuasan dengan kinerja, tingkat kesehatan, keberlangsungan karyawan (tetap bertahan) dan produktivitas.

Beberapa hal yang memengaruhi kepuasan kerja bagi karyawan Bio Farma dapat berupa fisik seperti gaji (Remunerasi), fasilitas (Kesejahteraan Karyawan & *Work Life Balance*) dan jaminan masa depan, atau hal-hal yang non fisik seperti kesempatan untuk maju, keamanan pekerjaan, kesehatan, manajemen Perusahaan, pengawasan, kondisi pekerjaan, komunikasi.

Bio Farma sangat memperhatikan pemenuhan kepuasan kerja karyawan untuk keberlangsungan dan produktivitas perusahaan.

Remunerasi

Bio Farma memberlakukan sistem remunerasi yang kompetitif dengan mempertimbangkan level pengupahan pada industri sejenis, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Kemampuan Perusahaan. Perusahaan memastikan bahwa besaran upah minimum yang diberikan kepada semua karyawan berada di atas upah minimum provinsi.

Selain itu, tidak ada kebijakan remunerasi yang membedakan perlakuan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan. Remunerasi yang kompetitif akan mempertahankan karyawan yang mempunyai kompetensi tinggi. Remunerasi diberikan kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja yang adil. Perusahaan terus mengembangkan sistem remunerasi sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Pada tahun 2014 Divisi *Human Capital* mengembangkan sistem remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja,

Total reward yang diterima karyawan terdiri dari:

1. *Pay For Person* (kompensasi terhadap kompetensi)
2. *Pay For Position* (kompensasi terhadap pekerjaan)
3. *Pay For Performance* (kompensasi terhadap kinerja)
4. Insentif.

Sistem penggajian karyawan dinyatakan dalam grade dan level jabatan, dari grade 17 (terendah) hingga grade 2 (tertinggi).

Jumlah Remunerasi yang Diterima Oleh Karyawan Per Bulan (*Take Home Pay*) Selama 3 Tahun Terakhir

Level Jabatan	Grade	2014		2015		2016		Kenaikan/Penurunan %	
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
		1	2	3	4	5	6	5/3	6/4
Kepala Divisi	6 - 2	15.845.847	28.081.906	23.516.202	30.975.418	24.860.040	32.586.257	5,71	5,20
Kepala Bagian	8 - 3	10.815.727	19.937.323	12.393.042	21.653.705	16.311.229	23.989.161	31,62	10,79
Kepala Seksi	12 - 3	5.856.204	16.397.396	9.634.826	18.388.485	11.007.054	19.548.659	14,24	6,31
Staf	9 - 5	6.253.860	8.338.027	5.777.460	9.471.683	6.855.330	11.046.718	18,66	16,63
Staf Muda	13 - 5	4.407.853	11.246.004	5.164.770	13.163.544	5.762.871	13.801.195	11,58	4,84
Pelaksana	17 - 7	3.396.621	9.089.201	3.971.733	10.865.530	5.184.660	11.962.839	30,54	10,10

Kesejahteraan Karyawan

Bio Farma memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan sebagai bagian dari remunerasi. Tunjangan tersebut berupa Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Kesejahteraan, uang cuti tahunan, uang cuti panjang, uang pakaian dinas dan bonus tahunan (jasa produksi).

Selain tunjangan tersebut, karyawan mendapatkan fasilitas seperti pengobatan (rawat jalan dan rawat inap), kantin, sarana olah raga, sarana ibadah dan rekreasi.

Dalam memberikan hak normatif kepada Karyawan, Bio Farma menetapkan:

- a. Jenis cuti yang terdiri dari cuti tahunan, cuti panjang, cuti sakit, cuti bersalin, cuti haid, cuti gugur kandungan, cuti ibadah dan cuti di luar tanggungan perusahaan. Karyawan berhak mengambil cuti dan memperoleh ijin meninggalkan pekerjaan karena alasan penting sesuai ketentuan yang berlaku.

SUMBER DAYA MANUSIA

- b. Memberikan tunjangan hari tua dalam bentuk iuran pasti dengan benefit diperoleh pada saat pensiun berupa penghasilan bulanan, tabungan hari tua, asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya seluruh karyawan baik yang berstatus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (tenaga kontrak) mendapatkan seluruh fasilitas tunjangan dan insentif/bonus, kecuali uang pakaian dinas dan uang cuti panjang yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap.

WORK-LIFE BALANCE (WLB)

Keseimbangan dalam kehidupan dan pekerjaan (*work-life balance*) merupakan cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan yaitu kerja, pribadi, keluarga, spiritual, dan sosial sehingga menghasilkan kemampuan untuk bertanggung jawab penuh atas pekerjaan, keluarga, kehidupan pribadi dan kehidupan sosial untuk dapat memberikan kontribusi dan pelayanan terbaik.

Menyadari pentingnya kualitas karyawan yang tidak hanya sehat secara fisik namun juga bahagia lahir bathin, pada tahun 2014 Bio Farma memiliki tim khusus yang dinamakan dengan Tim Paradigma Hidup sehat. Tim ini mempunyai tugas untuk pembentukan program Paradigma Hidup Sehat Karyawan Bio Farma dan evaluasi pencapaian implementasi program.

5 Aspek Penting Program Paradigma Hidup Sehat

1. Aspek kehidupan pribadi
2. Kerja
3. Ibadah
4. Keluarga & Komunitas
5. Budaya.

Sesuai dengan Filosofi Perusahaan yaitu *Dedicated to Improve Quality of Life*. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang tidak kalah penting adalah perhatian perusahaan agar tercipta karyawan yang BAHAGIA (Bugar, Harmonis & Giat).

1. Disiplin

Sikap disiplin adalah kesediaan dan kerelaan karyawan untuk menaati dan menjalankan norma-norma, budaya Perusahaan atau aturan yang berlaku.

Tujuan kedisiplinan

- a. Meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan mencegah pemborosan waktu dan energi
- b. Mencegah berbagai kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan dan perlengkapan kerja yang disebabkan ketidakhati-hatian.

Disiplin adalah upaya untuk mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan kurang perhatian, ketidakmampuan dan keterlambatan.

Hal-Hal yang Memengaruhi Disiplin

- a. Besarnya pemberian kompensasi
- b. Keteladanan Pimpinan
- c. Aturan yang pasti
- d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan
- e. Pengawasan dan perhatian terhadap karyawan
- f. Penciptaan kebiasaan-kebiasaan tegaknya didiplin

Disiplin menggambarkan besarnya tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya, karena itu sangat berpengaruh kepada produktivitas yang dapat mendorong tercapainya tujuan Perusahaan.

2. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*) berperan penting dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan. Untuk itu, seluruh karyawan dituntut untuk memahami dan menerapkannya dalam setiap perilaku dan aktivitas sehari-hari terutama di tempat kerja.



Seiring dengan tuntutan bisnis Perusahaan yang berorientasi global, pada awal 2014 telah dilakukan evaluasi terhadap Budaya Perusahaan yang dilakukan melalui survei untuk menggali dan memunculkan nilai-nilai Perusahaan berdasarkan persepsi seluruh karyawan yang akan digunakan untuk merancang program-program internalisasi nilai-nilai perusahaan secara sistematis dan komprehensif.

Dengan proses yang melibatkan seluruh karyawan tersebut diharapkan nilai-nilai yang dibangun mampu melekat kuat pada setiap pribadi karyawan dan menjadi budaya yang positif untuk mendukung pertumbuhan Perusahaan sehingga diperoleh dan ditetapkan visi, misi dan tata nilai (*values*) Perusahaan yang baru yaitu:

- a. **Professionals:** Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif, berorientasi ke depan dan taat prosedur.
- b. **Integrity:** Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.
- c. **Teamwork:** Bekerja sama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.
- d. **Innovation:** Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus-menerus untuk menghasilkan gagasan baru.
- e. **Customer Oriented:** Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada customer.

Untuk mempertajam pemahaman mengenai budaya perusahaan, pada tahun 2014 Perusahaan telah melakukan internalisasi secara bertahap kepada seluruh Karyawan dan di sosialisasikan kepada para tamu perusahaan, supplier dan kepada publik melalui website Bio Farma.

3. Produktivitas

Produktivitas merupakan sikap mental karyawan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya dalam segala bidang sehingga menjadi pribadi yang dinamis, kreatif, inovatif serta terbuka namun tetap kritis dan tanggap terhadap ide-ide baru dan perubahan.

Aspek-aspek Yang Menentukan Produktivitas

- a. Kemampuan manajemen SDM
- b. Efisiensi karyawan
- c. Kondisi lingkungan pekerjaan.

Indikator-Indakator Pengukuran Produktivitas Karyawan

- a. Kemampuan melaksanakan tugas
- b. Meningkatnya hasil yang dicapai
- c. Semangat kerja
- d. Pengembangan diri
- e. Selalu berusaha meningkatkan mutu pekerjaan
- f. Bertindak efisien

Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Karyawan

- a. Pelatihan
- b. Mental
- c. Kemampuan fisik
- d. Hubungan dengan pimpinan.

Cara Meningkatkan Produktivitas

- a. Perbaikan terus menerus
- b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan
- c. Pemberdayaan SDM.

4. Motivasi

Motivasi adalah cara untuk mendorong gairah kerja bawahan agar mau bekerja keras mengerahkan segala segala kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan Perusahaan.

Penerapan Di Bio Farma, Motivasi dipengaruhi oleh 2 faktor

- a. **Faktor Internal** berupa keinginan untuk dapat hidup, memiliki sesuatu, memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan dan keinginan berkuasa.
- b. **Faktor Eksternal** berupa kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggungjawab dan peraturan yang fleksibel.

SUMBER DAYA MANUSIA

Pemberian motivasi merupakan kewajiban seorang pimpinan terhadap bawahan atau karyawannya, agar mereka dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang menjadi tanggungjawabannya.

5. Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh karyawan dari aktivitas kerjanya.

Hal-Hal yang Mempengaruhi Penilaian Prestasi Kerja Di Bio Farma

- Hasil kerja
- Pengetahuan tentang pekerjaan
- Inisiatif
- Kecekatan mental
- Sikap dan disiplin waktu (kehadiran).

Penilaian prestasi kerja dimaksudkan untuk memahami lebih jauh, apakah para karyawan dan unsur yang terkait dengannya sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Hasil dari penilaian merupakan bahan bagi manajemen untuk peningkatan kualitas SDM yang dimiliki.

Penghargaan Bagi Karyawan

Perusahaan memberi penghargaan terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja, dedikasi dan profesionalisme yang tinggi. Setiap tahun Perusahaan memberikan beberapa penghargaan (reward) yaitu penghargaan ibadah haji dan penghargaan ibadah umrah untuk karyawan teladan, penghargaan atas karya dan pengabdian 20 tahun bekerja serta penghargaan donor darah.

Jumlah Karyawan Bio Farma Yang Menerima Penghargaan Selama 5 Tahun Terakhir

Jenis Penghargaan	Jumlah Penerima Penghargaan Per Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Ibadah haji	3 Orang Karyawan dan Pasangan	3 Orang Karyawan dan Pasangan	3 Orang Karyawan dan Pasangan	3 orang Karyawan dan Pasangan	3 Orang Karyawan dan Pasangan
Ibadah Umroh	5 Orang	5 Orang	11 Orang Karyawan dan Pasangan	3 Orang Karyawan dan Pasangan	3 Orang Karyawan dan Pasangan
Karya Pengabdian 20 tahun	28 Orang	22 Orang	16	6 orang Karyawan	37 orang Karyawan
Donor Darah	54 Orang	37 Orang	31	39 orang karyawan	37 orang Karyawan

6. Pengembangan Karier

Pengembangan karir adalah proses yang diciptakan untuk membantu karyawan agar lebih meningkatkan kariernya.

Kesuksesan karier di Bio Farma dipengaruhi oleh 2 aspek

- Kemampuan dan kemauan untuk melihat jauh ke depan
- Keuletan dari individu yang bersangkutan.

Pengembangan karier adalah untuk memperoleh jenjang karier dengan tujuan: memberikan kepastian arah karier jabatan, meningkatkan daya organisasi untuk menarik pegawai yang berkualitas, memudahkan manajemen dalam menyelenggarakan program pengembangan karier dan memudahkan administrasi kepegawaian dalam promosi, rotasi maupun demosi jabatan.



7. Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk uang, materi, fasilitas atau kesempatan berkarir.

Tujuan Kompensasi

Menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, mendapatkan karyawan yang bermutu, pengendalian biaya dan memenuhi peraturan ketenagakerjaan.

Dampak Pemberian Kompensasi Terhadap Karyawan

- Meningkatkan kinerja dan kesetiaan karyawan terhadap Perusahaan
- Menekan jumlah ketidakhadiran
- Mengurangi intervensi pihak-pihak lain sehingga berdampak positif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Bio Farma merancang sistem penilaian kinerja “Multi Rater System” atau sistem 360 derajat sejak 2013 untuk menggantikan sistem 90 derajat (penilaian karyawan oleh atasan langsung). Melalui sistem ini, kinerja seorang karyawan dinilai oleh atasan, bawahan, mitra kerja sederajat dan pemangku kepentingan (pelanggan internal/eksternal) sehingga diharapkan hasilnya akan lebih objektif.

Sistem penilaian kinerja 360 derajat telah dilengkapi pula dengan aplikasi sejak tahun 2014 dan dilakukan uji coba untuk diimplementasikan secara online mulai tahun 2015.

Proses Penilaian Kinerja Karyawan Yang Berkaitan Dengan Promosi

- Divisi terkait mengajukan pengisian formasi jabatan kosong ke Direktur SDM
- Divisi Human Capital membuka lowongan formasi jabatan kosong secara terbuka melalui intranet ke di web site internal untuk semua seluruh unit kerja
- Karyawan yang mendaftar dan memenuhi syarat administrasi Kandidat yang terjaring dan sesuai persyaratan diuji secara tertulis

- Kandidat yang lolos tes tertulis diharuskan membuat presentasi dan diuji di depan panel penilai
- Kandidat yang lolos seleksi diajukan kepada direktur SDM untuk dibuat keputusan apakah kandidat tersebut dipromosikan di tunda atau dilakukan penilaian ulang.

8. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh karyawan berupa pengetahuan, sikap, perilaku yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya. Aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi adalah: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap, (*attitude*) dan minat (*interest*).

Kompetensi merupakan tindakan yang disengaja yang mendorong sejumlah motif, karakter pribadi untuk melakukan suatu aksi menuju terbentuknya suatu hasil.

Kompetensi manajerial dalam Perusahaan sangat diperlukan karena dapat menggali potensi sumber daya lainnya yang dimiliki Perusahaan, mengefektifkan dan mengefisiensikan proses produksi serta menciptakan produk yang diinginkan konsumen. Kesemuanya itu akan memberi nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk keuntungan dan daya saing.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bio Farma mengakui kebebasan bagi para karyawan untuk berorganisasi di dalam lingkungan Perusahaan. Kebebasan berserikat bagi karyawan merupakan wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan internasional, yaitu ILO Convention 87 dan 98. Pada tanggal 1 April 1999, karyawan PT Bio Farma (Persero) membentuk organisasi bernama Himpunan Karyawan (HIKA) PT Bio Farma (Persero) dan pada tanggal 5 April 2010, berdiri organisasi bernama Forum Komunikasi Karyawan (Forwan).

SUMBER DAYA MANUSIA

Perusahaan mendorong serikat pekerja yang ada untuk dikelola secara profesional sebagai sarana penghubung antara karyawan dan Perusahaan agar menciptakan hubungan harmonis yang saling menguntungkan semua pihak.

Perundingan antara Serikat Pekerja dengan perusahaan terakhir telah dilakukan pada tahun 2012 yang menyepakati dan menyetujui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2012-2014 yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 568/07/PKB/Perlind/2012.

JUMLAH KARYAWAN BIO FARMA

Hingga 31 Desember 2016 jumlah karyawan Bio Farma tercatat sebanyak 1.780 orang yaitu

- Sebanyak 1.171 orang yang berstatus sebagai Karyawan Tetap
- Sebanyak 144 orang yang berstatus sebagai Karyawan Kontrak
- 465 orang yang berstatus sebagai Karyawan *Outsourcing*.

Tahun 2016 jumlah Karyawan Tetap Bio Farma sebanyak 1.171 orang meningkat sebanyak 3,90% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 1.127 orang

JUMLAH KARYAWAN BIO FARMA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

Jumlah Karyawan Berdasarkan Direktorat

Direktorat	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
Utama	83	77	97	102	101	(0,98)
Keuangan	58	57	61	63	67	6,35
Pemasaran	76	83	82	87	91	4,60
Sumber Daya Manusia	110	126	126	148	163	10,14
Produksi	369	405	450	489	501	2,45
Perencanaan & Pengembangan	225	205	213	238	248	4,20
Jumlah	921	953	1.029	1.127	1.171	3,90

Jumlah Karyawan Berdasarkan Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
Kepala Divisi	22	23	23	25	26	4,00
Ahli Utama		2	5	7	7	0,00
Kepala Bagian	58	55	58	66	68	3,03
Ahli Madya	18	26	39	38	39	2,63
Kepala Seksi	125	123	129	159	162	1,89
Ahli Muda	23	32	33	40	48	20,00
Staf	102	95	103	107	119	11,21



Jabatan	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
Staf Muda	109	120	132	135	163	20,74
Pelaksana	419	439	475	517	506	(2,13)
Portfolio Management Team	4	4	0	0	0	0
Proj Integration Mng	2	2	2	3	3	0,00
Research Coordinator	2	1	1	1	3	200,00
Research S.O.	0	0	0	0	1	0
Researcher	4	5	5	5	5	0,00
Junior Researcher	21	14	13	13	10	(23,08)
Operation Staff	12	12	11	11	11	0,00
Jumlah	921	953	1029	1.127	1.171	3,90

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
0-5	326	316	333	443	443	0,00
6-10	197	194	261	198	220	11,11
11-15	147	174	162	172	189	9,88
16-20	108	118	119	150	148	(1,33)
21-25	63	68	79	91	89	(2,20)
26-30	62	54	48	31	43	38,71
≥31	18	29	27	42	39	(7,14)
Jumlah	921	953	1.029	1.127	1.171	3,90

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Usis	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
<20						
21-25	43	27	43	74	75	1,35
26-30	171	193	221	250	253	1,20
31-35	201	210	228	221	237	7,24
36-40	166	172	165	188	194	3,19
41-45	192	189	201	197	174	(11,68)
46-50	102	112	112	125	147	17,60
≥51	46	50	59	72	91	26,39
Jumlah	921	953	1029	1127	1171	3,90

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
S3	2	2	1	1	3	200,00
S2	44	43	44	49	129	163,27
S1	231	234	262	282	370	31,21
D3	157	170	189	220	212	(3,64)
SMA	487	504	533	575	457	(20,52)
Jumlah	921	953	1029	1127	1171	3,90

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
Laki-Laki	716	747	810	880	903	2,61
Perempuan	205	206	219	247	268	8,50
Jumlah	921	953	1.029	1.127	1.171	3,90

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAAN	Jumlah Karyawan Per Tahun					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
Karyawan Tetap	921	953	1029	1127	1171	3,90
Tenaga Kontrak	311	376	421	430	144	(66,51)
Outsource	152	164	190	200	465	132,50
Jumlah	1.384	1.493	1.640	1.757	1.780	1,31

Jumlah Karyawan Bio Farma Berdasarkan Jabatan & Jenis Kelamin Selama 5 Tahun Terakhir

JABATAN	Jumlah Karyawan Per Tahun										Kenaikan/ Penurunan (%)	
	2012		2013		2014		2015		2016			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9/7	10/8
Kepala Divisi	16	6	14	9	14	9	17	8	17	9	0,0	12,5
Ahli Utama	0	0	2	0	4	1	5	2	5	2	0,0	0,0
Kepala Bagian	30	28	31	24	32	26	40	26	42	26	5,0	0,0
Ahli Madya	16	2	22	4	30	9	29	9	30	9	3,4	0,0
Kepala Seksi	84	41	83	40	85	44	105	54	107	55	1,9	1,9
Ahli Muda	16	7	19	13	19	14	23	17	24	24	4,3	41,2
Staf	55	47	48	47	57	46	56	51	66	53	17,9	3,9
Staf Muda	79	30	89	31	98	34	97	38	114	49	17,5	28,9
Pelaksana	393	26	414	25	450	25	487	30	477	29	(2,1)	(3,3)
Portfolio Mng Team	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Proj Integration Mng	0	2	1	1	1	1	1	2	1	2	0,0	0,0
Research Coordinator	2	0	1	0	1	0	1	0	3	0	200,0	0
Research S.O.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Researcher	2	2	4	1	4	1	4	1	2	3	(50,0)	200,0
Junior Researcher	8	13	4	10	4	9	4	9	3	7	(25,0)	(22,2)
Operation Staff	12	0	12	0	11	0	11	0	11	0	0,0	0
Jumlah	716	205	747	206	810	219	880	247	903	268	2,6	8,5
		921		953		1.029		1.127		1.171		



TESTIMONI INSAN BIO FARMA

Farah

(Staf Bagian Promosi)

“Saya bangga bekerja di Bio Farma, Perusahaan Vaksin yang terbesar di Asia Tenggara berdaya saing global. Bio Farma, selain menyehatkan masyarakat Indonesia juga ikut berperan aktif dalam menyehatkan masyarakat dunia, itulah suatu bentuk pengabdian Bio Farma kepada Negara. Pengalaman saya bekerja di Bagian Ekspor sangat banyak, saya bisa korespondensi dengan UNICEF dan hampir seluruh negara yang ada di Dunia. Inilah salah satu cara kami turut membantu menyehatkan anak-anak”.

Christian

(Staf Manajemen Produk)

“Banyak kesempatan yang saya peroleh di Bio Farma, saya banyak berkunjung ke daerah-daerah bahkan sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang Bio Farma dan produk-produk Bio Farma. Menariknya, Bio Farma tidak hanya Profit Oriented tapi juga Public Sector”.

Dewi Purnomo Rukmi

(Kepala Bagian Produksi
Vaksin Campak)

“Kesempatan kami bekerja di Bio Farma adalah bersama-sama untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya bangga bekerja di Bio Farma, karena Bio Farma adalah milik bangsa Indonesia, saya bangga bisa berjuang dan bisa menjadi bagian dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia”.

Arip Hidayat

(Research & Development)

“Saya pernah diberi kesempatan untuk Short Course di MIT (Massachusetts Institute of Technology) Cambridge, Amerika Serikat. Di Sana, Kami mempresentasikan tentang Indonesia dan kami sebagai wakil dari Bio Farma menjadi duta Bio Farma untuk mempromosikan tentang Bio Farma. Dengan bekerja di Bio Farma, kami mendapatkan banyak kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri”.

Neni

(Project Integration Manager
R & D)

“Saya dulu bercita-cita ingin bekerja di Bio Farma. Berawal dari saat SMA ayah saya meninggal dunia karena sakit Hepatitis yang dideritanya, dan saya berfikir bahwa satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah hepatitis adalah Vaksin. Dengan bekerja di Bio Farma kami bisa berkontribusi dalam membangun kesehatan dunia dengan Vaksin. Jadi kami juga berpartisipasi dalam Global Health Security”.

Komposisi Pemegang Saham

Per 31 Desember 2016, Bio Farma merupakan BUMN Non-listed Non-K keuangan, Pemegang Sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai :

1. Rincian nama Pemegang Saham yang meliputi 20 Pemegang Saham terbesar dan persentase kepemilikannya,
2. Rincian Pemegang Saham dan persentase kepemilikannya yang meliputi nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham, kelompok Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% dan
3. Nama Komisaris dan Direktur serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak memiliki entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang nama entitas anak dan/atau asosiasi, persentase kepemilikan saham, keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Struktur Grup Perusahaan

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak memiliki Struktur Grup Perusahaan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan Struktur Grup Perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV).



100%
KEPEMILIKAN
100% OLEH
PEMERINTAH
INDONESIA

Kronologis Pencacatan Saham

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM

Per 31 Desember 2016, Bio Farma merupakan Perusahaan Non Listed Non Keuangan sehingga baik Masyarakat, Karyawan, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%.

IKHTISAR SAHAM

Per 31 Desember 2016, Bio Farma merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM (TERMASUK PRIVATE PLACEMENT) DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM DARI AWAL PENERBITAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2016, Bio Farma merupakan salah satu BUMN Non Listed Non Keuangan atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang

1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (Corporate Action)
2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (Corporate Action)
3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.
4. Kronologis pencatatan saham, jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

Kronologis Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya dari Awal Penerbitan sampai dengan Akhir Tahun Buku

IKHTISAR OBLIGASI/SUKUK/OBLIGASI KONVERSI

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (Outstanding), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN EFEK LAINNYA

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak menerbitkan dan/atau pencatatan efek lainnya. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang

1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya.
2. Nilai penawaran efek lainnya.
3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan
4. Peringkat efek
5. Kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya, perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

Nama & Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Bio Farma per 31 Desember 2016, tidak memiliki entitas anak dan/atau tidak memiliki Kantor Cabang, namun memiliki Kantor Perwakilan di Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta.

Penyediaan serta Distribusi Nasional dan Internasional melalui:

PT Bio Farma
Jl. Pasteur No. 28
Bandung 40161
Indonesia
Tel. (62) 22 203 2755 ext. 747
Fax. (62) 22 204 1306
E-mail: sales@biofarma.co.id

Nama dan Alamat Lembaga aan/ atau Profesi Penunjang Pasar Modal

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak memiliki lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan serta nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

PER 31 DESEMBER 2016, BIO FARMA MEMILIKI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERSEROAN:

Kantor Akuntan Publik
Djoemarma, Wahyudin & Rekan
Jl. Dr. Slamet No. 55, Bandung
Tel. (62-22) 203 4044
Fax. (62-22) 203 7466
E-mail: kapdw@yahoo.com

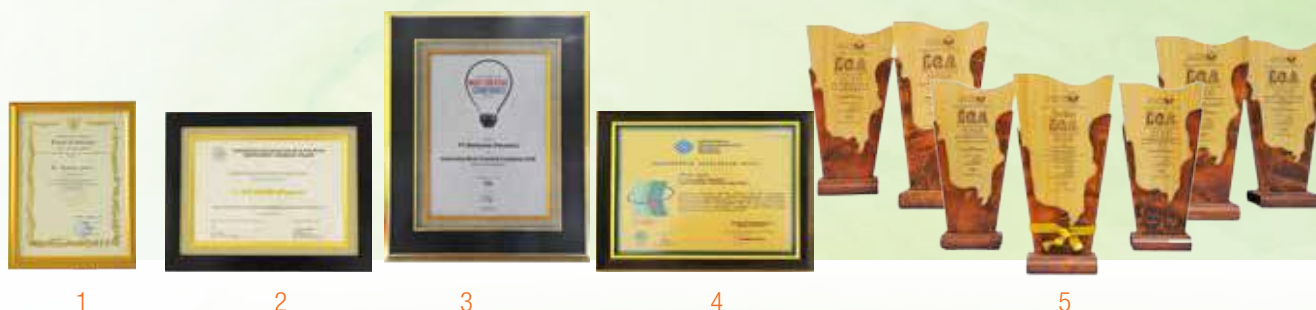
NOTARIS

Fathiah Helmi, SH.
Graha Irama Lt. 6C
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2, Kuningan
Jakarta 12950
Tel. (62-21) 5290 7304 / 5290 7305 / 5290 7306
Fax. (62-21) 526 1136



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

PENGHARGAAN



1

2

3

4

5

1

3 MARET 2016

Mitra Pembangunan Jawa Barat melalui program CSR/PKBL

Bio Farma menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai mitra pembangunan Jawa Barat melalui Program CSR/PKBL perusahaan tahun 2016. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan yang sekaligus meresmikan proyek-proyek CSR-PKBL Jawa Barat Tahun 2016, bertempat di Hotel Intercontinental Bandung, Resort Dago Pakar, Selasa (14/3).

2

5 APRIL 2016

Penghargaan Wajib Pajak

Bio Farma termasuk 24 wajib pajak (WP) yang berkontribusi besar terhadap total penerimaan pajak Pemerintah diserahkan oleh Menteri Keuangan RI sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan dalam kewajiban pembayaran pajak.

3

20 APRIL 2016

Indonesia Most Creative Company Marketers

Bio Farma Raih penghargaan "Indonesia Most Creative Company Marketeers" dari Majalah SWA

4

16 MEI 2016

Kecelakaan Nihil (Zero Accident)

Atas prestasi dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Bio Farma diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5

21 MEI 2016

Corporate Social Responsibility (CSR)

Bio Farma meraih 7 penghargaan bergengsi dalam bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada ajang Indonesia Green Awards 2016. Tujuh penghargaan tersebut, di antaranya di bidang penyelamatan sumber daya air, pengembangan pengolahan sampah terpadu, pelestarian keanekaragaman hayati, pelopor pencegahan polusi, pengembangan masyarakat, penghematan dan pengembangan energi baru dan terbarukan, dan *The Best Indonesia Green Awards 2016*. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh La Tofi, sebagai *chairman La Tofi School of CSR*, bertempat di Taman Tebet, Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, 21 Mei 2016.



6



7



8

6

7 JULI 2016 PROPER Emas

Untuk ketiga kalinya Bio Farma raih penghargaan tertinggi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Direktur Produksi Bio Farma Juliman, dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, bertempat di Istana Wapres, Jakarta.



7

Penghargaan PROPER Emas dari Provinsi Jawa Barat

BPLHD Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan PROPER Emas kepada Bio Farma. Penghargaan ini merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995.

8

18 JULI 2016 Anugerah Kekayaan Intelektual 2016 dan WIPO Award

Bio Farma Raih Anugerah Kekayaan Intelektual 2016 dan WIPO Award diterima oleh Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan Bio Farma dari Kementerian Hukum dan HAM RI.



9



10



11

9

27 JULI 2016**Anugerah Perlindungan Anak 2016**

Bio Farma Raih Penghargaan Perlindungan Anak dari KPAI atas konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan anak dengan menyediakan kebutuhan vaksin untuk bayi, usia sekolah dan dewasa.

11

25 AGUSTUS 2016**Warta Ekonomi**

Bio Farma Raih Penghargaan dari Warta Ekonomi Indonesia Social Business Innovation Company 2016, Category: Pharmacy – Program Pengembangan Kawasan Geopark di Hotel Pullman, Jakarta.

10

8 AGUSTUS 2016**BPJS**

Bio Farma Raih “Perusahaan Peduli Program Jaminan Pensiun” dari BPJS Ketenagakerjaan.



12



13



14

12

27 SEPTEMBER 2016**Annual Report Award 2015**

Bio Farma kembali meraih *Annual Report Award 2015* (ARA 2015). Bio Farma berhasil meraih juara II untuk kategori BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL) dan diterima oleh Direktur Keuangan Bio Farma, Pramusti Indrascaryo.

14

20 DESEMBER 2016**KIP 2016**

Untuk kali keempat, Bio Farma dapat penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016 dari Komisi Informasi Publik (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan Wapres JK kepada Direktur Produksi, Juliman.

13

14 DESEMBER 2016**Penghargaan SR 2016**

Bio Farma raih penghargaan "*Best Sustainability Report Category Manufacturers*" Penghargaan diserahkan langsung oleh Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Juri SRA 2016 dan diterima oleh Juliman, Direktur Produksi Bio Farma.

BIO FARMA LAPORAN TAHUNAN 2016



9. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



13. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



10. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



14. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



11. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



15. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



12. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



16. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.



17. Diberikan pada 29 April 2014, berlaku sampai dengan 31 Maret 2019.

III. Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., Singapura



21. Berlaku sampai dengan 12 Juli 2018.



18. Diberikan pada 14 Januari 2015, berlaku sampai dengan 14 Januari 2020.

IV. Occupational, Health And Safety Management System – OHSAS 18001:2007 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., Singapura



22. Berlaku sampai dengan 12 Juli 2018.



19. Diberikan pada 14 Januari 2015, berlaku sampai dengan 14 Januari 2020.

V. Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., Singapura



20. 27 Juni 2016 - Akreditasi ISO 9001 : 2015 - Bio Farma mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015 mengenai Standar Manajemen Mutu yang diberikan oleh L'loyds Register Quality Assurance tanggal 27 Juni 2016 - 26 Juni 2019.



23. Berlaku sampai dengan 30 Juni 2016.

SERTIFIKASI

VI. Laboratory Accreditation dari WHO Regional South East Asia



VII. Sertifikat Vaccine Vial Monitor dari Badan Kesehatan Dunia (WHO)



VIII. Bill & Melinda Gates Foundation Certificate of Appreciation dari Bill & Melinda Gates Foundation



IX. Geopark Cileutuh dari Komisi Nasional Indonesia Untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan



24. Geopark Cileutuh binaan Bio Farma sudah mendapatkan sertifikasi menjadi Geopark Nasional sesuai dengan Standar UNESCO pada. kerjasama PT Bio Farma (Persero) dengan Disbudpar & Pemprov Jabar. Diberikan pada 22 Desember 2015, tidak ada masa ED.

X. Program Pemantapan Mutu Eksternal Imunologi dari Bina Pelayanan Penunjang Medis & Sarana Kesehatan



25. Bio Farma mendapatkan sertifikasi telah mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal Imunologi. Diberikan pada 21 April 2015, tidak ada masa ED.

XI. Program Pemantapan Kualitas Ekstra Laboratorium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIN) Bidang Mikrobiologi dari PDS PatKLIN



26. Bio Farma mendapatkan sertifikasi telah mengikuti Program Pemantapan Kualitas Ekstra Laboratorium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIN) bidang Mikrobiologi. Diberikan pada Juni 2015, tidak ada masa ED.

XII. Program Pemantapan Kualitas Ekstra Laboratorium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIN) Bidang Hematologi, Kimia Klinik, Koagulasi dari PDS PatKLIN



27. Bio Farma mendapatkan sertifikasi telah mengikuti Program Pemantapan Kualitas Ekstra Laboratorium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik & Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIN) bidang Hematologi, Kimia Klinik, Koagulasi. Diberikan pada Agustus 2015, tidak ada masa ED.



PERISTIWA PENTING



22 JANUARI
Uji Emisi Kendaraan
Karyawan Bio Farma

Sebagai komitmen Perusahaan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan mewujudkan kawasan emisi bersih di Kota Bandung. Bio Farma membuktikannya dengan melaksanakan kembali uji emisi bagi kendaraan roda empat dan roda dua.

Uji emisi kendaraan ini ditujukan bukan hanya untuk kendaraan karyawan Bio Farma saja, tetapi juga bagi kendaraan operasional (garasi), truk-truk pengangkut vaksin (distribusi), kendaraan rekanan dan juga kendaraan tamu.



25 JANUARI - 10 FEBRUARI
Santri Sehat

Sebagai ikhtiar menanamkan hidup sehat di lembaga pendidikan dan masyarakat, Biofarma bekerja sama dengan Harian "PR" mengadakan roadshow "Santri Sehat" ke pesantren-pesantren di Kab. Tasikmalaya dari Senin-Rabu (25-27/1/2016). Roadshow diisi dengan materi pola hidup sehat dan pelatihan menulis.



17-FEBRUARI
Akreditasi ISO 17025

Bio Farma memiliki keahlian dalam *Life Science* sehingga dengan keahlian ini, Bio Farma bisa membantu pelaku industri makanan, minuman, farmasi dan kosmetik dalam melakukan pemeriksaan uji identifikasi mikro organisme, untuk mengetahui apakah produk mereka sudah terbebas dari cemaran mikroorganisme, sehingga produk mereka aman.

Tanggal 17 Februari 2016, Bio Farma menerima akreditasi ISO 17025. Dengan akreditasi ini Bio Farma akan membantu Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) untuk melakukan pengujian, uji makanan dan minuman, yang sampai dengan saat ini, jumlahnya mencapai 500 industri. Kedepannya sertifikat hasil pengujian dari Lab Mikrobiologi Bio Farma, dapat dijadikan rujukan BPOM untuk mengeluarkan izin edar produk. Akreditasi ISO 17025, menandakan Bio Farma sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyatakan bahwa Laboratorium Bio Farma telah menerapkan standar Sistem Manajemen Laboratorium yang diakui secara internasional.



13-MARET
Kunjungan 17 Duta Besar ke
Bio Farma

Bio Farma mendapat kehormatan kunjungan dari Duta Besar yang tergabung dalam organisasi JAGA (Jakarta Ambassadors Golf Association). Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Pemasaran Mahendra Suhardono, Direktur Produksi, Juliman serta didampingi oleh jajaran staf Bio Farma.

Sejumlah 17 Duta Besar yang tergabung dalam JAGA tersebut memiliki kegiatan diplomatik tour, untuk mempromosikan potensi daerah, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan budaya kepada para duta besar negara sahabat.



15-MARET
Pekan Imunisasi Nasional
Polio

Mendukung program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bio Farma turut mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2016 yang berlangsung mulai hari ini hingga 15 Maret 2016. Bio Farma menjadi tuan rumah pelaksanaan PIN Provinsi Jawa Barat di hadir oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung, serta pimpinan Kementerian Kesehatan dan Bio Farma.

PIN Polio ini digelar secara serentak diseluruh provinsi

Indonesia yang ditargetkan untuk bayi usia 0-59 bulan. Dengan tujuan memastikan bahwa seluruh anak Indonesia telah memiliki tingkat kekebalan yang tinggi terhadap penyakit polio. Dengan dilakukannya imunisasi juga mampu mengurangi resiko penyebaran virus polio di negara lain. PIN Polio 2016 ini merupakan bagian dari rencana anti vaksin global pada tahun 2020 mendatang dengan tujuan mencapai dunia bebas polio.



16-MARET
Distributor Meeting

Program Sosialisasi dan koordinasi distributor resmi Bio Farma untuk mendapatkan paparan product knowledge terbaru serta koordinasi distribusi produk Bio Farma.



05-APRIL

**Bio Farma Raih Penghargaan
Wajib Pajak**

Ditjen Pajak memberikan penghargaan kepada 24 Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi besar terhadap total penerimaan pajak 2015. Bio Farma termasuk salah satu dari 24 wajib pajak tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, kepada Pramusti Indrascaryo,

Direktur Keuangan Bio Farma. Bio Farma sangat fokus terhadap aspek kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Bio Farma juga pernah raih penghargaan ini pada tahun sebelumnya.



10-APRIL

Bio Farma adakan *School of Vaccine for Journalis* di Mataram Lombok

Bio Farma kembali mengadakan acara Media Gathering dan Workshop dihadiri 60 awak media Bandung, Jakarta dan Mataram. Acara yang diselenggarakan di Mataram pada tanggal 10 - 12 April 2016, mengambil tema Sinergi Farmasi Nasional untuk Kemandirian, menghadirkan narasumber dari berbagai institusi yang berkaitan dengan imunisasi. seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menghadirkan dr. Piprim B Yanuarso., Sp A (K), Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Arif Budisusilo mengenai Perkembangan Industri Farmasi dari perspective Media dan

bagaimana membuat indept reportase Bioteknologi. Komisaris Bio Farma Ihsan S Latief, membahas CSR Bio Farma dan Corporate Secretary Bio Farma, Rahman Rustan, menyampaikan Sinergi Industri Farmasi untuk kemandirian, dengan moderator Redaktur Pelaksana Koran Sindo Hanna Fahrana. Dalam media gathering di kota Mataram, dihadiri juga oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang menyampaikan sosialisasi mengenai persiapan NTB menjadi destinasi wisata halal pertama di dunia.

PERISTIWA PENTING



12-MEI
Sinergi Riset Bio Farma dan UNPAD

Bio Farma dan 26 BUMN lain kembangkan Riset bersama UNPAD dalam *BUMN Center of Excellence* sebagai wujud sinergi Pentahelix. Komitmen kerja sama Unpad dan BUMN diantaranya Bio Farma diperkuat dengan penan-datanganan nota kesepahaman Kementerian BUMN dan Unpad tentang Unpad-BCE sebagai pu-sat pengembangan keunggulan BUMN

untuk menciptakan daya saing global. Yang dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan In-formatika Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, serta sejumlah Direktur Utama BUMN.



24-JUNI
Pasar Murah BUMN Hadir Untuk Negeri

Bio Farma, ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara “Sinergi BUMN Hadir untuk Negeri”, yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN Republik Indonesia. Salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Operasi Pasar Murah.

Kegiatan yang secara serentak dilaksanakan oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia, dibuka secara resmi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Garut, pada tanggal 24 Juni 2016. Turut hadir dalam acara peresmian Direktur SDM Bio Farma

Andjang Kusumah, Kepala Divisi CSR Bio Farma, R. Herry dan Direksi dari BUMN lain. Kegiatan Pasar Murah yang berbarengan dengan Bulan Suci Ramadhan 1437 H, diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bio Farma sebagai BUMN yang terletak di Jawa Barat, ingin ikut membagi kebahagiaan kepada masyarakat dengan melaksanakan Pasar Murah.

**27-JUNI**

**Mou dengan PMI, Bio Farma
Kembangkan Pengelolaan
Plasma Darah**

Produsen vaksin global, Bio Farma, telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan plasma darah untuk menjadi Albumin dan Globulin dari Palang Merah Indonesia (PMI). Kepercayaan tersebut dituangkan

dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan PMI di Gedung PMI Pusat, Jakarta, Senin (27/6/2016). Penandatanganan dilakukan oleh Plh. Ketua Umum Ginanjar Kartasasmita dengan Presiden Direktur Bio Farma, Iskandar.

**15-JULI**

**Bio Farma Undang Media
Nasional Kunjungi Fasilitas
Proses Produksi Vaksin**

Bio Farma mengundang media massa nasional guna melihat langsung fasilitas produksi, riset dan pengembangan (R & D,) pengemasan, dan distribusi vaksin di Bandung. Kegiatan ini bekerjasama dengan Biro Komunikasi Publik Kementerian

Kesehatan dan Humas Badan POM. Pertemuan bertujuan menyamakan pemahaman pihak media mengenai isu vaksin terkini dan peran penting Bio Farma sebagai industri vaksin nasional.

**18-JULI**

**Bio Farma Raih Anugerah
Kekayaan Intelektual 2016
dan WIPO Award**

Pada ajang Anugerah Kekayaan Intelektual Nasional 2016 dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) Awards 2016, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI, Bio Farma raih anugerah kategori Inovasi dan IP utk *Enterprise* / korporasi. Penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kala di Istana Wapres diterima oleh Pramusti Indrascaryo, Direktur Keuangan Bio Farma.

Bio Farma sangat bangga menerima penghargaan ini, setelah sebelumnya dilakukan visitasi, wawancara dan penilaian yang ketat oleh tim Juri ke Bio Farma di Bandung. Bagi kami inovasi ini sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan, saat ini kami terus mengembangkan sistem dalam penerapan dan pengembangan inovasi baik dalam bentuk inovasi produk, proses dan strategi bisnis.

PERISTIWA PENTING

**27-JULI****Bio Farma Raih Penghargaan
Perlindungan Anak dari KPAI**

Bio Farma mendapatkan “Penghargaan Anugerah Perlindungan Anak Indonesia 2016” dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk kategori Badan Usaha. Penghargaan yang diberikan oleh Sekjen KPAI Erlinda Iswanto kepada Direktur Pemasaran Bio Farma, Mahendra Suhardono. Ini sebagai bukti kontribusi Bio Farma dalam menyediakan vaksin yang berkualitas internasional, untuk melindungi balita dan anak sejak 126 tahun yang lalu.

KPAI menilai Bio Farma sebagai BUMN memiliki konsistensi dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan anak dengan memenuhi 5 juta kebutuhan vaksin untuk bayi, 27,6 juta vaksin anak usia sekolah dan 15 juta vaksin wanita usia subur setiap tahunnya. Bio Farma juga memenuhi semua kebutuhan vaksin dasar untuk balita seperti polio, campak, hepatitis B, BCG, DPT dan Pentabio. Selain memproduksi vaksin, Bio Farma memiliki kemampuan.

**14-AGUSTUS****Jalan Sehat Program BUMN
Hadir untuk Negeri**

Dalam rangka program BUMN hadir untuk negeri wilayah Jawa Barat, 5 BUMN (PT PN III, Bio Farma, PT PN VIII, Perum Jasa Tirta 2, PT Pupuk Kujang) gelar Jalan Sehat dan pemeriksaan kesehatan yang dihadiri oleh 1.000 masyarakat.

**19-AGUSTUS****Peneliti Muda Bio Farma
Terpilih sebagai anggota
ALMI**

Neni Nurainy, peneliti muda Bio Farma terpilih menjadi salah satu dari 40 anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) yang dikukuhkan oleh Bj Habibie sekaligus peluncuran buku Sains 45. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP), dengan ketua Prof. Sangkot Marzuki, memilih 40 anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Ilmuwan muda yang terpilih berusia dibawah 45 tahun, memiliki karir dari berbagai lintas disiplin, dengan latar belakang pendidikan minimal Ph.D (*Doctor of Philosophy*). Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan scientific culture di Indonesia agar kedepannya sains dan teknologi dapat menjadi solusi untuk bangsa. Hasil dari terbentuknya ALMI adalah sebuah buku yang berisi solusi hasil pemikiran 17 ilmuwan muda dengan judul “Buku Sains 45 – Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan.” Buku yang berisi tentang 45 pertanyaan krusial atas perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia sampai 2045 dibuat dalam rangka menyongsong satu abad kemerdekaan Republik Indonesia.



24-25 AGUSTUS
FRLN 2016

Sebagai tindak lanjut Forum Riset Vaksin Nasional (FRVN) Tahun 2015 bertemakan “Hilirisasi Hasil Riset Nasional Bidang *Life Science* untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Bangsa”. Tahun ini kembali diselenggarakan Forum Riset *Life Science* (FRLN) bertemakan, “Tantangan Menuju Kemandirian Riset Nasional Bidang *Life Science*”.

Perubahan dari FRVN menjadi FRLN bertujuan memperluas cakupan pengembangan produk sesuai misi Bio Farma yaitu, “Menyediakan dan Mengembangkan Produk *Life*

Science Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Kualitas Hidup”. Produk *Life Science* dimaksud adalah produk yang dihasilkan dari organisme hidup melalui proses bioteknologi.

FRLN bertujuan meningkatkan sinergi riset bidang *Life Science* antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, serta komunitas pendukung. Tujuannya untuk mempercepat hilirisasi serta tujuan akhir komersialisasi produk *Life Science* yang akan diakui sebagai produk nasional hasil kerja nyata putra-putri terbaik Bangsa Indonesia.



30-AGUSTUS
Siswa Mengenal Nusantara (SMN)

Sebanyak lima BUMN di Jawa Barat yakni PT Bio Farma, PTPN III, PTPN VIII, Perum Jasa Tirta II (PJT II) dan PT Pupuk Kujang mengirimkan 20 Siswa SMA/SMK berprestasi dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat Ke Sulawesi Utara. Para pelajar tersebut mengikuti

pertukaran pelajar dengan siswa dari Sulawesi Utara dalam Program Siswa Mengenal Nusantara 2016 (SMN 2016) yang diprakarsai oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan proses seleksi sinergi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.



30-AGUSTUS
Karyawan Bio Farma Raih Penghargaan 100 kali Donor

Karyawan Bio Farma Dede Wanda mendapatkan penghargaan “Satyalancana Kebaktian Sosial Donor Darah Sukarela (DDS)” dari Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Dede Wanda sudah 105 kali donor darah, ini merupakan kegiatan positif untuk kesehatan dan untuk membantu orang lain yang membutuhkannya.

Sebelum penyematan penghargaan oleh Wapres, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melepas para ‘Pahlawan Kemanusiaan’ tersebut di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Aksi donor darah ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat lain agar memiliki kesadaran untuk menyumbangkan darahnya kepada yang membutuhkan.

PERISTIWA PENTING



SEPTEMBER - OKTOBER
BUMN Mengajar

Direksi Bio Farma memberi inspirasi siswa SMA/SMK di 6 kota dan kabupaten Jawa Barat dalam program BUMN Mengajar untuk meningkatkan kebanggaan dan minat berkarya di BUMN Nasional.

Program BUMN Mengajar ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan difasilitasi oleh seluruh BUMN dengan wilayah kerja di 34 provinsi seluruh

Indonesia yang dimulai sejak bulan Mei sampai dengan Desember 2016. Dalam kegiatan ini, Bio Farma bertanggung jawab untuk berkunjung ke sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah sekitar lokasi perusahaan.

Bio Farma berbagi pengetahuan kepada para siswa tentang profil perusahaan, proses bisnis, dan berbagai macam profesi yang ada di BUMN.



02-SEPTEMBER
Bio Farma berperan aktif dalam repatriasi aset dan sosialisasikan Tax Amnesty kepada Karyawan

Sebagai bentuk apresiasi dan keterlibatan terhadap program pemerintah dalam mendukung pembangunan bangsa. Bio Farma selenggarakan sosialisasi *Tax Amnesty* untuk seluruh karyawan Bio Farma dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jendral Pajak untuk mendukung program Pemerintah.

Sosialisasi ini merupakan salah satu wujud kontribusi Bio Farma dalam mensukseskan program perpajakan, Bio Farma pun berperan aktif dalam repatriasi aset (menginvestasikan aset di Indonesia selama jangka waktu paling singkat 3 tahun)



10-SEPTEMBER
Peresmian Taman Vaksinasi

Walikota Cimahi resmikan Taman Vaksinasi untuk mendekatkan layanan kesehatan dan pos imunisasi dengan warga yang merupakan program CSR Bio Farma bidang Lingkungan dan Kesehatan

Walikota Cimahi meresmikan Taman Vaksinasi di Kompleks Fadjar Raya Estate, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, taman ini untuk mendukung Program

Pemerintah dalam pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dan POSBINDU (Pos Binaan Terpadu) khususnya di RW-24 yang telah dilaksanakan secara Rutin setiap Bulan, bagi anak-anak Balita dan Para Lansia maupun Pra Lansia.

**16-SEPTEMBER****Bantuan CSR Bio Farma
untuk korban banjir Garut**

Hujan deras yang melanda kota Garut pada tanggal 20 September 2016 dini hari, telah menyebabkan bencana banjir bandang, yang mengakibatkan ratusan rumah di enam Kecamatan Garut antara lain; Bayongbong, Pasirwangi, Samarang, Tarogong Kidul dan Banyuwesi hanyut terbawa banjir, dan menelan puluhan korban jiwa. Banjir bandang yang diakibatkan meluapnya sungai Cimanuk juga ikut menerjang fasilitas umum seperti RSUD Dr Slamet, Kecamatan Tarogong, Garut.

Bio Farma sebagai BUMN yang keberadaannya dekat dengan kota Garut, bersama dengan relawan – relawan dari Kodim 0611 Garut, Denpo, Garut, Yonif 301, Polres Garut, Brimob, Satpol PP, BPBD Garut, SAR Garut, Kwarcab, Polantas, FKPN Garut dan Basarnas, membantu untuk meringankan beban para korban bencana banjir dengan membuka Posko Penanggulangan Bencana Alam Garut yang dipusatkan di Makodim 0611 Garut.

**26-30 SEPTEMBER****Bio Farma promosikan
Geopark Ciletuh ke
Mancanegara**

Bio Farma secara konsisten terus mempromosikan pengembangan Geopark (Taman Geologi) Ciletuh Palabuhanratu, Jawa Barat ke dunia internasional, termasuk pada Konferensi Geopark UNESCO di Inggris pada 26-30 September 2016.

Konferensi Internasional UNESCO *Global Geopark Network* (GGN) itu sendiri diselenggarakan untuk yang ketujuh kalinya di Torquay, kawasan English Riviera, Inggris. Konferensi tersebut dihadiri oleh sekitar 800 anggota delegasi dari 30 negara.

**27-SEPTEMBER****Penghargaan Annual Report
Award 2015**

Bio Farma kembali meraih *Annual Report Award* 2015 (ARA 2015). Bio Farma berhasil meraih juara II untuk kategori BUMN Non Keuangan Non Listed (BNKNL), Anugerah yang diserahkan oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, diterima Direktur Keuangan Bio Farma, Pramusti Indrascaryo.

Penghargaan ini merupakan prestasi yang menggambarkan bahwa Bio Farma sebagai BUMN kelas dunia, secara konsisten dan berkomitmen terus menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG)

dan menerapkan keterbukaan informasi. Hal ini menjadi motivasi bagi Bio Farma untuk tidak hanya menerapkan GCG tetapi secara konsisten untuk terus meningkatkan GCG sehingga siap untuk memenangkan persaingan global dalam industri vaksin. Penghargaan ARA ini terselenggara atas kerjasama yaitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, BEI, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

PERISTIWA PENTING



02-NOVEMBER

**Kriteria Penilaian Kinerja
Unggul (KPKU)**

Bio Farma raih Penilaian KPKU dengan skor 520,25 dengan kategori *Good Performance*



15-NOVEMBER

**Meeting Vaccine
Manufactures Group OIC
Countries**

Bio Farma menjadi tuan rumah pertemuan *Vaccine Manufactures Group* (VMG) untuk negara Islam yang bertujuan untuk kemandirian produsen Vaksin di negara Islam dihadiri oleh 10 negara Islam.



16-18 November

**Bio Farma, dipercaya
menjadi Tuan Rumah
Workshop Produksi Vaksin
Negara Islam (OIC)**

Bio Farma, BUMN produsen vaksin di Indonesia dipercaya Organisasi Kerjasama Islam menjadi tuan rumah program *workshop* produksi vaksin bagi negara Islam, bertempat di Exhibition room, Lantai 3 kawasan Farma, pada 15-18 November 2016. Workshop ini akan diikuti oleh peserta dari negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah memiliki industri vaksin negara yang sedang mempersiapkan diri untuk membuat

vaksin di negaranya. Saat ini lebih dari 10 negara akan hadir yaitu Pakistan, Turki, Tunisia, Malaysia, Iran, Arab Saudi, Maroko, Senegal, Bangladesh, serta lembaga dunia yaitu *World Health Organization* (WHO), UNICEF, dan *Islamic Development Bank* (IDB), *Statistical, Economic, and Social Research and Training Centre for Islamic Countries* (SESCRIC) yang berpusat di Turki, *Global Alliance for Vaccines and Immunisation* (GAVI) yang berpusat di Jenewa.



14-DESEMBER
Penghargaan SR 2016

Bio Farma raih penghargaan “*Best Sustainability Report Category Manufacturers*” Penghargaan diserahkan langsung oleh Sarwono Kusumaatmadja, Ketua Dewan Juri SRA 2016 dan diterima oleh Juliman, Direktur Produksi Bio Farma.

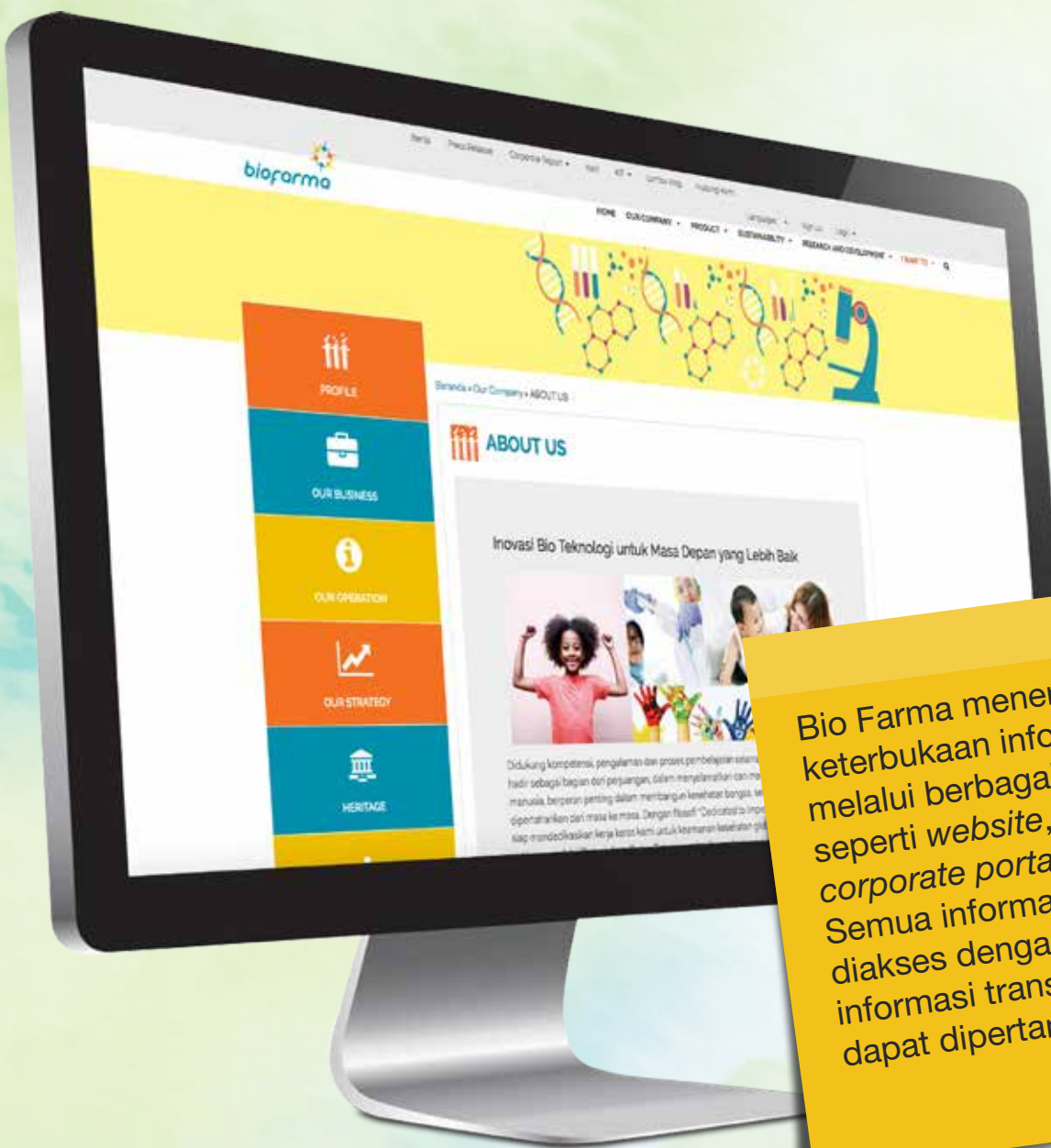


20-DESEMBER
Penghargaan KIP 2016

Untuk kali keempat, Bio Farma mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016 dari Komisi Informasi Publik (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan Wapres JK kepada Direktur Produksi, Juliman . Penghargaan tersebut dengan raihan nilai 81,27 memberikan arti penting bagi Perseroan termasuk terhadap kinerja. Penerapan keterbukaan informasi publik ini mampu mendorong korporasi untuk bisa bersaing secara global, Penghargaan ini merupakan prestasi bagi Bio Farma.

Penilaian tersebut melalui assessment yang ketat dari Komisi Informasi Pusat tahun 2016 dilakukan sepanjang tahun tersebut melalui Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self-Assessment Questionnaire (SAQ)* sebagai alat ukur bagi Badan Publik dalam menjalankan amanah UU KIP. Penilaian tahap akhir dilakukan dengan visitasi ke badan publik untuk mengukur indikator pelayanan informasi publik dan indikator pengelolaan informasi dan dokumentasi dari badan publik.

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN



Bio Farma menerapkan keterbukaan informasi publik melalui berbagai media, seperti website, portal BUMN, corporate portal, microsite. Semua informasi dapat diakses dengan mudah dan informasi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL (PENGAWASAN INTERNAL)

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Dewan Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1	Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
2	Heridadi	Komisaris	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
3	Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
4	Mohamad Subuh	Komisaris	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
5	Nizar Yamani	Komisaris	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
6	Paruli Lubis	Komisaris	12-May-16	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/ KBUMN	Sharing session
			09-Dec-16	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Pedoman Pelaksanaan Program Orientasi Komisaris Baru Bio Farma

Pelaksanaan program orientasi Komisaris Baru Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011. tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator / Paramater Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN.
3. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan khusus Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktivitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, company profile, sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy*, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Dalam acara program pengenalan tersebut Dewan Komisaris yang baru sepakat akan menghindari potensi untuk terlibat dalam kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Direksi, dan menghindari potensi terjadinya gratifikasi serta berkomitmen akan melaksanakan GCG sebaik-baiknya. Dewan Komisaris juga telah menyepakati pembagian tugas di antara Komisaris.

Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang (*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Selama tahun 2016 tidak ada terjadinya perubahan komposisi dan jumlah Dewan Komisaris Bio Farma sehingga tidak adanya kegiatan orientasi bagi Dewan Komisaris baru.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK DIREKSI

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2016, Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:



No	Nama Direksi	Jabatan	Tanggal	Kegiatan / Agenda	Penyelenggara	Tempat Pelatihan	Kategori
1	Iskandar	Direktur Utama	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			23 Januari 2016	Musykernas Pusat Zakat Umat XIII	Pusat Zakat Umat	Soreang	Ceramah Umum- Narasumber
			30 Maret 2016	Studium Generale KU 4078	ITB	Bandung	Kuliah Umum- Narasumber
			31 Maret 2016	Pengembangan Vaksin Saat ini dan di Masa yang Akan Datang	Ikatan Apoteker Indonesia	Jakarta	Forum Group Discussion- Narasumber
			13 April 2016	Sinergi antara Serikat Pekerja dan Direksi dalam Upaya Menjadikan PT BF Sebagai Perusahaan Kelas Dunia	Federasi Serikat Pekerja BUMN	Bandung	Seminar- Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop- Narasumber
			30-31 Mei 2016	Perumusan Draft Naskah Kerjasama Riset, Perizinan, dan Produksi Diagnostik Kit Deteksi Dini GM GAD65	Kemenristek Dikti dan Universitas Brawijaya	Malang	Workshop- Narasumber
			27-29 Mei 2016	Sinergi BUMN	Kementerian BUMN, Parapat	Sumut	Focus Group Discussion- Peserta
			18 Agustus 2016	Integrasi ITB 2016	ITB	Bandung	Talkshow- Narasumber
			24-25 Agustus 2016	Forum Riset Life Science Nasional	Bio Farma	Bio Farma	Forum Riset- Narasumber
			5 September 2016	Leadership Workshop	Bio Farma	Bio Farma	Workshop- Narasumber
			14 November 2016	Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional	Dewan Riset Nasional	Jakarta	Seminar- Narasumber
			19 November 2016	Integrasi Geopark Ciletuh	SMPN 1 Ciemas	Sukabumi	Workshop- Narasumber
2	Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop- Narasumber
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Seminar- Narasumber
3	Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			17 Juli 2016	CVMN workshop on clinical studies management and pharmacovigilance strategies	DCVMN	Bali	Workshop

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL (PENGAWASAN INTERNAL)

No	Nama Direksi	Jabatan	Tanggal	Kegiatan / Agenda	Penyelenggara	Tempat Pelatihan	Kategori
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop
			19 Juli 2016	Indonesia Lawyers Club	Indonesia Lawyers Club	Jakarta	FGD
			21 Juli 2016	Pemred Gathering			Diskusi Panel
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Workshop
4	Andjang Kusumah	Direktur SDM	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop-Narasumber
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Seminar-Narasumber
			20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop-Narasumber
5	Sugeng Raharso	Direktur SDM	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Seminar-Narasumber
			20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop-Narasumber
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Seminar-Narasumber
6	Juliman Fuad	Direktur SDM	20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop-Narasumber
			8-10 Desember 2016	Performance Management System	Dunamis	Adimulia Hotel Medan	Seminar-Narasumber
			20-21 Januari 2016	Plan of Action	Bio Farma	Bandung	Workshop - Narasumber
			12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali	Workshop-Narasumber



PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Pedoman Pelaksanaan Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi Direksi Baru Bio Farma mengacu pada

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator / Parametr Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN
3. Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan khusus Direksi, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, buku sejarah perusahaan, Dokumen terkait GCG, *product knowledge*, serta diakhiri dengan kunjungan ke area produksi vaksin.

Direksi baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan baik yang skala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang (*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Selama tahun 2016 tidak ada perubahan anggota Direksi Bio Farma jadi tidak adanya Program Orientasi bagi Direksi Baru.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KOMITE AUDIT

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Komite Audit dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit. Sepanjang tahun 2016, anggota Komite Audit telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL (PENGAWASAN INTERNAL)

Nama Peserta	Jabatan	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
M. Asawir	Komite Audit	<i>Workshop dampak penerapan PMK 191 bagi Perusahaan</i>	IAI Jakarta	IAI Pusat Menteng	14 Januari 16	14 Januari 16
M. Asawir Harahap	Komite Audit	<i>Training Financial risk management</i>	IAI Jakarta	Jakarta	20 September 16	22 September 16
Afrizal	Komite Audit	<i>Training Financial risk management</i>	IAI Jakarta	Jakarta	20 September 16	22 September 16

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT. Bio Farma (Persero) per 31 Desember 2016 tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi Dan Remunerasi.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK KOMITE LAINNYA

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang

pelaksanaan tugas Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Sepanjang tahun 2016, anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah mengikuti berbagai program pelatihan.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK SEKRETARIS PERUSAHAAN

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Guna menunjang kinerja Sekretaris Perusahaan serta menambah wawasan dalam bidang Good Corporate Governance maka selama tahun 2016, program pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:



Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

No	Tgl	Topik	Tempat Pelatihan
1	29 November 2016	KPKU BUMN Tahun 2016	Bandung
2	5 s/d 6 September 2016	<i>Leadership strategic thinking for leading corporate action</i>	Bandung
3	28 Juli 2016	Pengembangan Kepemimpinan	Bandung
4	20 Juni 2016	Persiapan & uji coba sertifikasi produk halal	Bandung
5	22 November 2016	Sosialisasi <i>assessment & leadership commitment</i>	Bandung
6	2 September 2016	<i>Tax Amnesty</i>	Bandung

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNTUK UNIT AUDIT INTERNAL

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWASAN INTERNAL (PI)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai Pengawasan Internal (PI), mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop selama tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

No	Topik	Jabatan
1	"Strategic Partnership : Mengoptimalkan Partnership Fungsi Internal Audit dalam mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"	1. Kepala PI 2. Ahli Madya 3. Ahli Madya 4. Ahli Muda 5. Ahli Muda 6. Ahli Muda 7. Ahli Muda 8. Ahli Muda
2	<i>Leadership</i>	Kepala PI
3	<i>Training Microsoft Word</i>	1. Ahli Madya
4	Ujian CA/Certified of Accountant	1. Ahli Madya 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Muda
5	<i>Creating Database Program with Access 2010 for Non Programmer (Microsoft Access)</i>	1. Ahli Madya 2. Ahli Madya 3. Ahli Madya 4. Ahli Muda 5. Ahli Muda
6	<i>Review & Exam CIPM (Certified Information Project Manager)</i>	1. Ahli Madya
7	Asesor KPKU/Kriteria Penilaian Kinerja Unggul	1. Ahli Madya
8	CRMA Review Course	1. Ahli Madya
9	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pribadi untuk Asisten Manajer PT Bio Farma "Building The Solid Ground"	1. Ahli Muda 2. Ahli Muda 3. Ahli Muda 4. Ahli Muda
10	Dasar-dasar Internal Auditing untuk Auditor Anggota Tim	1. Ahli Muda 2. Ahli Muda
11	<i>Risk Based Audit</i>	1. Ahli Muda
1	<i>Competency Based Leadership</i>	Kepala PI

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT INTERNAL (PENGAWASAN INTERNAL)

No	Topik	Jabatan
2	KPKU BUMN Tahun 2016	1. Kepala PI 2. Ahli Madya
3	<i>Leadership strategic thinking for leading corporate action</i>	Kepala PI
4	Pemetaan Minat & Bakat Aktifitas Produktif dalam Rangka Pemberdayaan & Diskusi Mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP) # 3	1. Kepala PI 2. Ahli Madya
5	Pengembangan Kepemimpinan	
6	<i>Sosialisasi assessment & leadership commitment</i>	
7	<i>Tax Amnesty</i>	1. Kepala PI 2. Ahli Madya
8	<i>Vision and Portfolio</i>	
9	Akuntansi kombinasi & konsolidasi serta aspek perpajakannya	Ahli Madya
10	Asesor KPKU	Ahli Madya
11	<i>Chartered accountant (CA)</i>	1. Ahli Madya 2. Ahli Muda
12	<i>Certified international project management</i>	Ahli Madya
13	<i>Microsoft Access # 1</i>	1. Ahli Madya 2. Ahli Muda
14	<i>Microsoft Word # 4</i>	Ahli Madya
15	Penataan sistem karir	Ahli Madya
16	Pendampingan KPKU PT. Bio Farma Tahun 2016	Ahli Madya
17	<i>Review certified risk management assurance (CRMA)</i>	Ahli Madya
18	Ujian sertifikasi <i>Chartered accountant (CA)</i> Termin Ke 1 "Manajemen Strategik & Sistem Pengendalian Internal"	Ahli Madya
19	Ujian sertifikasi <i>Chartered accountant (CA)</i> Termin ke 3 "Manajemen Keuangan Lanjutan & Sistem Pengendalian Internal"	Ahli Madya
20	Akuntansi kombinasi & konsolidasi serta aspek perpajakannya	Ahli Muda
21	Dasar-dasar internal auditing untuk auditor anggota tim	Ahli Muda
22	Financial Planning	Ahli Muda
23	Pemetaan Minat & Bakat Aktifitas Produktif dalam Rangka Pemberdayaan & Diskusi Mengenai Masa Persiapan Pensiun (MPP) # 3	Ahli Muda
24	Risk based internal audit	Ahli Muda
25	<i>Talent mapping</i>	Ahli Muda
26	Ujian sertifikasi <i>Chartered accountant (CA)</i> Termin ke 3 "Manajemen Keuangan Lanjutan & Sistem Pengendalian Internal"	Ahli Muda
27	Ujian sertifikasi <i>Chartered accountant (CA)</i> Termin ke 3 "Pelaporan Korporat & Manajemen Perpajakan"	Ahli Muda

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi *Quality Assurance*

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai Auditor mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun *workshop* yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Internal Auditor QA dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Internal Auditor QA. Sepanjang tahun 2016, anggota Internal Auditor QA telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Tanggal	Jumlah Auditor Yang Mengikuti Pelatihan
1	Pelatihan Lead Auditor ISO <i>Integrated Management System</i> (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007 berdasarkan ISO 19011) oleh BSI (<i>British Standard Institution</i>) Group Indonesia kepada seluruh Lead auditor Bio Farma.	4-6 Januari 2016 dan 13-15 Januari 2016	52
2	<i>Coaching</i> pelaksanaan inspeksi GMP bersama konsultan GMP David Buckley	18 Maret 2016 dan 8 Desember 2016	4



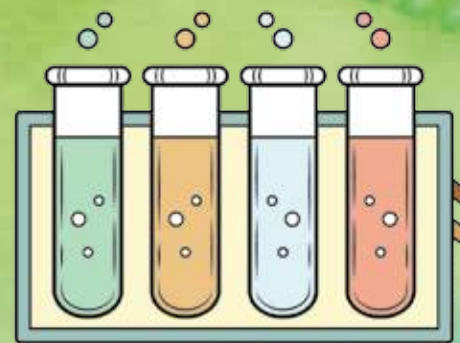
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI,
KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN DAN UNIT AUDIT
INTERNAL (PENGAWASAN INTERNAL)



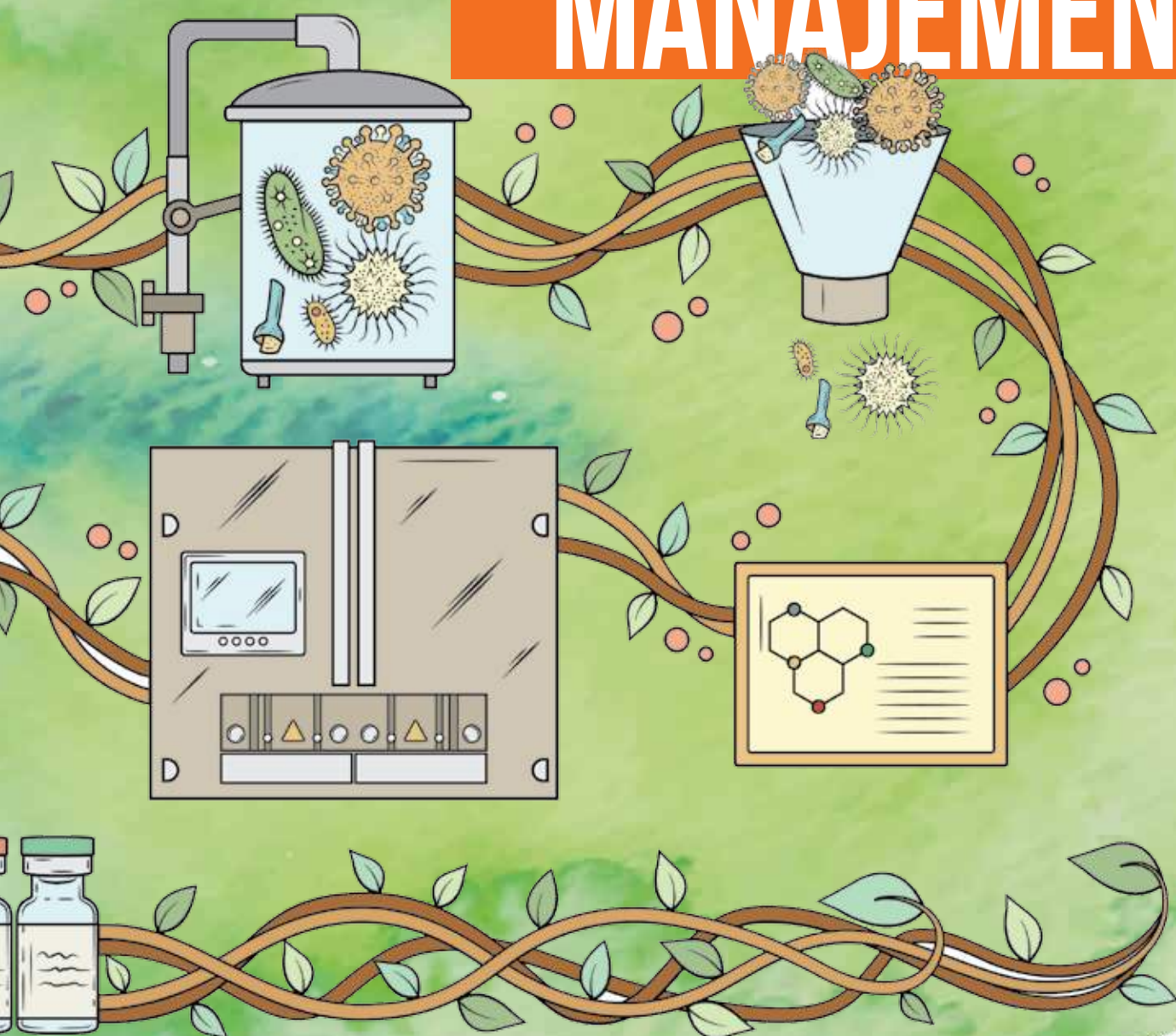


SELF-RELIANCE OF VACCINES

Tantangan Kemandirian bahan baku dan tantangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi fokus kami dalam menentukan arah dan kebijakan strategis ke depan, kami produsen vaksin dalam negeri yang sebagian bahan bakunya sudah mandiri, saat ini harus mempersiapkan untuk produksi bahan baku untuk pasar global.



ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN





ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

PERGERAKAN BEBERAPA HARGA KOMODITAS KHUSUSNYA ENERGI MENGALAMI KENAIKAN PADA TRIWULAN IV TAHUN 2016.

PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

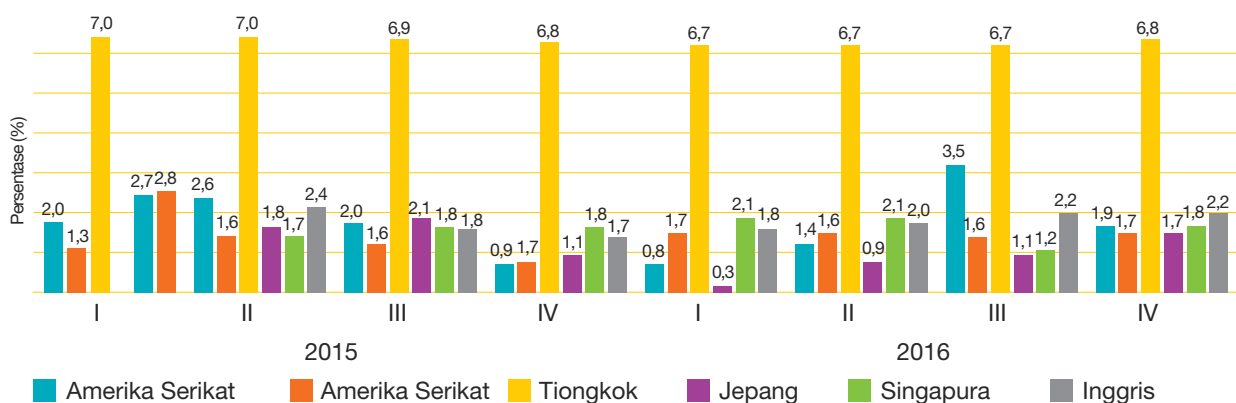
Perekonomian global mulai mengalami perbaikan seiring perbaikan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang, serta beberapa negara emerging market seperti Tiongkok, negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil, dan Rusia. Pertumbuhan ekonomi dunia masih didorong oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang serta pertumbuhan volume perdagangan dunia yang meningkat yang didukung oleh mulai membaiknya harga komoditas dunia khususnya harga energi. Namun, walaupun perekonomian global ini mengalami perbaikan, tetapi pertumbuhannya masih lebih rendah 0,1 persen dari pertumbuhan tahun 2015 yang sebesar 3,1 persen (YoY).

Perekonomian negara-negara di berbagai kawasan pada triwulan IV tahun 2016 mulai tumbuh membaik namun masih moderat. Amerika Serikat (AS) tumbuh sebesar 1,9 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan III tahun 2016 yang tumbuh sebesar 3,5 persen (YoY). Penurunan ini disebabkan oleh kinerja perdagangan ekspor Amerika Serikat yang menurun menjadi 4,3 persen setelah sebelumnya

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen (YoY) lebih rendah dari triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,5 persen akibat kinerja perdagangan yaitu adanya penurunan ekspor dan peningkatan impor.

mencapai 10,0 persen pada triwulan III. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan ekspor kedelai. Sementara itu, impor Amerika Serikat mengalami peningkatan 8,3 persen. Namun demikian, pengeluaran konsumsi masih menguat seiring dengan peningkatan upah dan rendahnya tingkat pengangguran. Investasi tetap swasta non residensial juga mengalami peningkatan mencapai 2,4 persen sepanjang Oktober hingga Desember 2016. Pada keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 1,6 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Tahun 2016 di Beberapa Negara (YoY)



Keterangan: Year on year (YoY), Quarter on Quarter (QoQ)

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Investasi tetap swasta non residensial juga mengalami peningkatan mencapai 2,4 persen sepanjang Oktober hingga Desember 2016. Pada keseluruhan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mencapai 1,6 persen yang lebih tinggi, dan kebijakan suku bunga rendah European Central Bank (ECB). Namun, pelemahan perdagangan global, ketidakpastian kebijakan terkait Brexit dan masih belum stabilnya perekonomian Amerika Serikat ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Eropa sepanjang bulan Juli hingga September 2016. *Office of Nation Statistics* juga merilis data pertumbuhan ekonomi Inggris yang tumbuh sebesar 2,3% (YoY).

Ekonomi Tiongkok tumbuh diluar ekspektasi menjadi 6,8 persen pada triwulan IV tahun 2016 karena adanya peningkatan konsumsi rumah tangga melalui kredit dan investasi.



Stagnansi perdagangan global, pelemahan investasi, ketidakpastian kebijakan menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian dunia. Namun perbaikan secara moderat perekonomian dunia diperkirakan terjadi tahun 2017.

Sementara itu, perekonomian Jepang pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh sebesar 1,7 persen (YoY) didorong oleh ekspor dan belanja modal. Ekspor Jepang tumbuh 2,6 persen terutama ekspor mobil ke



PEREKONOMIAN UNI EROPA MULAI TUMBUH PERLAHAN MENJADI 1,7 PERSEN (YOY) PADA TRIWULAN IV TAHUN 2016 KARENA SEKTOR INDUSTRI, PMI MANUFAKTUR, DAN PENINGKATAN INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN

Di sisi lain, perekonomian Uni Eropa mulai mengalami perbaikan secara bertahap dimana sektor industri tumbuh mencapai 3,2 persen pada bulan November 2016 (YoY) dengan meningkatnya output industri di negara-negara Uni Eropa. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Uni Eropa mengalami perlambatan dari tahun 2015 sebesar 2,0 persen menjadi 1,6 persen pada tahun 2016 karena ekspor dan permintaan domestik yang menurun. Peningkatan harga-harga komoditas mempengaruhi pendapatan riil rumah tangga dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang semakin menurun dan sejalan dengan penurunan permintaan domestik.

Tiongkok dan Amerika Serikat serta ekspor barang-barang elektronik ke Asia. Hal ini juga didukung dengan pelemahan mata uang Yen terhadap USD semenjak pemilihan umum Amerika Serikat bulan November 2016. Konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga terutama sayuran serta kebijakan fiskal “*abonomics*” yang meningkatkan pajak penjualan mulai tahun 2014, dari 5,0 persen menjadi 8,0 persen. Selain itu peningkatan juga terjadi pada investasi perumahan karena adanya relaksasi moneter dan belanja modal yang meningkat masing-masing 0,2 persen (QoQ) dan 0,9 persen (QoQ).

Ekonomi Tiongkok tumbuh diluar ekspektasi menjadi 6,8 persen pada triwulan IV tahun 2016 karena adanya peningkatan konsumsi rumah tangga melalui kredit dan investasi.

Pada triwulan IV tahun 2016, perekonomian Tiongkok tumbuh diatas ekspektasi yaitu sebesar 6,8 persen (YoY), didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 64,6 persen (YoY), pertumbuhan investasi properti sebesar 6,9 persen (YoY), serta peningkatan fiskal dan stimulus kredit. Akan tetapi, investasi swasta mengalami penurunan, jumlah utang rumah tangga melebihi 40 persen dari PDB, dan depresiasi mata uang akibat terjadinya *capital outflow*

PERKIRAAN EKONOMI DUNIA

Setelah pelemahan perekonomian sepanjang 2016 akibat kinerja perdagangan dan investasi yang melemah, perekonomian dunia diperkirakan akan membaik walaupun masih moderat pada tahun 2017. Perbaikan ini terutama terjadi pada negara negara *emerging market and developing economies* (EMDEs). Kebijakan stimulus fiskal di Amerika Serikat dan Tiongkok akan menyumbang pertumbuhan ekonomi dunia, namun ketidakpastian kebijakan terutama isu proteksionisme tetap akan memberikan risiko penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Perbaikan harga-harga komoditas dunia diproyeksikan akan meningkat dan lebih stabil tahun 2017 sampai tahun 2019 dan mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara EMDEs terutama negara eksportir. Secara umum pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan meningkat secara moderat tahun 2017 dan proyeksi ini tidak banyak berubah dari proyeksi triwulan III tahun 2016.

WEO-IMF Kelompok Negara	Realisasi		Perkiraan			
			2017		2018	
	2015	2016	Oktober*	Januari*	Oktober**	Januari**
Dunia	3,2	3,1	3,4	3,4	3,6	3,6
Negara Maju	2,1	1,6	1,8	1,9	1,8	2,6
Amerika Serikat	2,6	1,6	2,2	2,3	2,1	2,5
Kawasan Eropa	2,0	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6
Jerman	1,5	1,7	1,4	1,5	1,4	1,5
Inggris	2,2	2,0	1,1	1,5	1,7	1,4
Jepang	0,5	0,9	0,6	0,8	0,5	0,5
Negara Berkembang	4,0	4,1	4,6	4,5	4,8	4,8
Tiongkok	6,9	6,7	6,2	6,5	6,0	6,0
Indoa	7,6	7,0	7,6	7,2	7,7	7,7
ASEAN-5	4,8	4,8	5,1	4,9	5,2	5,2
Amerika Latin dan Karibia	0,0	(0,7)	1,6	1,2	2,2	2,1
Brazil	(3,8)	(3,5)	0,5	0,2	1,5	1,5
Sub Sahara Afrika	3,4	1,6	2,9	2,8	3,6	3,7
Afrika Selatan	1,3	0,3	0,8	0,8	1,6	1,6

*World Economic Outlook, April 2016

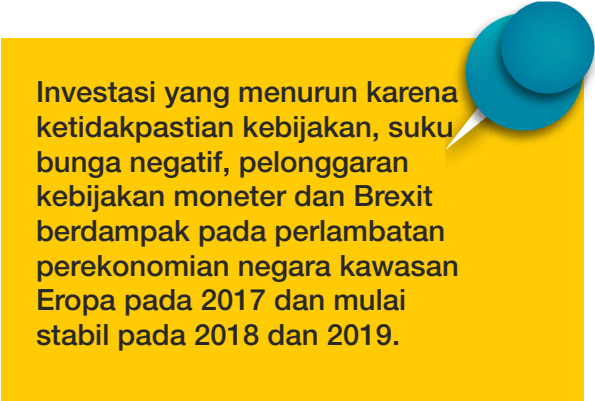
**World Economic Outlook, Oktober 2017

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Terpilihnya presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pengaruh terhadap proyeksi perekonomian negara Amerika Serikat. Proposal pemotongan pajak untuk perusahaan dan individu, peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur, proteksi perdagangan dan imigrasi adalah kebijakan yang berdampak besar terhadap perekonomian Amerika Serikat kedepan. Kebijakan ekspansi fiskal yang direncanakan pemerintah akan memberikan dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Dengan adanya stimulus fiskal sebesar 1 persen dari PDB, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan Amerika Serikat sebesar 0,7 persen hingga 1,5 persen dalam dua tahun. Dengan demikian pertumbuhan Amerika Serikat (bila implementasi stimulus fiskal dilakukan secara penuh dan pertimbangan dari kebijakan lain) akan meningkat menjadi 2,2-2,5 persen tahun 2017 dan 2,5-2,9 persen tahun 2018.

Adanya ketidakpastian kebijakan termasuk pemilihan di Amerika Serikat dan keputusan Inggris keluar dari EU memberikan dampak pelemahan investasi di kawasan Eropa. Namun, suku bunga negatif yang disertai dengan program belanja aset yang lebih besar oleh European Central Bank, memberikan kemudahan biaya meminjam dan memberikan dampak positif kepada alur peminjaman. Inflasi di kawasan Eropa masih dibawah target. Pertumbuhan ekonomi negara kawasan Eropa tahun 2017 diproyeksi melambat karena pelemahan peningkatan pendapatan dan ketidakpastian kebijakan yang meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2017 karena adanya penurunan ekspor ke negara-negara mitra dagang utama, dan permintaan domestik yang juga menurun. Perekonomian Jepang diperkirakan tumbuh sebesar 0,8 persen (WEP Januari 2017). ADB juga memprediksi perekonomian Jepang tumbuh sebesar 0,8 persen pada tahun 2017. Ketidakpastian perdagangan global dan kebijakan lainnya yang merupakan dampak dari terpilihnya presiden baru Amerika Serikat diperkirakan berdampak pada faktor eksternal Jepang dan pelemahan hingga dua kali lipat permintaan domestik, yang dapat menyebabkan



Investasi yang menurun karena ketidakpastian kebijakan, suku bunga negatif, pelonggaran kebijakan moneter dan Brexit berdampak pada perlambatan perekonomian negara kawasan Eropa pada 2017 dan mulai stabil pada 2018 dan 2019.

perekonomian Jepang diprediksi melemah tahun 2017. Selain itu penurunan populasi menjadi isu permasalahan yang sedang dihadapi negara Jepang sehingga lebih sedikit orang yang menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi menjadikan rencana pemerintah Jepang menaikkan pajak konsumsi dari 8 persen menjadi 10 persen yang direncanakan pada Oktober 2015 dan diundur menjadi April 2017 kini diundur kembali hingga tahun 2019.

Pada tahun 2017, Tiongkok diperkirakan akan tumbuh 6,5 persen mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari tahun 2016 namun masih dalam pertumbuhan moderat. Hal ini karena adanya permintaan eksternal yang melemah sehingga menyebabkan penurunan ekspor Tiongkok, ketidakpastian perdagangan dunia, dan investasi swasta yang melemah. Investasi pemerintah kemungkinan akan meningkat namun investasi swasta akan cenderung menurun karena iklim bisnis yang tidak baik dan ketidakpastian ekspor. Selain itu penurunan penduduk usia kerja, pelemahan konsumsi dan pelemahan ekspor manufaktur dan investasi menjadi tekanan pada perekonomian Tiongkok. Begitu juga penyeimbangan antara investasi dan konsumsi serta dari sektor industri ke sektor jasa juga diprediksi masih moderat. Hal tersebut tergantung kepada reformasi struktural pada BUMN dan restrukturisasi perusahaan termasuk juga penurunan kelebihan keuangan.

Ekonomi Indonesia masih mampu bertahan menghadapi berbagai gejolak ekonomi global. Karena itu, langkah untuk membuat ekonomi nasional mampu beradaptasi terhadap perubahan global, menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan kondisi global yang tidak pasti pun, perekonomian nasional masih bisa tumbuh 5,1%. Jadi kalau globalnya bisa diprediksi dan dikendalikan, artinya Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan global, itu akan bagus untuk ekonomi Indonesia.

Perekonomian negara di kawasan Asia diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan seperti India didukung oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat. Di Asia Timur, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menurun namun masih dalam level moderat menjadi 5,6 persen. Konsumsi privat dan jasa yang didukung pertumbuhan upah serta penciptaan lapangan pekerjaan menjadi sektor utama penyumbang pertumbuhan di kawasan Asia Timur.

Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara diperkirakan meningkat pada tahun 2017 menjadi 4,6 persen didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi infrastruktur serta inflasi yang rendah di hampir seluruh wilayah serta proyeksi peningkatan perekonomian Malaysia dan Filipina. Di Indonesia, pertumbuhan diperkirakan tumbuh 5,1 persen tahun 2017 seiring dengan adanya peningkatan alokasi

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Menurut ADB (YoY)

		Pertumbuhan PDB (%)			
		2015		2016	
Uraian	2015	ADO	ADOS	ADO	ADOS
Asia	5,9	5,7	5,6	5,7	5,7
Asia TImur	6,1	5,8	5,8	5,6	5,6
Tiongkok	6,9	6,6	6,6	6,4	6,4
Jepang	0,6	0,6	0,6	0,5	0,8
Asia Selatan	7,0	6,9	6,6	7,3	7,3
India	7,6	7,4	7,0	7,8	7,8
ASEAN	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6
Indonesia	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1
Filiphina	5,9	6,4	6,8	6,2	6,4
Thailand	2,8	3,2	3,2	3,5	3,5
Malaysia	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5

Sumber: Asia Development Outlook Supplement Januari 2017

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta investasi publik yang diprediksi akan terus meningkat. Ekonomi Malaysia diprediksi akan meningkat secara perlahan sepanjang tahun 2017 menjadi 4,4 persen seiring dengan perbaikan di sektor industri utama yang meningkatkan permintaan eksternal dan pengucuran anggaran pada bulan Oktober yang memberikan dukungan pada perekonomian domestik. Filipina akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4 persen tahun 2017 dengan permintaan domestik yang meningkat, serta investasi yang akan terus meningkat dalam rangka meningkatkan infrastruktur publik dan memperbaiki iklim bisnis.

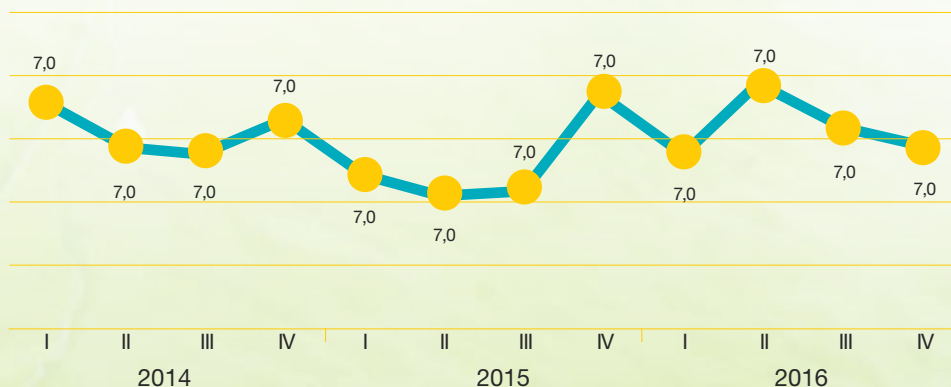
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2016 tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,2 persen (YoY) dan triwulan III tahun 2016 sebesar 5,0 persen (YoY). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,0 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian global walaupun pertumbuhannya belum merata. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya ekspor dan terjaganya permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat, namun realisasi belanja pemerintah APBN lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya akibat pemotongan anggaran.

Bio Farma tetap meraup keuntungan disaat kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional sedang lesu. Produk Bio Farma telah tersebar di ratusan negara berkembang dan negara yang mayoritas pemeluk agama Islam. Namun, Bio Farma tetap memprioritaskan dan membesarkan pasar domestik

Pada triwulan III tahun 2016, pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa semakin menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar -6,0% (YoY), menurun dibandingkan triwulan III tahun 2015 yang tumbuh negatif sebesar -0,6% (YoY) dan triwulan II Pada triwulan IV tahun 2016, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh positif untuk pertama kali sejak triwulan IV tahun 2014, yaitu sebesar 4,2 persen (YoY). Ekspor Barang tumbuh sebesar 4,0 persen (YoY), meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV tahun 2015 maupun triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -7,1 persen (YoY). Sementara itu, Ekspor Jasa tumbuh sebesar 6,3 persen (YoY),

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2014 - Triwulan IV Tahun 2016 (Persen)



Sumber Basan Pusat Statistik



meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,7 persen (YoY), namun meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV tahun 2015 yang sebesar 0,1 persen (YoY). Kondisi ini seiring dengan menguatnya perekonomian negara-negara tujuan utama ekspor, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2016, sebesar 19,1 persen.

Impor Barang dan Jasa tumbuh positif untuk yang pertama kali sejak triwulan I tahun 2015, yaitu sebesar 2,8 persen (YoY) seiring dengan membaiknya ekspor barang dan jasa. Impor Barang meningkat signifikan dari triwulan IV tahun 2015 yang tumbuh negatif sebesar -8,4 persen (YoY) dan triwulan III tahun 2016 yang sebesar -3,7 persen (YoY), menjadi sebesar 2,7 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2016. Impor Jasa juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari sebesar -11,0 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2015 dan sebesar -3,7 persen (YoY) pada triwulan III tahun 2016 menjadi sebesar 3,3 persen (YoY).

BIO FARMA SEBAGAI PRODUSEN VAKSIN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA DAN GLOBAL

Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Bio Farma, Perusahaan yang berkelas dunia. Lebih dari 130 negara berhasil dijangkau oleh Bio Farma melalui produk-produk vaksin yang sudah lulus Prakuualifikasi WHO. Ini merupakan bentuk pengakuan Internasional pada Bio Farma sebagai produsen vaksin untuk masyarakat global

Bio Farma juga telah mengeksport vaksin-vaksinnya ke negara-negara Islam. Tidak mudah untuk menembus pasar tersebut karena vaksin harus dibuat dengan bahan-bahan halal, sehingga layak digunakan oleh umat Muslim. Semua vaksin produk Bio Farma sudah diarahkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bio Farma juga menyediakan vaksin untuk melindungi masyarakat yang sedang dalam ibadah haji dan umrah.

Bio Farma memposisikan diri sebagai produsen vaksin untuk negara-negara berkembang yang pangsa pasarnya cukup besar dan Bio Farma akan mensuplai

vaksin yang berkualitas dengan harga terjangkau sesuai dengan kebutuhan untuk negara berkembang.

Dari total pendapatan perusahaan, 65% di antaranya merupakan sumbangan dari aktivitas ekspor, sementara sisanya dihasilkan dari pasar dalam negeri. Namun, Bio Farma tetap melihat pasar dalam negeri sebagai pasar besar dan menargetkan setidaknya bisa memberikan porsi masing-masing 50%.

Di tengah kelesuan ekonomi, justru Bio Farma boleh berbahagia karena bisnisnya tidak dipengaruhi oleh gejolak mata uang. Bahkan, kondisi ini justru membuat Bio Farma meraup laba bersih hingga 15,18%.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Bio Farma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai produsen vaksin dan antisera bagi manusia, Bio Farma menjamin kualitas vaksin yang digunakan untuk Program Imunisasi Dasar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun untuk kebutuhan ekspor, sudah melalui proses pengawasan yang ketat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia.

Dari sekitar 200 pabrik vaksin di seluruh dunia, kurang lebih baru 30 pabrik yang diakui oleh WHO, salah satunya Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia masih satu-satunya negara di Asia Tenggara yang vaksinnya sudah diakui WHO.

Setelah memenuhi kewajiban Program Imunisasi Nasional, barulah vaksin produksi Bio Farma di ekspor lebih dari 130 negara. Indonesia juga termasuk lima negara yang dominan menyuplai vaksin.

PERBEDAAN VAKSIN DAN ANTISERA (SERUM)

Vaksin adalah suatu produk biologi yang berasal dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau diambil sebagian komponen bakteri/virus yang dimasukkan kedalam tubuh manusia yang sehat melalui suntikan

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

atau pemberian secara oral. Vaksin berfungsi untuk menimbulkan kekebalan aktif, sehingga tubuh memiliki respon kebal terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri.

Serum adalah sebuah sediaan yang berisi antibodi dan antigen yang umumnya berupa mikro organisme yang telah dilemahkan atau dimatikan, untuk membentuk kekebalan pasif yang disebabkan oleh virus atau bakteri.

Penggunaan vaksin dan antiserum, dibedakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi penerima. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat dengan tujuan untuk mencegah tertular penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Sedangkan antiserum diberikan kepada orang yang diduga akan terpapar atau orang yang sudah terpapar oleh penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri.

PENJELASAN MASING-MASING SEGMENT USAHA

Produk Bio Farma dikelompokkan berdasarkan segment terdiri atas 2:

1. Segment/Kelompok Produk:

- Vaksin Bakteri
- Vaksin Virus
- Vaksin Kombinasi
- Sera & Diagnostika

2. Penjualan Produk Per Segment/Sektor Usaha:

- Sektor Pemerintah
- Sektor Swasta
- Sektor Ekspor

URAIAN MENGENAI SEGMENT/KELOMPOK PRODUK

Segment/Kelompok Produk Vaksin Bakteri

Produk-produk Bio Farma yang termasuk kedalam segment (kelompok produk) vaksin bakteri adalah sebagai berikut:

1. Vaksin TT

- Vaksin TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.

- Untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap Tetanus Neonatorum pada wanita usia subur.

2. Vaksin DT

- Vaksin DT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni yang teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.
- Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria (difteri) dan Tetanus secara simultan pada anak-anak.

3. Vaksin DTP

- Vaksin DTP merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus murni, toksoid difteri murni, dan bakteri pertusis yang diinaktivasi, yang teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.
- Untuk pencegahan terhadap penyakit Diphtheria, Tetanus dan Pertusis (batuk rejan) secara simultan pada bayi dan anak-anak.

4. Vaksin BCG (Beku Kering)

- Vaksin BCG merupakan vaksin beku kering yang mengandung Mycobacterium bovis hidup yang dilemahkan (Bacillus Calmette Guerin), strain Paris.
- Untuk pencegahan terhadap penyakit Tuberkulosis.
- Vaksin BCG diberikan pada bayi sejak lahir, untuk mencegah penyakit TBC. Jika bayi sudah berumur lebih dari tiga bulan, harus dilakukan uji tuberkulin terlebih dulu. BCG dapat diberikan apabila hasil uji tuberkulin negatif.

5. Vaksin Td

- Vaksin Td merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam vial gelas, mengandung toksoid tetanus dan toksoid difteri murni, dengan komponen difteri berdosisi rendah dan teradsorbsi pada aluminium fosfat.
- Untuk pencegahan terhadap penyakit Tetanus dan Difteri untuk anak usia 7 tahun ke atas.



6. Vaksin Bio-TT

- a. Vaksin Bio-TT merupakan suspensi koloidal homogen berwarna putih susu dalam ampul, mengandung toksoid tetanus murni, teradsorbsi kedalam aluminium fosfat.
- b. Untuk pencegahan terhadap tetanus dan perlindungan terhadap tetanus neonatorum pada wanita usia subur.

Segmen/Kelompok Produk Vaksin Virus

1. Vaksin Oral Polio

- a. Vaksin Polio Oral (OPV) adalah vaksin tri-valen merupakan cairan berwarna kuning kemerahan dikemas dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1,2, dan 3 virus Polio hidup (strain Sabin) yang telah dilemahkan. Vaksin Polio Oral ini merupakan suspensi "drops" untuk diteteskan melalui *dropper* (secara oral).
- b. Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1, type 2 dan tipe 3.
- c. Imunisasi yang satu ini belakangan sering didengung-dengungkan pemerintah karena telah memakan korban cukup banyak. Target pemerintah membebaskan anak-anak Indonesia dari penyakit polio. Polio-0 diberikan saat kunjungan pertama setelah lahir. Selanjutnya vaksin ini diberikan 3 kali, saat bayi berumur 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian vaksin ini dulang pada usia 18 bulan dan 5 tahun.

2. Vaksin Bivalent Oral Poliomyelitis

- a. Vaksin bOPV adalah cairan berwarna kuning muda sampai merah muda dalam vial gelas yang mengandung suspensi dari tipe 1 virus Polio hidup yang dilemahkan (*strain Sabin*).
- b. Untuk pencegahan terhadap penyakit poliomyelitis tipe 1 & 3.

3. Vaksin Campak (Beku Kering)

- a. Vaksin campak adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan, merupakan vaksin beku kering berwarna kekuningan pada vial gelas, yang harus dilarutkan hanya dengan pelarut vaksin campak kering produksi PT Bio Farma yang telah disediakan secara terpisah. Vaksin campak ini berupa serbuk injeksi.

- b. Untuk pencegahan terhadap penyakit Campak.
- c. Campak pertama kali diberikan saat anak umur 9 bulan. Campak-2 diberikan pada program BIAS SD kelas 1, umur 6 tahun.

4. Vaksin Hepatitis B Rekombinan

- a. Vaksin Hepatitis B Rekombinan mengandung antigen virus Hepatitis B, HBsAg, yang tidak menginfeksi yang dihasilkan dari biakan sel ragi dengan teknologi rekayasa DNA. Vaksin Hepatitis B rekombinan berbentuk suspensi steril berwarna keputihan dalam *prefill injection device*, yang dikemas dalam *aluminum foil pouch*, and vial.
 - Untuk pencegahan terhadap penyakit Hepatitis B.
 - Hepatitis B diberikan tiga kali. Yang pertama dalam waktu 12 jam setelah lahir. Imunisasi ini dilanjutkan saat bayi berumur 1 bulan, kemudian diberikan lagi saat 3-6 bulan.

5. Vaksin Flubio

- Vaksin influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan (*slightly turbid*), mengandung haemagglutinin dari antigen virus influenza. Vaksin influenza HA berupa suspensi yang diberikan untuk injeksi.
- Untuk pencegahan influenza musiman.
- Vaksin influenza diberikan kepada orang sehat usia 12 tahun ke atas. Karena secara alami influenza bersifat musiman, pemberian vaksin direkomendasikan sekali dalam setahun.

Segmen/Kelompok Produk Vaksin Kombinasi

1. Vaksin Pentabio (DTP-HB-Hib)

- a. Vaksin Pentabio adalah Vaksin DTP-HB-Hib (Vaksin Jerap Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B Rekombinan, *Haemophilus influenzae* tipe b) berupa suspensi homogen yang mengandung toksoid tetanus dan difteri-murni, bakteri-pertusis (batuk rejan) inaktif, antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) murni yang tidak infeksius, dan komponen Hib sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida *Haemophilus influenzae* tipe b tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid tetanus.

- b. Untuk pencegahan terhadap penyakit Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B & Haemophilus Influenza tipe B.
- c. Imunisasi kombinasi Pentavalen terdiri dari 5 jenis vaksin sekaligus diantaranya DPT-HB,Hib pada anak bayi dan imunisasi lanjutan pada anak batita sesuai standar. Imunisasi DPT-HB-Hib merupakan imunisasi rutin yang diberikan kepada sasaran pada usia 0-11 bulan. Imunisasi lanjutan DPT-HB,Hib dan Campak, diberikan kepada batita (Bawah Tiga Tahun).

Segmen/Kelompok Produk Antisera

1. Serum Anti Tetanus (BioSAT)

- a. Serum Anti Tetanus (BioSAT) adalah antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus, serta mengandung fenol sebagai pengawet, berupa cairan bening kekuningan.
- b. Untuk pengobatan terhadap penyakit tetanus.
- c. Indikasi suntikan ATS (Anti Tetanus Serum)
- d. Luka cukup besar (dalam lebih dari 1 cm)
- e. Luka berbentuk bintang
- f. Luka berasal dari benda yang kotor dan berkarat
- g. Luka gigitan hewan dan manusia
- h. Luka tembak dan luka bakar
- i. Luka terkontaminasi, yaitu: luka yang lebih dari 6 jam tidak ditangani, atau luka kurang dari 6 jam namun terpapar banyak kontaminasi, atau luka kurang dari 6 jam namun timbul karena kekuatan yang cukup besar (misalnya luka tembak atau terjepit mesin)
- j. Penderita tidak memiliki riwayat imunisasi tetanus yang jelas atau tidak mendapat *booster* selama 5 tahun atau lebih

2. Serum Anti Difteri (BioADS)

- a. Untuk pengobatan terhadap penyakit diphtheria.

3. Serum Anti Bisa Ular (BioSave)

- b. Serum Anti Bisa Ular Polivalen (BioSave) adalah an- tiseria murni yang dibuat dari plasma kuda yang memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik (seperti ular dari jenis Naja sputatrix – Ular Kobra, Bungarus fasciatus – Ular Belang) dan yang bersifat hemotoksik (ular Agkistrodon rho- dostoma – Ular Tanah) yang banyak ditemu- kan di Indonesia, serta mengandung fenol sebagai pengawet. Serum Anti Bisa Ular Polivalen berupa cairan bening kekuningan.
- c. Untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa yang mengandung efek neurotoksik (Naja sputatrix/ula kobra dan Bungarus fasciatus/ular belang) dan efek hemotoksik (Ankistrodon rhodostoma/ular tanah).

Segmen/Kelompok Produk Diagnostika

1. PPD RT 23 (Purified Protein Derivative)

Untuk pengujian kepekaan seseorang terhadap infeksi tuberkulosis.

FASILITAS DAN KUALITAS PRODUKSI BIO FARMA

Bio Farma berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan inovatif di berbagai bidang dengan mengacu pada Standar Internasional dan Sistem Manajemen Mutu terkini. Sejak tahun 1997, produk Bio Farma merupakan salah satu dari sekitar 30 produsen vaksin di dunia yang telah mendapatkan Prakuifikasi WHO. Bio Farma telah menerapkan berbagai sistem terintegrasi, antara lain: CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM dan *current Good Manufacturing Practices* (cGMP) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), *Good Laboratory Practices* (GLP), *Good Clinical Practices* (GCP), *Good Distribution Practices* (GDP), sistem manajemen terpadu ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, dan OHSAS 18001:2007. Serta panduan *world class standard* antara lain ISO 26000 guidance for CSR, *Enterprise Risk Management* ISO 31000, *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Saat ini, Bio Farma beroperasi di dua lokasi yang berbeda, yaitu Jalan Pasteur No. 28 Bandung dengan luas lahan 91.058 m² yang digunakan untuk fasilitas Produksi, Penelitian dan Pengembangan, Pemasaran, serta Administrasi. Sedangkan lokasi kedua berada di Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan luas lahan 282.441 m² yang digunakan untuk pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan laboratorium. Untuk mendukung kelancaran operasional, perusahaan memiliki juga Kantor Perwakilan di Gedung Pakarti Centre, Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta.

PROSES PRODUKSI DAN PENGUJIAN VAKSIN BIO FARMA

Proses produksi vaksin Bio Farma dilakukan melalui proses yang ketat, dan berstandar tinggi. Diawali dengan penyediaan bahan baku, yang berasal dari rekanan yang memiliki kualifikasi tertentu, fasilitas produksi yang harus tervalidasi baik dari alat dan penunjang lainnya, hingga fasilitas penyimpanan barang jadi dan proses distribusi yang dimonitor ketat agar tetap memenuhi faktor kualitas, keamanan, dan efektivitas yang konsisten

Keseluruhan proses pembuatan vaksin tersebut, tidak terlepas dari adanya fase uji kualitas, baik untuk barang setengah jadi (bulk), maupun produk jadi, yang sudah ditetapkan oleh BPOM, dan WHO. Vaksin memiliki perbedaan yang mendasar dengan produk farmasi lainnya seperti obat – obatan. Vaksin yang dibuat dari makhluk hidup, memiliki potensi kontaminasi yang cukup besar, baik yang kontaminasi berasal dari lingkungan maupun dari operator dalam setiap tahapan pembuatan vaksin. Oleh karenanya diperlukan suatu jaminan baik dari jaminan kualitas maupun jaminan keamanan dari setiap produk yang ada. Bio Farma memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang terjamin baik dari sisi keamanan, kualitas dan kemanjuran. Untuk menghasilkan produk yang baik tersebut, Bio Farma melakukan pemeriksaan setiap produk baik yang dilakukan oleh sendiri maupun dari pihak eksternal. Pemeriksaan Uji Kualitas internal seperti; Uji potensi,

Uji keamanan (toksisitas), Uji mikrobiologi (sterilitas) dan Uji kimia (pH, kandungan pengawet, dsb), dilakukan oleh Divisi Pengawasan Mutu dan Divisi Quality Assurance.

Pemeriksaan dari pihak eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM - RI), memiliki peranan yang penting dalam hal menilai kesiapan fasilitas pabrik yang dimiliki oleh Bio Farma, termasuk perizinan yang diperlukan untuk pembuatan vaksin, pemeriksaan batch produk vaksin, termasuk pemantauan kinerja dari setiap vaksin yang berasal dari Bio Farma.

Jadi, vaksin produksi Bio Farma yang digunakan Pemerintah untuk program imunisasi nasional (Pentabio (dtp-hb-hib), DT, TD, TT, Hepatitis b, Campak, Polio, dan BCG) adalah vaksin dengan proses pembuatan sangat ketat sesuai standar WHO serta sudah mendapatkan *release* dari Badan POM.



URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

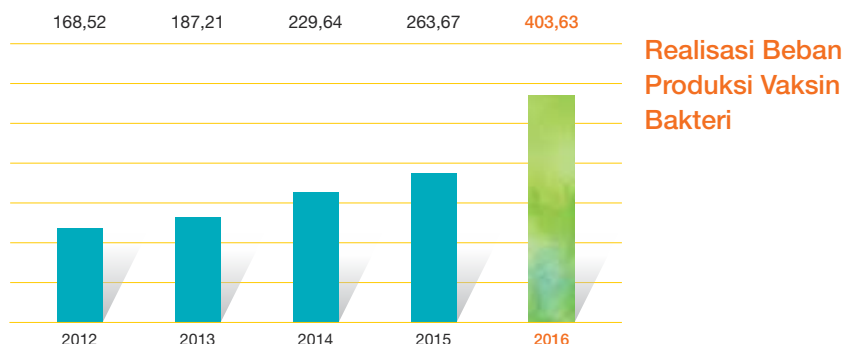
KINERJA PER SEGMENT USAHA

PRODUKSI

Realisasi beban produksi tahun 2016 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,12 triliun, naik sebesar Rp162,32 miliar atau meningkat sebesar 16,86% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp962,61 miliar dan sebesar Rp63,17 miliar atau 5,95% di atas RKAP sebesar Rp1,06 triliun.

Kinerja Segmen Vaksin Bakteri

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-5
Produksi Vaksin Bakteri (Juta Dosis)	379,08	361,76	457,13	531,50	631,62	538,23	1,27	(14,79)	6,73
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	168,52	187,21	229,64	263,67	327,33	403,63	53,08	23,31	139,96



1. Produksi Vaksin Bakteri

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar 538,23 juta dosis, naik sebesar 6,73 juta dosis atau 1,27% dibandingkan dengan produksi vaksin bakteri tahun 2015 yaitu sebesar 531,50 juta dosis dan 14,79% di bawah RKAP sebesar 631,62 juta dosis.
- Meningkatnya jumlah produksi Vaksin Bakteri disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat produksi meningitis

2. Realisasi Beban Produksi Vaksin Bakteri

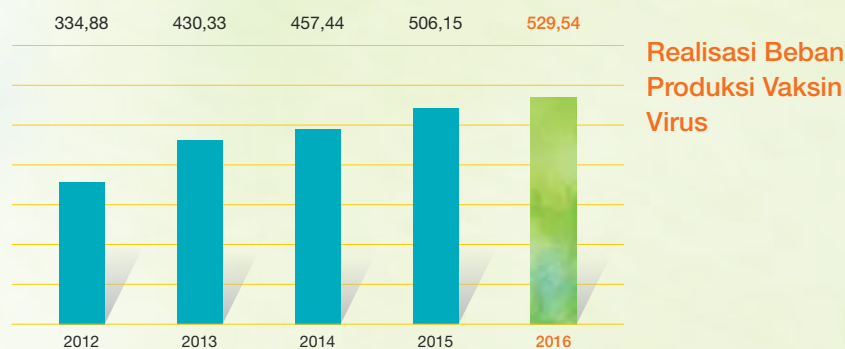
- Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp403,63 miliar, naik sebesar Rp139,96 miliar atau meningkat sebesar 53,08% bila dibandingkan dengan realisasi beban produksi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp263,67 miliar dan sebesar Rp76,30 miliar atau 23,31% di atas RKAP sebesar Rp327,33 miliar.

- Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Vaksin Bakteri beban produksinya meningkat karena pencapaian produksi vaksin Meningitis senilai Rp119,92 miliar untuk memenuhi kebutuhan penjualannya sedangkan pada tahun 2015 belum terdapat produksi vaksin tersebut.
- Bila dibandingkan dengan anggaran Vaksin Bakteri beban produksinya di atas anggarannya karena pencapaian beban produksi vaksin Meningitis mencapai 238,76% atau melebihi anggaran senilai Rp69,69 miliar seiring dengan peningkatan kebutuhan penjualan vaksin tersebut yang mencapai 218,22% dari anggarannya. Peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari penjualan karena terdapat pemakaian sendiri dari harga jual di bawah yang dianggarkan.



Kinerja Segmen Vaksin Virus

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6 - 4	6-5
Produksi Vaksin Virus (miliar dosis)	2,19	2,63	3,09	3,41	2,95	3,94	15,58	33,64	0,53	0,99
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	334,88	430,33	457,44	506,15	524,12	529,54	4,62	1,03	23,38	5,42



c) Produksi Vaksin Virus

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar 3,94 miliar dosis, naik sebesar 530,82 juta dosis atau 15,58% dibandingkan dengan produksi vaksin virus tahun 2015 yaitu sebesar 3,41 miliar dosis dan 33,64% di atas RKAP sebesar 2,95 miliar dosis.
- Meningkatnya jumlah produksi vaksin virus disebabkan karena produksi *Bulk Polio* tipe 1 dan 3 terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan penjualan triwulan I & II tahun 2017.

d) Realisasi Beban Produksi Vaksin Virus

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp529,54 miliar, naik sebesar Rp23,38 miliar atau 4,62% dibandingkan dengan realisasi beban produksi

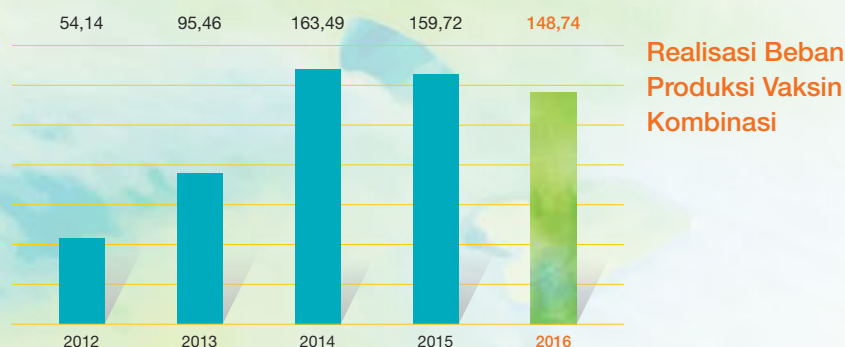
pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp506,15 miliar dan sebesar Rp5,42 miliar atau 1,03% di atas RKAP sebesar Rp524,18 miliar.

- Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Vaksin Virus beban produksinya naik sebesar 4,62% dari realisasi tahun 2015 meskipun realisasi penjualannya turun sebesar 15,80%, hal tersebut karena produksi *Bulk Polio* Tipe 1 dan Tipe 3 terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan penjualan triwulan I dan II tahun 2017.
- Bila dibandingkan dengan anggarannya, Vaksin Virus beban produksinya di atas anggarannya karena produksi *Bulk Polio* Tipe 1 dan Tipe 3 terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan penjualan triwulan I dan II tahun 2017.

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja Segmen Vaksin Kombinasi

	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-5
Produksi Vaksin Kombinasi (juta Dosis)	24,78	25,61	25,54	15,79	19,23	20,72	31,22	7,75	4,93
Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	54,14	95,46	163,49	159,72	159,53	148,74	(6,87)	(6,76)	(10,98)



e) Produksi Vaksin Kombinasi

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar 20,72 juta dosis, naik sebesar 4,93 juta dosis atau 31,22% dibandingkan dengan produksi vaksin kombinasi tahun 2015 yaitu sebesar 15,79 juta dosis dan 7,75% di atas RKAP sebesar 19,23 miliar dosis.
- Meningkatnya jumlah produksi vaksin kombinasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan pentabio 5 ds dari sektor penjualan dalam negeri.

f) Realisasi Beban Produksi Vaksin Kombinasi

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp148,74 miliar, turun sebesar Rp10,98 miliar atau turun 6,87% dibandingkan dengan realisasi beban

produksi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp159,72 miliar dan sebesar Rp10,79 miliar atau 6,76% di bawah RKAP sebesar Rp159,53 miliar.

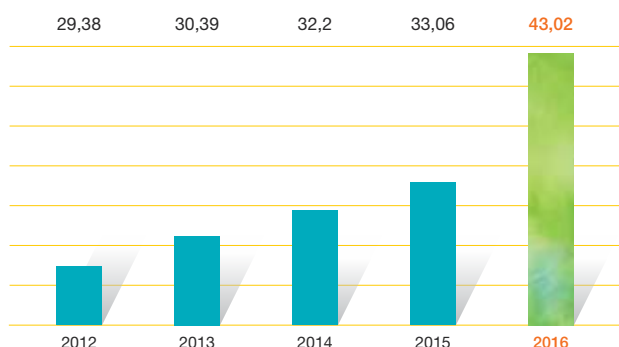
- Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Vaksin Kombinasi beban produksinya turun karena adanya penurunan beban produksi vaksin Pentabio 5 ds sebesar 9,53% senilai Rp15,10 miliar.
- Bila dibandingkan dengan anggarannya, Vaksin Kombinasi beban produksinya di bawah anggaran karena tidak terealisasinya Pentabio 10 ds sebesar Rp14,42 miliar seiring dengan tidak diperolehnya kontrak penjualan ekspor ke Unicef.



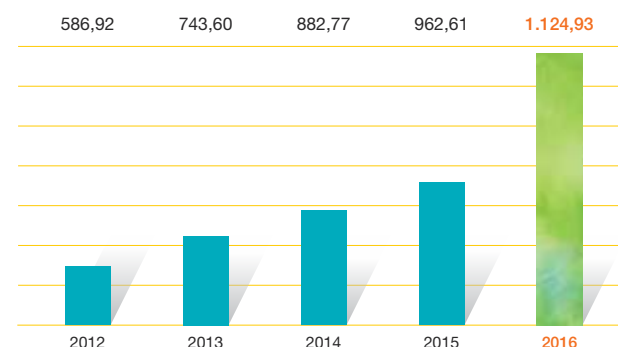
Kinerja Segmen Sera & Diagnostika

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2015- 2016	Selisih 2016 -RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6 - 4	6-5
Realisasi Beban Produksi (Rp/ miliar)	29,38	30,59	32,20	33,06	50,78	43,02	30,12	(15,28)	9,96	(7,76)
Jumlah Realisasi Beban Produksi (Rp/miliar)	586,92	743,60	882,77	962,61	1.061,76	1.124,93	16,86	5,95	162,32	63,17

Realisasi Beban Produksi Sera & Diagnostika



Jumlah Realisasi Beban Produksi Per Tahun



g) Realisasi Beban Produksi Sera & Diagnostika

- Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp43,02 miliar, naik sebesar Rp9,96 miliar atau 30,12% dibandingkan dengan Realisasi beban produksi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp33,06 miliar dan sebesar 15,28% di bawah RKAP sebesar Rp43,02 miliar.
- Bila dibandingkan dengan realiasi tahun 2015. Produk Sera & Diagnostika beban produksinya meningkat karena adanya peningkatan adanya peningkatan beban overhead tetap produksi vaksin sera.
- Bila dibandingkan dengan anggarannya, Produk Sera & Diagnostika beban produksinya di bawah anggaran karena adanya peningkatan beban overhead tetap produksi vaksin sera.

produksi dilakukan secara ketat untuk memenuhi kebutuhan pasar mengingat keterbatasan kapasitas produksi terutama pada fasilitas fill and finish. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Produksi telah menyiapkan dan merencanakan peningkatan kapasitas fill and finish melalui investasi bertahap dari tahun 2013 hingga 2016. Selain itu, pada tahun 2016 dilakukan peremajaan beberapa fasilitas produksi, penambahan beberapa alat produksi dan perawatan mesin. Target yang ingin dicapai adalah produksi vaksin dapat dilakukan tanpa kendala teknis yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan vaksin. Dengan strategi mengoptimalkan kapasitas produksi untuk memenuhi proyeksi pemasaran yang dinamis, pada tahun 2016 Bio Farma mencapai target produksi sebesar 3,2 miliar dosis.

PENINGKATAN/PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI

Pencapaian kinerja produksi pada tahun 2016 secara keseluruhan mencapai target Perusahaan. Strategi yang dijalankan adalah mengoptimalkan kapasitas produksi untuk menghasilkan produk sesuai proyeksi pemasaran yang dinamis. Perencanaan jadwal

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA

Kinerja Perusahaan tahun 2016 dari sisi penjualan mencapai Rp2,32 triliun turun sebesar 1,29% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan 20,66% di bawah RKAP, sedangkan beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1,01 triliun meningkat 15,89% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan 9,84% dibawah RKAP.

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

PENJUALAN PER SEGMENT/KELOMPOK PRODUK

Penjualan Produk Perusahaan

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016 - RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Vaksin Bakteri	226.713	233.754	217.605	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.577	97.409
Vaksin Virus	939.684	1.302.853	1.457.280	1.705.305	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,90)	(268.907)	(426.569)
Vaksin Kombinasi	210.286	248.565	276.548	253.404	296.100	200.695	(20,80)	(32,22)	(52.709)	(95.405)
Sera & Diagnostika	56.581	63.635	90.240	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)	(60.597)
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	-	-	(3.635)
Jumlah	1.433.264	1.848.806	2.041.673	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)	(488.798)
Dikurangi: Potongan Penjualan	(298)	(354)	(12.685)	(15.063)	-	(22.339)	48,30	-	(7.276)	(22.339)
Penjualan Produk Bersih	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)
									(511.137)	2.452.728

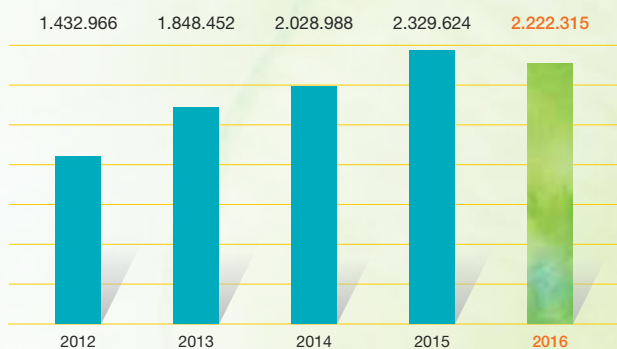
Penjualan Barang Dagangan

(Dalam Juta Rupiah)

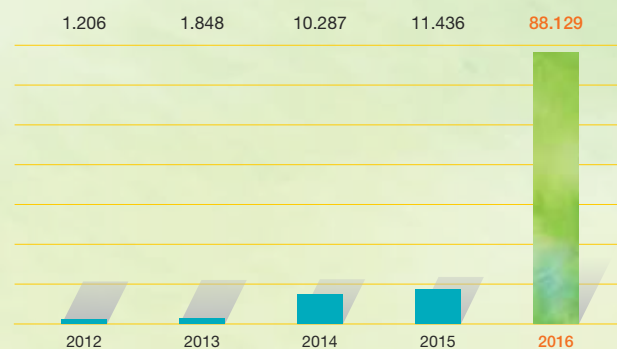
Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2015/ RKAP	RAKP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluarix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaksin IPV 5 ds	-	-	-	-	98.000	18.377	-	-	18.377	18.377	-
Pneumo 23	-	-	-	-	-	45.988	-	-	45.988	45.988	-
Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaksin HPV	-	-	-	-	-	22.804	-	-	22.804	22.804	-
Polyvalent Snake Anti Venom	1.206	1.848	2.641	3.393	1.172	1.125	(66,84)	-	(2.268)	1.125	-
HJ BD IPV 5 DS	-	-	7.769	-	-	-	-	-	-	-	-
Imovac Rabies Vero	-	-	-	8.528	7.232	-	-	-	(8.528)	-	-
Vaksin Rabies	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Vaksin Varicela	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.206	1.848	10.410	11.922	-	88.294	640,57	-	76.372	88.294	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(123)	(486)	-	(165)	(65,99)	-	320	(165)	-
Penjualan Bersih Barang Dagangan	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,60	(51,42)	76.693	(93.275)	478.888



Penjualan Produk Perusahaan



Penjualan Barang Dagang



Penjualan Jasa

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016- RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Imunisasi	2.134	2.501	3.978	3.529	2.665	3.975	12,62	49,15	445	1.310
Laboratorium	1.337	881	827	1.329	1.435	1.660	24,91	15,71	331	225
Jumlah	3.471	3.382	4.805	4.859	4.100	5.635	15,98	37,44	776	1.535
Dikurangi: Potongan Penjualan	(2)	(0)	-	(0)	-	(320)	160.034	-	(320)	(320)
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	3.469	3.382	4.805	4.859	4.100	5.315	9,40	29,64	456	1.215
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.169)	(603.197)
										2.940.215

Realisasi Penjualan Bersih Per Segmen/Kelompok Produk

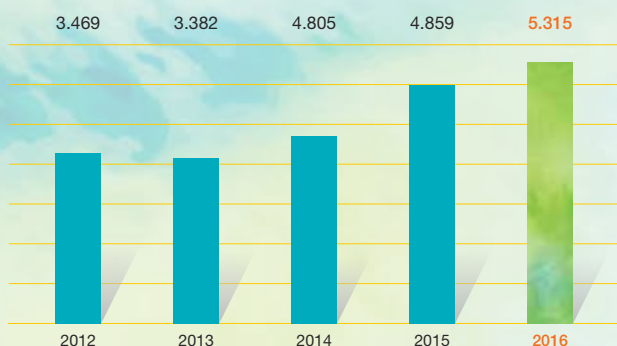
(Dalam Juta Rupiah)

Produksi	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-5
Penjualan Produk Perusahaan									
Vaksin Bakteri	226.713	233.754	217.605	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.577
Vaksin Virus	939.684	1.302.853	1.457.280	1.705.305	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,90)	(268.907)
Vaksin Kombinasi	210.286	248.565	276.548	253.404	296.100	200.695	(20,80)	(32,22)	(52.709)
Sera & Diagnostika	56.581	63.635	90.240	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	(100,00)	-
Jumlah	1.433.264	1.848.806	2.041.673	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)
									(488.798)

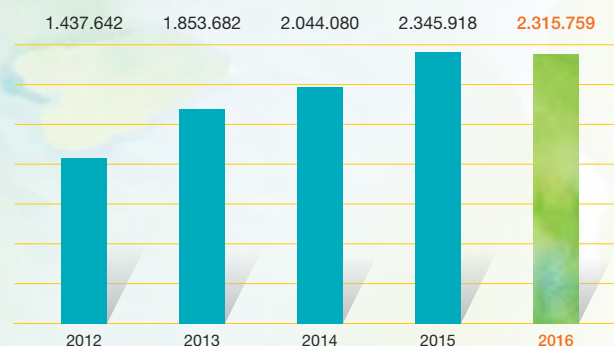
URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Produksi	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-5
Dikurangi: Potongan Penjualan	(298)	(354)	(12.685)	(15.063)	-	(22.339)	48,30	-	(7.276)
Jumlah Penjualan Perusahaan Bersih	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)
Barang Dagang	1.206	1.848	10.410	11.922	-	88.294	640,57	-	76.372
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(123)	(486)	-	(165)	(65,99)	-	321
Jumlah Penjualan Barang Dagang Bersih	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,60	(51,42)	76.692
Jasa	3.471	3.382	4.805	4.859	4.100	5.635	15,98	37,44	776
Dikurangi: Potongan Penjualan	(2)	(0)	-	(0)	-	(320)	160.034	-	(320)
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	3.469	3.382	4.805	4.859	4.100	5.315	9,40	29,64	456
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.919	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)

Penjualan Jasa



Total Penjualan Per Tahun



Realisasi penjualan bersih dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 pencapaiannya sebesar 79,34% atau 20,66% di bawah anggaran, hal ini disebabkan oleh:

1. Realisasi penjualan Vaksin Bakteri 22,37% di atas anggaran atau sebesar Rp97,41 miliar di atas anggaran karena penjualan produk vaksin Meningitis yang mencapai 218,23% dari anggarannya atau sebesar Rp118,23 miliar dari anggarannya.
2. Realisasi penjualan Vaksin Virus sebesar 22,90% di bawah anggaran atau Rp426,57 miliar di bawah anggaran karena adanya program Switching tOPV ke bOPV atau eradikasi Polio tipe 2 dari WHO sejak tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *Bulk* Polio dan vaksin tOPV 20 dosis masing-masing mencapai 63,31% dan 88,89% atau senilai Rp430,59 miliar dan Rp16,16 miliar di bawah anggaran.
3. Realisasi penjualan Vaksin Kombinasi sebesar 32,22% di bawah anggaran atau Rp95,41 miliar di bawah anggaran, hal tersebut karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya menjadi 72,63% dari yang dianggarkan atau turun sebesar Rp70,74 miliar serta tidak terealisasinya penjualan vaksin Pentabio 10 ds ke Unicef karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari yang dianggarkan senilai Rp33,36 miliar.
4. Realisasi penjualan Serum dan Diagnostika sebesar 44,79% di bawah anggaran atau Rp60,59 miliar di bawah anggaran karena rendahnya penjualan PPD 2 TU dan BIOSAT 1.5 masing

masing mencapai 19,00% dan 75,69% atau dibawah anggaran senilai Rp46,54 miliar dan Rp13,83 miliar karena stok produk PPD 2 TU dunia sangat terbatas serta kapasitas produksi serum untuk BIOSAT-1.5 masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pasar.

5. Realisasi penjualan Barang Dagangan dan Jasa mencapai 50,37% atau dibawah anggaran senilai Rp92,06 miliar karena pencapaian penjualan produk barang dagangan IPV hanya sebesar 18,75% atau dibawah anggaran senilai Rp18,38 miliar dan terdapat vaksin Varicella yang tidak terealisasi penjualannya dari yang dianggarkan sebesar Rp70,00 miliar.

Realisasi penjualan bersih tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi penjualan tahun 2015 dengan komposisi penjualan per kelompok:

1. Realisasi penjualan Vaksin Bakteri naik sebesar 74,54% atau senilai Rp227,58 miliar karena adanya penjualan produk vaksin Meningitis sebesar Rp218,23 miliar dan pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.
2. Realisasi penjualan Produk Barang Dagangan dan Jasa naik sebesar 473,48% atau senilai Rp77,15 miliar karena adanya penjualan vaksin IPV dan HPV masing-masing sebesar Rp18,38 miliar dan Rp22,80 miliar dimana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.

3. Realisasi penjualannya Vaksin Virus turun sebesar 15,77% atau senilai Rp268,91 miliar karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 10 ds masing-masing turun 31,99% dan 99,07% atau sebesar Rp349,39 miliar dan Rp87,79 miliar, walaupun terdapat switching dari vaksin tOPV ke produk bOPV 10 ds sebesar Rp59,93 miliar dan bOPV 20 ds meningkat sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar; serta terdapatnya peningkatan penjualan vaksin Hepatitis B Bayi sebesar 52,98% atau senilai Rp33,35 miliar.
4. Realisasi penjualan Vaksin Kombinasi turun sebesar 20,80% atau senilai 52,71 miliar karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya sebesar 24,96% atau turun senilai Rp62,44 miliar.
5. Realisasi penjualan Serum dan Diagnostika turun sebesar 7,43% atau senilai Rp5,99 miliar karena penurunan penjualan Serum ABU dan PPD 2 TU sebesar 21,53% dan 13,03% atau senilai Rp4,97 miliar dan Rp1,64 miliar.

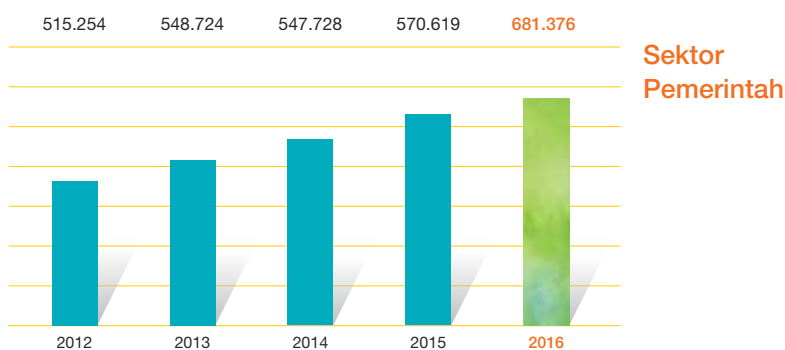
Penjualan Produk Bersih Per Segmen Usaha (Per Sektor)

Realisasi penjualan produk bersih per segmen usaha/per sektor selama tahun 2016 :

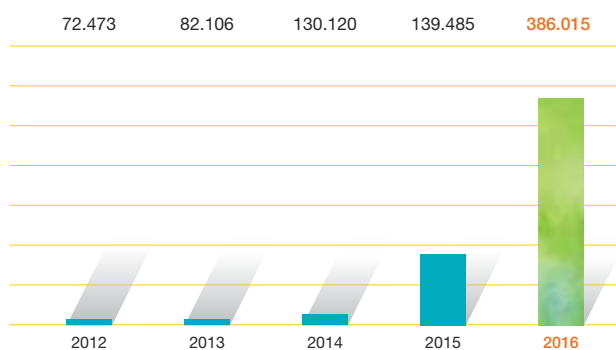
(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016-RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4
Sektor Pemerintah	515.254	548.724	547.728	570.619	751.949	681.376	19,41	(9,39)	110.757
Sektor Swasta	72.473	82.106	130.120	139.485	372.899	386.015	176,74	3,52	246.530
Sektor Ekspor	849.914	1.222.852	1.366.232	1.635.814	1.790.473	1.248.368	(23,69)	(30,28)	(387.446)
Biofarma klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	-	-
Total Penjualan Bersih	1.437.641	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)

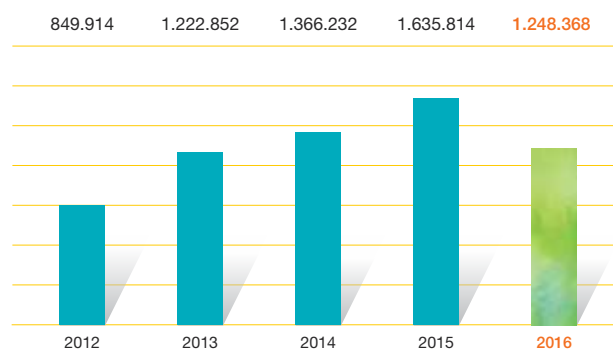
URAIAN KINERJA PERUSAHAAN



Penjualan Sektor Swasta



Penjualan Sektor Ekspor



1. Realisasi Penjualan Sektor Pemerintah Tahun 2016

- Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 sebesar 9,39% di bawah anggaran atau senilai Rp70,57 miliar di bawah anggaran karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya sebesar menjadi 76,32% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp57,48 miliar meskipun terdapat penjualan vaksin Td 10 ds dan vaksin campak 10 ds masing-masing mencapai 220,88% dan 131,34% atau diatas anggaran meningkat senilai Rp27,20 miliar dan Rp20,09 miliar.
- Dibandingkan dengan realisasi penjualan tahun 2015 terjadinya kenaikan sebesar 19,41% atau senilai Rp110,76 miliar, karena adanya penjualan vaksin bOPV 10 ds senilai Rp53,47 miliar yang merupakan realisasi atas eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016

dan karena adanya penjualan vaksin IPV senilai Rp64,37 miliar dimana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin tersebut, meskipun adanya penurunan penjualan vaksin Pentabio 5 ds sebesar 23,53% atau turun senilai Rp56,99 miliar karena masih banyaknya stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya.

2. Realisasi Penjualan Sektor Swasta Tahun 2016

- Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 realisasi penjualan 3,52% di atas anggaran atau senilai Rp13,12 miliar di atas anggaran karena penjualan vaksin Meningitis mencapai 218,23% atau melampaui anggaran senilai Rp118,23 miliar meskipun terdapat penjualan beberapa produk dibawah anggaran, yaitu BIOSAT-1.5 dan PPD 2 TU masing-masing hanya mencapai 75,69% dan 19,00% atau dibawah anggaran senilai Rp13,83 miliar dan Rp46,54 miliar.



- b. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 naik sebesar 176,74% atau senilai Rp246,53 miliar karena adanya penjualan vaksin Meningitis dan HPV masing-masing senilai Rp218,23 miliar dan Rp22,80 miliar dimana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin Meningitis dan HPV

3. Realisasi Penjualan Ekspor Tahun 2016

- a. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah sebesar 30,28% di bawah anggaran atau senilai Rp542,10 miliar di bawah anggaran. Bila dalam mata uang valas USD sebesar 26,10% dibawah anggaran atau senilai USD 33,62 juta dibawah anggaran. Penurunan penjualan ekspor karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 73,22% atau dibawah anggaran senilai Rp430,60 miliar dan Rp28,12

miliar dan pencapaian penjualan ekspor vaksin campak 10 ds hanya mencapai 55,65% atau dibawah anggaran senilai Rp31,53 miliar serta tidak terealisasinya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp15,64 miliar karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari Unicef.

- b. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah turun sebesar 23,69% atau turun senilai Rp387,45 miliar. Bila dalam mata uang valas USD turun sebesar 21,70%, atau turun sebesar USD 26,38 juta. Penurunan penjualan ekspor karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio, vaksin tOPV 10 ds dan tOPV 20 ds masing-masing turun 31,99%, 99,64% dan 38,63% atau senilai Rp349,39 miliar, Rp37,21 miliar dan Rp48,40 miliar meskipun terdapat peningkatan penjualan vaksin bOPV 20 ds sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar.

PROFITABILITAS

Laba (Rugi) Komprehensif

URAIAN	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]		SELISIH	
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2015/2016	2015 - RKAP
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)
Barang Dagang	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)
Jasa	3.469	3.382	4.805	4.858	4.100	5.315	9,40	29,64	457	1.215
Jumlah Penjualan Bersih	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)
BEBAN POKOK PENJUALAN										
Produk Perusahaan	580.216	718.463	767.609	852.361	978.454	931.879	9,33	(4,76)	79.518	(46.575)
Barang Dagangan	518	1.148	8.827	11.165	133.957	68.454	513,12	(48,90)	57.289	(65.503)
Beban Jasa	3.183	3.986	3.654	3.962	2.605	4.962	25,23	90,43	1.000	2.356
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	583.917	723.596	780.090	867.488	1.115.016	1.005.294	15,89	(9,84)	137.806	(109.722)
LABA (RUGI) KOTOR	853.724	1.130.085	1.263.991	1.478.430	1.803.940	1.310.465	(11,36)	(27,36)	(167.966)	(493.475)
Penghasilan Lain-lain	53.159	152.838	118.630	129.064	18.110	164.728	27,63	809,58	35.664	146.617
Beban penjualan	(58.592)	(72.830)	(99.182)	(126.818)	(159.600)	(133.996)	5,66	(16,04)	(7.178)	25.604
Beban Administrasi dan Umum	(227.583)	(304.313)	(349.010)	(421.759)	(498.274)	(402.002)	(4,68)	(19,32)	19.758	96.273
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(78.262)	(68.318)	(88.779)	(93.443)	(130.896)	(114.481)	22,52	(12,54)	(21.039)	16.415
Beban Bunga Pinjaman	-	-	-	-	(125)	(9.343)	-	7374,00	-	(9.218)

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

URAIAN	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN [%]	SELISIH	
	1	2	3	4	5	6		2015/2016	2015 - RKAP
							6/4	6/5	6-4
Beban Lain-Lain	(21.346)	(58.873)	(69.748)	(66.201)	(3.184)	(130.403)	96,98	3995,14	(64.202)
Jumlah	(332.624)	(351.496)	(488.089)	(579.157)	(773.970)	(625.497)	8,00	(19,18)	(46.340)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	521.100	778.589	775.902	899.274	1.029.970	684.968	(23,83)	(33,50)	(214.306)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN									
Pajak Kini	(137.261)	(207.288)	(197.136)	(232.893)	(275.614)	(185.425)	(20,38)	(32,72)	47.468
Pajak Tangguhan	2.053	1.166	3.427	4.213	3.871	1.498	(64,44)	(61,29)	(2.715)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(135.208)	(206.121)	(193.709)	(228.681)	(271.743)	(183.927)	(19,57)	(32,32)	44.754
LABA (RUGI) BERSIH	385.892	572.468	582.193	670.593	758.227	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN									
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi									
Surplus Revaluasi Aset Tetap Net	0	0	0	1.980.782	0	0	(100,00)	-	(1.980.782)
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	0	0	(21.701)	(828)	(448)	(8.313)	903,70	1756,71	(7.485)
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Kepemilikan Efek Tersedia Untuk Dijual	0	0	377	0	0	0	-	-	0
Pos-Pos yang akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi									
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	0	0	(21.323)	1.979.954	(448)	(8.313)	(100,42)	1756,71	(1.988.267)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	385.892	572.468	560.870	2.650.546	757.779	492.728	(81,41)	(34,98)	(2.157.819)





Profitabilitas Perusahaan dapat diukur dari menurunnya laba bersih sebesar Rp169,55 miliar dari Rp670,59 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp501,04 miliar di tahun 2016. Net Profit Margin (NPM) Perusahaan pada tahun 2016 sebesar 21,64%, mengalami penurunan sebesar 24,30% dari tahun 2015 yang sebesar 25,98%.

Penurunan perolehan laba bersih tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 karena

1. Stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak sisa dari pembelian Pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya sebesar di 74,50% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp91,12 miliar.

2. Penurunan penjualan ekspor karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 73,22% atau dibawah anggaran senilai Rp430,60 miliar dan Rp28,12 miliar dan pencapaian penjualan ekspor vaksin campak 10 ds hanya mencapai 55,65% atau dibawah anggaran senilai Rp31,53 miliar serta tidak terealisasinya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp15,64 miliar karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari Unicef.

Rasio Keuangan Bio Farma

Rasio Keuangan	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan [%]		Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
LIKUIDITAS [%]										
Rasio Kas	252,13	228,74	286,08	121,74	61,95	98,85	(18,80)	59,56	(22,89)	36,90
Rasio Lancar	522,91	395,98	537,18	437,04	412,60	408,14	(6,61)	(1,08)	(28,90)	(4,46)
RENTABILITAS [%]										
Gross Profit Margin	59,38	60,96	61,84	63,02	61,80	56,59	(10,21)	(8,43)	(6,43)	(5,21)
Operating Margin	34,03	36,93	35,57	35,65	34,78	28,50	(20,07)	(18,05)	(7,15)	(6,28)
Net Profit Margin	26,84	30,88	28,48	28,59	25,98	21,64	(24,30)	(16,69)	(6,95)	(4,34)
Return on Equity (ROE)	29,36	37,81	31,93	17,14	18,79	12,47	(27,26)	(33,64)	(4,67)	(6,32)
Return on Investment (ROI)	31,22	34,81	31,15	20,27	20,04	16,53	(18,42)	(17,49)	(3,73)	(3,50)
Return On Assets (ROA)	20,42	24,11	20,26	15,37	12,30	8,80	(42,77)	(28,48)	(6,57)	(3,50)
SOLVABILITAS [%]										
Debt to Equity	13,24	19,34	19,69	12,62	21,35	11,70	(7,29)	(45,21)	(0,92)	(9,65)
Turnover [times]										
Turnover Persediaan	3,59	3,95	2,94	2,20	2,83	1,72	(21,91)	(39,24)	(0,48)	(1,11)
Turnover Piutang	7,80	7,29	7,54	6,17	9,50	5,87	(4,87)	(38,16)	(0,30)	(3,62)
PERTUMBUHAN [%]										
Penjualan	108,20	128,94	110,27	114,77	122,03	98,71	(13,99)	(19,10)	(16,05)	(23,31)
Laba Usaha	126,51	139,92	106,19	115,05	131,43	78,91	(31,41)	(39,96)	(36,14)	(52,53)
Laba Sebelum Pajak	127,79	149,41	99,65	115,90	120,56	76,17	(34,28)	(36,82)	(39,73)	(44,39)

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Pada tahun 2016, rasio keuangan Perusahaan berupa likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas sebagai berikut:

1. Likuiditas.

Realisasi rasio likuiditas tahun 2016 untuk *Current Ratio* lebih rendah dari anggaran, karena penurunan aset lancar yang lebih besar dari penurunan liabilitas lancar. Selanjutnya untuk *Acid Test Ratio* dan *Cash Ratio* diatas anggarannya karena kas dan persediaan melebihi anggarannya.

2. Rentabilitas.

Realisasi rentabilitas tahun 2016 hampir seluruhnya di bawah anggarannya terutama karena adanya kenaikan total aset dan juga adanya efisiensi di berbagai sektor.

3. Solvabilitas.

Realisasi rasio solvabilitas tahun 2016 lebih baik dari anggarannya, karena realisasi hutang lebih rendah dari anggarannya.

4. *Turnover*

Realisasi turnover piutang Perusahaan terjadinya penurunan sebesar 0,30 dari 6,17 pada tahun 2015 menjadi 5,87 di tahun 2016. Hampir sama dan tidak banyak mengalami perubahan, ini berarti kemampuan Perusahaan dalam menagih piutang tidak berubah.

5. *Growth*

Pada akhir tahun 2016 Perusahaan terjadinya penurunan pertumbuhan laba bersih sebesar 25,28% dibanding tahun 2015 atau mencapai 66,08% dari anggarannya atau 33,92% di bawah anggaran.

Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Di Bio Farma Dilakukan Hal-Hal berikut:

1. Meningkatkan motivasi kerja melalui *training* yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan motivasi karyawan sehingga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

2. Lingkungan Kerja yang Kondusif

Peran Pimpinan (*top leader*) dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan merasa nyaman dan optimis dalam bekerja serta memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan mindset positif.

3. Integrasi Manajemen Waktu Dengan Sistem Perusahaan

Manajemen waktu yang terintegrasi dengan sistem Perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan yang efektif dan produktif.

4. *Reward*

Perusahaan memberikan *reward* untuk karyawan yang berprestasi, dedikasi dan profesionalisme yang tinggi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan bahwa maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Bio Farma:

1. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
2. Produksi-produk biologi dan produk farmasi, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.
3. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan klinik.
5. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a, b, c dan d.

Selain kegiatan usaha utama di atas, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bio Farma melakukan usaha pendidikan dan pelatihan, pertanian, peternakan, pengembangbiakan hewan laboratorium, properti, perkantoran, pergudangan, dan pariwisata.

SEGMENT/DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bio Farma memiliki perhatian khusus terhadap kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagai usaha untuk peningkatan core bisnis perusahaan. Dalam mendukung kegiatan Penelitian dan Pengembangan, Bio Farma menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk mendukung kinerja perusahaan.

Struktur Organisasi Divisi Penelitian dan Pengembangan Serta Surveilans dan Uji Klinis



Program Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Produk

• Penelitian dan Pengembangan Vaksin

Selama tahun 2016 terdapat kegiatan penelitian dan pengembangan vaksin, antara lain:

a. Pengembangan Vaksin

- Vaksin Rotavirus (MCRI)
- Vaksin Rabies
- Vaksin nOPV2 (BMGF)
- Vaksin Pneumococcus Whole Cell (PATH)
- Vaksin Typhoid Konjugat (IVI)

- Vaksin Heksavalen
- Vaksin acellular Pertusis
- Vaksin Hepatitis B
- Vaksin Hepatitis B Konsorsium
- Vaksin TB
- Adjuvant R4/E8 Pam2Cys
- Vaksin Influenza
- b. Pengembangan Biosimilar
 - Eritropoietin (EPO)
 - Trastuzumab
- c. Pengembangan stemcell
- d. Pengembangan Nanopartikel

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

2. Inovasi Produk

Kegiatan inovasi produk yang dilakukan pada tahun 2016:

- a. Pengembangan pemekatan toksin 1000 Lf.
- b. Pembuatan inokulum *C. Diphtheriae*.
- c. Pembuatan working seed Pertusis dalam gliserol.
- d. Peningkatan kapasitas konjugasi.
- e. Pembuatan formula induk proses Konjugasi Hib skala 500g.
- f. Pembuatan vaksin BCG dalam kemasan vial.
- g. Pembuatan Seedlot BCG.
- h. Peningkatan Rendemen Serum.
- i. Implementasi inspection camera for labeling.
- j. Penggunaan automated freeder untuk box printing.
- k. Produksi vaksin IPV dan uji stability untuk vaksin DT dan DTP menggunakan *bulk* PDT dan PTT.
- l. Penggunaan standar warna untuk inspeksi visual.
- m. Penggunaan alat bantu penyusun dus secara otomatis pada proses printing dus.
- n. Penggunaan standar volume untuk inspeksi visual.

3. Surveilans dan Evaluasi Produk

Kegiatan surveilans dan uji klinis yang dilakukan pada tahun 2016

- a. Surveilans AFP (Acute Flaccid Paralysis).
- b. Surveilans Polio Lingkungan.
- c. Surveilans Campak dalam rangka eliminasi campak.
- d. Surveilans Congenital Rubella Syndrome (CRS).
- e. Surveilans Rotavirus.
- f. Implementasi Farmakovigilans.
- g. Uji Klinis RV3 Phase II b.
- h. Kerjasama penelitian polio dengan Litbangkes yang berjudul "Status Antibodi terhadap Virus Polio pada anak yang mendapat OPV dan IPV di Indonesia".
- i. Persiapan Uji Klinis vaksin whole cell *Pneumococcus*, Typhoid conjugate, PMS bOPV dan PMS Menivax.
- j. Pengukuran titer antibodi difteri.
- k. Pemeriksaan titer antibodi karyawan.
- l. Evaluasi titer antibodi pada bayi pasca 1 tahun imunisasi dengan vaksin Flubio.
- m. Peran Probiotik dan Vaksinasi Influenza dalam menurunkan kejadian Influenza Like Illness pada Lansia.
- n. Pemeriksaan Hemaglutinasi-Inhibisi sampel penelitian.





SEGMENT/DIVISI KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Pada tahun 2016, segmen keuangan dan akuntansi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan *Un-Audited* maupun *Audited* tahun buku 2015.
2. Update data Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2015 (*Unaudited & Audited*), dan RKAP tahun 2016 pada program FIS-BUMN.
3. Menyusun laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan triwulan I, II dan III Tahun 2016.
4. Menyusun *Resume Plan of Action* RKAP tahun 2016.
5. Menghitung realisasi *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan tahun 2015, RKAP 2016 dan Triwulan I, II dan III Tahun 2016.
6. Menyempurnakan Aplikasi Anggaran dan ERP terkait modul penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen.
7. Menerima pengembalian restitusi PPN melalui proses pemeriksaan normal untuk masa pajak Januari – Juni 2014 dan untuk masa pajak Juli – Desember.
8. Melakukan pembuatan nomor EFIN dan penyampaian SPT PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun 2015 secara elektronik.
9. Melakukan jual beli Valuta Asing sesuai kebutuhan.
10. Menerbitkan LC untuk pembelian investasi/bahan baku dan barang investasi melalui LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

SEGMENT/DIVISI PENGADAAN (LOGISTIK)

Struktur Organisasi Divisi Pengadaan



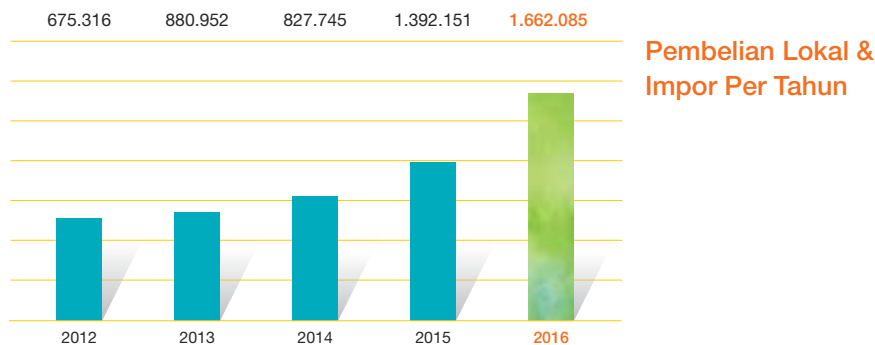
Kegiatan pembelian baik lokal maupun impor tahun 2016 sebesar Rp1,66 triliun atau 78,95% dari anggarannya, dan naik sebesar 19,39% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, dengan perincian per kelompok pembelian sebagai berikut:

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2014/ 2015	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4
Bahan Kimia	49.983	64.240	63.282	95.471	80.617	109.449	14,64	35,76	13.978
Bahan Baku & Penolong	133.654	179.390	195.388	233.644	280.467	344.451	47,43	22,81	110.806
Alat-alat Laboratorium	106.144	117.809	121.672	186.298	124.616	189.787	1,87	52,30	3.489
Perlengkapan Kerja	2.952	5.100	4.767	6.028	6.087	7.315	21,35	20,16	1.287
Perkemasan & Embalage	94.435	123.769	130.658	142.776	171.580	108.915	(23,72)	(36,52)	(33.861)
Pemeliharaan & Suku Cadang	59.849	88.226	69.778	76.455	120.247	136.776	78,90	13,75	60.320
Jasa Profesional	25.863	23.592	27.855	31.155	62.287	50.986	63,65	(18,14)	19.831
Investasi	176.122	248.276	174.623	544.974	1.032.812	542.671	(0,42)	(47,46)	(2.303)
Pengujian	3.138	4.089	5.416	7.008	7.544	6.357	(9,30)	(15,74)	(651)
Barang Umum	22.510	25.047	23.990	57.012	85.749	96.502	69,27	12,54	39.490
Barang Dagangan	666	1.414	10.316	11.331	133.299	68.879	507,90	(48,33)	57.548
Jumlah	675.316	880.952	827.745	1.392.151	2.105.305	1.662.085	19,39	(21,05)	269.934



Perbandingan pembelian lokal dan impor tahun 2016 adalah 52,58% lokal dan 47,42% impor, dimana pada barang-barang lokal terdapat juga barang impor yang dibeli melalui agen di Indonesia. Realisasi pembelian sebesar 21,05% di bawah anggaran karena kelompok perkemasan & embalase, jasa profesional, investasi, pengujian dan barang dagangan masing-masing hanya mencapai

63,48%, 81,86%, 52,54%, 84,26% dan 51,67% dari anggarannya, meskipun terdapat beberapa kelompok pembelian yang melampaui anggarannya secara signifikan yaitu bahan kimia, bahan baku dan penolong, alat-alat laboratorium dan perlengkapan kerja masing-masing sebesar 35,76%, 22,81%, 52,30% dan 20,16% di atas anggarannya.



SEGMENT ADMINISTRASI

Segment Administrasi tidak memiliki komoditas untuk dijual sesuai dengan karakteristik Administrasi yang mengelola strategi Perusahaan, segment ini tidak membukukan penjualan bersih ataupun laba.

INDIKATOR UTAMA PERUSAHAAN TAHUN 2016

Perhitungan Indikator Utama Perusahaan Tahun 2016

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	RKAP 2016	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	Selisih 2015/ 2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6-5	6-5
PERTUMBUHAN (%)									
a. Pendapatan/ Penjualan Netto	108,2	128,94	110,27	114,77	122,03	98,71	(13,99)	(19,10)	(16,06)
b. Laba Usaha	126,51	139,92	106,19	115,05	131,43	78,91	(31,42)	(39,96)	(36,14)
c. Laba Sebelum Pajak	127,79	149,41	99,65	115,9	120,56	76,17	(34,28)	(36,82)	(39,73)
Return On Investment (ROI) (%)	25,47	28,8	25,48	15,83	15,23	11,57	(26,94)	(24,05)	(4,26)
Profit Margin (PROMA) (%)	36,25	42	37,96	38,33	35,29	29,58	(22,83)	(16,17)	(8,75)

URAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	RKAP 2016	Realisasi 2016	Kenaikan/ Penurunan	Selisih 2015/ 2016	Selisih 2016/ RKAP	
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Company Productivity (COPRO) Rp/ Orang	918.391.979	1.192.270.887	1.224.519.153	1.312.570.441	1.477.776.082	1.119.272.625	(14,73)	(24,26)	(193.297.816)	(358.503.457)
Employee Productivity (EMPRO) Rp/ Orang	1.561.282.295	1.945.473.637	1.998.919.897	2.095.356.607	2.402.432.848	1.997.081.801	(4,69)	(16,87)	(98.274.806)	(405.351.046)
Asset Productivity (ASPRO) (%)	70,28	68,58	67,14	41,30	43,15	39,10	(5,32)	(9,39)	(2,20)	(4,05)
Inventory Turn Over (ITO) (kali)	3,59	3,95	2,94	2,2	2,83	1,72	(21,96)	(39,24)	(0,48)	(1,11)
Receivable Turn Over (RTO) (kali)	7,8	7,29	7,54	6,17	9,50	5,87	(4,81)	(38,16)	(0,30)	(3,62)
Base Cost Productivity (BASE PRO) (%)	65,97	63,07	64,43	64,35	65,22	71,50	11,11	9,63	7,15	6,28
QUALITY PERFORMANCE RATE										
a. Product Defect (%)	0,92	1,96	4,31	1,75	-	0,61	(65,12)	-	(1,14)	0,61
b. Material Defect (%))	0,19	0,06	0,15	0,15	-	0,48	220,11	-	0,33	0,48

*) KEP210/M-PBUMN/1999





KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENCAKUP PERBANDINGAN ANTARA KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015, TAHUN 2016 DENGAN RKAP 2016 DAN PENYEBAB KENAIKAN/PENURUNANNYA

Berikut ini adalah pembahasan mengenai kinerja keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Angka-angka yang berpadanan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 maupun target anggaran tahun 2016 (RKAP 2016) disajikan untuk tujuan analisa dan atau perbandingan.

ASET LANCAR, ASET TIDAK LANCAR DAN TOTAL ASET

Aset Lancar

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
ASET LANCAR											
Kas dan Setara Kas	498.498	891.251	971.717	555.939	326.933	447.950	(19,42)	37,02	(107.989)	121.017	-
Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Usaha	220.544	288.246	257.260	507.746	329.584	288.626	(43,16)	(12,43)	(219.120)	(40.958)	-
Piutang Lain-Lain	28	346	850	822	1.012	446	(45,74)	(55,92)	(376)	(566)	-
Persediaan	161.924	204.899	326.600	462.557	448.145	708.564	53,18	58,11	246.007	260.420	-
Uang Muka	18.363	38.623	50.412	102.353	658.438	54.052	(47,19)	(91,79)	(48.301)	(604.386)	-
Pajak Dibayar Dimuka	103.185	96.972	154.008	242.720	340.675	298.817	23,11	(12,29)	56.097	(41.858)	-
Biaya Dibayar Dimuka	1.530	1.590	4.767	10.163	13.781	12.137	19,42	(11,93)	1.973	(1.645)	-
Setoran Jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	1.889	3.104	2.726	1.592	-	800	(49,74)	-	(792)	800	-
Aset Lancar Lainnya	27.903	17.870	30.698	111.888	58.853	38.162	(65,89)	(35,16)	(73.726)	(20.691)	-
Jumlah Aset Lancar	1.033.864	1.542.901	1.824.639	1.995.781	2.177.422	1.849.555	(7,33)	(15,06)	(146.226)	(327.866)	2.358.153

Aset lancar Bio Farma di tahun 2016 tercatat sebesar Rp1,85 triliun turun sebesar Rp146,23 miliar atau 7,33% dibandingkan dengan aset lancar tahun 2015 yaitu sebesar Rp2,00 triliun dan 15,06% dibawah RKAP sebesar Rp2,18 triliun atau Rp327,87 miliar di bawah RKAP.

**Hal ini disebabkan oleh:**

1. Kas setara kas pada tahun 2016 tercatat Rp447,95 miliar turun sebesar Rp107,99 miliar atau 19,42% dibandingkan dengan kas dan setara kas tahun 2015 yaitu sebesar Rp555,94 miliar.
2. Piutang Usaha
 - a. Piutang usaha pelanggan dalam negeri pada tahun 2016 tercatat Rp27,06 miliar turun sebesar Rp18,92 miliar atau 41,15% dibandingkan dengan piutang usaha pelanggan dalam negeri tahun 2015 yaitu sebesar Rp45,98 miliar.
 - b. Piutang usaha pelanggan luar negeri pada tahun 2016 tercatat Rp261,23 miliar turun sebesar Rp200,31 miliar atau 43,40% dibandingkan dengan piutang usaha pelanggan dalam negeri tahun 2015 yaitu sebesar Rp461,55 miliar.
 - c. Piutang Usaha Jasa pada tahun 2016 tercatat Rp0,68 miliar. atau meningkat 28,48% dibandingkan dengan piutang usaha jasa tahun 2015 yaitu sebesar Rp0,53 miliar.
 - d. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang. Adanya hubungan berelasi mungkin mengakibatkan persyaratan transaksi tersebut di atas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.
3. Piutang lain-lain, pihak ketiga pada tahun 2016 tercatat Rp446 juta turun sebesar Rp376 juta miliar atau 45,74% dibandingkan dengan piutang lain-lain pihak ketiga tahun 2015 yaitu sebesar Rp822 juta.
4. Persediaan
 - a. Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kadaluarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan-aktual dibebankan ke beban (penghasilan) lainnya. Penyisihan dilakukan atas saldo persediaan yang telah dikurangkan dengan yang rusak atau kadaluarsa.
 - b. Pada bulan April 2016 *World Health Organisation* (WHO) mendeklarasikan penghentian penggunaan, pengedaran, penyimpanan dan produksi vaksin polio tipe 2 (trivalent Oral Polio Vaccine/tOPV) secara global terhitung 1 Mei 2016, dan menggantinya dengan bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengambil langkah-langkah menghentikan produksi tOPV dan *bulk* polio tipe 2 serta menarik tOPV dari peredaran dan menggantinya dengan bOPV.
 - c. Pada tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki persediaan *bulk* polio tipe 2 sejumlah 2.882,5 liter dengan nilai tercatat sebesar Rp22.214.885.705,00. Pertimbangan manajemen menyimpan *bulk* polio tipe 2 adalah:
 - Diperlukan untuk keperluan produksi sabin Inactivated Polio Vaccine (sIPV).



- Diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung program Pemerintah jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB)/outbreak atau wabah virus polio tipe 2 mengingat wilayah Indonesia masih berisiko tinggi terjadi KLB polio tipe 2.
 - Telah mendapat dukungan dari Pemerintah cc. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah meminta kepada WHO melalui representatif di Indonesia agar Perusahaan (PT Bio Farma) diberi wewenang sebagai rekanan nasional stockpile untuk monovalent Oral Polio Vaccine type 2 (mOPV2).
 - Diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung program WHO jika terjadi outbreak di luar Indonesia mengingat masih ditemukannya indikasi dan outbreak virus polio tipe 2 di Afganistan, Pakistan, Laos, Guinea, Nigeria, Chad, dan negara-negara di West Africa serta keterbatasan persediaan IPV.
 - WHO telah merekomendasikan Perusahaan untuk komunikasi dengantim WHO *Pre Qualification*(PQ) dan memproses mOPV2 sesuai prosedur PQ untuk merespon jika terjadi *outbreak* virus polio tipe 2 di luar Indonesia dan WHO berencana berkunjung ke Perusahaan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk membicarakan hal tersebut pada bulan Maret 2017.
5. Uang Muka
- a. Uang Muka pembelian lokal sebesar Rp2,20 miliar terutama dari pembangunan istal kuda di Cisarua sebesar Rp834 juta.
 - b. Uang Muka Impor dalam penyelesaian sebesar Rp7,47 miliar merupakan pembayaran biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya inkling, dan pajak terkait proses penanganan barang impor dari pelabuhan dalam negeri ke lokasi Perusahaan
6. Menurunnya pendapatan yang masih akan diterima pada tahun 2016 tercatat Rp800 juta turun sebesar Rp792 juta atau 49,74% dibandingkan dengan pendapatan yang masih akan diterima pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1,59 miliar
7. Aset lancar lainnya
- Persediaan dalam karantina berasal dari pembelian bahan baku vaksin dan sera dan bahan perkemasan yang sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masih dalam status karantina karena sedang dalam proses pengujian.
 - Persediaan dalam perjalanan per 31 Desember 2016 dan 2015 merupakan pembelian impor yang masuk dalam kategori persediaan dalam perjalanan karena pada tanggal tersebut posisinya masih berada di pelabuhan. Persediaan dalam perjalanan per 31 Desember 2016 merupakan pembelian Impor disposable media bag (ukuran 20 liter).
 - Persediaan dalam proses penggantian per 31 Desember tahun 2016 terutama dari persediaan bahan kemasan yang dinyatakan tidak lulus uji, supplier telah menyetujui mengganti seluruhnya di tahun 2017.

Perusahaan memiliki Aset Tetap dengan nilai buku sebesar Rp4 triliun setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp0,98 triliun.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

ASET TIDAK LANCAR

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
ASET TIDAK LANCAR											
Aset Pajak Tangguhan	11.746	14.447	17.874	22.087	25.835	23.585	6,78	(8,71)	1.498	(2.250)	30.416
Aset Tetap	985.019	1.126.086	1.163.473	3.605.537	4.529.929	3.998.187	10,89	(11,74)	392.650	(531.742)	5.851.363
Aset Takberwujud	13.365	20.214	37.855	36.005	30.190	38.634	7,30	27,97	2.629	8.444	22.843
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.694	956	766	21.253	694	12.493	(41,22)	1.701,30	(8.760)	11.800	10.191
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.011.824	1.161.703	1.219.969	3.684.882	4.586.647	4.072.899	10,53	(11,20)	388.017	(513.748)	5.914.812

Aset tidak lancar Bio Farma di tahun 2016 tercatat sebesar Rp4,07 triliun naik Rp388,02 miliar atau 10,53% dibandingkan dengan aset tidak lancar tahun 2015 yaitu sebesar Rp3,68 triliun dan 11,20% dibawah RKAP sebesar Rp4,59 triliun atau Rp513,75 miliar di bawah RKAP.

Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya Aset Tetap: mesin, pabrik dan *utility* pelaksanaan
 - a. *Filling line* BCG sebesar Rp51,51 miliar.
 - b. *Integrated WTP* sebesar Rp47,79 miliar.
 - c. *Integrated Filling Line 3 vial* sebesar Rp93,48 miliar.
 - d. *Integrated Filling Line For filling line 4* sebesar Rp51,72 miliar.
 - e. *Packaging line* sebesar Rp15,34 miliar.
 - f. *Vial ampoule Packaging line* sebesar Rp3,86 miliar.
 - g. Sistem kromatografi kolom sebesar Rp8 miliar
 - h. *Water Chiler* sebesar Rp6 miliar.
 - i. *Rubber stopper*/PV BCG sebesar Rp4,4 miliar.
 - j. *Autoclave* PMVV sebesar Rp4,25 miliar.
 - k. *Isolator* sebesar Rp4,13 miliar.
 - l. *Bioreactor* 150L sebesar Rp3,26 miliar.
 - m. *TFF System* sebesar Rp1,86 miliar.
 - n. Gardu hubung PLN sebesar Rp1,67 miliar.
2. Meningkatnya jumlah aset dalam pelaksanaan sebesar Rp321,34 miliar.
3. Meningkatnya peralatan kantor dan kendaraan bermotor sebesar Rp19,20 miliar.
4. Meningkatnya bangunan sebanyak 73,83 miliar.
5. Meningkatnya aset tidak berwujud sebesar 2,63 miliar.

TOTAL ASET

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan /Penurunan (%)		Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
ASET LANCAR											
Kas dan Setara Kas	498.498	891.251	971.717	555.939	326.933	447.950	(19,42)	37,02	(107.989)	121.017	-
Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	25.600	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Usaha	220.544	288.246	257.260	507.746	329.584	288.626	(43,16)	(12,43)	(219.120)	(40.958)	-
Piutang Lain-Lain	28	346	850	822	1.012	446	(45,72)	(55,92)	(376)	(566)	-
Persediaan	161.924	204.899	326.600	462.558	448.145	708.564	53,18	58,11	246.006	260.420	-
Uang Muka	18.363	38.623	50.412	102.353	658.438	54.052	(47,19)	(91,79)	(48.301)	(604.386)	-
Pajak Dibayar Dimuka	103.185	96.972	154.008	242.720	340.675	298.817	23,11	(12,29)	56.097	(41.858)	-
Biaya Dibayar Dimuka	1.530	1.590	4.767	10.163	13.781	12.137	19,42	(11,93)	1.974	(1.645)	-
Setoran Jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	1.889	3.104	2.726	1.592	-	800	(49,75)	-	(792)	800	-
Aset Lancar Lainnya	27.903	17.870	30.698	111.888	58.853	38.162	(65,89)	(35,16)	(73.726)	(20.691)	-
Jumlah Aset Lancar	1.033.864	1.542.901	1.824.639	1.995.781	2.177.422	1.849.555	(7,33)	(15,06)	(146.226)	(327.866)	2.358.153
ASET TIDAK LANCAR											
Aset Pajak Tangguhan	11.746	14.447	17.874	22.087	25.835	23.585	6,78	(8,71)	1.498	(2.250)	30.416
Aset Tetap	985.019	1.126.086	1.163.473	3.605.537	4.529.929	3.998.187	10,89	(11,74)	392.650	(531.742)	5.851.363
Aset Takberwujud	13.365	20.214	37.855	36.005	30.190	38.634	7,30	27,97	2.629	8.444	22.843
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.694	956	766	21.253	694	12.493	(41,22)	1.701,30	(8.760)	11.800	10.191
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.011.824	1.161.703	1.219.969	3.684.882	4.586.647	4.072.899	10,53	(11,20)	388.017	(513.748)	5.914.812
TOTAL ASET	2.045.688	2.704.604	3.044.607	5.680.663	6.764.069	5.922.454	4,26	(12,44)	241.791	(841.615)	8.272.965

Total Aset Bio Farma di tahun 2016 tercatat sebesar Rp5,92 triliun naik Rp241,79 miliar atau 4,26% dibandingkan dengan total aset tahun 2015 yaitu sebesar Rp5,68 triliun dan 12,44% dibawah RKAP sebesar Rp6,76 triliun atau sebesar Rp841,61 di bawah RKAP.

Hal ini terutama disebabkan

Adanya peningkatan jumlah persediaan sebesar Rp246,01 miliar, aset tetap dalam pelaksanaan Rp321,34 miliar, dan peningkatan peralatan pabrik dan peralatan lainnya sebesar Rp118,09 miliar serta pajak dibayar dimuka Rp56,1 miliar serta bangunan sebesar Rp73,83 miliar bangunan.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

LIABILITAS JANGKA PENDEK, LIABILITAS JANGKA PANJANG DAN TOTAL LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
LIABILITAS JANGKA PENDEK											
Utang Usaha	85.896	158.098	145.095	208.598	350.148	259.234	24,27	(25,96)	50.636	(90.914)	-
Utang Pajak	30.131	86.916	38.919	46.518	32.451	47.624	2,38	46,76	1.106	15.173	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	66.464	112.781	128.280	170.308	113.422	113.405	(33,41)	(0,02)	(56.902)	(17)	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.921	5.405	1.366	899	-	44	(95,09)	-	(855)	44	-
Liabilitas Lancar Lainnya	13.302	26.437	26.009	30.341	31.709	32.861	8,31	3,63	2.520	1.151	-
Jumlah Jangka Pendek	197.714	389.637	339.668	456.663	527.731	453.169	(0,77)	(14,13)	(3.494)	(74.562)	737.577

Bio Farma membukukan liabilitas jangka pendek tahun 2016 sebesar Rp453,17 miliar atau turun sebesar Rp3,49 miliar atau 0,77% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek tahun 2015 yang berjumlah Rp456,66 miliar dan 14,13% dibawah RKAP sebesar Rp527,73 miliar atau sebesar Rp74,56 miliar di bawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Penurunan pendapat yang diterima dimuka sebesar Rp855 miliar.
2. Menurunnya bahan baku/penolong sebesar Rp20,24 miliar dalam rupiah dan Rp37,38 miliar.
3. Penurunan biaya yang harus dibayar sebesar Rp56,90 miliar.
 - a. Jasa produksi karyawan Rp24,83 miliar.
 - b. Beban angkutan & Embalage Rp7,87 miliar.
 - c. Keagenan ekspor, royalti, dan insentif penjualan Rp2,50 miliar.
 - d. Pemeliharaan & perbaikan Rp3,35 miliar.
 - e. Monitoring kualitas produk Rp3,70 miliar.
 - f. Inventaris bangunan, mesin & pabrik dalam penyelesaian Rp24,82 miliar.
 - g. Lainnya Rp2,07 miliar.



LIABILITAS JANGKA PANJANG

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/ 2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
LIABILITAS JANGKA PANJANG											
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	457.500	-	-	-	-	(457.500)	-
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	41.441	48.371	136.368	152.022	177.089	167.133	9,94	(5,62)	15.111	(9.956)	-
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	-	24.882	27.846	27.800	-	-	-	(27.846)	(27.800)	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.441	48.371	161.250	179.868	662.389	167.133	(7,08)	(74,77)	(12.735)	(495.256)	1.485.333



KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Bio Farma membukukan liabilitas jangka panjang tahun 2016 sebesar Rp167,13 miliar atau turun sebesar Rp12,73 miliar atau 7,08% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang tahun 2015 yang berjumlah Rp179,87 miliar dan 74,77% dibawah RKAP sebesar Rp662,39 miliar atau sebesar Rp495,26 miliar di bawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

Penurunan liabilitas tidak lancar lainnya sebesar Rp27,85 miliar.

Pada tahun 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian untuk melaksanakan suatu proyek riset dan pengembangan yang dibiayai dengan Grant sebesar US\$2,918,998.00. Perjanjian ini berlaku sejak 17 November 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 dengan evaluasi berkala. Pada 31 Desember 2016 proyek telah diselesaikan seluruhnya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian dan telah disetujui. Oleh karena itu perusahaan telah mengakui seluruh grant sebagai pendapatan hibah pada tanggal 31 Desember 2016.

TOTAL LIABILITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
LIABILITAS JANGKA PENDEK											
Utang Usaha	85.896	158.098	145.095	208.598	350.148	259.234	24,27	(25,96)	50.636	(90.914)	-
Utang Pajak	30.131	86.916	38.919	46.518	32.451	47.624	2,38	46,76	1.106	15.173	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	66.464	112.781	128.280	170.308	113.422	113.405	(33,41)	(0,02)	(56.902)	(17)	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.921	5.405	1.366	899	0	44	(95,09)	-	(855)	44	-
Pinjaman Jk. Panjang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas Lancar Lainnya	13.302	26.437	26.009	30.341	31.709	32.861	8,31	3,63	2.520	1.151	-
Jumlah Jangka Pendek	197.714	389.637	339.668	456.663	527.731	453.169	(0,77)	(14,13)	(3.494)	(74.562)	737.577
LIABILITAS JANGKA PANJANG											
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	457.500	-	-	-	-	(457.500)	-
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	41.441	48.371	136.368	152.022	177.089	167.133	9,94	(5,62)	15.111	(9.956)	-
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	-	24.882	27.846	27.800	-	-	-	(27.846)	(27.800)	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.441	48.371	161.250	179.868	662.389	167.133	(7,08)	(74,77)	(12.735)	(495.256)	1.485.333
JUMLAH LIABILITAS	239.155	438.008	500.919	636.532	1.190.121	620.302	(2,55)	(47,88)	(16.230)	(569.818)	2.222.910

Bio Farma membukukan total liabilitas tahun 2016 sebesar Rp620,30 miliar atau turun sebesar Rp16,23 miliar atau 2,55% dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2015 yang berjumlah Rp636,53 miliar dan 47,88% dibawah RKAP sebesar Rp1,19 triliun atau sebesar Rp569,82 miliar di bawah anggaran.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Penurunan biaya yang masih harus dibayar Rp56,91 miliar.
2. Penurunan pendapatan diterima dimuka Rp854,58 juta.

C. EKUITAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
EKUITAS											
Modal Saham	750.000	750.000	1.250.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	21,21	-	350.000	-	-
Saldo Laba (Rugi)											
- Dicapangkan	670.641	941.919	786.075	816.422	881.101	899.824	10,22	2,12	83.402	18.723	-
- Belum Dicapangkan	0	675	0	(2484)	-	-	(100,00)	-	2.484	-	-
Laba Periode Berjalan	385.892	572.468	577.590	670.593	758.224	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.183)	-
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	(69.976)	1.909.600	1.934.623	1.901.287	(0,44)	(1,72)	(8.313)	(33.336)	-
Jumlah Ekuitas	1.806.533	2.265.062	2.543.689	5.044.132	5.573.948	5.302.152	5,12	(4,88)	258.021	(271.796)	6.070.005
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.045.688	2.703.069	3.044.608	5.680.663	6.764.069	5.922.454	4,26	(12,44)	241.791	(841.615)	8.292.915

Bio Farma membukukan total ekuitas tahun 2016 sebesar Rp5,30 triliun atau naik sebesar Rp258,02 miliar atau 5,12% dibandingkan dengan total ekuitas tahun 2015 yang berjumlah Rp5,04 triliun dan 4,88% dibawah RKAP sebesar Rp5,57 triliun atau sebesar Rp271,80 miliar di bawah RKAP.

Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Modal Saham
 - a. Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No 34, tanggal 14 Desember 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0024481. AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), modal dasar Perseroan

meningkat dari semula Rp5 triliun (terdiri dari 5.juta lembar saham) menjadi Rp8 triliun (terdiri dari 8.juta lembar saham).

- b. Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp1,65 triliun (terdiri dari 1,65 juta lembar saham) menjadi Rp2 triliun (terdiri dari 2 juta lembar saham) dengan mengkapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp350 miliar.
- c. Peningkatan saldo Laba (Rugi) dicadangkan sebesar Rp899,82 miliar atau naik sebesar Rp83,40 miliar atau 10,22% dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun 2015 yang berjumlah Rp816,42 miliar dan 2,12% diatas RKAP sebesar Rp881,10 miliar atau sebesar Rp18,72 miliar diatas RKAP.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

2. Saldo Laba (Rugi) dicadangkan Sesuai dengan PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan mengalokasikan dana cadangan untuk bina lingkungan.

Rp5,68 triliun dan 12,44% dibawah RKAP sebesar Rp6,76 triliun atau sebesar Rp841,61 miliar dibawah RKAP.

Kenaikan ini disebabkan oleh:

Adanya peningkatan persediaan sebesar Rp246,01 miliar, aset tetap dalam pelaksanaan sebesar Rp321,34 miliar dan peningkatan peralatan pabrik dan peralatan lainnya sebesar Rp118,09 miliar. Dari sisi ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp258,02 miliar yang berasal dari peningkatan laba tahun berjalan.

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Bio Farma membukukan total liabilitas & ekuitas tahun 2016 sebesar Rp5,92 triliun atau naik sebesar Rp241,79 miliar atau 4,26% dibandingkan dengan total liabilitas & ekuitas tahun 2015 yang berjumlah

PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA, BEBAN DAN LABA (RUGI), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, DAN TOTAL LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**PENJUALAN/PENDAPAT USAHA****PENJUALAN BERSIH**

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PENJUALAN BERSIH											
Produk Perusahaan	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)	-
Barang Dagang	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)	-
Jasa	3.469	3.382	4.805	4.858	4.100	5.315	9,40	29,64	457	1.215	-
Jumlah Penjualan Bersih	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

Bio Farma membukukan penjualan bersih tahun 2016 sebesar Rp2,32 triliun atau turun sebesar Rp30,16 miliar atau 1,29% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 2015 yang berjumlah Rp2,35 triliun dan 20,66% dibawah RKAP sebesar Rp2,92 triliun atau sebesar Rp603,20 miliar dibawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Penurunan penjualan produk perusahaan sebesar 4,61% atau sebesar Rp107,31 miliar.
2. Penurunan penjualan vaksin virus sebesar Rp267,64 miliar
3. Penurunan penjualan vaksin kombinasi sebesar Rp56,36 miliar
4. Penurunan penjualan sera & diagnostia sebesar Rp5,34 miliar
5. Penurunan penjualan Inovac rabies vero sebesar Rp8,53 miliar
6. Penurunan penjualan Polyvalent Snake Anti Vernom sebesar Rp2,27 miliar

PENJUALAN JASA

1. Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari jasa imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium.
2. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah statusnya menjadi *Strategic Business Unit* (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi.

Penjualan Produk Perusahaan Per Segmen/Kelompok Produk

(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2012				2013			
	Pemerintah	Swasta		Jumlah	Pemerintah	Swasta		Jumlah
		Lokal	Ekspor			Lokal	Ekspor	
PENJUALAN PRODUK								
Vaksin Bakteri	127.508	5.714	93.490	226.713	130.988	3.558	99.208	233.754
Vaksin Virus	177.941	5.888	755.856	939.684	183.656	10.268	1.108.929	1.302.853
Vaksin Kombinasi	209.246	472	568	210.286	233.509	341	14.715	248.565
Sera & Diagnostika	559	56.022	-	56.581	571	63.064	-	63.635
Jumlah	515.254	68.096	849.914	1.433.264	548.724	77.230	1.222.852	1.848.806
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	(298)	-	(298)	-	(354)	-	(354)
Penjualan Produk Bersih	515.254	67.798	849.914	1.432.966	548.724	78.680	1.222.852	1.848.452

(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	2014				2015			
	Pemerintah	Swasta		Jumlah	Pemerintah	Swasta		Jumlah
		Lokal	Ekspor			Lokal	Ekspor	
PENJUALAN PRODUK								
Vaksin Bakteri	98.522	7.776	111.308	217.605	137.172	6.748	161.369	305.289
Vaksin Virus	167.684	34.687	1.254.909	1.457.280	191.216	47.576	1.466.512	1.705.305
Vaksin Kombinasi	273.678	2.870	-	276.548	242.231	3.265	7.909	253.404
Sera & Diagnostika	76	90.149	15	90.240	-	80.664	25	80.689
Jumlah	539.959	135.481	1.366.232	2.041.673	570.619	138.253	1.635.815	2.344.687
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	(12.685)	-	(12.685)	-	(15.063)	-	(15.063)
Penjualan Produk Bersih	539.959	122.796	1.366.232	2.028.988	570.619	123.190	1.635.815	2.329.624

(Dalam Juta Rupiah)

URAIAN	RKAP 2016					2016				
	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah
		Lokal	Ekspor				Lokal	Ekspor		
	PENJUALAN PRODUK									
Vaksin Bakteri	136.420	106.414	192.622	-	435.456	157.150	232.065	143.650	-	532.865
Vaksin Virus	274.804	39.309	1.548.853	-	1.862.967	274.617	57.063	1.104.718	-	1.436.397
Vaksin Kombinasi	242.725	4.378	48.998	-	296.100	185.244	15.451	-	-	200.695
Sera & Diagnostika	-	135.293	-	-	135.293	-	74.696	-	-	74.696
Jumlah	653.949	285.395	1.790.473	3.635	2.733.452	617.011	379.275	1.248.368	-	2.244.654

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

URAIAN	RKAP 2016					2016				
	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah	Pemerintah	Swasta		Anak Perusahaan	Jumlah
		Lokal	Ekspor				Lokal	Ekspor		
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	-	-	-	-	(22.339)	-	-	(22.339)
Penjualan Produk Bersih	653.949	285.395	1.790.473	3.635	2.733.452	617.011	356.936	1.248.368	-	2.222.315

Rekapitulasi Penjualan Produk Perusahaan Per Segmen/Kelompok Produk

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP	RAKP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PENJUALAN PRODUK											
Vaksin Bakteri	226.713	233.754	217.605	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.576	97.409	-
Vaksin Virus	939.684	1.302.853	1.457.280	1.705.305	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,90)	(268.907)	(426.569)	-
Vaksin Kombinasi	210.286	248.564	276.548	253.404	296.100	200.695	(20,80)	(32,22)	(52.710)	(95.405)	-
Sera & Diagnostika	56.581	63.635	90.240	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)	(60.597)	-
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	-	-	(3.635)	-
Jumlah	1.433.264	1.848.806	2.041.673	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)	(488.798)	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(298)	(354)	(12.685)	(15.063)		(22.338,621)	48,30	-	(7.276)	(22.339)	-
Penjualan Produk Bersih	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)	2.452.728





Penjualan Bersih Segmen/Kelompok Produk Vaksin Bakteri

Bio Farma membukukan penjualan vaksin bakteri tahun 2016 sebesar Rp532,86 miliar atau naik sebesar Rp227,58 miliar atau 74,54% dibandingkan dengan penjualan vaksin bakteri tahun 2015 yang berjumlah Rp305,29 miliar dan 22,377% di atas RKAP sebesar Rp435,46 miliar atau sebesar Rp97,41 miliar diatas RKAP.

Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, meningkatnya jumlah penjualan produk vaksin Meningitis yang mencapai 218,23% dari anggarannya atau bila dalam nominal lebih tinggi senilai Rp118,23 miliar dari anggarannya.
2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan vaksin bakteri tahun 2015, meningkatnya penjualan vaksin penjualan produk vaksin Meningitis senilai Rp218,23 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.

Penjualan Bersih Segmen/Kelompok Produk Vaksin Virus

Bio Farma membukukan penjualan vaksin virus tahun 2016 sebesar Rp1,44 triliun atau turun sebesar Rp268,91 miliar atau 15,77% dibandingkan dengan penjualan vaksin virus tahun 2015 yang berjumlah Rp1,70 triliun dan 22,90% dibawah RKAP sebesar Rp1,86 triliun atau sebesar Rp426,57 miliar di bawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, adanya program switching tOPV ke bOPV atau eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 88,89% atau masing-masing dibawah anggaran senilai Rp430,59 miliar dan Rp16,16 miliar.
2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan vaksin virus tahun 2015, adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 10 ds masing-masing turun 31,99% dan 99,07% atau senilai Rp349,39 miliar dan Rp87,79 miliar, meskipun untuk vaksin tOPV tersebut terdapat

switching ke produk bOPV 10 ds senilai Rp59,93 miliar dan bOPV 20 ds meningkat sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar; disamping itu terdapat peningkatan penjualan vaksin Hepatitis B Bayi sebesar 52,98% atau senilai Rp33,35 miliar.

Penjualan Bersih Segmen (Kelompok Produk) Vaksin Kombinasi

Bio Farma membukukan penjualan vaksin kombinasi tahun 2016 sebesar Rp200,70 miliar atau turun sebesar Rp52,71 miliar atau 20,80% di bawah penjualan vaksin kombinasi tahun 2015 yang berjumlah Rp253,40 miliar dan 32,22% di bawah RKAP sebesar Rp296,10 miliar atau sebesar Rp95,41 miliar dibawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya menjadi 72,63% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp70,74 miliar serta tidak terealisasinya penjualan vaksin Pentabio 10 ds ke Unicef karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari yang dianggarkan senilai Rp33,36 miliar.
2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan vaksin kombinasi tahun 2015, turunnya penjualan karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya sebesar 24,96% atau turun senilai Rp62,44 miliar.

Penjualan Bersih Segmen/Kelompok Produk Sera dan Diagnostika

Bio Farma membukukan penjualan Sera dan Diagnostika tahun 2016 sebesar Rp74,70 miliar atau turun sebesar Rp5,99 miliar atau 7,43% di bawah penjualan Sera dan Diagnostika tahun 2015 yang berjumlah Rp80,69 miliar dan 44,79% di bawah RKAP sebesar Rp135,29 miliar atau sebesar 60,59 miliar dibawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, menurunnya jumlah penjualan PPD 2 TU dan BIOSAT1.5 masing masing mencapai 19,00% dan 75,69% atau

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

dibawah anggaran senilai Rp46,54 miliar dan Rp13,83 miliar karena stok produk PPD 2 TU dunia sangat terbatas serta kapasitas produksi serum untuk BIOSAT-1.5 masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pasar.

2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan sera dan diagnostika tahun 2015, turunnya penjualan produk Serum ABU dan PPD 2 TU masing-masing sebesar 21,53% dan 13,03% atau senilai Rp4,97 miliar dan Rp1,64 miliar.

Penjualan Segmen/Kelompok Produk Barang Dagangan dan Jasa

Penjualan Barang Dagangan

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RAKP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PEMERINTAH											
Fluarix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaksin HPV 5 ds	-	-	-	-	98.000	18.377	-	-	18.377	18.377	-
Pneumo 23	-	-	-	-	-	45.988	-	-	45.988	45.988	-
SWASTA											
Vaksin HPV	-	-	-	-	-	22.804	-	-	22.804	22.804	-
Polyvalent Snake Anti Venom	1.206	1.848	2.641	3.393	1.172	1.125	(66,83)	-	(2.268)	1.125	-
HJ BD IPV 5 DS	-	-	7.769	-	-	-	-	-	-	-	-
Imovac Rabies Vero	-	-	-	8.529	7.232	-	-	-	(8.529)	-	-
Vaksin Rabies	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Vaksin Varicella	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.206	1.848	10.410	11.922	-	88.294	640,57	-	76.372	88.294	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(123)	(486)	-	(165)	(65,99)	-	321	(165)	-
Penjualan Bersih Barang Dagangan	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,60	(51,42)	76.692	(93.275)	478.888

Bio Farma membukukan penjualan barang dagangan tahun 2016 sebesar Rp88,13 miliar atau naik sebesar Rp76,69 miliar atau 670,63% di atas penjualan barang dagangan tahun 2015 yang berjumlah Rp11,44 miliar dan 51,42% di bawah RKAP sebesar Rp181,40 miliar atau sebesar Rp93,28 miliar di bawah anggaran.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, pencapaian penjualan produk barang dagangan IPV hanya sebesar 65,68% atau dibawah anggaran senilai Rp33,63 miliar dan terdapat vaksin Varicella yang tidak terealisasi penjualannya dari yang dianggarkan sebesar Rp70,00 miliar.
2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan barang dagangan tahun 2015, meningkatnya penjualan vaksin IPV dan HPV masing-masing senilai Rp18,38 miliar Rp22,80 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.



Penjualan Jasa

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2015/2016	Selisih 2016-RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Imunisasi	2.134	2.501	3.978	3.529	2.665	3.975	12,62	49,15	445	1.310	-
Laboratorium	1.337	881	827	1.329	1.435	1.660	24,91	15,71	331	225	-
Jumlah	3.471	3.382	4.805	4.859	4.100	5.635	15,98	37,44	776	1.535	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(2)	(0)	-	(0)	-	(320)	160.034	-	(320)	(320)	-
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	3.469	3.382	4.805	4.859	4.100	5.315	9,39	29,64	456	1.215	8599,308
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

Bio Farma membukukan penjualan jasa tahun 2016 sebesar Rp5,32 miliar atau naik sebesar Rp457 juta atau 9,39% di atas penjualan barang dagangan tahun 2015 yang berjumlah Rp4,86 miliar dan 29,64% diatas RKAP sebesar Rp4,10 miliar atau sebesar Rp1,21 miliar di atas anggaran.

Peningkatan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, meningkatnya penjualan jasa imunisasi sebesar 49,15%

atau sebesar Rp1,31 miliar diatas RKAP dan peningkatan penjualan jasa laboratorium sebesar 15,71% atau sebesar Rp225 juta diatas RKAP

2. Dibandingkan dengan jumlah penjualan jasa tahun 2015, meningkatnya penjualan jasa untuk Imunisasi sebesar 12,63% atau sebesar Rp446 juta dan peningkatan penjualan jasa laboratorium sebesar 24,93% atau Rp331 juta.



KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Rekapitulasi Penjualan Produk Perusahaan

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
PENJUALAN PRODUK											
Vaksin Bakteri	226.713	233.754	217.605	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.577	97.409	269.303
Vaksin Virus	939.684	1.302.853	1.457.280	1.705.305	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,90)	(268.907)	(426.569)	1.798.624
Vaksin Kombinasi	210.286	248.564	276.548	253.404	296.100	200.695	(20,80)	(32,22)	(52.709)	(95.405)	298.351
Sera & Diagnostika	56.581	63.635	90.240	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)	(60.597)	86.450
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	(100,00)	-	(3.635)	-
Jumlah	1.433.264	1.848.806	2.041.673	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)	(488.798)	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(298)	(354)	(12.685)	(15.063)	-	(22.339)	48,30	-	(7.276)	(22.339)	-
Jumlah Penjualan Produk Bersih	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)	-
Penjualan Barang Dagang & Jasa											
Penjualan Barang Dagang	1.206	1.848	10.410	11.922	-	88.294	640,57	-	76.372	88.294	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(123)	(486)	-	(165)	(65,99)	-	320	(165)	-
Jumlah Penjualan Bersih Barang Dagangan	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,60	(51,42)	76.693	(93.275)	478.888
Penjualan Jasa	3.471	3.382	4.805	4.859	4.100	5.635	15,98	37,44	776	1.535	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(2)	-	(0)	(0)	-	(320)	160.033,57	-	(320)	(320)	-
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	3.469	3.382	4.805	4.858	4.100	5.315	9,40	29,64	457	1.215	8599,308
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa

Bio Farma membukukan penjualan produk, barang dagangan & jasa tahun 2016 sebesar Rp2,32 triliun atau turun sebesar Rp30,16 miliar atau 1,29% di atas penjualan produk, barang dagangan & jasa tahun 2015 yang berjumlah Rp2,35 triliun dan 20,66% di bawah RKAP sebesar Rp2,92 triliun atau sebesar Rp603,20 miliar di bawah RKAP.

Penjualan Produk Bersih Per Segmen/Sektor Usaha

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Sektor Pemerintah	515.254	548.724	547.728	570.619	751.949	681.376	19,41	(9,39)	110.757	(70.574)	795.573
Sektor Swasta	72.473	82.106	130.120	139.485	372.899	386.015	176,74	3,52	246.530	13.117	395.148
Sektor Ekspor	849.914	1.222.852	1.366.232	1.635.814	1.790.473	1.248.368	(23,69)	(30,28)	(387.446)	(542.105)	1.749.494
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635		(100,00)	-	-	(3.635)	-
Total Penjualan Bersih	1.437.641	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215



Penjualan Produk Segmen/Sektor Pemerintah

Bio Farma membukukan penjualan produk di segmen/ sektor pemerintah tahun 2016 sebesar Rp681,38 miliar atau naik sebesar Rp110,76 miliar atau 19,41% di atas penjualan produk segmen/sektor Pemerintah tahun 2015 yang berjumlah Rp570,62 miliar dan 9,39% di bawah RKAP sebesar Rp751,95 miliar atau sebesar 70,57 miliar dibawah RKAP.

Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, menurunnya penjualan produk di segmen (sektor) Pemerintah hal ini disebabkan oleh stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya menjadi 74,50% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp91,12 miliar meskipun terdapat penjualan vaksin Td 10 ds dan vaksin campak 10 ds masing-masing mencapai 220,88% dan 131,34% atau diatas anggaran meningkat senilai Rp27,20 miliar dan Rp20,09 miliar.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 penjualan produk mengalami kenaikan karena adanya penjualan vaksin bOPV 20 ds senilai Rp53,47 miliar yang merupakan realisasi atas eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 dan karena adanya penjualan vaksin IPV senilai Rp64,37 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin tersebut, meskipun terdapat penurunan penjualan vaksin Pentabio 5 ds sebesar 23,53% atau turun senilai Rp56,99 miliar sebagai akibat dari stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya.

Penjualan Produk Segmen/Sektor Swasta

Bio Farma membukukan penjualan produk di Segmen (sektor) Swasta tahun 2016 sebesar 386,02 miliar atau naik sebesar Rp246,53 miliar atau 176,74% di atas penjualan produk segmen (sektor) Swasta tahun 2015 yang berjumlah Rp139,49 miliar dan 3,52% diatas RKAP sebesar Rp372,90 miliar atau sebesar Rp13,12 miliar diatas RKAP.

Peningkatan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, peningkatan penjualan sektor swasta disebabkan oleh penjualan vaksin Meningitis mencapai 218,23% atau melampaui anggaran senilai Rp118,23 miliar meskipun terdapat penjualan beberapa produk dibawah anggaran, yaitu BIOSAT1.5 dan PPD 2 TU masing-masing hanya mencapai 75,69% dan 19,00% atau dibawah anggaran senilai Rp13,83 miliar dan Rp46,54 miliar.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 penjualan produk mengalami kenaikan terutama karena adanya kenaikan penjualan penjualan vaksin Meningitis dan HPV masing-masing senilai Rp218,23 miliar dan Rp22,80 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin tersebut.

Penjualan Produk Segmen (Sektor) Ekspor

Bio Farma membukukan penjualan produk di segmen (sektor) Ekspor tahun 2016 sebesar Rp1,25 triliun atau turun sebesar Rp387,45 miliar atau 23,69% di bawah penjualan produk segmen (sektor) Ekspor tahun 2015 yang berjumlah Rp1,64 triliun dan 30,28% di bawah RKAP sebesar Rp1,79 triliun atau sebesar Rp542,10 miliar dibawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah mencapai 69,72% atau bila dalam mata uang valas USD mencapai 73,90%, bila dalam nominal dibawah anggaran senilai Rp542,10 miliar atau USD 33,62 juta. Pencapaian penjualan ekspor dibawah anggaran terutama karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 73,22% atau dibawah anggaran senilai Rp430,60 miliar dan Rp28,12 miliar dan pencapaian penjualan ekspor vaksin campak 10 ds hanya mencapai 55,65% atau dibawah anggaran senilai Rp31,53 miliar serta tidak terealisasinya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp33,36 miliar karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari Unicef.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah turun sebesar 23,69% dan bila dalam mata uang valas USD turun sebesar 21,70%, bila dalam nominal turun senilai Rp387,45 miliar atau USD 26,38 juta; Penurunan penjualan ekspor tersebut terutama karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio, vaksin tOPV 10 ds dan tOPV 20 ds masing-masing turun 31,99%, 99,64% dan 38,63% atau senilai Rp349,39 miliar, Rp37,21 miliar dan Rp48,40 miliar meskipun terdapat peningkatan penjualan vaksin bOPV 20 ds sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar.

BEBAN USAHA

Beban Pokok Penjualan Produk Perusahaan

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Beban Produksi	586.917	743.601	882.769	962.608	1.061.756	1.124.929	16,86	5,95	162.321	63.172
PERSEDIAAN PRODUK DALAM PROSES										
Awal Tahun	48.087	34.134	46.676	97.889	93.187	222.475	127,27	138,74	124.586	129.288
Akhir Tahun	34.134	46.676	97.889	222.475	(102.291)	(357.924)	(260,88)	249,91	(580.399)	(255.633)
Beban Pokok Produksi	600.870	731.059	831.555	838.022	1.052.652	989.480	18,07	(6,00)	151.458	(63.172)
PERSEDIAAN PRODUK JADI										
Awal Tahun	31.059	46.963	42.582	65.775	121.684	33.162	(49,58)	(72,75)	(32.614)	(88.523)
Kadaluarsa/Rusak	3.229	14.561	38.040	16.833	-	(6.397)	(138,00)	#DIV/0!	(23.230)	(6.397)
Promosi, Rusak, Disumbangkan Penggantian dan Pemakaian Sendiri	837	793	1.234	738	(679)	(1.830)	(347,82)	169,52	(2.568)	(1.151)
Beban Pokok Barang Tersedia untuk Dijual	627.863	762.668	834.863	886.225	1.173.658	1.014.415	14,46	(13,57)	128.190	(159.243)
Dijual untuk Imunisasi	684	1.623	1.479	703	(378)	(679)	(196,59)	79,71	(1.381)	(301)
Persediaan Akhir Tahun	46.963	42.582	65.775	33.162	(196.111)	(81.857)	(346,84)	(58,26)	(115.019)	114.253
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produk	580.216	718.463	767.609	852.361	977.169	931.879	9,33	(4,63)	79.518	(45.290)
Beban Pokok Anak Perusahaan	-	-	-	-	1.284	-	#DIV/0!	(100,00)	-	(1.284)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Produk Konsolidasi	580.216	718.463	767.609	852.361	978.454	931.879	9,33	(4,76)	79.518	(46.575)

Di Tahun 2015 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk perusahaan sebesar Rp931,88 miliar atau naik sebesar Rp79,52 miliar atau 9,33% di atas beban pokok penjualan produk perusahaan tahun 2015 yang berjumlah Rp852,36 miliar dan 4,76% dibawah RKAP sebesar Rp978,45 miliar atau sebesar Rp46,58 miliar dibawah RKAP.

**Hal ini disebabkan oleh:**

1. Seiring dengan komposisi penjualannya yang lebih banyak berupa produk jadi dibanding komposisi penjualan yang sudah dianggarkan dan realisasi tahun lalu lebih banyak berupa penjualan *bulk* polio, sehingga realisasi beban pokok penjualan produk tahun 2016 lebih tinggi dari pencapaian penjualannya sebesar 81,30% dari dari anggarannya.
2. Peningkatan pemakaian bahan baku sebesar Rp118,91 miliar.
3. Peningkatan beban karyawan sebesar Rp19,58 miliar.
4. Peningkatan pemeliharaan & perbaikan sebesar Rp32,65 miliar.
5. Peningkatan penyusutan & amortisasi sebesar Rp4,36 miliar.
6. Peningkatan persediaan produk dalam proses pada awal tahun sebesar Rp124,58 miliar.

Beban Pokok Penjualan Barang Dagangan

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Persediaan Awal Tahun	84	40	34	1.313	-	2.011	53,08	-	697	2.011
Pembelian	665	1.414	10.332	13.176	133.957	69.323	426,15	(48,25)	56.148	(64.633)
Tersedia untuk Dijual	749	1.454	10.366	14.489	133.957	71.334	392,33	(46,75)	56.845	(62.623)
Kadaluarsa/rusak	1	1	-	-	-	(470)	-	-	(470)	(470)
Digunakan untuk Promosi, Penggantian, Pemakaian Sendiri dan Disumbangkan	1	-	-	1.089	-	(908)	(183,35)	-	(1.997)	(908)
Digunakan untuk Imunisasi	191	263	226	224	-	(425)	(289,51)	-	(650)	(425)
Persediaan Akhir Tahun	40	34	1.313	2.011	-	(1.077)	(153,57)	-	(3.088)	(1.077)
Jumlah Beban Pokok Penjualan Barang Dagangan	518	1.148	8.827	11.165	133.957	68.454	513,11	(48,90)	57.289	(65.503)

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan barang dagangan sebesar Rp68,45 miliar atau naik sebesar Rp57,29 miliar atau 513,11% di atas beban pokok penjualan barang dagangan tahun 2015 yang berjumlah Rp11,16 miliar dan 48,90% di bawah RKAP sebesar Rp133,96 miliar atau sebesar Rp65,50 miliar dibawah RKAP.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Hal ini disebabkan oleh:

1. Dibandingkan dengan RKAP, Beban pokok penjualan barang dagang dibawah anggaran karena tidak terealisasinya penjualan Verorab, vaksin Rabies dan vaksin Varicella, meskipun terdapat penjualan HPV yang sebelumnya tidak dianggarkan.
2. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 beban pokok penjualan barang dagang naik karena naiknya beban pokok barang dagangan sebesar 404,27% seiring dengan peningkatan penjualannya sebesar 473,47% dari realisasi tahun 2015.
3. Meningkatnya pembelian sebesar Rp56,15 miliar.

Beban Pokok Penjualan Jasa

Dalam Juta Rupiah

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2015/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Karyawan	1.952	1.414	914	1.602	1.341	1.944	21,36	45,03	342	603.64
Pemakaian Produk Jadi untuk Imunisasi	684	1.623	1.479	703	378	679	(3,41)	79,71	(24)	301
Pemakaian Barang Dagang untuk Imunisasi	190	263	226	224	-	425	89,51	-	201	425
Pemakaian Bahan Baku Penolong	-	-	-	45	131	81	80,24	(38,29)	36	(50)
Perjalanan Dinas	89	53	66	148	121	171	15,61	41,86	23	51
Jasa Profesional	-	-	-	481	-	410	(14,76)	-	(71)	410
Penyusutan Aset Tetap	73	117	218	229	278	175	(23,40)	(37,00)	(54)	(103)
Pemeliharaan dan Perbaikan	31	182	14	46	15	151	228,05	900,34	105	136
Asuransi	1	1	2	2	3	2	(19,35)	(33,93)	(0)	(1)
Beban Kantor	66	-	-	182	68	273	49,98	304,36	91	206
Peningkatan SDM	-	-	-	35	-	101	189,66	-	66	101
Lain-lain	163	333	681	-	272	-	-	(100,00)	-	(272)
Jumlah Beban Jasa	3.183	3.986	3.654	3.962	2.605	4.962	25,23	90,46	1.000	2.357
Total Beban pokok penjualan produk, barang dagangan & jasa	583.917	723.597	780.090	867.488	1.115.016	1.005.294	15,89	(9,84)	137.806	(109.721)

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat beban jasa sebesar Rp4,96 miliar atau naik sebesar Rp1 miliar atau 25,23% di atas beban jasa tahun 2015 yang berjumlah Rp3,96 miliar dan 90,46% diatas RKAP sebesar Rp2,60 miliar atau Rp2,36 miliar di bawah RKAP.



Kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya Pemakaian Bahan Baku Penolong sebesar Rp35,85 miliar.
2. Meningkatnya beban Karyawan sebesar Rp0,62 miliar.
3. Meningkat beban kantor, peningkatan & pengembangan SDM, Pemeliharaan dan Perbaikan, Perjalanan Dinas, dan lain-lain.

Total Beban Pokok Penjualan Produk, Barang Dagangan & Jasa

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat beban pokok penjualan produk, barang dagangan & jasa sebesar Rp1 triliun miliar atau naik sebesar 137,81 miliar atau 15,89% di atas beban pokok penjualan produk, barang dagangan & jasa tahun 2015 yang berjumlah Rp867,49 miliar.

Dibandingkan dengan RKAP, 9,84% di bawah RKAP sebesar Rp1.11 triliun atau sebesar Rp109,72 miliar dibawah RKAP.

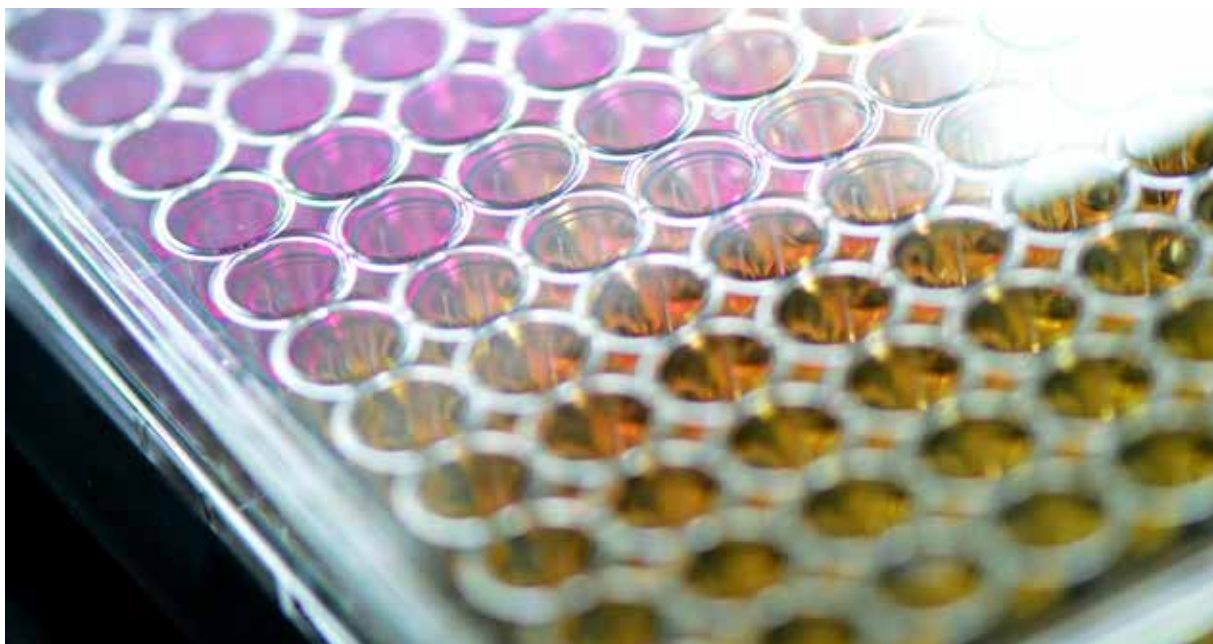
LABA (RUGI), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, DAN TOTAL LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
PENJUALAN BERSIH										
Produk Perusahaan	1.432.966	1.848.452	2.028.988	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,70)	(107.309)	(511.137)
Barang Dagang	1.206	1.848	10.287	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)
Jasa	3.469	3.382	4.805	4.858	4.100	5.315	9,40	29,64	457	1.215
Jumlah Penjualan Bersih	1.437.642	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)
BEBAN POKOK PENJUALAN										
Produk Perusahaan	580.216	718.463	767.609	852.361	978.454	931.879	9,33	(4,76)	79.518	(46.575)
Barang Dagangan	518	1.148	8.827	11.165	133.957	68.454	513,12	(48,90)	57.289	(65.503)
Beban Jasa	3.183	3.986	3.654	3.962	2.605	4.962	25,23	90,43	1.000	2.356
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	583.917	723.596	780.090	867.488	1.115.016	1.005.294	15,89	(9,84)	137.806	(109.722)
LABA (RUGI) KOTOR	853.724	1.130.085	1.263.991	1.478.430	1.803.940	1.310.465	(11,36)	(27,36)	(167.966)	(493.475)
Penghasilan Lain-lain	53.159	152.838	118.630	129.064	18.110	164.728	27,63	809,58	35.664	146.617
Beban penjualan	(58.592)	(72.830)	(99.182)	(126.818)	(159.600)	(133.996)	5,66	(16,04)	(7.178)	25.604
Beban Administrasi dan Umum	(227.583)	(304.313)	(349.010)	(421.759)	(498.274)	(402.002)	(4,68)	(19,32)	19.758	96.273
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(78.262)	(68.318)	(88.779)	(93.443)	(130.896)	(114.481)	22,52	(12,54)	(21.039)	16.415
Beban Bunga Pinjaman	-	-	-	-	(125)	-	-	-	-	125
Beban Lain-Lain	(21.346)	(58.873)	(69.748)	(66.201)	(3.184)	(139.745)	111,09	4.288,53	(73.544)	(136.561)
Jumlah	(332.624)	(351.496)	(488.089)	(579.157)	(773.970)	(625.497)	8,00	(19,18)	(46.340)	148.473

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2015 - 2016	Selisih 2016 - RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	521.100	778.589	775.902	899.274	1.029.970	684.968	(23,83)	(33,50)	(214.306)	(345.002)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak Kini	(137.261)	(207.288)	(197.136)	(232.893)	(275.614)	(185.425)	(20,38)	(32,72)	47.468	90.188
Pajak Tangguhan	2.053	1.166	3.427	4.213	3.871	1.498	(64,44)	(61,29)	(2.715)	(2.373)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(135.208)	(206.121)	(193.709)	(228.681)	(271.743)	(183.927)	(19,57)	(32,32)	44.754	87.816
LABA (RUGI) BERSIH	385.892	572.468	582.193	670.593	758.227	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.186)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN										
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi										
Surplus Revaluasi Aset Tetap Net	-	-	-	1.980.782	0	0	(100,00)	-	(1.980.782)	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	(21.701)	(828)	(448)	(8.313)	903,70	1756,71	(7.485)	(7.865)
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Kepemilikan Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	377	-	-	-	-	-	-	-
Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi										
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	-	-	(21.323)	1.979.954	(448)	(8.313)	(100,42)	1756,71	(1.988.267)	(7.865)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	385.892	572.468	560.870	2.650.546	757.779	492.728	(81,41)	(34,98)	(2.157.819)	(265.052)





Laba (Rugi) Kotor

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat laba (rugi) kotor sebesar Rp1,31 triliun atau turun sebesar Rp167,97 miliar atau 11,36% di bawah laba sebelum pajak penghasilan tahun 2015 yang berjumlah Rp1,48 triliun dan 27,36% di bawah RKAP sebesar Rp1,80 triliun atau sebesar Rp493,48 miliar di bawah RKAP.

Penghasilan Lain-lain

Meningkatnya penghasilan lain-lain sebesar Rp35,67 miliar diantaranya adalah pemasok dan pelanggan sebesar Rp745,91 juta, pendapatan hibah Rp41,27 miliar, pemulihan penyisihan piutang sebesar Rp1,60 miliar, pendapatan jasa importasi sebesar Rp496,83 juta, penghasilan lainnya (di bawah 1 miliar) sebesar Rp2,87 miliar.

Beban Penjualan

Meningkatnya beban penjualan sebesar Rp7,18 miliar diantaranya adalah karyawan sebesar Rp4,23 miliar, jasa profesional sebesar Rp836,69 juta, pemeliharaan & perbaikan sebesar Rp1,41 miliar, penyusutan aset tetap sebesar Rp3,48 miliar, keagenan ekspor sebesar Rp879,33 juta, embalage sebesar Rp3,56 miliar, jaminan dan kerugian penjualan sebesar Rp1,69 miliar, pajak sebesar Rp204,21 juta.

Beban Administrasi dan Umum

Menurunnya beban administrasi dan umum sebesar Rp19,76 miliar diantaranya karyawan sebesar Rp28,42 miliar, Dewan Komisaris dan Direksi sebesar Rp3,96 miliar, peningkatan dan pengembangan SDM sebesar Rp3,89 miliar, perjalanan dinas sebesar Rp1,75 miliar, jamuan tamu sebesar Rp1,19 miliar, lain-lain sebesar Rp1,39 miliar.

Beban Penelitian, Pengembangan & Surveilans

Meningkatnya beban penelitian, pengembangan & *surveillance* sebesar Rp21,04 miliar diantaranya pemakaian bahan baku & penolong sebesar Rp4,9 miliar, jasa profesional sebesar Rp13 miliar, karyawan sebesar Rp2,31 miliar, penyusutan aset tetap sebesar Rp2,94 miliar, pemeliharaan & perbaikan sebesar Rp1,15 miliar

Beban Lain-Lain

Meningkatnya beban lain-lain diantaranya kerugian selisih kurs sebesar Rp59,93 miliar, koreksi pajak & denda pajak sebesar Rp10,57 miliar, beban bunga pinjaman sebesar Rp9,34 miliar.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp684,97 miliar atau turun sebesar Rp214,31 miliar atau 23,83% di bawah laba sebelum pajak penghasilan tahun 2015 yang berjumlah Rp899,27 miliar dan 33,50% di bawah RKAP sebesar Rp1,03 triliun atau sebesar Rp345,00 miliar di bawah RKAP.

Penurunan Laba sebelum pajak Penghasilan disebabkan oleh:

Meningkatnya Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans, beban lain-lain.

Manfaat (Beban) pajak penghasilan

Menurunnya beban pajak penghasilan bersih sebesar Rp44,75 miliar diantaranya pajak kini sebesar Rp47,47 miliar, manfaat (beban) pajak tangguhan sebesar Rp2,71 miliar.

Total Laba (Rugi) Bersih

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat laba (rugi) bersih sebesar Rp501,04 miliar atau turun sebesar 169,55 miliar. *Net profit margin* mencapai 21,64% dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang berjumlah Rp670,59 miliar laba bersih turun sebesar 25,28% dan 33,92% di bawah RKAP sebesar Rp758,23 miliar atau sebesar Rp257,19 miliar di bawah RKAP.

Hal ini disebabkan oleh:

Adanya peningkatan beban pokok produksi sebagai akibat dari penurunan penjualan *bulk* polio dan peningkatan penjualan final produk yang mempunyai margin lebih rendah dari *bulk* polio.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Penghasilan Komprehensif Lainnya

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp- 8,31 miliar atau turun 1,99 triliun.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Turunnya Surplus revaluasi aset tetap (surplus revaluasi aset tetap merupakan selisih lebih antara nilai wajar hasil revaluasi tanah dengan nilai perolehan).
2. Meningkatnya Kerugian Aktuaria.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp492,73 miliar atau turun sebesar 2,16 triliun atau 81,41% di atas total penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2015 yang berjumlah Rp2,65 triliun dan 34,98% di bawah RKAP sebesar Rp757,78 miliar atau sebesar Rp265,05 miliar.

Penurunan ini disebabkan oleh:

Menurunnya laba (Rugi) kotor, Beban Penjualan, Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans, Beban Bunga Pinjaman, Beban Lain-Lain, Pajak Tangguhan, Surplus Revaluasi Aset Tetap Net.

ARUS KAS

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	1	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1.218.318	1.339.426	1.375.334	1.800.735	2.108.672	2.106.478	2.876.996	2.334.948	10,85	(18,84)	228.470	(542.048)
Penerimaan Pajak (Retribusi)	65.592	54	0	0	(314.959)	28.876	(458.463)	124.792	332,17	(127,22)	95.916	583.255
Penerimaan Bunga	3530	4	3.138	12.823	35.395	37.422	15.000	7.960	(78,73)	(46,93)	(29.462)	(7.040)
Penerimaan Hibah/ Donasi WHO	6857	3	1.767	1.278	4.989	800	2.918	13.588	1.598,50	365,71	12.788	10.670
Penerimaan (Pembayaran) Lainnya - Bersih	4955	3	2.405	(19.156)	11.673	(23.774)	4.517	1.238	(105,21)	(72,59)	25.012	(3.279)
Penerimaan Klaim Asuransi	226	10	-	-	107	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Bunga	(8635)	(3)	-	-	-	-	(125)	(9.343)	-	7.374,00	(9.343)	(9.218)
Pembayaran Tantiem	(5319)	(5)	(5.867)	(6.980)	(9.727)	(13.737)	-	(14.750)	7,38	-	(1.013)	(14.750)
Pembayaran Pajak	0	-	(139.777)	(151.969)	0	(326.409)	0	(391.829)	20,04	-	(65.420)	(391.829)
Pembayaran Kepada Pemasok dan Karyawan	(931.517)	(908)	(858.357)	(1.003.850)	(1.330.310)	(1.584.191)	(1.732.277)	(1.519.679)	(4,07)	(12,27)	64.512	212.597
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	216420	339	378.642	632.880	505.839	225.465	708.566	546.926	142,58	(22,81)	321.461	(161.640)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI												
Pembelian Aset Tetap	(139.074)	(269)	(208.859)	(192.644)	(163.149)	(535.175)	(1.344.255)	(393.170)	(26,53)	(70,75)	142.005	951.085
Penempatan Jaminan Deposito	-	-	-	-	(25.000)	25.000	-	-	-	-	(25.000)	-



Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	1	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Pembelian Aset Takberwujud	(5.839)	(1)	(1.816)	(6.671)	(20.578)	(3.962)	(14.308)	(11.173)	181,97	(21,91)	(7.210)	3.135
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	381	274	20	138	-	-	-	-	-	-	-	-
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(144.532)	(270)	(210.655)	(199.177)	(208.727)	(514.137)	(1.358.563)	(404.343)	(21,36)	(70,24)	109.795	954.220
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN												
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	77.000	-	-	-	-	-	450.000	235.000	-	(47,78)	235.000	(215.000)
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	(77.000)	-	-	-	-	-	-	(235.000)	-	-	(235.000)	(235.000)
Pembayaran Dividen	(21.768)	(25)	(57.460)	(113.938)	(228.987)	(145.015)	(203.434)	(234.707)	61,85	15,37	(89.692)	(31.273)
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(6.531)	(10)	-	-	-	(4.712)	-	-	-	-	4.712	-
Modal Donasi dari WHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang	101.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	(2.772)	-	-	-	-	2.772
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	72.701	(135)	(57.460)	(113.938)	(228.987)	(149.727)	243.794	(234.707)	56,76	(196,27)	(84.980)	(478.501)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	144.589	(66)	110.527	319.765	68.125	(438.398)	(406.202)	(92.123)	(78,99)	(77,32)	346.275	314.079
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	(15.256)	(6)	16.100	72.988	12.341	22.621	-	(15.865)	(170,14)	-	(38.486)	(15.865)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	314.794	444	371.871	498.498	891.251	971.717	733.136	555.939	(42,79)	(24,17)	(415.778)	(177.196)
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	444.127	372	498.498	891.251	971.717	555.939	326.933	447.950	(19,42)	37,02	(107.989)	121.017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp546,93 miliar atau naik sebesar 321,46 miliar atau 142,58% di atas arus kas dari aktivitas operasi tahun 2015 yang berjumlah Rp225,46 miliar dan 22,81% di bawah RKAP sebesar Rp708,57 miliar atau sebesar Rp161,64 miliar di atas RKAP.

Peningkatan ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan pada tahun 2016 sebesar Rp228,40 juta yaitu 2,33 triliun dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 2,11 triliun.
2. Meningkatnya penerimaan pajak (retribusi) pada tahun 2016 sebesar Rp95,92 miliar yaitu 124,79 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 28,88 miliar.

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

3. Meningkatnya penerimaan Hibah/ Donasi WHO pada tahun 2016 sebesar Rp12,79 miliar yaitu Rp13,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 500 juta.
4. Meningkatnya pembayaran pajak pada tahun 2016 sebesar Rp65,42 miliar yaitu Rp391,83 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 326,41 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp404,34 miliar atau turun sebesar Rp109,79 miliar atau 21,36% di bawah arus kas dari aktivitas investasi tahun 2015 yang berjumlah Rp514,14 miliar dan 70,24% di bawah RKAP sebesar Rp1,36 triliun atau sebesar Rp954,22 miliar di bawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

Menurunnya penempatan Pembelian Aset Tetap sebesar Rp142 miliar, penempatan jaminan deposito sebesar Rp25 miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp234,71 miliar atau naik sebesar Rp84,98 miliar atau 56,76% di atas arus kas dari aktivitas pendanaan tahun 2015 yang berjumlah Rp149,73 miliar dan 196,27% di bawah RKAP sebesar Rp243,79 miliar atau sebesar Rp478,50 miliar di bawah RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya penerimaan jangka pendek sebesar Rp235 miliar.
2. Meningkatnya pembayaran deviden sebesar Rp89,69 miliar.

Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun

Di Tahun 2016 Bio Farma mencatat saldo kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar Rp447,95 miliar atau turun sebesar Rp107,99 miliar atau 19,42% di atas saldo kas dan setara kas pada akhir tahun 2015 yang berjumlah Rp555,94 miliar dan 37,02% di atas RKAP sebesar Rp107,99 miliar atau sebesar Rp121,02 di atas RKAP.

Penurunan ini disebabkan oleh:

Penurunan Kas Bersih, Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas, Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun.



KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG BAIK JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG

Kemampuan membayar liabilitas tergambar dari rasio liabilitas jangka pendek terhadap ekuitas yang tercatat sebesar 8,55% di tahun 2016. Rasio ini lebih baik dari tahun 2015 yaitu 9,05%. Sementara itu rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas menurun dari 3,57% pada tahun 2015 menjadi 3,15% pada tahun 2016. Secara keseluruhan rasio total liabilitas terhadap ekuitas tidak lebih baik dari tahun 2015 yaitu dari 12,62% pada tahun 2015 menjadi 11,70% pada tahun 2016.

Hal ini disebabkan oleh:

1. Penurunan pendapatan diterima dimuka sebesar 95,09% menjadi Rp44 juta dari Rp899 juta atau Rp855 juta di bawah RKAP.
2. Penurunan biaya yang masih harus dibayar sebesar 22,05% menjadi Rp113,40 miliar dari 145,49 miliar atau sebesar Rp32,08 miliar dibawah RKAP
3. Penurunan liabilitas tidak lancar lainnya tahun 2016 sebesar 100% menjadi Rp0 dari 27,85 miliar dibandingkan dengan tahun 2015 dan 100% dibandingkan dengan RKAP sebesar Rp27,80 miliar atau sebesar Rp27,8 miliar sesuai dengan RKAP

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Usaha	85.896	158.098	145.095	208.598	350.148	259.234	24,27	(25,96)	50.636	(90.914)
Utang Pajak	30.131	86.916	38.919	46.518	32.451	47.624	2,38	46,76	1.106	15.173
Biaya yang Masih Harus Dibayar	66.464	112.781	128.280	170.308	113.422	113.405	(33,41)	(0,02)	(56.902)	-17
Pendapatan Diterima Dimuka	1.921	5.405	1.366	899	-	44	(95,09)	-	(855)	44
Liabilitas Lancar Lainnya	13.302	26.437	26.009	30.341	31.709	32.861	8,31	3,63	2.520	1.151
Jumlah Jangka Pendek	197.714	389.637	339.668	456.663	527.731	453.169	(0,77)	(14,13)	(3.494)	-74.562
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	-	457.500	-	-	-	-	(457.500)
Liabilitas Diestimasi Imbalan Pasca Kerja	41.441	48.371	136.368	152.022	177.089	167.133	9,94	(5,62)	15.111	(9.956)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	-	24.882	27.846	27.800	-	(100,00)	(100,00)	(27.846)	(27.800)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.441	48.371	161.250	179.868	662.389	167.133	(7,08)	(74,77)	(12.735)	(495.256)
JUMLAH LIABILITAS	239.155	438.008	500.919	636.532	1.190.121	620.302	(2,55)	(47,88)	(16.230)	(569.818)
EKUITAS										
Modal Saham	750.000	750.000	1.250.000	1.650.000	2.000.000	2.000.000	21,21	-	350.000	0
Saldo Laba (Rugi)										
- Dicanangkan	670.641	941.919	786.075	816.422	881.101	899.824	10,22	2,12	83.402	18.723
- Belum Dicanangkan	0	675	0	(2484)	0	0	(100,00)	-	2.484	0
Laba Periode Berjalan	385.892	572.468	577.590	670.593	758.224	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.183)
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	(69.976)	1.909.600	1.934.623	1.901.287	(0,44)	(1,72)	(8.313)	(33.336)
JUMLAH EKUITAS	1.806.533	2.265.062	2.543.689	5.044.132	5.573.948	5.302.152	5,12	(4,88)	258.021	(271.796)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.045.688	2.703.070	3.044.608	5.680.663	6.764.069	5.922.454	4,26	(12,44)	241.791	(841.615)
Debt to Equity	13,24%	19,34%	19,69%	12,62%	21,35%	11,70%	(7,29)	(45,20)	(0,01)	(0,10)
Liabilitas Jangka Pendek/ Ekuitas	10,94	17,20	13,35	9,05	9,47	8,55	(5,59)	(9,73)	(0,51)	(0,92)
Liabilitas Jangka Panjang/ Ekuitas	2,29	2,14	6,34	3,57	11,88	3,15	(11,60)	(73,47)	(0,41)	(8,73)
Total Liabilitas/ Ekuitas	13,24	19,34	19,69	12,62	21,35	11,70	(7,29)	(45,21)	(0,92)	(9,65)

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

Kolektibilitas Piutang

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Collection period	55,99	56,76	45,94	79,00	41,25	45,49	(42,29)	10,52	(33,41)	4,34
Average A/R	6,52	6,43	7,95	4,62	8,86	8,02	73,66	(9,41)	3,40	(0,83)

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan Bio Farma dalam menagih piutangnya. Pada akhir tahun 2016, collection period memperlihatkan penurunan sebesar 42,29% menjadi 45,49 hari dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 79 hari.

Untuk mengurangi risiko pembeli gagal bayar (*default*), Bio Farma menerapkan kebijakan distributor tidak melakukan pembayaran atau telat melakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Dikenakan denda 1% dari nilai faktur untuk tiap hari keterlambatan pembayaran yang dihitung berdasarkan hari kalender (tercantum dalam perjanjian distributorship pasal 12).
2. Barang yang dikirim ditahan terlebih dahulu sampai mereka melakukan pembayaran (SOP dan perjanjian *distributorship*).
3. Dilakukan klaim atas bank garansi distributor tersebut, klaim diajukan oleh Bagian Penjualan Sektor Swasta ke Bagian Administrasi Keuangan yang akan dilanjutkan ke Bank atau Asuransi yang mengeluarkan Bank Garansi tersebut. (Bank Garansi tercantum dalam Perjanjian *Distributorship* pasal 12 dan SOP).
4. Besaran bank garansi ditentukan oleh Pemasaran.



6th Annual Meeting Islamic Development Bank yang mengambil tema Self Reliance in Vaccine Production (SRVP) yang diselenggarakan di Bandung pada Agustus 2010, menjadi titik awal Bio Farma menekspansi produk vaksinya untuk negara – negara Islam, khususnya negara yang berada di jazirah arab. Dan Sejak saat itu pula, Bio Farma menjadi pelopor kemandirian pembuatan vaksin di negara – negara anggota OKI.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Bio Farma menyusun Rencana Permodalan berdasarkan telaah dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Rencana Permodalan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perusahaan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko melalui proses perencanaan modal. Begitu juga dengan bisnis yang didasarkan pada permodalan dan persyaratan likuiditas Perusahaan. Kebutuhan permodalan direncanakan dan didiskusikan secara rutin dengan didukung data-data analisis.

Tujuan Perusahaan mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga Perusahaan dapat tetap dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada Pemegang Saham, Perusahaan harus memonitor modal berdasarkan rasio hutang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah hutang dengan total modal. Hutang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang ada sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Struktur modal merupakan perimbangan antara pengguna modal sendiri dengan pinjaman/hutang yang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL DAN DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Kebijakan manajemen terkait permodalan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki modal yang kuat dan menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan dimasa mendatang. Selain itu, kebijakan permodalan ditetapkan untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perusahaan telah efektif dan efisien.

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Oleh karena itu Bio Farma menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perusahaan.

RASIO HUTANG TERHADAP MODAL

Kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya dapat diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio tersebut juga merupakan indikator dalam menghitung kemungkinan risiko-risiko yang muncul dalam kegiatan operasional Perseroan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk senantiasa melakukan pengendalian kinerja keuangan secara berkelanjutan.



Selama tahun 2016, Bio Farma mempertahankan strategi diterapkan pada tahun 2016 yaitu mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimal yaitu liabilitas terhadap ekuitas 12,62% pada tahun 2015 menjadi 11,70% pada tahun 2016.

Rasio utang terhadap modal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2015/RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
JUMLAH LIABILITAS	239.155	438.008	500.919	636.531	1.190.121	620.302	(2,55)	(47,88)	(16.229)	(569.818)
JUMLAH EKUITAS	1.806.533	2.265.062	2.543.689	5.044.131	5.573.948	5.302.152	5,12	(4,88)	258.021	(271.796)
RASIO HUTANG TERHADAP MODAL/ SOLVABILITAS (%)	13,24	19,34	19,69	12,62	21,35	11,70	(7,29)	(45,21)	(0,92)	(9,65)

Struktur Modal

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2012		2013		2014		2015		RKAP 2016		2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jumlah Jangka Pendek	197.714	9,66	389.637	14,41	339.668	11,16	456.663	8,04	527.731	7,80	453.169	7,65
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	41.441	2,03	48.371	1,79	161.250	5,30	179.868	3,17	662.389	10	167.133	2,82
JUMLAH LIABILITAS	239.155	11,69	438.008	16,20	500.919	16,45	636.532	11,21	1.190.121	17,59	620.302	10,47
JUMLAH EKUITAS	1.806.533	88,31	2.265.062	83,80	2.543.689	83,55	5.044.132	88,79	5.573.948	82,41	5.302.152	89,53
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.045.688	100,00	2.703.070	100,00	3.044.608	100,00	5.680.663	100,00	6.764.069	100,00	5.922.454	100,00

Uraian	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/ 2016	Selisih 2015/ RKAP	Selisih 2015/2016	Selisih 2015/ RKAP
	11/7	11/9	12/8	12/10	11-7	11-9	12-8	12-10
Jumlah Jangka Pendek	(0,77)	(14,13)	(4,82)	(1,93)	(3.494)	0,86	(0,39)	(0,15)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	(7,08)	(74,77)	(10,87)	(71,18)	(12.735)	0,25	(0,34)	(6,97)
JUMLAH LIABILITAS	(2,55)	(47,88)	(6,53)	(40,47)	(16.229)	0,52	(0,73)	(7,12)
JUMLAH EKUITAS	5,12	(4,88)	0,82	8,64	258.021	0,95	0,73	7,12
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	4,26	(12,44)	(0,00)	-	241.792	0,88	(0,00)	-

Likuiditas

Uraian	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2015/RKAP
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Jumlah Aset Lancar	1.033.864	1.542.901	1.824.639	1.995.781	2.177.422	1.849.555	(7,33)	(15,06)	(146.226)	(327.866)
Jumlah Jangka Pendek	197.714	389.637	339.668	456.663	527.731	453.169	(0,77)	(14,13)	(3.494)	(74.562)
RASIO (%)	422,91	295,98	437,18	337,04	312,60	308,14	(8,57)	(1,43)	(28,90)	(4,46)

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 SEBESAR RP542,67 MILIAR ATAU 47,46% DARI ANGGARANNYA YAITU SEBESAR RP1,03 TRILIUN, MENURUN SEBESAR 0,42% JIKA DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI TAHUN 2015 SEBESAR RP544,97 MILIAR.

NAMA PIHAK YANG MELAKUKAN IKATAN

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi - transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo Akun dengan Pihak Berelasi

(Dalam Juta Rupiah)

Akun	31 Januari 2015		31 Januari 2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)	555.939.258.294	9,79%	441.042.856.520	7,42%
Piutang Usaha (Catatan 5)	17.298.055.107	0,30%	12.280.577.813	0,21%
Piutang Lain-lain (Catatan 6)	1.302.637.458	0,02%	1.302.637.458	0,02%
Uang Muka Pembelian Lokal (Catatan 8)	16.044.202.629	0,28%	834.000.000	0,00%
Pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 11)	1.591.887.435	0,03%	221.375.000	0,00%
Utang Usaha (Catatan 16)				
Koperasi Karyawan Bio Farma	8.174.576.205	0,14%	14.869.209.176	0,25%
CV Karya Cahya Abadi	1.180.481.303	0,02%	1.652.232.908	0,03%
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	4.392.144.317	0,08%	8.351.209.045	0,14%
PT Wijaya Karya (Persero)	769.068.182	0,01%	-	0,00%
PT Kimia Farma, Tbk	419.689.563	0,01%	160.990.986	0,00%
PT INTI	-	0,00%	71.221.650	0,00%
Jumlah	14.935.959.570	0,26%	25.104.863.765	0,42%

Investasi berupa Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan. Sepanjang tahun 2016, Bio Farma melakukan perikatan material mengenai investasi barang modal dengan berbagai pihak yang diuraikan sebagai berikut:



Sifat Hubungan

(Dalam Juta Rupiah)

Pihak yang Berikatan	Tujuan	Sumber Dana
Bank Milik Negara	Kas Dan Setara Kas	RKAP 2016
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Penjualan Produk	RKAP 2016
PT Indofarma Global Medika	Penjualan Produk	RKAP 2016
PT Rajawali Nusantara Indonesia	Penjualan Produk	RKAP 2016
PT Iglas (Persero)	Piutang Lain-lain	-
PT PP (Persero) Tbk	Pembelian Investasi	RKAP 2016
PT Adhi Karya	Pembelian Investasi	RKAP 2016
K2BF	Pembelian Barang dan Investasi	RKAP 2016
CV KCA	Pembelian Barang dan Investasi	RKAP 2016
Pihak Berelasi Lainnya	Lain-lain dengan nilai dibawah Rp1 miliar	RKAP 2016

TUJUAN DARI IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU 2016

Selama tahun 2016 Bio Farma melakukan ikatan material untuk investasi barang modal dengan beberapa rekanan dengan tujuan pengadaan terkait dengan Penilaian *Assesment* WHO & GMP, Penggantian, IPAL/K3/ Lingkungan, Peningkatan Kapasitas, Litbang dan Produk Baru.

Realisasi investasi tahun 2016 sebesar Rp542,67 miliar atau 52,54% dari anggarannya yaitu sebesar Rp1,03 triliun, menurun sebesar 0,42% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp544,97 miliar. Lihat pembahasan bagian “Investasi Barang Modal, pada Tinjauan Keuangan (Realisasi Investasi Barang Modal Pada Tahun Buku Terakhir).”

SUMBER DANA YANG DIHARAPKAN UNTUK MEMENUHI IKATAN-IKATAN TERSEBUT

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari dana intern Perusahaan yaitu dari RKAP 2016.

MATA UANG YANG MENJADI DENOMINASI

Mata uang yang menjadi denominasi adalah Rupiah. Transaksi transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, keuangan dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Euro (EUR)	12.809,86	16.821,44	15.133,26	15.069,67	14.161,55
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	9.670,00	12.189,00	12.440,00	13.759,00	13.436
1 Dollar Australia (AUD)	10.025,39	10.875,66	10.218,22	10.064,16	9.724,31
1 Dollar Singapura (SGD)	7.907,12	9.627,99	9.422,10	9.751,19	9.298,92
1 Poundsterling Inggris (GBP)	15.578,86	20.096,63	19.370,33	20.451,11	16.507,51
1 Frank Swiss (CHF)	10.596,70	13.731,78	12.582,82	13.951,29	13.177,76
1 Danish Krone Denmark (DKK)	1.717,16	2.254,99	2.031,90	2.019,32	1.905,09
1 Yen Jepang (JPY)	111,97	116,17	104,24	114,52	115,4

LANGKAH-LANGKAH YANG DIRENCANAKAN PERUSAHAAN UNTUK MELINDUNGI RISIKO DARI POSISI MATA UANG ASING YANG TERKAIT

RISIKO KEUANGAN

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko risiko di atas.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko penjualan kredit, Perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan:

(Dalam Rupiah)

Uraian	2015			2016		
	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum	Konsentrasi Risiko Kredit		Eksposur Maksimum
	Institusi	Lain-Lain		Institusi	Lain-Lain	
Piutang Usaha	507.746.089.376	-	507.746.089.376	288.626.423.903	-	288.626.423.903
Piutang Lain-Lain	1.302.637.458	3.194.971.060	4.497.608.518	1.302.637.458	446.140.212	1.748.777.670
Total	509.048.726.834	3.194.971.060	512.243.697.894	289.929.061.361	446.140.212	290.375.201.573

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Disamping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa yang datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga Perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif dibanding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami {natural hedging} terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun

demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan (long position) serta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka Perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar di atas, Perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan Vendor Luar Negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2015				31 Desember 2016			
	Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap	Jumlah		Suku Bunga Mengembang	Suku Bunga Tetap	Jumlah	
	Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga		Kurang Dari 1 Tahun	Kurang Dari 1 Tahun	Tidak Dikenakan Bunga	
Aset								
Kas dan Setara Kas	346.754.915.461	209.001.583.500	182.759.333	555.939.258.294	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Aset Keuangan	346.754.915.461	209.001.583.500	182.759.333	555.939.258.294	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548
Jumlah Gap Suku Bunga	346.754.915.461	209.001.583.500	182.759.333	555.939.258.294	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Menindaklanjuti program WHO tahun 2013-2018 terkait eradikasi Polio Global yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif WHO di tahun 2013. Dimana salah satu keputusannya yang harus dilaksanakan adalah melakukan penghapusan semua vaksin Polio Oral secara bertahap. Strategi untuk meminimalkan risiko adalah melalui penghentian produksi tOPV (*trivalent Oral Polio Vaccine*) secara bertahap oleh para produsen dan pembatasan produk tOPV sampai dengan *switching* produk tOPV ke bOPV (*bivalent Oral Polio Vaccine*) selesai dilakukan pada April 2016.

Komitmen Indonesia untuk eradikasi Polio Nasional tahun 2020 sudah ditindaklanjuti melalui edaran Kemenkes mengenai peralihan 95% pemakaian vaksin tOPV ke boPV secara bertahap sampai batas waktu 4 April 2016, melakukan pengenalan produk pengganti IPV (*Inactivated Polio Vaccine*) pada program imunisasi rutin, pencabutan ijin edar dan penarikan tOPV serta pemusnahannya mulai tanggal 4 - 30 April 2016 diseluruh Indonesia baik di sektor swasta maupun pemerintah.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms length*.

Perusahaan memperhitungkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena pendiskontoan yang tidak signifikan.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka panjang.

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat memberikan dampak pada kondisi keuangan Perusahaan.

Selama ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh Perusahaan untuk melindungi risiko dari perubahan nilai tukar mata uang asing dengan menerapkan kebijakan hedging natural (*Natural Hedge*), perusahaan masih mempelajari dampak penerapan hedging terhadap perubahan transaksi keuangan.



INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

JENIS INVESTASI BARANG MODAL

Jenis investasi barang modal yang ada di Bio Farma terdiri atas 2 sebagai berikut:

1. Investasi Berdasarkan Penggunaannya meliputi:

- a. Rutin:
 - Assesment WHO & GMP
 - Penggantian
 - IPAL /K3/Lingkungan/QC
- b. Pengembangan:
 - Peningkatan Kapasitas
 - Litbang/Riset Dasar & Development
 - Produk Baru

2. Investasi Berdasarkan Per Kelompok meliputi:

- a. Inventaris Kantor
- b. Inventaris Pabrik
- c. Inventaris Lainnya
- d. Inventaris Bangunan
- e. Inventaris Kendaraan Bermotor
- f. Aset tak berwujud
- g. Investasi Tanah

Strategi keuangan Bio Farma difokuskan pada pengelolaan dana sebaik mungkin dengan terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan.

Sejak tahun 2015 Bio Farma mulai menyiapkan lahan baru sebagai *Life Science Park* di Jasinga Bogor-Jawa Barat. Saat ini telah dilakukan kegiatan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai jaring pengaman sosial seperti *access to medicine* dan pengolahan air bersih, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat menerima keberadaan Bio Farma. Selain itu, untuk meningkatkan investasi barang modal Bio Farma juga melakukan penelitian, pengembangan dan surveilans, investasi dalam pelaksanaan antara lain Gedung.

Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan, Restorasi Gedung *Heritage* dan Renovasi Gedung Distribusi (fasilitas Distribusi dan Administrasi), *Integrated Filling Line BCG*, *Integrated WTP* dan *Packaging Line*.

Kebijakan investasi Bio Farma berfokus pada kelancaran operasional dan pemenuhan sasaran jangka panjang perusahaan. Jenis investasi barang modal yang dilakukan terutama untuk keperluan proyek pengembangan dalam bentuk mesin dan peralatan.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Tujuan investasi barang modal untuk keperluan pengembangan Perseroan adalah dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan melalui ekspansi kapasitas produksi, peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi lini usaha.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Realisasi investasi tahun 2016 tercatat sebesar Rp542,67 miliar turun sebesar Rp2.30 miliar atau 0,42% dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2015 yaitu sebesar Rp544,97 dan 47,46% di bawah RKAP sebesar Rp1,03 triliun atau sebesar Rp490,14 miliar di bawah RKAP.

Hal ini disebabkan oleh

Terdapat investasi yang penyelesaiannya bergeser ke tahun 2017 senilai Rp677,91 miliar. Dari total realisasi investasi tersebut terdapat investasi masih dalam pelaksanaan senilai Rp418,81 miliar antara lain Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan, Integrated Water Treatment Plant (WTP), Integrated Filling Line BCG dan Packaging Line 1. Rinciannya sebagai berikut:

Realisasi Investasi Berdasarkan Penggunaannya

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	RUTIN					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
PENILAIAN WHO & GMP						
Peralatan Kantor	180	1.013	1.327	1.867	1.250	(33,06)
Peralatan Pabrik	8.969	21.863	17.425	28.779	15.665	(45,57)
Peralatan Lainnya	23.564	7.142	3.133	595	-	(100,00)
Peralatan Bangunan	6.715	20.580	1.354	43.073	1.800	(95,82)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	56	7.632	-	4.826	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	39.428	50.655	30.873	74.314	23.540	(68,32)
PENGANTIAN						
Peralatan Kantor	5.507	5.620	17.876	7.860	8.689	10,55
Peralatan Pabrik	4.651	23.284	7.320	13.700	20.582	50,23
Peralatan Lainnya	6.894	13.787	3.034	983	1.817	84,72
Peralatan Bangunan	1.541	2.122	909	807	2.438	201,88
Kendaraan Bermotor	0	0	750	384	30	(92,17)
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	18.592	44.814	29.889	23.735	33.555	41,38
IPAL/K3/LINGKUNGAN/QUALITY CONTROL						
Peralatan Kantor	340	728	832	738	803	8,75
Peralatan Pabrik	1.713	479	9.277	13.706	13.021	(5,00)
Peralatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Peralatan Bangunan	642	424	25	378	9.884	2.513,29
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.694	1.632	10.133	14.822	23.708	59,95

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Kelompok Investasi	PENGEMBANGAN					Kenaikan/ Penurunan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
	1	2	3	4	5	
PENINGKATAN KAPASITAS						
Peralatan Kantor	258	3.589	12.115	2.879	6.464	124,49
Peralatan Pabrik	611	8.067	482	160.586	284.970	77,46
Peralatan Lainnya	2.083	5.008	16.071	51.322	12.423	(75,79)
Peralatan Bangunan	21.952	90.904	37.561	180.371	70.321	(61,01)
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	518	6.656	2.880	3.880	4.402	13,44
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	25.423	114.224	69.109	399.039	378.580	-5,13
LITBANG/RISET DASAR/DEVELOPMENT						
Peralatan Kantor	375	324	243	328	1.006	206,91
Peralatan Pabrik	2.679	19.579	7.886	5.946	42.293	611,32
Peralatan Lainnya	6.023	4.787	4.855	-	112	-
Peralatan Bangunan	29	-	-	3.698	28.079	659,37
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9.107	24.690	12.984	9.971	71.491	616,97
PRODUK BARU						
Peralatan Kantor	449	230	161	170	113	(33,63)
Peralatan Pabrik	10.585	9.449	7.058	20.645	8.947	(56,66)
Peralatan Lainnya	69.820	1.233	4.925	907	-	-
Peralatan Bangunan	24	819	-	31	1.776	5.592,82
Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	-	530	9.492	1.339	961	(28,24)
Tanah	-	-	-	-	-	-
Jumlah	80.878	12.262	21.636	23.093	11.797	(48,92)
Total	176.122	248.276	174.623	544.974	542.671	(0,42)



Rekapitulasi Realisasi Investasi Berdasarkan Penggunaannya

(Dalam Juta Rupiah)

KELOMPOK INVESTASI	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015-2016
	1	2	3	4	5	5/4	5-4
RUTIN							
Jumlah Penilaian WHO & GMP	39.428	50.655	30.873	74.314	23.540	(68,32)	(50.774)
Jumlah Penggantian	18.592	44.814	29.889	23.735	33.555	41,38	9.820
Jumlah IPAL/K3/Lingkungan/Quality Control	2.694	1.632	10.133	14.822	23.708	59,95	8.886
PENGEMBANGAN							
Jumlah Peningkatan Kapasitas	25.423	114.224	69.109	399.039	378.580	(5,13)	(20.459)
Jumlah LITBANG/Riset Dasar/ Development	9.107	24.690	12.984	9.971	71.491	616,97	61.519
Jumlah Produk Baru	80.878	12.262	21.636	23.093	11.797	(48,92)	(11.296)
Total	176.122	248.276	174.623	544.974	542.671	(0,42)	(2.303)

Realisasi Investasi berdasarkan Kelompok

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok Investasi	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)	Kenaikan/ Penurunan (%)	Selisih 2015- 2016	Selisih 2015- 2016
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5
Inventaris Kantor	7.110	11.504	32.554	13.842	31.418	18.324	32,38	(41,68)	4.482	(13.094)
Inventaris Pabrik	29.208	82.722	49.448	243.363	376.722	385.478	58,40	2,32	142.115	8.756
Inventaris Lainnya	108.384	31.958	32.018	53.807	26.137	14.351	(73,33)	(45,09)	(39.456)	(11.786)
Inventaris Bangunan	30.903	114.850	39.849	228.358	484.195	114.298	(49,95)	(76,39)	(114.061)	(369.897)
Inventaris Kendaraan Bermotor	-	-	750	384	32	30	(92,17)	(6,13)	(354)	(2)
Aset Tak Berwujud	518	7.242	20.004	5.219	14.308	10.189	95,22	(28,79)	4.970	(4.119)
Tanah	0	0	0	0	100.000	0	-	(100,00)	0	(100.000)
Jumlah	176.122	248.276	174.623	544.974	1.032.812	542.671	(0,42)	(47,46)	(2.303)	(490.141)

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN
BUKU TERAKHIR**Tanah**

Pengadaan tanah dalam tahun 2016 belum terealisasi, karena terdapat kendala perizinan kawasan industri dan pembebasan tanah untuk akses jalan masuk (Subang) dan legalitas kepemilikan (Eyckman Bandung). Rencana pembelian tanah ini dianggarkan kembali ke Tahun 2017.

Bangunan

Realisasi pengadaan inventaris bangunan tahun 2016 mencapai 23,61% dari anggarannya karena terdapat bangunan yang proses pembangunannya bergeser ke tahun 2017 antara lain clean room pada Fasilitas Produksi Vaksin & Pengemasan (Gedung No. 43 tahap 2), Fasilitas *Filling Line* Vaksin BCG (Gedung No. 36 lantai 4), Gedung QC, Teknik dan Media (Gedung No. 3) dan Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan Produk dalam Kemasan *Prefiled Syringe*.

Peralatan Pabrik

Realisasi pengadaan peralatan pabrik tahun 2016 mencapai 102,32% dari anggarannya karena terdapat peralatan yang realisasinya di percepat, antara lain *Integrated Water Treatment Plant* (WTP).

Peralatan Kantor

Realisasi pengadaan peralatan kantor tahun 2016 mencapai 58,33% dari anggarannya karena terdapat beberapa peralatan kantor yang realisasinya bergeser ke tahun 2017 sejalan dengan pergeseran realisasi bangunan.

Peralatan Lainnya

Realisasi pengadaan peralatan lainnya tahun 2016 mencapai 54,91% dari anggarannya karena terdapat beberapa peralatan lainnya yang realisasinya bergeser ke tahun 2017 sejalan dengan pergeseran penyelesaian bangunan diantaranya peralatan *Utility* untuk Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan.

Kendaraan Bermotor

Realisasi kendaraan tahun 2016 mencapai 95,38% berupa Motor Pengangkut Barang.

Aset Tak Berwujud

Realisasi aset takberwujud tahun 2016 mencapai 71,21% dari anggarannya karena terdapat aset takberwujud yang realisasinya bergeser ke tahun 2017 diantaranya *Paperless Document BPR Online*.



PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

PENCAPAIAN PENJUALAN BAIK PER KELOMPOK PRODUK MAUPUN PER SEKTOR MENCAPAI 102,03% DARI ANGGARANNYA, TERUTAMA KARENA PENJUALAN VAKSIN VIRUS DAN BARANG DAGANGAN & JASA MASING-MASING MENCAPAI 114,20% DAN 110,21% DARI ANGGARANNYA

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI) DAN TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI UNTUK SATU TAHUN MENDATANG MENGENAI PENDAPATAN, LABA DAN LAINNYA

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKAP

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan tahun 2017

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).
5. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Maret 1998, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Anggaran

Dasar Perusahaan Nomor 26 tanggal 6 Juni 2015 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0104.40.20.2015 tanggal 10 Juni 2015, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero) dan berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03087.40.21.2015 tanggal 10 Juni 2015, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01//MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
10. Surat Menteri BUMN S-513/MBU/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016, tentang Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017.

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

GAMBARAN UMUM KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2016

Kinerja Perusahaan tahun 2016 dari sisi penjualan mencapai Rp2,32 triliun turun sebesar 1,29% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan mencapai 79,34% dari anggarannya, sedangkan beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1,01 triliun meningkat 15,89% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan mencapai 90,16% dari anggarannya, sedangkan perolehan laba bersih perusahaan turun sebesar 25,28% dari realisasi tahun 2015 menjadi sebesar Rp501,04 miliar atau mencapai 66,08% dari anggarannya. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2016 mendapat skor 81,60 dengan kriteria "SEHAT AA", tahun sebelumnya 88,50 dengan kriteria "SEHAT AA". Untuk pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) memperoleh nilai 89,41 dari total nilai 100.

Kinerja Perusahaan Tahun 2016

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Realisasi 2015 (Audited)	RKAP 2016	Realisasi 2016 (Audited)	Kenaikan/Penurunan (%)		Selisih 2015 -2016	Selisih 2016 - RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	3/2	3/1	3-1	3-2	
Penjualan Bersih	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(20,66)	(1,29)	(30.159)	(603.197)	2.940.215
Beban Pokok Penjualan & Jasa	867.488	1.115.016	1.005.294	(9,84)	15,89	137.806	(109.722)	1.262.254
Beban Perusahaan	1.619.051	1.986.712	1.848.145	(6,97)	14,15	229.094	(138.567)	2.146.339
Investasi	544.974	1.032.812	542.671	(47,46)	(0,42)	(2.303)	-	1.460.831
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	899.274	1.029.970	684.968	(33,5)	(23,83)	(214.306)	-	1.005.963
Beban Pajak Bersih	2.228.681	271.743	183.927	(32,32)	(19,57)	(2.044.754)	-	-
Laba Bersih	670.593	758.227	501.041	(33,92)	(44,85)	(169.552)	-	747.313
Total Aset/Liabilitas & Ekuitas	5.680.663	6.764.069	5.922.454	(12,44)	4,26	241.791	-	8.292.915
Jumlah SDM (Orang)	1.127	1.215	1.171	(3,62)	3,90	44	-	1.219



REKAPITULASI PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN TAHUN 2016

Pencapaian penjualan bersih perusahaan tahun 2016 mencapai 79,34% dari RKAP tahun 2016 dan hampir sama dengan realisasi tahun 2015.

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015-2016	Selisih 2016 - RKAP 2016	RKAP 2017
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2	
PENJUALAN PRODUK								
Vaksin Bakteri	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.576	97.409	269.303
Vaksin Virus	1.705.304	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,9)	(268.907)	(426.569)	1.798.624
Vaksin Kombinasi	253.405	296.100	200.695	(20,8)	(32,22)	(52.710)	(95.405)	298.351
Sera & Diagnostika	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)	(60.597)	86.450
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	3.635	-	-	-	-	(3.635)	-
Produk Partnership	-	-	-	-	-	-	-	210.789
Trading Partnership	-	-	-	-	-	-	-	268.099
Jumlah	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)	(488.798)	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(15.063)	-	(22.339)	48,3	-	(7.276)	(22.339)	-
Jumlah Penjualan Produk Bersih	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,7)	(107.309)	(511.137)	-
Penjualan Barang Dagang	11.922	-	88.294	640,62	-	76.372	88.294	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(486)	-	(165)	(65.97)	-	(320)	(165)	-
Jumlah Penjualan Bersih Barang Dagangan	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)	-
Penjualan Jasa	4.858	4.100	5.635	16	37,44	777	1.535	-

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

Kelompok	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015-2016	Selisih 2016 - RKAP 2016	RKAP 2017
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2	
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(320)	-	-	(320)	(320)	
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	4.858	4.100	5.315	9,41	29,64	457	1.215	8.599
Anak Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

Penjualan Produk Bersih Per Segmen (Per Sektor) Tahun 2016

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/Penurunan (%)	Selisih 2015- 2016	Selisih 2016 - RKAP 2016	RKAP 2017
	1	2	3	3/1	3-1	3-2	
Sektor Pemerintah	570.619	751.949	681.376	19,41	110.757	(70.574)	795.573
Sektor Swasta	139.485	372.899	386.015	176,74	246.530	13.117	395.148
Sektor Ekspor	1.635.814	1.790.473	1.248.368	(23,69)	(387.446)	(542.105)	1.749.494
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	3.635	-	-	-	(3.635)	-
Total Penjualan Bersih	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN 2016

Perolehan Laba Bersih tahun 2016 sebesar Rp501,04 miliar atau 66,08% dari anggarannya dengan net profit margin mencapai 21,64% dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba bersih turun sebesar 25,28% karena adanya peningkatan beban pokok produksi sebagai akibat dari penurunan penjualan *bulk* polio dan peningkatan penjualan final produk yang mempunyai margin lebih rendah dari *bulk* polio.



(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2015	RKAP	2016	Kenaikan/ Penurunan		Selisih	Selisih
				[%]		2015/2016	2016 - RKAP 2016
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2
PENJUALAN BERSIH							
Produk Perusahaan	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,7)	(107.309)	(511.137)
Barang Dagang	11.436	181.404	88.129	670,63	(51,42)	76.693	(93.275)
Jasa	4.858	4.100	5.315	9,4	29,64	457	1.215
Jumlah Penjualan Bersih	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)
BEBAN POKOK PENJUALAN							
Produk Perusahaan	852.361	978.454	931.879	9,33	(4,76)	79.518	(46.575)
Barang Dagangan	11.165	133.957	68.454	513,12	(48,9)	57.289	(65.503)
Beban Jasa	3.962	2.605	4.962	25,23	90,43	1.000	2.356
Jumlah Beban Pokok Penjualan & Jasa	867.488	1.115.016	1.005.294	15,89	(9,84)	137.806	(109.722)
LABA (RUGI) KOTOR	1.478.430	1.803.940	1.310.465	(11,36)	(27,36)	(167.966)	(493.475)
Penghasilan Lain-lain	129.064	18.110	164.728	27,63	809,58	35.664	146.617
Beban penjualan	(126.818)	(159.600)	(133.996)	5,66	(16,04)	(7.178)	25.604
Beban Administrasi dan Umum	(421.759)	(498.274)	(402.002)	(4,68)	(19,32)	19.758	96.273
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(93.443)	(130.896)	(114.481)	22,52	(12,54)	(21.039)	16.415
Beban Bunga Pinjaman	-	(125)	(9.343)	-	7374	-	(9.218)
Beban Lain-Lain	(66.201)	(3.184)	(130.403)	96,98	3995,14	(64.202)	(127.218)
Jumlah	(579.157)	(773.970)	(625.497)	8	(19,18)	(46.340)	148.473
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	899.274	1.029.970	684.968	(23,83)	(33,5)	(214.306)	(345.002)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Pajak Kini	(232.893)	(275.614)	(185.425)	(20,38)	(32,72)	47.468	90.188
Pajak Tangguhan	4.213	3.871	1.498	(64,44)	(61,29)	(2.715)	(2.373)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(228.681)	(271.743)	(183.927)	(19,57)	(32,32)	44.754	87.816
LABA (RUGI) BERSIH	670.593	758.227	501.041	(25,28)	(33,92)	(169.552)	(257.186)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi							
Surplus Revaluasi Aset Tetap Net	1.980.782	0	0	(100)	-	(1.980.782)	0
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	(828)	(448)	(8.313)	903,7	1756,71	(7.485)	(7.865)
Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi Atas Kepemilikan Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	-	-	-	-
Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	1.979.954	(448)	(8.313)	(100,42)	1756,71	(1.988.267)	(7.865)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2.650.546	757.779	492.728	(81,41)	(34,98)	(2.157.819)	(265.052)

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG
PERUSAHAAN

Posisi Perusahaan Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2012-2016, menggunakan “Analisis SWOT”, perusahaan berada pada posisi tumbuh dimana secara internal perusahaan mempunyai kekuatan lebih besar dibanding kelemahannya dan secara eksternal mempunyai peluang lebih besar dibanding dengan ancamannya. Demikian pula dengan “Analisis Daya Tarik Industri dan Kekuatan Bisnis”, Perusahaan berada pada posisi tumbuh dimana industri vaksin tergolong sedang dengan kekuatan bisnis tergolong rata-rata. Pada posisi tumbuh, Perusahaan menerapkan strategi melalui integrasi horisontal.

Pada tahun 2016, Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi produk akhir dan *bulk* serta melanjutkan pengembangan vaksin baru. Selain itu perusahaan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 serta mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pemetaan Produk

Pada tahun 2016, market share produk perusahaan untuk Sektor Pemerintah masih 100% sedangkan untuk kebutuhan UNICEF bervariasi, yaitu untuk vaksin Campak 10 ds sebesar 25%, DTP 10 ds sebesar 52%, Td 10 ds sebesar 43%, TT 10 ds sebesar 19% dan OPV sebesar 40%. Untuk vaksin Polio, Bio Farma lebih memprioritaskan mensuplai vaksin untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu program imunisasi polio reguler dan juga mengeksport dalam bentuk *bulk* ke beberapa produsen vaksin.

Pencapaian Realisasi Dibanding Dengan RJPP dan
RKAP

Pencapaian penjualan bersih tahun 2016 di bawah RJPP dan RKAP nya masing-masing sebesar 9,88% dan 20,66%, dari segi pencapaian laba bersih realisasinya di bawah RJPP sebesar 11,61%, namun jika dibanding RKAP nya turun sebesar 33,92% dibawah anggarannya.

Realisasi Kinerja Tahun 2016 Dibanding Dengan RJPP Tahun 2012-2016 dan RKAP Tahun 2016

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	RJPP 2012-2016	RKAP 2016	Realisasi 2016 (AUDITED)	Kenaikan/Penurunan [%]		Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2
Penjualan Bersih	2.569.703	2.918.956	2.315.759	(9,88)	(20,66)	253.944	(603.197)
Beban Pokok Penjualan & Jasa	1.070.861	1.115.016	1.005.294	(6,12)	(9,84)	(65.567)	(109.722)
Beban Perusahaan	1.700.240	1.986.712	1.848.145	8,70	(6,97)	147.905	(138.567)
Investasi	336.625	1.032.812	542.671	61,21	(47,46)	206.046	(490.141)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	766.579	1.029.970	684.968	(10,65)	(33,50)	(81.611)	(345.002)
Laba Bersih	566.844	758.227	501.041	(11,61)	(33,92)	(65.803)	(257.186)
Total Aset	4.908.798	6.764.069	5.922.454	20,65	(12,44)	1.013.656	(841.615)



Statistik Perusahaan 10 (Sepuluh) Tahun

Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, kinerja perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini, berdasarkan prosentase kenaikan dengan tahun dasar tahun 2007 (100%).

Dalam%

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penjualan Bersih	100	108	159	162	178	193	249	274	315	311
B. Pokok Penj. & Jasa	100	92	131	137	147	159	198	213	237	274
Beban Perusahaan	100	110	140	153	166	163	204	245	277	316
Investasi	100	132	144	165	230	148	209	147	459	457
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	100	120	181	197	238	304	454	453	525	400
Laba Bersih	100	119	186	215	259	331	490	499	574	429
Total Aset	100	124	167	209	231	272	360	405	756	788

Data Statistik Perusahaan Tahun 2006-2016 Berdasarkan Nilai Rupiah

(Dalam Juta Rupiah)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penjualan Bersih	745.440	805.790	1.182.992	1.210.263	1.328.729	1.437.665	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.315.759
B. Pokok Penj. & Jasa	366.336	337.649	479.744	502.038	538.998	583.917	723.596	780.090	867.488	1.005.294
Beban Perusahaan	584.833	641.686	815.860	894.396	969.575	954.329	1.192.575	1.430.742	1.619.052	1.848.145
Investasi	118.666	156.690	171.186	195.846	272.887	176.122	248.276	174.623	544.974	542.671
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	171.369	206.492	310.982	338.419	407.772	521.124	778.589	775.902	899.274	684.968
Laba Bersih	116.767	138.385	217.681	250.815	302.419	385.916	572.468	582.193	670.593	501.041
Total Aset	751.795	930.971	1.255.302	1.570.969	1.733.504	2.045.688	2.703.070	3.044.608	5.680.663	5.922.454

Dari gambaran tabel diatas, perkembangan perusahaan mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Aktivitas perusahaan mengalami peningkatan setelah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain melakukan peningkatan kapasitas produksi vaksin polio dan mengembangkan produk baru berupa vaksin DTP-HB-Hib (Pentabio).

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI DALAM 1 TAHUN MENDATANG

ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2017

Penjualan Vaksin, Sera dan Trading Partnership

Rencana penjualan bersih tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp2,94 triliun atau 113,64% dari prognosa tahun 2016, dengan penjualan per kelompok produk.

Rencana Penjualan Per Kelompok Produk Tahun 2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Vaksin Bakteri	275.506	245.091	269.303	(11,04)	9,88	(30.415)	24.212
Vaksin Virus	1.862.967	1.707.514	1.798.624	(8,34)	5,34	(155.453)	91.111
Vaksin Kombinasi	296.100	191.774	298.351	(35,23)	55,57	(104.327)	106.577
Sera & Diagnostika	77.837	57.896	86.450	(25,62)	49,32	(19.941)	28.553
Produk Partnership	217.406	264.630,11	210.789	21,72	(20,35)	47.224	(53.841)
Trading Partnership	181.404	114582,32	268.099	(36,84)	133,98	(66.822)	153.517
Jasa	4.100	5866,538	8.599	43,09	46,58	1.767	2.733
Pendapatan Anak Perusahaan	3.635	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.918.956	2.587.354	2.940.215	(11,36)	13,64	(331.602)	352.862

Rencana penjualan tahun 2017 sebesar 113,64% dari prognosa tahun 2016 karena hampir seluruh kelompok produk mengalami peningkatan rencana penjualan, kecuali kelompok produk *partnership* mengalami penurunan sebesar 20,35% karena penurunan penjualan vaksin Meningitis.

Kelompok vaksin bakteri sebesar 109,88% dari prognosa tahun 2016 karena hampir seluruh produk mengalami kenaikan, kecuali Bio TT, Bio Td, Td 10 ds dan DT 10 ds mengalami penurunan masing-masing turun 9%, 65%, 13% dan 18%.

Kelompok vaksin virus sebesar 105,34% dari prognosa tahun 2016 terutama dari penjualan vaksin bOPV, vaksin Campak dan *bulk* campak masing-masing direncanakan meningkat sebesar 26,34%, 40,60% dan 384,81% serta adanya penjualan vaksin IPV hasil fill & finish senilai Rp73,50 miliar yang mana pada prognosa 2016 masih sebagai Trading Partnership. Peningkatan rencana penjualan produk-produk tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kinerja penjualan karena adanya penurunan penjualan vaksin tOPV dan *Bulk* Polio Type 2 akibat sudah diberlakukannya eradikasi polio type 2.

Kelompok vaksin kombinasi sebesar 155,57% dari prognosa tahun 2016 terutama karena adanya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp116,38 miliar yang pada prognosa tahun 2016 tidak bisa direalisasikan karena tidak memperoleh tender dari Unicef.

Kelompok sera dan diagnostika sebesar 149,32% dari prognosa tahun 2016 terutama karena seluruh produk mengalami peningkatan.

Kelompok penjualan produk partnership sebesar 80% dari prognosa tahun 2016 terutama karena penjualan vaksin Meningitis mengalami penurunan sebesar 49%.

Kelompok penjualan trading partnership sebesar 233,98% dari prognosa tahun 2016 terutama karena pada tahun 2017 direncanakan terdapat penjualan vaksin Varicella dan MR dimana pada prognosa 2016 tidak ada.

Kelompok Penjualan jasa sebesar 146,58% terutama dari rencana penjualan jasa laboratorium dan jasa imunisasi masing-masing sebesar 164,35% dan 154,86% dari prognosa tahun 2016.

Penjualan sektor Pemerintah tahun 2017 direncanakan sebesar 120,04% dari prognosa tahun 2016 terutama karena adanya rencana penjualan vaksin hasil fill & finish IPV senilai Rp73,75 miliar atau 160,63% dari prognosa tahun 2016 dan rencana penjualan trading partnership vaksin MR senilai Rp175,00 miliar.

Penjualan sektor Swasta tahun 2017 direncanakan sebesar 105,63% dari prognosa tahun 2016, terutama karena hampir seluruh kelompok produk sektor swasta direncanakan penjualannya meningkat, yaitu vaksin bakteri, virus, vaksin kombinasi, sera & diagnostika, trading partnership dan penjualan jasa masing-masing mencapai 113,21%, 132,02%, 131,70%, 140,20%, 135,27% dan 146,58% kecuali kelompok product partnership hanya mencapai 75,02% dari prognosa tahun 2016.

Penjualan sektor ekspor tahun 2017 direncanakan dalam mata uang rupiah senilai Rp1,75 triliun atau 112,83% dan bila dalam mata uang valas senilai USD 131,540,912.50 atau 113,17% dari prognosa tahun 2016, terutama karena adanya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp116,38 miliar yang mana pada prognosa tahun 2016 tidak bisa direalisasikan karena tidak memperoleh

Rencana Penjualan Per Sektor Tahun 2017

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Sektor Pemerintah	751.949	681.376	795.573	(9,39)	16,76	(70.574)	114.197
Sektor Swasta	372.899	386.015	395.148	3,52	2,37	13.117	9.133
Sektor Ekspor	1.790.473	1.248.368	1.749.494	(30,28)	40,14	(542.105)	501.126
Bio Farma Klinik & Imunisasi	3.635	-	-	-	-	(3.635)	-
Total Penjualan Bersih	2.918.956	2.315.759	2.940.215	(20,66)	26,97	(603.197)	624.456

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

tender dari Unicef dan peningkatan rencana penjualan vaksin bOPV, vaksin campak dan *bulk* campak masing-masing menjadi 131,59%, 221,23 dan 484,81% dari prognosa tahun 2016. Peningkatan rencana penjualan produk-produk tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kinerja penjualan karena adanya penurunan penjualan vaksin tOPV dan *Bulk* Polio Type 2 akibat sudah diberlakukannya eradikasi polio type 2.

Rencana Produksi Per Kelompok Produk Tahun 2017

Rencana produksi tahun 2017 senilai Rp1,22 triliun atau naik 108,17% dari prognosa tahun 2016 seiring dengan peningkatan penjualan sebesar 13,64%, dengan gambaran per kelompok produk sebagaimana pada tabel berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Vaksin Bakteri	327.334	384.694	397.553	17,52	3,34	57.360	12.859
Vaksin Virus	524.117	569.738	670.109	8,70	17,62	45.620	100.371
Vaksin Kombinasi	159.526	132.804	106.759	(16,75)	(19,61)	(26.722)	(26.045)
Sera & Diagnostika	50.779	44.453	49.714	(12,46)	11,84	(6.326)	5.262
Jumlah	1.061.756	1.131.688	1.224.135	6,59	8,17	69.932	92.447

Rencana produksi tahun 2017 meningkat 8,17% dari prognosa tahun 2016 karena peningkatan beban produksi kelompok produk vaksin bakteri, vaksin virus dan Sera & Diagnostika masing-masing sebesar 3,34%, 17,62% dan 11,84%. Rencana produksi tersebut telah mempertimbangkan rencana penjualan, kebutuhan persediaan, kapasitas produksi dan rencana pemasangan peralatan atau renovasi bangunan.

Rekap Laporan Laba-Rugi Komprehensif untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2017, 2016

Berdasarkan sasaran yang direncanakan dalam tahun 2017, Perusahaan menetapkan proyeksi Laba Bersih senilai Rp747,31 miliar dengan perhitungan sebagai berikut:



Februari 2013 : Kunjungan tim Bio Farma ke Arabio sebuah pabrik vaksin yang terletak di kota Mekkah Al Mukraromah, untuk berdiskusi mengenai transfer teknologi downstreaming pembuatan vaksin yang akan dikerjasamakan antar kedua belah pihak. Bio Farma menempatkan karyawannya di Arabio sebagai mentor pembuatan vaksin.



(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Penjualan Bersih	2.918.956	2.587.354	2.940.215	(11,36)	13,64	(331.602)	352.862
Beban Pokok Penjualan & Beban Jasa	(1.115.016)	(996.585)	(1.262.254)	(10,62)	26,66	118.431	(265.668)
LABA KOTOR	1.803.940	1.590.769	1.677.962	(11,82)	5,48	(213.171)	87.193
Penghasilan Lain-lain & Beban Usaha	(773.970)	(726.336)	(671.999)	(6,15)	(7,48)	47.633	54.337
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.029.970	864.432	1.005.963	(16,07)	16,37	(165.538)	141.531
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(271.743)	(222.848)	(258.650)	(17,99)	16,07	48.895	(35.802)
LABA BERSIH	758.227	641.585	747.313	(15,38)	16,48	(116.643)	105.728

Target laba bersih tahun 2017 naik sebesar 16,48% dari prognosa tahun 2016 dengan net profit margin sebesar 25,41% seiring dengan target penjualannya yang naik sebesar 13,64% dan adanya efisiensi beban usaha

Beban Peningkatan & Pengembangan SDM

Anggaran Beban Peningkatan & Pengembangan SDM tahun 2017 senilai Rp18,50 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Beban Pelatihan, Seminar & Workshop	19.252	15.215	14.115	(20,97)	(7,23)	(4.037)	(1.100)
Beban Pendidikan Formal	2.800	2.200	2.150	(21,43)	(2,27)	(600)	(50)
B. Peningkatan & Pengemb. SDM Lainnya	2.233	2.233	2.233	0,00	0,00	0	0
Jumlah	24.285	19.648	18.498	(19,09)	(5,85)	(4.637)	(1.150)

Untuk memenuhi Aspirasi Pemegang Saham dalam penyusunan RKAP tahun 2017 ini, anggaran Beban Peningkatan & Pengembangan SDM tahun 2017 diproyeksikan sama dengan prognosa tahun 2016 tanpa mengurangi efektivitas program kerja peningkatan dan pengembangan SDM.

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

Beban Perusahaan Beban Perusahaan tahun 2017 dianggarkan senilai Rp2,15 triliun atau 109,98% dari prognosa tahun 2016 yang dikelompokkan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa- RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Beban Produksi	1.061.756	1.149.434	1.220.036	8,26	6,14	87.677	70.602
Beban Trading Partnership	133.957	104.082	252.202	(22,30)	142,31	(29.874)	148.120
Beban Jasa	2.228	4.501	4.386	102,02	(2,55)	2.273	(115)
Beban Penjualan	159.600	129.965	138.762	(18,57)	6,77	(29.635)	8.797
Beban Administrasi & Umum	498.274	440.188	402.122	(11,66)	(8,65)	(58.086)	(38.066)
B. Penelitian, Pengemb. & Surveilans	130.896	123.382	128.830	(5,74)	4,42	(7.514)	5.448
Jumlah	1.986.712	1.951.553	2.146.339	(1,77)	9,98	(35.157)	194.786

Rekap Laporan Laba-Rugi Komprehensif untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2017, 2016

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2016		RKAP 2017	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih Prognosa RKAP 2016	Selisih RKAP 2017 Prognosa 2016
	Anggaran	Prognosa					
	1	2	3	2/1	3/2	2-1	3-2
Penuaian Bersih	2.918.956	2.587.354	2.940.215	(11,36)	13,64	(331.602)	352.862
Beban Pokok Penjualan & Beban Jasa	(1.115.016)	(996.585)	(1.262.254)	(10,62)	26,66	118.431	(265.668)
Laba Kotor	1.803.940	1.590.769	1.677.962	(11,82)	5,48	(213.171)	87.193
Penghasilan Lain-lain & Beban Usaha	(773.970)	(726.336)	(671.999)	(6,15)	(7,48)	47.633	54.337
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.029.970	864.432	1.005.963	(16,07)	16,37	(165.538)	141.531
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(271.743)	(222.848)	(258.650)	(17,99)	16,07	48.895	(35.802)
Laba Bersih	758.227	641.585	747.313	(15,38)	16,48	(116.643)	105.728

Target laba bersih tahun 2017 naik sebesar 16,48% dari prognosa tahun 2016 dengan net profit margin sebesar 25,41% seiring dengan target penjualannya yang naik sebesar 13,64% dan adanya efisiensi beban usaha



TARGET LAIN YANG INGIN DICAPAI DALAM TAHUN MENDATANG

1. Menjadi Perusahaan *Life Science* Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global
Visi Perusahaan yang awalnya, “Menjadi Produsen Vaksin dan Antisera Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global”, pada semester I tahun 2014 berubah: “Menjadi Perusahaan *Life Science* Kelas Dunia yang Berdaya Saing Global”. Dengan berubahnya visi tersebut mengharuskan Perusahaan selalu berada pada posisi world class company dalam semua bidang operasinya dan untuk mencapai hal tersebut Perusahaan harus menjabarkan visi tersebut kedalam misi, sasaran, strategi, kebijakan serta program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Perusahaan berkomitmen untuk menjadi *Green Company*
 - a. Perusahaan juga berkomitmen untuk menjadi *Green Company*, Perusahaan selalu berupaya untuk beroperasi dengan seimbang (*balance*) dan menjunjung tinggi triple bottom line (*people, profit, planet*). Perusahaan percaya bahwa selain kewajiban memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham, Perusahaan juga harus memiliki peran positif bagi kepentingan *stake holders*, baik kelestarian lingkungan dan keberlanjutan alam, maupun dimensi sosial (kesejahteraan masyarakat sekitar).
 - b. Dengan dimilikinya sertifikasi WHO, ISO dan OHSAS serta komitmen tinggi menjadi green company dapat menjadikan salah satu kekuatan Perusahaan untuk bersaing dengan Perusahaan lain di pasar global, selain itu sesuai dengan kebijakan Perusahaan untuk lebih meningkatkan kepuasan kepada pelanggan, Perusahaan akan mengimplementasikan CRM (*Customer Relationship Management*) yang terintegrasi baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri sehingga pangsa pasar yang telah ada dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan.
3. Melakukan riset produk yang sesuai dengan trend dan berupaya melakukan percepatan riset sehingga time to market produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar.
Salah satu antisipasi untuk menghadapi tantangan global adalah melakukan riset produk yang sesuai dengan trend dan berupaya melakukan percepatan riset sehingga time to market produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas riset vaksin baru, Perusahaan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset di dalam dan luar negeri supaya dapat mempercepat ketersediaan produk di pasar.
4. Menjelang eradikasi Polio yang diperkirakan tahun 2018, untuk mengantisipasi hal tersebut Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, menyiapkan infrastruktur untuk produk baru
Menjelang eradikasi Polio yang diperkirakan tahun 2018, untuk mengantisipasi hal tersebut Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, menyiapkan infrastruktur untuk produk baru dengan tetap memperhatikan regulasi internasional terkini (*current Good Manufacturing Practices/cGMP*, rencana investasi diantaranya untuk pembangunan gedung fasilitas produksi. Pembangunan fasilitas tersebut dan peralatan di dalamnya direncanakan secara multi years sampai dengan tahun 2017.
5. Perusahaan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 serta mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).
Penerapan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) dan *Risk Management System* yang berbasis IT yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta dapat mengelola Perusahaan dengan baik, ditindaklanjuti oleh Perusahaan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) termasuk memperkuat *Enterprise Risk Management (ERM)* yang

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

dinyatakan dalam budaya Perusahaan yaitu PITIC (*Professional, Integrity, Teamwork, Inovation Customer Oriented*), dokumen manual mutu, pedoman dan prosedur baku secara optimal dan berkelanjutan. Perusahaan mengimplementasikan ERP yang akan mengintegrasikan hampir seluruh proses bisnis Perusahaan, sesuai dengan *best practice*/standar yang berlaku, sehingga pengendaliannya menjadi lebih baik, akurasi dan integrasi data antar unit kerja lebih baik, serta kecepatan proses bisnis akan meningkat. Peranan sistem informasi yang terintegrasi tersebut akan sangat membantu Perusahaan dalam memperlancar dan efisiensi proses bisnis serta memenuhi persyaratan regulasi, termasuk dalam pelaksanaan GCG.

6. Untuk mewujudkan visi Perusahaan, peranan Sumber Daya Manusia/SDM sangat penting dan harus dikelola dengan baik, untuk itu Perusahaan melakukan pengelolaan SDM dengan paradigma "*Human Capital Management*" yang memandang SDM sebagai aset yang perlu terus ditumbuhkembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya agar nilainya terus bertambah melalui program pengembangan yang terintegrasi. Disisi lain, Perusahaan berupaya meningkatkan

kesejahteraan karyawan selama bekerja dan setelah pensiun sehingga diharapkan disamping mereka kompeten juga memiliki loyalitas dan integritas tinggi terhadap Perusahaan.

7. Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi produk akhir dan *bulk*
8. Melanjutkan pengembangan vaksin baru.

Peran Strategis Bio Farma

Bio Farma memiliki peran yang sangat strategis di bidang pengembangan dan produksi vaksin baik di tingkat lokal maupun internasional, di tingkat lokal Bio Farma merupakan satu-satunya produsen yang memasok kebutuhan vaksin EPI untuk kebutuhan masyarakat Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI, sehingga suplai vaksin secara nasional dapat diamankan, PT Bio Farma (Persero) pun merupakan salah satu anggota Dewan Riset Nasional yang salah satu tugasnya mempercepat pengembangan vaksin di Indonesia sehingga kemandirian bangsa di bidang vaksin dapat segera terwujud, hal ini sesuai dengan program Pemerintah yang berupaya untuk menciptakan kemandirian bangsa dalam berbagai bidang termasuk kesehatan.



Delegasi Bio Farma mengunjungi Kantor Kementerian Kesehatan Tunisia untuk menjajaki kerjasama dengan produsen vaksin asal Tunisia yaitu Tunis Pasteur Institute of Tunis dalam hal penyediaan tenaga ahli, transfer teknologi dan produk setengah jadi (*bulk*) khususnya untuk pembuatan produk vaksin yang memenuhi program imunisasi dasar seperti BCG, DTP, Polio, Campak dan Hepatitis B. dan dari pihak Pasteur Institute of Tunis akan bersinergi kaitan dalam riset untuk penemuan vaksin baru.



Di tingkat internasional, Bio Farma memiliki peran yang strategis sebagai *global player* dalam memasok kebutuhan vaksin dunia melalui WHO/UNICEF, karena Bio Farma merupakan salah satu produsen vaksin yang telah lulus prakualifikasi WHO. Peran strategis Bio Farma lainnya yang diakui dunia adalah Bio Farma pilih sebagai ketua organisasi DCVMN (*Developing Countries Vaccine Manufacturers Network*), sehingga semakin meningkatkan posisi tawar Bio Farma di organisasi tersebut. Di OIC (*Organization of Islamic Countries*) peran strategis Bio Farma semakin diakui, yang ditandai dengan banyaknya tawaran dari Negara-negara islam untuk melakukan kerjasama di bidang pengembangan dan produksi vaksin diantaranya dari Negara Iran dan Arab Saudi.

Strategi Perusahaan

1. Pengembangan inovasi dan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar.
2. Mempertahankan pasar yang sudah ada dan memperluas pasar.
3. Melakukan aliansi strategi dalam bidang penelitian dan pengembangan produk, produksi dan pemasaran dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Melakukan investasi untuk produk baru, meningkatkan kapasitas produksi, mempertahankan kualitas dan memenuhi regulasi yang berlaku.
5. Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi global.
6. Merencanakan, melaksanakan, mengimplementasikan dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program termasuk penyusunan dokumen yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 berdasarkan cGMP, ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001.
7. Melakukan efisiensi biaya di berbagai bidang.
8. Koordinasi dengan berbagai lembaga/institusi baik nasional maupun internasional, termasuk dan tidak terbatas pada BPOM dan WHO untuk berbagai kegiatan Perusahaan.

PERBANDINGAN RKAP & REALISASI

9. Meningkatkan *awareness* masyarakat umum dan komunitas (instansi, institusi pendidikan dan Perusahaan) terhadap imunisasi.

Kebijakan Perusahaan

1. Prioritas penyediaan vaksin untuk mendukung program imunisasi Pemerintah.
2. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
3. Prioritas R & D yang sejalan dengan WHO dan UNICEF.
4. Produksi yang berkualitas internasional, efisien dan ramah lingkungan.
5. Investasi selektif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta produk baru.
6. Penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasa nasional.
7. Sistem remunerasi karyawan berbasis kompetensi.
8. Mendukung Pemerintah dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi flu burung dan Flu A (H1N1).
9. Meningkatkan peran teknologi informasi dalam pengelolaan Perusahaan.
10. Menerapkan sistem mutu secara konsisten dan terpadu.
11. Mengikuti ketentuan WHO terkait aspek prekualifikasi.

Ke depan, kebutuhan vaksin maupun produk biologis lainnya akan meningkat. Tetapi tantangannya juga akan semakin berat baik karena peningkatan persaingan, perkembangan regulasi dan teknologi maupun adanya gerakan kontra imunisasi yang semakin menguat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga akan melakukan re-assessment terhadap Bio Farma, sehingga Bio Farma harus berupaya agar status Prakualifikasi WHO untuk produk lama dapat dipertahankan dan status Prakualifikasi WHO untuk vaksin Pentabio segera didapatkan.

Dengan kekuatan besar yang dimiliki mulai dari penelitian dan pengembangan, produksi dan pemasarannya yang sudah luas serta kemandiriannya, maka tantangan yang berat di masa yang akan datang dapat dihadapi dengan baik.

Bio Farma harus meningkatkan diversifikasi produk dan memperluas jenis produk ke arah biological product lainnya serta bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pasar termasuk memenuhi 100% kebutuhan Pentabio untuk pemerintah.

Bio Farma akan membangun fasilitas produksi yang baru yang dilengkapi dengan fasilitas formulasi dan filling untuk vaksin yang diproduksi saat ini maupun vaksin baru hasil riset Bio Farma (Vaksin MR, sIPV, rotavirus, dan lainnya), fasilitas produksi *bulk* sIPV, *bulk* tetanus dan *bulk* difteri. Sarana produksi yang akan dibangun sesuai dengan standar Eropa sehingga selain meningkatkan kapasitas produksi juga membuka peluang bagi Bio Farma untuk memasok produk ke pasar Eropa, meningkatkan efisiensi karena menggunakan *batch size* yang besar mengurangi penggunaan kertas dengan mengaplikasikan e-BPR (*Electronic Batch Production Record*).

Rencana ke depan lainnya adalah:

1. Tetap mempertahankan kerja sama yang baik dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, dan ikut serta dalam misi dagang di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar ekspor.
2. Bekerja sama dengan international partner untuk mencari pasar baru dengan mekanisme kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. Mencari pasar di wilayah India, China, dan ASEAN untuk memperluas pasar.
4. Meningkatkan suplai *bulk* polio, campak dan *bulk* lainnya.
5. Penetrasi pasar untuk produk yang sudah PQ WHO (*Bulk, ready to fill final bulk dan finished products*).
6. Meregistrasikan produk di negara-negara potensial.
7. Memperkuat aktivitas pemasaran di sektor penjualan swasta dalam negeri.
8. Melakukan aktivitas pemasaran dengan mengupayakan sinergi antar BUMN.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

PASAR VAKSIN GLOBAL DIPERKIRAKAN AKAN MENCAPAI 48,03 MILIAR PADA 2021 DARI USD 32,24 MILIAR PADA TAHUN 2016 PADA CAGR SEBESAR 8,3%.

PROSPEK PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI DAN EKONOMI SECARA UMUM

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2017

IMF merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 untuk kawasan Asean 5, termasuk Indonesia. Ramalan IMF ini berbeda dengan Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan positif. Investasi swasta menjadi catatan penting bagi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2017.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2017 hanya akan mencapai 4,9%. Perkiraan itu turun dari laporan WEO Oktober 2016, di mana pada 2017 pertumbuhan ekonomi kawasan Asean 5 diproyeksikan tumbuh 5,1%. Revisi turun ini disumbang oleh Indonesia yang diperkirakan investasi swastanya akan tumbuh lebih rendah dari proyeksi awal dan Thailand yang berpotensi mengalami pelambatan dari sisi konsumsi dan pariwisata.

Sementara itu, secara umum proyeksi pertumbuhan ekonomi global tidak mengalami perubahan dari *World Economic Outlook* Oktober 2016. Saat itu

produk domestik bruto (PDB) pada 2017 diperkirakan tumbuh 3,4% dan berlanjut menjadi 3,6% pada 2018.

Adapun pertumbuhan ekonomi negara seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang diperkirakan meningkat. Ekonomi dunia akan mendapat kecepatan baru tumbuh dalam jangka pendek. Tahun 2017 menjadi momentum pertumbuhan itu. Namun, di sisi lain ketidakpastian justru akan meningkat mulai tahun ini.

Proyeksi lebih kuat dan lebih akurat diperkirakan akan muncul dalam WEO April 2017. Pasalnya, para pelaku pasar dan IMF telah mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari rencana kebijakan ekonomi AS di bawah Donald Trump.

Apabila AS konsisten dengan kebijakan stimulus fiskal yang dijanjikan Trump pada masa kampanye, maka prospek pertumbuhan ekonomi negara berkembang berpotensi kembali mendapat tekanan ke bawah. Proyeksi dari IMF ini berbanding terbalik dengan proyeksi yang diterbitkan oleh Bank Dunia, terutama terkait proyeksi PDB Indonesia.

Naiknya investasi sektor swasta dan menguatnya kembali harga komoditas, diproyeksikan akan membuat sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada 2017 dibandingkan tahun lalu.

Bank Dunia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 akan mencapai 5,3% dan berlanjut menjadi 5,5% secara berturut-turut pada 2018 dan 2019.

Aksi proteksionis yang digaungkan Trump pada kampanyenya bisa membatasi laju ekspor Indonesia ke AS. Namun, secara umum kinerja ekonomi AS membaik di semester kedua diiringi dengan adanya kepastian kenaikan Fed Fund Rate yang diperkirakan sebanyak dua kali pada tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2017 peran dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari konsumsi dalam negeri dan dari pemerintah, melainkan juga investasi swasta.

Sementara, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2017 akan pulih di level moderat 2,7%. Pemulihan ekonomi dunia terutama akan ditopang oleh pertumbuhan negara-negara maju dan berkembang yang mengandalkan ekspor komoditas.

Di sisi lain permintaan dari negara-negara maju dan berkembang yang merupakan importir barang komoditas tetap solid. Setelah melewati beberapa tahun dengan pertumbuhan ekonomi yang mengecewakan, melihat adanya peluang penguatan prospek ekonomi global.

Stimulus fiskal di berbagai negara turut mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik dan global. Meskipun ada hal yang harus diwaspadai dari sisi kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat terpilih, Donald Trump, yang berpotensi lebih cenderung proteksionis. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang sepanjang tahun ini setidaknya bisa meningkat hingga rata-rata 4,2%, dari tahun lalu sebesar 3,4%.

Tahun 2017 adalah saatnya untuk mengambil keuntungan dari momentum bangkitnya ekonomi global dan meningkatnya investasi di bidang infrastruktur dan sumber daya. Ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mencegah kemiskinan ekstrem. Namun, untuk negara berkembang terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang harus dihadapi, khususnya untuk negara dengan jumlah populasi besar dan tingkat kemiskinan cukup tinggi. Pertumbuhan investasi di 2015 hanya berada di posisi 3,4% atau turun 10% dari rata-rata pertumbuhan di 2010. Dan, di 2016 diperkirakan kembali menurun sekitar 0,5%.

Pertumbuhan investasi yang melambat itu merupakan bagian dari koreksi pasca krisis ekonomi kemarin, serta merefleksikan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Termasuk di dalamnya harga minyak dunia yang rendah, investasi langsung luar negeri yang melambat, ancaman utang swasta, dan risiko politik.

Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Cina di 2017 akan tetap berada di posisi 6,5%. Negara maju diprediksi akan tumbuh hingga 1,8% di 2017 atau meningkat dari tahun lalu sebesar 1,6%.

Bank Indonesia, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2017 bakal mencapai 3,4%. Sebelumnya, BI memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 3,2%. Menurut Gubernur Bank Indonesia, perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut akan mempengaruhi nilai tukar di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah inflasi. Ini kombinasi masih adanya ketidakpastian dunia dan kondisi nasional yang membuat kita harus memperhatikan nilai tukar. Dunia masih mengalami ketidakpastian, terutama dalam hal sistem keuangan. Semua negara masih menunggu kebijakan fiskal dan perdagangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu juga bagaimana kebijakan mereka terhadap negara besar seperti Cina.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN



Selain itu, nilai tukar mata uang Cina atau yuan akan melemah. Hal tersebut harus diperhatikan oleh otoritas karena sejak 2016 yuan terus mengalami pelemahan hingga mencapai 7%. Itu akan berdampak pada negara-negara lain. Kondisi global lain yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah adalah harga minyak. BI memperkirakan, pada 2017, harga minyak berada di kisaran US\$ 45 per barel. Tapi kemarin kami melakukan penyesuaian menjadi US\$ 47 per barel. Harga minyak naik karena kesepakatan OPEC mengurangi produksi. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, menyambut baik terjadinya peningkatan terhadap harga barang-barang komoditas andalan Indonesia yang sejak 2012 terus mengalami penurunan. Situasi sudah membaik. Diharapkan tahun 2017 lebih baik.

PROPEK EKONOMI INDONESIA TAHUN 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dari target APBN 2017. Ia memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5,2-5,4% tahun ini. Target dalam APBN 2017 yang sebesar 5,1% merupakan baseline. Artinya, belum memasukkan sejumlah kebijakan baru yang dirancang pada 2017 ini.

Pemerintah berencana menerbitkan beberapa kebijakan baru. Kebijakan berfokus kepada pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kombinasi kebijakan tersebut, menurut dia, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas *baseline*.

Pemerintah juga akan membuat kebijakan terkait dengan performa agraria. Pemerintah akan mengalokasikan lahan dengan cara kluster kepada masyarakat. Tujuannya, lahan bisa lebih produktif dan membantu perekonomian. Dalam APBN 2017, pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,1%. Target tersebut lebih rendah dari usulan awal pemerintah dalam RAPBN 2017 yaitu sebesar 5,3%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat beberapa faktor pertumbuhan ekonomi tahun lalu, jika dilihat dari sisi kinerja ekonomi, memberikan banyak sekali sinyal positif, meski terjadi tekanan dari dunia internasional. Momentum positif tersebut, ia berharap, akan terus terjaga pada 2017. Tentu dengan pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk memperbaiki berbagai macam isu yang sifatnya adalah fundamental.

Ada beberapa catatan yang diperoleh dengan melihat hasil statistik yang menggambarkan ekonomi Indonesia pada 2016. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,02 dan pertumbuhan kuartal keempat di angka 4,94, hal itu menggambarkan kondisi yang sehat. Di satu sisi melihat bahwa di sisi permintaan atau konsumsi, masih sangat *rowbust* (sehat). Bahkan di atas rata-rata pertumbuhan di atas 10 tahun terakhir adalah *slightly* di 5%.

Adapun dari sisi investasi, meski masih di bawah 5% itu adalah PR dari pemerintah untuk memperbaikinya pada 2017. Misalnya, dengan pemotongan anggaran di semester II yang membuat sepanjang tahun negatif 0,15 dibanding tahun lalu, yang defisitnya cukup tinggi, yakni 2,53. Tahun ini kami lihat di 2,46.

Secara nominal, belanja pemerintah merupakan faktor di semester II untuk tahun 2017. Namun diperlukan sesuatu untuk kebijakan fiskal tetap terjaga dan tidak menjadi persoalan kredibilitas. Jika diamati yang patut dicatat adalah terjadi perkembangan positif dari sisi ekspor tepatnya di kuartal IV tahun 2016. Kalau di lihat dari sisi itu, untuk 2017, sisi konsumsi akan terus dijaga agar paling tidak setara dengan *average* 10 tahun. Kemudian investasi diharapkan kita akan positif, lebih besar, dan dari faktor *government*, pemerintah tidak menjadi faktor yang menciptakan ketidakpastian.

Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,3% Pada 2017

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3% pada tahun 2017. Menurut Bank Dunia, serangkaian reformasi kebijakan fiskal dan iklim usaha diperkirakan bakal meningkatkan ekonomi Indonesia. Proyeksi tersebut tidak berubah dari proyeksi yang dirilis pada Oktober 2016 lalu. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% pada tahun 2016 dan 5,3% pada 2017.

Pertumbuhan PDB sebesar 5% secara tahunan pada kuartal III 2016, turun dibandingkan 5,2% pada kuartal II 2016. Hal ini tertuang dalam laporan teranyar

Bank Dunia bertajuk Indonesia *Economic Quarterly*. Dalam laporannya tersebut, Bank Dunia menyatakan layaknya negara-negara lain dunia, Indonesia pun memiliki berbagai risiko yang intensif, seperti ketidakpastian kebijakan ekonomi global dan gejolak finansial global.

Bank Dunia menyatakan, kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik. Hal ini sejalan dengan penetapan sasaran penerimaan yang lebih realistis dalam APBN 2017. Meskipun demikian, untuk meningkatkan pendapatan pajak, Indonesia masih perlu mempercepat reformasi administrasi dan kebijakan pajak.

APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin.

Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi tersebut. Dengan demikian, sasaran pembangunan lebih cepat tercapai. Bank Dunia pun memberikan dua saran yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu belanja.

1. Pertama, relokasi belanja ke sektor-sektor prioritas dengan tingkat belanja yang masih rendah dan bisa membawa dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan. Sektor-sektor ini antara lain infrastruktur, bantuan sosial, dan kesehatan.
2. Kedua, pemerintah sebaiknya memaksimalkan dampak belanja di semua sektor, termasuk pertanian, pendidikan, dan bantuan sosial.

Pondasi ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang lebih tinggi dipandang bakal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Meskipun demikian, Bank Dunia memandang masih ada beberapa risiko yang dapat menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Risiko tersebut berasal baik dari dalam negeri maupun eksternal.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN



Ke depan terdapat tantangan dalam jangka pendek. Ada tantangan politik dan kepastian kebijakan. Beberapa risiko eksternal yang dapat memberikan risiko penurunan atau downside risk yang signifikan antara lain perubahan besar dalam kebijakan perdagangan di antara negara-negara maju.

Selain itu, ada pula perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter di Amerika Serikat. Risiko lainnya adalah ketidakpastian politik Eropa. Hal ini terkait proses keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan ketidakpastian terkait pemilihan umum di beberapa negara Eropa, antara lain di Belanda dan Perancis.

Dari dalam negeri, beberapa risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri. Bank Dunia memprediksi inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada tahun 2017 menjadi 4,3% dari 3,5% pada tahun 2016 lalu. Karena adanya kenaikan tarif listrik dan pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, inflasi diproyeksikan akan menurun pada tahun 2018 oleh karena hilangnya efek kenaikan harga.

Selain itu, hal lain yang dipandang sebagai risiko terhadap pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan fiskal yang lemah. Bank Dunia mencatat, pada tahun 2016 penerimaan dari program amnesti pajak meningkatkan penerimaan secara keseluruhan. Akan tetapi, penerimaan dari sektor non-amnesti pajak melemah pada tahun 2016.

Di tengah maraknya potensi ketidakpastian pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 9 November 2016 lalu, di dalam negeri berkembang kabar baik yang patut dicermati. Sentimen positif berasal dari dua lembaga riset ternama dan kredibel, yaitu AC Nielsen dan Danareksa Research Institute (DRI). Keduanya memaparkan hasil tentang kenaikan indeks kepercayaan konsumen, berdasarkan riset yang baru saja mereka lakukan.

Menurut survei Nielsen, indeks kepercayaan konsumen (IKK) Indonesia terus naik tahun 2016 hingga menembus 122 pada triwulan III, meningkat enam poin dibanding kuartal sama tahun 2015 sebesar 116. Indeks yang menunjukkan optimisme konsumen ini merupakan terbaik ketiga di Asia-Pasifik, setelah India dan Filipina.



Ada dua indikator yang membuat indeks kepercayaan konsumen naik.

1. Pertama, indikator keyakinan konsumen akan kondisi keuangan pribadi dalam 12 bulan ke depan yang cukup aman.
2. Kedua, indikator keinginan berbelanja yang cukup meyakinkan.

Pertumbuhan Ekonomi VS RAPBN 2017

Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi mencapai level 5,3 pada RAPBN 2017 dengan mempertimbangkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan ekonomi yang dihadapi pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 akan mencapai 5,3%. Diprediksikan bahwa perekonomian Indonesia akan mebaik dalam beberapa bulan kedepan dan laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0%.

Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidato Nota Keuangan 2017 menetapkan, nilai RAPBN 2017 dibuat dengan nilai belanja Rp2.070,5 triliun. Anggaran belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.310,4 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa Rp760 triliun. Pemasukan negara dalam RAPBN 2017 direncanakan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di 2017 ditargetkan mencapai angka Rp240 triliun.

Optimis, Laju Pertumbuhan Ekonomi negara kita akan lebih baik dan meningkat di tahun 2017. Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2017 akan lebih kencang bahkan mencapai angka 5,5%.

Laju pertumbuhan yang lebih kencang ini bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, disebabkan oleh Fondasi Ekonomi Indonesia yang semakin kuat dan membaik.

Ada beberapa hal yang menjadi faktor utama:

1. Kinerja ekspor nasional yang bergerak menuju tren positif. Nilai produk yang diekspor surplus bila dibandingkan dengan nilai impor.
2. Meningkatnya permintaan ekspor, ini sangat mempengaruhi daya saing sebuah negara. Bila permintaan ekspor dari negara luar tinggi, maka akan berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi.
3. Semakin baiknya harga komoditas ekspor. Hal ini sangat dinantikan oleh para eksportir. Karena di tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi harga tidak menentu. Akibat persaingan harga, maka perdagangan anjlok. Bahkan berpengaruh langsung pada permintaan komoditas ekspor.
4. Membaiknya ekonomi China dan pengaruh dari suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Ini satu-satunya pengaruh dari luar negeri, tetapi menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi semakin laju ke tren positif atau malah menjadi bumerang bagi perekonomian kita kedepannya.
5. Suksesnya program pemerintah yaitu *tax amnesty* dan dana *repatriasi*. Walaupun diawal program tersebut timbul ketidakpercayaan (trust) wajib pajak. Namun saat mendekati akhir periode pertama, program ini mendapat sambutan yang hangat dari para wajib pajak. Pemerintah menerima uang tebusan mencapai Rp97,2 triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp4.500 triliun dan repatriasi Rp137 triliun.

Hal-hal di atas yang menjadi pengaruh penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kita saat ini. Disamping itu, pemerintah juga akan menghadapi kondisi global yang semakin kompleks dan berbagai tantangan dari dalam dan luar negeri seperti:

1. Inflasi yang diprediksi akan meningkat
2. Penyerapan APBN dan APBD yang masih rendah.
3. Maraknya dana yang keluar ke Luar Negeri

KONTRIBUSI BIO FARMA DI DUNIA

TINJAUAN INDUSTRI FARMASI, VAKSIN & LIFE SCIENCE

PETA INDUSTRI VAKSIN DAN FARMASI GLOBAL

Peta Industri Vaksin dan Farmasi Global

Pasar Vaksin global diperkirakan akan mencapai 48,03 miliar pada 2021 dari USD 32,24 miliar pada tahun 2016 pada CAGR sebesar 8,3%. Pasar global secara luas diklasifikasikan ke dalam teknologi, jenis, indikasi penyakit, pengguna akhir, dan wilayah.

Berdasarkan teknologi, pasar vaksin tersegmentasi menjadi vaksin konjugasi (*conjugate vaccine*), vaksin tidak aktif dan subunit (*inactivated and subunit vaccines*), vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin toksoid, dan vaksin rekombinan (*live attenuated vaccines, toxoid vaccines, and recombinant vaccines*).

Segmen Vaksin konjugasi diharapkan berkontribusi sebagai pangsa terbesar dari pasar global pada tahun 2016. Peningkatan dukungan pemerintah untuk pengembangan vaksin dan meningkatnya investasi perusahaan akan mendorong pertumbuhan segmen pasar ini.

Berdasarkan jenis, pasar vaksin tersegmentasi menjadi vaksin monovalen dan vaksin multivalen.

Segmen Vaksin monovalen diharapkan untuk memperhitungkan pangsa terbesar dari pasar ini. Pangsa pasar yang besar dikaitkan dengan meningkatnya prevalensi penyakit dan meningkatkan inisiatif pemerintah dan non-pemerintah untuk melaksanakan R & D vaksin.

Indikasi penyakit, termasuk di pasar vaksin penyakit pneumokokus, influenza, difteri, tetanus, dan pertusis (DTP), hepatitis, rotavirus, varicella, penyakit meningokokus, polio, campak, gondok, dan rubella

(MMR), human papilloma virus (HPV) infeksi, dan lain-lain. Segmen penyakit pneumokokus diharapkan untuk memperhitungkan pangsa terbesar dari pasar global pada tahun 2016. insiden tinggi infeksi pneumokokus dan kebutuhan imunisasi untuk mencegah penyakit meningkatkan pertumbuhan pasar dari segmen ini.

Pengguna akhir, termasuk pada pasar vaksin untuk anak-anak dan orang dewasa. segmen vaksin untuk anak-anak diharapkan dapat memperhitungkan pangsa terbesar dari pasar global pada tahun 2016. Jumlah meningkatnya program kesadaran untuk mempromosikan vaksinasi telah mengakibatkan meningkatnya penggunaan vaksin untuk anak-anak.

Secara geografis, pasar vaksin didominasi oleh Amerika Utara, diikuti oleh Eropa dan Asia. Pertumbuhan di segmen Amerika Utara terutama didorong oleh inisiatif pemerintah untuk imunisasi terhadap penyakit seperti influenza dan Human Papiloma Vaccine (HPV) di negara-negara Amerika Utara.

Sumber: <http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vaccine-technologies-market->

INDUSTRI VAKSIN NEGARA BERKEMBANG

Adapun perkembangan belanja kesehatan Indonesia, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masuk pada jajaran yang terendah yaitu sebesar 3,6% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, belanja kesehatan Vietnam 7,1% dari PDB dan Filipina 4,7% dari PDB. Untuk belanja pemerintah, Indonesia tercatat merupakan yang terendah ketiga diantara negara lain yang berada pada level yang sama, dengan proporsi 41,4% dari APBN, jauh dari Thailand yang sudah menapai 86%. Menurut data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa Industri Farmasi, Kimia dan obat tradisional tumbuh 5,46%, sedangkan menurut *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG) mencatat pada 2016 industri farmasi tumbuh pada kisaran 7,49%.

Adanya kepedulian untuk berkontribusi kepada masyarakat dunia ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Pertama, kemandirian vaksin dan ketidakmampuan industri vaksin negara negara berkembang dan negara Islam berkompetisi dengan negara maju. Tidak banyak negara berkembang yang mampu membangun kemandirian vaksin. Sampai saat ini, mereka masih bergantung pada industri vaksin di negara-negara maju.

Kalaupun negara-negara berkembang dan Islam memiliki fasilitas industri vaksin, tetapi mereka belum mampu memenuhi standar global sehingga belum mampu masuk dan berkompetisi di pasar internasional.

Saat ini, jumlah negara berkembang yang memiliki industri vaksin hanya 17 dan 7 di kalangan negara muslim. Mereka menghasilkan 200 produk vaksin, tetapi hanya sekitar 30 yang memiliki prekualifikasi WHO.

Dengan populasi penduduknya mencapai 80% dari total warga dunia, tetapi industri vaksin negara berkembang tidak mampu mencukupinya. Justru sebaliknya, hampir 80% pangsa pasar vaksin global dikuasai oleh negara maju.

Meskipun ukuran pasar produk vaksin hanya 2,3% dari total industri farmasi global, tetapi pertumbuhannya cukup spektakuler yakni 10-15% per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan farmasi yang hanya 5-7% per tahun. Tentu saja, bagi mereka ini sangat menggiurkan.

Permasalahan dan tantangan tersebut mendorong kami untuk berinisiatif mengambil peran lebih besar. Dengan *world-class capability* yang dimiliki, Bio Farma mencoba lebih aktif membantu produsen vaksin di negara negara-negara berkembang dan Islam untuk lebih mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Sebagai produsen vaksin dari negara berkembang yang diakui dunia karena kualitas dan ekspertisnya, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dan *center of excellence* industri vaksin bagi negara-negara berkembang dan Islam.

Semenjak tahun 2011, lebih dari 70% kebutuhan vaksin global hanya dipenuhi oleh 3 negara yaitu China, India dan Indonesia. Bio Farma sebagai satu-satunya produsen Vaksin di Indonesia tentunya berkontribusi dalam pemenuhan tersebut, sesuai data SESRIC bahwa Produsen Vaksin Indonesia memiliki kinerja bintang, walaupun industri vaksin merupakan industri yang kompleks serta memiliki tingkat pengembalian investasi yang lama dan tingkat risiko yang besar dalam riset dan pengembangan produk. Peningkatan kebutuhan vaksin tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah produsen vaksin, sejak tahun 1990 produsen vaksin yang berjumlah 63 menjadi 44 pada tahun 2010. Negara berkembang menjadi produsen vaksin utama dibandingkan negara lainnya.

KONTRIBUSI BIO FARMA DI DUNIA

**PERAN PRODUSEN VAKSIN DI NEGARA ISLAM**

Pada 15-18 November 2016, Bio Farma, dipercaya menjadi tuan rumah *workshop* produksi vaksin bagi negara Islam di Bandung. Pertemuan ini diikuti oleh peserta dari negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang telah memiliki industri vaksin serta negara yang sedang mempersiapkan diri untuk membuat vaksin di negaranya. Saat ini lebih dari 10 negara sudah menyatakan hadir yaitu Pakistan, Turki, Tunisia, Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Maroko, Senegal, Mesir, Bangladesh, serta tiga lembaga dunia yaitu Badan Kesehatan dunia (WHO), UNICEF dan *Islamic Development Bank* (IDB).

Indonesia mendapatkan kesempatan istimewa menjadi tuan rumah ini merujuk pada hasil rapat pertemuan OKI, Konjen RI di Jeddah dan Bio Farma pada tanggal 1 September 2016. Bio Farma akan melaksanakan pelatihan vaksin yang berlangsung pada 15-18 November, sebelumnya juga akan dilaksanakan pertemuan terbatas kelompok produsen vaksin negara Islam (*Vaccine Manufacturers Group*) pada 14-15 November 2016.

Dengan sinergi dengan berbagai pihak perwakilan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P

Kemenkes, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), *The Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI), World Health Selain itu, pada akhir acara akan dilakukan *field visit* untuk memperkenalkan potensi Indonesia dengan keanekaragaman hayati, kekayaan budaya serta potensi pariwisata.

Program pelatihan ini sejalan dengan program Nawacita nomor enam yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar Internasional. Dengan itu industri vaksin Indonesia mampu dipasarkan secara massif di dunia sekaligus mendorong kemajuan negara-negara Islam.

Dengan pelatihan ini diharapkan menghasilkan pemikiran - pemikiran dalam mentransformasikan dan kemandirian negara Islam dalam memproduksi vaksin. Indonesia perlu mensosialisasikan keberhasilan dan berbagi dengan negara Asia khususnya negara Islam untuk mendorong kepercayaan negara Islam. Karena Indonesia melalui Bio Farma diberikan tanggung jawab sebagai *center of excellence* di bidang vaksin. Dipilihnya Bio Farma menjadi tuan rumah karena memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memproduksi vaksin selama lebih dari 126 tahun dan produknya sudah diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO).



ASPEK PEMASARAN

BIO FARMA MENJALANKAN STRATEGI DENGAN CARA MEMPERTAHANKAN PASAR YANG SUDAH ADA DAN MEMPERLUAS PASAR BARU UNTUK MENINGKATKAN PEMASARAN PRODUK

STRATEGI PEMASARAN BIO FARMA

Untuk mendukung pencapaian target penjualan, Bio Farma menjalankan strategi dengan cara mempertahankan pasar yang sudah ada dan memperluas pasar baru untuk meningkatkan pemasaran produk yang sudah dikenal maupun produk baru, membina dan membangun kemitraan yang lebih strategis melalui *face to face meeting* dengan customer sehingga dapat mengetahui secara langsung keinginan customer (*customer oriented*) dan kebutuhan pasar secara global, mengikuti tender-tender vaksin yang diselenggarakan oleh suatu negara maupun organisasi internasional, serta melakukan registrasi produk baru secara selektif dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap potensi pasar di negara tujuan ekspor.

Strategi pemasaran yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penetrasi pasar (*Market Penetration*) untuk produk vaksin dewasa seperti vaksin Influenza, Hepatitis B dan yang lainnya). Di pasar domestik sektor swasta, Direktorat Pemasaran melakukan penetrasi pasar melalui aktivitas *Geographical Marketing* dan menawarkan program vaksinasi di berbagai instansi pemerintah/ swasta dalam negeri.
2. Pengembangan pasar (*Market Development*) di pasar Internasional dengan pengembangan pasar ke negara-negara anggota OIC (*Organization of Islamic Conference*) dan Amerika Latin melalui Pan American Health Organization (PAHO).
3. Pengembangan produk (*Product Development*) dengan mengembangkan produk *branded* seperti BIO Td, BIOSAT, BIOADS, BIOSAVE untuk masuk ke pasar sektor swasta dalam negeri.
4. Strategi media (*Media Strategy*) yang terpadu untuk meningkatkan *awareness* pelanggan terhadap perusahaan dan produk-produk yang ditawarkannya melalui berbagai media *above the line*, *below the line* dan *through the line*.

Menghadapi permintaan di sektor/Internasional yang lebih tinggi daripada produk yang tersedia, Bio Farma melakukan langkah-langkah strategis yaitu:

1. Merencanakan pembangunan fasilitas baru untuk menambah kapasitas produksi sekaligus proses pengemasannya.
2. Upaya lain yang dilakukan Bio Farma untuk mengakomodir kebutuhan customer adalah perpanjangan masa kadaluarsa (ED) untuk Vaksin Campak 10 ds dari semula 2 tahun menjadi 3 tahun, sehingga apabila ada penundaan campaign imunisasi di suatu negara, sisa umur vaksin (*Residual Shelf Life*) masih dapat diterima oleh negara tujuan ekspor serta meningkatkan batch size produksi vaksin polio.

Untuk meningkatkan kinerja di sektor penjualan dalam negeri/domestik, dibutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian *business process* yang memerlukan dukungan fasilitas dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Perusahaan telah mengambil langkah strategis untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan investasi pembuatan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) sebagai bagian dari IT Masterplan serta membangun aplikasi *integrated inventory stock* dengan pihak distributor dalam negeri.

Untuk meningkatkan kinerja di sektor penjualan dalam negeri/domestik, Perusahaan mengambil langkah strategis melakukan investasi pembuatan aplikasi CRM (*Customer Relationship Management*) sebagai bagian dari IT Masterplan.

Penjualan Produk Bersih Per Segmen/Sektor Usaha

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2012	2013	2014	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan/ Penurunan (%)		Selisih 2015/2016	Selisih 2016/ RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	6-4	6-5	
Sektor Pemerintah	515.254	548.724	547.728	570.619	751.949	681.376	19,41	(9,39)	110.757	(70.574)	795.573
Sektor Swasta	72.473	82.106	130.120	139.485	372.899	386.015	176,74	3,52	246.530	13.117	395.148
Sektor Ekspor	849.914	1.222.852	1.366.232	1.635.814	1.790.473	1.248.368	(23,69)	(30,28)	(387.446)	(542.105)	1.749.494
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	-	-	-	3.635	-	-	-	-	(3.635)	-
Total Penjualan Bersih	1.437.641	1.853.682	2.044.080	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(599.562)	2.940.215

Realisasi Penjualan Sektor Pemerintah Tahun 2016

1. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 mencapai 9,39% atau lebih rendah dari anggarannya senilai Rp70,57 miliar terutama karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya menjadi 76,32% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp57,48 miliar meskipun terdapat penjualan vaksin Td 10 ds dan vaksin campak 10 ds masing-masing mencapai 220,88% dan 131,34% atau diatas anggaran meningkat senilai Rp27,20 miliar dan Rp20,09 miliar.
2. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terdapat kenaikan sebesar 19,41% atau senilai Rp110,76 miliar, karena adanya penjualan vaksin bOPV 10 ds senilai Rp53,47 miliar yang merupakan realisasi atas eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 dan karena adanya penjualan vaksin IPV senilai Rp64,37 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin tersebut, meskipun terdapat penurunan penjualan vaksin Pentabio 5 ds sebesar 23,53% atau turun senilai Rp56,99 miliar sebagai akibat dari stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya.

Realisasi Penjualan Sektor Swasta Tahun 2016

3. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 mencapai 103,52% atau melampaui anggaran senilai Rp13,12 miliar terutama karena penjualan vaksin Meningitis mencapai 218,23% atau melampaui anggaran senilai Rp118,23 miliar meskipun terdapat penjualan beberapa produk dibawah anggaran, yaitu BIOSAT-1.5 dan PPD 2 TU masing-masing hanya mencapai 75,69% dan 19,00% atau dibawah anggaran senilai Rp13,83 miliar dan Rp46,54 miliar.
4. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 naik sebesar 176,74% atau senilai Rp246,53 miliar, terutama karena adanya penjualan vaksin Meningitis dan HPV masing-masing senilai Rp218,23 miliar dan Rp22,80 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan vaksin tersebut.

Realisasi Penjualan Ekspor Tahun 2016

1. Dibandingkan dengan RKAP tahun 2016, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah mencapai 30,28% atau bila dalam mata uang valas USD mencapai 73,90%, bila dalam nominal dibawah anggaran senilai Rp542,10 miliar atau USD 33,62 juta. Pencapaian penjualan ekspor dibawah anggaran terutama karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1

Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 73,22% atau dibawah anggaran senilai Rp430,60 miliar dan Rp28,12 miliar dan pencapaian penjualan ekspor vaksin campak 10 ds hanya mencapai 55,65% atau dibawah anggaran senilai Rp31,53 miliar serta tidak terealisasinya rencana penjualan vaksin Pentabio 10 ds senilai Rp15,64 miliar dan Rp33,36 miliar karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari Unicef.

- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, penjualan ekspor dalam mata uang rupiah turun sebesar 23,69% dan bila dalam mata uang valas USD turun sebesar 21,70%, bila dalam nominal turun senilai Rp387,45 miliar atau USD 26,38 juta; Penurunan penjualan ekspor tersebut terutama karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio, vaksin tOPV 10 ds dan tOPV 20 ds masing-masing turun 31,99%, 99,64% dan 38,63% atau senilai Rp349,39 miliar, Rp37,21 miliar dan Rp48,40 miliar meskipun terdapat peningkatan penjualan vaksin bOPV 20 ds sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar.

Rekapitulasi Penjualan Produk Perusahaan Tahun 2016

Pencapaian penjualan bersih perusahaan tahun 2016 mencapai 79,34% dari RKAP tahun 2016 dan hampir sama dengan realisasi tahun 2015.

(Dalam Juta Rupiah)

Kelompok	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2	
Vaksin Bakteri	305.289	435.456	532.865	74,54	22,37	227.576	97.409	269.303
Vaksin Virus	1.705.304	1.862.967	1.436.397	(15,77)	(22,9)	(268.907)	(426.569)	1.798.624
Vaksin Kombinasi	253.405	296.100	200.695	(20,8)	(32,22)	(52.710)	(95.405)	298.351
Sera & Diagnostika	80.689	135.293	74.696	(7,43)	(44,79)	(5.993)	(60.597)	86.450
Bio Farma Klinik & Imunisasi	-	3.635	-	-	(100,00)	-	(3.635)	-
Produk Partnership	-	-	-	-	-	-	-	210.789
Trading Partnership	-	-	-	-	-	-	-	268.099
Jumlah	2.344.687	2.733.452	2.244.654	(4,27)	(17,88)	(100.033)	(488.798)	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(15.063)	-	(22.339)	48,3	-	(7.276)	(22.339)	-
Jumlah Penjualan Produk Bersih	2.329.624	2.733.452	2.222.315	(4,61)	(18,7)	(107.309)	(511.137)	-
Penjualan Barang Dagang	11.922	-	88.294	640,57	-	76.372	88.294	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	(486)	-	(165)	(65,99)	-	321	-	-

ASPEK PEMASARAN

Kelompok	2015	RKAP 2016	2016	Kenaikan / Penurunan (%)	Kenaikan / Penurunan (%)	Selisih 2015/2016	Selisih 2016/RKAP	RKAP 2017
	1	2	3	3/1	3/2	3-1	3-2	
Jumlah Penjualan Bersih Barang Dagangan	11.436	181.404	88.129	670,60	(51,42)	76.693	(93.275)	-
Penjualan Jasa	4.858	4.100	5.635	15,98	37,44	777	1.535	-
Dikurangi: Potongan Penjualan	-	-	(320)	160.033,57	-	(320)	(320)	-
Jumlah Penjualan Jasa Bersih	4.858	4.100	5.315	9,41	29,64	457	1.215	8599,308
Anak Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penjualan Produk, Barang Dagangan dan Jasa	2.345.918	2.918.956	2.315.759	(1,29)	(20,66)	(30.159)	(603.197)	2.940.215

Realisasi penjualan bersih dibandingkan dengan RKAP tahun 2016 hanya mencapai 79,34%, terutama karena

1. Vaksin Virus realisasi penjualannya mencapai 77,10% atau dibawah anggaran senilai Rp426,57 miliar, hal tersebut karena adanya program switching tOPV ke bOPV atau eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 20 ds masing-masing hanya mencapai 63,31% dan 88,89% atau masing-masing dibawah anggaran senilai Rp430,59 miliar dan Rp16,16 miliar.
2. Vaksin Kombinasi realisasi penjualannya mencapai 67,78% atau dibawah anggaran senilai Rp95,41 miliar, hal tersebut karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya menjadi 72,63% dari yang dianggarkan atau turun senilai Rp70,74 miliar serta tidak terealisasinya penjualan vaksin Pentabio 10 ds ke Unicef karena tidak berhasil mendapatkan kontrak dari yang dianggarkan senilai Rp33,36 miliar.
3. Serum dan Diagnostika realisasi penjualannya mencapai 55,21% atau dibawah anggaran senilai Rp60,59 miliar terutama karena rendahnya penjualan PPD 2 TU dan BIOSAT1.5 masing masing mencapai 19,00% dan 75,69% atau dibawah anggaran senilai Rp46,54 miliar dan Rp13,83 miliar karena stok produk PPD 2 TU dunia sangat terbatas serta kapasitas produksi serum untuk BIOSAT-1.5 masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan pasar.
4. Barang dagangan dan jasa realisasi penjualannya mencapai 50,37% atau dibawah anggaran senilai Rp92,06 miliar hal tersebut terutama karena pencapaian penjualan produk barang dagangan IPV hanya sebesar 18,75% atau dibawah anggaran senilai Rp18,38 miliar dan terdapat vaksin Varicella yang tidak terealisasi penjualannya dari yang dianggarkan sebesar Rp70,00 miliar.
5. Vaksin Bakteri realisasi penjualannya mencapai 122,37% atau bila dalam nominal diatas anggaran senilai Rp97,41 miliar hal tersebut terutama karena penjualan produk vaksin Meningitis yang mencapai 218,23% dari anggarannya atau bila dalam nominal lebih tinggi senilai Rp118,23 miliar dari anggarannya.

Realisasi penjualan bersih tahun 2016 hampir sama dengan realisasi tahun 2015 dengan komposisi penjualan per kelompok.

1. Vaksin Bakteri realisasi penjualannya naik 74,54% atau senilai Rp227,58 miliar terutama karena adanya penjualan produk vaksin Meningitis senilai Rp218,23 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.
2. Produk barang dagangan dan jasa realisasi penjualannya naik 473,48% atau senilai Rp77,15 miliar terutama karena adanya penjualan vaksin IPV dan HPV masing-masing senilai Rp18,38 miliar dan Rp22,80 miliar yang mana pada tahun 2015 tidak terdapat penjualan produk tersebut.
3. Vaksin Virus realisasi penjualannya turun 15,77% atau senilai Rp268,91 miliar karena adanya eradikasi polio tipe 2 dari WHO mulai tanggal 1 Mei 2016 sehingga penjualan *bulk* polio dan vaksin tOPV 10 ds masing-masing turun 31,99% dan 99,07% atau senilai Rp349,39 miliar dan Rp87,79 miliar, meskipun untuk vaksin tOPV tersebut terdapat *switching* ke produk bOPV 10 ds senilai Rp59,93 miliar dan bOPV 20 ds meningkat sebesar 50,41% atau senilai Rp76,56 miliar; disamping itu terdapat peningkatan penjualan vaksin Hepatitis B Bayi sebesar 52,98% atau senilai Rp33,35 miliar.
4. Vaksin Kombinasi realisasi penjualannya turun 20,80% atau senilai Rp52,71 miliar terutama karena stok vaksin Pentabio 5 ds di daerah masih banyak dari pembelian pemerintah tahun 2015 sehingga untuk tahun 2016 pemerintah menurunkan pembeliannya sebesar 24,96% atau turun senilai Rp62,44 miliar.
5. Serum dan Diagnostika realisasi penjualannya turun 7,43% atau senilai Rp5,99 miliar terutama karena penurunan penjualan Serum ABU dan PPD 2 TU masing-masing sebesar 21,53% dan 13,03% atau senilai Rp4,97 miliar dan Rp1,64 miliar.

PANGSA PASAR

BIO FARMA MELAYANI KEBUTUHAN PASAR SEKTOR DOMESTIK DAN GLOBAL

Pasar Dalam Negeri

1. Sektor Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler di Indonesia yaitu vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan DTP-HB-Hib (pentaBio);
2. Pasar swasta nasional, yaitu melayani distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia)) dan PPD 2 TU;

Pasar Luar Negeri/Internasional

Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan negara lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk

Pasar Luar Negeri Terdiri Dari 2 Sektor

1. Sektor Ekspor Institusi: Suplai vaksin melalui institusi seperti Badan Kesehatan Dunia - World Health Organization (WHO), UNICEF, PAHO untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi negara-negara berkembang untuk program imunisasi.
2. Sektor Ekspor Umum: Suplai vaksin secara bilateral ke negara-negara tujuan ekspor secara, *business to business*, *business to government* atau kerjasama dengan International atau local partner yang telah ditunjuk. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk.

ASPEK PEMASARAN

Vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu

Vaksin tOPV (vial 20 dosis), Vaksin tOPV (vial 10 dosis), Vaksin Campak (vial 10 dosis), Vaksin TT (Vial 10 dosis), Vaksin TT (Vial 20 dosis), Vaksin DT (Vial 10 dosis), Vaksin DTP (*whole cell*) (vial 10 dosis), Vaksin TT (Uniject 1 Dosis), Vaksin Hepatitis B (Uniject 1 dosis), Vaksin DTP (*whole cell*) – Hep B (5µg) (vial 5 dosis), Vaksin DTP (*whole cell*) – HepB (10µg) (vial 10 dosis), Vaksin Campak (vial 20 dosis), Vaksin mOPV tipe 1 (vial 20 dosis), Vaksin bOPV tipe 1 & 3 (vial 20 dosis), Vaksin Td (untuk dewasa) (vial 10 dosis), Vaksin DTP (*whole cell*)-HepB-Hib (vial 5 dosis), Vaksin DTP (*whole cell*)-HepB-Hib (vial 10 dosis).

Realisasi Program Kerja Bidang Pemasaran**Program Kerja Bidang Pemasaran yang sudah Dilaksanakan Tahun 2016****Pemasaran Dalam Negeri**

1. Menerbitkan penetapan harga Harga Jual Produk (HJP) untuk Distributor tahun 2016, Harga Netto Apotik (HNA) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Realisasi Kontrak Distributorship tahun 2016
3. Menerbitkan surat ke Distributor perihal info penggantian dan penarikan vaksin TOPV ke BOPV serta mekanisme penarikannya pada tanggal 23 Maret 2016.
4. Melakukan penandatanganan kontrak perjanjian jual beli vaksin tahun 2016 antara PT Bio Farma (Persero) dengan Pemerintah, tanggal 10 Februari 2016.
5. Melakukan penagihan tahap I, II, III vaksin reguler tahun 2016, penagihan pengadaan vaksin DPT-HB-Hib, vaksin IPV serta vaksin IPV.
6. Melaksanakan penandatanganan kontrak pengadaan vaksin Reguler untuk vaksin Hepatitis B, vaksin BCG 20 ds, vaksin tOPV 20 ds, vaksin DT 10 ds, vaksin Campak 10 ds, vaksin bOPV 10 ds, vaksin DPT-HB-Hib 5 ds, vaksin Td 10 ds, vaksin IPV 5 ds dan 10 ds.

7. Melakukan pengiriman produk vaksin dan *bulk* untuk sektor pemerintah, swasta dan ekspor sebanyak 1.522 kali pengiriman, termasuk pengiriman sample ke beberapa negara.
8. Mengadakan kontrak kerjasama dengan Rumah Sakit dalam rangka memasukkan produk Bio Farma ke dalam formulariumnya.
9. Mengikuti Pengadaan DOT periode tahun 2017 – 2018.
10. Mengajukan permohonan ke pihak BPJS kesehatan untuk masuknya Vaksin Hepatitis B dewasa kedalam sistem e-katalog.
11. Melakukan sosialisasi vaksin palsu pada seluruh distributor dan seluruh penyelenggara fasilitas kesehatan (dokter, rumah sakit dan klinik).
12. Melakukan proses kontrak kerjasama dengan beberapa instansi lainnya.

Pemasaran Luar Negeri dan Pengembangan Bisnis

1. Melakukan registrasi produk tahap awal dan registrasi variasi.
2. Melakukan perpanjangan registrasi
3. Mengikuti tender di luar negeri
4. Menerima kunjungan *Customer*/Agen penjualan ekspor,
5. Melakukan penyusunan dan koordinasi *agreement*,
6. Melakukan pengiriman vaksin ke negara tujuan ekspor.

Regulatory Affair dan Pemasaran

1. Membuat Desain materi iklan corporate dan produk pada 12 media massa.
2. Pemasangan logo (brand) Bio Farma pada 115 media/kegiatan.
3. Mendistribusikan *promotion kit* ke berbagai perusahaan, Dinas/instansi /lembaga pemerintahan, perguruan tinggi dan berbagai organisasi baik intern maupun ekstern serta pada berbagai pameran, sebanyak + 749 tempat/ kegiatan.
4. Mengikuti berbagai pameran/symposium/open table sebanyak 37 kali.

5. Melakukan registrasi ekspor yang terdiri dari registrasi baru, registrasi ulang dan registrasi variasi sebanyak 30 kali.
6. Melakukan registrasi ke BPOM untuk produk impor sebanyak 61 kali dan untuk produk lokal sebanyak 55 kali.
7. Melakukan analisa potensi dan peluang pasar untuk produk Ranibizumab, Flubio Anak, Flubio Quadrivalent, Trastuzumab, Blood Product dan vaksin EV71.
8. Melakukan analisa pengadaan vaksin Meningitis conjugate & MR, vaksin Meningitis polisakarida dan TB-PPD.
9. Membuat desain kemasan vaksin Hepatitis B 5 ml, vaksin bOPV 10 dan 20 ds, Vaksin campak 10 dan 20 ds, vaksin Meningokokus Menivax ACYW, vaksin Flubio, Label Uji Klinis ViDT Typhoid Conjugate Vaccine, Leaflet Td 10 dosis, Bio PPD 1 ml, vaksin TT uniject, Ulinastatin (BIOSTATIN) dan BIOADS 5000UI.

Klinik dan imunisasi

Kegiatan Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi yang dilakukan pada tahun 2016

1. Melakukan pelayanan jasa klinik kesehatan, vaksinasi, pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan mikrobiologi industri, penunjang medis non lab dan pelayanan apotik dengan memperhatikan aspek mutu, lingkungan dan K3.
2. Dalam rangka spin off Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi menjadi Anak Perusahaan sudah dibuat kajian komprehensif yang didalamnya termasuk aspek operasional, finansial dan legal yang sudah dibahas dengan Komite Audit, Komite RPG, Dewan Komisaris dan Kementerian BUMN tetapi sampai dengan akhir tahun 2016 belum ada keputusan dari Pemegang Saham.



KEBIJAKAN DIVIDEN & JUMLAH DIVIDEN

KEWAJIBAN DIVIDEN DARI LABA BERSIH TAHUN BUKU 2015 YANG DITETAPKAN PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

KEBIJAKAN DIVIDEN, JUMLAH DIVIDEN KAS PER SAHAM DAN JUMLAH DIVIDEN PER TAHUN YANG DIUMUMKAN ATAU DIBAYAR SELAMA 5 TAHUN BUKU TERAKHIR

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Bio Farma memiliki kebijakan untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham setidaknya satu kali setahun. Berdasarkan hasil perolehan laba bersih tahun 2016 yaitu sebesar Rp501,04 miliar manajemen mengusulkan pembagian laba Sebagai berikut:

- Dividen sebesar 20% = Rp100,21 miliar
- Cadangan sebesar 80% = Rp400,83 miliar

Cadangan diusulkan sebesar Rp400,83 miliar atau 80% dari laba bersih untuk mendanai rencana investasi tahun 2017 yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1,46 triliun, dan memperkuat modal kerja sehubungan dengan peningkatan beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans untuk menghasilkan produk baru dan sustainable growth.

TOTAL DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DAN TANGGAL PENGUMUMAN, PEMBAYARAN DIVIDEN KAS UNTUK MASING-MASING TAHUN

Kewajiban dividen dari laba bersih tahun buku 2015 yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan tahun buku 2015 pada tanggal 21 Maret 2016 adalah sebesar Rp234,71 miliar. Untuk kewajiban dividen atas laba bersih tahun buku 2016 akan ditetapkan pada RUPS tentang Laporan Tahunan tahun buku 2016.

Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(Dalam Juta Rupiah)

Keterangan	Saldo Laba (Rugi)				Jumlah Ekuitas
	Modal Ditempatkan	Komponen Ekuitas Lainnya	Dicadangkan	Belum Dicadangkan	
Saldo per 1 Januari 2015	1.250.000	(69.976)	786.075	577.590	2.543.689
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	670.593	670.593
Pembagian laba tahun 2014:	-	(377)	-	-	(377)
Dividen	-	-	-	(145.015)	(145.015)
Cadangan	-	-	435.059	(435.059)	-
Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	1.980.782	-	-	1.980.782



Saldo Laba (Rugi)					
Keterangan	Modal Ditempatkan	Komponen Ekuitas Lainnya	Dicadangkan	Belum Dicadangkan	Jumlah Ekuitas
Pengukuran kembali Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Pasca kerja	-	(828)	-	-	(828)
Konversi cadangan ke Bina Lingkungan	-	-	(4.712)	-	(4.712)
Konversi Cadangan ke Setoran Modal	400.000	-	(400.000)	-	-
Saldo 31 Desember 2015	1.650.000	1.909.600	816.422	668.109	5.044.132
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	-	501.041	501.041
Penghasilan Komprehensif Lainnya	-	(8.313)	-	-	(8.313)
Pembagian Laba tahun 2015:	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	(234.707)	(234.707)
Cadangan	-	-	435.886	(435.886)	-
Konversi Cadangan Akibat Penerapan PSAK 24 Tahun 2015	-	-	(2.484)	2.484	-
Konversi Cadangan ke Setoran Modal	350.000	-	(350.000)	-	-
Saldo per 31 Desember 2016	2.000.000	1.901.287	899.824	501.041	5.302.152

JUMLAH DIVIDEN KAS PER SAHAM

Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan salah satu BUMN non listed yang komposisi kepemilikan saham: 100% Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai jumlah Dividen Kas Per Saham.

Dividen Payout Ratio (Dpr)

(Dalam Juta Rupiah)

KELOMPOK	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan [%]
	1	2	3	4	5	5/4
Laba Bersih Setelah Pajak	302.418,86	385.891,88	572.467,62	582.193,11	670.592,89	115,18
Dividen	45.362,83	77.178,38	228.987,29	145.015,00	234.707,00	161,85
DPR	15,00%	20,00%	40,00%	24,91%	35,00%	140,51

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERUSAHAAN (ESOP/MSOP)

Per 31 Desember 2016, Sesuai dengan karakteristik Bio Farma yang 100% dimiliki oleh Pemerintah, maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) di Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi dengan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) seperti jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM (DALAM HAL PERUSAHAAN MASIH DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA)

Sampai 31 Desember 2016, Bio Farma adalah perusahaan negara yang tidak melakukan penawaran saham dan obligasi di bursa, sehingga tidak adanya realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum di dalam Ekuitas. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum seperti total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi transaksi material tersebut seperti nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi, kewajaran transaksi, alasan dilakukannya transaksi, realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir, kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi dan pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Selama tahun 2016, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya (kualitatif dan/atau kuantitatif) terhadap perusahaan.



Oktober 2013 : Bio Farma turut serta dalam Konferensi Menteri Kesehatan Negara OKI, di Jakarta pada tanggal 22 – 24 Oktober 2013. Bio Farma berbicara sebagai industri vaksin dari negara OKI yang sudah mendapatkan PQ WHO, mengajak anggota OKI untuk bekerjasama membuat vaksin yang berkualitas dan terjangkau.

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (historical cost method), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI & DAMPAKNYA SECARA KUANTITATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BIO FARMA

PERUBAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRESTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Pada tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta mengesahkan Standar dan Interpretasi

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 4 “Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas Dalam Laporan Keuangan Tersendiri”.
2. Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima Untuk Penyusutan dan Amortisasi”.
3. Amandemen PSAK 19 “Aset Tak Berwujud tentang Metode yang Diterima Untuk Penyusutan dan Amortisasi”.
4. Amandemen PSAK 24 “Imbalan Kerja tentang Program Iuran Pasti: Iuran Pekerja”.
5. PSAK 5 (Penyesuaian 2015) “Segmen Operasi”.
6. PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”.
7. PSAK 13 (Penyesuaian 2015) “Properti Investasi”.
8. PSAK 16 (Penyesuaian 2015) “Aset Tetap”.
9. PSAK 19 (Penyesuaian 2015) “Aset Takberwujud”.
10. PSAK 13 (Penyesuaian 2015) “Properti Investasi”.
11. PSAK 25 (Penyesuaian 2015) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
12. PSAK 68 (Penyesuaian 2015) “Pengukuran Nilai Wajar”.

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen dan penyesuaian standar dan interpretasi baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017

1. Amandemen PSAK 1 “Pernyataan Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan”.
2. ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 “Properti Investasi”

3. Amandemen PSAK 65 “Laporan Keuangan Konsolidasi Tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”
4. PSAK 69 “Agrikultur” (berlaku efektif 1 Januari 2018).

Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

PENENTUAN TINGKAT MATERIALITAS SUATU POS

Berdasarkan SM-S15 Pedoman Akuntansi Keuangan sebagai ukuran objektif, suatu akun dinyatakan material dan karenanya harus disajikan tersendiri di dalam laporan keuangan jika:

1. 5% dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset
2. 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban
3. 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas;
4. 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi; dan
5. 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

TRANSAKSI DAN SALDO DALAM MATA UANG ASING

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2016
Dollar Amerika Serikat (USD)	13.795	13.436,00
EURO (EUR)	15.069,67	14.161,55
Dollar Singapore (SGD)	9.751,19	9.298,92
Dollar Australia (AUD)	10.064,16	9.724,31
Yen Jepang (JPY)	114,52	115,40
Poundsterling Inggris (GBP)	20.451,11	16.507,51
Danish Krone Denmark (DKK)	2.019,32	1.905,09
Frank Swiss (CHF)	13.951,29	13.177,76

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Aset Keuangan

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
 - (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang
 - (iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
 - (iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual.
- Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i). Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Keuntungan/kerugian yang timbul dari

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Pencatatan atas penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan pada setiap triwulan. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain.

(iii) Investasi yang Dimiliki hingga Jatuh Tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- a. Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

- b. Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan
- c. Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode yang tidak ditentukan, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas, atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan (beban) komprehensif lain dan disajikan tersendiri pada bagian ekuitas hingga terealisasi, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dibawah nilai perolehan yang bersifat nontemporer dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.



LIABILITAS KEUANGAN

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori:

(i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tahun 2016 dan 2015 Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan mempunyai utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

ESTIMASI NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian (quoted price) pada tanggal pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu yang meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi nilai wajar instrumen keuangan lainnya yang serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

PENGHENTIAN PENGAKUAN

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut. Peristiwa yang merugikan tersebut dapat diestimasi secara handal dan berdampak negatif pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang bersangkutan.

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi penurunan nilainya diukur dari selisih antara nilai tercatat dan nilai kini estimasi arus kas di masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERKAHIR

1. Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Perusahaan, dan BUMN lain yang memiliki hubungan afiliasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah.
2. Perusahaan menempatkan dana atau memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN/D dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
3. Mempunyai anggota pengurus (komisaris dan direksi) yang sama dengan Entitas Anak.
4. Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain maupun Entitas Anak BUMN serta badan/lembaga-lembaga Pemerintah.

PERSEDIAAN

1. Penilaian Persediaan
Nilai persediaan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau rata-rata sederhana bergantung pada jenis persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.
2. Biaya Perolehan Persediaan
Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*), kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu:
 - Produk dalam proses untuk barang curah (*bulk*) penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
 - Produk dalam proses untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase

produk reject saat dikemas, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direksi No.07841/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Persediaan Bahan Baku, Penolong dan Perlengkapan
Persediaan bahan baku, penolong dan perlengkapan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).
4. Persediaan Produk Dalam Proses
Biaya persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.

Persediaan produk dalam proses terdiri dari:

- a. *Bulk* hasil produksi yang telah lulus uji (*quality control*) dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan siap untuk dijual sebelum dilakukan pengemasan.
- b. Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah (botol/ampul/vial/ uniject blank) dan telah lulus uji (*quality control*) sebelum diberi etiket, leaflet dan dimasukkan ke dalam dus.

5. Persediaan Produk Jadi
Persediaan produk jadi terdiri dari persediaan produk perusahaan dan persediaan barang dagangan. Biaya persediaan produk Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, sedangkan biaya persediaan barang dagangan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.
6. Persediaan Dalam Perjalanan
Persediaan dalam perjalanan adalah persediaan bahan baku/bahan penolong/perlengkapan/barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Perusahaan. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".

7. Persediaan dalam Karantina

Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku, bahan penolong, perlengkapan maupun barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima atau tiba di Perusahaan, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus uji. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke kelompok Aset Lancar Lainnya.

8. Penurunan Nilai Persediaan

Penurunan nilai persediaan menjadi sebesar nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban dalam periode terjadinya pemulihan.

Provisi untuk penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Provisi ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

ASET TETAP

1. Pengukuran Aset Tetap Selain Tanah

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap, kecuali Tanah, disusutkan sesuai tabel berikut:

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan	Manfaat Keekonomian	Tarif Penyusutan
Bangunan	Garis Lurus	10-20 tahun	5%-10%
Investasi Pabrik	Saldo Menurun	8-16 tahun	12,5%-25%
Investasi Kantor	Saldo Menurun	4-8 tahun	25%-50%
Investasi Lainnya	Saldo Menurun	8-16 tahun	12,5%-25%
Kendaraan Bermotor	Saldo Menurun	4-5 tahun	25%-50%

Pengeluaran setelah perolehan untuk menjaga manfaat keekonomian aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang dapat meningkatkan manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dan bernilai material dikapitalisasi.

2. Perubahan Model Pengukuran Aset Tetap Tanah Kebijakan akuntansi untuk aset tetap kelompok Tanah didasarkan model revaluasi secara prospektif. Nilai Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar jumlah revaluasi yang dilakukan pada 31 Desember 2015. Selisih yang timbul akibat revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi akan dialihkan ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya

3. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan disajikan tersendiri dalam kelompok aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

4. Aset Tetap Tidak Produktif

Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau usang dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan disajikan pada pos aset tetap tidak produktif dalam kelompok aset tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Jika akan dijual dalam periode pendek maka aset tersebut disajikan dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau Dewan Komisaris.

URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERKAHIR

ASET TAKBERWUJUD

1. Biaya yang berhubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur yang dapat diidentifikasi, dikendalikan serta memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 4 (empat) tahun.
2. Biaya pengembangan upstream vaksin flu meliputi biayabiaya yang terkait dengan penemuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan bulk, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut yang dilakukan oleh pihak eksternal. Biaya pengembangan upstream vaksin flu diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun.

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN SURVEILANS

Biaya - biaya yang dikeluarkan dari tahapan penelitian (atau tahapan penelitian pada proyek internal) uji klinis, surveilans produk dan lingkungan serta pemantauan produk yang sudah dijual di pasar.

PAJAK PENGHASILAN

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Pajak kini diakui berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

IMBALAN KERJA

Perusahaan melaksanakan imbalan manfaat karyawan dan menyelenggarakan program pensiun/imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program pensiun karyawan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan membukukan imbalan manfaat karyawan lainnya untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Perusahaan mengakui beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Perhitungan beban jasa kini, jasa lalu dan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Perusahaan mengakui komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut:

1. Biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti dalam laba rugi; dan
2. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan imbal hasil atas aset program dalam penghasilan komprehensif lain.

Selain imbalan manfaat karyawan, Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dan karyawan kontrak. Program ini memberikan imbalan manfaat karyawan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Pendanaan dana pensiun berdasarkan ketentuan terakhir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Himpunan Karyawan (HIKA) periode 2015-2017 pasal 66, yaitu 15% dari gaji dasar dengan komposisi 60% ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 40% ditanggung oleh karyawan masing-masing.

PENDAPATAN HIBAH

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan melakukan penerapan lebih awal terhadap PSAK 61 “Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah” sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 6 “Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas”, ISAK 1 “Penentuan Harga Pasar Dividen; ISAK 2 “Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemegang Saham” dan ISAK 3 “Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan”. Penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif.

Hibah terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat aset. Hibah terkait dengan penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam pos umum seperti “penghasilan lain-lain” atau alternatif pengurang dalam beban terkait.

Hibah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah

PENGUNAAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mensyaratkan Perusahaan untuk memakai estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan dalam periode mendatang mungkin didasarkan atas jumlah-jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 57 (Revisi 2009) “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”, yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap, aset takberwujud dan penyisihan untuk piutang. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

BIO FARMA TELAH MENERAPKAN SISTEM ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) DAN RISK MANAGEMENT SYSTEM YANG BERBASIS IT YANG TERINTEGRASI UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

Perekonomian dunia saat ini sedang dalam kondisi rumit yang dapat mempengaruhi negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi global, salah satunya adalah geopolitik dengan ancaman yang dihadapi semakin kompleks. Faktor yang menjadi perhatian di antaranya perlambatan ekonomi China, fluktuasi harga minyak mentah dunia dan kekhawatiran tentang keamanan geopolitik. Selain itu menjelang negosiasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) alias Brexit ditambah rencana kebijakan proteksionis Presiden AS terpilih Donald Trump *diyakini juga akan berimbas kepada negara emerging markets*.

Semua itu menyebabkan makin meningkatnya ketidakpastian tentang prospek pertumbuhan ekonomi global. Gejala ekonomi dunia ini bukan hal baru. Namun, Indonesia dinilai sudah memiliki mental kuat agar tidak terpengaruh dampak dari kondisi perekonomian global. Lingkungan global, ketidakpastian pembangunan ekonomi, geopolitik global, ini tidak baru. Hidup memang rumit, kita ubah yang rumit, dengan menyiapkan mental dan pengaruh lingkungan ekonomi global ke Indonesia dari sisi ekspor-impor, psikologi, persepsi, risiko.

Risiko gejala perekonomian dunia yang berdampak ke negara berkembang hingga maju bisa dimengerti. Risiko Indonesia dan dunia dengan negara maju dan berkembang ini dapat dipahami dan diterima. Dengan kerumitan ini kita mulai melakukan antisipasi. Indonesia harus tetap fokus agar tidak terseret perlambatan ekonomi dunia. Sebab, banyak hal yang akan mempengaruhi perekonomian negara berkembang. Indonesia harus memahami kerumitan ini, kalau kita menafsirkan banyak hal akan kehilangan fokus. Mulai dari lingkungan global, ekonomi, sosial, politik, dari ekonomi terlihat ekspor-impor, aliran modal serta risiko pengaruh jalan sebagai satu negara dan satu perekonomian.

BIO FARMA

1. Pasar Pemerintah yang selama ini merupakan *captive market* harus tetap dipelihara mengingat masuknya kompetitor lain yang dapat merebut pasar yaitu China dan India untuk produk yang sudah PQ WHO serta berlakunya pasar tunggal ASEAN (*Asean free Trade Area/AFTA*) tahun 2016 dan WTO (*World Trade Organization*) tahun 2020. Demikian pula penambahan kompetitor yang mendapat PQ WHO akan meningkatkan persaingan dan dapat merebut pasar tersebut. Perusahaan harus waspada agar pelanggan terbesar di sektor dalam negeri ini tidak berpaling ke pemasok lain. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan penguatan pasar domestik dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dalam hal ketepatan pengiriman dan kelengkapan/keragaman jenis vaksin yang dibutuhkan. Peluang tersebut harus ditangkap oleh Perusahaan dengan menyediakan produk tersebut sesuai jadwal yang dibutuhkan baik produksi sendiri maupun melalui aliansi dengan pihak lain.
2. Menjelang eradikasi Polio yang diperkirakan tahun 2018, Perusahaan berpotensi kehilangan omzet yang berasal dari penjualan vaksin Polio baik dalam bentuk *bulk* maupun produk. Untuk mengantisipasi hal tersebut pada tahun 2016 Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, menyiapkan infrastruktur untuk produk baru dengan tetap memperhatikan regulasi internasional terkini. Oleh karena itu rencana investasi pada tahun 2016 melonjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rencana investasi tersebut diantaranya untuk pembangunan gedung fasilitas produksi dan pengemasan. Pembangunan fasilitas tersebut dan peralatan di dalamnya direncanakan secara *multi years* sampai dengan tahun 2017. Dengan upaya-upaya tersebut di atas diharapkan potensi kehilangan omzet dari produk vaksin Polio dapat di minimalisasi melalui peningkatan penjualan produk yang ada dan produk baru.

3. Bio Farma telah menerapkan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) dan *Risk Management System* yang berbasis IT yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta dapat mengelola Perusahaan dengan baik dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) termasuk memperkuat *Enterprise Risk Management* (ERM) yang dinyatakan dalam budaya Perusahaan yaitu PITIC (*Professional, Integrity, Teamwork, Inovation Customer Oriented*), dokumen manual mutu, pedoman dan prosedur baku secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2015 sampai sekarang Perusahaan telah mengimplementasikan ERP yang mengintegrasikan hampir seluruh proses bisnis Perusahaan, sesuai dengan *best practice*/standar yang berlaku, sehingga pengendaliannya menjadi lebih baik, akurasi dan integrasi data antar unit kerja lebih baik, serta kecepatan proses bisnis akan meningkat. Peranan sistem informasi yang terintegrasi tersebut akan sangat membantu Perusahaan dalam memperlancar dan efisiensi proses bisnis serta memenuhi persyaratan regulasi, termasuk dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan memiliki *core competences*.
4. Untuk mewujudkan visi Perusahaan, peranan Sumber Daya Manusia sangatlah penting dan harus dikelola dengan baik, untuk itu Perusahaan melakukan pengelolaan SDM dengan paradigma "*Human Capital Management*" yang memandang SDM sebagai aset yang perlu terus ditumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya agar nilainya terus bertambah melalui program pengembangan yang terintegrasi yaitu melalui *performance management system*, *reward management system*, *talent management system* dan *knowledge management system*. Diharapkan dengan memiliki karyawan yang kompeten di bidangnya dapat dilakukan *international placement*. Disisi lain, Perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan selama bekerja dan setelah pensiun sehingga diharapkan disamping mereka kompeten juga memiliki loyalitas dan integritas tinggi terhadap Perusahaan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

Dalam evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi kelangsungan usaha, Bio Farma memiliki Divisi *Compliance & Risk Management*, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan *Quality Assurance* (QA).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

1. Mengkoordinasikan aspek kepatuhan GCG, Regulasi, dengan Risiko aktivitas korporasi.
2. Monitoring aspek GCG, Risiko, dan Regulasi/Hukum.
3. Evaluasi aspek GCG, Risiko, dan Regulasi/Hukum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL (PI)

1. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas terhadap operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya di perusahaan.
3. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

6. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan yang direkomendasikan.
7. Melakukan tugas konsultasi untuk memperbaiki sistem pengendalian intern.
8. Bersama dengan komite audit membahas Laporan hasil audit dan meminta masukkan yang diperlukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI
QUALITY ASSURANCE**

1. Melakukan Audit Sistem Manajemen Mutu.
2. Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Melakukan Audit Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja.
4. Melakukan Audit Praktek Produksi yang Baik (GMP).
5. Melakukan Audit Vendor.
6. Melakukan Audit Pengaduan Pelanggan.

**EVALUASI YANG DILAKUKAN ATAS
EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO**

Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur Key Risk Indicator yaitu:

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang dilangsungkan.
2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatar belakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.

6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/ informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai *roadmap* Manajemen Risiko Bio Farma.

Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 1.120 risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

**RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI
PERUSAHAAN**

Pada tahun 2016, terdapat 6 (enam) risiko korporat, yang terbagi atas 4 (empat) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek. Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi *Compliance and Risk*

Management (CRM) selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma. Adapun rincian risiko korporat tersebut adalah:

No	Jenis Risiko	Risiko yang Dihadapi
1	Risiko Aktivitas Rutin	1. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
		Perusahaan mengeksport produknya ke berbagai negara untuk kebutuhan program imunisasi di negara tersebut, yang antara lain disuplai melalui UNICEF dengan persyaratan produk harus memenuhi prakualifikasi WHO. Oleh karena itu, pengakuan kualitas produk oleh WHO memegang peran penting dalam kelancaran penjualan ekspor. Oleh karena itu Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan internasional, terutama regulasi dari WHO, serta perubahan-perubahan regulasi yang mungkin terjadi di Pemerintah. Risiko ini memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sehingga ketika risiko ini terjadi, perusahaan dapat segera menyesuaikan dengan regulasi/kebijakan yang baru secepatnya dan menyiapkan strategi antisipatif jika regulasi berubah kembali.
		2. Fluktuasi Nilai Kurs Mata Uang Asing
		Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan juga menghadapi risiko keuangan yakni fluktuasi mata uang asing, yang dapat menimbulkan dampak dalam bentuk kerentanan terhadap fluktuasi valuta asing. Fluktuasi mata uang asing, terutama dalam Dollar Amerika, sangat berdampak pada biaya produksi. Untuk memenuhi kewajiban atas transaksi pembelian barang/bahan impornya, perusahaan akan mengoptimalkan untuk selalu tersedianya dana valuta asing yang siap dibayarkan atas transaksi impor tersebut. Risiko yang sangat mungkin terjadi adalah selisih nilai mata uang asing antara nilai pembukaan L/C pada saat barang/bahan dipesan dengan nilai kewajiban yang harus dibayar pada saat barang/bahan tersebut diterima.
		3. Meningkatnya Persaingan Global
		Dalam era pasar terbuka sekarang ini, persaingan dalam sector farmasi dan produk biologi akan semakin ketat dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan internasional. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, seperti kemampuan operasional pesaing internasional yang lebih kuat, produk-produk yang inovatif, perubahan permintaan pasar, maupun daya beli masyarakat yang terbatas. Ancaman atas produk dari kompetitor seperti dari China dan India, untuk produk yang sudah PQ (Prequalification) WHO dan pasar tunggal ASEAN menjadi hal yang serius untuk keberlangsungan perusahaan. Demikian pula penambahan kompetitor global yang mendapat PQ WHO akan meningkatkan persaingan dan dapat merebut pangsa pasar dalam dan luar negeri. Oleh karena itu kesesuaian produk yang dihasilkan dengan trend pasar menjadi faktor yang sangat serius bagi kelangsungan perusahaan, produk yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat disediakan tepat waktu. Adanya keterlambatan dalam penyediaan produk baru yang dibutuhkan akan mengakibatkan hilangnya pasar yang potensial.
		4. Keterlambatan dalam Supply Vaksin
		Perusahaan merupakan satu - satunya produsen vaksin di Indonesia yang memasok seluruh kebutuhan vaksin untuk program imunisasi di dalam negeri. Disamping untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Perusahaan juga mengeksport vaksin ke berbagai institusi maupun negara lainnya. Pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dalam waktu yang sangat ketat mengingat proses produksi & QC yang memerlukan waktu lama serta kapasitas produksi yang sangat terbatas, sehingga dapat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan produk ke konsumen bilateral/institusi negara lain dapat terganggu. Risiko ini muncul dari beberapa risiko terkait seperti adanya perubahan forecast atau permintaan produk yang mendadak yang diikuti perubahan rencana produksi secara mendadak, dan kekurangan pasokan material karena terbatasnya kemampuan pemasok dalam memenuhi spesifikasi barang maupun kuantitas. Selain itu, keterlambatan dalam penandatanganan kontrak juga akan dapat memperpendek waktu penyediaan produk sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pemenuhan produk yang merugikan karena merusak nama baik Perusahaan dan atau harus membayar denda.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

No	Jenis Risiko	Risiko yang Dihadapi
2	Risiko Aktivitas Proyek	5. Realisasi Investasi Tidak Sesuai Jadwal Perusahaan harus dapat menjaga ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik melalui perbaikan sarana dan prasarana produksi maupun melalui riset dan pengembangan produk baru. Diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses produksi yang memenuhi persyaratan atau regulasi yang berlaku serta fasilitas riset & pengembangan yang mumpuni agar riset dan pengembangan produk ini dapat diselesaikan tepat waktu, agar produk dapat masuk ke pasar sesuai dengan kebutuhan. Adanya keterlambatan dalam program investasi baik yang mendukung proses riset maupun produksi akan menyebabkan hilangnya kesempatan meraih pasar, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program investasi harus tepat waktu dan sasaran. 6. Ketidaksiapan Produksi Vaksin Influenza untuk menghadapi pandemik Sebagai langkah antisipasi menghadapi pandemik flu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, membangun fasilitas produksi vaksin flu untuk manusia. Rencananya setelah pembangunan fasilitas selesai dilaksanakan, akan diserahkan ke Perusahaan untuk dioperasikan sebagai antisipasi pandemik flu. Perusahaan telah menguasai teknologi produksi vaksin flu dan sudah mampu memproduksi namun dalam kapasitas terbatas, sementara itu proyek pemerintah sampai saat ini belum ada kepastian kelanjutannya sehingga produksi vaksin dalam skala besar tidak dapat dilakukan apabila sewaktu-waktu pandemik flu benar-benar terjadi.

PENGELOLAAN RISIKO

Bio Farma berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan aktivitasnya dan terus melanjutkan upaya untuk senantiasa melaksanakan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, yang meliputi tindakan:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemerintah dan etika usaha.

Pengelolaan risiko di Bio Farma meliputi kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, mekanisme komunikasi, pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal dan kesamaan bahasa.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN
ASSESSMENT

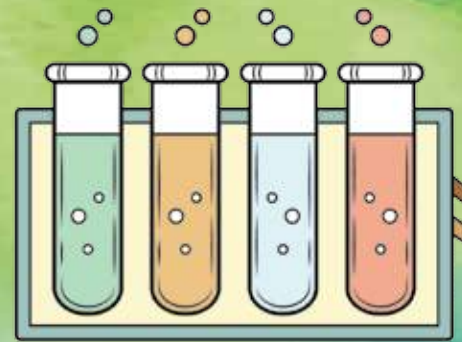
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan
2. Likuiditas
3. Solvabilitas
4. Masalah Internal
5. Tingkat inflasi
6. Nilai tukar
7. Indikator pelaksanaan tata kelola Perusahaan

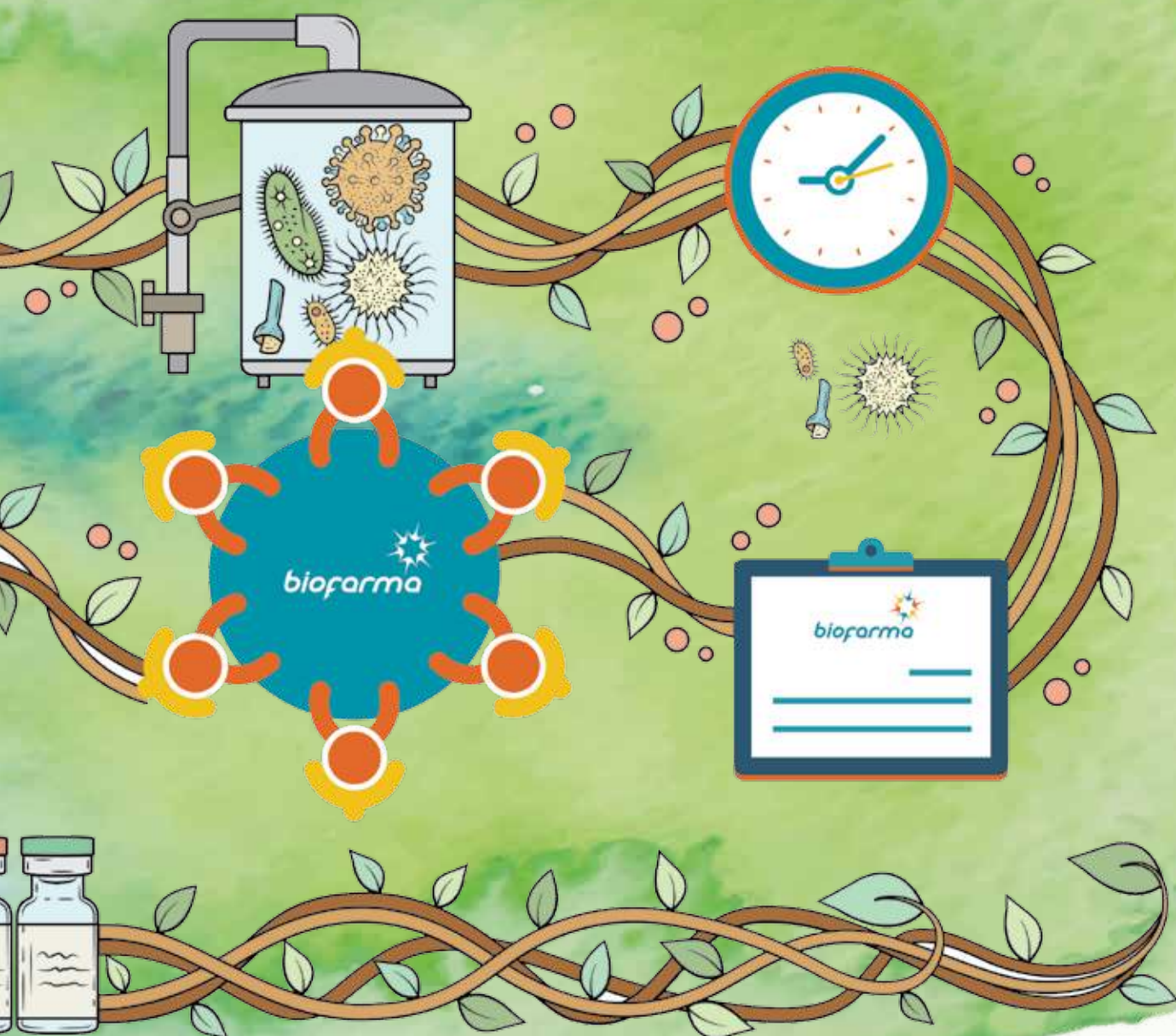


GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara fundamental menjadi landasan yang kuat bagi Bio Farma dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global.



TATA KELOLA PERUSAHAAN





TATA KELOLA PERUSAHAAN

MEMBANGUN GCG MEMERLUKAN KOMITMEN, KONSISTENSI DAN KESUNGGUHAN DARI BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT YAITU MANAJEMEN PERUSAHAAN, KARYAWAN, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, PEMERINTAH SERTA STAKE HOLDER LAINNYA

Kondisi global yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan akan demokratisasi dan desentralisasi yang mengarah pada pentingnya peningkatan kompetensi di berbagai bidang. Peningkatan kompetensi sebagai pendongkrak daya saing diyakini sebagai kunci sukses dalam memenangkan kompetisi di era globalisasi. Faktor utama penentu daya saing adalah efisiensi proses pelayanan serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik dalam sistem tata kelola berbagai sektor. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara fundamental menjadi landasan yang kuat bagi Bio Farma dalam upaya peningkatan daya saing di berbagai aspek baik pada tataran lokal, regional, nasional maupun global.

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh Karyawan Bio Farma atau yang biasa disebut dengan Insan Bio Farma menjunjung tinggi komitmen dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap insan Bio Farma. Melalui GCG Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul dan bermartabat dengan budaya Perusahaan yaitu *Professional, Integrity, Team Work, Innovation, dan Customer Oriented*.

Dengan terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bio Farma mampu mengoptimalkan nilai Perusahaan, meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional, dan meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.

Ini dapat dilihat dari perolehan skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Bio Farma 2016 mencapai 510,25 atau naik 9,26% atau 43,25 *point* dibanding

skor 2015 sebesar 467. Peningkatan skor ini menjadikan Bio Farma berubah klasifikasi kategori menjadi *Good Performance* yang semula *Early Improvement*. Meningkatnya skor hasil evaluasi yang dilakukan oleh Forum Ekselen BUMN (FEB) ini, membuktikan bahwa komitmen penerapan Tata Kelola di Bio Farma semakin baik, efektif sehingga kinerja Perusahaan semakin meningkat.

ARTI PENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI BIO FARMA

1. Untuk menambah dan memaksimalkan nilai Perusahaan guna memenangkan kompetisi Global.
2. Untuk menghindari *fraud* dan KKN.
3. Untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu : *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

**PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG HARUS
DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING
PILAR**

Negara dan perangkatnya, menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

1. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
2. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

**PERNYATAAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN**

Good Corporate Governance (GCG) hadir sebagai sebuah kerangka dan acuan bagi Bio Farma dalam melakukan pengelolaan Perusahaan yang baik dan benar. Penerapan GCG yang efektif dan seimbang membutuhkan peran dan kontribusi positif dari seluruh insan Bio Farma yang melaksanakannya.

Bio Farma memandang bahwa penerapan GCG yang baik merupakan sebuah pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan Perusahaan. Oleh sebab itu, Bio Farma berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh Pemangku Kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG di Bio Farma bertujuan untuk mencapai keberhasilan atas filosofi, visi, misi, dan tujuan Perusahaan, yang berlandaskan atas **5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG** yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* disingkat **TARIF**.

1. Transparency (Transparansi) yaitu

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Pedoman Pelaksanaan:

- a. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
- b. Informasi yang diungkapkan: visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam Perusahaan dan Perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
- c. Keterbukaan informasi Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.



GCG menjadi filosofi dasar yang melekat dalam sikap, perilaku, pola pikir, dan cara kerja setiap insan Bio Farma. Melalui GCG Bio Farma mampu membangun citra dan reputasi sebagai Perusahaan yang unggul.



- d. Kebijakan Perusahaan secara tertulis dan proporsional dikomunikasikan kepada Pemangku Kepentingan.

2. **Accountability (Akuntabilitas)** yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (*corporate values*), dan strategi Perusahaan.
- b. Perusahaan meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma berpegang pada etika bisnis dan pedoman *perilaku* (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. **Responsibility (Pertanggungjawaban)** yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Organ Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan Perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. **Independency (kemandirian)** yaitu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Pedoman Pelaksanaan

- a. Masing-masing organ Perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. **Fairness (Kewajaran)** yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Pedoman Pelaksanaan

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik

TUJUAN PENERAPAN GCG

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Mendorong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan di lingkungan sekitar Perusahaan dan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif di lingkungan sekitar Perusahaan.
Seluruh jajaran Bio Farma meyakini bahwa penerapan GCG dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Perusahaan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.

DASAR-DASAR PENERAPAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Yang Diperbaharui Dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
4. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan *Good Corporate Governance* Yang Diperbaharui Dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012,
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance*, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.



MANFAAT PENERAPAN GCG

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung Pemegang Saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
 2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan Perusahaan yang baik, menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh Perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko Perusahaan.
 3. Meningkatkan citra Perusahaan kepada publik luas dalam jangka panjang.
 4. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pihak yang berkepentingan) dalam lingkungan Perusahaan terhadap keberadaan, strategi dan kebijakan yang ditempuh Perusahaan, karena mendapat jaminan dari segala tindakan dan operasi Perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.
 5. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tentang tata kelola Perusahaan yang baik.
 6. Perusahaan dapat mengoptimalkan perolehan laba dan nilai pertumbuhan yang tinggi.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional (*benchmark /acuan*).
2. **Faktor Internal**, pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG di Bio Farma yang berasal dari dalam Perusahaan antara lain:
 - a. Budaya Perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di Perusahaan.
 - b. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
 - c. Manajemen Pengendalian Risiko Perusahaan berdasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
 - d. Sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam Perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
 - e. Keterbukaan Informasi Publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam Perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika Perusahaan dari waktu ke waktu.

STRUKTUR TATA KELOLA

Struktur tata kelola Bio Farma mengacu pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas memiliki Organ Perseroan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan Perusahaan, dan Direksi sebagai pengelola Perusahaan.

FAKTOR PENERAPAN GCG

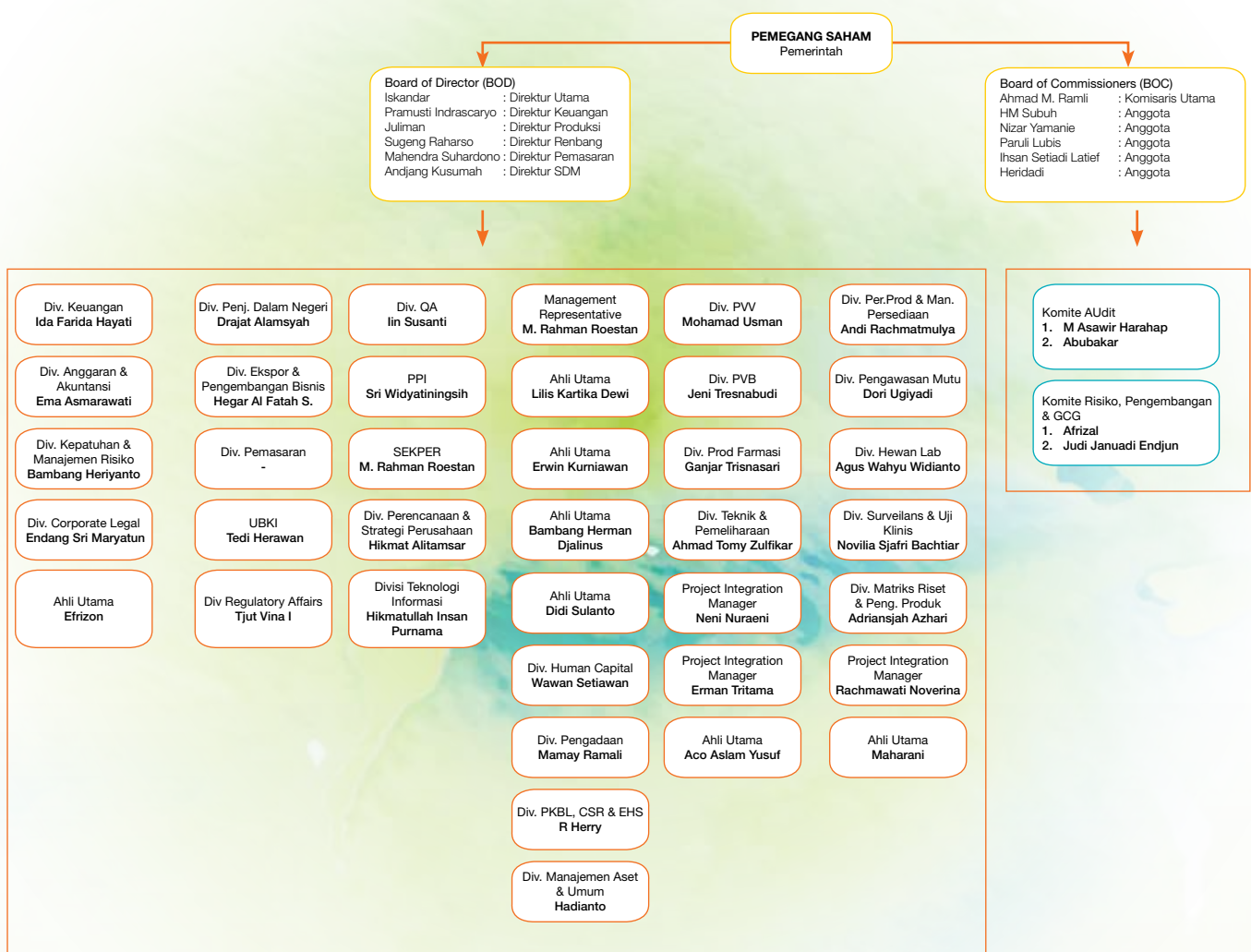
1. **Faktor Eksternal**, berasal dari luar Perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
 - a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
 - b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Berkaitan dengan Organ Perusahaan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan

Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Bio Farma dalam jangka panjang sehingga harus memiliki persamaan persepsi terhadap filosofi, visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA PT BIO FARMA (PERSERO)





STRUKTUR TATA KELOLA BIO FARMA SEBAGAI BERIKUT

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris

Bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Direksi

Bertanggung jawab secara kolektif untuk mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Manajemen memiliki organ-organ pendukung sebagai unit kerja untuk mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG sekaligus sebagai mitra kerja dari komite di bawah Dewan Komisaris.

KERANGKA GCG BIO FARMA

Bio Farma memiliki kerangka GCG yang dibentuk berdasarkan sistem Tata Kelola yang ada di Bio Farma yaitu sebagai berikut:



TATAKELOLA PERUSAHAAN

MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN GCG

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing Perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
4. Kebijakan Perusahaan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar.
5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Kebijakan Penerapan GCG Di Bio Farma

1. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 05345/DIR/VIII/2006, Tanggal 7 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bio Farma (Persero) Yang Telah Diperbaharui Dengan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-04/DK/BF/II/2013, 01023/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di PT Bio Farma (Persero)
2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang memberikan acuan perilaku yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh insan Bio Farma dalam menerapkan nilai-nilai Perusahaan dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pedoman Perilaku merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran/perilaku tidak etis. Pedoman perilaku diatur dalam SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor: 011103/DIR/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor : KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013.
3. *Whistleblowing System* (WBS), yang merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*), korupsi, pencurian, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran terhadap hukum serta kebijakan/prosedur Perusahaan. Kebijakan ini diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 Tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Bio Farma.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN
PENERAPAN GCG DI BIO FARMA

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang baik dan untuk menjamin efektivitas penerapan GCG yang berkelanjutan, Bio Farma telah memiliki pedoman dan kebijakan untuk melaksanakan GCG yang telah diterapkan di lingkungan Perusahaan.

Pedoman Penerapan GCG Di Bio Farma

1. Filosofi, Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan.
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal.
3. Kebijakan Perusahaan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif



4. Pengendalian Gratifikasi, yang merupakan elemen penting dalam menentukan standar guna mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran lainnya. Pengendalian gratifikasi diatur dalam SK Direksi Nomor: 01236/DIR/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
5. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. *Board Manual* ditetapkan berdasarkan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero). *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala ditinjau ulang dan disempurnakan. Selain *Board Manual*, Dewan Komisaris juga telah mempunyai Piagam Dewan Komisaris (*BOC Charter*) yang telah ditetapkan dengan SK Dewan Komisaris Nomor: SK-06/DK/BF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. Sedangkan Direksi telah mempunyai Piagam Direksi (*BOD Charter*) yang ditetapkan dengan SK Direksi Nomor: 07457/DIR/XII/2011 tanggal 23 Desember 2012.
6. SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 07882/DIR/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bio Farma (Persero)

Pedoman dan kebijakan terkait implementasi tata kelola Perusahaan senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini, perubahan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan usaha Bio Farma. Implementasi GCG diharapkan dapat mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Perusahaan.

Sebagai langkah nyata dari komitmen pelaksanaan GCG, pada tanggal 26 April 2016 setelah dilakukan internalisasi dan sosialisasi atas Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

(*Whistleblowing System*), dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Bio Farma menandatangani Pakta Integritas.

Pada tanggal 28 April sampai dengan 30 Juni 2016 Bio Farma telah melakukan asesmen GCG secara internal (*self assessment*) yang dilakukan oleh tim Penilai Internal Asesmen GCG Bio Farma. Hasil *self assessment* digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan praktik tata kelola yang baik di Bio Farma yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Sampai dengan tahun 2016, Bio Farma telah menyempurnakan dan melengkapi perangkat kebijakan (*soft structure*) GCG yang dimiliki, meliputi:

1. Disusunnya GCG manual sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yaitu:
 - a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) tahun 2013.
 - b. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) tahun 2014 sebagai perubahan nomenklatur Pedoman Perilaku tahun 2014.
 - c. Piagam Komite Audit tahun 2014.
 - d. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) tahun 2012.
 - e. Piagam Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG tahun 2014.
 - f. Kebijakan Manajemen Risiko tahun 2013.
 - g. Kebijakan Teknologi Informasi tahun 2012.
 - h. Kebijakan mengenai hak-hak konsumen yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku 2014.
 - i. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial Perusahaan tahun 2014.
2. Penyempurnaan *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan yang mengacu pada struktur, proses kerja, dan kebutuhan organisasi Perusahaan.
3. Penyampaian informasi terkini Perusahaan kepada para pemangku kepentingan melalui website dan buletin internal.
4. Menjalankan peran dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagai organ utama GCG sesuai aturan hukum dan anggaran dasar Perusahaan.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

5. Meningkatkan peran dan fungsi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG, Corporate Secretary, dan Pengawasan Internal (PI) sebagai organ pendukung GCG.
6. Melakukan evaluasi berkala atas penerapan GCG baik melalui kegiatan asesmen yang dilakukan pihak internal (*self assessment*) sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2016, Bio Farma melakukan evaluasi penerapan GCG melalui kegiatan asesmen yang dilaksanakan pihak internal (*self assessment*). Evaluasi internal dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal yang dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor : 00163/DIR/I/2015. Selain itu, upaya peningkatan GCG juga dilakukan melalui mekanisme penilaian KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul) yang proses asesmennya telah dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 10 Desember 2016. Dicapai skor hasil penilaian KPKU sebesar 510,25.

TAHAP-TAHAP PENERAPAN GCG

1. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan terdiri atas 3 langkah utama:

- a. **Awareness Building**, langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar Perusahaan.
- b. **GCG assessment**, mengidentifikasi aspek-aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
- c. **GCG manual building**, langkah yang dilakukan setelah GCG asesmen. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan Perusahaan dan identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.

Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ Perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota Perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- Kebijakan GCG perusahaan
- Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku
- *Audit committee charter*
- Kebijakan disclosure dan transparansi
- Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- *Roadmap implementasi*

2. TAHAP IMPLEMENTASI

Tahap Implementasi terdiri atas 3 langkah :

- a. **Sosialisasi**, memperkenalkan kepada seluruh insan Bio Farma berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG.
- b. **Implementasi**, kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *Top Down Approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Implementasi mencakup pada upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- c. **Internalisasi**, upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis Perusahaan kerja, dan berbagai peraturan Perusahaan.

3. TAHAP EVALUASI

Tahap evaluasi, dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada.



Workshop Penyusunan Laporan Implementasi KPKU Tahun 2016

MEMBANGUN KESADARAN MENGENAI ARTI PENTING GCG DAN KOMITMEN BERSAMA DALAM PENERAPAN GCG.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bio Farma dalam rangka membangun kesadaran mengenai pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapan GCG sebagai berikut:

Sebagai langkah nyata dari komitmen pelaksanaan GCG, pada tanggal 26 April 2016, seluruh karyawan Bio Farma telah menandatangani Pakta Integritas setelah dilakukan internalisasi dan sosialisasi atas Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dihadiri pula oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

ROADMAP GCG BIO FARMA

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sehingga menjadi semakin baik lagi, manajemen telah menetapkan *Roadmap* GCG tahun 2006–2018 yang terbagi atas 4 fase yang diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 5 tahun. Sasaran akhir yang hendak dicapai adalah posisi sebagai Perusahaan global yang penetapan strateginya melalui pendekatan CSR Global menuju *Good Sustainability Citizenship*. Untuk memperkuat komitmen dan meningkatkan kinerja Bio Farma, maka Bio Farma berkoordinasi dengan konsultan yang ditunjuk untuk memperbaiki *roadmap* GCG sebagai berikut:



2006-2015

- Penandatanganan kesepakatan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pekerja dalam bentuk “Janji GCG Bio Farma”
- Pembentukan Tim Penerapan GCG
- Penyusunan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), *Board Manual*, Piagam Komite Audit dan Piagam Internal Audit
- Penandatanganan pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris
- Pelaksanaan assessment GCG.
- Pembentukan Komite Risiko
- Penyusunan Kebijakan GCG, Kebijakan Teknologi Informasi, dan Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
- Penerapan berbagai sistem terintegrasi, sistem serta panduan world class standard
- Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI)
- Penetapan GCG sebagai indikator kinerja utama (KPI) dalam Kontrak Manajemen
- Perumusan Kebijakan Whistle Blowing System (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi yang didasarkan pada *Code of Conduct* tahun 2009
- Pembentukan struktur yang menangani GCG dan ERM.
- Penandatanganan pakta integritas penerapan GCG oleh Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan seluruh pegawai setiap tahun
- Penyempurnaan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku
- Pelaksanaan program penguatan penerapan Pedoman Perilaku kepada seluruh pegawai
- Dimasukkannya substansi dari Pedoman Perilaku ke dalam program orientasi bagi pegawai baru
- Pemutakhiran kebijakan LHKPN
- Sosialisasi dan implementasi Kebijakan WBS dan Pengendalian Gratifikasi
- Perubahan nilai-nilai budaya perusahaan menjadi PITIC
- Penyusunan Roadmap GCG dan framework GRC
- Penetapan dan pelaksanaan sistem penilaian penerapan GCG secara self assessment



Good Governance Company: Pengembangan Sistem Tata Kelola Perusahaan					
Uraian	2015				
	Implementasi Kerangka Kerja GRC				
Program	• Penetapan Kerangka Kerja GRC menjadi Kebijakan Korporat	• Penerapan Manajemen Risiko Berbasis IT	• Penerapan GRC	• Penyusunan Kebijakan dan Prosedur BCM	
Tujuan	• Melakukan formalisasi kerangka kerja GRC menjadi kebijakan perusahaan.	• Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko dengan menggunakan IT sebagai basisnya.	• Memperkuat penerapan GCG dengan menggunakan manajemen risiko dan kepatuhan (<i>compliance</i>) sebagai pendekatannya.	• Menjamin keberlangsungan fungsi bisnis kritikal ketika terjadi insiden yang berpotensi mengganggu/ menghentikan operasional bisnis perusahaan.	
Aktivitas	• Menetapkan kebijakan perusahaan terkait implementasi GRC di perusahaan berdasarkan kerangka kerja GRC yang telah disusun.	• Melakukan review untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam menetapkan pemodelan IT yang akan digunakan dalam sistem manajemen risiko. • Menetapkan infrastruktur sistem IT dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem manajemen risiko. • Melaksanakan pengembangan secara berkelanjutan khususnya bagi unit kerja terkait guna meningkatkan pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko berbasis IT.	• Meningkatkan kesadaran insan Perusahaan mengenai kerangka kerja GRC. • Melakukan penerapan GCG, pengelolaan Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Compliance</i>) secara terintegrasi.	• Melakukan business <i>impact analysis</i> dan <i>risk assessment</i>. • Menetapkan strategi BCM dan merumuskan kebijakan BCM. • Menyusun prosedur BCM dan menyusun program tahunan BCM.	

2016					
Penguatan dan Pengukuran Sistem dan Proses Tata Kelola dan Integrasi <i>Framework</i> GRC Melalui <i>Platform</i> GRC (IT)					
• Pelaksanaan <i>Self Assessment</i> GCG Secara Berkala	• Penguatan Infrastruktur dan <i>Soft Structure</i> GRC	• Pengukuran Efektivitas <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	• Penerapan dan Pengujian BCM	• Integrasi <i>Framework</i> GRC ke dalam sistem IT (<i>GRC Platform</i>)	
• Memantau perkembangan implementasi GCG di perusahaan secara mandiri.	• Meningkatkan kejelasan fungsi dari struktur pengelola GRC di perusahaan serta kelengkapan kebijakan dan prosedur pendukung yang terkait dengan penerapan GRC di perusahaan.	• Mengetahui sejauhmana WBS dapat dijalankan secara efektif di Perusahaan termasuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari sistem tersebut dalam rangka penyempurnaan.	• Menerapkan dan mengintegrasikan prosedur BCM ke dalam proses bisnis perusahaan.	• Meningkatkan penerapan GRC melalui integrasi kerangka kerja GRC ke dalam sistem IT.	
• Melakukan pemetaan secara mandiri melalui pengukuran kualitas penerapan GCG di perusahaan yang dilakukan secara berkala. • Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di perusahaan. • Menindaklanjuti rekomendasi hasil <i>assessment</i> yang dilakukan pada periode sebelumnya.	• Melakukan kajian mengenai kecukupan fungsi dan struktur pengelola GRC di perusahaan. • Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penerapan GRC. • Melakukan penyempurnaan terkait kebijakan dan prosedur GRC serta kecukupan fungsi dan struktur pengelola GRC berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.	• Melakukan <i>review</i> terhadap kebijakan dan sistem WBS Perusahaan. • Melakukan kajian untuk mengetahui kecukupan ataupun kekurangan dan kelemahan dari sistem tersebut. • Melakukan benchmark mengenai pelaksanaan WBS di perusahaan lain yang lebih maju.	• Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka memberikan pemahaman terkait BCM. • Mengembangkan kebutuhan infrastruktur BCM. • Melakukan pengujian terhadap prosedur dan infrastruktur BCM.	• Melakukan integrasi kerangka kerja GRC ke dalam sistem IT sehingga penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Compliance</i>) dapat diterapkan secara terpadu. • Melakukan identifikasi kelemahan dan kekurangan dalam proses integrasi.	

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Good Governance Company: Pengembangan Sistem Tata Kelola Perusahaan					
Uraian	2015				
	Implementasi Kerangka Kerja GRC				
Indikator	- Adanya pemahaman insan perusahaan mengenai kerangka kerja GRC secara memadai. - Penerapan GRC dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	Semakin efisiennya pelaksanaan manajemen risiko yang didukung dengan sistem IT yang memadai.	- Digunakannya pendekatan risiko dan kepatuhan (<i>compliance</i>) dalam penerapan GCG di Perusahaan. - Adanya keterkaitan yang kuat antara pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan (<i>compliance</i>) dengan sistem tata kelola perusahaan.	Ditetapkannya kebijakan dan prosedur BCM perusahaan.	
Hasil	Dimilikinya kebijakan penerapan GRC perusahaan.	Penerapan manajemen risiko berbasis IT di Perusahaan yang berjalan secara efektif.	Penerapan GRC yang berjalan secara efektif.	Kebijakan dan prosedur BCM yang dilengkapi dengan struktur organisasi pelaksanaan BCM.	
Uraian	2016				
	Penguatan dan Pengukuran Sistem dan Proses Tata Kelola dan Integrasi <i>Framework</i> GRC Melalui <i>Platform</i> GRC (IT)				
- Diketahuinya peta praktik terkini penerapan GCG di perusahaan. - Rekomendasi hasil <i>assessment</i> periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.	- Adanya kejelasan fungsi dan struktur pengelola GRC. - Adanya kelengkapan kebijakan dan prosedur GRC secara memadai.	- Meningkatnya pemahaman insan Perusahaan dan stakeholders terhadap prosedur WBS. - Berfungsinya saluran pelaporan pelanggaran dengan baik. - Meningkatnya kesadaran insan Perusahaan untuk tidak melakukan pelanggaran yang ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggaran. - Meningkatnya kesadaran insan Perusahaan dan stakeholders untuk melaporkan ketika mengetahui adanya pelanggaran.	- Adanya integrasi prosedur BCM ke dalam proses bisnis. - Terpenuhinya prosedur dan infrastruktur pendukung BCM.	Integrasi kerangka kerja GRC ke dalam sistem IT berjalan secara memadai.	
Pelaksanaan <i>self assessment</i> GCG yang dilakukan secara berkesinambungan yang menghasilkan peta praktik penerapan GCG di Perusahaan dari waktu ke waktu.	Kejelasan fungsi dan struktur pengelola GRC yang didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur GRC secara memadai.	Pelaksanaan WBS secara efektif di Perusahaan.	Prosedur BCM yang berjalan secara efektif yang terintegrasi dalam proses bisnis dan didukung prosedur dan infrastruktur secara memadai.	Integrasi <i>framework</i> GRC ke dalam sistem IT dapat dilakukan secara memadai sehingga penerapan GRC dapat berjalan secara efektif.	



Uraian	Good Sustainability Company: Pengukuran Tingkat Maturitas GRC		Good Sustainability Citizenship: Pencapaian Sebagai Perusahaan Global Yang Beretika dan Bertanggung Jawab	
	2017	2018		
	Pengukuran Tingkat Maturitas GRC	Penetapan Strategi dengan Pendekatan CSR Global		
Program	• Pengukuran Tingkat Kematangan GRC (<i>Maturity Level</i>)	• Pengukuran KPI berbasis KPKU	• Perolehan penghargaan di bidang GCG	• Penetapan strategi berlandaskan CSR Global
Tujuan	• Menentukan tingkat kematangan penerapan seluruh komponen GRC perusahaan.	• Mengukur pencapaian kinerja Perusahaan mengacu pada KPKU dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha, profit dan daya saing Perusahaan.	• Membangun reputasi perusahaan sebagai <i>well governed company</i>.	• Menetapkan strategi Perusahaan yang selaras dengan pengembangan dan pembangunan masyarakat serta kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka membangun reputasi perusahaan sebagai <i>corporate citizen</i>.
Aktivitas	• Melakukan <i>assessment</i> tingkat kematangan GRC. • Melakukan analisis kesenjangan. • Memberikan rekomendasi perbaikan tingkat kematangan	• Memahami secara komprehensif cara penilaian KPI dengan basis KPKU. • Meningkatkan pencapaian kinerja Perusahaan. • Melakukan pengukuran KPI dengan menggunakan substansi KPKU menjadi basisnya.	• Mengikuti berbagai ajang penghargaan di bidang GCG secara aktif. • Secara rutin menyelenggarakan forum- forum GCG di perusahaan.	• Menjalankan aktivitas bisnis dengan kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi. • Meningkatkan peran Perusahaan dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. • Memasukkan perspektif tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam penetapan Rencana Jangka Panjang. • Melakukan pengukuran kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan (<i>sustainable development</i>) yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (<i>triple bottom line</i>) dengan berpedoman pada kriteria Global Reporting Initiative (GRI). • Melakukan audit terhadap Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) perusahaan.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

Uraian	Good Stainability Company: Pengukuran Tingkat Maturitas Grc				Good Stainability Citizenship: Pencapaian Sebagai Perusahaan Global Yang Beretika dan Bertanggung Jawab			
	2017		2018		2017		2018	
	Pengukuran Tingkat Maturitas GRC				Penetapan Strategi dengan Pendekatan CSR Global			
Indikator	- Diketahuinya tingkat maturitas GRC di perusahaan. - Tercapainya target level maturitas yang dikehendaki.		Digunakannya KPKU sebagai basis dalam pengukuran KPI.		- Keikutsertaan Perusahaan dalam berbagai ajang penghargaan di bidang GCG seperti <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i>, <i>Annual Report Award (ARA)</i> dll. - Diperolehnya penghargaan dari berbagai ajang penghargaan di bidang GCG yang telah diikuti.		- Adanya komitmen perusahaan terhadap program pembangunan keberlanjutan (<i>sustainable development</i>). - Adanya kontribusi nyata dari Perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan kepada pemerintah. - Meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. - Adanya peningkatan kategori penghargaan di bidang lingkungan (PROPER) dari Hijau ke Gold.	
Hasil	Laporan tingkat maturitas dan program kerja peningkatan maturitas yang baru		Peningkatan pertumbuhan usaha, profit dan daya saing Perusahaan.		Perusahaan dikenal sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik.		Perusahaan dikenal sebagai perusahaan global yang beretika dan bertanggung-jawab.	

KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Seluruh insan Bio Farma berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Perusahaan dan Peraturan perundang-undangan.

KETERBUKAAN INFORMASI

Perusahaan wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif, sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 tahun 2011.

Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dalam Laporan Manajemen (Triwulan dan Tahunan) serta Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Penyampaian Laporan Manajemen (Triwulan dan Tahunan) serta Laporan Tahunan dilakukan tepat waktu.

Sebagai bentuk wujud nyata tentang keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bio Farma kembali mendapatkan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016, dari Komisi Informasi Pusat, pada tanggal 20 Desember 2016 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, di Jakarta. Penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kala, kepada Direktur Produksi Bio Farma, Juliman, merupakan penghargaan ke-empat kalinya sejak tahun 2013. Penghargaan ini merupakan komitmen Bio Farma untuk secara konsisten menerapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.



Dengan skor 81,27 Bio Farma meraih peringkat ke 3, untuk kategori badan publik BUMN. Melalui layanan informasi publik, hak masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai perusahaan, proses bisnis, tata kelola, laporan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi “Penghargaan ini merupakan prestasi bagi Bio Farma, dimana kami sudah menjalankan kewajiban kami sebagai BUMN untuk memberikan informasi kepada publik, dan Bio Farma mendukung ketentuan ini, dengan menyajikan Jenis-Jenis Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008”.

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Semua Pejabat Perusahaan dan insan Bio Farma harus menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Benturan kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik kepentingan yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan insan Bio Farma memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.

Benturan kepentingan yang diterapkan di Bio Farma berdasarkan SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 07882/DIR/XII/2015 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Bio Farma (Persero):

1. Insan Bio Farma harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
2. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui dan tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

3. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Bio Farma dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
4. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
5. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

PENERIMAAN HADIAH, CINDERAMATA, JAMUAN, HIBURAN, PEMBERIAN DONASI DAN FASILITAS LAINNYA

Perilaku insan Bio Farma dan keluarganya berkaitan dengan pemberian donasi dan fasilitas lainnya:

1. Dilarang menerima/memberikan hadiah, cinderamata, jamuan, hiburan, dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti :
 - a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*).
 - b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya.
 - c. Uang/barang/fasilitas lainnya kepada insan Bio Farma dan keluarganya, pegawai (auditor), tamu selama kunjungan dinas.
 - d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses rekrutmen/promosi/transfer karir Karyawan.
2. Insan Bio Farma dapat memberikan hadiah, cinderamata, jamuan, hiburan kepada pihak lain dengan syarat:
 - a. Untuk menunjang kepentingan Perusahaan dalam rangka interaksi sosial dan membina hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Bisnis secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan batas-batas wajar di tempat yang terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif terhadap Perusahaan dan tanpa

TATAKELOLA PERUSAHAAN

- menimbulkan Benturan Kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atau yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Tidak dimaksudkan untuk menyuap.
 - c. Telah dianggarkan oleh Perusahaan.
 - d. Untuk hadiah dan Cinderamata harus mencantumkan logo nama Bio Farma.
3. Pengeluaran untuk pemberian Hadiah, Cinderamata, Jamuan Bisnis dan Donasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat otorisasi dari Pejabat Perusahaan yang berwenang.
4. Hadiah, Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Fasilitas Lainnya yang diperbolehkan untuk diterima tanpa perlu melaporkan adalah:
- a. Diperoleh dari hadiah langsung/indian, diskon/ rabat, *voucher*, *point reward*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
 - b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
 - c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
 - d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari insan Bio Farma, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.
 - e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan insan Bio Farma.
 - f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan insan Bio Farma.
 - g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan insan Bio Farma.
 - h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musabah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan insan Bio Farma.
 - i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata.
 - j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku.
5. Insan Bio Farma dapat menerima honorarium, biaya perjalanan dinas dari penyelenggara kegiatan yang berkaitan dengan kedinasan dimana insan Bio Farma ditugaskan oleh Perusahaan untuk hadir pada acara tersebut, dengan melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Perusahaan (Kepala Divisi *Compliance & Risk Management* atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi).
6. Perusahaan membolehkan adanya pengeluaran dana untuk masyarakat dalam bentuk sumbangan (Donasi) untuk tujuan sosial/amal dalam batas kepatutan sebagai wujud komitmen dan kepedulian Perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

**KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK
MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN
PROMOSI**

Berdasarkan SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-05/DK/BF/II/2013, No. 01024/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 Tentang Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) Yang Telah Diperbaharui Dengan SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: KEP-07/DK/BF/III/2014, No. 01123/DIR/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014 sebagai berikut:



Perusahaan berkomitmen bahwa setiap karyawan mempunyai hak yang sama dalam kenaikan pangkat, jabatan dan pengembangan karirnya di Perusahaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan prestasi kerja dan kinerja yang ditentukan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan kerja termasuk didalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi ras, suku, jenis kelamin dan agama. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan dan tidak mentolerir praktik-praktik diskriminatif dalam pekerjaan dengan alasan apapun.

Perusahaan melarang segala bentuk pelecehan dan intimidasi, serta berkomitmen untuk menjaga suatu lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan dan intimidasi, baik yang dilakukan terhadap atasan, bawahan, tekan sekerja, Pelanggan/konsumen, Pemasok atau Mitra Bisnis Perusahaan.

Pelecehan dan intimidasi tersebut dapat berupa ancaman, tindakan kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia ataupun ketidak mampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan/atau tindakan semacamnya. Perusahaan akan menyelidiki setiap kasus pelecehan dan intimidasi serta akan mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.

AKTIVITAS POLITIK

Terhadap aktivitas politik, seluruh insan Bio Farma:

1. Tidak memanfaatkan nama, aset dan potensi Perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
2. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan kontribusi atau sumbangan atas nama Perusahaan kepada partai politik manapun.
3. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
4. Tidak melaksanakan aktivitas politik baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan Perusahaan.
5. Apabila seseorang menduduki jabatan sebagai pengurus partai politik, calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, maka yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari Perusahaan.
6. Dilarang menggunakan atribut partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terafiliasi dengan partai politik dalam lingkungan kerja Perusahaan.

TATAKELOLA PERUSAHAAN

PERILAKU ASUSILA, NARKOTIKA, OBAT TERLARANG DAN PENJUDIAN SETIAP INSAN BIO FARMA

1. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, memfitnah.
2. Dilarang menggunakan, mengedarkan, menyimpan dan menjual hal-hal yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya serta minuman keras.
3. Dilarang mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi.
4. Dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun.
5. Dilarang membawa senjata api dan senjata tajam serta senjata lainnya di lingkungan Perusahaan.

PENCATATAN DAN PENYUSUNAN DATA PERUSAHAAN SERTA INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Setiap insan Bio Farma berkewajiban untuk melakukan pengelolaan data Perusahaan secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara sebagai berikut:

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, diverifikasi keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyampaikan laporan secara benar, lengkap, jelas dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melakukan dokumentasi dokumen, laporan dan berkas-berkas sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
5. Penggunaan, pendistribusian dan pemusnahan dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
6. Dilarang memalsukan dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan.
7. Dilarang membiarkan dokumen, laporan dan berkas-berkas yang tidak benar atau transaksi yang melanggar hukum.
8. Seseorang di Perusahaan yang karena kedudukan atau profesinya atau hubungan usaha dengan Perusahaan dilarang menggunakan dokumen

laporan dan berkas-berkas serta informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan Perusahaan atau Pemangku Kepentingan lainnya.

9. Setiap insan Bio Farma bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen, laporan dan berkas-berkas serta informasi yang ada di bawah pengawasannya.
10. Laporan Keuangan Perusahaan harus dibuat akurat mengingat data tersebut mendukung prinsip-prinsip integritas dan kejujuran usaha disamping itu juga reputasi Perusahaan bergantung pada akurasi datanya.

PERLINDUNGAN INFORMASI PERUSAHAAN

1. Seluruh insan Bio Farma berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi non publik Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
2. Informasi non publik adalah informasi yang oleh Perusahaan belum diungkapkan atau belum tersedia secara umum bagi publik. Contohnya informasi yang berkaitan dengan penemuan, proses penelitian dan pengembangan, proses produksi, proses pengujian, formula-formula produk, peluncuran produk baru, rencana strategis dan program usaha, spesifikasi teknis, penentuan harga, data karyawan, kontrak, proposal bisnis, data keuangan, biaya produk, merger dan kuisisi, daftar pelanggan.
3. Pengungkapan informasi non publik hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dalam rangka menyampaikan informasi yang relevan kepada auditor internal atau eksternal dalam proses audit atau kepada penegak hukum dalam rangka penyelidikan atau penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Insan Bio Farma yang bekerja dengan data atau informasi milik pemberi pekerjaan, rekanan dan Mitra Bisnis yang dikategorikan rahasia, dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak luar tanpa persetujuan Direksi, atau tidak seorangpun boleh mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada yang lain kecuali diwajibkan oleh hukum.



5. Insan Bio Farma yang telah menyelesaikan masa tugasnya di Perusahaan dilarang mengungkapkan informasi non publik Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan.
6. Keterbukaan informasi:
 - a. Perusahaan akan mengungkapkan informasi penting yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan kepada pihak yang berwenang seperti Laporan Tahunan, Laporan Manajemen dan lain-lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
 - b. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan kepada pihak-pihak yang kepentingan sesuai dengan prosedur Keterbukaan Informasi Publik di Perusahaan.

PERLINDUNGAN ASET PERUSAHAAN

Terhadap aset Perusahaan setiap insan Bio Farma berkewajiban untuk :

1. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan aset Perusahaan sesuai dengan peruntukannya, sesuai jabatan, kewenangan dan lingkup pekerjaannya yang sedang dilaksanakan.
3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Dilarang untuk memindahkan secara tidak sah peralatan, persediaan maupun aset Perusahaan lainnya.
5. Fasilitas dan peralatan komunikasi seperti telepon, faksimili, email dan sarana telekomunikasi lainnya hanya dipergunakan untuk keperluan Perusahaan. Komunikasi pribadi harus dibatasi dan dijaga pada tingkat penggunaan minimal.
6. Menjaga akurasi pencatatan dan pelaporan aset Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

PENERIMAAN/PEMBERIAN GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

Berdasarkan SK Direksi PT Bio Farma (Persero) No.: 01236/DIR/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di PT Bio Farma (Persero), Insan Bio Farma dilarang menerima/ memberikan Gratifikasi atas inisiatif sendiri maupun pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, seperti:

1. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/perlakuan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*);
2. Menerima atau memberikan uang/barang/ fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
3. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya selama kunjungan dinas;
4. Menerima atau memberikan uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan Karyawan/ promosi/transfer karir;
5. Menerima uang/barang/fasilitas lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada voucher dan cek, yang diberikan kepada Insan Bio Farma sebagai ucapan terima kasih dari pihak ketiga terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, sehubungan dengan telah terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan di Perusahaan;
6. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/ fasilitas sebagai tanda terima kasih kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga terkait dengan proses pemeriksaan kelayakan pekerjaan dan/atau proses persetujuan atas Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga di Perusahaan;
7. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak ketiga secara menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini dan peraturan perundang-undangan;
8. Menyupai atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, termasuk tapi tidak terbatas pada pejabat suatu instansi dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;

TATAKELOLA PERUSAHAAN

9. Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang/barang/ fasilitas lainnya kepada Insan Bio Farma yang diberikan oleh pihak ketiga yang merupakan Mitra Bisnis Perusahaan seperti Bank, Perusahaan Asuransi, Biro Perjalanan, atau perusahaan/ konsultan atas perjanjian/kerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan;
10. Menerima pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya yang diterima karena jabatan dan kewenangan dari Insan Bio Farma dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
11. Menerima keuntungan seperti jumlah/prosentase bunga khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Bio Farma karena hubungan pribadi atau jabatan dan tidak berlaku bagi masyarakat umum;
12. Menerima makanan, minuman atau hiburan (entertainment) yang diberikan secara khusus, karena jabatan atau kewenangan dari Insan Bio Farma yang bersangkutan, yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan;
13. Pemberian hiburan, paket wisata, akomodasi, fasilitas lainnya yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Bio Farma di perusahaan pihak ketiga, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan maksud dan penugasan Insan Bio Farma tersebut;
14. Pemberian parcel dalam bentuk apapun kepada Insan Bio Farma dari pihak ketiga atau dari Insan Bio Farma kepada pihak ketiga sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan;
15. Pemberian kepada Insan Bio Farma, termasuk yang diberikan kepada Keluarga Inti-nya sehubungan dengan suatu perayaan, termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun, pernikahan, dan kelulusan, dari pihak ketiga yang nilai materilnya dalam mata uang Rupiah melebihi Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dari masing-masing pihak ketiga;
16. Memberi bantuan kepada pihak ketiga dengan menggunakan harta/dana/fasilitas Perusahaan untuk dan atas nama pribadi;
17. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kaidah agama, norma kesusilaan dan ketentuan dalam Pedoman ini;
18. Memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada sesama Insan Bio Farma dan/atau pihak ketiga yang merupakan aset/harta/fasilitas milik Perusahaan tanpa terdokumentasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

19. Seluruh Insan Bio Farma dan/atau anggota Keluarga Inti-nya dilarang memberi Gratifikasi kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan karena adanya permintaan dari pihak ketiga tersebut.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bio Farma berkomitmen memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemenuhan pasokan kepada pelanggan. Ini semua tercermin dalam etika perusahaan sebagai berikut:

1. Bekerja keras untuk memberikan hasil produksi terbaik dengan harga terjangkau
2. Mengedepankan standar layanan yang profesional demi memuaskan pelanggan.
3. Memperhatikan kebutuhan para pelanggan melalui peningkatan standar kerja yang tersistem didukung teknologi yang tinggi.
4. Mempertahankan kualitas produk, Bio Farma memperhatikan aspek keselamatan dan inovasi pada setiap tahap proses pengembangan, produksi, dan distribusi.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bio Farma mendukung secara nyata K3 dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3, meningkatkan partisipasi semua pihak untuk optimalisasi pelaksanaan budaya K3 di lingkungan perusahaan. Sehingga, dengan menerapkan K3 diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Bio Farma pelaksanaan K3 dengan melakukan sosialisasi penerapan kegiatan yang melibatkan seluruh aspek di lingkungan perusahaan secara langsung, seperti pemantauan kegiatan K3 dan rutin melakukan *safety* patrol ke setiap bagian. Untuk masyarakat, Bio Farma melalui TTD ikut terlibat secara langsung dalam memberikan bantuan dan penanganan bagi para korban bencana alam, seperti penanganan bencana Merapi, bencana banjir bandang, bencana tsunami, bencana longsor, dan bencana banjir.



Sertifikasi *Occupational, Health and Safety Management System-OHSAS 18001: 2007* untuk pengelolaan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bekerja yang dimiliki oleh Bio Farma merupakan salah satu bentuk keberhasilan Bio Farma dalam mengimplementasikan K3 di lingkungan perusahaan. Selain Sertifikasi OHSAS 18001 : 2007, Bio Farma selama tiga tahun berturut-turut berhasil meraih Zero Accident Award sebagai keberhasilan kecelakaan nihil di lingkungan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bio Farma berharap melalui pengoptimalan Sistem Manajemen K3 dan implementasi K3 menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat menuju nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna peningkatan produksi dan produktivitas nasional dapat segera terwujud.

Keberadaan P2K3 di lingkungan Bio Farma memiliki tujuan untuk menjamin keberadaan tenaga kerja secara jasmani maupun rohani melalui proses identifikasi, analisa, penilaian, dan pengendalian sumber potensi bahaya yang berkaitan dengan peralatan, bahan, proses, cara kerja serta lingkungan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, peraturan sekaligus pedoman K3. Sehingga dapat tercipta sistem K3 yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Dengan mengimplementasikan sistem K3 diharapkan mampu mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, dan menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Bio Farma memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan disetujui bahwa kewajiban dividen dari laba bersih tahun buku 2015 yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan tahun buku 2015 pada tanggal 10 Juni 2016 adalah sebesar Rp234,71 miliar. Untuk kewajiban dividen atas laba bersih tahun buku 2016 akan ditetapkan pada RUPS tentang Laporan Tahunan tahun buku 2016.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS SEBAGAI ORGAN PERUSAHAAN BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA KOLEKTIF UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN MEMBERIKAN NASIHAT KEPADA DIREKSI SERTA MEMASTIKAN BAHWA PERUSAHAAN MELAKSANAKAN GCG.

Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Tugas Dewan Komisaris Bio Farma dapat berjalan dengan efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan dalam mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat dan Dewan Komisaris dituntut untuk dapat bertindak secara independen yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan antar Dewan Komisaris maupun hubungan terhadap Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.

5. Anggota Dewan Komisaris memahami dan mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris memahami dan melaksanakan Pedoman GCG.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Bio Farma memiliki Dewan Komisaris Independen yaitu Dewan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan



Nama Komisaris	Jabatan	Masa Jabatan	Pelaksana	Representasi	Lulus Fit & Proper Test.
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23 Januari 2014	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Paruli Lubis	Komisaris	5 November 2012 s/d Sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Nizar Yamani	Komisaris	28 Mei 2012 s/d Sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	1 Mei 2013 s/d Sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014 s/d Sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
H.M. Subuh	Komisaris	22 Juni 2015 s/d Sekarang	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui RUPS melalui proses yang transparan serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual* dan ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dengan pertimbangan aspek integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Bio Farma

Kriteria/Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria/Persyaratan Menjadi Dewan Komisaris

Berdasarkan peraturan di atas dijelaskan tentang kriteria/persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal

- Persyaratan formal anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - Orang perseorangan;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
- Persyaratan formal anggota Dewan Pengawas, yaitu:
 - Orang perseorangan;
 - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit; dan

- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu:

- a. integritas;
- b. dedikasi;
- c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
- e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:

- a. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
- b. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
- e. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS**Alasan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara;
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
 - e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. Mengundurkan diri.
3. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, misalnya, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. Memasuki masa usia pensiun dan Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.



Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

1. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang akan diberhentikan.
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Deputi Teknis bersama dengan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Menteri guna mendapatkan penetapan.
3. Penyampaian usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 2, disertai dengan
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
4. Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 4, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis, Sekretaris dan/atau Deputi.
6. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
7. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dengan Peraturan ini, Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
8. Menteri dapat pula menugaskan Sekretaris dan/atau Deputi berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
9. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 huruf a, b, c, d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela

URAIAN DEWAN KOMISARIS

10. Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
11. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan oleh Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 10 dianggap telah terpenuhi.
13. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan Menteri/pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud angka 6, 7 dan 8.
14. Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 13, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
15. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam forum RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
16. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan berkoordinasi dengan pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
17. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
18. Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
20. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan apabila Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
21. Menteri dapat pula memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 20.
22. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
23. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
24. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/ seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Susunan Dewan Komisaris Bio Farma

Pada tahun 2016 tidak adanya perubahan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bio Farma. Sampai dengan 31 Desember 2016, Dewan Komisaris Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 5 (lima) orang Komisaris dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Domisili	Tanggal Pertama Kali Menjabat & Tanggal Efektif	Dasar Pengangkatan
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	Indonesia	23 Januari 2014	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014
Paruli Lubis	Komisaris	Indonesia	5 November 2012	Keputusan Menteri BUMN Nomor: 392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015
Nizar Yamani	Komisaris	Indonesia	28 Mei 2012	Kep di Luar RUPS Nomor: 204/MBU/2012 tanggal 28 Mei 2012 Jo Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-81/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	Indonesia	1 Mei 2013	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-235/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013
Heridadi	Komisaris	Indonesia	23 Januari 2014	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 KEP-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015
H.M. Subuh	Komisaris	Indonesia	22 Juni 2015	Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENETAPAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal

6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN

2. Anggaran Dasar Perusahaan
3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

TUGAS DEWAN KOMISARIS BIO FARMA

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan

URAIAN DEWAN KOMISARIS

- terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 - j. Melakukan tindakan pengelolaan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - k. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
 - l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 2. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek.
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Wewenang Dewan Komisaris Bio Farma

1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - a. Melihat buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
 - b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
 - c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
 - d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 - e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
 - g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 - h. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
 - i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
 - Menyewakan aset.
Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai sewa/transaksi lebih dari 1% sampai dengan 2,5% dari pendapatan (revenue), atau lebih dari 2% sampai dengan 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*).
 - Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kerjasama Bangun Serah(*Build Operate Transfer/BOT*) Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun



Serah Guna (Build Transfer Operate/ BTO) dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan lebih dari 6% sampai dengan 12,5% dari pendapatan (revenue) atau lebih dari 6,5% sampai dengan 13% dari ekuitas (equity) Perusahaan, mana yang lebih kecil.

- Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya.
Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya dengan jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) lebih dari 2,5% sampai dengan 5% dari pendapatan (revenue) atau lebih dari 5% sampai dengan 10% dari ekuitas (equity) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
- Pelaksanaan tindakan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan dengan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa Benturan Kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang kecuali pinjaman (utang atau pitutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan dari Perusahaan, dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan dari Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.

- f. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern.
- h. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- 3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan atas permohonan Direksi sebagaimana dimaksud angka 2 diatas.

Kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJP Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberi nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
15. Dewan Komisaris harus memantau bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
16. Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator/KPI*) Dewan Komisaris kepada RUPS.
17. Menyajikan laporan triwulan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) kepada Pemegang Saham.

Kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

1. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
2. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan yang tercantum dalam RKAP yang merupakan penjabaran dari RJP.

Kewajiban Dewan Komisaris Bio Farma Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Laporan Tahunan

1. Dewan komisaris melakukan telaahan atas Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan untuk selanjutnya oleh Direksi disampaikan kepada Pemegang Saham.

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan.
2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
3. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penasehatan, Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris, sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) No : KEP-02/DK/BF/VII/2015 tgl 9 Juli 2015 sebagai berikut:

Nama	Bidang Tugas	Perincian Tugas
Ahmad M. Ramli	Ketua Dewan Komisaris	- Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Dewan Komisaris. - Melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam melakukan tugasnya secara keseluruhan termasuk ketaatan pada ketentuan anggaran dasar, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Paruli Lubis	Membidangi Keuangan	- Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan tata cara dan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana jangka panjang, pertanggungjawaban keuangan serta penyusunan pelaporan yang meliputi laporan manajemen triwulanan dan laporan keuangan tahunan dengan memperhatikan standar pelaporan yang berlaku. - Sebagai Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Audit
Ihsan S. Latief	Membidangi Pemasaran dan Teknologi Informasi	- Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan dan pemasaran dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan penyusunan dan implimentasi IT Master Plan. - Sebagai Wakil Ketua Komite Audit dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Audit.
Heridadi	Membidangi Penelitian dan Pengembangan	- Melakukan pengawasan dan memberi nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan produk vaksin dan antisera. - Sebagai Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.
Nizar Yamanie	Membidangi Produksi	- Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan produksi meliputi proses produksi termasuk rencana investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, ketersediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku serta pengendalian terhadap barang persediaan kadaluarsa. - Sebagai Wakil Ketua I Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.
HM. Subuh	Membidangi SDM	- Melakukan pengawasan dan memberi nasehat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyiapan SDM, mulai dari sistem rekrutmen, penegakan disiplin, sistem penggajian dan pemberian insentif, diklat pegawai, organisasi perusahaan. - Sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan tugas sebagaimana diatur dalam <i>Charter</i> Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2016

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan penasihat (konsultatif) Perseroan.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2016 sebagai berikut:**1. Rapat Rutin Internal**

- a. Rapat rutin internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat rutin membahas kinerja perusahaan per bulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2016.
- Pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.
- Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2016 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi.
- Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semesteran tahun 2016 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi.
- Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tahun 2016 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2017 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persetujuan dari Dewan Komisaris.

- Pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG.
- Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan dan monitoring implementasi kebijakan perusahaan.

- b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi.
- c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi

- a) Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).
- b) Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan perseroan.
- c) Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:
- Pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.
 - Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2016.
 - Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2016 dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham.
 - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2017 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP.
 - Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham.
 - Pembahasan tindak lanjut *area of improvement* hasil *assessment* GCG.



- Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di perusahaan dan monitoring implementasi kebijakan perusahaan, yang meliputi antara lain:
 - Perubahan lingkungan bisnis
 - Respon terhadap stakeholders
 - Penguatan sistem pengendalian intern perusahaan
 - Manajemen resiko perusahaan
 - Sistem teknologi informasi
 - Kebijakan SDM
 - Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan Keuangan
 - Kebijakan pengadaan
 - Kebijakan mutu dan pelayanan
 - Remunerasi direksi
 - Hal-hal penting lainnya yang perlu dibahas

3. Rapat Dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham

- a. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 dan Kontrak Manajemen/KPI Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero).
- b. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 dan Pengesahan Laporan Keuangan.
- c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgen yang terjadi di perusahaan.

4. Program Pengembangan

Program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bentuk-bentuk kegiatan/program yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

- a. Program Internal
- b. Program Eksternal

5. Program Kunjungan Kerja Ke Lapangan/ Monitoring

- a. Kunjungan berkala (Dalam Negeri) dalam rangka:
 - Melakukan monitoring dan pengawasan atas realisasi dari program-program investasi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP Tahun 2016.
 - Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses produksi, pemasaran, distribusi sebagaimana dianggarkan dalam RKAP Tahun 2016.
 - Melakukan koordinasi dengan pejabat satu tingkat di bawah direksi untuk mendapat masukan tentang permasalahan yang dihadapi.
 - Memonitor pelaksanaan dan pencapaian RKAP.
- b. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (Luar Negeri):
 - Akan dijadwalkan sesuai tingkat kebutuhan (urgensinya) berdasarkan pertimbangan dan masukan dari BOD ataupun pihak terkait lainnya serta kesepakatan atau keputusan bersama Dewan Komisaris.

Realisasi Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris Tahun 2016

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris Bio Farma telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat terhadap:
 - a. Pelaksanaan RKAP Tahun 2016 dan RJPP
 - b. Masalah-masalah strategis bagi perusahaan seperti WHO PQ, Proyek Pengembangan Vaksin dan lain sebagainya.
 - c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Penerapan prinsip-prinsip GCG, ISO, cGMP dan lain-lain.
 - e. Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

URAIAN DEWAN KOMISARIS



2. Membuat keputusan/memberikan persetujuan/tanggapan:
 - a. Menyampaikan pendapat/tanggapan/masukan kepada Pemegang Saham atas Laporan Manajemen berkala, Laporan Tahunan dan Usulan RKAP dan RJPP
 - b. Laporan RKAP dan RKA PKBL.
 - c. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
 - d. Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva
 - e. Usulan Remunerasi Direksi.
3. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat rutin internal Dewan Komisaris.
4. Review analisis kinerja bulanan Perusahaan dan pembahasan perkembangan kondisi perusahaan melalui rapat gabungan bersama Direksi termasuk pemberian nasihat/saran kepada Direksi.
5. Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan beserta Rencana Anggaran Dewan Komisaris.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan
7. Pemantauan atas tindak lanjut keputusan/arahan pemegang saham dan hasil/temuan audit internal dan eksternal.
8. Melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke lapangan.
9. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan.

10. Melaksanakan kegiatan lain yang sifatnya mendadak dan mendesak.

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyampaikan berbagai arahan, nasihat dan memberikan persetujuan khususnya menyangkut kelangsungan/perkembangan bisnis Perusahaan. Secara khusus arahan yang disampaikan Dewan Komisaris pada tahun 2016 antara lain:

1. Direksi diminta agar menggunakan RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham sebagai alat kendali atas beban perusahaan, karena biaya dalam RKAP merupakan batasan maksimal yang diperbolehkan, sedangkan pendapatan adalah batasan minimal yang harus dicapai.
2. Direksi agar memperhatikan efektivitas upaya-upaya peningkatan efisiesi, selain itu agar meningkatkan monitoring dan pengendalian biaya-biaya usaha utamanya pada biaya atau kegiatan yang kurang terkait dengan upaya merealisasikan penjualan, sehingga target penjualan tahun 2016 dapat tercapai.
3. Direksi diminta agar memperhatikan peningkatan Beban Penelitian, Pengembangan & Surveilans yang melampaui anggarannya, dimana s.d triwulan III Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp90 miliar atau 218,64% dari RKAP Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp41,1 miliar dan 68,73% bila dibandingkan dengan total anggaran dalam RKAP Tahun 2016.

4. Melakukan evaluasi terhadap peningkatan Beban Pokok Penjualan (BPP) Barang Dagangan & Jasa terhadap Penjualan s.d Triwulan III Tahun 2016, lebih tinggi dari Harga Jualnya sebesar 2,36% yang mengakibatkan Rugi Kotor.
 5. Direksi diminta agar mengupayakan merealisasikan Laba Bersih sesuai target RKAP tahun 2016 sebesar Rp758,2 miliar, dimana sampai dengan 30 September 2016 baru terealisasi sebesar Rp326,4 miliar atau 47,52% dari RKAP triwulan III Tahun 2016 dan 43,05% dari target RKAPnya, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp338,1 miliar mengalami penurunan sebesar 3,43%.
 6. Mengingat kegiatan investasi merupakan tulang punggung keberlangsungan dan pengembangan perusahaan, dan terutama berdampak jangka panjang, disarankan agar Direksi dapat memberikan perhatian yang lebih lagi untuk mengupayakan percepatan realisasi investasi, sehingga pengembangan bisnis perusahaan ke depan tidak menghadapi kendala, dan operasional perusahaan dapat berjalan sesuai rencana jangka pendek maupun rencana strategis (jangka panjang).
 7. Mengingat penelitian dan pengembangan, serta inovasi produk merupakan tujuan (misi) perusahaan didirikan, disarankan Direksi memerintahkan manajemen terkait agar membuat analisa sebab-sebab belum tercapainya target kegiatan tersebut sesuai RKAP tahun 2016, dan bagaimana dampaknya terhadap operasional dan keberlangsungan (going concern) perusahaan di masa yang akan datang.
 8. Dalam proses pelaksanaan program investasi, agar Direksi terus meningkatkan unsur GCG serta dilengkapi dengan pengkajian manajemen risiko yang komprehensif disertai rancangan langkah-langkah mitigasi atas risiko dimaksud.
 9. Terkait dengan alokasi dana Bina Lingkungan, Dewan Komisaris menyarankan agar manajemen memprioritaskan alokasi dana BL pada program-program/kegiatan yang *inline* dengan bisnis perusahaan, dan melakukan upaya penagihan terhadap piutang macet kepada para mitra binaan.
 10. Pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2016 agar dijadikan basis dan pembelajaran yang bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya, dengan diikuti kerja keras, pengoptimalan seluruh sumber daya, serta terus mengupayakan peluang peningkatan melalui pengawasan yang konstruktif, dan senantiasa memotivasi semangat kerja karyawan guna memperoleh produktivitas dan efisiensi yang optimal bagi perusahaan, mengingat berbagai tantangan yang akan dihadapi perusahaan dimasa mendatang semakin berat.
 11. Direksi diminta untuk memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap aspek kegiatan pengurusan perseroan dengan memperhatikan pedoman GCG sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2012 jo PER-16/MBU/2012.
- Sepanjang tahun 2016, sesuai kewenangannya dalam Anggaran Dasar Bio Farma Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan/rekomendasi diantaranya:
1. Rekomendasi atas Usulan Pendirian Anak Perusahaan PT Bio Farma (Persero).
 2. Persetujuan mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit Bank Mandiri Tahun 2016-2017.
 3. Persetujuan mengagunkan Aktiva Tetap Perusahaan terkait Perpanjangan dan Peningkatan Plafond Fasilitas Kredit Indonesia Eximbank tahun 2016-2017.
 4. Rekomendasi Dewan Komisaris atas penggunaan sebagian cadangan perusahaan untuk peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Ditempatkan PT Bio Farma.
 5. Persetujuan perubahan struktur organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.
 6. Persetujuan sistem remunerasi Direksi sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Realisasi Anggaran Dewan Komisaris

Jumlah RKAP Dewan Komisaris pada tahun 2016 adalah sebesar Rp19.866.949.000 dan realisasi RKAP sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.754.355.000 atau terealisasi sebesar 64,20% dari anggaran.

Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2017

1. Rapat Rutin Internal
 - a. Rapat rutin internal Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat rutin dimaksud dilaksanakan guna membahas kinerja perusahaan per bulan, apabila diperlukan atau dalam rangka mendalami permasalahan perusahaan dan dapat mengikutsertakan anggota Komite Audit atau anggota Komite Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu:
 - Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2018.

- Pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.
- Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2017 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi.
- Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semesteran tahun 2017 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka pembahasan dengan Direksi.
- Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2017 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2018 dengan mengikutsertakan Komite-Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Pembahasan tindak lanjut area of improvment hasil assessment GCG.
- Pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgent yang terjadi di Perusahaan dan monitoring implementasi kebijakan Perusahaan.



- b. Rapat internal Dewan Komisaris dapat melibatkan Kepala Divisi yang terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Direksi.
 - c. Rapat internal Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik).
2. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
 - a. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan (waktu sesuai kesepakatan Dewan Komisaris dan Direksi).
 - b. Rapat rutin dimaksud untuk membahas kinerja perusahaan serta permasalahan pengurusan perseroan.
 - c. Rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi meliputi:
 - Pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS.
 - Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Triwulanan tahun 2017.
 - Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Semester I dan II tahun 2017 dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham.
 - Pembahasan dalam rangka penetapan KAP untuk pelaksanaan General Audit Laporan Keuangan, Laporan PKBL, Kinerja Perusahaan dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk Tahun 2018 serta Jadwal dan Program Pelaksanaan Audit oleh KAP.
 - Pembahasan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 dan KPI dan Kontrak Manajemen Tahun 2017 dalam rangka persiapan Pra RUPS dan RUPS dengan Pemegang Saham.
3. Rapat Dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham
 - a. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS dengan Kementerian BUMN/Pemegang Saham untuk Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2017 dan Kontrak Manajemen/KPI Tahun 2017 PT Bio Farma (Persero).
 - b. Dalam rangka Pra RUPS dan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan.
 - c. Rapat pelaksanaan rapat-rapat khusus yang berkaitan dengan adanya permasalahan yang penting/urgen yang terjadi di perusahaan.
4. Program Pengembangan
5. Program Kunjungan Kerja Ke Lapangan/Monitoring
6. Kunjungan berkala (Dalam Negeri)
7. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (Luar Negeri)

URAIAN DEWAN KOMISARIS

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DEWAN
KOMISARIS DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Dewan Komisaris dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		9 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
Heridadi	Komisaris	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		09 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		09 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
Mohamad Subuh	Komisaris	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		09 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
Nizar Yamani	Komisaris	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		09 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session
Paruli Lubis	Komisaris	12 Mei 2016	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	Inna Garuda Bali	Bio Farma/KBUMN	Sharing session
		09 Desember 2016	Performance Management System	Adimulia Hotel Medan	Dunamis	Sharing session

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Pelaksanaan program orientasi Komisaris Baru Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Paramaetr Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekrearis Kementerian BUMN.
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan Perusahaan khusus Komisaris, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Komisaris baru yang bertujuan memberikan gambaran tentang profil perusahaan yang berisikan materi tentang kondisi umum perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, strategi yang sedang dijalankan oleh Perusahaan, aktivitas bisnis, RJP Perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Komisaris baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan Divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, sejarah Perusahaan, *Corporate Governance Policy*, serta peraturan perundangan yang terkait dengan proses bisnis Bio Farma.

Dalam acara program pengenalan tersebut Dewan Komisaris yang baru sepakat akan menghindari potensi untuk terlibat dalam kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Direksi, dan menghindari potensi terjadinya gratifikasi serta berkomitmen akan melaksanakan GCG sebaik-baiknya. Dewan Komisaris juga telah menyepakati pembagian tugas di antara Komisaris.

Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang (*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Selama tahun 2016 tidak ada terjadinya perubahan komposisi dan jumlah Dewan Komisaris Bio Farma sehingga tidak adanya kegiatan orientasi bagi Dewan Komisaris baru.

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka mendukung serta membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi advise atau memberi arahan, kontrol atau melakukan pengawasan, dan approve atau memberikan persetujuan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite – Komite yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG.

Dalam pelaksanaan fungsinya, komite telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite dan program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dalam satu tahun. Selama tahun 2016 Dewan Komisaris menilai peran, fungsi serta rekomendasi yang diberikan komite telah sangat efektif berkontribusi dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, komite-komite tersebut secara intensif mengadakan pertemuan dengan Direksi terkait, satuan pengawasan intern (SPI) serta Divisi *Compliance & Risk Management* (CRM), rekomendasi dari komite telah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perusahaan dan memberikan pandangan dan masukan secara keseluruhan atas laporan kinerja Direksi kepada RUPS. Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerjanya. Atas masukan dari Komite-komite tersebut Dewan Komisaris dapat melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian di seluruh unit kerja, unit bisnis, sesuai kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.

Komite Audit

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya memberikan masukan bagi Dewan Komisaris:

1. Laporan Direksi, khususnya laporan keuangan,
2. RKAP Tahun 2016.
3. Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Evaluasi Rencana Pendirian Anak Perusahaan.
5. *Self Assessment* GCG PT Bio Farma.
6. Evaluasi Penjualan Vaksin Polio.
7. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) SPI,
8. Menelaah independensi dan obyektivitas audit eksternal (KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan)
9. Menindaklanjuti dan verifikasi surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Direktur Pemasaran, Kepala Divisi terkait Pengurus HIKA Biofarma beserta Pengurus Forwan Bio Farma.
10. Menelaah atas Rancangan RKAP Tahun 2017.

Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG.

Sepanjang tahun 2016, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah memberikan masukan bagi Dewan Komisaris:

1. Tindaklanjut hasil asesmen GCG oleh BPKP Jabar, laporan final risk management tahun 2015 dan *Corporate Risk Register* tahun 2015.
2. Pembentukan anak Perusahaan klinik dan Imunisasi (APKI).
3. Rencana pendirian anak Perusahaan, perkembangan/issue UU JPH, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil assessment GCG oleh BPKP, dll.
4. Permintaan persetujuan Direksi atas perubahan struktur organisasi, penggunaan cadangan Perusahaan dan dampak PSAK 24 tahun 2014, persetujuan atas pelampauan realisasi investasi, usulan tantiem dan gaji Direksi dan Komisaris tahun 2016, serta usulan penetapan KAP untuk audit laporan tahunan 2016.
5. Persiapan self assessment penerapan GCG dan progres implementasi perubahan ERM dari COSO menjadi ISO 31000.
6. Laporan Manajemen Perusahaan
7. Verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Direktur Penelitian dan Pengembangan, Direktur SDM, Direktur Keuangan, Direktur Produksi, Kepala Divisi terkait, Pengurus Hika BF serta Pengurus Forwan BF.
8. Hasil verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF, Laporan Komite Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama.
9. Risiko pemalsuan produk dan mitigasinya risiko keterlambatan suplai vaksin, risiko tidak bisa menjual ke konsumen bilateral.
10. Risiko korporat dengan tim *counterpart* manajemen PT Bio Farma (Persero) : risiko kerugian kurs, dan risiko keterlambatan realisasi investasi.
11. Risiko perusahaan terkait kebijakan dan regulasi yang berdampak pada kualitas : persiapan sertifikasi produk halal, pembahasan risiko korporat “ketidaksiapan produksi vaksin influenza”.



PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD MANUAL (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS)

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Organ Perusahaan, harus menjadi teladan yang baik (*role model*) bagi setiap Insan Bio Farma. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Bio Farma.

Board Manual merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktek-praktek terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan dari Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi

1. Menjadi rujukan dan/atau pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai organ Perseroan.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Menerapkan prinsi-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran)

Board Manual merupakan *living document* sehingga senantiasa ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan-perubahan atas *Board Manual* harus berdasarkan kesepakatan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pedoman dan tata tertib kerja (*Board Manual*) Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama Direksi dan Dewan Komisaris. *Board Manual* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Pelaksanaan Board Manual Dewan Komisaris

Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Peraturan Pemerintah, diantaranya:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

URAIAN DEWAN KOMISARIS

2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN

Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya:

1. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
3. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP).
4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
5. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Perusahaan Tentang Pedoman Pelaksanaan *Board Manual* Dewan Komisaris

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).
3. Piagam Dewan Komisaris (*Commissioners Charter*) yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama SK Dekom Nomor : 17/DK/BF/XI/2014 Tanggal 3 November 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Diatur Dalam *Board Manual* dan Piagam (*Charter*) Dewan Komisaris Mengatur Aspek:

1. Program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris Baru.
2. Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.
3. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris.
4. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris.
5. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Tugas, wewenang dan Kewajiban serta Pembagian tugas Dewan Komisaris.
7. Ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Dewan Komisaris yang lowong.
8. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang.
9. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan RKAP.
10. Kewajiban Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*).
11. Pengelolaan Manajemen Risiko.
12. Sistem Pengendalian Internal.
13. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
14. Etika berusaha dan anti korupsi.
15. Larangan mengambil keuntungan pribadi.



16. Organ pendukung Dewan Komisaris
17. Rapat Dewan Komisaris
18. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris
19. Rapat antara Komite Dewan Komisaris dengan *Counterpart* Dewan Komisaris
20. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris
21. Kebijakan informasi yang harus Disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris
22. Kebijakan Informasi Perubahan Lingkungan Bisnis
23. Kebijakan dalam Merespon Saran, Harapan, Permasalahan, dan Keluhan dari *Stakeholder* dan Menyampaikan Saran Penyelesaian kepada Direksi
24. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan Pelaksanaannya
25. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
26. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan
27. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya
28. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan serta Pelaksanaannya
29. Kebijakan Komisarisan dan Pemberian Nasihat atas Kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan Perjanjian dengan Pihak Ketiga
30. Kebijakan atas Pemantauan Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Pengurusan Perusahaan terhadap RKAP dan/atau RJPP
31. Kebijakan Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Terhadap Tindakan Direksi yang Memerlukan Persetujuan/Rekomendasi Dewan Komisaris
32. Kebijakan atas Proses Penunjukan Calon Auditor Eksternal dan/atau Penunjukan Kembali Auditor Eksternal dan Penyampaian Usulan Calon Auditor Eksternal kepada RUPS
33. Kebijakan Komisarisan Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal, serta Pelaksanaan Telaah atas Pengaduan yang Berkaitan dengan BUMN yang Diterima oleh Dewan Komisaris
34. Kebijakan Pelaporan Kepda Pemegang Saham jika Terjadi Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan
35. Kebijakan Komisarisan dan pemberian nasihat atas Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan dan Pelaksanaannya
36. Kebijakan atas Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
37. Kebijakan atas Seleksi dan Pengusulan Calon Direksi Kepada Pemegang Saham
38. Kebijakan atas Penilaian Kinerja dan Pelaporan kepada Pemegang Saham
39. Kebijakan dan Pengurusan Remunerasi Direksi
40. Kebijakan Pemantauan Penerapan Prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)
41. Kebijakan Pengukuran dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
42. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
43. Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS)



Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PROFESIONALISME DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).

Dalam rangka memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, keberadaan Komisaris Independen adalah sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bio Farma, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Disadari bahwa menurut UUPT semua komisaris pada hakekatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dengan demikian tanpa harus mempertentangkan, pengertian Komisaris Independen di dalam UUPT sama dengan anggota Dewan Komisaris.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, Komisaris Independen Bio Farma telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan
3. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
4. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya

6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris Bio Farma telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bio Farma saat ini adalah 6 (enam) orang, 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 33% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN mengenai Komisaris Independen.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS INDEPENDEN BIO FARMA

Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor : SK-97/MBU/06/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Serta Pengukuhan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Tanggal 22 Juni 2015 yang berisikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014 mengukuhkan Paruli Lubis dan Heridadi sebagai Dewan Komisaris menjadi Komisaris Independen.

2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang dikukuhkan sebagai Komisaris Independen merujuk masa jabatan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor KEP-392/MBU/2012 tanggal 5 November 2012 dan SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014

Nama	Jabatan	Tanggal Pertama Kali Menjabat	Dasar Pengangkatan/ Pemberhentian
		Akhir Masa Jabatan	
Paruli Lubis	Komisaris Independen	22 Juni 2015	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015
Heridadi	Komisaris Independen	22 Juni 2015	Kep Men BUMN Nomor: SK-97/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut.

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* yang lain.

3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil.
4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku.
5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

WEWENANG KOMISARIS INDEPENDEN

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite risiko, pengembangan dan GCG.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.



PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT BIO FARMA (PERSERO)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Paruli Lubis
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Pengangkatan : 22 Juni 2015

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairnes di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2016



Paruli Lubis

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN
PT BIO FARMA (PERSERO)

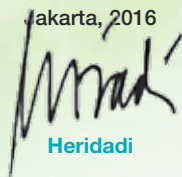
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Heridadi
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal Pengangkatan : 22 Juni 2015

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
2. Mampu melaksanakan perbuatan tidak melawan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
7. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
8. Tidak memiliki kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di PT Bio Farma (Persero) dan atau perusahaan lain.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Demikian pernyataan independensi dan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya atas kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 2016

Heridadi

URAIAN DIREKSI

MEMBANGUN GCG TIDAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN TETAPI MEMERLUKAN KOMITMEN, KONSISTENSI DAN KESUNGGUHAN DARI BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT YAITU MANAJEMEN PERUSAHAAN, KARYAWAN, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, PEMERINTAH SERTA STAKEHOLDER LAINNYA



Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Pelaksanaan tugas Direksi Bio Farma berjalan dengan efektif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah anggota Direksi Bio Farma harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Seluruh anggota Direksi Bio Farma harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUHAN DIREKSI

Seluruh Anggota Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit & proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lainnya. Seluruh anggota Direksi Bio Farma memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Hal tersebut terbukti dengan lulusnya *fit and proper test*

URAIAN DIREKSI

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Direksi

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Pelaksana	Representasi	Lulus <i>Fit & Proper Test.</i>
Iskandar	Direktur Utama	07 Juli 2012	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Juliman	Direktur Produksi	12 April 2013	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12 April 2013	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	07 Juli 2012	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	12 April 2013	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus
Andjang Kusumah	Direktur SDM	07 Maret 2012	Kementerian BUMN	Negara Republik Indonesia	Lulus

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Direksi dilakukan melalui tahap *fit & proper test*.

DASAR PENGANGKATAN DIREKSI
BIO FARMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria/Persyaratan Menjadi Direksi

Berdasarkan peraturan di atas dijelaskan tentang kriteria/persyaratan menjadi anggota Direksi sebagai berikut:

- Persyaratan Forma Direksi Perseroan** adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - Dinyatakan pailit
 - Menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit.
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Persyaratan Materiil

Persyaratan materiil Direksi BUMN, yaitu:

- Keahlian;
- Integritas;
- Kepemimpinan;
- Pengalaman;
- Jujur;
- Perilaku yang baik; dan
- Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:

- Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif



- terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
- Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
 - Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut.
 - Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.
 - Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.

ALASAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Alasan Pemberhentian dan Berakhirnya Jabatan

- Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS atau Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- Alasan Pemberhentian antara lain:
 - Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - Telah ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara.
 - Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN.
 - Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - Mengundurkan diri.
 - Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS atau Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain karena terjadinya ketidakharmonisan antar Anggota Direksi.
- Apabila terjadi perbedaan antara ketentuan Peraturan Menteri ini dengan Anggaran Dasar BUMN mengenai alasan pemberhentian, maka yang berlaku adalah ketentuan Anggaran Dasar.
- Jabatan Direksi berakhir apabila:
 - Meninggal dunia
 - Masa jabatannya berakhir
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- Rangkap jabatan yang dilarang sebagai mana dimaksud pada angka 4 huruf c antara lain sebagai berikut:
 - Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta
 - Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
 - jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
 - pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
 - jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
- Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 5, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali :
 - Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.

URAIAN DIREKSI

- b. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.
7. Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 4, masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
- Tata Cara Pemberhentian Direksi**
1. Deputi Teknis melakukan evaluasi terhadap Direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Menteri.
 2. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi dan Sekretaris menyampaikan usulan pemberhentian Direksi BUMN kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
 3. Penyampaian usulan pemberhentian disertai dengan:
 - a. Penjelasan mengenai alasan pemberhentian;
 - b. Konsep surat keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS tentang pemberhentian, atau surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS mengenai pemberhentian, atau surat kuasa untuk melakukan pemanggilan/penerimaan pembelaan diri dalam hal pemberhentian akan dilakukan di luar RUPS.
 4. Rencana pemberhentian Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
 5. Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri, dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa kepada Deputi Teknis untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
 6. Menteri dapat menugaskan Deputi dan/atau Sekretaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk melakukan pemberitahuan.
 7. Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 8. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberitahu.
 9. Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
 10. Apabila Direksi yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak keberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu dianggap telah terpenuhi.
 11. Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh Direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
 12. Apabila Direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara tersebut.
 13. Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 14. Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Deputi Teknis dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
 15. Menteri dapat memberhentikan Direksi berdasarkan hasil evaluasi Menteri sendiri selain yang diusulkan oleh Deputi Teknis.
 16. Dalam proses pemberhentian, Menteri dapat meminta pertimbangan Deputi Teknis dan/atau Sekretaris.
 17. Penetapan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan melalui cara:
 - a) Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - b) Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.



18. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputy Teknis dan Sekretaris memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
19. Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa kepada Deputy Teknis untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
20. Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputy dan/atau Sekretaris untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
22. Pemberhentian anggota Direksi dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan.

SUSUNAN DIREKSI BIO FARMA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara Nomor: SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013 dan Kep. Men. BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 4 Februari 2013 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma, komposisi Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham yang melaksanakan pengelolaan Perusahaan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan visi dan misi.

Pada tahun 2016 tidak adanya perubahan jumlah dan komposisi Direksi Bio Farma. Sampai dengan 31 Desember 2016, Direksi Bio Farma berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur dengan komposisi dan dasar pengangkatan sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Tanggal Efektif	Dasar Pengangkatan
Iskandar	Direktur Utama	Indonesia	07 Juli 2012 12 April 2013	Kep Men BUMN Nomor: SK-285/MBU/2012 Kep Men BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013
Juliman	Direktur Produksi	Indonesia	12 April 2013	Kep Men BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Indonesia	12 April 2013	Kep Men BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013
Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	Indonesia	07 Juli 2012 12 April 2013	Kep Men BUMN Nomor: SK-285/MBU/2012 Kep Men BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Indonesia	12 April 2013	Kep Men BUMN Nomor: SK-221/MBU/2013
Andjang Kusumah	Direktur SDM	Indonesia	04 Februari 2013	Kep Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma di Luar RUPS Nomor: SK-116/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012 Jo. Kep Men BUMN Nomor: SK-69/MBU/2013 tanggal 04 Februari 2013

Riwayat singkat dari masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

URAIAN DIREKSI

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan bagian dari Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional Perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Direksi harus mampu mengambil keputusan secara efektif, tepat, cepat dan bertindak independen sekaligus bertanggung jawab dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta sistem manajemen risiko secara konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman dan Kebijakan Penetapan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang baik dan menerapkan GCG yang berkelanjutan, dalam penetapan tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Bio Farma mengacu pada pedoman dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

3. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA**TUGAS DIREKSI BIO FARMA**

Tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

WEWENANG DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi memiliki kewenangan untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Karyawan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern. Untuk Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawas Intern dilakukan berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan

segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

9. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dengan batasan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyewakan aset.
Direksi dapat menyewakan aset Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan nilai sewa/transaksi sampai dengan 1% dari pendapatan (*revenue*) atau 2% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - b. Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha.
Direksi dapat melakukan Kerjasama Operasi dan Kerjasama Usaha dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*) atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - c. Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/ BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/ BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*).
Direksi dapat melakukan Kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan nilai aset Perusahaan yang dikerjasamakan sampai dengan 6% dari pendapatan (*revenue*) atau 6,5% sampai dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - d. Kontrak Manajemen dan Kerjasama Lainnya.
Direksi dapat melakukan kerjasama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan nilai penyertaan (aset Perusahaan yang dikerjasamakan) sampai dengan 2,5% dari pendapatan (*revenue*), atau 5% dari ekuitas (*equity*) Perusahaan, mana yang lebih kecil.
 - e. Pelaksanaan tindakan tersebut pada huruf a, b, c dan d, harus disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh

URAIAN DIREKSI

kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

KEWAJIBAN DIREKSI BIO FARMA

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berkewajiban untuk:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntan Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan perusahaan serta dokumen perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
14. Memberi laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
18. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Direksi guna dimintakan persetujuan RUPS.
19. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pembagian Tugas dan Wewenang
Setiap Anggota Direksi Bio Farma**

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi tidak menghilangkan tanggungjawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perusahaan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dijabarkan dalam Bagan Organisasi Perusahaan yang penetapannya melalui persetujuan Dewan Komisaris.



Kewajiban Direksi Bio Farma Yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP)

1. Direksi wajib menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. RJP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya.
 - b. Posisi Perusahaan saat ini.
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP.
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJP disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Kewajiban Direksi Bio Farma Yang Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

1. Direksi wajib menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
2. RKAP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran, strategi, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan.
 - b. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan.
 - c. Proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaannya.
 - d. Program kerja Dewan Komisaris.
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
3. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
4. Rancangan RKAP yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku RKAP yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
5. Rancangan RKAP disetujui oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).

6. Dalam hal rancangan RKAP belum disampaikan oleh Direksi dan/atau RKAP belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka RKAP tahun sebelumnya yang diberlakukan.
7. Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.

Kewajiban Direksi Bio Farma Yang Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report)

1. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, dan pada akhir tahun bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan.
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, jika ada.
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau.
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

URAIAN DIREKSI

4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan tidak memberi alasannya secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.
9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh RUPS berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS untuk kepentingan Pemegang Saham.
11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Kewajiban Direksi Bio Farma Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Laporan Berkala

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan RKAP.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi laporan triwulan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau RUPS.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 di atas, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pengelolaan Manajemen Risiko Bio Farma

1. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
 - a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi atau
 - b. Memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.



Sistem Pengendalian Internal Bio Farma

1. Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
2. Sistem pengendalian intern antara lain mencakup:
 - a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur yang terdiri dari:
 - Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan.
 - Filosofi dan gaya manajemen.
 - Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya.
 - Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan ada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
 - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
 - e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi Bio Farma

1. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan atau perusahaan lain termasuk

rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan Perusahaan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

2. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
3. Direksi bertanggungjawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan.
4. Informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendelegasian Wewenang Bio Farma

Direksi dapat mendelegasikan kewenangan kepada anggota Direksi lainnya dan pejabat setingkat di bawah Direksi. Pendelegasian wewenang meliputi tugas, tanggung jawab serta kewenangan, dan dibuat secara tertulis. Setiap pendelegasian wewenang dilakukan melalui analisis terhadap pekerjaan yang akan didelegasikan dan kompetensi orang yang akan menerima pendelegasian wewenang.

Pada tahun 2016 terdapat 22 kali pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada anggota Direksi lainnya melalui surat kuasa.

URAIAN DIREKSI

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Untuk kelancaran tugasnya Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Direksi mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga harus melaksanakan kepentingan Perusahaan sesuai dengan visi dan misi serta mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No. 03807/DIR/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016, tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) tahun 2016:

Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
Iskandar	Direktur Utama	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Merencanakan dan mengevaluasi arah bisnis perusahaan agar sesuai dengan visi perusahaan - Mewakili perusahaan dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain - Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi perusahaan - Memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya - Memperhatikan kepentingan dari stakeholders sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Juliman	Direktur Produksi	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Mendukung Direktur Utama dalam menetapkan arah bisnis perusahaan melalui perencanaan, penerapan, dan pengevaluasian tata cara pengelolaan produksi Perusahaan - Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan produksi, termasuk kebijaksanaan kualitas produk Standar Nasional dan Internasional.
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah bisnis perusahaan melalui perencanaan dan pengevaluasian tata cara pengembangan produk Perusahaan dan mendukung efektivitas - Efisiensi proses produksi, dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan produk perusahaan dengan mempertimbangkan pasar dalam negeri dan global.
Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah bisnis perusahaan melalui perencanaan dan pengevaluasian tata cara pengelolaan pemasaran Perusahaan - Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pemasaran perusahaan.



Nama Direksi	Jabatan	Bidang Tugas
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Membantu Direktur Utama dalam menetapkan arah bisnis Perusahaan melalui perencanaan dan pengevaluasian tata cara pengelolaan keuangan Perusahaan - Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan, menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan keadaan dan jalannya Perusahaan dalam bentuk laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Andjang Kusumah	Direktur SDM	Bertugas dan bertanggung jawab untuk - Mendukung Direktur Utama dalam menetapkan arah kebijakan Perusahaan dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan logistik Perusahaan, Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Penyelenggaraan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) - Menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi: performance & reward management system, talent management, knowledge management, dan pengembangan organisasi, menetapkan kebijakan-kebijakan pengelolaan logistik, teknologi informasi, dan penyelenggaraan kegiatan CSR & PKBL.

RENCANA KERJA DIREKSI TAHUN 2016

Kepengurusan

- Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017 - 2021
- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2015 berdasarkan Standar Akuntan Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2015 yang telah disahkan oleh RUPS kepada menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan per Triwulan tahun 2016 ditandatangani oleh semua anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- Menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - Laporan keuangan, Laporan mengenai kegiatan Perusahaan, Laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama tahun 2015, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2015, Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun 2015, Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, Akuntan Publik ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris,

URAIAN DIREKSI

7. Menyusun struktur Organisasi Perusahaan tahun 2016 lengkap dengan perincian dan tugasnya.
8. Pemenuhan target kinerja Perseroan berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi
9. Pengelolaan aset dan keuangan Perseroan,
10. Melakukan inovasi dan diversifikasi produk dengan meningkatkan peran penelitian dan pengembangan.
11. Meningkatkan efisiensi biaya dalam pengadaan barang/jasa, pemakaian bahan baku/penolong serta perbaikan proses kerja.
12. Membentuk anak perusahaan klinik dan imunisasi.
13. Menyempurnakan *supply chain management* dan *costing* dengan berbasis teknologi informasi.
14. Meningkatkan dan mempertahankan cGMP, sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan lingkungan dan K3.
15. Meningkatkan peran Bio Farma di dunia Internasional terutama di negara-negara berkembang khususnya yang berkaitan dengan vaksin.
16. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Direksi guna dimintakan persetujuan RUPS.
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Menyusun Laporan Manajemen Risiko Korporat (ERM) dan penanganannya bersamaan dengan Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta *monitoring* implementasi manajemen risiko korporat.
5. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha dengan mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
6. Monitoring dan sosialisasi regulasi baru atau perubahan regulasi yang berkaitan dengan aktivitas Perusahaan.
7. Melakukan konsultasi implementasi GCG, ERM, aplikasi IT GRC dan KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul).
8. Melakukan *review*, pemutakhiran dan sosialisasi atas kebijakan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sesuai aturan yang berlaku.
9. Mendampingi pelaksanaan *assessment* penerapan GCG, dan melakukan perbaikan atas rekomendasinya.
10. Implementasikan aplikasi IT GRC
11. Menyusun kebutuhan pelatihan di bidang hukum, tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko di Divisi CRM.
12. Menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara optimal dan berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan risiko Perusahaan.
13. Melakukan review kajian analisa risiko setiap proses kegiatan yang terkait kualitas, lingkungan dan K3.

Manajemen Risiko/Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

1. Melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri disertai dengan Pakta Integritas yang berisi pernyataan Direksi bahwa pelaksanaan tindakan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan itikad baik, tanpa pengaruh pihak lain dan tanpa benturan kepentingan, serta dengan penuh kehati-hatian untuk kepentingan terbaik bagi Perusahaan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Setiap pengambilan keputusan/tindakan mempertimbangkan risiko usaha.
3. Membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

Pengendalian Internal

1. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
2. Menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.
3. Melakukan aktivitas pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja di Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.

4. Monitoring penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap unit kerja yang ada di Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
5. Melakukan pemeriksaan/audit internal sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016.
6. Melakukan pemeriksaan rutin aktivitas keuangan, pemasaran dan pengadaan barang & jasa.
7. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari objek pemeriksaan atas LHP audit internal maupun LHP audit eksternal.
8. Melakukan kas opname Perusahaan triwulanan dan opname fisik persediaan barang jadi dan bahan baku pada akhir tahun 2016.
9. Menjadi *Counterpart* Pemeriksa/Auditor eksternal seperti Kantor Akuntan Publik/KAP, BPK dan BPKP.
3. Membuat ruang terbuka hijau serta meningkatkan kebersihan di sekitar lingkungan Perusahaan.
4. Melakukan upaya 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*) dalam penanganan limbah, kerjasama dengan mitra binaan
5. Penyusunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2016
6. Bantuan pinjaman modal tahun 2016 direncanakan akan disalurkan kepada 200 unit usaha kecil dan koperasi dan untuk sinergi BUMN kepada 1 lembaga BUMN.
7. Kelanjutan Pelaksanaan Kegiatan Program Kemitraan khususnya penyaluran bantuan pinjaman modal.
8. Penyaluran Program Kemitraan Tahun 2016 berdasarkan Wilayah dan Sektor Usaha
9. Penyaluran Program Bina Lingkungan Tahun 2016 Berdasarkan Wilayah dan Jenis Bantuan
10. Bantuan hibah pendidikan, pelatihan, pemasaran dan promosi mitra binaan dialokasikan dari dana Bantuan Lingkungan.

Komunikasi

1. Melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri
2. Membuat Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
3. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
4. Penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
5. Rapat Rutin Internal Direksi
6. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
7. Rapat internal Direksi dapat melibatkan Kepala Divisi atau Bagian yang terkait
8. Program Kunjungan Kerja Ke Lapangan/
Monitoring
 - d. Kunjungan berkala (Dalam Negeri)
 - e. Kunjungan berdasarkan kebutuhan (Luar Negeri)

Tanggung Jawab Sosial

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem manajemen lingkungan dan K3.
2. Melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan PROPER.

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI TAHUN 2016

Sepanjang tahun 2016, Direksi Bio Farma telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Kepengurusan

1. Menyusun Program Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2017 - 2021.
2. Menyusun Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2017.
3. Kinerja Perusahaan tahun 2016 dari sisi penjualan mencapai Rp2,32 triliun menurun sebesar 1,30% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan mencapai 79,34% dari anggarannya.
4. Beban pokok penjualan & jasa sebesar Rp1 triliun meningkat 15,89% dibandingkan realisasi tahun 2015 dan mencapai 90,16% dari anggarannya.
5. Perolehan laba bersih perusahaan menurun sebesar 25,28% dari realisasi tahun 2015 menjadi sebesar Rp501,04 miliar atau mencapai 66,08% dari anggarannya.

URAIAN DIREKSI

6. Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan tahun 2016 mendapat skor 81,60 dengan kriteria “SEHAT AA”, tahun sebelumnya 88,50 dengan kriteria “SEHAT AA”.
7. Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) memperoleh nilai 89,41 dari total nilai 100.
8. Pencapaian penjualan tahun 2016 baik per kelompok produk maupun per sektor mencapai 79,34% dari anggarannya.
9. Realisasi beban produksi tahun 2016 untuk memproduksi produk jadi maupun produk dalam proses sebesar Rp1,12 triliun atau sebesar 105,95% dari anggarannya. Apabila dibanding dengan realisasi tahun 2015 naik sebesar 16,86%.
10. Dilaksanakannya penelitian dan pengembangan vaksin, surveilans & evaluasi produk.
14. Penyusunan *Sustainability Report* Bab Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Produk.
15. Koordinasi Program aplikasi ERM: Sso, *schema*, & konversi *source code*.
16. Pembuatan daftar dokumen *Assessment* GCG Tahun 2015/2016.
17. Penyusunan Laporan Implementasi KPKU Tahun 2016.
18. Pembahasan *Corporate Risk Register*-Risiko realisasi investasi tidak sesuai jadwal.
19. Revisi pedoman penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) di PT Bio Farma sesuai rekomendasi *assesment* GCG oleh BPKP Jabar.
20. Penyusunan materi presentasi *Induction Training* karyawan baru untuk aspek GCG Bio Farma.

Manajemen Risiko/Implementasi Good Corporate Governance (GCG)

Pada tahun 2016 kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. *Benchmarking* Implementasi GCG, CRM, Culture dan Corsec
2. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Pembuatan Laporan Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG)
4. Finalisasi Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bab Tata Kelola Perusahaan Tahun 2015 untuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Penyebaran Kuesioner *Self Assessment* GCG untuk Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Staf, Staf Muda, dan Pelaksana.
6. Tabulasi Kuesioner *Self Assessment* GCG.
7. Finalisasi Scorecard *Self Assessment* GCG.
8. Finalisasi Laporan Hasil *Self Assessment* PT Bio Farma (Persero).
9. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Bio Farma (Persero) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
10. Pembahasan Program Aplikasi ERM.
11. Koordinasi Mitigasi & *Action Plan* Risiko Korporat (Tindak Lanjut Penanganan Risiko Korporat).
12. Sosialisasi Pedoman GCG dan Pakta Integritas.
13. Penyerahan Laporan ERM Unit dan Rencana Tindak Lanjut Penanganan Risiko Unit.

Pengendalian Internal

Realisasi kegiatan Pengendalian internal pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2015
2. Melakukan pemeriksaan/audit internal di beberapa bagian yang ada di Bio Farma sesuai Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2016 serta dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
3. Melakukan pemeriksaan diluar PKPT/Non PKPT yaitu melakukan pemeriksaan rutin aktivitas keuangan, pemasaran dan pengadaan barang & jasa.
4. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut dari objek pemeriksaan atas LHP audit internal maupun LHP audit eksternal.
5. Melakukan kas opname Perusahaan per Triwulan tahun 2016 dan opname fisik persediaan barang jadi dan bahan baku pada akhir tahun 2016
6. Menjadi *Counterpart* Pemeriksa/Auditor eksternal seperti Kantor Akuntan Publik/KAP, BPK dan BPKP.

Komunikasi

Realisasi kegiatan komunikasi pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama baik dalam maupun luar negeri dengan mempertimbangkan manajemen risiko Perusahaan.
2. Membuat Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
3. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2015 termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
4. Penyajian laporan tahun 2015 mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perusahaan.
5. Rapat Rutin Internal Direksi
6. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi
7. Rapat internal Direksi dapat melibatkan Kepala Divisi atau Bagian yang terkait
9. Kunjungan Kerja Ke Lapangan/*Monitoring* ke dalam dan luar negeri.

Tanggung Jawab Sosial

1. Penyaluran Program Kemitraan periode Januari-Desember 2016 sebesar Rp5,73 miliar yang disalurkan kepada 240 Mitra Binaan yang terdiri dari Usaha Kecil dan Koperasi.
2. Melakukan realokasi anggaran Program Bina Lingkungan yang berasal dari pos Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum sebesar Rp450 juta, pos Bantuan Sarana Ibadah sebesar Rp200 juta dan pos Bantuan Pelestarian Alam sebesar Rp100 juta.
3. Penyaluran dana bantuan Program Bina Lingkungan Tahun 2016 sebesar Rp13.438.109.093 disalurkan dalam bentuk bantuan sebagai berikut:
 - a. Bantuan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum antara lain bantuan pembangunan kantor RW, pemberian bantuan roda sampah, bantuan seragam untuk petugas sampah, bantuan pembangunan

MCK, pembangunan penahan badan jalan serta pembangunan sarana air bersih untuk masyarakat umum.

- b. Bantuan untuk peningkatan kesehatan masyarakat antara lain berupa pemberian bantuan vaksinasi flubio dan pengobatan gratis, bantuan peralatan kesehatan untuk poliklinik, bantuan sarana dan perlengkapan untuk posyandu serta bantuan pembangunan gedung unit gawat darurat di Puskesmas.
- c. Bantuan untuk perbaikan tempat ibadah serta pemberian bantuan perlengkapan untuk rumah ibadah.
- d. Bantuan untuk pendidikan dan /atau pelatihan berupa bantuan perlengkapan untuk kegiatan olah raga serta bantuan berupa sarana untuk kegiatan pendidikan di pondok pesantren dan PAUD, serta pemberian bantuan berupa beasiswa.
- e. Bantuan untuk sosial kemasyarakatan berupa pemberian bantuan peralatan dan penunjang usaha yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro yang berlokasi disekitar dan di luar lingkungan perusahaan serta pemberian bantuan peralatan penunjang usaha untuk kelompok PKK.
- f. Bantuan pelestarian alam berupa bantuan bibit pohon bambu di Kab. Bogor, penanaman pohon berwarna di Geopark Kab.Sukabumi dan penanaman pohon di Kab. Pangandaran serta adopsi pemeliharaan satwa Primata di PPS Cikananga Kabupaten Sukabumi.
- g. Bantuan bencana alam angin puting beliung, banjir di Kabupaten Bandung, bencana longsor di Andir Lembang.
- h. Bantuan pendidikan dan latihan, pemasaran, dan promosi Mitra Binaan disalurkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan kegiatan Temu Mitra untuk menjalin kerja sama dan sinergi usaha di antara Mitra Binaan.
4. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Periode tahun 2016 periode Januari s.d Desember berdasarkan jenis bantuan dan wilayah.

URAIAN DIREKSI

Realisasi Anggaran Direksi

Jumlah Anggaran Beban Direksi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp43,97 miliar dan realisasi Beban Direksi sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp29,61 miliar atau terealisasi sebesar 67,34% dari anggaran.

Pertanggungjawaban Direksi

1. Direksi menyusun pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.
2. Laporan tahunan memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan memperoleh pengesahan RUPS.
3. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
4. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Rencana Kerja Direksi Tahun 2017

1. Gambaran Umum
 - a. Analisis Internal
 - b. Analisis Eksternal
 - c. Peran Strategis Bio Farma
2. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2017
3. Risiko Perusahaan
 - a. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional.
 - b. Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung.

- c. Keluar/Pindahnya yang Memiliki Talenta dan Potensi Tinggi.
 - d. Tidak Terserapnya Persediaan Produk.
 - e. Kinerja Manajemen dan Karyawan Tidak Mencapai Target KPI.
 - f. Pemalsuan Produk Bio Farma.
 - g. Munculnya Berita Negatif Mengenai Perusahaan di Media Massa Mainstream.
 - h. Implementasi MRP Tidak Sesuai Target.
4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Korporat Tahun 2017
 - a. Sasaran Perusahaan
 - b. Strategi Perusahaan
 - c. Kebijakan Perusahaan
 5. Program Kerja Per Bidang
 - a. Pemasaran
 - b. Produksi
 - c. Penelitian dan Pengembangan
 - d. Organisasi
 - e. Sumber Daya Manusia
 - f. Keuangan dan Pengadaan
 - g. Rencana Kerjasama Tahun 2017
 6. Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP 2017 Dibanding Dengan RJPP 2017
 7. Anggaran Perusahaan
 - a. Penjualan
 - b. Produksi
 - c. Beban Peningkatan & Pengembangan SDM
 - d. Pembelian
 - e. Beban Perusahaan
 - f. Beban Pokok Penjualan
 - g. Investasi dan Sumber Pembiayaan
 8. Proyeksi Keuangan Tahun 2017
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - b. Laporan Laba/Rugi Komprehensif
 - c. Perubahan Ekuitas
 - d. Arus Kas
 - e. Rasio Keuangan
 - f. Tingkat Kesehatan Perusahaan
 - g. *Key Performance Indicators* (KPI)
 9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI DIREKSI DAN PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan pengetahuan, kompetensi, dan menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Selama tahun 2015, Direksi telah mengikuti program pelatihan, seminar, *workshop*, sosialisasi atau loka karya sebagai berikut:

No.	Nama	Topik	Tanggal	Penyelenggara	Tempat Pelatihan
1	Andjang Kusumah	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	12-Mei-16	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali
		<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan
2	Iskandar	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	12-Mei-16	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali
		<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan
3	Juliman Fuad	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	12-Mei-16	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali
		<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan
4	Mahendra Suhardono	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	12-Mei-16	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali
		<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan
5	Pramusti Indrascaryo	Mekanisme hukum dan strategi pengembangan bisnis Bio Farma terkait dengan rencana Holding BUMN Farmasi	12-Mei-16	Bio Farma/KBUMN	Inna Garuda Bali
		<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan
6	Sugeng Raharso	<i>Performance Management System</i>	09-Des-16	Dunamis	Adimulia Hotel Medan

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Pedoman Pelaksanaan Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Orientasi Direksi Baru Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
2. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN.
3. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).

Dalam rangka pengembangan kompetensi dan pengenalan perusahaan khusus Direksi, Bio Farma memiliki dan menjalankan program pengenalan bagi anggota Direksi baru yang bertujuan memberikan gambaran aktivitas bisnis, strategi, rencana jangka panjang perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab Direksi.

Program orientasi bagi Direksi baru disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan bekerja sama dengan Divisi SDM dan divisi terkait lainnya, disampaikan dalam bentuk presentasi, pemberian dokumen laporan tahunan, *company profile*, buku sejarah perusahaan, Dokumen terkait GCG, *product knowledge*, serta diakhiri dengan kunjungan ke area produksi vaksin.

Direksi baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan baik yang skala nasional seperti Forum Riset Vaksin maupun skala internasional seperti pertemuan vaksin negara berkembang (*Developing Countries Vaccine Manufacturer Networks*) serta *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Selama tahun 2016 tidak ada perubahan anggota Direksi Bio Farma jadi tidak adanya Program Orientasi bagi Direksi Baru.





PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Per 31 Desember 2016, Bio Farma tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Direksi dan dasar penilainya.

PENGUNGKAPAN MENGENAI BOARD MANUAL (PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA) DIREKSI

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi kepengurusan perseroan serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, Direksi berpedoman pada Pedoman Direksi yang termuat dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi.

Board Manual merupakan *living document* sehingga secara berkala harus selalu dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan *Board Manual* Direksi

1. Sebagai panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas dan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
3. Menjabarkan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pedoman Pelaksanaan *Board Manual* Direksi

1. Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

2. Peraturan Pemerintah, diantaranya:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.

3. Peraturan Menteri Negara BUMN, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-16/MBU/2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.

URAIAN DIREKSI

- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2010 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN

4. Keputusan Menteri Negara BUMN, diantaranya:

- a. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-104/MBU/2002 tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- b. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara.
- c. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP).
- d. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
- e. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.
- f. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-09A/MBU/2002 tentang Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Perusahaan Tentang Pedoman Pelaksanaan Board Manual Direksi

- 1. Anggaran Dasar Perusahaan
- 2. *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris Bio Farma ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013 dan Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Bio Farma (Persero).
- 3. Piagam Dewan Komisaris (*Commissioners Charter*) yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama SK Dekom Nomor : 17/DK/BF/XI/2014 Tanggal 3 November 2014.

Pedoman Direksi yang diatur dalam Board Manual antara lain mengatur aspek:

- 1. Program pengenalan bagi anggota Direksi Baru.
- 2. Program pelatihan bagi anggota Direksi.
- 3. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4. Tugas, wewenang dan Kewajiban serta Pembagian tugas Direksi.
- 5. Ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Direksi yang lowong.
- 6. Benturan kepentingan.
- 7. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan rencana jangka panjang.
- 8. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan penyusunan RKAP.
- 9. Kewajiban Direksi berkaitan dengan penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report).
- 10. Pengelolaan Manajemen Risiko.
- 11. Sistem Pengendalian Internal.
- 12. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
- 13. Etika berusaha dan anti korupsi.
- 14. Larangan mengambil keuntungan pribadi.
- 15. Rapat Direksi.
- 16. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas dan wewenang yang sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG secara konsisten. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut campur dalam pengambilan keputusan operasional Perusahaan.



Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan akan mempertanggungjawabkannya di RUPS.

Untuk menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan keputusan strategis Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai 2 (dua) organ Perusahaan terpenting senantiasa mengagendakan pertemuan berkala. Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat ini diselenggarakan oleh Dewan Komisaris secara berkala, antara lain untuk membahas kinerja Perusahaan bulan sebelumnya, rencana Direksi bulan mendatang untuk meraih peluang yang ada, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan Direksi mengenai:
 - a. RJPP.
 - b. Rencana Pengembangan Perusahaan.
 - c. RKAP.
 - d. Rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan.
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Intern.
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.
 - g. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku, beberapa hal membutuhkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Bersama-sama dengan Direksi melakukan kajian Visi dan Misi Perusahaan
3. Apabila diperlukan, Dewan Komisaris dibantu Direksi dalam:
 - a. Proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Perusahaan.
 - b. Penunjukan penilai (assessor) independen dalam proses *assessment* penerapan GCG di Perusahaan.
4. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa:
 - a. Dewan Komisaris menerima informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap
 - b. Dewan Komisaris memperoleh laporan secara periodik mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi.
 - c. Dewan Komisaris menerima laporan mengenai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan dan/atau Perusahaan patungan dari Perusahaan, yang telah ditetapkan dalam RUPS anak Perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
 - d. Dewan Komisaris atau Komite Penunjang Dewan Komisaris menerima penjelasan atas segala hal yang ditanyakan;
 - e. Dewan Komisaris menerima Risalah Rapat Direksi.
5. Hal-hal lainnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, *Board Manual* Dewan Komisaris & Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

URAIAN DIREKSI

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Penilaian penerapan GCG di Bio Farma mengacu pada:

1. Pasal 44 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik Pada BUMN Bab XII Tentang Pengukuran Terhadap Penerapan GCG, yang mewajibkan BUMN untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian (*assessment*), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan melakukan evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
2. Kementerian BUMN melalui Sekretaris Kementerian BUMN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 06 Juni 2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Pada Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan GCG, BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, BUMN dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DALAM
PENILAIAN

1. **Penilaian (*assessment*)**, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

2. **Evaluasi**, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Tujuan penilaian dan evaluasi penerapan GCG adalah:

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG di BUMN melalui penilaian dan evaluasi tingkat pemenuhan kriteria dengan kondisi nyata yang diterapkan di BUMN, melalui pemberian skor/ nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di BUMN, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria dengan penerapan GCG di BUMN yang bersangkutan.
- c. Memonitor konsistensi penerapan GCG di BUMN dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan corporate governance di lingkungan BUMN

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian yang menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat yang telah melakukan asesmen GCG secara berkala selama 5 periode. Pada tahun 2016 BPKP Perwakilan Jawa barat tidak melakukan asesmen GCG karena tahun 2016 merupakan periode *self assessment* untuk menilai implementasi GCG tahun 2015. *Self assessment* dilakukan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 30 Juni 2016. Adapun hasil *self assessment* mencapai skor 87,0028 yang termasuk ke dalam kategori predikat “Sangat Baik”.



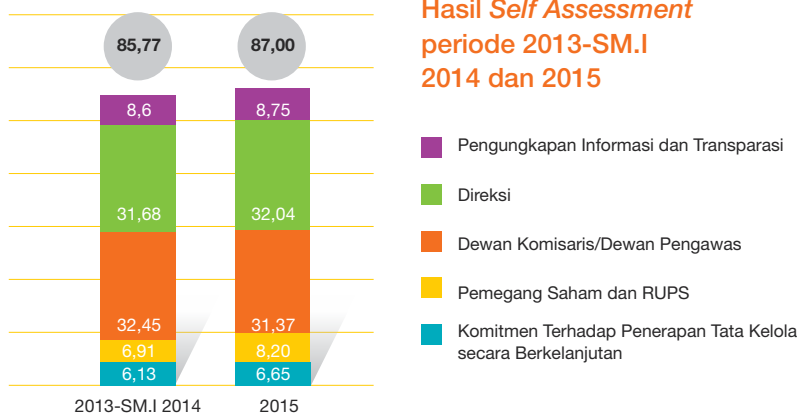
SKOR PENILAIAN MASING - MASING KRITERIA

Hasil Self Assessment Implementasi GCG pada Bio Farma tahun 2015

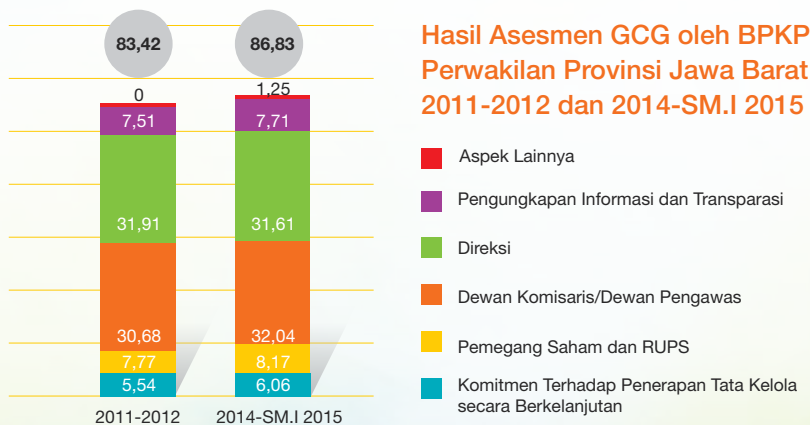
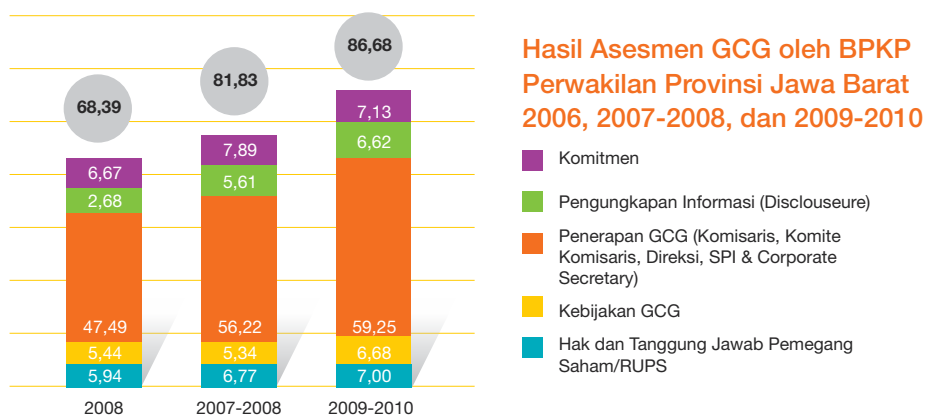
Aspek Pengujian/Indikator/Parameter	Bobot	Capaian Tahun 2015		Penjelasan
		Skor	% Capaian	
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan	7,000	6,6453	94,93	Sangat Baik
II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,000	8,1967	91,07	Sangat Baik
III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,000	31,3720	89,63	Sangat Baik
IV Direksi	35,000	32,0419	91,55	Sangat Baik
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,000	8,7471	97,19	Sangat Baik
VI Aspek Lainnya	0,000	0		
Skor Keseluruhan		87,0028		Sangat Baik

Sedangkan hasil asesmen GCG periode tahun 2006, 2007-2008 dan 2009-2010 disajikan kembali sebagai berikut:

Aspek	Bobot	Skor			% Capaian			Penjelasan		
		2006	2007-2008	2009-2010	2006	2007-2008	2009-2010	2006	2007-2008	2009-2010
Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS	9,00	5,94	6,77	7,00	66,00%	75,22%	77,78%	Cukup Baik	Baik	Baik
Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	8,00	5,44	5,34	6,68	68,00%	66,75%	83,50%	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik
Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)										
a. Dewan Komisaris	27,72	18,62	23,38	24,11	68,96%	86,59%	89,30%	Cukup Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
b. Komite Komisaris	5,28	4,25	4,97	5,31	70,83%	82,83%	88,50%	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
c. Direksi	27	19,04	22,55	24,62	70,52%	83,52%	91,19%	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
d. SPI	3	2,87	2,34	2,35	95,67%	78,00%	78,33%	Sangat Baik	Baik	Baik
e. Sekretaris Perusahaan	3	2,73	3	2,87	91,00%	100,00%	95,67%	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Pengungkapan Informasi (<i>disclosure</i>)	7,00	2,86	5,61	6,62	40,86%	80,14%	94,57%	Tidak Baik	Baik	Sangat Baik
Komitmen	10,00	6,67	7,89	7,13	66,7%	78,9%	71,3%	Cukup Baik	Baik	Cukup Baik
Jumlah	100,00	68,39	81,83	86,68	68,39%	81,83%	86,68%	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik



Sedangkan Hasil asesmen GCG periode tahun 2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, dan 2014 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat disajikan kembali sebagai berikut:



REKOMENDASI HASIL ASSESSMENT GCG OLEH BPKP PERWAKILAN JAWA BARAT

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan

- a. Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) belum dimutakhirkan dengan memuat organ-organ utama perusahaan dalam penerapan GCG.
- b. Pedoman Perilaku belum dimutakhirkan dengan memuat Penghormatan kepada Hak Intelektual dan Integritas Laporan Keuangan.
- c. Perusahaan belum mendokumentasikan setiap proses pemutakhiran Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Pedoman Perilaku.

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

- a. Pemegang Saham belum memohon secara formal dari Departemen Teknis BUMN untuk calon anggota Dewan Komisaris.
- b. Pemegang Saham/RUPS belum memberikan persetujuan/keputusan atas aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS secara tepat waktu.
- c. Pemegang Saham belum menetapkan pedoman penilaian Direksi secara individual, dan belum memberikan penilaian atas capaian kinerja Direksi secara individual dan dituangkan dalam risalah RUPS.
- d. Pemegang Saham belum menetapkan pedoman penilaian Dewan Komisaris.
- e. Pemegang Saham belum memuat penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan dalam penunjukan penetapan auditor eksternal yang dituangkan dalam Risalah RUPS.

3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

- a. Dewan Komisaris belum menyusun laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.
- b. Dewan Komisaris belum memberikan tanggapan rancangan RJPP sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam ketentuan/kebijakan.

- c. Komite Dewan Komisaris belum dilibatkan di dalam proses telaahan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja perusahaan.
- d. Komite Dewan Komisaris belum dilibatkan di dalam proses pembahasan atas saran, permasalahan atau keluhan stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- e. Dewan Komisaris belum melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi.
- f. Dewan Komisaris belum memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa.
- g. Dewan Komisaris belum mencantumkan rencana mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan belum melakukan pembahasan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
- h. Dewan Komisaris belum menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit eksternal.
- i. Dewan Komisaris belum memberikan persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris secara tepat waktu.
- j. Dewan Komisaris belum mencantumkan besarnya honorarium auditor eksternal dalam pengusulan penunjukan auditor eksternal.
- k. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utamanya yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan mempertimbangkan realisasi pencapaian masing-masing Direksi.
- l. Dewan Komisaris belum mengusulkan tantien/ insentif kinerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan dan belum melibatkan Komite Dekom dalam proses telaahannya.

- m. Dewan Komisaris belum mendokumentasikan pencapaian kinerja Dewan Komisaris (*Self Assessment*).
- n. Dewan Komisaris belum membuat surat kuasa bagi anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir di dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mewakili suaranya dalam rapat.
- o. Risalah Rapat Dewan Komisaris belum memuat penjelasan evaluasi atas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
- p. Dewan Komisaris belum memasukkan dalam program kerja tahunan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengenai rencana *self assessment* Komite tersebut.
- g. Direksi belum mendokumentasikan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi secara berjenjang.
- h. Direksi belum mendokumentasikan dan melaporkan pencapaian target kinerja Direksi secara individu kepada Dewan Komisaris.
- i. Aplikasi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap pengembangan manajemen perusahaan.
- j. Direksi belum mengoptimalkan penerapan TI sesuai dengan *masterplan* dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI.
- k. Direksi belum mengefektifkan pelaksanaan program pengembangan SDM agar tercapai target indikator keberhasilan atas program tersebut.
- l. Direksi belum menetapkan KPI individu yang mencakup indikator kinerja individu dan target kinerja setiap karyawan.
- m. Prosedur Baku Kualifikasi dan Evaluasi Rekanan belum memuat kriteria penilaian supplier dari aspek *service* dan *cost* yang diberikan.
- n. Direksi belum melaksanakan survey kepuasan pemasok yang memuat aspek *fairness* pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.
- o. Direksi belum menetapkan pengaturan mengenai pengukuran kepuasan karyawan dalam kebijakan *Human Capital* Perusahaan.
- p. Direksi belum mendokumentasikan laporan hasil survey kepuasan karyawan dan melaksanakan tindak lanjut hasil survey kepuasan karyawan.
- q. Direksi belum melampirkan Pakta Integritas dalam setiap tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
- r. Direksi belum mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam rapat Direksi dan Komisaris (RaDirKom).

4. Direksi

- a. Direksi belum menetapkan uraian tugas setiap jabatan dalam struktur organisasi/bagan organisasi.
- b. Direksi belum menyampaikan hasil assessment pejabat 1 (satu) level jabatan di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memberi kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi.
- c. Direksi belum menempatkan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan.
- d. Tindakan Direksi atas Kebutuhan (Pengadaan/Sewa) Lahan Jasinga belum didukung dengan *Business Plan* Kebutuhan (Pengadaan/Sewa) Lahan Jasinga sebagai bagian dari *Grand Design* menuju pengembangan strategis untuk menjadi industri *Life Science* dan *bio medical technology* untuk menyongsong era Bio economy 2030.
- e. Direksi belum menyelesaikan proses review pedoman *Performance Management System* (PMS) dan prosedur baku yang melengkapinya sebagai sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja unit dan jabatan dalam organisasi termasuk aplikasinya.
- f. Direksi belum menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.



- s. Direksi belum mempercepat proses pemutakhiran muatan Piagam SPI dengan menambahkan penjelasan ruang lingkup Fungsi Audit Internal dan mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern.
- t. Direksi belum meningkatkan kualitas personil SPI dengan keikutsertaan dalam sertifikasi profesi yang tepat (CIA/QIA).
- u. Direksi belum melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal dan melakukan penilaian atas program tersebut.
- v. Risalah Rapat Direksi belum memuat dinamika rapat dan *dissenting comments*.

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

- a. Perusahaan belum memuat bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi di dalam Laporan Tahunan.
- b. Perusahaan belum memuat bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun.

Tindak Lanjut Rekomendasi Penerapan GCG

No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
1	Memohon masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN untuk calon anggota Dewan Komisaris.	√			√	
2	Melaksanakan pengesahan RUPS RKAP tepat waktu.	√				√
3	Memberikan persetujuan/keputusan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Pemegang Saham secara tepat waktu. (maksimal 7 hari untuk pelepasan aset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap)	√			√	
4	Memberikan Penilaian Kinerja Direksi secara Individual dan dituangkan dalam RUPS.	√			√	
5	Menetapkan pedoman Penilaian Komisaris.	√			√	
6	Memberikan penilaian kinerja Dewan Komisaris sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris.	√				√
7	Mencantumkan besarnya honorarium/ imbal jasa untuk auditor eksternal dalam pengesahan penunjukkan auditor eksternal.	√			√	
8	RUPS melaksanakan tindak lanjut atas area of improvement yang dihasilkan dari assessment atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan.	√			√	
9	Menyusun laporan hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris.		√		√	

No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
10	Dewan Komisaris memberikan tanggapan terhadap rancangan RJPP yang mencakup semua aspek strategis RJPP		√			√
11	Memuat kebijakan/kriteria mengenai informasi lingkungan bisnis lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan termasuk mekanismenya.		√			√
12	Mendokumentasikan telaahan/ pembahasan kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis.		√			√
13	Memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan berdasarkan telaahan atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas, dan internal control report		√		√	
14	Mendokumentasikan pemberian arahan terkait pengangkatan kepala SPI		√		√	
15	Meningkatkan pemberian arahan dan nasehat tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.		√		√	
16	Memberikan persetujuan/otorisasi/ rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris secara tepat waktu		√			√
17	Mencantumkan besarnya honorarium eksternal audit dalam pengusulan penunjukan auditor eksternal.		√		√	
18	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan mempertimbangkan realisasi pencapaian masing-masing Direksi		√		√	
19	Melaksanakan penelitian terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham		√			√
20	Mendokumentasikan hasil pemantauan penerapan GCG dan pencapaian Kinerja Dewan Komisaris (Self Assessment).		√		√	√



No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
21	Menyempurnakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor KEP-17/DK/BF/XI/2014 tentang Tata Tertib Rapat Internal Dewan Komisaris tanggal 3 November 2014, yaitu disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang muatan tata tertib rapat		√			√
22	Memuat penjelasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat pada Risalah Rapat.		√			√
23	Memuat penjelasan evaluasi atas pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dalam Risalah Rapat		√			√
24	Membuat surat kuasa untuk anggota Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat untuk mewakilkan suaranya dalam rapat		√			√
25	Memasukkan dalam Program Kerja Tahunan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengenai rencana self assessment komite tersebut.		√		√	
26	Mengefektifkan pertemuan rutin Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG sesuai dengan program kerja.		√			√
27	Menyimpan risalah rapat Komite Komisaris di Sekretaris Dewan Komisaris.		√		√	
28	Membuat Laporan Tahunan Komite Audit dan Komite Risiko, Pengembangan & GCG tersendiri.		√			√
29	Melakukan pemutakhiran Pedoman Penerapan Tata Kelola (GCG) di Bio Farma (Persero) dengan memuat organ-organ utama perusahaan dalam penerapan GCG.			√	√	
30	Melakukan pemutakhiran Pedoman Perilaku dengan memuat Penghormatan kepada Hak Intelektual dan integritas laporan keuangan			√	√	
31	Mendokumentasikan setiap proses pemutakhiran Pedoman Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Pedoman perilaku			√	√	
32	Menambahkan materi Pedoman Perilaku dalam Program Pengenalan Orientasi karyawan Baru			√		√
33	Memuat uraian setiap aspek pengujian dari hasil asesmen GCG dalam Laporan Tahunan Perusahaan.			√		√

No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
34	Mendorong seluruh pegawai wajib lapor LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.			√		√
35	Memberikan pemberian teguran/sanksi bagi wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan.			√		√
36	Memuat Rencana pengelolaan gratifikasi dalam Rencana Kerja Divisi SDM sebagai unit Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi			√		√
37	Memuat informasi Kebijakan/ mekanisme pengendalian gratifikasi dalam laporan tahunan.			√		√
38	Mengefektifkan kegiatan diseminasi/ sosialisasi kebijakan whistle blowing system kepada Stakeholders melalui tatap muka dan publikasi di majalah atau media lainnya.			√		√
39	Menetapkan uraian tugas Direksi dan setiap jabatan dalam Struktur Organisasi/Bagan Organisasi Perusahaan secara formal dalam keputusan Direksi			√		√
40	Memuat tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi dibawah direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani ke dalam <i>Board Manual</i> .			√		√
41	Mendokumentasikan proses sosialisasi hasil rapat kerja (RKAP) secara berjenjang kepada Kabag, kasi dan staf dibawahnya di Divisi masing-masing.			√		√
42	Mendokumentasikan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.			√		√
43	Mengefektifkan pemanfaatan sarana aplikasi BIOSIS oleh setiap pegawai sebagai sarana pengkomunikasian manajemen karir di PT Bio Farma (Persero).			√		√
44	Menyusun daftar grade yang dapat diketahui pegawai sehingga transparansi dalam penempatan setiap level jabatan lebih meningkat			√		√

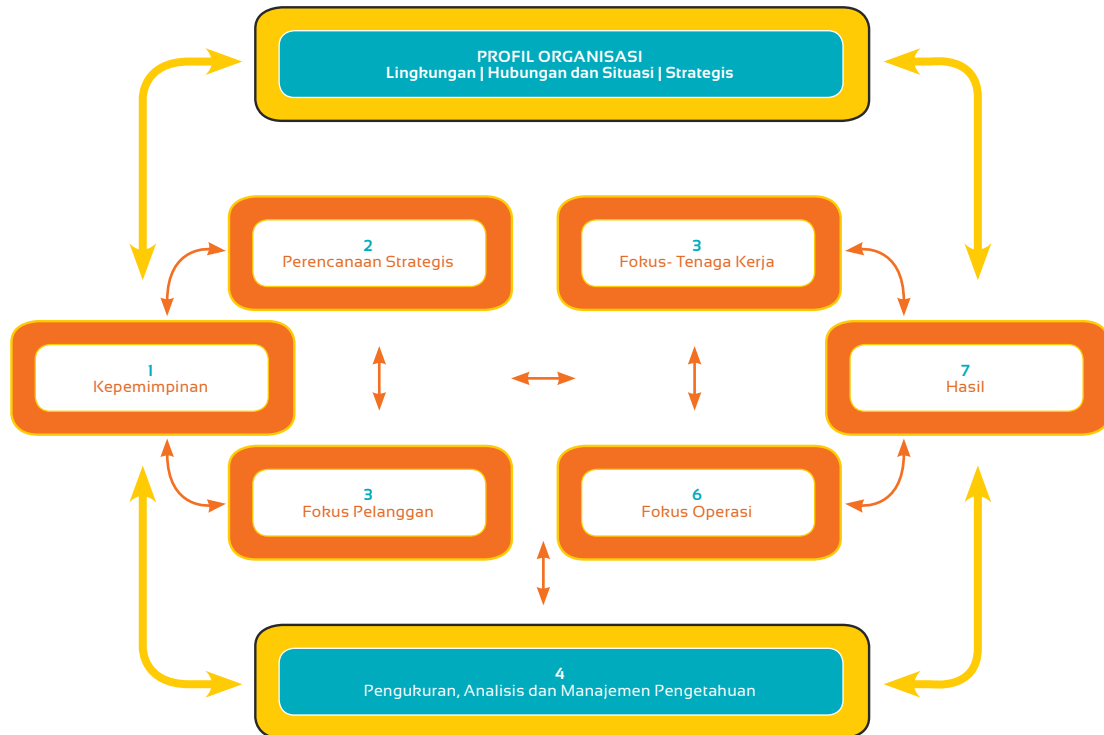


No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
45	Mempercepat proses penyusunan Business Plan Kebutuhan (Pengadaan/Sewa) Lahan Jasinga sebagai bagian dari Grand Design menuju pengembangan strategis untuk menjadi industri <i>Life Science</i> dan <i>bio medical technology</i> untuk menyongsong era Bioeconomy 2030.			√		√
46	Mempercepat Proses Pengembangan Performance Management System (PMS) sebagai sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja unit dan jabatan dalam organisasi termasuk aplikasinya			√	√	
47	Menetapkan kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi			√	√	
48	Mendokumentasikan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit di bawah Direksi secara berjenjang			√	√	
49	Mendokumentasikan dan melaporkan pencapaian target kinerja Direksi secara individu kepada Dewan Komisaris			√	√	
50	Mempercepat proses penerapan aplikasi e-procurement dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa			√	√	
51	Menetapkan KPI Individu yang mencakup indikator kinerja individu dan target kinerja bagi setiap karyawan.			√	√	
52	Menetapkan kebijakan job tender untuk pengisian jabatan satu level di bawah Direksi sebagai salah satu sarana pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk menduduki jabatan sesuai persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan.			√		√
53	Melaksanakan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil evaluasi terhadap efektivitas struktur pengendalian intern (<i>Internal Control Report</i>).			√		√
54	Mendokumentasikan penanggung jawab pelaksanaan rencana Kerja Tindak lanjut survey Pasar dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya.			√		√
55	Memperbaharui Prosedur Baku penilaian dan pemilihan supplier (dok#:102K-PPSp-03 rev 4 tgl 03/01/2012) dengan menambahkan kriteria penilaian supplier dari aspek service dan cost yang diberikan			√		√

No	Rekomendasi	Penanggungjawab Tindak Lanjut			Tindak Lanjut	
		PS/RUPS	Komisaris	Direksi	On Process	Selesai
56	Menyusun Prosedur Baku Pengukuran Kepuasan Pemasok yang memuat aspek <i>fairness</i> dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.			√		√
57	Menambahkan Pengaturan mengenai pengukuran kepuasan karyawan dalam kebijakan <i>Human Capital</i> Perusahaan.			√	√	
58	Melampirkan Pakta Integritas dalam setiap tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris.			√		√
59	Mencantumkan alasan ketidakhadiran dalam Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom).			√		√
60	Memuat bahasan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya pada Risalah Rapat Direksi.			√		√
61	Memperbaharui muatan Piagam SPI dengan menambahkan penjelasan ruang lingkup Fungsi Audit Internal dan mempertimbangkan Standar Profesional Audit Intern.			√		√
62	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf auditor internal			√	√	
63	Menyusun Pedoman QA (<i>Quality Assurance Manual</i>) untuk melakukan penilaian (<i>review</i>) internal fungsi audit internal			√		√
64	Menyampaikan hasil audit SPI kepada Dewan Komisaris			√		√
65	Menyusun pedoman untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ekstern			√		√
66	Memastikan bahwa dinamika rapat, <i>dissenting comments</i> , dan evaluasi (pemantauan progress) terhadap pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dituangkan dalam Risalah Rapat			√	√	
67	mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan			√		√
68	Mempublikasikan <i>Board Manual</i> , <i>Charter</i> Internal Audit, dan kebijakan MR dalam website Perusahaan			√		√
69	Menyempurnakan Laporan Tahunan untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			√		√



Kerangka Kerja KPKU



11 Tata Nilai Inti (CORE VALUE)





BENEFIT KEUNGGULAN KINERJA

1. Perusahaan selalu memberikan/meningkatkan nilai kepada pelanggan dan para stakeholder.
2. Perusahaan senantiasa meningkatkan efektivitas dan kemampuan keseluruhan aspek Perusahaan.
3. Perusahaan yang terus meningkat dan belajar.
4. Tenaga kerjanya senantiasa belajar dan tumbuh.

TUJUAN PENILAIAN KPKU

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Perusahaan.
2. Memberikan umpan balik kepada Perusahaan.
3. Memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang berprestasi.

Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Bio Farma

1. Surat Sekretaris Kementerian BUMN RI Nomor S-08/S.MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013 mengenai Pedoman Penentuan Key Performance Indicators (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Tgl. 14 Oktober 2016 Nomor: S-445/D7.MBU/10/2016 Hal: Pelaksanaan Asesmen Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN Tahun 2016.

Pelaksanaan Asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Bio Farma telah dilaksanakan pada tanggal 03 Desember - 10 Desember 2016 dengan

Lead Assesor Suyanto dari PT Telkom (Persero), Tbk dan member anggota Fauzan Nurmansyah dari PT Krakatau Bandar Samudera (Persero), Rini Listyaningsih dari PT BNI (Persero), Tbk, Yuni Arfah dari PT Jasa Marga (Persero), Tbk, dan Aah Ahadiat dari PT Telkom (Persero), Tbk.

Hal ini ditujukan untuk penyelarasan dan konsistensi dalam penataan sistem pengelolaan kinerja di Bio Farma di mana Direksi menetapkan skor KPKU Sebagai KPI Direksi (Perusahaan) merupakan cerminan kualitas sistem pengelolaan kinerja yang diharapkan di Bio Farma. Dengan penggunaan KPKU dalam penentuan KPI, Bio Farma diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian kinerjanya, mampu mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi yang dihadapi, dan dapat mengakselerasi pertumbuhan kinerja Bio Farma.

Pelaksanaan Asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Bio Farma
04 Desember - 10 Desember 2016

Skor KPKU Yang Diperoleh Bio Farma 2013-2016

No	Tahun				%	Selisih
	2013	2014	2015	2016		
	1	2	3	4		
SKOR KPKU	315	422,75	467	510,25	43,25	9,26%

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEMBANGUN GCG TIDAK SEMUDAH MEMBALIKKAN TELAPAK TANGAN TETAPI MEMERLUKAN KOMITMEN, KONSISTENSI DAN KESUNGGUHAN DARI BERBAGAI PIHAK YANG TERKAIT YAITU MANAJEMEN PERUSAHAAN, KARYAWAN, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM, PEMERINTAH SERTA STAKE HOLDER LAINNYA

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Dasar Penetapan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.
3. Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma sebagaimana No.: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.

PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan mengusulkan sampai dengan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
 - c. Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Dewan Komisaris dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Dewan Komisaris.
 - e. Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Dewan Komisaris dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Dewan Komisaris berdasarkan PER-04/MBU/2014.
 - f. Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris.

Gaji/honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 termasuk didalamnya tantiem atas kinerja Perusahaan tahun buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 akan ditetapkan secara tersendiri.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.

**Remunerasi bagi anggota
Dewan Komisaris merupakan
kewenangan Pemegang Saham
dan ditetapkan dalam RUPS**

2. Pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2016.

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris Bio Farma sesuai ketentuan remunerasi Dewan Komisaris meliputi gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja. Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN.

Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan RUPS sebagai berikut:

1. Honorarium.
 - a. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan dengan faktor jabatan 45% dari gaji Direktur Utama.
 - b. Honorarium Anggota Komisaris ditetapkan dengan faktor jabatan 90% dari Honorarium Komisaris utama.
2. Tunjangan.
 - a. Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali honorarium per bulan.
 - b. Tunjangan transportasi sebesar 20% x honorarium.
 - c. Asuransi Purna Jabatan: premi sebesar 25% dari honorarium dalam satu tahun.
3. Fasilitas.
 - a. Kesehatan: Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan, dengan rincian sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
 - b. Bantuan Hukum: fasilitas bantuan hukum diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
4. Tantiem/Insentif Kinerja. Tantiem/Insentif Kinerja didasarkan atas kinerja tahun buku 2015.



STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam Rupiah

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Gaji Per Tahun	Tunjangan Per Tahun	Gaji Bersih Per Tahun	Tantiem & THR	Jumlah
			1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23 Januari 2014	473.040.000	94.608.000	567.648.000	871.708.401	1.439.356.401
Nizar Yamanie	Komisaris	28 Mei 2012	425.736.000	85.147.200	510.883.200	784.537.561	1.295.420.761
Paruli Lubis	Komisaris	05 November 2012	425.736.000	85.147.200	510.883.200	784.537.561	1.295.420.761
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013	425.736.000	85.147.200	510.883.200	784.537.561	1.295.420.761
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014	425.736.000	85.147.200	510.883.200	784.537.561	1.295.420.761
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015	425.736.000	85.147.200	510.883.200	431.556.069	942.439.269
Total			2.601.720.000	520.344.000	3.122.064.000	4.441.414.714	7.563.478.714

HONORARIUM, TUNJANGAN DAN FASILITAS DEWAN KOMISARIS

Honorarium	Tunjangan	Fasilitas
Komisaris Utama Rp473.040.000	Tunjangan Hari Raya Keagamaan: 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium.	Fasilitas kesehatan:
Komisaris Rp425.736.000	- Asuransi Purna Jabatan: Premi 25% gaji/ honorarium per tahun - Tunjangan Transport sebesar Rp6.525.000	- Asuransi/Penggantian pengobatan sebesar at cost, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. - Fasilitas bantuan hukum: sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Bio Farma memberikan Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero).

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI

Dasar Penetapan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

URAIAN KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-08/DK/BF/07/2016 Tanggal 27 Juli 2016 Tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.
- Keputusan Pemegang Saham selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma sebagaimana No.: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.

PENGUNGKAPAN PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Perseroan menetapkan remunerasi bagi Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, besaran penghasilan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PROSEDUR PENGUSULAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

- Dewan Komisaris penugaskan Komite Audit untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Direksi.
- Komite Audit melakukan koordinasi dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Direksi.
- Komite Audit menyusun rekomendasi Remunerasi Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris membahas usulan Komite Audit tentang usulan Remunerasi Direksi.
- Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi Direksi dalam RUPS dan RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk menetapkan Remunerasi Direksi Bio Farma. RUPS menetapkan penghasilan Direksi berdasarkan PER-04/MBU/2014.
- Dewan Komisaris menetapkan Remunerasi Direksi.

Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero) sebagaimana dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: RIS-01/RUPS/BF/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.

Berdasarkan persetujuan dan keputusan RUPS Laporan Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015 tersebut, penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 akan ditetapkan secara tersendiri.

PENGUNGKAPAN INDIKATOR UNTUK PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

- Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat inflasi, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



2. Penetapan penghasilan berupa tunjangan dan tantiem yang bersifat variable, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor lain yang relevan.
3. Pemberian remunerasi kepada Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER – 04/MBU/2014, rincian remunerasi yang diterima oleh Direksi Bio Farma pada tahun 2016 terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya seperti asuransi dan santunan purna jabatan sebagai berikut:

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Dalam Rupiah

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Potongan Dinas	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
			1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6 = 4 + 5
Iskandar	Direktur Utama	12 April 2013	1.051.200.000	300.000.000	26.466.706	1.324.733.294	1.937.129.781	3.261.863.075
Andjang Kusumah	Direktur SDM	07 Maret 2012 Jo 7 Februari 2013	946.080.000	300.000.000	24.561.706	1.221.518.294	1.743.416.803	2.964.935.097
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	12 April 2013	946.080.000	300.000.000	25.215.177	1.220.864.823	1.743.416.803	2.964.281.626
Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	12 April 2013	946.080.000	300.000.000	25.215.177	1.220.864.823	1.743.416.803	2.964.281.626
Juliman Fuad	Direktur Produksi	12 April 2013	946.080.000	300.000.000	25.215.177	1.220.864.823	1.743.416.803	2.964.281.626
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12 April 2013	946.080.000	300.000.000	24.708.412	1.221.371.588	1.743.416.803	2.964.788.391
Total			5.781.600.000	1.800.000.000	151.382.355	7.430.217.645	10.654.213.796	18.084.431.441

Selain memperoleh gaji, Direksi juga memperoleh tunjangan dan fasilitas sebagai berikut:

GAJI, TUNJANGAN DAN FASILITAS DIREKSI

Gaji per Tahun	Tunjangan	Fasilitas
Direktur Utama Rp1.051.200.000	- Tunjangan Hari Raya: 1 (satu) kali Gaji - Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun	Fasilitas kendaraan: 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan.
Direksi Rp946.080.000	- Tunjangan Perumahan: - Rp25.000.000 per bulan	- Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (<i>at cost</i>) - Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian (<i>at cost</i>)

PENGUNGKAPAN BONUS KINERJA, BONUS NON KINERJADAN OPSI SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja dan opsi saham yang diberikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Bio Farma memberikan Gaji/honorarium dan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Bio Farma (Persero).

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT YANG DIHADIRI MAYORITAS ANGGOTA PADA RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BioFarma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT BioFarma (Persero).

RAPAT DEWAN KOMISARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Disamping waktu tersebut, Rapat Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapat keputusan, apabila:

- a. Atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris.
 - b. Atas permintaan Direksi.
 - c. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Peserta Rapat Dewan Komisaris terdiri dari semua anggota Dewan Komisaris.

Apabila Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadiri dalam Rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

AGENDA RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang diperlukan dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris.
2. Agenda untuk Rapat Dewan Komisaris dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya, disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam Rapat Dewan Komisaris.

UNDANGAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



2. Dalam undangan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat Dewan Komisaris.
3. Undangan Rapat Dewan Komisaris tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.
2. Dalam Rapat Dewan Komisaris, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

PIMPINAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat antara Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama.
3. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dan Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris yang memimpin Rapat Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris.

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Untuk setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.
2. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan:
 - a. Alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada Dewan Komisaris yang tidak hadir;

RAPAT DEWAN KOMISARIS

- b. Hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat Dewan Komisaris sebelumnya;
 - c. Dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion) jika ada;
 - d. Pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - e. Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan Notulis.
 4. Risalah Rapat Dewan Komisaris diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.
 5. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan

(Corporate Secretary). Salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

PANCATAT/NOTULIS RAPAT DEWAN
KOMISARIS

1. Pencatat/Notulis Dewan Komisaris adalah Sekretaris Komisaris.
2. Dalam hal Sekretaris Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai Notulis Rapat Dewan Komisaris adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali.

Daftar kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Rapat Internal Dewan Komisaris		
			Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Ahmad Ramli	Komisaris Utama	23 Januari 2014	12	12	100%
Paruli Lubis	Komisaris	05 November 2012	12	12	100%
Nizar Yamani	Komisaris	28 Mei 2012	12	12	100%
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013	12	12	100%
Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014	12	12	100%
Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015	12	12	100%



TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2016, tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta rapat Rapat Internal Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
1.	28-Jan-16	1. Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Kegiatan PKBL PT Bio Farma (Persero) Tahun 2015 (UnAudited) 2. Lain-lain, membahas rencana terkait pembentukan anak perusahaan	1. Secara umum kinerja Perusahaan tahun 2015 dibandingkan anggarannya sebagai berikut : penjualan bersih mencapai 102%; beban pokok penjualan & jasa mencapai 101,7%; beban perusahaan mencapai 107,9%; investasi mencapai 82,2%; dan laba bersih mencapai 98,5%; <i>net profit margin</i> sebesar 37% serta total asses/liabilitas dan ekuitas sebesar Rp6,68 triliun atau 156,7% dari anggarannya. 2. Hal-hal yang perlu dikritisi adalah terkait dengan investasi, dimana pencapaian per kelompok kenaikannya cukup signifikan sebesar 190% dan 454% dari anggarannya, tetapi ada juga yang masih jauh dari anggarannya, walaupun secara total tercapai 82,2%, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mencapai 311,19%. dengan adanya perbedaan tersebut, maka kualitas perencanaan dianggap kurang bagus. 3. Tanggapan Dekom atas Laporan Manajemen Perusahaan (LMP) unaudited tahun 2015, beban perjalanan dinas agar dibuat point tersendiri, dan diminta penjelasan/laporan secara rinci dari Direksi atas pelampauan beban. Direksi diminta agar mencermati dan menganalisis kenaikan Beban Penjualan dan Beban Administrasi & Umum guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. 4. Direksi diminta meningkatkan pengendalian Piutang dan Persediaan guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh

RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
2.	18-Feb-16	1. Laporan dan paparan tentang Rencana Pendirian Anak Perusahaan oleh Komite Audit dan Komite Risiko 2. Laporan Perkembangan/ Issue tentang Jaminan Produk Halal oleh Sekretaris Perusahaan 3. Progress Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> GCG 4. Lain - lain	1. Komite Audit dan Risiko melakukan kajian terkait dengan dua hal, yaitu perkembangan IPV dan pemetaan SDM. Komite Audit berbicara dampak dan risiko IPV terhadap keuangan, dan Komite Risiko berbicara terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi. 2. Membuat Surat ke Direksi meminta penjelasan atas isu-isu tentang IPV secara lengkap, dan melakukan pembahasan antara Komite Audit dan Risiko dengan Direktur terkait (Dir. Produksi dan Dir. Renbang) untuk memberikan penjelasan tentang persiapan IPV, dan meminta penjelasan tentang pemetaan SDM, berapa yang diperlukan. 3. Untuk anak perusahaan akan ada pembahasan dengan Direksi, konsultan dan Komite (gabungan), Komite menjadwalkan pembahasannya. 4. Polio dalam posisi pasif karena akan habis, tidak ada masalah dan oleh MUI diperbolehkan digunakan. 5. Dipercepat untuk label sertifikasi untuk flu bio, polio, BCG termasuk produk-produk berikutnya yang dianggap sudah clear. 6. Untuk rubella disepakati akan menggunakan MRC 5 dari India memenuhi jangka pendek (<i>short term</i>), sambil menunggu untuk menentukan produk yang akan digunakan buatan Bio Farma, maka perlu keputusan dari Direksi untuk <i>long term</i>. 7. Agar membuat <i>time line</i> supaya bisa mengikuti, dan untuk kepastiannya harus dibahas pada tingkat Direksi dan Komisaris. 8. Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite agar berkoordinasi untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya sesuai rekomendasi BPKP tentang GCG.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh



No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
3	08-Mar-16	1. Membahas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2015 2. Membahas Tanggapan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan TB 2015 Audited PT Bio Farma 3. Lain-lain	1. Dewan Komisaris menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun 2015 untuk disampaikan kepada pemegang saham namun terlebih dahulu laporan dari komite agar disampaikan secepatnya. 2. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2015 (audited) dapat disampaikan kepada pemegang saham dengan arahan dan masukan agar jajaran manajemen terus mengembangkan motivasi dan kekompakan serta melakukan sinergi supaya terwujud Bio Farma yang lebih baik, walaupun pencapaian kinerja Tahun 2015 secara umum sudah cukup bagus, namun perlu disampaikan beberapa saran dan masukan kepada Direksi.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh
4.	08-Apr-16	1. Membahas Surat Direksi Nomor : 01155/DIR/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 01221/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 01222/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016, dan Nomor : 01223/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016 2. Lain - lain tentang revisi tanggapan Dekom Atas Laporan Kinerja Keuangan TB 2015	1. Sekretaris Dewan Komisaris akan menyiapkan konsep surat tentang revisi atas tanggapan Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015, usulan remunerasi, tantiem dan usulan KAP. Surat akan ditandatangani oleh seluruh Komisaris. Komite Audit agar segera menyampaikan hasil evaluasinya terutama tentang usulan KAP. 2. Permohonan persetujuan pembentukan anak perusahaan masih di <i>pending</i> (belum diproses), Direksi akan <i>sounding</i> untuk mendapatkan informasi dari KBUMN tentang rencana holding farmasi. 3. Terkait dengan usulan penambahan modal, akan diproses setelah ada keputusan RUPS tentang besaran dividen. 4. Perubahan struktur organisasi akan dibahas lebih lanjut dengan Direksi, karena tidak hanya merubah satu Direktorat tetapi dirubah secara besar, sehingga perlu dilakukan reviu organisasi secara komprehensif, maka persetujuannya belum dapat diberikan.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh

RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
5	12-Mei-16	1. Membahas Tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero) 2. Membahas Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris pada Triwulan I Tahun 2016 3. Lain - lain	1. Akan menyiapkan konsep surat tanggapan Dewan Komisaris atas LMP triwulan I tahun 2016, dan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama triwulan I tahun 2016 yang akan disampaikan kepada pemegang saham. 2. Komite dengan Sek dekom akan melakukan pembahasan terkait rekomendasi hasil assessment GCG tahun 2015 dan melengkapi dokumen terkait GCG. 3. Terkait dengan berakhirnya masa jabatan 3 (tiga) orang Direksi, yaitu Dir SDM bulan Maret 2017, Dirut dan Dir Pemasaran bulan April 2017. Mekanisme untuk seleksi calon Direksi, menunggu surat dari Pemegang Saham, kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh
6	28-Jun-16	1. Pembahasan Laporan Komite kepada Dewan Komisaris Utama Hasil Verifikasi dan Klarifikasi dari Direksi, Kepala Divisi, Pengurus Forwan dan Pengurus Hika PT Bio Farma (Persero) terkait surat Forwan 2. Lain - lain	1. Hasil klarifikasi akan disampaikan kepada Direksi dan tembusan kepada Kementerian BUMN, tidak kepada Forwan. 2. Akan mengadakan rapat dengan Direksi untuk membahas hasil verifikasi dan rekomendasi tim. 3. Hasil verifikasi oleh Komite Audit, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan rekomendasi sebagai berikut : a. Agar Direksi meningkatkan komunikasi formal dan non formal dengan karyawan b. Agar Direksi melakukan pemantauan apakah diseminasi informasi berlangsung dengan baik dan mencapai sasaran. c. Agar Direksi menegakkan aturan dengan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> karyawan secara konsisten.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh



No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
7	28-Jul-16	1. Membahas Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero) 2. Lain - lain	1. Tanggapan atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Bio Farma semester I tahun 2016 akan segera disiapkan konsep suratnya. 2. Beberapa Arahan dan masukan yang menjadi perhatian Direksi terkait dengan pencapaian kinerja akan dimasukkan dalam surat tanggapan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham. 3. Akan dilakukan pembahasan dengan Direksi dan meminta penjelasan atas penurunan kinerja semester I tahun 2016.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh
8.	10-Agust-16	1. Membahas Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris selama semester I Tahun 2016 2. Lain - lain	1. Pengawasan agar dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan organ. Dewan Komisaris yang telah dibentuk diantaranya dengan melaksanakan pertemuan rutin internal Dewan Komisaris minimal 1 bulan sekali. 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama periode Januari sampai dengan Juni tahun 2016 (semester I) kepada Pemegang Saham. 3. Atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim kepada Direksi, Kepala Divisi, dan Karyawan agar menyampaikan surat kepada Direksi untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dan klarifikasi atas surat Forwan.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh
9	13-Sept-16	1. Membahas Draft RKA Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2017 2. Lain-lain	1. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2017, segera difinalkan dan disampaikan kepada Bio Farma untuk dimasukkan ke dalam RKAP tahun 2017 PT Bio Farma. 2. Rencana kegiatan yang telah disepakati, diharapkan bisa kita laksanakan dengan baik, dan yang akan mengikuti kegiatan sebaiknya menyampaikan informasi kepada Komut di cc kepada Sekretaris Dewan Komisaris, agar disiapkan Surat Tugas.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh

RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
10.	21-Okt-16	1. Membahas Finalisasi RKA Dekom 2. Membahas RJPP RKAP Dekom 3. Lain-lain	1. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2017, yang sudah final agar segera disampaikan kepada Bio Farma. 2. Dalam pembahasan RKAP dan RJPP dengan Direksi, perlu dimintakan penjelasan antara lain : • Penyebab kenaikan Beban Pokok Penjualan yang lebih tinggi dari kenaikan penjualan dalam Rancangan RKAP tahun 2017 bila dibandingkan dengan prognosa tahun 2016 (margin Penjualan Barang Dagangan & Jasa dalam RKAP 2017 hanya 6%). • Manajemen membuat alternatif perencanaan lain atas pengadaan tanah bila pengadaan tanah Jasinga Bogor mengalami kegagalan dikemudian hari. 3. Agar Direksi tetap mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan internasional, perubahan-perubahan regulasi dari Pemerintah, serta berperan aktif dalam kegiatan nasional dan internasional, baik WHO maupun organisasi lainnya terutama yang berkaitan dengan regulasi vaksin.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh
11.	25-Nov-16	1. Membahas Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan III Tahun 2016 2. Lain-lain	1. Terkait dengan rekomendasi Dewan Komisaris atas peningkatan beban perusahaan, hal tersebut merupakan catatan Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada pemegang saham dan merupakan potret Dewan Komisaris atas kinerja PT Bio Farma apa adanya. 2. Dalam laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris agar dimasukkan arahan-arahan kepada Direksi terkait dengan pencapaian kinerja sampai triwulan III Tahun 2016. 3. Sek. Dekom diminta agar menyiapkan/ menyusun laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris yang akan disampaikan kepada pemegang saham.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh



No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
12	09-Des-16	1. Membahas surat Direksi Nomor: 04404/DIR/XI/2016 tanggal 18 November 2016 perihal Permohonan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Bio Farma2. 2. Membahas surat Direksi Nomor: 04405/DIR/XI/2016 tanggal 18 November 2016 perihal permohonan penghapusbukuan Aset Tetap PT Bio Farma	1. Penghapusbukuan aset sebaiknya dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Kantor Lelang Negara. 2. Perlu dikonfirmasi kepada Direksi apakah kendaraan dinas tersebut tidak layak dipakai lagi? 3. Komite Audit agar melakukan konfirmasi dengan Kepala Divisi Asset dan Umum PT Bio Farma atas nilai asset yang akan dihapusbukukan. 4. Pengajuan permohonan penghapusbukuan aktiva tetap oleh Direksi kepada RUPS disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung lainnya.	Jakarta	1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sekretaris Kementerian BUMN
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BioFarma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT BioFarma (Persero).

RAPAT DIREKSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM (BOARD MANUAL) DIREKSI

DASAR, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Direksi diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Disamping waktu tersebut, Rapat Direksi dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:
 - a. Atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
 - c. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain wilayah RI yang ditetapkan oleh Direksi.

PESERTA RAPAT DIREKSI

1. Peserta Rapat Direksi terdiri dari semua anggota Direksi.
2. Apabila Direksi menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam Rapat Direksi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

AGENDA RAPAT DIREKSI

1. Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Direksi, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat Direksi.
 2. Agenda untuk Rapat Direksi dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya disertai dengan bahan/berkas yang diperlukan dalam Rapat Direksi.
 3. Direksi yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat Direksi, menentukan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam Rapat Direksi, yang untuk itu – apabila dianggap perlu oleh anggota Direksi yang bersangkutan – dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan agar melaksanakan penyusunan acara dan menyiapkan bahan/berkas untuk Rapat Direksi.
 4. Acara yang belum selesai dibahas/diputuskan pada Rapat Direksi sebelumnya, dapat diajukan ke dalam Rapat Direksi berikutnya oleh anggota Direksi yang terkait/berkepentingan.
 5. Setiap anggota Direksi dapat menambah acara Rapat Direksi di luar acara yang telah disusun sebelumnya, untuk dibahas/diputuskan dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahan/berkasnya telah disiapkan oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hasil dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
 6. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat Direksi disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada para anggota Direksi sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
2. Dalam undangan Rapat Direksi harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat Direksi.
 3. Undangan Rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

KUORUM RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota Direksi atau wakilnya yang sah.
2. Dalam Rapat Direksi, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi, hanya oleh anggota Direksi lain dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Direksi yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

PIMPINAN RAPAT DIREKSI

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama.
3. Dalam hal direktur Utama tidak hadir dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.
4. Dalam hal anggota Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

UNDANGAN RAPAT DIREKSI

1. Undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau oleh anggota Direksi lain yang mewakili Direktur Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk segera diselenggarakan rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.



RISALAH RAPAT DIREKSI

- Untuk setiap Rapat Direksi harus dibuatkan Risalah Rapat.
- Risalah Rapat Direksi harus mencantumkan:
 - Alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada Direksi yang tidak hadir.
 - Hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat Direksi sebelumnya.
 - Dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan Rapat Direksi termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (dissenting opinion) jika ada.
 - Pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan Rapat Direksi.
 - Hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Direksi.
- Risalah Rapat Direksi ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan Notulis.
- Risalah Rapat Direksi diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- Risalah asli dari setiap Rapat Direksi disimpan dan dipelihara oleh Direksi. Direksi dapat menugaskan Sekretaris Perusahaan.

PENCATAT/NOTULIS RAPAT DIREKSI

- Pencatat/Notulis Rapat Direksi adalah Sekretaris Perusahaan.
- Dalam hal Sekretaris Perusahaan tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai Notulis Rapat Direksi adalah salah seorang anggota Direksi yang hadir atau personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan rapat Internal Direksi sebanyak 16 (enam belas) kali.

Daftar kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Kehadiran Direksi Dalam Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Bulan												Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Iskandar	Direktur Utama	12 April 2013	3	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	10	9	90
Juliman Fuad	Direktur Produksi	12 April 2013	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	10	10	100
Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12 April 2013	3	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	10	9	90
Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	12 April 2013	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	10	10	100
Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	12 April 2013	3	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	10	8	80
Andjang Kusumah	Direktur SDM	07 Maret 2012	1	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	10	8	80

RAPAT DEWAN KOMISARIS

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT DIREKSI

RAPAT INTERNAL DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, rapat Direksi membahas tentang berbagai masalah yang dihadapi Perusahaan, kinerja dan strategi yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan dengan rincian tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta rapat Rapat Internal Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal & Waktu	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta	% Kehadiran
1	Senin, 04 Januari 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya			Iskandar	90%
	Pkl. 09.00 - 10.00 WIB	2. Prognosa 2015 dan RKAP 2016		Ruang Rapat Direksi	Mahendra Suhardono	
		3. KPI Perusahaan			Juliman Fuad	
		4. Agenda Perusahaan			Sugeng Raharso	
		5. Lain-lain			Pramusti Indrascaryo	
2	Selasa, 12 Januari 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya			Iskandar	90%
	Pkl. 07.30 - 09.30 WIB	2. Rencana POA		Ruang Rapat Direksi	Mahendra Suhardono	
		3. Agenda Perusahaan			Juliman Fuad	
		4. Lain-lain			Sugeng Raharso	
					Pramusti Indrascaryo	
3	Selasa, 19 Januari 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya		Ruang Rapat Atas	Iskandar	100%
	Pkl. 10.00 - 12.00 WIB	2. Rencana Pembentukan Anak Perusahaan		Gd. Heritage	Andjang Kusumah	
					Mahendra Suhardono	
		3. Lain-lain			Iskandar	
					Sugeng Raharso	
4	Selasa, 23 Februari 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya		Ruang Rapat	Andjang Kusumah	90%
	Pkl. 14.00 - 14.30 WIB	2. Surat BPOM perihal penarikan vaksin BCG Green Signal		Dir. SDM	Mahendra Suhardono	
					Juliman Fuad	
		3. Lain-lain\			Sugeng Raharso	
					Pramusti Indrascaryo	
5	Kamis, 7 April 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya			Iskandar	100%
	Pkl. 13.00 - 14.30 WIB	2. Rencana Holding BUMN Farmasi		Ruang Rapat Direksi	Andjang Kusumah	
					Mahendra Suhardono	
					Juliman Fuad	
					Sugeng Raharso	
					Pramusti Indrascaryo	



No	Hari, Tanggal & Waktu	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta	% Kehadiran
6	Rabu, 27 April 2019	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya			Iskandar	90%
	Pkl. 15.00 - 16.00 WIB	2. Pembelian Lahan Milik PT PG-RNI		Ruang Rapat Direksi	Andjang Kusumah	
		di Manyingsal, Subang			Mahendra Suhardono	
		3. Anak Perusahaan			Juliman Fuad	
		4. Lain-lain			Sugeng Raharso	
7	Kamis, 12 Mei 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya		Ruang Rapat	Iskandar	90%
	Pkl. 08.00 - 09.30 Wib	2. Prognosa Penjualan 2016		Grand Ina Bali	Mahendra Suhardono	
		3. Lain-lain			Mahendra Suhardono	
					Juliman Fuad	
8	Rabu, 29 Juni 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya		Ruang Rapat	Iskandar	90%
	Pkl. 08.00 - 09.30 WIB	2. Progress Penelusuran Vaksin Palsu		Direksi	Andjang Kusumah	
		3. Progress Blood Product			Mahendra Suhardono	
		4. Lain-lain			Juliman Fuad	
					Mahendra Suhardono	
9	Kamis, 18 Agustus 2016	1. Tindak lanjut rapat sebelumnya		Ruang Rapat	Iskandar	100%
	Pkl. 13.30 - 15.30 WIB	2. Fasilitas Baru Produksi <i>Bulk</i> Campak		Direksi	Andjang Kusumah	
		3. Antisipasi Kebutuhan Vaksin			Mahendra Suhardono	
		mOPV2			Juliman Fuad	
		4. Progress Anak Perusahaan dan Rencana Holding Farmasi			Mahendra Suhardono	
10	Kamis, 26 September 2016	1. Tindak Lanjut rapat Sebelumnya		Ruang Rapat	Iskandar	100%
	Pkl. 08.00 - 10.00 WIB	2. Rencana Penerapan ERP		Direksi	Andjang Kusumah	
		3. Lain-lain			Mahendra Suhardono	
					Juliman Fuad	
					Sugeng Raharso	
					Pramusti Indrascaryo	

RAPAT DEWAN KOMISARIS

**PEDOMAN RAPAT GABUNGAN DEWAN
KOMISARIS DENGAN DIREKSI**

Bedasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT BioFarma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT BioFarma (Persero) diantaranya mengenai Rapat Antara Direksi Dengan Dewan Komisaris.

**RAPAT GABUNGAN ANTARA DIREKSI
DENGAN DEWAN KOMISARIS****Dasar, Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
Rapat**

1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.
2. Disamping waktu tersebut, Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dapat pula diselenggarakan setiap waktu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan dan/atau perlu mendapatkan keputusan, apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama ATAU LEBIH DARI SETENGAH ANGGOTA Direksi atau lebih dari setengah anggota Dewan Komisaris.
 - b. Atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
3. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di wilayah RI yang ditetapkan oleh Direksi.

**PESERTA RAPAT DALAM RAPAT ANTARA
DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS**

1. Peserta Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris terdiri dari semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Apabila Direksi dan/atau Dewan Komisaris menganggap perlu, pihak lainnya dapat dihadirkan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan yang diperlukan.

**AGENDA RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN
DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi atau Dewan Komisaris yang mengusulkan untuk diselenggarakan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, menentukan acara dan menyiapkan bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
2. Agenda untuk Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dapat disampaikan secara lisan atau secara tertulis berupa memo, surat dan lain sebagainya disertai dengan bahan/berkas tersebut.
3. Direksi atau Dewan Komisaris yang menentukan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan – dapat menugaskan pimpinan atau pejabat lain di Perusahaan atau Komite Dewan Komisaris dan/atau terkait/kepentingan dengan agenda yang perlu dibahas/diputuskan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut, agar melaksanakan penyusunan acara dan menyiapkan bahan/berkas untuk Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
4. Acara yang belum selesai dibahas/diputuskan pada Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sebelumnya, dapat diajukan ke dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berikutnya oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terkait/berkepentingan.
5. Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menambah acara Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris di luar acara yang telah disusun sebelumnya, untuk dibahas/diputuskan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahan/berkasnya telah disiapkan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan dan semua peserta rapat atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

6. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berasal dari Direksi disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya oleh Sekretaris Perusahaan disampaikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris sebelum Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan.
7. Semua bahan/berkas yang perlu dibahas dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berasal dari Dewan Komisaris disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk selanjutnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris disampaikan kepada para anggota Direksi melalui Sekretaris Perusahaan dan Dewan Komisaris sebelum Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diselenggarakan.
3. Dalam undangan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
4. Undangan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

Kuorum Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris

UNDANGAN RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Apabila inisiasi Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berasal dari Direksi, maka setelah jadwal Rapat disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris, undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau oleh anggota Direksi Lain yang mewakili Direktur Utama atau oleh anggota Direksi lain yang mewakili Direktur Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk diselenggarakan rapat.
2. Apabila inisiasi Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris berasal dari Dewan Komisaris, maka setelah jadwal rapat disepakati oleh Direksi dan Dewan Komisaris, undangan rapat dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang mewakili Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika diperlukan untuk diselenggarakan rapat.
1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.
2. Dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, diupayakan selalu dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Direksi lain yang hadir dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
4. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris, hanya oleh anggota Dewan Komisaris lain yang hadir dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan kuasa tertulis yang khusus untuk keperluan Rapat Gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang bersangkutan.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

PIMPINAN RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris dipimpin oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama.
3. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir dan Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah satu Anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

RISALAH RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Untuk setiap Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus dibuatkan Risalah Rapat.
2. Risalah Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus mencantumkan:
 - a. Alasan ketidakhadiran anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, apabila ada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak hadir.
 - b. Hasil evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan keputusan hasil Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris sebelumnya.

- c. Dinamika rapat sebagai proses pengambilan keputusan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada.
 - d. Pertimbangan dan/atau analisis dalam pengambilan keputusan Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
 - e. Hal-hal diputuskan dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris.
3. Risalah Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris ditandatangani oleh pimpinan rapat, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan Notulis.
 4. Risalah Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris diperbanyak dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris tersebut.
 5. Risalah asli dari setiap Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

PENCATAT/NOTULIS RAPAT ANTARA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS

Pencatat/Notulis Rapat antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah Sekretaris Komisaris.

Dalam hal Sekretaris Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka yang bertindak sebagai Notulis antara Direksi dengan Dewan Komisaris adalah personel lain yang ditunjuk oleh pimpinan rapat.



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2016, Direksi telah melaksanakan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Komisaris		Jabatan	Mulai Menjabat	Rapat Gabungan Dewan Komisaris & Direksi		
				Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
DEWAN KOMISARIS						
1	Ahmad Ramli	Komisaris Utama	23 Januari 2014	4	4	100
2	Paruli Lubis	Komisaris	05 November 2012	4	4	100
3	Nizar Yamani	Komisaris	28 Mei 2012	4	4	100
4	Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013	4	4	100
5	Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014	4	4	100
6	Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015	4	4	100
DIREKSI						
1	Iskandar	Direktur Utama	12 April 2013	4	3	75
2	Juliman Fuad	Direktur Produksi	12 April 2013	4	4	100
3	Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12 April 2013	4	4	100
4	Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	12 April 2013	4	4	100
5	Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	12 April 2013	4	4	100
6	Andjang Kusumah	Direktur SDM	07-Mar-12	4	4	100

RAPAT DEWAN KOMISARIS

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT
GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2016, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang berbagai masalah yang dihadapi Perusahaan, kinerja dan strategi yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
1	25-Feb-16	Pembahasan Laporan Manajemen Perusahaan Tahun Buku 2015 (Audited) PT Bio Farma (Persero)	1. Secara umum kinerja Perusahaan tahun 2015 dibandingkan anggarannya sebagai berikut: penjualan bersih mencapai 102%; beban pokok penjualan & jasa mencapai 101,7%; beban perusahaan mencapai 104,4%; investasi mencapai 82,2%; dan laba bersih mencapai 107,9%; net profit margin sebesar 28,59% serta total asset/liabilitas dan ekuitas sebesar Rp5,68 T atau 156,6% dari anggarannya. 2. Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian kinerja tahun 2015. 3. Perusahaan diminta melakukan strategi perencanaan investasi yang lebih baik ke depannya sehingga pencapaian investasi yang sudah baik ini akan terus berlanjut. 4. Perusahaan diminta untuk memperhatikan pertumbuhan beban sehingga sesuai dengan <i>shareholder aspiration</i>. 5. Perusahaan diminta membuat perencanaan yang komprehensif terkait dengan pemanfaatan lahan di Jasinga dan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak Kemenkeu terkait prospek kedepannya.	Bandung	Dewan Komisaris 1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh Direksi 1. Juliman 2. Sugeng Raharso 3. Mahendra Suhardono 4. Pramusti Indrascaryo 5. Andjang Kusumah
2	10-Mar-16	1. Pembahasan Rencana Pembentukan Anak Perusahaan Klinik dan Imunisasi 003/PRSDM-FORWAN BF/X/2015 2. Isu Tentang Produk Halal	1. Dewan Komisaris pada prinsipnya mendukung dibentuknya anak perusahaan dengan cara <i>spin off</i>, namun dengan adanya masukan-masukan perlu disempurnakan untuk meyakinkan pemegang saham. 2. Penggunaan nama Bio Farma bagus, namu agar diberi nama yang eksklusif. 3. Direksi diminta agar menginventarisasi hal-hal yang dibutuhkan dan produk yang telah bisa didaftarkan sebanyak 3 produk (halal), dan yang belum halal sesuai pernyataan MUI.	Bandung	Dewan Komisaris 1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh Direksi 1. skandar 2. Juliman 3. Sugeng Raharso 4. Mahendra Suhardono 5. Pramusti Indrascaryo 6. Andjang Kusumah



No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
3.	08-Apr-16	1. Membahas Surat Direksi Nomor : 01155/DIR/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 01221/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016, Nomor : 01222/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016, dan Nomor : 01223/DIR/III/2016 Tanggal 30 Maret 2016 2. Lain – lain	1. Agar Direksi mengundang <i>corporate lawyer</i> yang mengerti <i>corporate</i> untuk memahami posisi hukum dari holding, (Konsultan Fred Tumbuan) dalam acara <i>workshop</i> untuk membuat suatu konsep yang baik terkait dengan rencana holding. Perlu dikomunikasikan dengan Bapak Deputi KBUMN terkait dengan rencana tersebut. 2. Untuk <i>core business</i> baru yang akan dilakukan menutup polio, harus di <i>explore</i> betul. 3. Karakteristik bisnis yang membedakan antara Kimia Farma, Indo Farma dengan Bio Farma agar dibuat matriks <i>core business</i> masing-masing untuk disampaikan kepada pemegang saham. 4. Dalam waktu yang bersamaan harus menyiapkan RJPP, karena akan menjadi acuan. 5. Usulan Penambahan Modal sesuai saran dari Biro Hukum KBUMN akan diproses setelah ada keputusan RUPS tentang besaran dividen. 6. Pelampauan Realisasi Investasi tahun 2015 tidak perlu persetujuan Dewan Komisaris karena hanya pergeseran, saran dari KBUMN jika terdapat estimasi pelampauan untuk tahun 2016 akan dirubah, dan diperlukan persetujuan Komisaris. 7. Program-program yang dibahas, termasuk kajian holding dan khawatirkan hilangnya polio tahun 2020 menjadi perhatian yang harus diseriusi. 8. Perubahan struktur organisasi tidak hanya merubah satu Direktorat tetapi yang dirubah secara besar di Bio Farma, maka persetujuannya belum dapat diberikan dan perlu pembahasan lebih lanjut. 9. Mengusulkan adanya pertemuan lanjutan dengan MUI, Komisi Fatwa dan Bagian Hukum untuk melakukan pendampingan, dan untuk kriteria halal agar dilakukan komunikasi dan koordinasi aktif dari Bio Farma dengan pihak MUI dan Komisi Fatwa, siap mendampingi.	Bandung	Dewan Komisaris 1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh Direksi 1. Iskandar 2. Juliman 3. Sugeng Raharso 4. Mahendra Suhardono 5. Pramusti Indrascaryo 6. Andjang Kusumah

RAPAT DEWAN KOMISARIS

No	Hari/Tgl	Agenda Rapat	Keputusan	Tempat	Nama Peserta Rapat
4	15-Jul-16	1. Membahas hasil verifikasi Tim Komite atas surat Forwan BF 2. Lain - lain	1. Rekomendasi mengenai Tata kelola surat menyurat (surat Forwan) yang ditanggapi secara tertulis oleh Direksi kurang tepat, sebaiknya dipanggil, dihadapkan dengan Direksi supaya tidak berbalas pantun, dan langsung komunikasi verbal <i>face to face</i> . 2. Hasil verifikasi tentang komunikasi, perlu dilakukan pendekatan dan komunikasi oleh Direksi kepada karyawan. 3. Agar masing-masing Direksi memberi masukan/ koreksi secara tertulis atas kesimpulan dan rekomendasi dari Tim Komite dan disampaikan kepada Dekom, dan draft kedua akan dibahas kembali sebelum difinalkan. Diharapkan Direksi dan Dewan Komisaris agar satu suara untuk laporan akhirnya (disetujui bersama) dan akan disampaikan kepada Deputi. 4. Karyawan yang tidak <i>perform</i> diberi sanksi, terutama sanksi yang berdampak pada <i>in come</i> , sehingga ada efek jera dan ketegasan dalam pembinaan personel (tegakkan manajemen personil dengan konsekuen). 5. Keanggotaan dan keberadaan SP ditempatkan secara proporsional, sehingga dapat diketahui podiketahui posisi dan jumlah masing-masing SP, sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk hak dan kewajiban pengurus dan anggotanya (apabila tidak memenuhi kuota maka tidak punya hak suara). 6. Apabila SP menyampaikan sesuatu data yang tidak benar (kebohongan <i>public</i>), akan diberi sanksi. 7. Menyarankan agar dilakukan FPT oleh konsultan kepada seluruh karyawan untuk menempatkan orang yang tepat sesuai kemampuannya. Hal ini salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi kejadian seperti ini. 8. Dewan Komisaris pada prinsipnya setuju atas usulan penambahan struktur organisasi pada Direktorat Keuangan yaitu deviasi <i>corporate legal</i> , dan akan disiapkan surat persetujuannya. 9. Agar Direksi mewaspadai intelijen bisnis dan juga pengelolaan media terkait dengan vaksin palsu karena produk Bio Farma terekspos, untuk itu agar media harus dipegang supaya informasi tidak salah. 10. Rencana Rapat Dirkom tanggal 25 Juli 2016 di Jakarta, dan akan dibuat kesepakatan, untuk rencana pertemuan dengan Forwan (BOD dan BOC).	Bandung	Dewan Komisaris 1. Ahmad Ramli 2. Paruli Lubis 3. Nizar Yamani 4. Ihsan Setiadi Latief 5. Heridadi 6. Mohamad Subuh Direksi 1. Iskandar 2. Juliman 3. Sugeng Raharso 4. Mahendra Suhardono 5. Pramusti Indrascaryo 6. Andjang Kusumah

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, SAMPAI KEPADA PEMILIK INDIVIDU

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, kepemilikan saham PT Bio Farma (Persero) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bio Farma per 31 Desember 2016 merupakan Perusahaan Non Listed sehingga baik Masyarakat, Direksi, maupun Dewan Komisaris Bio Farma tidak mempunyai kepemilikan saham atas Bio Farma. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi mengenai Pemegang Saham Utama (pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali) dan Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada Pemilik Individu.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAINNYA, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, SERTA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM UTAMA (PENGENDALI).

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pada tanggal 26 April 2016 semua anggota Direksi membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya. Anggota Direksi juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Bio Farma dan atau perusahaan lain. Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Independensi Direksi ditetapkan untuk menjalankan segala tindakan pengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain secara Independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan untuk kepentingan perusahaan.

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi dalam pengambilan keputusannya. Dalam kedudukannya Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Pemegang saham Utama dan atau Pemegang Saham Pengendali (Kementerian BUMN). Surat Pernyataan Independensi ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Direksi

Iskandar	1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundangan yang berlaku.
Andjang Kusumah	2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
Mahendra Suhardono	3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
Juliman Fuad	a. Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
	b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sugeng Raharso	4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness di dalam pengelolaan perusahaan.
Pramusti Indrascaryo	5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
	6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Bio Farma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
	7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan Daerah.
	8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Komisaris lainnya atau dengan Direksi.
	9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

Independensi Direksi juga ditunjukkan dalam hubungan keluarga. Antar Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, dan Direksi dengan Pemegang Saham dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

No.	Nama	Hubungan Keluarga Dengan		
		Direksi Lainnya	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Iskandar	-	-	-
2.	Andjang Kusumah	-	-	-
3.	Mahendra Suhardono	-	-	-
4.	Juliman Fuad	-	-	-
5.	Sugeng Raharso	-	-	-
6.	Pramusti INdrascaryo	-	-	-

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI BESERTA KELUARGA

Hingga 31 Desember 2016, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di PT Bio Farma (Persero), Badan Usaha Milik Negara lain dan perusahaan lain. Dengan demikian, Direksi Bio Farma telah memenuhi kriteria independensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011.

Nama	Kepemilikan Saham		
	Pribadi Pada Perusahaan	Keluarga Pada Perusahaan	Pribadi /Keluarga Pada Perusahaan Lain
Iskandar	-	-	-
Andjang Kusumah	-	-	-
Mahendra Suhardono	-	-	-
Juliman Fuad	-	-	-
Sugeng Raharso	-	-	-
Pramusti Indrascaryo	-	-	-

RANGKAP JABATAN DAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2016 seluruh anggota Dewan Komisaris Bio Farma tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BUMN, Perusahaan, Instansi lainnya yang menimbulkan benturan kepentingan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rangkap Jabatan Pada Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Sebagai Anggota Dewan Komisaris Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Anggota Direksi Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain		Sebagai Pejabat Eksekutif Pada BUMN/Perusahaan/Instansi Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ahmad M. Ramli	Komisaris Utama	23-Jan-14		√		√		√
Paruli Lubis	Komisaris	05-Nov-12		√		√		√
Nizar Yamani	Komisaris	28-Mei-12		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01-Mei-13		√		√		√
Heridadi	Komisaris	23-Jan-14		√		√		√
H.M. Subuh	Komisaris	22-Jun-15		√		√		√

KOMITE AUDIT

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT DITETAPKAN UNTUK MENJALANKAN SEGALA TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA ATAU HUBUNGAN DENGAN PIHAK LAIN

KOMITE AUDIT

Komite Audit PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2004 dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

1. Pembentukan Komite Audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi sebagai pengawas perusahaan
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang diperbarui dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.
3. Komite Audit PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2003, sesuai dengan Surat Keputusan No. : 023/KEP/DK/BF/2003 tanggal 29 Agustus 2003 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bio Farma (Persero). Komite Audit berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4. Komite Audit Bio Farma terakhir diperbarui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris melalui SK No: KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero).

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Ketua Komite Audit adalah Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris independen atau yang dapat bertindak independen. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau di luar Perusahaan.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBENTUKAN, KOMPOSISI DAN PERUBAHAN NAMA KOMITE AUDIT

1. No. 023/KEP/DK/BF/2003 tanggal 29-Aug-2003 tentang Pembentukan Komite Audit PT Bio Farma (Persero),
2. No. 71/KEP/DK/BF/2006 tanggal 22-Aug-2006 tentang Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) dari unsur Ekstern,
3. No. KEP-50/DK/BF/XII/2007 tanggal 31 Des 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero),



4. No. KEP-50A/DK/BF/XII/2007 tanggal 31-Dec-2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Komite Audit PT Bio Farma (Persero),
5. No. KEP 64/DK/BF/XII/2009 tanggal 28-Dec-2009 tentang Perpanjangan Keanggotaan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Periode 2010-2011,
6. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-05/DK/BF/II/2012 tanggal 07 Februari 2012, komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. Komposisi keanggotaan Komite Audit dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Chaizi Nasucha	Ketua
2	Ahmad M. Ramli	Wakil Ketua merangkap anggota
3	M. Iqbal Alamsjah	Anggota (eksternal)
4	Dadang E. Sukarsa	Anggota (eksternal)

7. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Remunerasi

Komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, serta 2 (dua) orang pihak independen. Komposisi keanggotaan Komite Audit dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Paruli Lubis	Ketua
2	M. Iqbal Alamsjah	Anggota (eksternal)
3	Dadang E. Sukarsa	Anggota (eksternal)

8. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang

Pengangkatan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero),

9. Komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. Masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit berlangsung selama 3 (tiga) tahun. Komposisi keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Paruli Lubis	Ketua
2	Ahmad M. Ramli	Wakil Ketua merangkap anggota
3	M. Iqbal Alamsjah	Anggota (eksternal)
4	Dedi Sopyan	Anggota (eksternal)

10. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-18/DK/BF/XII/2013 tanggal 31-Dec-13 tentang Pemberhentian Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero), dengan hormat nama-nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) :

No.	Nama	Jabatan
1	M. Iqbal Alamsjah	Anggota (eksternal)
2	Dedi Sopyan	Anggota (eksternal)

Yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor : No: KEP-01/DK/BF/I/2012 dan No: KEP-02/DK/BF/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 serta, Nomor : KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama bertugas sebagai anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero). Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

KOMITE AUDIT

11. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-01/DK/BF/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Perpanjangan dan Pengangkatan keanggotaan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) sebagai berikut :

- Memperpanjang masa jabatan Dedy Sopyan sebagai anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) sampai dengan Mei 2014
- Mengangkat Abu Bakar sebagai Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

12. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-05/DK/BF/II/2014 tanggal 19-Feb-14 tentang Pengangkatan komite Audit PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan.

13. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Pengangkatan keanggotaan Komite Audit PT Bio Farma (Persero) sebagai berikut :

- Mengangkat M. Aswir Harahap sebagai Anggota Komite Audit PT Bio Farma (Persero) dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.

14. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, komposisi keanggotaan Komite Audit terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. Komposisi keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Paruli Lubis	Ketua
2	Herman L. Djuni*	Wakil Ketua
3	Abu Bakar	Anggota (eksternal)
4	M. Asawir Harahap	Anggota (eksternal)

15. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/BF/09/2015 tanggal 30 September 2015 memberhentikan dengan hormat Herman L. Djuni sebagai Wakil Ketua merangkap anggota komite Audit PT Bio Farma (Persero) dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama bertugas sebagai Komite Audit PT Bio Farma (Persero) dan mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Komite Audit PT Bio Farma (Persero):

No.	Nama	Jabatan
1	Paruli Lubis	Ketua
2	Ihsan S. Latief	Wakil Ketua
3	Abu Bakar	Anggota (eksternal)
4	M. Asawir Harahap	Anggota (eksternal)

Masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit selama 2 tahun, masa kerja Komite Audit meneruskan masa tugasnya sesuai dengan SK Komisaris No : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan KEP-05/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

NAMA DAN JABATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan vendor Bio Farma. Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua/Anggota Komite melalui Surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Per 31 Desember 2016, Komposisi Komite Audit Bio Farma adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Surat Keputusan
1	Paruli Lubis	Ketua	SK Dekom No. : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaharui dengan SK Dekom No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015
2	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap anggota	SK Dekom No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015
3	Abu Bakar	Anggota (eksternal)	SK Dekom No : KEP-01/DK/BF/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 dan diperbaharui dengan SK Dekom No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015
4	M. Asawir Harahap	Anggota (eksternal)	SK Dekom No : KEP-15/DK/BF/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaharui dengan SK Dekom No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Komite Audit Bio Farma dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah seorang anggota Dewan Komisaris dan memiliki 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite, yang masing-masing memiliki kualifikasi pendidikan dan keahlian di bidang audit. Hal ini dapat dilihat dari profil Komite Audit sebagai berikut.

Riwayat hidup singkat anggota Komite Audit sebagai berikut:



Dasar hukum penunjukan sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham



Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2015 adalah 52 tahun. Lahir tanggal 31 Desember tahun 1964, menyelesaikan pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Jurusan Akuntansi, memiliki pengalaman sebagai Auditor Madya di kantor Kementerian BUMN dan sebagai anggota Komite Audit PT PNM sejak 2012-2013, serta beberapa instansi lainnya. Ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Bio Farma sejak tanggal 23 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-01/DK/BF/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 diperbaharui dengan SK No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Lainnya maupun Pemegang Saham

KOMITE AUDIT



Dasar hukum penunjukan sebagai Ketua Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.



Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2015 adalah 70 tahun. Lahir di Padangsidimpuan, tanggal 11 Agustus 1946, Menyelesaikan pendidikan S1 dari Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi (1975), memiliki pengalaman sebagai Auditor di Bidang Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah pada Direktorat Akuntan Negara (1969), Kasiwas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kanwil VII DJPKN Palembang (1981), Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Jasa Perdagangan dan Pertambangan di Kanwil VII DJPKN Palembang (1982), Kasiwas Pertambangan & Energi, Bidwas BUMN/BUMD II di Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel (1984), Kasiswas Industri 3, Bidwas BUMN/BUMD I di Unit Perwakilan BPKP DKI Jakarta (1985), Ka Bidwas Pengeluaran II di Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel (1993), Ka Bidwas BUMN/BUMD I di Perwakilan BPKP Prov. Jatim (1996), Kepala Perwakilan (Eselon II) di Unit Deputy Bidang Pengawasan Penerimaan (1998), Direktur Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit Deputy Bidang Pengawasan Penerimaan (2001), Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan & Kemanan di Unit Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (2001). Kepala Perwakilan (Eselon II) Unit Perwakilan BPKP Prov. Jatim (2002), Deputy (Eselon I) di Unit Deputy Bidang Akuntan Negara. Selain itu juga memiliki pengalaman di bidang Audit/Pengawasan yaitu pengalaman Audit selama 35 tahun dibidang Perusahaan Negara, BUMN & BUMD, Komisaris Independen PT Indofarma Global Medika, Ketua Badan Pengawas Yayasan Keluarga BPKP Dharma Satya Parahita, Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Bio Farma sejak tanggal 01 Juli 2014.

Penghargaan

Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun (1996)
Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Audit adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 diperbaharui dengan SK No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Lainnya maupun Pemegang Saham

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.



KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE AUDIT

KUALIFIKASI PENDIDIKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

- Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan :
 - Memiliki integritas yang baik pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 - Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
 - Mampu berkomunikasi secara aktif.
 - Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- Salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

Anggota Komite Audit Bio Farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat pada profil di bawah ini

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Paruli Lubis	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.	- S1, Insititut Ilmu Keuangan Jakarta - S2, Program Master of Business Administration di Washington University – Saint Louis, Amerika Serikat	- Meniti karir di lingkungan Kementerian Keuangan RI - Kepala Kantor Wilayah XXVII Direktorat Jenderal Anggaran di Manado - Direktur Pelaksanaan Anggaran - Direktur Sistem Perbendaharaan - Direktur Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015	- S1, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung - S2, Magister Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran - S3, Doktor pada Program Pascasarjana S3 Unpad Buku Kajian Utama Ilmu Komunikasi	- Aktif berorganisasi di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perhimpunan Masyarakat Madani, Komunitas Konsultasi Komunikasi (Konklusi) dan Persatuan Islam. - Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis) - Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis) - Ketua STKIP Persis - Dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung - Dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al- Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno. - Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan

KOMITE AUDIT

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Abu Bakar	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-01/DK/BF/II/2014 tanggal 23 Januari 2014 diperbaharui dengan SK No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.	S1, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Jurusan Akuntansi	8. Auditor Madya di kantor Kementerian BUMN 9. Anggota Komite Audit PT PNM serta beberapa instansi lainnya.
M. Asawir Harahap	Anggota Komite Audit	Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-15/DK/BF/II/2014 tanggal 01 Juli 2014 diperbaharui dengan SK No. KEP-10/DK/BF/09/2015, tanggal 30 September 2015.	S1 dari Institut Ilmu Keuangan/Akuntansi	10. Sebagai Auditor di Bidang Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah pada Direktorat Akuntan Negara 11. Menjadi Kasiwas di beberapa Unit di Kanwil VII DJPKN Palembang Kasiwas Jasa Bidwas Industri, Kanwil VII DJPKN Palembang, Unit Perwakilan BPKP Prov. Sumsel, Unit Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Prov. Jatim 12. Kepala Perwakilan (Eselon II) di Unit Deputy Bidang Pengawasan Penerimaan 13. Direktur Pengawasan Penerimaan Pajak di Unit Deputy Bidang Pengawasan Penerimaan 14. Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan & Keamanan di Unit Deputy Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polvoskam 15. Kepala Perwakilan (Eselon II) Unit Perwakilan BPKP Prov. Jatim 16. Deputy (Eselon I) di Unit Deputy Bidang Akuntan Negara. 17. Menjadi Auditor & Pengawasan selama 35 tahun dibidang Perusahaan Negara, BUMN & BUMD, 18. Komisaris Independen PT Indofarma Global Medika, 19. Ketua Badan Pengawas Yayasan Keluarga BPKP Dharma Satya Parahita, 20. Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dan PT Taspen (Persero).



INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Independensi anggota Komite Audit tertuang dalam pada Pedoman Kerja (*Charter*) Komite Audit yaitu bahwa anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Mampu berkomunikasi secara efektif.
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
8. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
9. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada BUMN/Perusahaan lain.
10. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Semua anggota Komite Audit tidak mempunyai afiliasi dengan anggota Komite Audit Lainnya, dengan Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Independensi Komite Audit ditetapkan untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya atau hubungan dengan pihak lain secara Independen tanpa campur tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Dasar perusahaan yang secara material dapat mengganggu objektivitas dan kemandirian tugas Komite Audit yang dijalankan untuk kepentingan perusahaan. Antar Anggota Komite Audit serta antara Anggota Komite Audit, dengan Anggota Komite Risiko Pengembangan dan GCG, dengan Direksi, dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.



Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2014.

KOMITE AUDIT

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Komite Audit

Paruli Lubis	1. Tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham
Ihsan Setiadi Latief	2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
Abu Bakar	3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris atau dengan Direksi, Komite Yang Lain & Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
M. Asawir Harahap	4. Tidak merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.
	5. Jika anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.
	6. Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut:
	a. Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah.
	b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan dengan Perusahaan.
	c. Menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengawasan sebagai Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero).

Hubungan Afiliasi Komite Audit

Hubungan afiliasi antara anggota Komite, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Audit dengan anggota Direksi.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Audit dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Audit dengan anggota Komite lainnya

Hubungan Keluarga & Hubungan Anggota Komite Audit

Hingga 31 Desember 2016, seluruh anggota Komite Audit Bio Farma tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan : Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan Komite Audit lainnya

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Hubungan Keluarga dengan								Hubungan Keuangan dengan							
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komite	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paruli Lubis	Ketua	22-Nov-12	√		√		√		√		√		√		√		√	
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30-Sep-15	√		√		√		√		√		√		√		√	
Abu Bakar	Anggota	23-Jan-14	√		√		√		√		√		√		√		√	
M. Asawir Harahap	Anggota	01-Jul-14	√		√		√		√		√		√		√		√	

Kepemilikan Saham Anggota Komite Audit Beserta Keluarga

Hingga 31 Desember 2016, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki saham di PT Bio Farma (Persero), Badan Usaha Milik Negara lain dan Perusahaan serta tidak ada kepemilikan saham secara pribadi maupun keluarga.

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			PT Bio Farma (Persero)		BUMN Lain		Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paruli Lubis	Ketua	22-Nov-12		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30-Sep-15		√		√		√
Abu Bakar	Anggota	23-Jan-14		√		√		√
M. Asawir Harahap	Anggota	01-Jul-14		√		√		√

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Kepemilikan Saham (Lembar)					
			Pribadi Pada Perusahaan Lain		Keluarga Pada Perusahaan Lain		Pribadi /Keluarga Pada Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paruli Lubis	Ketua	22-Nov-12		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30-Sep-15		√		√		√
Abu Bakar	Anggota	23-Jan-14		√		√		√
M. Asawir Harahap	Anggota	01-Jul-14		√		√		√

Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Tidak Memiliki Hubungan Kepengurusan Di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi		Tidak Menjabat Sebagai Pengurus Partai Politik, Pejabat & Pemerintah		Tidak Menjabat Sebagai Komite Di Perusahaan Lain	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Paruli Lubis	Ketua	22-Nov-12		√		√		√
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30-Sep-15		√		√		√
Abu Bakar	Anggota	23-Jan-14		√		√		√
M. Asawir Harahap	Anggota	01-Jul-14		√		√		√

KOMITE AUDIT

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2014. Piagam Komite Audit berisi latar belakang, visi, misi, maksud dan tujuan, kedudukan, keanggotaan, hak dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pihak yang terkait, rapat, laporan, serta konflik dan kode etik sebagai pedoman bagi Komite Audit.

Berdasarkan Piagam Komite Audit (*Charter Komite Audit*), Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas Pokok Komite Audit

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
 - a. Memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - b. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham;
 - c. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI (auditor internal) maupun auditor ekstern untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta pelaksanaannya;

- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
2. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Audit.
4. Menyusun jenis dan jumlah gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS.
5. Melakukan evaluasi dan analisis atas sistem penggajian, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Dewan Komisaris namun tidak sebatas pada

1. Menyusun dan mereview secara berkala *Charter* Komite Audit.
2. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai BUMN, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen dan informasi lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan BUMN Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan BUMN.
4. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN.
5. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
6. Mengkaji kecukupan fungsi audit eksternal termasuk didalamnya perencanaan audit dan jumlah auditornya.



Hak dan Kewenangan

1. Kepada Anggota Komite Audit baru diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4. Komite Audit, berdasarkan Surat Tugas dari Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perusahaan dari Direksi, SPI dan semua satuan organisasi perusahaan. Jika terjadi kasus/indikasi penyimpangan komite audit perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus tersebut.
5. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.
6. *Self Assessment* GCG PT Bio Farma.
7. Evaluasi Penjualan Vaksin Polio.
8. Melaksanakan rapat Evaluasi Hasil Pemeriksaan SPI Triwulan IV Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2016.
9. Melakukan rapat pembahasan untuk menindaklanjuti surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif.
10. Melakukan verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Direktur Perencanaan dan Pengembangan, beserta Kepala Divisi terkait.
11. Melakukan verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Direktorat SDM, Direktorat Keuangan dan Kepala Divisi terkait.
12. Melakukan verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Direktur Produksi, Direktorat Pemasaran dan Kepala Divisi terkait.
13. Melakukan verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Pengurus Forwan Bio Farma.
14. Melakukan verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif dengan Pengurus HIKA Biofarma.
15. Melakukan kunjungan, monitoring kepada mitra binaan Biofarma yang berlokasi di Garut, Jawa Barat dalam rangka evaluasi kemajuan usaha mitra binaan.
16. Rapat Finalisasi hasil verifikasi atas surat Forum Karyawan PT Bio Farma terkait seruan moratorium penerimaan karyawan PT Bio Farma dan investasi yang tidak produktif.
17. Pembahasan Teknis Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) Semester I Tahun 2016.

Pedoman Kerja Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Pedoman Kerja (*Charter*) Komite Audit tanggal 1 Juli 2014.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2016

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja Komite Audit (RKKa) yang disetujui Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit 2015.
2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Bio Farma Tahun 2016.
3. Pembahasan Teknis LMP dan Laporan PKBL Tahun 2015.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan.
5. Evaluasi Rencana Pendirian Anak Perusahaan.

KOMITE AUDIT

18. Melakukan evaluasi Komite Audit atas menurunnya kinerja PT Bio Farma (Persero) dalam Semester I Tahun 2016, dimana Biofarma hanya mencapai laba bersih Rp167,9 miliar atau 35,91% dari RKAP Semester I Tahun 2016 sebesar Rp467,8 miliar dan turun 36,41% bila dibandingkan dengan Semester I Tahun 2015 sebesar Rp264,2 miliar.
19. Telaahan atas Rancangan RKAP PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017.
20. Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen PT Bio Farma (Persero) Triwulan III Tahun 2016.

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

No.	Tanggal	Agenda
1	Januari 2016	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit 2015.
2	Januari 2016	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PT Bio Farma Tahun 2015.
3	Januari 2016	Pembahasan Teknis LMP dan Laporan PKBL Tahun 2015
4	Februari 2016	Evaluasi Pelaksanaan Tugas KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan
5	Februari 2016	Evaluasi Kinerja dan usulan penunjukan KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan untuk melakukan Audit Umum Tahun Buku 2016.
6	Februari 2016	Self Assessment GCG PT Bio Farma
7	Februari 2016	Tanggapan Komite Audit atas Permohonan Persetujuan dan ata Pemindahtanganan Aset Tetap Rusak atau tidak produktif.
8	April 2016	Pemberian masukan atas Permohonan Izin Direksi melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.
9	April 2016	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) Triwulan I Tahun 2016
10	April 2016	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Manajemen PT Bio Farma (Persero) Triwulan I Tahun 2016.
11	April 2016	Pemberian masukan atas permohonan izin Direksi Dinas ke luar negeri.
12	April 2016	Pemberian masukan atas permohonan izin Direksi Dinas ke luar negeri.
13	Mei 2016	Memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan Aset Tetap atau tidak produktif.
14	Mei 2016	Pemberian masukan atas permohonan izin Direksi Dinas ke luar negeri.
15	Mei 2016	Tanggapan Komite Audit atas Permohonan Persetujuan Fasilitas KMKE dari Indonesia Eximbank
16	Juni 2016	Sinkronisasi Kebijakan Akuntansi Penyusutan Aktiva Tetap dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
17	Juli 2016	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) Triwulan II Tahun 2016
18	Juli 2016	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Manajemen PT Bio Farma (Persero) Triwulan II Tahun 2016
19	September 2016	Reviu Hasil Audit Satuan Pengawasan Intern Bio Farma
20	September 2016	Melakukan Reviu dan Pemberian Masukan atas Draft RKAP PT Bio Farma untuk Tahun Buku 2017
21	Oktober 2016	Evaluasi Komite Audit atas Permohonan Persetujuan Peningkatan Modal Disetor/Ditempatkan PT Bio Farma (Persero)
22	Oktober 2016	Penyampaian Telaahan Usulan RKAP dan RKA-PKBL PT Bio Farma (Persero) Tahun 2017
23	Desember 2016	Evaluasi Komite Audit atas Laporan Manajemen Perusahaan Tahun 2016 (Unaudited)



FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, baik berupa rapat internal, atau rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, Kepala SPI, Kepala Divisi atau Auditor Eksternal. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua yang hadir. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

Selama tahun 2016, Komite Audit mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 7 (tujuh) kali berupa rapat dengan SPI, rapat dengan eksternal auditor, rapat dengan Anggaran & Akuntansi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi. Data kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Paruli Lubis	Ketua	6	85,71 %
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap Anggota	4	57,14 %
Abu Bakar	Anggota (Eksternal)	4	57,14 %
M. Asawir Harahap	Anggota (Eksternal)	7	100 %

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

RAPAT KOMITE AUDIT TAHUN 2016

No	Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	20 Januari 2016	Hotel Mercure, Bandung	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Tahun Buku 2015 (Unaudited) PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief Abu Bakar M. Asawir Harahap
2	24 Februari 2016	PT Bio Farma (Persero)	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Tahun Buku 2015 (Audited) PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief Abu Bakar M. Asawir Harahap
3	27 April 2016	Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis Abu Bakar M. Asawir Harahap

KOMITE AUDIT

No	Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	27 Juli 2016	Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief Abu Bakar M. Asawir Harahap
5	21 Oktober 2016	Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan III Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis M. Asawir Harahap
6	27 Oktober 2016	Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2021 PT Bio Farma (Persero)	M. Asawir Harahap
7	27 Oktober 2016	Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2017-2021 PT Bio Farma (Persero)	Paruli Lubis Ihsan Setiadi Latief M. Asawir Harahap

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Remunerasi bagi Komite Audit ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dekom No: KEP-15/DK/BF/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, diperbaharui dengan SK Dewan Komisaris No : KEP-07/DK/BF/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Remunerasi yang diterima oleh Komite Audit terdiri atas honorarium dan fasilitas lainnya seperti asuransi. Anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan honorarium bulanan dan fasilitas. Anggota Komite Audit yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit untuk melaksanakan tugas menjadi beban perusahaan. Besaran remunerasi Komite Audit tersebut ditentukan melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut:



Penetapan Penghasilan Bagi Anggota Komite Audit

No	Jenis Penghasilan	Besaran
1	Honorarium bulanan bagi anggota Komite Audit	20% x gaji Direktur Utama = Rp17.520.000
2	Tunjangan : Tunjangan Hari Raya Tunjangan Komunikasi Santunan Purna Jabatan Tunjangan Transportasi	Rp17.520.000 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
3	Fasilitas Fasilitas Kesehatan	Tidak ada
4	Tantiem/Insentif Kinerja	Tidak ada



Sosialisasi Kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, yang bekerjasama dengan Bio Farma untuk menyiapkan dan memberikan pemahaman kepada pemerintah dan aparat di tataran desa termasuk siswa sekolah, tentang manfaat yang akan didapat dari penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan taman bumi internasional atau "UNESCO Global Geopark".

Remunerasi Komite Audit Tahun 2016

Dalam Rupiah

Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
			1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Paruli Lubis	Ketua	22-Nov-12	-	-	-	-	-
Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua Merangkap Anggota	30-Sep-15	-	-	-	-	-
Abu Bakar	Anggota	23-Jan-14	210.240.000	-	210.240.000	17.520.000	227.760.000
M. Asawir Harahap	Anggota	01-Jul-14	210.240.000	-	210.240.000	17.520.000	227.760.000
Total			420.480.000	-	420.480.000	35.040.000	455.520.000

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Komite Audit dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit. Sepanjang tahun 2016, anggota Komite Audit telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

Pelatihan Komite Audit 2016

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1.	Paruli Lubis	Ketua	-	-	-	-	-
2.	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua merangkap Anggota	-	-	-	-	-
3.	Abu Bakar	Anggota	-	-	-	-	-
4.	M. Asawir Harahap	Anggota	14 Januari 2016	Workshop dampak penerapan PMK 191 bagi Perusahaan	IAI Pusat Menteng	IAI Jakarta	Ekstern
			20 – 22 September 2016	Training Financial Risk Management	Jakarta	IAI Jakarta	Ekstern

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2011, sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-02/DK/BF/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero).

Pada tahun 2012 Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bio Farma (Persero) berubah menjadi Komite Audit dan Remunerasi serta Komite Risiko & Nominasi yaitu berdasarkan KEP-02/DK/BF/V/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi PT Bio Farma (Persero) serta No. KEP - 10/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Remunerasi.

KOMITE AUDIT DAN REMUNERASI

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dalam rangka mengelola kegiatan usaha PT Bio Farma (Persero) selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Audit PT Bio Farma.

Untuk membatasi jumlah Komite perlu pembatalan Surat Keputusan No. KEP-01/DK/BF/XI/2012 tentang Pengangkatan Komite Audit dan Remunerasi serta pembatalan Surat Keputusan No. KEP-10/DK/BF/XI/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Remunerasi.

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-10/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, Komite Audit dan Remunerasi diubah menjadi Komite Audit.

KOMITE RISIKO DAN NOMINASI

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, dalam rangka mengelola kegiatan usaha PT Bio Farma (Persero) selain efisien, berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang baik, dalam membantu Dewan

Komisaris melaksanakan tugasnya, maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Risiko PT Bio Farma.

Untuk membatasi jumlah Komite perlu pembatalan Surat Keputusan No. KEP-01/DK/BF/XI/2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi serta pembatalan Surat Keputusan No. KEP-11/DK/BF/XI/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Risiko dan Nominasi.

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15 April 2013, Komite Risiko dan Nominasi diubah menjadi Komite Risiko.

Pada tahun 2014, penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. : KEP-02/DK/BF/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.

PT BIO FARMA (PERSERO) PER 31 DESEMBER 2016 TIDAK MEMILIKI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.

Bio Farma tidak menyajikan informasi nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi, pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi dan kebijakan mengenai suksesi Direksi

KOMITE-KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS YANG DIMILIKI OLEH BIO FARMA

KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG DIBENTUK DEWAN KOMISARIS DAN BERFUNGSI MEMBANTU DEWAN KOMISARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA

KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Risiko Pengembangan dan GCG merupakan organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris terkait permasalahan kebijakan Direksi yang berkaitan dengan pengelolaan risiko (risk management) dan kemungkinan terjadinya risiko usaha, serta pengelolaan perusahaan yang baik (GCG) maka dipandang perlu untuk membentuk Komite Risiko Bio Farma.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Pasal 70 ayat 3, mewajibkan Dewan Komisaris membentuk komite lainnya selain Komite Audit yang berfungsi membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan di PT Bio Farma (Persero)
2. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 Yang Diperbaharui Dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN pasal 17 ayat 1 bahwa organ Dewan Komisaris terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan
 - b. Komite Audit
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diatur secara dalam Pedoman Kerja Komite Risiko Pengembangan dan GCG.

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dibentuk Dewan Komisaris dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Risiko Pengembangan dan GCG diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma terakhir diperbarui melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal Februari 2014 tentang Pengangkatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero).

Masa jabatan anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBENTUKAN, KOMPOSISI DAN PERUBAHAN NAMA KOMITE RISIKO PENGEMBANGAN DAN GCG

1. Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) telah dibentuk sejak tahun 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-33/DK/BF/V/2009 tanggal 15-May-2009 tentang Komite Risiko. Komposisi keanggotaan Komite Risiko sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Triono Soendoro	Ketua
3	Dedy Sopyan	Anggota (eksternal)

2. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-01/DK/BF/V/2010 tanggal 14-May-2010 tentang Perpanjangan keanggotaan Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Triono Soendoro	Ketua
3	Dedy Sopyan	Anggota (eksternal)

3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-01/DK/BF/V/2011 tanggal 12-May-2011 tentang Perpanjangan Keanggotaan Komite Risiko PT Bio Farma (Persero)
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-02/DK/BF/V/2012 tanggal 20-Jan-2012 tentang Pengangkatan Komite Risiko dan Nominasi PT Bio Farma (Persero) dan Perubahan Penamaan Komite Risiko menjadi Komite Risiko dan Nominasi. Komposisi keanggotaan Komite Risiko dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Triono Soendoro	Ketua
2	Herman L. Djuni	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Dedy Sopyan	Anggota (eksternal)
4	Sawidjan Gunadi	Anggota (eksternal)

5. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-11/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komite Risiko dan Nominasi.

Komposisi keanggotaan Komite Risiko dan Nominasi terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 2 (satu) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang pihak eksternal. Komposisi keanggotaan Komite Risiko dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Herman L. Djuni	Ketua
2	Nizar Yamanie	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Dedy Sopyan	Anggota (eksternal)
4	Sawidjan Gunadi	Anggota (eksternal)

6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-11/DK/BF/IV/2013 tanggal 15-Apr-2013 tentang Pengangkatan Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) & Perubahan Penamaan Komite Risiko dan Nominasi menjadi Komite Risiko.

Komposisi keanggotaan Komite Risiko dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Herman L. Djuni	Ketua
2	Nizar Yamanie	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Sawidjan Gunadi	Anggota (eksternal)
4	Dadang Epi Sukarsa	Anggota (eksternal)

7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. KEP-19/DK/BF/XII/2013 tanggal 31-Des-13 tentang Pemberhentian Anggota Komite Risiko PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)

No.	Nama	Jabatan
1	Dedy Sopyan	Anggota (eksternal)
2	Sawidjan Gunadi	Anggota (eksternal)

8. Surat Keputusan Dewan Komisaris Bio Farma No. Kep 02/DK/BF/I/2014 tanggal 15-Jan-14 tentang Pengangkatan Komite Pengembangan, Risiko dan GCG PT Bio Farma (Persero) dan Perubahan Penamaan Komite Risiko berubah menjadi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan No. Kep-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19-Feb-14 tentang Pengangkatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero).

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Afrizal	Anggota (eksternal)	3 (tiga) tahun
2	Dadang Epi Sukarsa	Anggota (eksternal)	2 (dua) tahun

9. Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 tentang Pengangkatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero) :

No.	Nama	Jabatan
1	Heridadi	Ketua
2	Nizar Yamanie	Wakil Ketua I merangkap anggota
3	Ihsan Setiadi Latief	Wakil Ketua II merangkap anggota
4	Afrizal	Anggota (eksternal)
5	Dadang Epi Sukarsa	Anggota (eksternal)

10. Pada tahun 2015 komposisi Komite Risiko, Pengembangan dan Risiko mengalami perubahan yaitu berdasarkan SK Dekom Nomor : KEP-02/DK/BF/VII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 Ihsan Setiadi

Latief dari menjabat sebagai Wakil Ketua II Komite Risiko, Pengembangan dan GCG menjadi Wakil Ketua Komite Audit merangkap anggota dan digantikan oleh M. Subuh sebagai Wakil Ketua Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.

No.	Nama	Jabatan
1	Heridadi	Ketua
2	M. Subuh	Wakil Ketua I merangkap anggota
3	Nizar Yamanie	Wakil Ketua II merangkap anggota
5	Afrizal	Anggota (eksternal)
6	Dadang Epi Sukarsa	Anggota (eksternal)

11. Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bio Farma No. KEP-01/DK/BF/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Pemberhentian Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero), Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero), Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016 tentang Susunan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero)

No.	Nama	Jabatan
1	Heridadi	Ketua
2	M. Subuh	Wakil Ketua I merangkap anggota
3	Nizar Yamanie	Wakil Ketua II merangkap anggota
5	Afrizal	Anggota (eksternal)
6	Judi Januardi Endjun	Anggota (eksternal)



KOMPOSISI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang berasal dari anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dari pihak eksternal. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma tidak berasal dari karyawan Bio Farma dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan vendor Bio Farma.

Per 31 Desember 2016, Komposisi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma adalah sebagai berikut:

Nama Komisaris	Jabatan	SK Pengangkatan
Heridadi	Ketua	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
H.M. Subuh	Wakil Ketua I merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
Nizar Yamanie	Wakil Ketua II merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
Afrizal	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016
Judi Januardi Endjun	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016

NAMA, JABATAN DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komposisi keanggotaan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG terdiri dari 5 (empat) orang, yaitu 3 (dua) orang Komisaris yang menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta 2 (dua) orang pihak independen. Masa kerja Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

Riwayat hidup singkat anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sebagai berikut:



Heridadi Ketua
Ketua Komite Risiko,
Pengembangan dan
GCG

Profil Ketua Komite
Profil Komite Risiko,
Pengembangan dan GCG
dapat di lihat pada Profile
Perusahaan pada Laporan
Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

**H.M. Subuh****Wakil Ketua I Merangkap
Anggota Komite Risiko,
Pengembangan dan GCG**

Profil Wakil Ketua I Merangkap Anggota Komite
Profil Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
dapat di lihat pada Profile Perusahaan pada
Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-02/DK/BF/VII/2015, Tanggal 09 Juli 2015 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

**Nizar Yamanie****Wakil Ketua II Merangkap
Anggota Komite Risiko,
Pengembangan dan GCG**

Profil Wakil Ketua II Merangkap Anggota Komite
Profil Komite Risiko, Pengembangan dan GCG
dapat di lihat pada Profile Perusahaan pada
Laporan Tahunan ini.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. :KEP-11/DK/BF/XI/2012 tanggal 22 November 2012 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya anggota Komite lainnya maupun pemegang saham.

**Afrizal Anggota
(Eksternal)****Anggota Komite Risiko,
Pengembangan dan GCG**

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta, Usia per 31 Desember 2015 adalah 56 tahun. Lahir di Jakarta 17 April 1960, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi (1985) dan lulus Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI (2002). Memiliki pengalaman banyak kerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi UI (1988-1989), Konsultan Akuntansi, Keuangan dan Auditor (1987-1990), Financial Controller (1990-1995), Asisten Direksi PT Tarnsweep International (1996-2000), General Manager Adm. & Keuangan PT SNC Lavalin TPS (2002-2004), Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI (2003-2004), Manajer Audit Badan Audit Internal UI (2005-2008), Direktur Akuntansi UI (2008), Kepala Badan Audit Internal UI (2008-2014), Direktur Logistik UI (2015-2016). Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma sejak tanggal 15 Januari 2014.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No.: KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.



Judi Januardi Endjun
Anggota (Eksternal)
Anggota Komite Risiko,
Pengembangan dan GCG

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Jakarta menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (1985), Diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh Croatia (1991), Spesialis 1 Obstetri & Ginekologi di Fakultas Kedokteran UI (1993), dan saat ini sedang mengambil gelar Magister Hukum UPN Veteran. Memiliki pengalaman banyak kerja sebagai Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor (1985-1987), Sekretaris Pendidikan S1 dan S2 Dep. OBGIN RSPAD/FK UPN Veteran, Ketua Unit Peristi RSPAD, saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Fetomaternal Dep. OBGIN RSPAD. Selain itu masih aktif sebagai dosen dan penguji di beberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta serta aktif menyusun buku kedokteran & Buku Awam. Ditunjuk sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Bio Farma sejak tanggal 02 Februari 2015.

PENGHARGAAN

Pengabdian sebagai dokter Puskemas di Propinsi Timor-Timur (1987) dan Pengabdian 20 tahun sebagai PNS

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

Dasar hukum penunjukan sebagai Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG, Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Komite lainnya maupun Pemegang Saham.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

1. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki integritas yang baik pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas sebagai Komite Risiko, Pengembangan dan GCG.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
 - c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - d. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG Bio Farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat di bawah ini

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Heridadi	Ketua	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	1. S1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2. Sekolah Perwira Wajib Militer ABRI 3. S-2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan - Fakultas Pascasarjana UI 4. Pendidikan Seskoad 5. Pendidikan Lemhannas 6. Program S-3 di Fakultas Kedokteran UGM Di Bidang Biodefense	1. Perwira TNI AD di Keskdam II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur). 2. Dokter di Direktorat Kesehatan TNI AD - Keskdam II/Sriwijaya 3. Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad 4. Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad. 5. Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina 6. Kepala Kesehatan Kostrad 7. Kepala Kesehatan Kodam Jaya 8. Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD 9. Direktur Kesehatan TNI AD. 10. Kepala Pusat Kesehatan TNI 11. Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta 12. Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD 13. Ketua Ikatan Alumni FKUI 1977.
H.M. Subuh	Wakil Ketua I merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	1. S1, Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta 2. S2, School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM) di University of Southern California	1. Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 3. Direktur Pengendalian Penyakit Menular 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI 6. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI.



Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Nizar Yamanie	Wakil Ketua II merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	1. S1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2. Pendidikan Spesialis Saraf di Universitas Indonesia 3. Pendidikan Spesialis Saraf Konsultan di Universitas Indonesia 4. Pernah kuliah di Oxford University-Ingggris	1. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, 2. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, 3. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. 4. Anggota tim penasihat pada Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia (PERPEI) 5. Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk. 6. Anggota Dewan Komisaris PT Surveyor Carbon Consulting 7. Anggota Komisaris Rumah Sakit Sanglah Bali
Afrizal	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	1. S1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Akuntansi 2. S2, Pascasarjana Kekhususan Administrasi Kebijakan Perpajakan Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi FISIP UI	1. Dosen Fakultas Ekonomi UI 2. Konsultan Akuntansi 3. Keuangan dan Auditor 4. Financial Controller 5. Asisten Direksi PT Tarnsweep International 6. General Manager Adm. & Keuangan PT SNC Lavalin TPS 7. Konsultan Senior Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI 8. Manajer Audit Badan Audit Internal UI 9. Direktur Akuntansi UI 10. Kepala Badan Audit Internal UI 11. Direktur Logistik UI
Judi Januardi Endjun	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	1. S1, Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran 2. Diploma of Ultrasound, Universitas of Zagreh Croatia 3. Spesialis 1 Obstetri & Ginekologi di Fakultas Kedokteran UI 4. Saat ini sedang mengambil gelar Magister Hukum UPN Veteran.	1. Kepala Puskesmas Kec. Hato Builico Timor-Timor 2. Sekretaris Pendidikan S1 dan S2 Dep. OBGIN RSPAD/FK UPN Veteran 3. Ketua Unit Peristi RSPAD 4. Saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Fetomaternal Dep. OBGIN RSPAD. 5. Masih aktif sebagai dosen dan penguji di beberapa beberapa Universitas ternama di Jakarta 6. Aktif menyusun karya ilmiah : buku kedokteran & Buku Awam.

INDEPENDENSI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Independensi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tertuang dalam pada Pedoman Kerja (*Charter*) Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yaitu bahwa anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dipilih dari luar perusahaan yang tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
3. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan dan anggota Direksi Perusahaan.
4. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari luar Perusahaan, tidak boleh merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.
5. Jika anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.

Surat Pernyataan Independensi Potensi Benturan Kepentingan Komite Risiko, Pengembangan & GCG

Heridadi	1. Tidak memiliki keterikatan keuangan, kepengurusan, dan/atau kepemilikan saham
Nizar Yamanie	2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan.
H.M. Subuh	3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ke-tiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Dewan Komisaris atau dengan Direksi, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
Afrizal	4. Tidak merangkap sebagai anggota komite pada Perusahaan lain.
Judi Januardi Endjun	5. Jika anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.
	6. Tidak memiliki aktivitas sebagai berikut:
	a. Menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah.
	b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan dengan Perusahaan.
	c. Menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada pengawasan sebagai Komite Risiko, Pengembangan & GCG PT Bio Farma (Persero).



HUBUNGAN AFILIASI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Hubungan afiliasi antara anggota Komite, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan anggota Direksi.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG dengan anggota Komite lainnya.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Berdasarkan Piagam Komite Risiko, Pengembangan dan GCG PT Bio Farma (Persero), tugas dan tanggung jawab Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sebagai berikut:

1. Komite Risiko, Pengembangan dan GCG bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Divisi Compliance dan *Risk Management* Perusahaan;
 - b. Melakukan review atas penilaian risiko oleh Divisi Compliance dan *Risk Management* terhadap rencana investasi perusahaan yang material;
 - c. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi Compliance dan *Risk Management* dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG oleh Divisi Compliance dan *Risk Management*;

- e. Melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan atau ekspansi bisnis;
- f. Melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG serta dan mendampingi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* (CRM) dalam *assessment* GCG oleh pihak eksternal secara berkala;
- g. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi.
- h. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan;
- i. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan Perusahaan sesuai kebutuhan;
- j. Menyusun sistem penilaian dan nominasi calon Direksi dan Dewan Komisaris;
- k. Memberikan evaluasi dan analisa atas system seleksi, rekrutmen, dan suksesi karyawan perusahaan;
- l. Menyusun jenis dan jumlah gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS;
- m. Melakukan evaluasi dan analisa atas system penggajian, honorarium, tunjangan dan fasilitas yang sudah/akan diberikan kepada level manajemen dan karyawan.

WEWENANG KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan kewajibannya, komite berwenang untuk:

1. Memperoleh semua dokumen dan akses penuh, independen, dan tidak terbatas tentang kebijakan perusahaan yang terkait dengan strategi pengembangan usaha, penerapan GCG, pengelolaan risiko, dan sistem nominasi dan remunerasi perusahaan;
2. Bekerjasama dengan *counterpart* manajemen perusahaan, termasuk anggota Direksi yang berkaitan, dan terutama dengan Divisi *Compliance* dan *Risk Management*, Divisi SDM, *Corporate*

Strategy, SPI, dan Divisi-divisi lain terkait sebagai *Risk/Business Process Owner*;

3. Melakukan rivi u atas fungsi Divisi *Compliance* dan *Risk Management* terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG dan keberadaan dan efektivitas implementasi ERM di PT Bio Farma (Persero);
4. Mendapatkan masukan dari profesional eksternal/ pihak yang independen bila diperlukan atas biaya perusahaan.

PEDOMAN KERJA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG berpedoman pada Piagam (*Charter*) Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang disahkan pada 19 Februari 2014.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Sepanjang tahun 2016, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja yang disetujui Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Pembahasan implimentasi RKA Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tahun 2016
2. Pembahasan tindaklanjut hasil asesmen GCG oleh BPKP Jabar dan pembahasan penyusunan laporan final risk management tahun 2015 dan pembahasan Corporate Risk Register tahun 2015.
3. Mengikuti Rapat Kerja (Plan of Action) PT Bio Farma (Persero) tahun 2016 dengan tema “*Biotech Innovation for Global Competitiveness*”.
4. Pembahasan pembentukan anak Perusahaan klinik dan Imunisasi (APKI) antara Komite Risiko Pengembangan dan GCG dengan Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Tim UBKI, Konsultan Studi dan Manajemen terkait lainnya.
5. Pembahasan rencana pendirian anak Perusahaan, perkembangan/issue UU JPH, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil assessment GCG oleh BPKP, dll.
6. Pembahasan lanjutan pembentukan anak Perusahaan klinik dan imunisasi PT Bio Farma (Persero), Komite Dekom (Komite Audit & Komite RPG) dengan Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Divisi CRM, Divisi Klinik dan Imunisasi dan Konsultan Studi Kelayakan APKI.
7. Pembahasan penyusunan laporan Komite RPG dan evaluasi pelaksanaan program kerja Komite, dll.
8. Pembahasan permintaan persetujuan Direksi atas perubahan struktur organisasi, penggunaan cadangan Perusahaan dan dampak PSAK 24 tahun 2014, persetujuan atas pelampauan realisasi investasi, usulan tantiem dan gaji Direksi dan Komisaris tahun 2016, serta usulan penetapan KAP untuk audit laporan tahunan 2016.
9. Pembahasan persiapan self assessment penerapan GCG dan *progress* implimentasi perubahan ERM dari COSO menjadi ISO 31000.
10. Pembahasan LMP periode triwulan I tahun 2016
11. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Bio Farma (Persero).
12. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur SDM, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
13. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur Keuangan, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
14. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur Produksi, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
15. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Pengurus Forwan BF.
16. Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Pengurus Hika BF.
17. Pembahasan hasil verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF, Laporan Komite Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama.
18. Pembahasan risiko pemalsuan produk dan mitigasinya risiko keterlambatan suplai vaksin, risiko tidak bisa menjual ke konsumen bilateral.
19. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2015, antara Komite Dekom dan Manajemen Perusahaan.
20. Pembahasan risiko korporat dengan tim *counterpart* manajemen PT Bio Farma (Persero): risiko kerugian kurs, dan risiko keterlambatan realisasi investasi.



21. Pembahasan risiko perusahaan terkait kebijakan dan regulasi yang berdampak pada kualitas : persiapan sertifikasi produk halal, pembahasan risiko korporat “ ketidaksiapan produksi vaksin influenza”.

Agenda Kegiatan Komite Risiko, Pengembangan dan GCG Tahun 2016

Agenda
Pembahasan implementasi RKA Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tahun 2016
Pembahasan tindaklanjut hasil asesmen GCG oleh BPKP Jabar dan pembahasan penyusunan laporan final <i>risk management</i> tahun 2015 dan pembahasan Corporate Risk Register tahun 2015.
Mengikuti Rapat Kerja (Plan of Action) PT Bio Farma (Persero) tahun 2016 dengan tema “ <i>Biotech Innovation for Global Competitiveness</i> ”.
Pembahasan pembentukan anak Perusahaan klinik dan Imunisasi (APKI) antara Komite Risiko Pengembangan dan GCG dengan Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Tim UBKI, Konsultan Studi dan Manajemen terkait lainnya.
Pembahasan rencana pendirian anak Perusahaan, perkembangan/issue UU JPH, progres tindak lanjut atas rekomendasi hasil assessment GCG oleh BPKP, dll.
Pembahasan lanjutan pembentukan anak Perusahaan klinik dan imunisasi PT Bio Farma (Persero), Komite Dekom (Komite Audit & Komite RPG) dengan Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Divisi CRM, Divisi Klinik dan Imunisasi dan Konsultan Studi Kelayakan APKI.
Pembahasan penyusunan laporan Komite RPG dan evaluasi pelaksanaan program kerja Komite, dll.
Pembahasan permintaan persetujuan Direksi atas perubahan struktur organisasi, penggunaan cadangan Perusahaan dan dampak PSAK 24 tahun 2014, persetujuan atas pelampauan realisasi investasi, usulan tantiem dan gaji Direksi dan Komisaris tahun 2016, serta usulan penetapan KAP untuk audit laporan tahunan 2016.
Pembahasan persiapan self assessment penerapan GCG dan progres implementasi perubahan ERM dari COSO menjadi ISO 31000.
Pembahasan LMP periode triwulan I tahun 2016
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Bio Farma (Persero).
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur SDM, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur Keuangan, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan dengan Direktur Produksi, Kepala Divisi terkait, Kepala DIVISI CRM dan SPI.
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Pengurus Forwan BF.
Pembahasan, verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF dengan Pengurus Hika BF.
Pembahasan hasil verifikasi dan klarifikasi surat Forwan BF, Laporan Komite Dewan Komisaris kepada Komisaris Utama.
Pembahasan risiko pemalsuan produk dan mitigasinya risiko keterlambatan suplai vaksin, risiko tidak bisa menjual ke konsumen bilateral.
Pembahasan Laporan Manajemen Semester I tahun 2015, antara Komite Dekom dan Manajemen Perusahaan.
Pembahasan risiko korporat dengan tim <i>counterpart</i> manajemen PT Bio Farma (Persero) : risiko kerugian kurs, dan risiko keterlambatan realisasi investasi.
Pembahasan risiko perusahaan terkait kebijakan dan regulasi yang berdampak pada kualitas : persiapan sertifikasi produk halal, pembahasan risiko korporat “ ketidaksiapan produksi vaksin influenza”.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan rapat setidaknya satu kali dalam sebulan yang dipimpin oleh ketua Komite. Keputusan rapat Komite dianggap sah jika disetujui oleh ketua Komite. Setiap rapat Komite harus disusun dalam suatu risalah rapat yang disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pertemuan diadakan.

Selama tahun 2016, Komite Risiko, Pengembangan dan GCG mengadakan/mengikuti rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh rapat tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tugas dan tanggung jawab Komite Risiko, Pengembangan dan GCG. Data kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Heridadi	Ketua	10	100%
2	Nizar Yamanie	Wakil Ketua I	7	70%
3	H.M. Subuh	Wakil Ketua II	0	0%
4	Dadang Epi Sukarsa *	Anggota (eksternal)	1	100%
5	Afrizal	Anggota (eksternal)	10	100%
6	Judi Januadi Endjun **	Anggota (eksternal)	4	40%

* masa jabatan berakhir tanggal 15 Januari 2016

** masa jabatan dimulai tanggal 02 Februari 2016

TANGGAL, AGENDA RAPAT, KEPUTUSAN, TEMPAT DAN NAMA PESERTA RAPAT KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Sepanjang tahun 2016, rincian tanggal, agenda rapat, keputusan, tempat dan nama peserta Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG sebagai berikut:

Agenda Rapat Komite Risiko, Pengembangan dan GCG

Rapat Komite RPG Tahun 2016				
No.	Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	14 Januari 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Assessment GCG oleh BPKP – Jawa Barat 2. Pembahasan Corporate Risk Register Tahun 2016	Heridadi Nizar Yamanie Dadang Epi Sukarsa Afrizal
2	26 April 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	1. Pembahasan Persiapan <i>Self Assessment</i> 2. Pembahasan Progress Perubahan Basis ERM ke ISO 31000	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal
3	27 April 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Triwulan I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero)	Heridadi Afrizal
4	30 Mei 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Progress Pengembangan Produk Vaksin dan lainnya	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal Judi Januadi Endjun
5	25 Juli 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	1. Pembahasan Risiko Keterlambatan Suplai Vaksin 2. Pembahasan Risiko Tidak Bisa Menjual Produk ke Konsumen Bilateral 3. Risiko Pemalsuan Produk dan Mitigasinya.	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal



Rapat Komite RPG Tahun 2016

No.	Tanggal Rapat	Tempat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6	27 Juli 2017	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Teknis Laporan Manajemen Perusahaan Semester I Tahun 2016 PT Bio Farma (Persero)	Heridadi Afrizal
7	15 Agustus 2016	Ruang Rapat PT Bio Farma (Persero)	1. Pembahasan Monitoring dan Mitigasi Risiko Fluktuasi Nilai Tukar 2. Pembahasan Monitoring dan Mitigasi Risiko Keterlambatan Realisasi Investasi	Heridadi Afrizal
8	28 September 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	1. Monitoring dan Pembahasan Perubahan Regulasi : • WHO/POM terkait OPV; • UU Jaminan Produk Halal 2. Monitoring dan Pembahasan Risiko Ketidaksiapan Fasilitas Produksi Vaksin Pandemik	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal Judi Januadi Endjun
9	28 September 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	Pembahasan Draft Risiko Korporat Tahun 2016	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal Judi Januadi Endjun
10	24 Oktober 2016	Ruang Rapat Gedung Pakarti, Jakarta	Mitigasi, Monitoring dan Evaluasi Risiko Meningkatnya Persaingan Global	Heridadi Nizar Yamanie Afrizal Judi Januadi Endjun

REMUNERASI KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG

Remunerasi bagi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG ditetapkan secara internal oleh Dewan Komisaris Bio Farma dan diatur lebih lanjut dalam SK Dewan Komisaris No : KEP-10/DK/BF/07/2016 tanggal 27 Juli 2016.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang berasal dari Dewan Komisaris tidak diberikan honorarium bulanan. Anggota Komite Risiko, Pengembangan dan GCG yang tidak berasal dari Dewan Komisaris diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Risiko, Pengembangan dan GCG untuk melaksanakan tugas menjadi beban Perusahaan.

PENETAPAN PENGHASILAAN BAGI ANGGOTA KOMITE RISIKO, PENGEMBANGAN DAN GCG PT BIO FARMA (PERSERO)

No	Jenis Penghasilan	Besaran
1	Honorarium bulanan bagi anggota Komite Risiko, Pengembangan & GCG	20% x gaji Direktur Utama = Rp17.520.000
2	Tunjangan : 1. Tunjangan Hari Raya 2. Tunjangan Komunikasi 3. Santunan Purna Jabatan 4. Tunjangan Transportasi	1. Rp17.520.000 2. Tidak Ada 3. Tidak Ada 4. Tidak Ada
3	Fasilitas Fasilitas Kesehatan	5. Tidak ada
4	Tantiem/Insentif Kinerja	6. Tidak ada

Besaran remunerasi Komite Risiko, Pengembangan dan GCG tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan perincian sebagai berikut:

Remunerasi Komite Risiko Pengembangan dan GCG Tahun 2016

Dalam Rupiah

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Gaji per Tahun	Tunjangan per Tahun	Gaji Bersih per Tahun	Tantiem + THR	Jumlah
			1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 + 4
Heridadi	Ketua	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	-	-	-	-	-
H.M. Subuh	Wakil Ketua I merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/VII/2015, tanggal 09 Juli 2015 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	-	-	-	-	-
Nizar Yamanie	Wakil Ketua II merangkap Anggota	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	-	-	-	-	-
Afrizal	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	210.240.000	-	210.240.000	17.520.000	227.760.000
Dadang Epi Sukarsa *	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-06/DK/BF/II/2014 tanggal 19 Februari 2016	17.520.000	-	17.520.000	-	17.520.000
Judi Januardi Endjun**	Anggota (Eksternal)	SK Dekom No. KEP-02/DK/BF/02/2016 tanggal 02 Februari 2016 diperbaharui dengan SK Dekom No. KEP-03/DK/BF/02/2016 tanggal 04 Februari 2016	192.720.000	-	192.720.000	17.520.000	210.240.000
Total			420.480.000	-	420.480.000	35.040.000	455.520.000

*Berakhir masa jabatan tanggal 15 Januari 2016

** Mulai menjabat tanggal 02 Februari 2016

Dalam rangka implementasi GCG, Direksi Bio Farma membentuk beberapa tim sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 00012/DIR/I/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Tentang Tim Penilaian Internal (Internal Asesor) *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* GCG) tahun 2016
2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 03963/DIR/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Tim Penyusunan Laporan Tahunan (Annual Report) dan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. 00013/DIR/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016 Tentang Tim Penyusunan Laporan Implimentasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan Tim Evaluator Internal Implimentasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT Bio Farma (Persero) Tahun 2016.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

SEKRETARIS PERUSAHAAN MEMILIKI PERANAN PENTING DALAM MEMFASILITASI KOMUNIKASI ANTARA PERUSAHAAN DENGAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN, YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMASTIKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUNDANGAN DAN PERATURAN, SERTA ASPEK KETERBUKAAN DARI PERUSAHAAN.



**M. Rahman
Roestan**
Sekretaris
Perusahaan

Warga Negara Indonesia, Berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2016 adalah 46 tahun. Lahir di Bandung pada tahun 1970, memperoleh gelar Sarjana Farmasi dan Apoteker dari Universitas Padjadjaran Bandung. Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari ITB dan telah menyelesaikan Program Doktorat Management Strategic Universitas Padjadjaran. Bergabung dengan PT Bio Farma (Persero) sejak tahun 1998, pernah menjabat berbagai posisi struktural diantaranya sebagai Kepala Bagian Formulasi, Pengemasan, Kepala Bagian *Quality Assurance System* dan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Sejak tahun 2009 menjabat juga sebagai Management Representative untuk Integrated Management System. Aktif di Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan pernah aktif di Yayasan Indonesian Quality Award (IQAF) sebagai Examiner untuk Malcolm Baldrige Criteria for Excellence. Sejak tahun 2012 dilibatkan sebagai delegasi RI untuk pertemuan Internasional bidang Kesehatan di *World Health Organization* (WHO) Jenewa dan di forum *Organization of Islamic Cooperation* (OIC).

Dasar hukum Pengangkatan sebagai Sekretaris Perusahaan adalah Surat Keputusan Direksi No : 341/TK/ASDM/IV/2008, tanggal 02 Juni 2008.

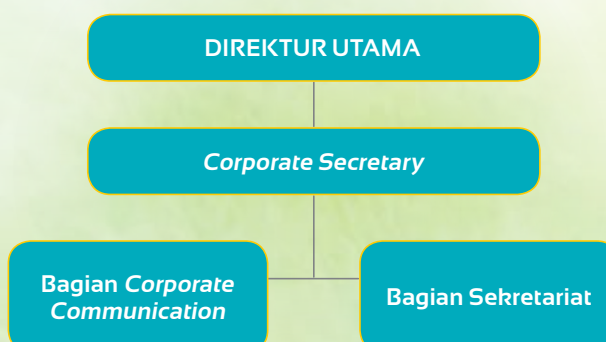
Sekretaris Perusahaan merupakan organ pendukung Direksi yang memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai penghubung (*liaison officer*), menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Fungsi Sekretaris Perusahaan

Dasar pengangkatan dan pemberhentian serta fungsi Sekretaris Perusahaan Bio Farma mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Pasal 29 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



SEKRETARIS PERUSAHAAN

2. Surat Keputusan Direksi No. 341/TK/ASDM/IV/2008 Tanggal 2 Juni 2008 tentang Pengangkatan M. Rahman Roestan sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan membantu tugas Direksi memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan Bio Farma membawahi 2 Bagian, yaitu Komunikasi Perusahaan dan Sekretariat.

Sesuai SK Direksi SK Direksi No. 02491/DIR/VI/2014 Tanggal 2 Juni 2014 tentang Bagan Organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2014, bahwa kedudukan Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan menjalankan tiga fungsi utama yaitu:

1. **Gate Keeper**, dengan fungsi melakukan analisa sistem korporasi baik yang telah dilaksanakan maupun sistem/standar baru yang perlu diimplementasikan ke dalam sistem manajemen terintegrasi.
2. **Sebagai Compliance adviser**, yang berfungsi melakukan telaah dan rekomendasi kepada manajemen dalam aspek GRC (*Governance, Risk, Compliance/legal aspect*).

3. **Sebagai Corporate Agenda**, yang melakukan fungsi koordinasi agenda perusahaan dan kolaborasi dengan instansi lain baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.

Kualifikasi Pendidikan & Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bio Farma telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan (*Job Requirement*) mampu berkomunikasi dan membangun hubungan kerja serta mempunyai pemikiran analitis dan mampu berpikir secara konseptual. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan sistem manajemen dapat terintegrasi dan corporate agenda dapat dikelola dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan fungsi gate keeper dan compliance advisor.

Anggota Komite Risiko, Pengembangan, dan GCG Bio Farma sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan, hal ini dapat dilihat di bawah ini

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
M. Rahman Roestan	Sekretaris Perusahaan	SK Direksi No : 341/TK/ASDM/IV/2008, tanggal 02 Juni 2008.	- S1, Sarjana Farmasi dan Apoteker dari Universitas Padjadjaran Bandung. - S2, Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari ITB - S3, Telah menyelesaikan Program Doktoral Management Strategic Universitas Padjadjaran.	- Kepala Bagian Formulasi, - Kepala Bagian Pengemasan - Kepala Bagian <i>Quality Assurance System</i> - Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Produksi. - Saat ini sedang menjabat sebagai <i>Management Representative</i> untuk <i>Integrated Management System</i>. - Aktif di Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan pernah aktif di Yayasan Indonesian <i>Quality Award</i> (IQAF) sebagai Examiner untuk Malcolm Baldrige Criteria for Excellence. - Sejak tahun 2012 dilibatkan sebagai delegasi RI untuk pertemuan Internasional bidang Kesehatan di World Health Organization (WHO) Jenewa dan di forum Organization of Islamic Cooperation (OIC).

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap perundangan dan peraturan, serta aspek keterbukaan dari perusahaan.

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat menangani hubungan dengan para Pemangku Kepentingan, masyarakat, serta pihak-pihak internal.

Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam Dokumen Job Description & Job Specification Rev #02 tanggal 22-06-2012, diantaranya adalah:

1. Bertindak selaku wakil Perusahaan dan pejabat penghubung antara Perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengkomunikasikan kegiatan Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
2. Mengarahkan seluruh aspek penyelenggaraan RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Menetapkan strategi dan implementasi program komunikasi korporat untuk berbagai target audiens baik dalam dan luar negeri agar reputasi Bio Farma terjaga dengan baik.
4. Mengendalikan penyampaian informasi kinerja Perusahaan dan corporate action kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menganalisis dan mengawasi pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat berdasarkan key performance indicator.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, mengkoordinasikan pencatatan notulen rapat serta mengendalikan administrasi kesekretariatan Direksi.
8. Sebagai Management Representative untuk sistem manajemen terintegrasi ISO, OHSAS, ERM, dan IFRS.
9. Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi aspek GCG, regulasi dengan risiko aktivitas perusahaan.

Terkait tugas mengevaluasi aspek-aspek GCG, Sekretaris Perusahaan memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen dalam upaya penyempurnaan dan melengkapi perangkat kebijakan GCG seperti Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*), Kebijakan GCG, Pedoman Penerapan dan Penilaian Internal Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Piagam Internal Audit dan Piagam Komite Audit.

Untuk mendukung visi Perusahaan menjadi produsen vaksin kelas dunia yang berdaya saing global, Sekretaris Perusahaan mengemban tugas strategis mewakili Perusahaan untuk aktif di berbagai forum internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Organization of Islamic Conference (OIC), DCVMN, GAVI, dan sebagainya.

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

1. *Gate Keeper*, dengan fungsi melakukan analisa kesisteman korporasi baik yang telah dilaksanakan maupun sistem/standar baru yang perlu diimplementasikan ke dalam sistem manajemen terintegrasi.
1. Sebagai *Compliance adviser*, yang berfungsi melakukan telaah dan rekomendasi kepada manajemen dalam aspek GRC (*Governance, Risk, Compliance/legal aspect*).
1. Sebagai *Corporate Agenda*, yang melakukan fungsi koordinasi agenda perusahaan dan kolaborasi dengan instansi lain baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

URAIAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN PADA TAHUN 2016

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

Wewenang

1. Menganalisa sistem yang akan diterapkan dan mengusulkan implementasi dalam korporasi
2. Menyusun jadwal dan agenda rapat manajemen tingkat senior manager, direksi, komisaris dan pemegang saham
3. Mendapatkan akses kegiatan seluruh direksi dan komisaris
4. Menyusun program divisi dan menyetujui laporan program bagian dan unit kerja *Corporate Secretary*
5. Melakukan Koordinasi dengan *stakeholder* nasional dan internasional

Indikator Keberhasilan

1. Presentase keberhasilan sistem yang diimplementasikan korporasi
2. Presentase implementasi keputusan rapat termasuk jumlah program kerja yang mendukung visi perusahaan.
3. Presentase efisiensi dalam pengelolaan RKAP *corporate secretariat*
4. Presentase tingkat komplain dalam sistem *stakeholder management*.
5. Presentase tingkat pencapaian *corporate image* ruang lingkup dalam dan luar negeri

Publikasi Media Internal Tahun 2016

No	Topik	Media
1.	Biomagz	Sosialisasi kebijakan, program dan event perusahaan
2.	<i>Corporate Portal</i>	Informasi korporasi, berkoordinasi dengan IT dan HC
3.	<i>Information Desk</i>	Pemenuhan aspek Keterbukaan Informasi Publik
	Spanduk, banner,dll	Sosialisasi, publikasi event korporasi

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan strategi maupun rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada investor dan publik. Dalam pelaksanaan internalisasi GCG, Corporate Secretary telah melaksanakan berbagai kegiatan secara berkesinambungan dalam upaya membudayakan penerapan GCG di seluruh lingkungan Bio Farma. Evaluasi kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dengan KPI Sekretaris Perusahaan. Pencapaian KPI Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Realisasi Key Performance Indicators (KPI) Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Indikator	Target	Formula	Satuan	Bobot	Nilai (%)	Skor
A. Rutin						
Memastikan pengelolaan Informasi Publik, Memastikan penyusunan <i>Annual Report & Sustainability Report 2012</i>	Paling lambat 3 bulan setelah Laporan Audited diterima perusahaan	Realisasi/Target	%	15	100%	15,00
Memastikan hubungan yang positif dan harmonis dengan seluruh <i>stakeholder</i> perusahaan	Peningkatan brand awareness 15%	Realisasi/Target	%	15	90%	13,50



Indikator	Target	Formula	Satuan	Bobot	Nilai (%)	Skor
Memastikan peningkatan dan Pengelolaan <i>Corporate Image</i> secara Nasional & Global melalui semua saluran komunikasi	Peningkatan berita positif 10%	Realisasi/Target	%	15	90%	13,50
Mengkoordinir & Mengendalikan Penyelenggaraan event yang melibatkan pihak dalam dan luar negeri (Forum Riset Vaksin Nasional, 2nd <i>meeting of</i> OIC, Seminar Edukasi, Program Duta Muda)	Penyelenggaraan minimal 1 event	Realisasi/Target	%	15	100%	15,00
Memastikan Pembuatan dan update dokumentasi perusahaan (<i>video Profile, Company profile, Video Safety</i>)	Paling lambat Desember 2012	Realisasi/Target	%	10	100%	10,00
Mereview & Merespon terhadap korespondensi dengan <i>stakeholder</i> , serta merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam hal Kesekretariatan	Tidak kurang dari 75% diberikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja	Realisasi/Target	%	10	90%	9,00
Sub Jumlah				80		76,00
B. Non Rutin						
Implementasi Quality Management Sistem terintegrasi	Integrasi Manajemen Sistem	Realisasi/Target	%	10	100%	10,00
Realisasi Investasi Tahun 2016 Rp421.199.500	Tidak kurang dari 75% dapat direalisasikan pada tahun berjalan	Realisasi/Target	%	10	75%	7,50
Sub Jumlah				20		17,50
Jumlah				100		93,50

PROGRAM PELATIHAN DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Guna menunjang kinerja Sekretaris Perusahaan serta menambah wawasan dalam bidang *Good Corporate Governance* maka selama tahun 2016, program pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Topik	Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Jenis Pelatihan
1	29-Nov-16	KPKU BUMN Tahun 2016	Bandung	Inhouse	Workshop
2	05-Sep-16	Leadership strategic thinking for leading corporate action	Bandung	Inhouse	Training
3	28-Jul-16	Pengembangan Kepemimpinan	Bandung	Inhouse	Training
4	20-Jun-16	Persiapan & uji coba sertifikasi produk halal	Bandung	LPOM MUI	Workshop
5	22-Nov-16	Sosialisasi assessment & leadership commitment	Bandung	Inhouse	Seminar
6	02-Sep-16	Tax Amnesty	Bandung	Kemenkeu RI	Seminar

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Organ Perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

RUPS sebagai Organ Perusahaan merupakan wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang,

RUPS sebagai Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar

RUPS memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja dan meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengelolaan perusahaan, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, dan menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham sebagai Pemilik Modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.

Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

HAK DAN TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM

1. Hak pemegang saham harus dilindungi dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:
 - a. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.
 - b. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat.
 - c. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya
 - d. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham



- e. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka:
 - Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki
 - Setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
2. Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi:
 - a. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
 - Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (ultimate shareholders) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait
 - b. Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
 - c. Pemegang saham harus dapat:
 - Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi
 - Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut
 - d. Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

Tanggungjawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

1. Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
2. Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
4. Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
5. Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN TERDAPAT 2 JENIS RUPS

1. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:

- a. RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan, diadakan paling lama dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
- b. RUPS mengenai persetujuan RKAP Perusahaan, diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran RKAP yang bersangkutan).

2. RUPS Luar Biasa

RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

RUPS Tahunan



RUPS Luar Biasa





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) RKAP TAHUN 2016

Pedoman Penyusunan RKAP Bio Farma Tahun 2016

1. Surat Menteri BUMN No. S-485/MBU/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Penyampaian Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016.
2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—01//MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER—09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PELAKSANAAN RUPS RKAP TAHUN 2016

RUPS PT Bio Farma (Persero) yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 1 Tanggal 3 Februari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH nomor 26 Tanggal 6 Juni 2014, diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Desember 2015
Waktu : 08.30 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 6. Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat - 10110

AGENDA RUPS RKAP TAHUN 2016

Rincian agenda pembahasan dan keputusan RUPS RKAP tahun 2016, sebagai berikut:

RUPS Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016

RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 di Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta Pusat. RUPS ini membahas tentang:

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016.
2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) tahun 2016.
3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2016.
4. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.
5. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2016.
6. Persetujuan penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap rusak & tidak produktif dengan nilai buku per 31 Desember 2015 sebesar Rp 750,122 juta.
7. Persetujuan untuk mengagunkan sebagian aset tetap perusahaan sebagai jaminan penarikan kredit investasi sebesar Rp 457,50 miliar.
8. Persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

Rekap Kehadiran Pada RUPS RKAP Tahun 2016

RUPS Tahunan 2016 dihadiri oleh Komisaris Utama dan seluruh anggota Dewan Komisaris, termasuk Ketua dan anggota Komite yang ada di bawah Dewan Komisaris, serta Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No	Nama Komisaris	Jabatan	Mulai Menjabat	Kehadiran	
				Hadir	Tidak
Dewan Komisaris					
1	Ahmad Ramli	Komisaris Utama	12 April 2013	√	
2	Paruli Lubis	Komisaris	05 November 2012	√	
3	Nizar Yamani	Komisaris	28 Mei 2012	√	
4	Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	01 Mei 2013	√	
5	Heridadi	Komisaris	23 Januari 2014	√	
6	Mohamad Subuh	Komisaris	22 Juni 2015	√	
Komite Audit					
1	Abu Bakar	Anggota (eksternal)	30 September 2015	√	
2	M. Asawir Harahap	Anggota (eksternal)	30 September 2015	√	
Komite Risiko, Pengembangan dan GCG					
1	Afrizal	Anggota (eksternal)	2014 tanggal 19 Februari 2014	√	
2	Dadang Epi Sukarsa	Anggota (eksternal)	2014 tanggal 19 Februari 2014	√	
Direksi					
1	Iskandar	Direktur Utama	07 Juli 2012	√	
2	Juliman Fuad	Direktur Produksi	12 April 2013	√	
3	Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	12 April 2013	√	
4	Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	07 Juli 2012	√	
5	Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	12 April 2013	√	
6	Andjang Kusumah	Direktur SDM	07-Mar-12	√	

KEPUTUSAN RUPS RKAP TAHUN 2016

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bio Farma (Persero) Tentang Pengesahan RKAP & RKA PKBL tahun 2016 Nomor RIS-03/RUPS/BF/XII/2015, hasil keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan RKAP tahun 2016.
2. Menyetujui RKA PKBL Tahun 2016 sebagaimana Risalah Rapat Pembinaan Penyusunan RKA PKBL PT Bio Farma (Persero) Nomor RIS-46/D7.MBU.4/12/2015 tanggal 2 Desember 2015.
3. Menetapkan Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2016.
4. Menetapkan KPI yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2016 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagaimana lampiran Keputusan Rapat ini.
5. Menetapkan KPI Dewan Komisaris tahun 2016 sebagaimana lampiran keputusan rapat ini.
6. Menyetujui penghapusbukuan dan atau pemindahtanganan aset tetap berupa bangunan, peralatan pabrik, peralatan kantor, dan peralatan lainnya yang rusak & tidak produktif dengan nilai buku per 31 Desember 2015 sebesar Rp750,12 juta.



7. Menyetujui pengagungan sebagian aset tetap perusahaan berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Pasteur Nomor 28 dengan Sertifikat HGB nomor 288 sebagai jaminan penarikan kredit investasi pada perbankan dengan plafon sebesar Rp 457,50 miliar.
8. Menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan sebesar Rp 400 miliar (empat ratus miliar rupiah) yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma Wahyudin & Rekan; menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 400 ribu (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1 juta (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp 400 miliar (empat ratus miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara RI; dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero) untuk disesuaikan dengan pengeluaran/penempatan saham yang masih

dalam simpanan (portepel) dan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3); dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi PT Bio Farma (Persero) untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam angka 8 Keputusan RUPS PT Bio Farma (Persero) ini dalam bentuk otentik dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan – perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk memperoleh pengesahan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dimaksud.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS RKAP 2016

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah menindaklanjuti Arahan RUPS sebagai berikut: Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tentang Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja & Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2016.

No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham	Batas Waktu Penyelesaian
		Efektif	Belum Efektif		
1.	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2016, dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan RKAP dengan selalu berpegang pada prinsip disiplin anggaran dan melaporkannya secara berkala kepada Pemegang Saham	V	-	Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Komite Risiko secara berkala melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham. Kegiatan usaha dilakukan berdasarkan RKAP serta dinamika eksternal lingkungan bisnis.	-
2.	Penetapan target RKAP 2016 didasarkan atas realisasi/capaian dalam prognosa tahun 2015. Dalam hal setelah terbitnya laporan tahun buku 2015 (audited) terdapat deviasi yang material ($\pm$ lebih dari 10%) antara nilai audited dan prognosa, maka RKAP 2016 dan Kontrak Manajemen tahun 2016 dapat diminta untuk direvisi.	V	-	Capaian kinerja tahun buku 2015 dalam Laporan Tahunan yang sudah di audit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan mempunyai deviasi terhadap prognosa dibawah 10% sehingga RKAP 2016 dan Kontrak Manajemen tidak perlu dilakukan revisi (Pendapatan mencapai 98,07%, Aset 102,14% dan laba 108,49% dari prognosa).	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham	Batas Waktu Penyelesaian
		Efektif	Belum Efektif		
3.	RKAP 2016 harus selaras dengan target dalam RJPP. Oleh karenanya apabila RJPP yang ada saat ini dinilai sudah tidak relevan (deviasi salah satu dari total asset, pendapatan, atau laba yang material $\pm 20\%$), maka agar dilakukan adjustment RJPP.	V	-	RJPP yang dimiliki perusahaan saat ini adalah RJPP periode 2012-2016 dan saat ini perusahaan sudah mengajukan draft RJPP 2017-2021 dalam EIS.	-
4.	Sebagai tindak lanjut Kontrak Manajemen yang di dalamnya terdapat <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) dan telah disepakati, agar disusun KPI secara berjenjang untuk setiap level manajemen dan anak perusahaan.	V	-	KPI secara berjenjang untuk setiap level manajemen telah selesai disusun dalam Performance Management System (PMS) diselaraskan dengan RKAP dan RJPP dengan menggunakan pendekatan balance scorecard.	-
5.	Rencana Pengembangan usaha melalui pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan laboratorium terpadu, agar terlebih dahulu disusun kajian komprehensif yang memadai mencakup aspek operasional, finansial maupun legal.	V	-	Kajian komprehensif sudah dibahas dalam rapat dengan Direksi, Komite RPG, Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Kementerian BUMN. Masukan dan saran dalam rapat sudah dimasukkan dalam kajian termasuk di dalamnya aspek operasional, finansial, dan legal dan saat ini dalam tahap finalisasi. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Perusahaan telah melakukan revisi kajian pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan laboratorium terpadu dan revisi kajian sudah dikirimkan ke Kementerian BUMN pada tanggal 4 Mei 2016	-



No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham	Batas Waktu Penyelesaian
		Efektif	Belum Efektif		
6.	Direksi diminta agar mengupayakan sinergi antara BUMN dengan mengacu pada Instruksi Menteri BUMN nomor: KEP-109/MBU/2002 Tentang Sinergi Antar BUMN dan peraturan Menteri BUMN	V	-	Saat ini Perusahaan sudah melakukan sinergi antara BUMN dengan: 1. PT Kimia Farma (Persero) untuk pengadaan bahan baku penunjang produksi (Kanamicine dan obat anastesi); 2. PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) untuk pekerjaan konstruksi; 3. PT Pertamina (Persero) untuk pengadaan solar; 4. PT PLN (Persero) untuk energi listrik; 5. PT Telkom untuk teknologi informasi; 6. LKBN Antara untuk pemberitaan.	-
7.	Direksi diminta memperhatikan Road Map BUMN di bidang Pelayanan Kesehatan sebagai acuan kebijakan pengembangan perusahaan dalam meningkatkan kontribusi perusahaan di sector Pelayanan Kesehatan.	V	-	Pengembangan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> BUMN Farmasi kearah pengembangan Bioteknologi dan <i>Life Sciences Industry</i> .	-
8.	Dalam rangka mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin, perusahaan agar terus mengembangkan produk bahan baku tersebut dan mendorong BUMN Farmasi lain melalui kerjasama untuk mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat di dalam negeri.	V	-	Pengembangan vaksin baru dilaksanakan melalui sinergi riset bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam negeri dengan mengutamakan potensi dalam negeri.	-
9.	Direksi agar memprogramkan penyertaan kerjasama pendirian rumah sakit di Arab Saudi melalui alokasi dana investasi tahun 2016. Selanjutnya pelaksanaan penyertaan kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	V	-	Program kerja sama untuk peningkatan kesehatan masyarakat akan menjadi perhatian utama Direksi. Investasi dan alokasi dana 2016 dilaksanakan sesuai RKAP serta melalui mekanisme persetujuan Dewan Komisaris.	-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

No	Arahan Pemegang Saham	Status		Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham	Batas Waktu Penyelesaian
		Efektif	Belum Efektif		
10.	Direksi diminta menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan dan rekomendasi BPK tahun-tahun sebelumnya.	V	-	a. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2010 dan 2011 dan Biaya-Biaya terkait Pengadaan Vaksin Flu Burung sampai dengan Tahun 2011 pada PT Bio Farma (Persero) mengungkapkan 7 temuan dengan 11 rekomendasi. Dari 11 rekomendasi, sebanyak 10 rekomendasi telah dinyatakan selesai dan 1 rekomendasi penyelesaiannya masih menunggu tanggapan dari Kementerian Kesehatan RI. b. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kegiatan Pengadaan, Pengelolaan Persediaan, Penjualan, dan Biaya Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Bio Farma (Persero) terdapat 17 temuan dengan 52 rekomendasi. PT Bio Farma (Persero) telah mengirimkan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK RI. Sampai dengan 31 Desember 2016 tindak lanjut rekomendasi tersebut masih dalam penelaahan/revisi oleh BPK RI.	-
11.	Direksi agar menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari 2016.	V	-	Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang sudah di audit KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sudah di upload di FIS BUMN pada tanggal 29 Februari 2016.	-



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUN SEBELUMNYA

RUPS PT Bio Farma (Persero) yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 1 Tanggal 3 Februari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH nomor 26 Tanggal 6 Juni 2014, diselenggarakan pada

Hari, tanggal : Jumat, 10 Juni 2016

Waktu : 14.00 WIB s/d 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 6. Gedung
Kementerian BUMN Jalan Medan
Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat
- 10110

AGENDA RUPS

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan Tahun Buku 2015, serta pengesahan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan Tahun Buku 2014.
3. Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan Tahun Buku 2015.
4. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
5. Persetujuan penetapan tantiem Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris, serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016.
6. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016.

DASAR PENYELENGGARAN RUPS

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 70)
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4756)
3. PP No. 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4305)
4. PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara No. 4556)
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2014.
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019
7. Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero) yang dibuat dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 1 tanggal 3 Februari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 26 Tanggal 6 Juni 2014 dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan terbatas

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PT Bio Farma (Persero), dan berdasarkan Surat Kmenterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03087.40.40.21.2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

8. Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-127/MBU/06/2016 Tanggal 9 Juni 2016 dengan hak substitusi kepada Sdr. Imam Apriyanto Putro, Sekretaris Kmenterian BUMN dan Sdr. Wahyu Kuncoro, Deputi Bidang Usaha Industri Agro Dan Farmasi.

REKAP KEHADIRAN PADA RUPS

RUPS Tahunan 2016 dihadiri oleh Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris Bio Farma, Anggota Direksi Bio Farma dan perwakilan dari Kementerian BUMN dan Bio Farma sebagai berikut:

No	Nama Komisaris	Jabatan	Kehadiran	
			Hadir	Tidak
Kuasa Pemegang Saham				
1	Wahyu Kuncoro	Deputi Usaha Industri Agro Dan Farma	√	
Dewan Komisaris				
1	Ahmad Ramli	Komisaris Utama	√	
2	Paruli Lubis	Komisaris	√	
3	Nizar Yamani	Komisaris	√	
4	Ihsan Setiadi Latief	Komisaris	√	
5	Heridadi	Komisaris	√	
6	Muhamad Subuh *	Komisaris		√
*) Muhamad Subuh berhalangan hadir dan dikuasakan kepada Nizar Yamani sesuai Surat Kuasa No. SKU-05/DK/BF/06/2016 Tanggal 9 Juni 2016				
Direksi				
1	Iskandar	Direktur Utama	√	
2	Juliman Fuad	Direktur Produksi	√	
3	Sugeng Raharso	Direktur Perencanaan & Pengembangan	√	
4	Mahendra Suhardono	Direktur Pemasaran	√	
5	Pramusti Indrascaryo	Direktur Keuangan	√	
6	Andjang Kusumah	Direktur SDM	√	
Peserta rapat dari Kementerian BUMN Dan PT Bio Farma				

JALANNYA RUPS

1. RUPS dibuka dan dipimpin oleh Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi sebagai Kuasa Pemegang Saham
2. Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
3. Pemaparan Direksi mengenai hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2015
4. Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris terhadap hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2015
5. Pembahasan dan tanya jawab tentang hasil kegiatan usaha Perseroan Tahun Buku 2015
6. Pembacaan Keputusan RUPAS
7. Penutup.

KEPUTUSAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas kegiatan usaha Tahun Buku 2015, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun Buku 2015, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk menyetujui penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudian & Rekan sesuai laporannya No. 384/LAI.15.BF-4/DWR/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal material", sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015, dengan ketentuan:
 - a. Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku.
 - b. Sepanjang tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014.

Pokok-pokok Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2015
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)		
Aset		
Aset Lancar	1.824.639	1.995.781
Aset Tetap (Net)	1.219.969	3.684.882
Jumlah Aset	3.044.608	5.680.663
Liabilitas & Ekuitas		
Liabilitas Jangka Pendek	339.668	456.663
Liabilitas Jangka Panjang	161.250	179.868
Ekuitas	2.543.689	5.044.132
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	3.044.607	5.680.663
b. Laba-Rugi Komprehensif		
Penjualan Operasional	2.044.080	2.345.918
Beban Pokok Penjualan	(780.090)	(867.488)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2015
Laba (Rugi) kotor	1.263.990	1.478.430
Beban Administrasi dan Umum	- 349.010	- 421.759
Beban Penjualan	- 99.182	- 126.818
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	- 88.779	- 93.443
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	48.882	62.863
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	775.902	899.274
Manfaat (Beban) pajak penghasilan	- 193.709	- 228.681
Laba (Rugi) tahun berjalan	582.193	670.593
Pendapatan (beban) Komprehensif Lain	- 21.323	1.979.954
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	560.870	2.650.546

c) Tingkat Kesehatan Tahun Buku 2015 : Sehat (AA), dengan skor 88,50

d) d. Skor KPI Tahun Buku 2015 : 145,25%

e) e. Skor GCG Tahun Buku 2015 : 86,83 kategori “ Sangat Baik”

3. Menyetujui Laporan Tahunan & mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan sesuai laporannya No. 385 / LAI.15.BF-PKBL/DWR/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal material”, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan & pengawasan PKBL yang telah dilakukan selama tahun Buku 2015 dengan ketentuan:
- Sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku.
 - Sepanjang tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015.

Pokok-pokok Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	31 Desember 2015
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	
Aset	
Kas & Setara Kas	4.007,33
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	17.366,46
Jumlah Aset	21.373,79
Liabilitas & Ekuitas	
Liabilitas	332,88
Aset Bersih	21.040,91
Jumlah Liabilitas & Aset Neto	21.373,79



Uraian	31 Desember 2015
b. Laporan Aktivitas	
Alokasi Laba BUMN Pembina	4.711,56
Pendapatan Bunga	109,06
Pendapatan Jasa Adm	718,85
Pendapatan Lain-lain	457,08
Jumlah Pendapatan	5.996,55
Penyaluran	5.190,74
Beban & Pengeluaran	631,96
Jumlah Penyaluran, Beban & Pengeluaran	5.822,70
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	173,85
Aset Neto Awal Tahun	20.867,06
Aset Neto Akhir Tahun	21.040,91

4. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2015

- a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2015 sebesar Rp670,59 miliar sebagai berikut:

Dividen : Rp. 234,71 miliar (35%)
Cadangan Umum : Rp. 435,89 miliar (65%)
Jumlah : Rp. 670,59 miliar (100%)

- b. Menyetujui alokasi dana untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp. 18 miliar atau ekuivalen 2,68% dari laba bersih tahun 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan.

5. Penetapan tantien Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015, gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan & fasilitas bagi Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016 akan ditetapkan tersendiri.
6. Menyetujui penunjukan kembali KAP Djoemarna, Wahyudin & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2016 dan melimpahkan keuangan kepada Dewan Komisaris untuk:
- a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

- b. Menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan PKBL untuk Tahun Buku 2016.

TINDAK LANJUT ARAHAN RUPS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KEGIATAN PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (PKBL) PT BIO FARMA (PERSERO) TAHUN BUKU 2015.

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah menindaklanjuti Arahan RUPS sebagai berikut:

Tindak Lanjut Keputusan/Arahan RUPS tentang Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) PT Bio Farma (Persero) Tahun Buku 2015.

URAIAN MENGENAI UNIT AUDIT INTERNAL

UNIT AUDIT INTERNAL DI BIO FARMA MENGALAMI PENGEMBANGAN FUNGSI MENJADI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL. PENGEMBANGAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP –PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*.



Sri Widayatiningsih
Kepala Pengendalian
dan Pengawasan
Internal

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2016 adalah 53 tahun. Lahir di Ungaran pada tanggal 3 Mei 1963, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Bergabung di Bio Farma sejak 03 Januari 1994. Menjabat sebagai Kepala Pengawasan Internal (PI) pada tanggal 02 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) SK No. :317/TM/TKK/XII/2014, dengan persetujuan Dewan Komisaris No. S-52/DK/BF/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik.

Dasar hukum Pengangkatan sebagai Sekretaris Perusahaan adalah Surat Keputusan Direksi No : 341/TK/ASDM/IV/2008, tanggal 02 Juni 2008.

PROFIL KEPALA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Sejalan dengan konsep era globalisasi, maka sebagai konsekuensinya makin banyak masalah yang harus dihadapi oleh Perusahaan dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif dan kompleks tersebut. Keadaan ini menuntut Manajemen Perusahaan untuk dapat mengelola Perusahaan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuat Manajemen tidak dapat lagi secara langsung mengawasi aktivitas Perusahaan sehingga harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dipikulnya kepada Auditor Internal.

Manajemen dituntut untuk menerapkan Pengendalian Internal yang tentunya akan sangat berguna untuk mengamankan aset Perusahaan. Variabel yang mempengaruhi efektivitas Pengendalian Internal adalah kualitas Auditor Internal.

Bio Farma membentuk Audit Internal yang disebut dengan Pengawasan Internal (PI) dipimpin oleh seorang Kepala Pengawasan Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan Internal merupakan pengawas yang objektif dan independen, dibentuk untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Audit Internal merupakan suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.



SECARA GARIS BESAR PENGAWASAN INTERNAL (PI) TERDIRI ATAS 2 (DUA) ASPEK

1. Aspek Struktur
2. Aspek Proses

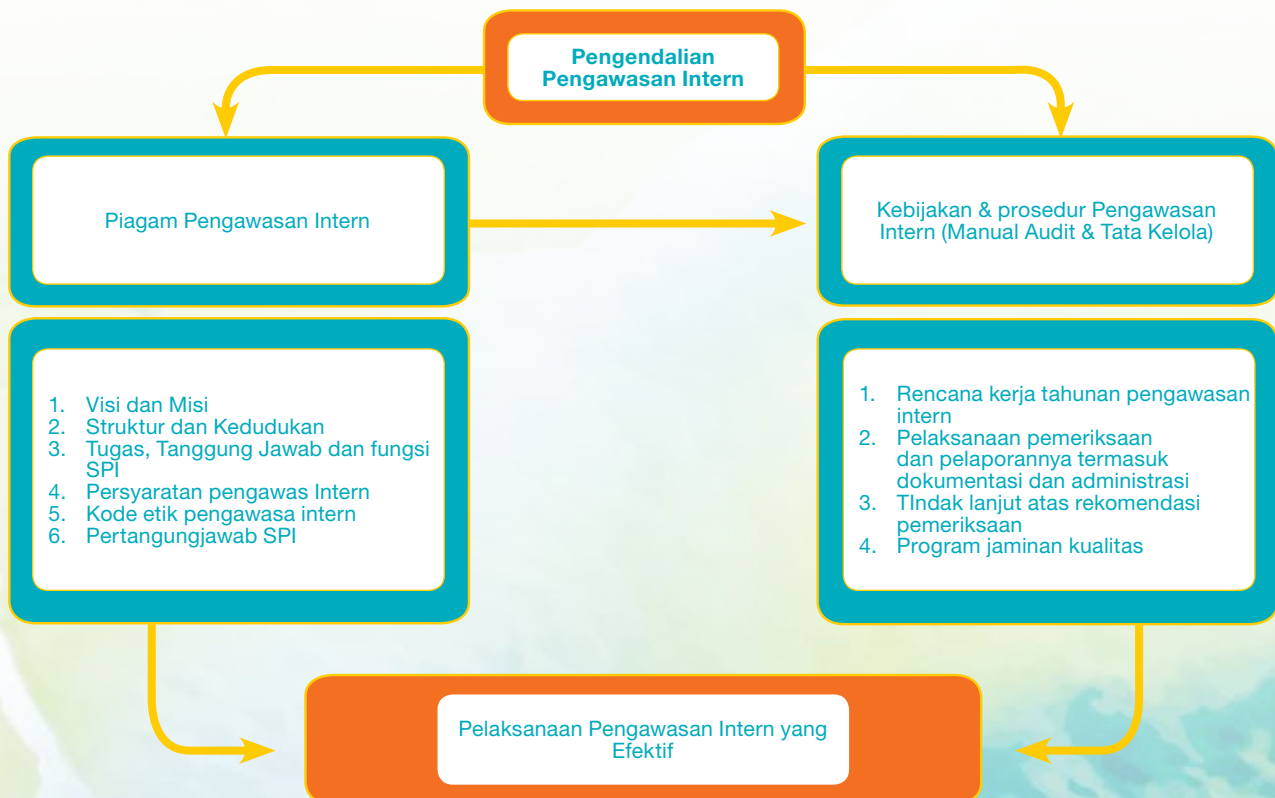
Aspek Struktur mengatur mengenai:

1. Kedudukan, tugas dan fungsi PI
2. Wewenang PI
3. Pertanggungjawaban PI
4. Persyaratan Pengawas Internal
5. Piagam Pengawasan Internal
6. Hubungan PI dengan organ Dewan Komisaris dan Komite Audit

Aspek Proses mengatur mengenai:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan Pengawasan Internal
2. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pengawasan eksternal
3. Pelaksanaan program *quality assurance*
4. Dokumentasi dan administrasi

Kedua aspek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri mengenai Piagam Pengawasan Internal serta Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Intern yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut:



URAIAN MENGENAI UNIT AUDIT INTERNAL

Dasar Penerapan Pengawasan Internal Di Bio Farma

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
2. Surat Sekretaris Kementerian Negara BUMN No S-168/MBU/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan *Good Corporate Governance* yang diperbaharui dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012.
3. Anggaran Dasar Perusahaan

JUMLAH KARYAWAN (AUDITOR INTERNAL) PADA DIVISI PENGAWASAN INTERNAL

Per 31 Desember 2016, Pengawasan Internal (PI) memiliki sebanyak 13 (tiga belas) orang karyawan yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Pengawasan Intern dan 12 orang karyawan yang terkait langsung dengan pelaksanaan Internal Audit. Latar belakang auditor adalah berpendidikan Strata 2, Strata 1 dan SMA. Setiap Auditor telah mengikuti pelatihan dibidang audit secara berkesinambungan.

No	Nama	Jabatan
1	Sri Widayatiningsih	Kepala Divisi
2	Amar Yuliar S	Ahli Madya
3	Edi Iskandar	Ahli Madya
4	Satia Permadi Senoputro	Ahli Madya
5	Johnny Hotman Gultom	Ahli Madya
6	Sigit Prakosa	Ahli Madya
7	Dedi Mulyadi	Ahli Muda
8	Ai Sukarni	Ahli Muda
9	Nurdin Wijaya	Ahli Muda
10	Emillina	Ahli Muda
11	Ahmad Agus Romansyah	Ahli Muda
12	Dani Matias	Ahli Muda

Komposisi Karyawan Pengawasan Internal (PI) per 31 Desember 2016

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Pengawasan Internal	1
2	Ahli Madya Pengawasan Internal	5
3	Ahli Muda Pengawasan Internal	6
Jumlah		12 orang



SERTIFIKASI SEBAGAI PROFESI PENGAWASAN INTERNAL (AUDIT INTERNAL)

Dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal, Pengawasan Internal didukung oleh tenaga Auditor yang profesional. Per 31 Desember 2016, kualifikasi dan kompetensi karyawan Pengawasan Internal Bio Farma sebagai berikut:

Sertifikasi Karyawan PPI

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Dani Matias	Ahli Muda	<i>Risk Based Internal Auditing</i>
2	Nurdin Wijaya, ST., M.M	Ahli Muda	<i>Risk Based Internal Auditing</i>
3	Nurdin Wijaya, ST., M.M	Ahli Muda	Dasar-dasar Internal Auditing untuk Auditor Anggota Tim
4	Raden Yanuar Rasyid Hidayat	Staf	Dasar-dasar Internal Auditing untuk Auditor Anggota Tim
5	Edi Iskandar	Ahli Madya	<i>Certified International Project Manager</i>
6	Amar Yuliar	Ahli Madya	Seminar & Musyawarah Nasional FKSPI Tahun 2016
7	Sigit Prakosa	Ahli Madya	<i>Certification in Risk Management Assurance Review Course</i>
8	Sigit Prakosa	Ahli Madya	Pelatihan Asesor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN
9	Sigit Prakosa	Ahli Madya	Akuntansi Kombinasi Bisnis dan Konsolidasi serta Aspek Perpajakannya

Jabatan	Jumlah Personil	Kualifikasi	Jumlah Personil
Kepala Pengawasan Internal (PI)	1	<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	-
Ahli Madya Pengawasan Internal (PI)	5	<i>Certified Fraud Examiners (CFE)</i>	-
		<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	-
		<i>Certificate in International Financial Reporting Standards (CIFRS)</i>	1
		<i>Certified PSAK (CPSAK)</i>	1
		<i>Certified International of Information System Auditor (CIISA)</i>	1
Ahli Muda Pengawasan Internal (PI)	6	<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	1
		<i>Certified PSAK(CPSAK)</i>	1
Jumlah	12	Jumlah	5

Sejumlah tenaga auditor lainnya yang cukup berpengalaman dan sedang proses menyelesaikan sertifikasi. Pada tahun 2016 sebanyak 5 (lima) auditor sedang dalam proses mengikuti program pendidikan dan pelatihan profesi serta program sertifikasi.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-13A/DK/BF/XII/2012 dan Nomor: 07357/DIR/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yaitu kedudukan Pengawasan Internal (PI) sebagai

Organisasi Internal Audit, ruang lingkup tugas, tanggung jawab pelaporan, wewenang dan peranan, serta standar profesi auditor internal. *Internal Audit Charter* disusun untuk menjadi pedoman bagi para Auditor Intern agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, serta diketahui oleh *Auditee*/pihak-pihak lain yang terkait agar dapat saling tercipta pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Bio Farma. Dengan adanya *Internal Audit Charter*, Pengawasan Internal (PI) diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan audit yang berkualitas untuk mendukung semua aktivitas Perusahaan.

URAIAN MENGENAI UNIT AUDIT INTERNAL

VISI & MISI DIVISI PENGAWASAN INTERNAL (PI) BIO FARMA

Visi

Menjadi unit pengawasan yang profesional, independen, objektif, memberikan konsultasi dan menjadi mitra manajemen yang terpercaya serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam pencapaian tujuannya.

Misi

Pengawasan Intern (PI) merupakan unit pengawasan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama

dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham, berupa adanya kepastian pencapaian tujuan operasional perusahaan.

Atas hal tersebut maka Pengawasan Internal melakukan audit secara berkala kegiatan operasional Perusahaan, berdasarkan prioritas risiko, dan menilai pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, serta memberikan konsultasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Perusahaan.

Struktur Organisasi Pengawasan Internal (PI) Bio Farma



KEDUDUKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai SK Direksi No. 05586/Dir/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero), Satuan Pengawasan Intern (SPI) dirubah menjadi Pengawasan Internal (PI).

Secara struktural Pengawasan Internal berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Pengawasan Internal yang membawahi Matrik Auditor & Pemastian Auditor & Assurance Matrix (Ahli Madya PI dan Ahli Muda PI). Auditor pada PI bertanggung jawab kepada Kepala SPI. Kepala PI

diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal (PI) mengacu pada:

1. Kerangka yang diakui secara Internasional (COSO- *Internal Control Framework*)
2. Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 05166/Dir/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Piagam Audit Internal (*Internal Audit*)



Charter) dan diperbaharui menjadi Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan melalui SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 07357/DIR/XII/2012 pada tanggal 17 Desember 2012.

Secara garis besar memuat visi, misi, struktur dan kedudukan, wewenang, tugas dan tanggung jawab PI, persyaratan profesional auditor serta kode etik auditor internal. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) dievaluasi secara berkala dan disepakati oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

3. Pelaksanaan audit secara operasional mengacu pada Pedoman Umum Pelaksanaan Pemeriksaan (*Audit Manual*) Pengawasan Internal yang ditetapkan melalui SK Direksi Nomor: 05094/DIR/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN INTERNAL (PI)

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas terhadap operasional, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya di perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa kepada Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut perbaikan yang direkomendasikan.
7. Melakukan tugas konsultasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal.
8. Bersama dengan komite audit membahas Laporan hasil audit dan meminta masukkan yang diperlukan.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Pengawasan Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

Direktur Utama memberi wewenang kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern untuk:

1. Mengakses ke seluruh informasi, dokumen, dan catatan, ke Direksi dan ke karyawan, ke lokasi asset perusahaan, ke sistem informasi, dan ke sistem dan prosedur yang relevan tentang perusahaan yang terkait dengan tugas dan fungsi audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan komisaris, Komite Audit, Komite Risiko.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan asidentil dengan Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko
4. Melakukan koordinasi bila perusahaan sedang diaudit oleh auditor eksternal (KAP, BPK, dsb).
5. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus ruang lingkup dan jadwal audit.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang audit.
7. Mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga profesional/ahli.

PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk:

1. Memberikan penilaian dan saran-saran mengenai kecukupan dan efektivitas proses manajemen perusahaan dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.
2. Melaporkan kejadian penting yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen, dan melaporkan peningkatan/pembenahan sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan
3. Memberikan laporan hasil pemeriksaan sesuai program kerja pemeriksaan tahunan, secara berkala.
4. Melaporkan pencapaian KPI unit Pengawasan Internal.

URAIAN MENGENAI UNIT AUDIT INTERNAL

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

Piagam Pengawasan Internal atau Internal Audit *Charter* adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen Pimpinan atas fungsi suatu Unit Pengawasan Intern (PI) di Bio Farma.

Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit *Charter*) Bio Farma merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan para auditor PI, dan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait, agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Bio Farma

PERSYARATAN AUDITOR

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tugasnya.
3. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
4. Mempunyai keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang audit.

KODE ETIK AUDITOR

1. Auditor internal harus jujur, objektif dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. Auditor internal harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
3. Auditor internal dilarang terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum.
4. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar Profesi Audit Internal.

6. Auditor internal dilarang secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal dan mendiskreditkan organisasinya.
7. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pendidikan profesional berjenjang dan berkelanjutan.

**HUBUNGAN PENGAWASAN INTERNAL
DENGAN ORGAN DEWAN KOMISARIS DAN
KOMITE AUDIT**

1. Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Tugas Komite Audit mengkaji kecukupan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
3. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal.

**URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
INTERNAL TAHUN 2016****I. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan
Pengawasan Intern****a. Perencanaan Audit Internal 2016**

Pada setiap akhir tahun, PI membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk tahun berikutnya. PI menyusun jadwal audit internal dengan memperhatikan tingkat risiko masing-masing bagian yang diaudit. Pada tahun 2016 PI akan melakukan audit terhadap 8 (delapan) obyek. Rencana PKPT disetujui oleh Direktur Utama, dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris c/q Komite Audit. Selain pelaksanaan audit PI juga menyusun rencana kegiatan pengembangan kompetensi auditor. Adapun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) & Rencana Kegiatan Pengembangan Kompetensi Auditor Bio Farma tahun 2016 adalah sebagai berikut:



No	Program Kegiatan	Bulan Pemeriksaan	Bulan Terbit Laporan	Jumlah LHP
1	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Produksi Vaksin Virus (Bagian OPV)	28 Januari 2016 – 06 April 2016	April	1
2	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Umum & Manajemen Aset (Bagian Manajemen Aset)	28 Januari 2016 – 06 April 2016	April	1
3	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Pengadaan (Bagian Pembelian “Capex” dan Pemeliharaan)	28 April 2016 – 13 Juli 2016	Juli	1
4	Pemeriksaan Operasional atas Unit Bisnis & Imunisasi	28 April 2016 – 13 Juli 2016	Juli	1
5	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Human Capital (Bagian Manajemen Pengembangan)	28 April 2016 – 13 Juli 2016	Juli	1
6	Pemeriksaan Operasional atas Divisi PKBL, CSR & EHS (Bagian CSR)	02 Agustus 2016 – 10 Oktober 2016	Oktober	1
7	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Perencanaan Produksi & Manajemen Persediaan (Bagian Perencanaan Produksi)	02 Agustus 2016 – 10 Oktober 2016	Oktober	1
8	Pemeriksaan Operasional atas Divisi Teknik & Pemeliharaan	02 Agustus 2016 – 10 Oktober 2016	Oktober	1

Pengawasan Internal (PI) Bio Farma menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) untuk pelaksanaan audit terhadap proses pengendalian kegiatan operasional, pengelolaan risiko dan *Corporate Governance*, memberikan konsultasi serta rekomendasi yang independen dan obyektif.

Dalam melakukan penilaian risiko, PI mengkoordinasikan aktivitasnya dengan pemilik risiko untuk memperoleh masukan mengenai penilaian risiko yang dihasilkan dari proses pengelolaan risiko tersebut.

b. Pelaksanaan Pengawasan Internal
Selama tahun 2016, PI telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan di luar PKPT/Non PKPT, yaitu:

- Melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) objek pemeriksaan sesuai PKPT sebagai berikut:
 - » Pemeriksaan Operasional atas Bagian Pengujian Mutu Kimia & Fisika (PMKF)
 - » Pemeriksaan Operasional atas Divisi Klinik & Imunisasi.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Divisi Pemasaran.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Bagian Manajemen Kinerja & Reward, Divisi Human Capital.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Pengelolaan Investasi.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Bagian Pengadaan Impor, Divisi Logistik.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Bagian CSR/PKBL.
 - » Pemeriksaan Keuangan atas Bagian Treasury.
 - » Pemeriksaan Operasional atas Bagian SIM (Sistem Informasi Manajemen), Divisi TI.

URAIAN MENGENAI UNIT AUDIT INTERNAL

- Pemeriksaan diluar PKPT/Non PKPT yaitu:
 - » Stock Opname per tanggal 31 Desember 2016.
 - » Kas Opname Perusahaan dan PKBL per 31 Des 2014, 31 Mar 2015, 30 Juni 2015 dan 30 Sep 2015.
 - » *Counterpart* kegiatan audit atas Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan PKBL Tahun Buku 2015 oleh KAP Djoemarma, Wahyudin & Rekan.
 - » Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor : 06574/Dir/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim *Counterpart* Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan General Audit atas Laporan Keuangan PT Bio Farma Tahun Buku 2015 tanggal 01 Oktober 2015.
- Pemeriksaan rutin aktivitas bulanan (produksi, pemasaran, pembelian dan bukti-bukti pembukuan).

Dari pelaksanaan program kerja tahun 2016 sesuai PKPT telah menerbitkan 9 (sembilan) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pengawasan Internal

juga melakukan rapat dengan Komite Audit yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan agenda rapat yang telah disepakati. PI melaporkan perkembangan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan membahas laporan keuangan serta isu terakhir yang ada di perusahaan. PI juga membina hubungan baik dengan auditor eksternal seperti BPK RI, BPKP dan KAP dalam rangka membantu kelancaran pemeriksaan yang dilakukan.

c. Pelaporan Pengawasan Internal

- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Pengawasan Eksternal**
- Dokumentasi Dan Administrasi**

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pengawasan Internal (PI)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai Pengawasan Internal (PI), mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop selama tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pelatihan	Kepala Pengawasan Internal (Pi)	Ahli Madya	Ahli Muda	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
1	Seminar & Munas FK SPI Th. 206 "Strategic Partnership: Mengoptimalkan Partnership Fungsi Internal Audit dalam mendukung Direksi dan Komisaris Meningkatkan Keunggulan Perusahaan di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)"	1	2	5	FKSPI	Jakarta	19-Apr-16 20-Apr-16
2	<i>Leadership</i>	1			Kubik	Bandung	05-Sep-16 06-Sep-16
3	<i>Training Microsoft Word</i>	-	1		Innov8	Bandung	01-Jun-16 02-Jun-16
4	Ujian CA/Certified of Accountant	-	2	2	IAI	Jakarta	27-Jan-16 28-Jan-16
5	<i>Creating Database Program with Access 2010 for Non Programmer (Microsoft Access)</i>	-	3	2	Innov8	Bandung	01-Jun-16 02-Jun-16
6	Review & Exam CIPM (Certified Information Project Manager)	-	1	-	-	-	-



No	Nama Pelatihan	Kepala Pengawasan Internal (PI)	Ahli Madya	Ahli Muda	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
7	Asesor KPKU/Kriteria Penilaian Kinerja Unggul	-	1		Forum Ekselen BUMN	Jakarta	03-Aug-16 05-Aug-16
8	CRMA Review Course	-	1		IIA Indonesia	Jakarta	07-Nov-16 11-Nov-16
9	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pribadi untuk Asisten Manajer Bio Farma "Building The Solid Ground"	-	-	4	MUVI	Bandung	25-Apr-16 25-Apr-16
10	Dasar-dasar Internal Auditing un Auditor Anggota Tim	-	-	2	YPIA	Jakarta	08-Aug-16 10-Aug-16
11	Risk Based Audit	-	-	1	YPIA	Jakarta	07-Nov-16 09-Nov-16

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA PENGENDALIAN INTERNAL

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PENGENDALIAN INTERNAL

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Pasal 28 (3) tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PENGENDALIAN INTERNAL

Pengangkatan Kepala Pengawasan Internal berdasarkan Keputusan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: 317/TM/TKK/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Transfer Karir Karyawan memutuskan Sdr. Sri Widayatiningsih, SE. Grade 4 (empat) yang semula sebagai Kepala Divisi Pengadaan pada Direktorat Sumber Daya Manusia, mengalami Transfer Karir menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern pada Direktorat Utama terhitung mulai tanggal 02 Januari 2015.

Pengawasan Internal berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Pengawasan Internal (PI) yang membawahi Matrik Auditor dan Pemastian Auditor & Assurance Matrix (Ahli Madya PI dan Ahli Muda PI). Auditor pada Pengawasan Internal bertanggung jawab kepada Kepala Pengawasan Internal. Kepala Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

QUALITY ASSURANCE

PENERAPAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DI BIO FARMA BERTUJUAN UNTUK MENJAGA KONSISTENSI PEMENUHAN SISTEM TERINTEGRASI.

PROFIL KEPALA DIVISI QUALITY ASSURANCE (QA)



Iin Susanti
Kepala Divisi Quality Assurance

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Usia per 31 Desember 2016 adalah 49 tahun. Lahir di Semarang, 20 Juli 1967, memperoleh gelar Sarjana Farmasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung. Bergabung dengan Bio Farma sejak tahun 1991 sebagai Staf Bagian Pengawasan mutu vaksin bakteri (1991-1997), pernah menjabat berbagai posisi struktural, seperti Kepala Bagian Pengawasan Mutu Vaksin Virus (1997-2006), Kepala Divisi Pengawasan mutu (2006-2012), diangkat sebagai Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA) sejak tahun 2012 – Sekarang. Memiliki kompetensi di Bidang Pengawasan Mutu, *Current GMP*, dll. Memiliki Kualifikasi sebagai Auditor dan *Lead Auditor* ke berbagai Perusahaan di dalam dan luar negeri.

Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Divisi *Quality Assurance* adalah Surat Keputusan No : 0461/TKK/SDM/VIII/201 tanggal 16 Agustus 2012.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DIVISI QUALITY ASSURANCE (QA)

Tugas Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA)

1. Melakukan Audit Sistem Manajemen Mutu.
2. Melakukan Audit Sistem Manajemen Lingkungan.
3. Melakukan Audit Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja.
4. Melakukan Audit Praktik Produksi yang Baik (*GMP*).

5. Melakukan Audit Vendor.
6. Melakukan Audit Pengaduan Pelanggan.

Wewenang Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA)

Kepala Divisi *Quality Assurance* dan/atau MR berwenang untuk menyetujui program audit serta menunjuk tim audit yang kompeten dan independen yang akan melakukan audit ke setiap Divisi/Bagian yang terkait dan memerintahkan audit di luar jadwal yang telah ditentukan baik dengan pemberitahuan dan/atau tanpa pemberitahuan kepada *auditee*.

Tanggung Jawab Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA)

1. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi ISO 900i.
2. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi ISO 14001.
3. Bertanggung jawab terhadap penerapan integrasi OHSAS 18001.

Kepala Bagian QA Service bertanggung jawab untuk membuat jadwal, program audit, lingkup audit dan evaluasinya termasuk penyimpanan rekaman internal audit serta melaporkan pelaksanaan audit pada Kepala Divisi QA dan/atau MR. Pembuatan jadwal internal audit berdasarkan analisis risiko (*Risk Analysis*).

Kompetensi Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA)

1. Kepala Divisi *Quality Assurance* (QA) memiliki kompetensi di bidang pengawasan mutu, *current GMP*, dll.
2. Memiliki kualifikasi sebagai auditor dan lead auditor ke berbagai perusahaan di dalam dan luar negeri untuk memastikan vendor Bio Farma memenuhi aspek *quality management system* dan ramah lingkungan.



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DIVISI QUALITY ASSURANCE (QA)

Kepala Divisi *Quality Assurance* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, Surat Keputusan Direksi Bio Farma Nomor: 0461/TKK/SDM/VIII/201 tanggal 16 Agustus 2012 tentang pengangkatan Kepala Divisi QA .

KEDUDUKAN *QUALITY ASSURANCE* DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi *Quality Assurance* (QA)

Sesuai SK Direksi No. 05586/DIR/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Bagan Organisasi PT Bio Farma (Persero), secara struktural *Quality Assurance* (QA) berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi QA System, QA Operation, QA Service. Struktur Organisasi Divisi QA Bio Farma adalah sebagai berikut:



QUALITY ASSURANCE

JUMLAH INTERNAL AUDITOR QUALITY ASSURANCE (QA)

Per 31 Desember 2016, jumlah Internal Auditor sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang yang merupakan perwakilan dari Divisi *Quality Assurance*, *Quality Control*, Produksi, Teknik, Hewan Laboratorium, Pengelolaan Persediaan, Pemasaran dan Administrasi. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Kompetensi Auditor	Jumlah
1	Auditor GMP, ISO dan OHSAS	86 orang
2	Auditor ISO dan OHSAS	12 orang
Jumlah		98 orang

Latar belakang pendidikan Internal Auditor yaitu Strata 2 (S2) dan Strata I (S1) di bidang Farmasi, Biologi, Kedokteran dan bidang lainnya. Setiap Auditor telah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang audit secara berkesinambungan.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Quality Assurance

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai Auditor mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, seminar maupun workshop yaitu sebagai berikut:

Dalam rangka peningkatan kompetensi diri bagi anggota Internal Auditor QA dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, pengembangan potensi diri dan menunjang pelaksanaan tugas Internal Auditor QA. Sepanjang tahun 2016, anggota Internal Auditor QA telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Tanggal	Jumlah Auditor Yang Mengikuti Pelatihan
1	Pelatihan Lead Auditor ISO <i>Integrated Management System</i> (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 18001:2007 berdasarkan ISO 19011) oleh BSI (<i>British Standard Institution</i>) Group Indonesia kepada seluruh <i>Lead auditor</i> Bio Farma.	4-6 Januari 2016 dan 13-15 Januari 2016	52
2	<i>Coaching</i> pelaksanaan inspeksi GMP bersama konsultan GMP David Buckley	18 Maret 2016 dan 8 Desember 2016	4

SERTIFIKASI AUDITOR QUALITY ASSURANCE (QA)

Dalam melaksanakan kegiatan Audit, QA didukung oleh tenaga Auditor yang profesional. Per 31 Desember 2016, kualifikasi dan kompetensi Auditor QA Bio Farma sebagai berikut:

No.	Kompetensi auditor	Jumlah
1	<i>Lead Auditor</i>	49 orang

Sejumlah tenaga observer lainnya yang cukup berpengalaman dan sedang proses menyelesaikan sertifikasi. Pada tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) calon auditor sedang dalam kualifikasi auditor.

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN AUDITOR QA TAHUN 2016

PENERAPAN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / QMS

Penerapan *Quality Management System* di Bio Farma bertujuan untuk menjaga konsistensi pemenuhan sistem terintegrasi. Dalam pelaksanaan, perusahaan telah menunjuk penanggung jawab *Management Representative* (MR) yaitu *Corporate Secretary* dan wakil MR *Quality* untuk membantu pelaksanaan adalah Divisi *Quality Assurance*. Tim integrasi sistem ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001 beranggotakan dari berbagai unit kerja berfungsi mengkoordinasikan, memastikan implementasi sistem terintegrasi serta sebagai internal auditor dan auditor vendor Bio Farma, sesuai Surat Keputusan yang diperbarui setiap tahunnya, SK No: 00167/DIR/I/2015 tanggal 9 Januari 2015. Implementasi *Quality Management System* pada tahun 2015 sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan	Remarks
1.	03 Februari 2015 – 03 Juli 2015	Audit Internal - Melakukan Audit Internal Periode I meliputi 55 unit kerja	Audit internal dilakukan oleh Auditor yang memiliki kualitas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen terpadu, meliputi Kualitas, Lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2	03 Juli – 22 September 2015	- Melakukan Audit Internal Periode II meliputi 36 unit kerja	
3	23 September 2015 – 21 Desember 2015	- Melakukan Audit Internal Periode III meliputi 44 unit kerja	
4.	23-25 Juni 2015	Audit Sistem Manajemen Mutu – ISO 9001:2008 • Melakukan pengawasan tahap ke 3, 4 & 5 • Bio Farma direkomendasikan untuk mendapatkan perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2008 dan menggambarkan tingkat komitmen dan kesadaran kualitas yang sangat tinggi.	Audit Surveillance dilakukan oleh Lloyd's Register <i>Quality Assurance</i> (LRQA), sebuah lembaga sertifikasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di PT Bio Farma (Persero)
5.	23-26 Juni 2015	Audit Sistem Manajemen Lingkungan – ISO 14001:2004 • Melakukan pengawasan renewal certification • Bio Farma direkomendasikan untuk mendapatkan perpanjangan sertifikasi ISO 14001:2004	Audit Pengawasan dilakukan oleh lembaga sertifikasi Lloyd's Register <i>Quality Assurance</i> (LRQA) yang menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan di PT Bio Farma (Persero)
6.	23-26 Juni 2015	Sistem manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja – OHSAS 18001:2007 • Melakukan pengawasan renewal certification • Bio Farma direkomendasikan untuk mendapatkan perpanjangan sertifikasi OHSAS 18001:2007	Audit Pengawasan dilakukan oleh lembaga sertifikasi Lloyd's Register <i>Quality Assurance</i> (LRQA) yang menilai efektivitas pelaksanaan Sistem manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja di PT Bio Farma (Persero)
7.	25-27 Maret 2015	Audit Praktek Produksi yang Baik (GMP) - Melakukan Audit GMP	Audit GMP dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Obat & Makanan (BPOM) sebagai Regulator Nasional Berwenang untuk menilai kepatuhan perusahaan kepada Peraturan Praktek Produksi yang Baik.
8	Tahun 2015	Audit Vendor - Sebagai bagian dari Sistem Manajemen Mutu Bio Farma, 75 vendor telah diaudit pada tahun 2015. 59 diantaranya adalah vendor yang ada dan sisanya adalah vendor potensial yang telah diaudit sebagai bagian dari proses kualifikasi vendor.	Mengacu pada ISO 9001:2008 dan persyaratan cGMP, audit vendor dilaksanakan untuk mengevaluasi kualifikasi vendor dalam kapasitas mereka untuk menyediakan produk atau jasa untuk PT Bio Farma (Persero).
9.	Tahun 2015	Pengaduan Pelanggan Pada 2015, terdapat 28 pengaduan, 10 pengaduan terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), 1 terkait dengan Kejadian tidak diinginkan dan 17 terkait dengan Keluhan Teknis Produk (PTC)	Semua laporan AEFI dan AE disimpulkan tidak berhubungan dengan kualitas produk.
10	Tahun 2015	Perbaikan Berkelanjutan	
11		PQ WHO Produk Vaksin bOPV tipe 1 & 3 (vial 10 dosis)	Vaksin poliomyelitis oral bivalen tipe 1 & 3 (bOPV) digunakan untuk imunisasi aktif dan memberikan perlindungan terhadap infeksi poliomyelitis tipe 1 dan 3.

QUALITY ASSURANCE

PERENCANAAN AUDIT QA TAHUN 2017

Perencanaan Audit yang akan dilakukan oleh Auditor QA di tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Bagian administrasi paling sedikit diaudit satu kali dalam setahun (aspek kualitas, lingkungan dan K3).
2. Bagian produksi, QA, QC, teknik atau bagian diluar administrasi paling sedikit diaudit dua kali dalam setahun (aspek kualitas, lingkungan dan K3) dan satu kali dalam setahun khusus aspek GMP.
3. Bagian EHS diaudit paling sedikit tiga kali setahun (aspek kualitas, lingkungan dan K3).

Audit internal dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen terpadu, meliputi Kualitas, Lingkungan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Festival Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu 2016 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.



AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bio Farma pada tanggal 13 Mei 2015, yang menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan sebagai Auditor Eksternal untuk melakukan audit independen terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2015. KAP ini telah memiliki izin dari Menteri Keuangan RI No. KEP-350/KM.17/2000 tanggal 18 September 2000 dan BAPEPAM No. 320/PM/STTD-AP/2002 tanggal 28 Juni 2002.

Penunjukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penunjukan Akuntan Publik telah melalui serangkaian proses pengadaan jasa di Bio Farma. Mulai dari mengundang beberapa KAP yang telah terdaftar di BPK dan berpengalaman dalam mengaudit untuk ikut dalam proses pengadaan jasa KAP yang akan dilaksanakan oleh Bio Farma sampai dengan proses persetujuan Dewan Komisaris dan Pelaporan Kepada Pemegang Saham.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal tanggal 31 Desember 2015 dan 2014; Laporan Rugi Laba komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014; serta melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Menurut Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoemarma, Wahyudin & Rekan, Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) menyajikan secara wajar sesuai dengan Laporan Nomor: 384/LAI.15.BF-4/DWR/2016 tanggal 04 Februari 2016, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2015 serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Jumlah periode akuntan publik melakukan audit laporan keuangan tahunan dan jumlah periode kantor akuntan publik melakukan audit laporan keuangan tahunan.

BESARNYA FEE YANG DIBERIKAN KEPADA AKUNTAN PUBLIK

Audit Laporan Keuangan PT Bio Farma (Persero) dan jumlah fee yang dibayarkan kepada auditor eksternal untuk 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 6 Tahun Terakhir

Periode Audit	Akuntan	Kantor Akuntan Publik	Fee Audit (Rp)	Opini	Jasa Di Luar Audit Keuangan
2015	Djoemarma No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	215.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	Ada
2014	Djoemarma No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	200.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada
2013	Djoemarna No. Registrasi Akuntan Publik: NRAP: AP.0190	Djoemarma, Wahyudin & Rekan	200.200.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada
2012	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono No. Registrasi Akuntan Publik: R/108.AGA/sat.3/2012	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	200.200.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada
2011	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono No. Registrasi Akuntan Publik: R/134.AGA/4.2/2011	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	242.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada
2010	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono No. Registrasi Akuntan Publik: R/123. AGA/4.1/04/2010	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	187.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada
2009	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptono No. Registrasi Akuntan Publik: R/077.S/7/03/08	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto	187.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	Tidak ada

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN SELAIN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Selain Jasa Audit Keuangan, KAP Djoemarma pada tahun 2015 memberikan jasa lainnya kepada Bio Farma, sebagai berikut:

Jasa Asesmen Mutu SPI

1. Jasa asesmen mutu Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Auditor Eksternal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif bahwa Pengawasan Internal telah memenuhi standar *The Institute of Internal Auditors* (The IIA).
2. Tujuan berikutnya adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat peluang untuk peningkatan mutu sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit internal serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.

2. Jasa Assessment implementasi ERP

Saat ini Perusahaan sedang melakukan konversi sistem informasi, yaitu dengan mengimplementasikan sistem ERP (*Enterprise*

Resources Planning) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing Perusahaan. Implementasi sistem informasi memerlukan penyesuaian yang signifikan pada proses bisnis dan sumber daya manusia. Oleh karena dalam masa transisi, diperlukan asesmen terhadap infrastruktur yang akan mendukung keberhasilan implementasi sistem ERP tersebut di Perusahaan, terutama menyangkut perubahan dalam organisasi, SOP dan sistem pengendalian internal, apakah telah sesuai dengan penerapan ERP.

Tujuan asesmen terhadap sistem ERP yang diimplementasikan adalah untuk memastikan bahwa perubahan dalam organisasi, SOP dan sistem pengendalian internal telah sesuai dengan sistem ERP, sehingga dapat menghasilkan berbagai informasi dan laporan yang diperlukan Perusahaan.



URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

KEPALA DIVISI COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT



Bambang Heriyanto
Kepala Divisi
Compliance & Risk
Management

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bandung. Bambang Heriyanto, usia 46 tahun. Lahir di Cirebon tahun 1970. Meraih gelar Sarjana Farmasi (1994) dan Apoteker (1995) dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Magister Manajemen (2005). Merintis karir di Bio Farma sebagai Staf di Bagian Pemurnian & Diagnostika/Reagensia (1997), Kepala Bagian Produksi Sera & Diagnostika (2002), Kepala Bagian Formulasi & Pengisian (2003), Kepala Bagian Produksi Vaksin Tetanus (2009), Kepala Divisi Produksi Vaksin Virus (2012). Kepala Divisi *Compliance & Risk Management* sejak tahun 2015 – Sekarang.

Dasar hukum pengangkatan sebagai Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor : 313/TM/TKK/XII/2015 Tanggal 02 Januari 2015.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

MANAJEMEN RISIKO KORPORAT

Manajemen Risiko Korporat adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin.

Kewajiban Perusahaan untuk menerapkan Manajemen Risiko terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012. Manajemen Risiko Korporasi di Bio Farma dituangkan di dalam Manual Bio Farma (MBF-01 dan MBF-02).

PENJELASAN MENGENAI SISTEM MANAJEMEN RISIKO YANG DITERAPKAN BIO FARMA

Mengelola risiko adalah tanggung jawab setiap orang, sehingga setiap karyawan harus mengenali setiap risiko yang terkait dengan pekerjaannya dan mengelolanya secara proaktif.

Bio Farma menyadari bahwa jalannya operasional Perusahaan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berada di bawah kendali maupun di luar kendali Perusahaan. Karena itu, risiko tidak boleh diabaikan dan harus dikelola secara integrasi, optimal, dan berkelanjutan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktik tata kelola yang baik.

Sejak tahun 2009, Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan bridging COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000 (2009).



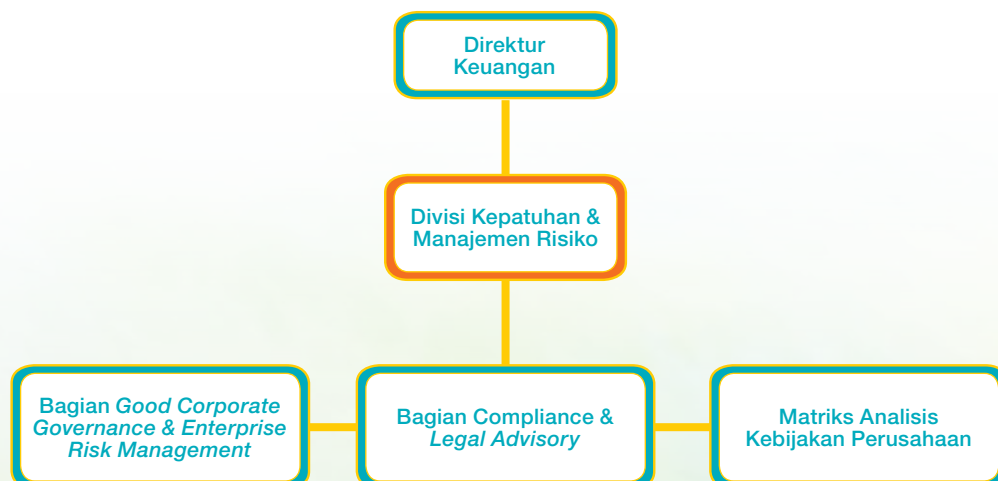
DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN
2. Manajemen Risiko Korporasi di Bio Farma dituangkan di dalam Manual Bio Farma (MBF-01 dan MBF-02).
3. Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG (2006)

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor PER-01/MBU/2011 pasal 25, Bio Farma menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan korporasi, harus mempertimbangkan risiko usaha.
2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
4. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penagannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan.

Struktur Organisasi Divisi Compliance & Risk Management



URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan manajemen risiko, Bio Farma telah membentuk Divisi yang membawahi fungsi Kepatuhan yaitu Divisi *Compliance & Risk Management*. Kepala Divisi *Compliance & Risk Management* bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan membawahi 3 Bagian yaitu Bagian GCG & ERM, Bagian Hukum dan Corporate Policy Matrik

Terkait dengan penerapan manajemen risiko di Bio Farma maka Tugas Direksi adalah sebagai Penanggungjawab Utama: penerapan manajemen risiko pada Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris adalah Pengawas Tertinggi dalam pelaksanaan pengawasan (*monitoring* dan *review*) pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada Perseroan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko adalah memastikan tata kelola dan kepatuhan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi *Governance, Risk and Compliance* (GRC) secara terintegrasi, konsisten dan berkesinambungan guna mendukung tercapainya GCG dan visi Perusahaan berdasarkan prosedur dan regulasi yang berlaku baik nasional maupun internasional.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Sejak tahun 2009, Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan di Bio Farma mengacu kepada COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework*. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Bio Farma, Sistem Manajemen Risiko Bio Farma mengalami perubahan dengan bridging COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000 (2009).

MANAJEMEN RISIKO YANG BERBASIS TATA KELOLA

Prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen risiko adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (*responsibilitas*) dan independensi.

Manajemen risiko yang berbasis tata kelola sangat diperlukan oleh Bio Farma:

1. Manajemen Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata kelola Perusahaan karena peran manajemen risiko dalam memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran keberhasilan usaha tidak tergantikan.
2. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-prinsip tata kelola sebagai berikut:
 - a. Transparansi: pengelolaan risiko haruslah transparan, karena dampak risiko tidak hanya pada satu unit atau bagian saja, tetapi juga pada bagian lain. Pengelolaan risiko haruslah bersifat inklusif dan transparan artinya melibatkan semua pihak yang terkait dengan risiko tersebut, baik dalam penanganan sumber risiko, maupun perlakuan terhadap dampak risiko
 - b. Akuntabilitas: harus terdapat akuntabilitas yang jelas dalam penerapan manajemen risiko dalam Perusahaan. Akuntabilitas tertinggi dalam penerapan manajemen risiko terletak pada Direksi dan akuntabilitas pengawasan penerapan manajemen risiko terletak pada Dewan Komisaris. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan risiko harus jelas di setiap tingkatannya, bahkan hingga ke tiap proses bisnis.
 - c. *Responsibilitas*: penjabaran akuntabilitas penerapan manajemen risiko memerlukan uraian tanggung jawab yang lebih jelas dalam pengelolaan risiko pada masing-masing tingkatan, bahkan hingga ke pengelolaan risiko dalam proses Perusahaan. Oleh karena itu setiap pemangku risiko (*risk owner*) harus dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan risiko dalam lingkup tugas dan kewenangannya



- d. Independensi: konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan tanggungjawab, dimana unit atau individu yang dibebani dengan akuntabilitas dan tanggungjawab untuk mengelola risiko yang masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya, haruslah diberi kebebasan dalam merumuskan cara menangani risiko tersebut.
3. Risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi. Manajemen risiko tidak dapat dipisahkan dari kegiatan utama ataupun proses lain dalam Perusahaan. Manajemen risiko juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran Perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi telah diidentifikasi dengan baik. Kemudian gangguan kelancaran proses organisasi tersebut juga telah diantisipasi sebelumnya. Karenanya, bila gangguan tersebut memang terjadi, maka organisasi telah siap untuk menanganinya dengan baik.
4. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukum.
5. Meningkatkan kesadaran terhadap adanya dampak dari aktivitas dan tindakan bisnis dan/atau dari faktor eksternal yang mengandung risiko.
6. Menurunkan potensi kejadian yang dinilai membahayakan yang mungkin terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang.
7. Meningkatkan *shareholder value*.
8. Memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian sehingga pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien.
9. Bio Farma secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Oleh sebab itu manajemen risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola Perusahaan agar dapat memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran Perusahaan. Dengan manajemen yang efektif, maka akan lebih memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran Perusahaan.

MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BIO FARMA

1. Meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam menerapkan manajemen risiko wajib untuk menemukenali para pemangku kepentingan dan harapannya. Melalui komunikasi timbal balik yang cukup intens maka dapat digalang kesamaan persepsi dan kepentingan bersama, dengan demikian dapat diperoleh hubungan yang lebih baik.
2. Meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan adanya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, dapat mengetahui bahwa perusahaan mampu untuk menangani risiko-risiko yang dihadapi dengan baik. Akibatnya kepercayaan pelanggan, pemasok, kreditor, komunitas bisnis serta masyarakat juga meningkat.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

**PENJELASAN MENGENAI HASIL REVIEW
YANG DILAKUKAN SISTEM MANAJEMEN
RISIKO PADA TAHUN 2016**

Untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Bio Farma, maka setiap tahun dilakukan review dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko.

Tujuan pengukuran adalah

1. Untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan Bio Farma.
2. Untuk mengetahui kualitas penerapan manajemen risiko yang ada di lingkungan Bio Farma sehingga dapat digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan manajemen risiko Perseroan di masa mendatang.

Dalam melakukan review dan evaluasi penerapan manajemen risiko, digunakan Model Pengukuran Maturitas dengan 5 (lima) tingkatan yaitu awal, pemula, kompeten, mahir sampai dengan pemimpin pada tingkatan teratas yang merepresentasikan tingkat kemampuan (kapabilitas) dan/atau Perseroan sebagai entitas untuk mengelola risiko dalam mencapai tujuan/sasaran yang dicanangkan.

Review dan Evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko dengan mengukur 8 (delapan) unsur *Key Risk Indicator* yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran yaitu mengukur tingkat kesadaran para pemangku kepentingan internal, baik terhadap risiko secara umum maupun penerapan manajemen risiko yang sedang dilangsungkan.

2. Reputasi yaitu mengukur pandangan serta penerimaan para pemangku kepentingan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko.
3. Budaya yaitu mengukur sejauh mana budaya sadar risiko telah mengakar dan melatar belakangi pelaksanaan praktik Manajemen Risiko.
4. Keahlian yaitu mengukur tingkat kompetensi para pemangku kepentingan internal di bidang Manajemen Risiko guna menunjang penerapan manajemen risiko.
5. Kepercayaan yaitu mengukur sejauh mana tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan internal terhadap hasil dari penerapan Manajemen Risiko.
6. Sumber Daya yaitu mengukur sumber daya khususnya SDM perusahaan yang tersedia secara memadai guna menunjang penerapan manajemen risiko.
7. Penerapan yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko serta pemeliharaan basis data/informasi manajemen risiko perusahaan telah didukung dengan proses otomatisasi berbasis teknologi informasi.
8. Proses yaitu mengukur seberapa jauh praktik Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan berbasis pada suatu metodologi yang dirujuk oleh praktik terbaik penerapan Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas maka Sistem Manajemen Risiko di Bio Farma berjalan dengan cukup efektif dan terus dikembangkan sesuai road map Manajemen Risiko Bio Farma. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:



Untuk memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran Perusahaan manajemen risiko diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola Perusahaan.

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan swa asesmen risiko.
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif seperti penggunaan analisis risiko secara semi kuantitatif.
4. Sumber daya yang tersedia cukup memadai.

Terdapat 916 risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja kemudian dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, Bio Farma melakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen risiko secara real time dan dapat diakses melalui berbagai media yaitu komputer, tablet, handphone. Pada tahun 2015 Bio Farma melakukan pengembangan terhadap sistem manajemen risiko berbasis Website. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelola risiko di lingkungan Bio Farma dalam melakukan pemantauan dan pembaharuan data informasi terkait dengan risiko yang dimiliki oleh unit kerjanya secara real time dan terdokumentasi, kapanpun dan dimanapun.

PENJELASAN MENGENAI RISIKO- RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Pada tahun 2016, terdapat 6 (enam) risiko korporat, yang terbagi atas 4 (empat) risiko dari aktivitas rutin dan 2 (dua) risiko proyek, sebagai berikut

1. Risiko Aktivitas Rutin
 - a. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
 - b. Fluktuasi nilai kurs mata uang asing
 - c. Meningkatnya persaingan global
 - d. Keterlambatan dalam supply vaksin

2. Risiko Proyek
 - a. Realisasi Investasi Tidak Sesuai Jadwal
 - b. Ketidaksiapan Produksi Vaksin Influenza untuk menghadapi pandemik

Dimana tiga risiko tertinggi adalah meningkatnya persaingan global, keterlambatan suplai vaksin dan perubahan kebijakan/regulasi nasional dan internasional.

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi *Corporate and Risk Management* (CRM) selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit. Masing-masing Kepala Bagian unit risiko menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bio Farma.

Bio Farma melakukan pengembangan terhadap sistem informasi manajemen risiko secara *real time* dan dapat diakses melalui berbagai media yaitu komputer, tablet, handphone.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

Rincian Risiko Korporat Bio Farma

No	Jenis Risiko	Risiko Yang Dihadapi
1	Risiko Aktivitas Rutin	1. Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional
		Perusahaan mengeksport produknya ke berbagai negara untuk kebutuhan program imunisasi di negara tersebut, yang antara lain disuplai melalui UNICEF dengan persyaratan produk harus memenuhi prakualifikasi WHO. Oleh karena itu, pengakuan kualitas produk oleh WHO memegang peran penting dalam kelancaran penjualan ekspor. Oleh karena itu Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan dan persyaratan internasional, terutama regulasi dari WHO, serta perubahan-perubahan regulasi yang mungkin terjadi di Pemerintah. Risiko ini memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sehingga ketika risiko ini terjadi, perusahaan dapat segera menyesuaikan dengan regulasi/kebijakan yang baru secepatnya dan menyiapkan strategi antisipatif jika regulasi berubah kembali.
		2. Fluktuasi Nilai Kurs Mata Uang Asing
		Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perusahaan juga menghadapi risiko keuangan yakni fluktuasi mata uang asing, yang dapat menimbulkan dampak dalam bentuk kerentanan terhadap fluktuasi valuta asing. Fluktuasi mata uang asing, terutama dalam Dollar Amerika, sangat berdampak pada biaya produksi. Untuk memenuhi kewajiban atas transaksi pembelian barang/bahan impornya, perusahaan akan mengoptimalkan untuk selalu tersedianya dana valuta asing yang siap dibayarkan atas transaksi impor tersebut. Risiko yang sangat mungkin terjadi adalah selisih nilai mata uang asing antara nilai pembukaan L/C pada saat barang/bahan dipesan dengan nilai kewajiban yang harus dibayar pada saat barang/bahan tersebut diterima.
		3. Meningkatnya Persaingan Global
		Dalam era pasar terbuka sekarang ini, persaingan dalam sector farmasi dan produk biologi akan semakin ketat dengan semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan internasional. Persaingan tersebut timbul dalam berbagai aspek, seperti kemampuan operasional pesaing internasional yang lebih kuat, produk-produk yang inovatif, perubahan permintaan pasar, maupun daya beli masyarakat yang terbatas. Ancaman atas produk dari kompetitor seperti dari China dan India, untuk produk yang sudah PQ (<i>Prequalification</i>) WHO dan pasar tunggal ASEAN menjadi hal yang serius untuk keberlangsungan perusahaan. Demikian pula penambahan kompetitor global yang mendapat PQ WHO akan meningkatkan persaingan dan dapat merebut pangsa pasar dalam dan luar negeri. Oleh karena itu kesesuaian produk yang dihasilkan dengan trend pasar menjadi faktor yang sangat serius bagi kelangsungan perusahaan, produk yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat disediakan tepat waktu. Adanya keterlambatan dalam penyediaan produk baru yang dibutuhkan akan mengakibatkan hilangnya pasar yang potensial.



No	Jenis Risiko	Risiko Yang Dihadapi
		4. Keterlambatan dalam Supply Vaksin Perusahaan merupakan satu - satunya produsen vaksin di Indonesia yang memasok seluruh kebutuhan vaksin untuk program imunisasi di dalam negeri. Disamping untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Perusahaan juga mengeksport vaksin ke berbagai institusi maupun negara lainnya. Pemenuhan kebutuhan harus dilakukan dalam waktu yang sangat ketat mengingat proses produksi & QC yang memerlukan waktu lama serta kapasitas produksi yang sangat terbatas, sehingga dapat mengakibatkan pemenuhan kebutuhan produk ke konsumen bilateral / institusi negara lain dapat terganggu. Risiko ini muncul dari beberapa risiko terkait seperti adanya perubahan forecast atau permintaan produk yang mendadak yang diikuti perubahan rencana produksi secara mendadak, dan kekurangan pasokan material karena terbatasnya kemampuan pemasok dalam memenuhi spesifikasi barang maupun kuantitas. Selain itu, keterlambatan dalam penandatanganan kontrak juga akan dapat memperpendek waktu penyediaan produk sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pemenuhan produk yang merugikan karena merusak nama baik Perusahaan dan atau harus membayar denda.
2	Risiko Aktivitas Proyek	5. Realisasi Investasi Tidak Sesuai Jadwal Perusahaan harus dapat menjaga ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, baik melalui perbaikan sarana dan prasarana produksi maupun melalui riset dan pengembangan produk baru. Diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses produksi yang memenuhi persyaratan atau regulasi yang berlaku serta fasilitas riset & pengembangan yang mumpuni agar riset dan pengembangan produk ini dapat diselesaikan tepat waktu, agar produk dapat masuk ke pasar sesuai dengan kebutuhan. Adanya keterlambatan dalam program investasi baik yang mendukung proses riset maupun produksi akan menyebabkan hilangnya kesempatan meraih pasar, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program investasi harus tepat waktu dan sasaran.
		6. Ketidaksiapan Produksi Vaksin Influenza untuk menghadapi pandemik Sebagai langkah antisipasi menghadapi pandemik flu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, membangun fasilitas produksi vaksin flu untuk manusia. Rencananya setelah pembangunan fasilitas selesai dilaksanakan, akan diserahkan ke Perusahaan untuk dioperasikan sebagai antisipasi pandemik flu. Perusahaan telah menguasai teknologi produksi vaksin flu dan sudah mampu memproduksi namun dalam kapasitas terbatas, sementara itu proyek pemerintah sampai saat ini belum ada kepastian kelanjutannya sehingga produksi vaksin dalam skala besar tidak dapat dilakukan apabila sewaktu-waktu pandemik flu benar-benar terjadi.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

PENGELOLAAN RISIKO

Bio Farma berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan aktivitasnya dan terus melanjutkan upaya untuk senantiasa melaksanakan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan, yang meliputi tindakan:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan pemerintah dan etika usaha.

Pengelolaan risiko di Bio Farma meliputi kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas pelaksanaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, penyediaan sumber daya yang memadai, mekanisme komunikasi, pelaporan pelaksanaan manajemen risiko baik internal maupun eksternal dan kesamaan bahasa.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan standarisasi praktik *Enterprise Risk Management*, Kebijakan manajemen risiko Bio Farma mengacu pada bridging COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000:2009 *Risk Management–Principles and Guidelines*, yang telah diadopsi menjadi standar nasional SNI ISO 31000:2011.

KONSEP PENGELOLAAN RISIKO

Konsep pengelolaan risiko Bio Farma berpedoman pada Manual Bio Farma MBF-01 dan MBF-02, Pedoman Manajemen Risiko SM-S.20 serta Prosedur-prosedur Baku/SOP: 100K-SIS-QRM, *Quality Risk Management*; 100K-SIS-IAP, Identifikasi Aspek Penting; 100K-SIS-ORM, *Operational Risk Management*; 235K-SIS-KBS, Keuangan, Bisnis dan Strategis; dan 235K-SIS-ERM, *Enterprise Risk Management*.

AKUNTABILITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen risiko di Bio Farma adalah Direktur Keuangan.

Di Bio Farma yang ditugaskan untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko dan sebagai fasilitator untuk penerapan manajemen risiko adalah Divisi *Compliance & Risk Management*, Bagian GCG & ERM. Kepala Divisi merupakan pemangku risiko pada divisi masing-masing dan sekaligus menjadi Penanggung Jawab dalam melakukan pengelolaan risiko pada divisinya.

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Untuk menimbulkan budaya sadar risiko dilakukan dengan sosialisasi Manajemen Risiko di lingkungan Bio Farma dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikasi manajemen risiko, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan, workshop, seminar dan lokakarya baik di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.

KOMPONEN PENGELOLAAN RISIKO

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan yaitu:

1. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko.
Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko.
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko
3. Proses pengelolaan risiko.
Proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.



PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko merupakan penerapan secara sistematis kebijakan manajemen, prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, melakukan asesmen risiko.

Proses manajemen risiko Bio Farma meliputi identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, dan pemantauan dan pengkajian risiko.

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kerangka kerja manajemen risiko pada tiap jenis risiko yang secara spesifik mempunyai karakter yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.

Penerapan Proses Manajemen Risiko Bio Farma



Proses Manajemen Risiko Bio Farma Meliputi 5 (lima) Tahapan Kegiatan

1. Komunikasi dan Konsultasi

Proses interaktif tukar menukar informasi dan pendapat mengenai risiko (*risk*) dan pengelolaannya, serta komunikasi antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai isu tertentu yang terkait dengan pengambilan keputusan atau penentuan langkah tertentu dalam menangani risiko (*risk*).

2. Menentukan Konteks

Dilakukan dengan menetapkan parameter-parameter yang relevan dengan Perseroan, baik internal maupun eksternal yang digunakan dalam pengelolaan risiko (*risk*), terutama dalam rangka menetapkan ruang lingkup dan kriteria risiko (*risk criteria*).

3. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

- Identifikasi Risiko (*Risk Identification*) dilakukan secara teliti sehingga semua risiko (*risk*) yang relevan termasuk risiko-risiko (*risk*) yang berada di luar kendali Perusahaan, dapat dipastikan telah teridentifikasi.
- Analisis Risiko (*Risk Analysis*) meliputi penentuan besaran kemungkinan terjadinya risiko (*risk*), besaran dampak kerugian, dengan memperhatikan sumber dan penyebab risiko (*risk agent/risk source*) serta pengendalian risiko (*risk*) yang sudah ada saat ini dan efektivitasnya.
- Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*) dilakukan untuk menetapkan risiko (*risk*) yang memerlukan penanganan risiko (*risk treatment*) berdasarkan skala prioritas.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

4. Penanganan Risiko (*Risk Treatment*) dilakukan untuk menyeleksi satu atau lebih alternatif metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi eksposur (*exposure*). Pemilihan alternatif penanganan risiko (*risk treatment*) harus didasarkan atas analisis biaya penanganan risiko (*risk treatment cost/cost of risk*) dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh pada berbagai aspek terkait.

Alternatif atau pilihan penanganan risiko (*risk treatment*) adalah:

- Menghindari risiko (*risk avoiding*) dengan tidak melakukan aktivitas korporasi tertentu
 - Mitigasi risiko (*risk mitigation*), misalnya dengan peningkatan keselamatan kerja, pemeliharaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemutakhiran sistem, dan prosedur
 - Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) dengan pihak lain, misalnya asuransi, hedging, kerja sama dengan bentuk *joint venture/partnership*. Pembagian risiko (*risk transfer/risk sharing*) ini dapat dilakukan untuk eksposur (*exposure*) yang melampaui toleransi risiko (*risk tolerance*) Perusahaan
 - Menerima risiko (*risk acceptance*) dengan melaksanakan aktivitas korporasi tertentu dengan tanpa usaha untuk mengurangi, membagi ataupun memindahkan risiko (*risk transfer*).
 - Kombinasi antara beberapa alternatif sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas.
5. Pemantauan (*Monitoring*) dan Kaji Ulang (*Review*) Pelaksanaan pemantauan meliputi monitoring secara berkelanjutan oleh para pemilik risiko (*risk owner*). Pengawasan pemantauan dilakukan oleh pimpinan pemilik risiko yang dilaksanakan secara berkala dan pihak ketiga melalui audit internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan, kaji ulang merupakan

peninjauan secara berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko yang diberlakukan dan efektivitas pelaksanaan penanganan risiko untuk disempurnakan secara berkesinambungan.

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO

- Meningkatkan kesadaran bahwa semua upaya pencapaian sasaran dan target-target perusahaan mengandung risiko sehingga setiap individu/unit kerja harus dapat mengelola risiko sesuai kedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko korporat terintegrasi.
- Meningkatkan kepastian pencapaian sasaran dan target perusahaan dengan cara:
 - Menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menghambat kelancaran proses bisnis.
 - Meminimalkan potensi kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut.

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko Bio Farma melalui:

- Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengendalian risiko yang dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO).
- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Divisi *Compliance and Risk Management* (CRM) dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Divisi Pengawasan Internal (PI).

Tugas & tanggung jawab dari Kepala Divisi *Compliance & Risk Management* untuk mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaan kepatuhan di lingkungan Bio Farma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan difokuskan pada upaya peningkatan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha dan pada setiap jenjang organisasi.

Selama tahun 2016, Divisi *Compliance & Risk Management* telah melakukan aktivitas sebagai berikut:

1. Melanjutkan sosialisasi mengenai pentingnya fungsi dan peranan kepatuhan dalam aktivitas Perusahaan guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
2. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kepatuhan untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku agar dapat meminimalkan risiko kepatuhan Perusahaan.
4. Melakukan tindakan pencegahan, bilamana diperlukan, agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak lain.
6. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi Perusahaan, dan menginformasikan setiap perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seluruh jajaran Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
7. Melaksanakan asesmen risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dan membuat rencana mitigasi atau pengendalian risiko yang dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO).

8. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang ada sudah dikelola dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi secara rutin oleh Urusan Manajemen Risiko Kantor Direksi dan melakukan pendekatan audit berbasis risiko oleh Bagian SPI

PENGELOLAAN ERM BIO FARMA

ERM Bio Farma terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. ERM Unit Risiko dan
2. ERM Korporat.

ERM Unit Risiko

ERM Unit Risiko disusun oleh seluruh Unit Risiko sesuai dengan Prosedur Baku/SOP 100K-SIS-ERM, yaitu setiap Unit Risiko membuat Laporan ERM Unit Risiko tahunan, dengan format laporan sebagai berikut:

1. Bab Pendahuluan, berisi tentang maksud dan tujuan dilakukannya ERM di setiap Unit Risiko, antara lain untuk menggali dan memahami semua risiko yang ada di dalam perusahaan secara menyeluruh sehingga risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan.
2. Bab Ruang Lingkup, berisi penjabaran proses bisnis perusahaan.
3. Tabel Risiko (Risk Register), menjelaskan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko untuk menentukan kejadian atau risiko yang mungkin timbul/terjadi, kemudian dihitung nilai probabilitas dengan metode Poisson, Binomial, Z-Score, Aproksimasi dan impact dengan metode Value at Risk (VaR), ditentukan Status Risikonya, dibuatkan Peta Risikonya apakah terdapat pada Kuadran I (Minor/Prevention) Kuadran II (Major/Catastrophic/Avoidance), Kuadran III (Insignificant/Acceptance) atau Kuadran IV (Moderate/Mitigation).
4. Bab Pembahasan, berisi informasi mengenai:
 - a. Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dan dinyatakan masuk sebagai risiko Unit Risiko.
 - b. Status Risiko yang diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil sebagai dasar prioritas penanganan risiko.
 - c. Risiko-risiko yang masuk kategori Acceptance, Prevention, Mitigation ataupun Avoidance.

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

4. Kesimpulan, yang menyimpulkan risiko-risiko yang akan atau masuk menjadi risiko korporat dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menanganinya.
- Laporan Tindak Lanjut Penanganan Risiko, berupa tabel yang menjelaskan bagaimana cara penanganan atau tindakan mitigasi atas risiko yang mungkin muncul, berisi:
 - Jenis kegiatan penanganan risiko.
 - Perkiraan biaya penanganan risiko.
 - Waktu pelaksanaan penanganan risiko.
 - Penanggung Jawab (PIC).

ERM Korporat

Sedangkan ERM Korporat disusun oleh Divisi *Compliance & Risk Management* dengan melakukan analisa dan rekomendasi atas Laporan ERM Unit Risiko dari seluruh bagian yang selanjutnya diajukan kepada manajemen (Direksi) untuk ditetapkan jumlah/ besaran Profil Risiko Korporat.

TINDAK LANJUT PENANGANAN RISIKO KORPORAT

Setelah menentukan risiko-risiko yang terkait dengan korporat dan langkah-langkah strategis yang akan diambil dalam menangani risiko-risiko tersebut, Divisi *Corporate & Risk Management* (CRM) selaku penanggung jawab risiko korporat akan melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan penanganan risiko yang dilaksanakan setiap unit di mana masing-masing Kepala Bagian unit risiko atau Ketua Tim proyek menjadi penanggung jawab setiap risiko dan kegiatan penanganannya yang secara keseluruhan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di Bio Farma.

Kegiatan Penanganan Risiko dari setiap Risiko Korporat Bio Farma yang akan Dilakukan pada tahun 2016

No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
1.	Perubahan Kebijakan/Regulasi Nasional & Internasional	- Menerapkan sistem manajemen mutu (<i>Quality Management System</i> - QMS) secara konsisten dan berkesinambungan sesuai ketentuan WHO sehingga Perusahaan dapat terus mempertahankan status prakualifikasinya. - Bekerja sama dan mendukung konsumen <i>bulk</i> untuk menjaga sistem manajemen kualitas (<i>Quality Management System</i>) untuk menghindari risiko delisting WHO. - Berperan aktif dalam kegiatan internasional baik WHO maupun organisasi lain terutama yang berkaitan dengan vaksin sehingga tetap mengikuti perkembangan industri dan pasar vaksin. - Mencari konsumen <i>bulk</i> lain untuk mengurangi ketergantungan penjualan <i>bulk</i> hanya ke beberapa konsumen.	- Bagian QA Service - Bagian Penjualan Korporasi Ekspor
2.	Fluktuasi Nilai Kurs Mata Uang Asing	- Menganalisa nilai kurs yang akan dipakai pada saat pembukaan LC atas barang/bahan yang diimpor tersebut - Mengupayakan/selalu berkomunikasi dengan pihak vendor perihal jadwal kedatangan barang/bahan tersebut, mengingat semakin lama jangka waktu antara pemesanan dengan jadwal kedatangan, akan berpotensi meningkatnya fluktuasi nilai tukar atas valuta asing.	Bagian <i>Treasury</i>



No.	Kejadian	Kegiatan Penanganan Risiko	Pemilik Risiko
3.	Realisasi Investasi Tidak Sesuai Jadwal	- Menyelaraskan perencanaan program investasi dengan kebutuhan riset dan pengembangan produk baru maupun kebutuhan pasar untuk produk yang sudah ada. - Menetapkan skala prioritas pada program investasi yang berdampak besar pada pendapatan perusahaan. - Meningkatkan kualitas sistem pengadaan dan pengawasan atas proyek pelaksanaan investasi. - Mempercepat proses kualifikasi sarana dan fasilitas baru agar dapat digunakan tepat waktu.	Proyek Pembangunan Gedung No.43
4.	Ketidaksiapan Produksi Vaksin Influenza untuk menghadapi pandemik	- Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk terus memantau kemungkinan kelanjutan proyek tersebut dan juga kemungkinan status pandemik flu di Indonesia. - Menyiapkan sendiri sarana dan fasilitas produksi vaksin seasonal flu untuk mengurangi ketergantungan impor <i>bulk</i> seasonal flu. Fasilitas ini sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin pandemik influenza jika diperlukan walaupun dalam skala kecil.	Bagian PV. Influenza
5.	Meningkatnya Persaingan Global	- Melakukan kebijakan riset produk yang sesuai dengan tren dan berupaya melakukan percepatan riset sehingga time to market produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar. - Melakukan kerja sama dengan lembaga riset/ produsen vaksin lainnya untuk mempercepat ketersediaan produk di pasar.	Bagian PV. sIPV
6.	Keterlambatan dalam Supply Vaksin	- Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan pihak Kementerian Kesehatan RI dan pembeli lainnya agar kontrak dapat ditandatangani tepat waktu. - Mengoptimalkan supply chain management yang berbasis teknologi informasi. - Mengoptimalkan jadwal produksi dan QC sesuai dengan kebutuhan pemasaran.	- Bagian Produksi OPV - Bagian Pengemasan - Bagian Produksi Hib - Bagian FPVP - Bagian PV. Campak

URAIAN MENGENAI MANAJEMEN RISIKO

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen risiko di lingkungan Bio Farma dan pengembangan kompetensi personil yang membidangi manajemen risiko, telah dilakukan program pelatihan berupa public training yang diselenggarakan oleh lembaga professional maupun in house training yang bekerjasama dengan narasumber dan pelatih berpengalaman di dalam Manajemen Risiko. Program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Nama Peserta	Jabatan	Kode Training	Topik Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
Mohammad Tarmizi	Ahli Madya	Training	Business continual management (BCM)	Expertindo Training	Yogyakarta	01-Feb-16	03-Feb-16
Mudi Risandi	Kepala Seksi	Training	Business continual management (BCM)	Expertindo Training	Yogyakarta	01-Feb-16	03-Feb-16
Mudi Risandi	Kepala Seksi	Training	Manajemen risiko proyek	CRMS Indonesia	Hotel Sensa Bandung	02-Mar-16	04-Mar-16
Nadia Khaerunisa	Staf	Training	Business continuity management	IT Governance Indonesia	Jakarta	04-Apr-16	06-Apr-16
Basuki Harjo	Kepala Bagian	Workshop	Corporate portfolio risk management "risk analysis, modeling and optimization"	Risk Workshop International-Jakarta	Jakarta	09-May-16	10-May-16
Mudi Risandi	Kepala Seksi	Workshop	Corporate portfolio risk management "risk analysis, modeling and optimization"	Risk Workshop International-Jakarta	Jakarta	09-May-16	10-May-16
Basuki Harjo	Kepala Bagian	Workshop	Project risk management	Risk Workshop International-Jakarta	Jakarta	26-May-16	27-May-16
Rian Dwi Oktavian	Staf Muda	Workshop	Project risk management	Risk Workshop International-Jakarta	Jakarta	26-May-16	27-May-16



URAIAN MENGENAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

KARYAWAN BIO FARMA MENJADI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN DALAM TUGAS FUNGSIONALNYA SEHARI-HARI WAJIB MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PENGENDALIAN INTERNAL MENCAKUP PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bio Farma secara berkesinambungan (*on going basis*) yang kualitas disain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh insan Bio Farma, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya laporan Keuangan yang akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan.
5. Penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan
6. Pelanggaran aspek kehati-hatian, serta.
7. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
8. Keandalan dan kebenaran informasi.
9. Kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan rencana kerja, prosedur dan peraturan perundangan.
10. Penggunaan sumber daya (*resources*) yang ekonomis dan efisien.
11. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program.
12. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DEWAN KOMISARIS, DIREKSI & INSAN BIO FARMA

Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko dengan dibantu oleh Komite-komite yang dimiliki Dewan Komisaris.

Direksi

Menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penerapan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan operasional, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta kebijakan akuntansi yang memadai.

INSAN BIO FARMA / KARYAWAN

Seluruh karyawan Bio Farma menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengendalian internal dan dalam tugas fungsionalnya sehari-hari wajib mempelajari dan memahami kebijakan sistem pengendalian internal di Perusahaan. Pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Bio Farma memiliki Pengawasan Internal (PI) yang berperan dalam mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Pengawasan Internal (PI) senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip GCG dapat berjalan sesuai secara baik.

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI BIO FARMA

Bio Farma telah melaksanakan sistem pengawasan dan pengendalian intern sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 26 sebagai berikut:

- a. Direksi menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset.
 - b. Sistem pengendalian intern di Bio Farma mencakup hal-hal sebagai berikut
 - Lingkungan pengendalian intern di Bio Farma dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari
 - » Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan
 - » Filosofi dan gaya manajemen
 - » Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya
 - » Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia
 - » Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - Aktivitas pengendalian, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
 - Sistem informasi dan komunikasi, merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Monitoring, merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pasal 28 sebagai berikut:
 - a. Direksi menyelenggarakan Pengawasan Intern.
 - b. Pengawasan intern dilakukan, dengan:
 - Membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - Membuat Piagam Pengawasan Intern.
 - c. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - d. Fungsi pengawasan intern sebagaimana adalah:
 - Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
 - e. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
 - f. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.
- Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Bio Farma dalam pengendalian intern yang diterapkan oleh unit-unit kerja, Bio Farma mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 05097/DIR/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Kebijakan Umum Pengendalian Internal. Kebijakan tersebut meliputi:
1. Peningkatan lingkungan pengendalian intern yang disiplin dan terstruktur.
 2. Pelaksanaan kajian dan pengelolaan risiko usaha, meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan secara berkesinambungan.



3. Melakukan aktivitas pengendalian pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan aset Perusahaan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang meliputi proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan pemantauan yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk pelibatan fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan.

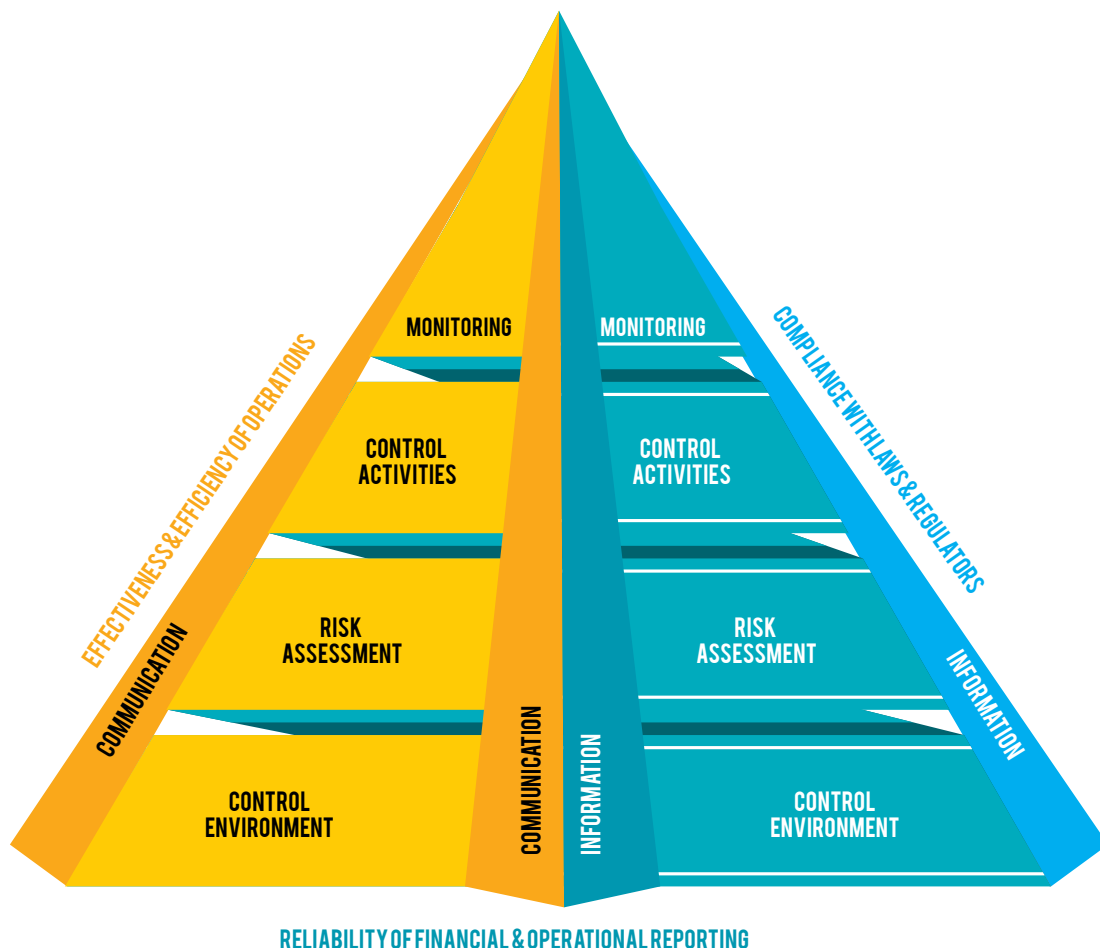
Kegiatan-kegiatan di atas ditangani secara sinergis dan proporsional lintas Bagian dengan melibatkan aktivitas Pengawasan Internal (PI), Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Divisi *Quality Assurance* dan bagian terkait lainnya.

PENGENDALIAN INTERN MENCAKUP PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Upaya yang dilakukan oleh Bio Farma untuk pengendalian keuangan yaitu

1. Menyusun rencana kerja yang membahas strategi Bio Farma secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Pengendalian investasi,
3. Alokasi biaya,
4. Memantau RKAP dengan realisasi dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibahas pada rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
5. Perolehan laba agar dapat berjalan sesuai dengan rencana Perusahaan.

Upaya yang dilakukan oleh Bio Farma untuk Pengendalian Operasional yaitu agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien.



URAIAN MENGENAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

1. Pengendalian operasional Perusahaan menggunakan standar operating prosedur (SOP) yang merinci prosedur kerja setiap aktivitas operasional yang dilakukan oleh Bio Farma terkait produk & aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Aturan keputusan yang telah ditentukan lebih dahulu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Perusahaan mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.
3. Bio Farma membuat struktur organisasi Perusahaan yang baik, dilengkapi dengan Divisi pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.

Sistem pengendalian di Bio Farma melibatkan seluruh insan Bio Farma, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Kegiatan pengendalian harus direncanakan terlebih dahulu sebelum diterapkan agar dapat mengendalikan risiko yang mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bio Farma. Kegiatan pengendalian juga mencakup pada penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bio Farma sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perusahaan.

KAJI ULANG YANG DILAKUKAN BIO FARMA DALAM MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi Bio Farma secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan karyawan sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut,

Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).

Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*)

Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Pengawasan Internal Division dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.

1. Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Divisi *Compliance & Risk Management*, Bagian GCG & ERM.
2. Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Divisi *Compliance & Risk Management*, Bagian GCG & ERM
3. Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - a. Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - b. Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

Kaji Ulang Pengendalian Internal

Kaji ulang pengendalian dimulai dari lingkungan pengendalian melalui

1. Budaya Perusahaan PITIC (*Profesional, Integritas, Teamwork, Innovation, Customer Oriented*), GCG (*Good Corporate Governance*) melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma serta penandatanganan Pakta Integritas, jadi lingkungan pengendalian Bio Farma sudah sesuai dengan kerangka COSO.
2. Management risiko, yaitu risiko dipetakan dan dimitigasi.
3. Pemantauan melalui audit internal yang dilakukan oleh Pengawasan Internal & *Quality Assurance* yang berbasis risiko (*risk based audit*).



PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI

1. Bio Farma melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari aktivitas dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan interen.
2. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - a. Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - b. Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bio Farma dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar.

Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

PENGENDALIAN ASET FISIK (PHYSICAL CONTROL)

1. Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bio Farma.
2. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bio Farma dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

DOKUMENTASI (DOCUMENTATION)

1. Bio Farma sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.

2. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bio Farma secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan karyawan.
3. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor interen, & akuntan publik.
4. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor interen ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

PENJELASAN KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN KERANGKA YANG DIAKUI SECARA INTERNASIONAL (COSO – INTERNATIONAL CONTROL FRAMEWORK)

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTENAL BIO FARMA

1. Tujuan Kepatuhan yaitu untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bio Farma telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan interen yang ditetapkan oleh Bio Farma.
2. Tujuan Informasi yaitu tersedianya informasi laporan keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bio Farma dari risiko kerugian.
4. Tujuan Budaya Risiko (*risk culture*) yaitu mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bio Farma secara berkesinambungan.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

URAIAN MENGENAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sedangkan, lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bio Farma.

Sikap terhadap pentingnya pengendalian intern ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

1. Struktur organisasi Perusahaan yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bio Farma.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh karyawan.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
5. Atensi dan arahan manajemen Bio Farma dan komite lainnya, seperti Komite Risiko.
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bio Farma dan penerapan manajemen risiko.

5 ELEMEN PENGENDALIAN INTERN (COSO INTERNATIONAL CONTROL FRAMEWORK)

Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Bio Farma telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Melalui budaya Perusahaan PITIC (*Profesional, Integritas, Teamwork, Innovation, Customer Oriented*),
 - b. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) melalui buku saku *Code of Conduct* yang sudah disosialisasikan dan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Komite-komite, Direksi, semua insan Bio Farma
 - c. Penandatanganan Pakta Integritas,
 - d. Kompetensi karyawan, peng-organisasian dan pengembangan sumberdaya manusia,
 - e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi jadi lingkungan pengendalian Bio Farma
2. Penilaian Risiko
Di Bio Farma Bagian GCG & ERM, Divisi *Compliance & Risk Management* (CRM) yang mengkaji dan pengelolaan risiko usaha yaitu mengidentifikasi, menganalisis & evaluasi, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan.

3. Prosedur Pengendalian
Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perusahaan. Yang sudah diterapkan oleh Bio Farma terkait dengan aktivitas pengendalian:
 - a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan.
 - b. Pembagian tugas dan tanggung jawab untuk kegiatan terkait,
 - c. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan)
 - d. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Pendokumentasian dan pencatatan Laporan Keuangan Audited Tahunan, telah dilakukan pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, serta dilakukan pemeriksaan kinerja secara independen, oleh Internal Audit maupun eksternal Audit (Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP).
4. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen, pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. Pengendalian informasi dan komunikasi yang sudah dilakukan oleh Bio Farma:
Dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, sosialisasi, mail moderator, Website Perusahaan, intranet, Portal Bio Farma, biolibrary, dan media lain lainnya.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Dilakukan melalui *performance check* oleh Pembina Teknis, Audit Internal oleh Divisi Pengawasan Internal & *Quality Assurance* dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP).

PENJELASAN MENGENAI HASIL REVIEW & EVALUASI YANG DILAKUKAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Review dan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian intern Bio Farma dilakukan pada tingkat entitas dan operasional. *Review* dan evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara berkala oleh auditor Internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Divisi Pengawasan Internal (PI) melakukan *review* dan evaluasi pada Bagian-Bagian yang diaudit yang ditetapkan dalam PKPT. Sedangkan secara entitas *review* dan evaluasi dilakukan oleh Auditor Eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat pelaksanaan general audit pada setiap tutup buku. Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian intern dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal.

Untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian intern, Perusahaan/ Perseroan melakukan *review* dan evaluasi sistem pengendalian intern secara berkala.

MAKSUD DAN TUJUAN REVIEW DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Memberikan keyakinan kepada Direksi dalam pemberian asersi mengenai efektivitas pengendalian internal untuk selanjutnya memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan lain bahwa penerapan sistem pengendalian internal Kami telah cukup memadai dalam mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, serta efisiensi/efektivitas dari kegiatan usaha Kami.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan sistem pengendalian intern perusahaan di masa yang akan datang (*areas of improvement*).

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN BIO FARMA DALAM RANGKA MEMASTIKAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN PEMANTAUAN YANG EFEKTIF

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam Perusahaan
2. Menetapkan unit kerja yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bio Farma dan sifat/ frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan PI ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/ penyimpangan dari kebijakandan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari unit kerja yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi/*feed back* dalam format dan frekuensi yang tepat.



Perseroan melakukan *review* dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian intern, Perusahaan.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENJABAT PADA PERIODE LAPORAN TAHUNAN

Sampai dengan 31 Desember 2016 di Bio Farma, tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan, baik permasalahan hukum perdata maupun pidana. Tidak ada dampak terhadap kondisi keuangan dan operasional Perusahaan. Dengan demikian Bio Farma tidak menyajikan informasi tentang pokok perkara/gugatan, status penyelesaian perkara/gugatan, risiko Perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan, dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otorisasi (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Hal ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris terhadap segala peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan serta komitmen manajemen untuk menegakkan prinsip tata kelola yang baik.

SANKSI ADMINISTRASI

Selama tahun 2016, tidak pernah ada sanksi administrasi kepada Bio Farma yang dikenakan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan.

POKOK PERKARA/GUGATAN

Tidak ada Pokok Perkara/Gugatan yang terjadi pada tahun Pelaporan 2016, sehingga Bio Farma tidak menyajikan informasi tersebut.

STATUS PENYELESAIAN PERKARA/ GUGATAN

Tidak ada Status Penyelesaian Perkara/Gugatan yang terjadi pada tahun Pelaporan 2016, sehingga Bio Farma tidak menyajikan informasi tersebut.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/ GUGATAN

Tidak ada Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan akibat status penyelesaian perkara yang terjadi pada tahun Pelaporan 2016, sehingga Bio Farma tidak menyajikan informasi tersebut.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 yang diberikan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Direktur Produksi Bio Farma, Juliman, merupakan komitmen Bio Farma untuk terus menerapkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bio Farma senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholder* untuk mengakses informasi dan data Perusahaan melalui telepon, website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, Facebook, Twitter, Instagram.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BIO FARMA 4 KALI RAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bio Farma kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016 dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Direktur Produksi Bio Farma Juliman di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin 19 Desember 2016. Ini adalah merupakan penghargaan yang ke-4 kalinya sejak tahun 2013.

Penghargaan ini merupakan komitmen Bio Farma yang secara konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan Badan Publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyajikan informasi yang diperuntukkan bagi kepentingan publik.

Dengan skor 81,27 Bio Farma meraih peringkat ke 3 untuk kategori badan publik BUMN,

Penerapan keterbukaan informasi publik ini mampu mendorong korporasi untuk bisa bersaing secara global dan penghargaan ini merupakan prestasi bagi Bio Farma yang telah memasuki kualifikasi informatif.

Penilaian melalui *assessment* yang ketat dari Komisi Informasi Pusat dilakukan sepanjang tahun 2016 melalui Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) sebagai alat ukur bagi badan publik dalam menjalankan amanah UU KIP.

Penilaian tahap akhir dilakukan dengan melakukan kunjungan ke badan publik untuk mengukur indikator pelayanan informasi publik, indikator pengelolaan informasi dan dokumentasi badan publik.

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

Bio Farma banyak melakukan inovasi di bidang layanan publik baik secara hard facilities maupun soft facilities dengan didukung IT terintegrasi seperti penyediaan informasi yang disediakan di Museum Bio Farma dan *Exhibition Hall*.

Melalui layanan informasi publik ini, hak masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai perusahaan, proses bisnis, tata kelola, laporan keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan dan informasi terkait lainnya dapat terpenuhi.

Bio Farma memiliki perangkat dan mekanisme KIP yang lengkap, diperbaharui setiap tahun. Bio Farma pun telah menyusun klasifikasi informasi publik yang terdiri dari informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Bio Farma memiliki website Perusahaan (www.biofarma.co.id) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menyajikan informasi yang lengkap tentang Bio Farma seperti profil Perusahaan, visi, misi, strategi, produk, struktur manajemen, kebijakan GCG, CoC, berita Perusahaan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan rilis media. Website Bio Farma menampilkan informasi terkini secara transparan, konsisten dan tepat sasaran sehingga dapat membentuk pemahaman publik mengenai Bio Farma dengan baik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui website tepat waktu, akurat, lengkap dan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

Selain media online, Perusahaan juga memanfaatkan media TV dan radio dalam bentuk pemasangan adlips/spot radio, info Bio Farma maupun talkshow. Selain itu Bio Farma juga menggunakan media luar ruang berupa majalah dinding (mading) digital. Mading digital memberikan informasi mengenai kegiatan manajemen Bio Farma dalam bentuk foto.

Media cetak dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi berupa berita dan publikasi laporan keuangan. Berita yang disebarkan berupa kegiatan Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik termasuk laporan tahunan, company profile dan brosur.

Selama tahun 2016 Bio Farma telah mengeluarkan 56 kali siaran pers dengan perincian sebagai berikut:

Daftar Siaran Pers Selama Tahun 2016

No	Judul Press Release	Tanggal	Kategori
1	Bio Farma Adakan Sosialisasi Kesehatan di Pesantren	25 Januari 16	Corporate
2	Bio Farma Ambil Bagian PIN 2016	26 Januari 16	Corporate
3	2/3 kebutuhan Vaksin polio dunia dipenuhi Bio Farma	02 Maret 16	Corporate
4	Pencanangan PIN POLIO Jabar di Bio Farma	08 Maret 16	Corporate
5	Laboratorium Bio Farma Raih Akreditasi	11 Maret 16	Corporate
6	Bio Farma Selenggarakan Customer Gathering Laboratorium Mikrobiologi	17 Maret 16	Corporate
7	Saudi Arabio Gunakan Vaksin Indonesia	18 Maret 16	Corporate
8	Bio Farma salurkan dana CSR untuk Jabar	19 Maret 16	CSR



No	Judul Press Release	Tanggal	Kategori
9	17 Duta Besar Kunjungi Bio Farma	20 Maret 16	Corporate
10	Bio Farma Raih Penghargaan Wajib Pajak	04 April 16	Corporate
11	Bio Farma ajak Media kunjungi Sistem Rantai Dingin Vaksin di Mataram	10 April 16	Corporate
12	Bio Farma Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas (Berita Foto)	24 April 16	Corporate
13	Bio Farma Bantu Tingkatkan Produktivitas UMKM	11 April 16	CSR
14	Bio Farma Raih The Best IGA Award 2016	24 April 16	Corporate
15	Bio Farma Tebar Kebahagiaan kepada 1126 Anak Yatim dan Gelar Safari Ramadhan 1437 H	21 Juni 16	Corporate
16	Bio Farma Klarifikasi Temuan Vaksin Palsu	23 Juni 16	Corporate
17	Bio Farma Partispasi BUMN Hadir Untuk Negeri	27 Juni 16	Corporate
18	Penjelasan Bio Farma terkait Vaksin Palsu	30 Juni 16	Corporate
19	Vaksinasi Ulang Gunakan Produk Berkualitas Global	18 Juli 16	Corporate
20	Mengenai Proses Produksi dan Pengujian Vaksin yang Canggih di Bio Farma	18 Juli 16	Corporate
21	Bio Farma Undang Media Nasional Kunjungi Fasilitas Proses Produksi Vaksin	19 Juli 16	Corporate
22	PENJELASAN BIO FARMA TERKAIT VAKSIN PALSU	21 Juli 16	Corporate
23	Badan POM Menjamin Vaksin yang Bermutu untuk Menunjang Program Imunisasi Nasional	24 Juli 16	Corporate
24	20 SISWA SMA & SMK JABAR SIAP IKUTI SMN 2016 DI SULUT	24 Juli 16	Corporate
25	Lima Bumh di Jawa Barat Kirim 20 Siswa Berprestasi Jawa Barat Ke Sulawesi Utara	24 Juli 16	Corporate
26	Bio Farma Raih Penghargaan Perlindungan Anak dari KPAI	28 Juli 16	Corporate
27	5 BUMN Jabar Hadir Untuk Masyarakat Jabar	16 Agustus 16	Corporate
28	Rilis 5 BUMN Jabar Serahkan Bantuan Renovasi Rumah Bagi Para Veteran	18 Agustus 16	Corporate
29	Melalui Forum Riset Life Science, Hadirkan Biofarmasetikal Mandiri yang Terjangkau oleh Rakyat Indonesia	23 Agustus 16	Corporate
30	Bio Farma Himpun Sinergi Antar Elemen se-Indonesia Guna Ciptakan Kemandirian Nasional Bidang Life Science	24 Agustus 16	Corporate
31	Bio Farma berperan aktif dalam repatriasi aset dan sosialisasikan Tax Amnesty kepada Karyawan	02 September 16	Corporate
32	Walikota Cimahi Resmikan Taman Vaksinasi	10 September 16	Corporate
33	NPAD – BUMN Centre of Excellence (BCE) Gelar Seminar Pentahelix untuk Kemandirian Bahan Baku Farmasi	16 September 16	Corporate
34	Bio Farma Bantu Warga Garut Korban Banjir Bandang dan Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis	23 September 16	Corporate
35	Bio Farma-Indonesia promotes the CSR activities in Developing Geopark at the UNESCO Conference on Global Geopark in England	26 September 16	Corporate
36	Terus Konsisten, Bio Farma Promosikan Peran BUMN dalam Pengembangan Ciletuh di Konferensi Geopark UNESCO di Inggris	26 September 16	Corporate

AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAAN

No	Judul Press Release	Tanggal	Kategori
37	Terapkan Keterbukaan Informasi Bio Farma Raih Annual Report Award 2015	27 September 16	Corporate
38	Konferensi Geopark UNESCO Di Inggris Angkat Isu Konservasi Geologi, Kesehatan Dan Kesejahteraan	28 September 16	Corporate
39	Depag Validasi Pemantauan Hilal	04 Oktober 2016	Corporate
40	Rilis Bio Farma Pasok Vaksin HPV ke DKI	06 Oktober 2016	Corporate
41	Komisi V DPRD Banten Kunjungi Bio Farma	09 November 2016	Corporate
42	Bio Farma – Indonesia, dipercaya jadi tuan rumah training Vaksin untuk Negara Islam	09 November 2016	Corporate
43	Kasus Terus Naik, Konsorsium Kejar Kemandirian Vaksin Dengue	09 November 2016	Corporate
44	Pengelolaan Limbah Vaksin Jadi Isu Penting di Negara Islam	09 November 2016	Corporate
45	Akselerasi Riset Vaksin dengan Belanja Platform Teknologi Baru	09 November 2016	Corporate
46	Bio Farma, BUMN Produsen Vaksin dipercaya OKI menjadi Tuan Rumah Program Pelatihan Produksi Vaksin Untuk Negara Islam	11 November 2016	Corporate
47	Bio Farma, dipercaya menjadi Tuan Rumah Workshop Produksi Vaksin Negara Islam	11 November 2016	Corporate
48	Vaksin produk yang strategic untuk saat ini dan masa depan	14 November 2016	Corporate
49	Indonesia Didorong Menjadi Centre Of Excellence Produk Vaksin Di Negara Islam	16 November 2016	Corporate
50	Rilis OIC_Produsen Vaksin Targetkan Percepatan kerjasama Pusat Riset Produk Halal	17 November 2016	Corporate
51	Rilis_Bio Farma turut serta dalam Pameran di Aljazair	29 November 2016	Corporate
52	Bio Farma Tanda Tangan MoU Perluasan Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhanratu	02 Desember 2016	Corporate
53	Bio Farma Raih Kembali PROPER Emas Untuk Ketiga Kalinya	08 Desember 2016	Corporate
54	Bio Farma Raih Juara Terbaik Laporan Keberlanjutan 2016	14 Desember 2016	Corporate
55	Bio Farma raih Penghargaan Keterbukaan informasi publik	19 Desember 2016	Corporate
56	Bio Farma gelar penandatanganan kontrak perjanjian kemitraan dan memberikan pendidikan kewirausahaan UKM calon binaan	20 Desember 2016	CSR

Bio Farma juga mendistribusikan rilis tidak hanya di dalam negeri namun Internasional melalui jaringan Distribusi Rilis Global, yang dikutip berbagai media International khususnya di Asia dan Timur Tengah.

Tahun	Jumlah Tamu yang Berkunjung (orang)	Jumlah Group
2014	4.211	76
2015	4.639	77
2016	4.889	70

PENERIMAAN KUNJUNGAN
PERUSAHAAN

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Perusahaan bertujuan untuk memperkenalkan Perusahaan dan mengedukasi tentang pentingnya vaksinasi. Tamu yang berkunjung ke Bio Farma selama tahun 2016 berasal dari dalam maupun dari luar Pulau Jawa.



KOMUNIKASI INTERNAL

Kemudahan akses komunikasi internal merupakan kunci kelancaran penyebaran informasi perusahaan dan sebagai alat untuk membangun solidaritas di internal perusahaan. Keberhasilan komunikasi internal sangat ditunjang oleh media komunikasi yang digunakan dan *content* informasi yang disebar. Dengan demikian, seluruh karyawan dapat mengerti informasi yang disampaikan dengan cepat dan efektif.

CORPORATE PORTAL

Bio Farma memiliki *corporate portal* sebagai sarana komunikasi internal karyawan Bio Farma. Konten *corporate portal* mencakup kebijakan, aturan serta pedoman-pedoman terkait GCG maupun berbagai aplikasi untuk kemudahan dan efektivitas perusahaan seperti sistem kehadiran, e-corespondensi, layanan kesehatan karyawan.

KLIPING

Perusahaan secara rutin mendistribusikan kliping berita yang terkait dengan Perusahaan kepada Direksi dan karyawan melalui jaringan intranet.

Tahun	Berita Baru	Jumlah Orang Yang Baca Berita
	1	2
2014	2.400	2.650
2015	1.635	1.797
2016	2,719	2,086

BULETIN BIO MAGZ

Bio Magz merupakan buletin internal triwulanan berisi informasi kegiatan Perusahaan yang didistribusikan melalui *e-buletin*. Selama tahun 2016 Design dan Pembuatan E – Buletin Tahun 2016

1. Edisi 3 : Bio Farma Penuhi 2/3 kebutuhan Vaksin Polio di Dunia
2. Edisi 4 : Penjelasan Bio Farma Terkait Vaksin Palsu
3. Edisi 5 : Forum Riset *Life Science* Nasional
4. Edisi 6 : BUMN Hadir untuk Negeri

NEWSLETTER

Newsletter yang berkaitan dengan informasi umum didistribusikan *e-mail* dan dipasang pada papan pengumuman. Selama tahun 2016 telah dilakukan pemasangan *Newsletter* sebanyak 147 kali.

Tahun	Jumlah Pemasangan <i>Newsletter</i> (kali)
2014	150
2015	125
2016	147

COFFEE MORNING

Coffee Morning adalah kegiatan *sharing knowledge* informal yang dilaksanakan secara rutin oleh Bio Farma.

Setiap karyawan yang telah mengikuti seminar, pelatihan, pendidikan formal yang sifatnya strategis, bagi Perusahaan, diwajibkan untuk melakukan *sharing knowledge* baik dalam bentuk tulisan maupun presentasi, yang nantinya akan dijadikan buku kompetensi Biofarma / *Bio Farma's books of competency*. Buku ini nantinya akan berisi ilmu – ilmu yang berkaitan dengan perkembangan bisnis Bio Farma di masa yang akan datang. Selain narasumber berasal dari internal Bio Farma, di beberapa kesempatan juga mengundang narasumber dari luar Perusahaan untuk menambah wawasan karyawan.

Pada tahun 2016, telah dilakukan sebanyak 10 kali *sharing knowledge* yang melibatkan karyawan, dari *level Staf* sampai dengan level Kepala Divisi yang berasal dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Kegiatan *sharing knowledge* ini mempunyai misi untuk meningkatkan soliditas antar karyawan dan menjalin hubungan komunikasi harmonis dan berkesinambungan di perusahaan.

Pelaksanaan Coffee Morning 2016

No	Tanggal	Tema
1	18 Februari 2016	Seroproteksi, Serokonversi, Geometric Mean Titer, Aviditas dan Kemampuan Bakterisidal Anti-Polyribosylribitol Phosphate setelah Pemberian Dosis Primer Vaksin Hib Pentavalen (DTwP/HB/Hib) Dibandingkan dengan Vaksin Hib Monovalen (PRP-T) yang Diberikan Secara Simultan dengan Vaksin DTwP/HB pada Bayi
2	3 Maret 2016	Menjawab Keraguan Vaksin
3	31 Maret 2016	Identifikasi dan Modifikasi Sel Vero Secara Genetik sebagai Substrat untuk Produksi Vaksin Influenza H1N1p-2009
4	21 April 16	Bioinformatics
5	21 April 16	Digital Asset
6	25 Mei 2016	"Business Continuity Management Systems Implementer"
7	02 September 16	"Tax Amnesty" sosialisasi Amnesti Pajak sebagai bentuk apresiasi dan keterlibatan terhadap program pemerintah dalam mendukung pembangunan bangsa.
8	26 Oktober 2016	"Nilai Strategis dibalik World Class CSR sebagai Value Added Perusahaan": Sharing presentasi Bio Farma di UNESCO tentang Global Geopark
9	November 16	Analytical Method in Development and Manufacture of Drugs and Biologics
10	Desember 2016	Workshop on Biorisk Management (BRM) as per GAP III: implementation for Diagnostic Facilities

PENGUMUMAN MELALUI INTRANET

Media intranet (*e-mail*) juga dimanfaatkan untuk sosialisasi berbagai aktivitas, pengumuman dan berita informal seperti pengumuman dari bagian SDM dan organisasi internal, penyelenggaraan kegiatan donor darah, berita duka cita, dan sebagainya.

PUSAT LAYANAN INFORMASI BIO FARMA

Bio Farma membuka layanan informasi konsumen melalui berbagai media komunikasi interaktif dimana konsumen atau masyarakat lainnya dapat menyampaikan pendapat, keluhan maupun pertanyaan melalui berbagai media seperti:



Coffee Morning menjadi ajang untuk berbagi informasi mengenai kegiatan terbaru yang diselenggarakan oleh perusahaan.



MENU CUSTOMER CARE

Pada website perusahaan www.biofarma.co.id

Portal Kementerian BUMN:

<http://www.bumn.go.id/biofarma/kontak-kami/>

Corporate blog : www.infoimunisasi.com

Telepon : (62-22) 2033755

Faksimile : (62-22) 2041306

Email : mail@biofarma.co.id

Facebook : [infoimunisasi](https://www.facebook.com/infoimunisasi)

Twitter : [@biofarmalD](https://twitter.com/biofarmalD), [@infoimunisasi](https://twitter.com/infoimunisasi)

KODE ETIK

UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERUSAHAAN DALAM JANGKA PANJANG, MAKA PELAKSANAAN GCG HARUS DILANDASI OLEH INTEGRITAS YANG TINGGI DAN DIPERLUKAN PEDOMAN PERILAKU YANG DAPAT MENJADI ACUA ORGAN PERUSAHAAN.

KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU / CODE OF CONDUCT)

Untuk tercapainya tujuan Perusahaan dalam jangka panjang, maka pelaksanaan GCG harus dilandasi oleh integritas yang tinggi dan diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

PRINSIP-PRINSIP YANG DIMILIKI OLEH BIO FARMA UNTUK PENERAPAN KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU)

1. Nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.
2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, Bio Farma sudah memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ Perusahaan dan insan Bio Farma. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis Perusahaan dituangkan dan dijabarkan dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Etika bisnis merupakan acuan bagi Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Penerapan nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Setiap Perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

FUNGSI PEDOMAN PERILAKU BAGI BIO FARMA

1. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ Perusahaan dan semua insan Bio Farma
2. Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

KEBERADAAN KODE ETIK

Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh insan Bio Farma diwajibkan untuk menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan sehari-harinya.

PEDOMAN PENERAPAN KODE ETIK (PEDOMAN PERILAKU) DI BIO FARMA

Sebagai wujud kepedulian Bio Farma untuk penerapan kode etik (Pedoman Perilaku) maka Direksi Bio Farma telah mengeluarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

Anggaran Dasar Perusahaan

1. Surat Keputusan Direksi Nomor: 00223/Dir/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang *Code of Conduct*,
2. Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor : 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) yang telah diperbaharui dengan SKB Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero)



Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman bagi insan Bio Farma dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari serta dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan demikian diharapkan lingkungan kerja Bio Farma dapat menjadi lingkungan kerja yang profesional dan menyenangkan sehingga seluruh potensi karyawan dapat dioptimalkan.

POKOK-POKOK KODE ETIK (*CODE OF CONDUCT*)

Pedoman Perilaku merupakan salah satu bentuk komitmen Bio Farma dalam rangka penerapan dan penegakan tata kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*) dan merupakan sekumpulan komitmen yang berisi tentang kewajiban, larangan dan hubungan dengan *stakeholders* lainnya.

Kode Etik Perusahaan yang mengatur kewajiban yang harus ditaati setiap insan Bio Farma memuat:

BAB I

PENDAHULUAN

1. Daftar Isi
2. Visi, Misi, *Philosophy*, *Value*

BAB II ETIKA USAHA

CARA PERUSAHAAN MELAKUKAN BISNIS

1. Etika Terhadap Pelanggan
2. Etika Terhadap Pemasok/Mitra Bisnis
3. Etika Terhadap Kreditur
4. Etika Terhadap Pesaing
5. Etika Terhadap Media Massa
6. Etika Terhadap Penegak Hukum
7. Etika Terhadap Pemerintah/Negara
8. Etika Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup
9. Etika Terhadap Karyawan
10. Etika Terhadap Pemegang Saham

BAB III ETIKA KERJA

TATA PERILAKU MANAJEMEN DAN KARYAWAN

1. Kepatuhan Terhadap Hukum
2. Benturan Kepentingan
3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Cendera Mata, Jamuan, Hiburan, Pemberian Donasi dan Fasilitas Lainnya
4. Kesempatan yang Sama Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
5. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Pelestarian Lingkungan

6. Pencatatan dan Penyusunan Data Perusahaan serta Integritas Laporan Keuangan
7. Perlindungan Informasi Perusahaan
8. Perlindungan Aset Perusahaan
9. Aktivitas Politik
10. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang dan Perjudian
11. Perilaku Etis Jajaran Manajemen dan Karyawan

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
2. Penanganan terhadap Dugaan Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)
3. Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)

PAKTA INTEGRITAS UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DI PT BIO FARMA (PERSERO)

PAKTA INTEGRITAS UNTUK KARYAWAN

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) DI PT BIO FARMA (PERSERO)

KODE ETIK



PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK (CODE OF CONDUCT) BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL DI BIO FARMA

Setiap insan Bio Farma harus memiliki komitmen untuk dapat menyelaraskan diri dengan sistem nilai dan budaya kerja di Perusahaan. Oleh karena itu, seluruh insan Bio Farma wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan tanggung jawab dari setiap insan Bio Farma di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pada tanggal 26 April 2016, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Bio Farma telah melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor : 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) yang telah diperbaharui dengan SKB Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero)

Acara ini yang dihadiri oleh seluruh insan Bio Farma dan diakhiri dengan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan atas Pedoman Perilaku.

Setiap 1 tahun sekali seluruh insan Bio Farma diwajibkan secara tertulis untuk menyatakan kesanggupan mentaati dan melaksanakan setiap butir Pedoman Perilaku, yang diwujudkan dalam suatu pernyataan kepatuhan yang ditanda tangani oleh setiap insan Bio Farma sebagai salah satu syarat kelanjutan hubungan kerja dengan perusahaan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK (CODE OF CONDUCT)

Untuk penyebaran kode etik (*Code of Conduct*), Bio Farma melakukannya dengan cara sosialisasi terhadap Pedoman Perilaku untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh insan Bio Farma bahwa pentingnya melaksanakan Pedoman Perilaku ini.

Sosialisasi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap insan Bio Farma diberikan buku saku sekaligus penandatanganan pakta integritas yang merupakan komitmen insan Bio Farma untuk melaksanakan Pedoman Perilaku Bio Farma.



2. Manajemen memberikan pemahaman dan kesadaran kepada karyawan untuk menerapkan Pedoman Perilaku melalui acara sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara mempertemukan seluruh karyawan.
3. Aplikasi *Code of Conduct* yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar pemahaman seluruh karyawan terhadap *Code of Conduct* (berupa kuesioner).
4. Website, intranet, banner

MEKANISME PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU TERMASUK PELAPORAN DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN

Penegakan dan sanksi bagi pelanggar *Code of Conduct* diatur dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor: 01024/DIR/II/2013 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor : KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 Tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) Bab IV: Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan dan Sanksi Atas Pelanggaran, sub bab 4.4: Penanganan Terhadap Dugaan Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan subbab 4.5: Sanksi atas Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang intinya menjelaskan sebagai berikut:

Penegakan dan sanksi pelanggaran kode etik dilaksanakan Bio Farma melalui mekanisme *Whistle Blowing System*. Adapun mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai berikut:

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku, maka insan Bio Farma berkewajiban melaporkan kepada:
 - a. Atasan langsungnya
 - b. Kotak Pengaduan Pelanggaran / *Whistleblowing System*.
2. Pelaporan dilakukan atas dasar itikad baik dan bukan didasari atas kehendak buruk atau fitnah. Disamping pihak internal Perusahaan, pelaporan pelanggaran Pedoman Perilaku juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal Perusahaan

seperti Pelanggan, Mitra Bisnis, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya.

3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada pelaporan yang dilakukannya disertai dengan bukti pendukung yang relevan atas dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku.
4. Perusahaan akan merahasiakan identitas Pelapor sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Perusahaan berkewajiban menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan dan/atau dapat merusak citra Perusahaan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

KEWENANGAN MENANGANI DUGAAN PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Kewenangan menangani dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku diatur secara berjenjang dimana tim yang menangani dugaan pelanggaran dipimpin oleh pejabat jabatannya yang satu tingkat lebih tinggi dari terduga pelaku pelanggaran.

Terduga Pelaku Pelanggaran	Pejabat yang Menangani Dugaan Pelanggaran
Insan Bio Farma, selain Kepala Divisi SDM, Dewan Komisaris dan Direksi	• Koordinator : Kepala Divisi SDM • Anggota : Pejabat di Divisi CRM, SPI, Divisi SDM sesuai dengan penugasan dari Direktur SDM/ Direktur Utama
Dewan Komisaris, Kepala Divisi SDM	Direktur Utama
Direksi	Dewan Komisaris

SANKSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM KODE ETIK (NORMATIF)

Setiap Insan Bio Farma yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi.

KODE ETIK

2. Sanksi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal (pemasok, mitra bisnis atau pemangku kepentingan lainnya), maka akan dikenakan ketentuan yang tertuang dalam kontrak dan prosedur Perusahaan yang relevan. Apabila ada indikasi tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

Keputusan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Akibat dari tindakan yang dilakukan:

1. Melanggar hukum dan peraturan perundangan serta peraturan yang berlaku di Perusahaan.
2. Mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dan/atau pihak-pihak lain baik finansial maupun non finansial.
3. Mengganggu kelancaran proses atau kegiatan di Perusahaan.
4. Mengganggu keamanan dan/atau keselamatan insan Bio Farma atau pihak lainnya.
5. Mencemarkan nama baik Perusahaan, insan Bio Farma atau pihak lainnya.
6. Melanggar kesusilaan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan/atau melanggar hak-hak dan martabat individu lainnya.
7. Dari derajat kesengajaan:
 - a. Apakah tindakan penyimpangan yang dilakukan merupakan kesengajaan atau bukan.
 - b. Apakah pelaku yang diduga melakukan pelanggaran sebelumnya pernah diingatkan atas tindakan tersebut.
 - c. Motif tindakan: dari tindakan penyimpangan yang dilakukan apakah ada motif finansial atau non finansial.
8. Sanksi pelanggaran kepada Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran tergantung pada bobot pelanggarannya, yaitu pelanggaran kategori ringan, sedang dan berat. Jenis peringatan yang

diberikan adalah peringatan lisan, surat peringatan (I, II dan III) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelaksanaan PHK dilakukan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

9. Sanksi pelanggaran yang dapat dikenakan kepada Karyawan adalah sebagai berikut:
10. Potongan merit pada komponen gaji.
11. Potongan insentif.
12. Penundaan penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan grade, penurunan grade, demosi.
13. Skorsing (pemberhentian sementara).
14. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
15. Jika pelanggaran dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau organ pendukung Dewan Komisaris dan telah terbukti, sanksinya tergantung pada bobot pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan. Keputusan pengenaan sanksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

DASAR PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU DI BIO FARMA

Penegakan Pedoman Perilaku diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan (Bio Farma) dengan Serikat Pekerja Karyawan Bio Farma Bab XVII: Disiplin dan Tata Tertib Kerja, Pasal 69 s.d. 81. Sedangkan untuk Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Bio Farma yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui SK Nomor: AHU-61576.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK BESERTA SANKSI YANG DIBERIKAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sampai dengan 31 Desember 2016 di Bio Farma tidak terdapat pelanggaran kode etik sehingga tidak disajikan jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun 2016.



BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan Perusahaan.

PEDOMAN TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, Direksi BUMN dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diatur di dalam SK Direksi Nomor : 07882/DIR/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015, dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi Insan Bio Farma memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan, sebagai pedoman dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan, dan mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Terkait ketentuan tersebut, seluruh anggota Direksi Bio Farma telah menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang dibuat tanggal 26 April 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di PT Bio Farma (Persero), maka dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa penerapan sanksi untuk dilarang menjadi

pengurus perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengangkatan.
3. Bersedia untuk tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturankepentingan;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness di dalam pengelolaan perusahaan.
5. Tidak memiliki keterkaitan dalam kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham perusahaan sejenis.
6. Tidak akan melakukan transaksi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak lain yang terkait dengan jabatan saya di Biofarma dimana saya atau keluarga saya mempunyai kepentingan atau memperoleh manfaat karenanya.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah.
8. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke-3 (ketiga) baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Anggota Direksi lainnya atau dengan Dewan Komisaris.
9. Akan dengan sepenuh hati menghindari benturan kepentingan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan operasional di Perusahaan.

KODE ETIK

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan yang Saya buat, Saya bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016, belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa terkait benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Dewan Komisaris, Direksi, insan Bio Farma dan Pemegang Saham dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain
3. Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
4. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
5. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/ tidak langsung, sejenis/tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk jabatan lainnya, yang ada hubungannya dengan aktivitas bisnis Perusahaan;
5. Situasi dimana Insan Bio Farma memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengawasi atau yang diawasi;
7. Situasi dimana melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Insan Bio Farma yang bersangkutan;
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang;
9. Situasi dimana memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
10. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (moonlight/ outside employment).

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

Kebijakan dari Insan Bio Farma yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi.

BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
2. Pengangkatan Insan Bio Farma berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Bio Farma lainnya atau pihak lainnya yang melanggar prosedur.



3. Pemilihan Mitra Bisnis oleh Insan Bio Farma berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
4. Menggunakan aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
5. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN DI BIO FARMA

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas dari wewenang yang dimilikinya;
2. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Bio Farma dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
3. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
4. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Bio Farma yang disebabkan karena aturan, Pedoman, Prosedur baku atau uraian pekerjaan (Job descriptions) yang tidak jelas;
5. Kepentingan pribadi (Vested interest) yaitu keinginan atau kebutuhan Insan Bio Farma mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Prinsip Dasar

6. Insan Bio Farma harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
7. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui dan tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

8. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Bio Farma dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
9. Insan Bio Farma yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.
10. Pimpinan unit kerja dan atas langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bio Farma wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Bio Farma yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran I *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Bio Farma atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* di Perusahaan. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 2 di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

KODE ETIK

Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan Keteladanan Manajemen wajib mempergunakan kewenangannya secara wajar, baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Insan Bio Farma, kepentingan masyarakat dan berbagai faktor lain.
2. Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan Bio Farma Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan Bio Farma. Para Insan Bio Farma harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan. Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan Bio Farma, dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman Insan Bio Farma akan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. Memberi bantuan konsultasi bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
3. Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:
 - a. Hubungan afiliasi;
 - b. Gratifikasi;
 - c. Pekerjaan tambahan;
 - d. Informasi orang dalam;
 - e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
 - f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - g. Kedudukan di organisasi-organisasi lain di mana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium;
 - h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - i. Perangkapan jabatan.
4. Langkah – langkah Preventif Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.

Terhadap situasi Benturan Kepentingan, maka setiap Insan Bio Farma dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Secara Profesional akan menghindari situasi Benturan Kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain;
2. Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan;
3. Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
4. Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan;
5. Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;
6. Tidak memanfaatkan dan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau yang dapat menghambat perkembangan Perusahaan;
7. Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan;
8. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
9. Mematuhi Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Insan Bio Farma agar selalu mengikuti prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan memproteksi diri dari tindakan Benturan Kepentingan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH DAN DONASI

Pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
3. Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan
4. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta insan Bio Farma diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

BUDAYA PERUSAHAAN

Pernyataan Mengenai Budaya Perusahaan (Corporate Culture)

Bio Farma dalam mengembangkan kegiatan usaha membutuhkan budaya perusahaan dalam bentuk pedoman tertulis, yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

PEDOMAN BUDAYA PERUSAHAAN

Pedoman yang memuat tentang Nilai-nilai Perusahaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor : 01024/DIR/II/2013 Tentang

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero). Budaya Perusahaan (*corporate culture*) telah dirumuskan dengan icon "PITIC " dengan uraian sebagai berikut:

Setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen.

P → Profesional

Berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, efisien, efektif berorientasi ke depan, dan taat prosedur.

I → Integritas

Jujur, transparan dan dapat dipercaya sesuai dengan tujuan Perusahaan.

T → Teamwork

Bekerjasama dengan menghargai peran dan pendapat orang lain.

I → Innovation

Melakukan perbaikan dan pengembangan secara terus menerus untuk menghasilkan gagasan baru.

C → Customer Oriented

Memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat kepada *customer*.

Dalam upaya meningkatkan budaya kerja di Perusahaan, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan survei kepuasan karyawan PT Bio Farma. Output yang diharapkan dari survei kepuasan karyawan Bio Farma ini adalah:

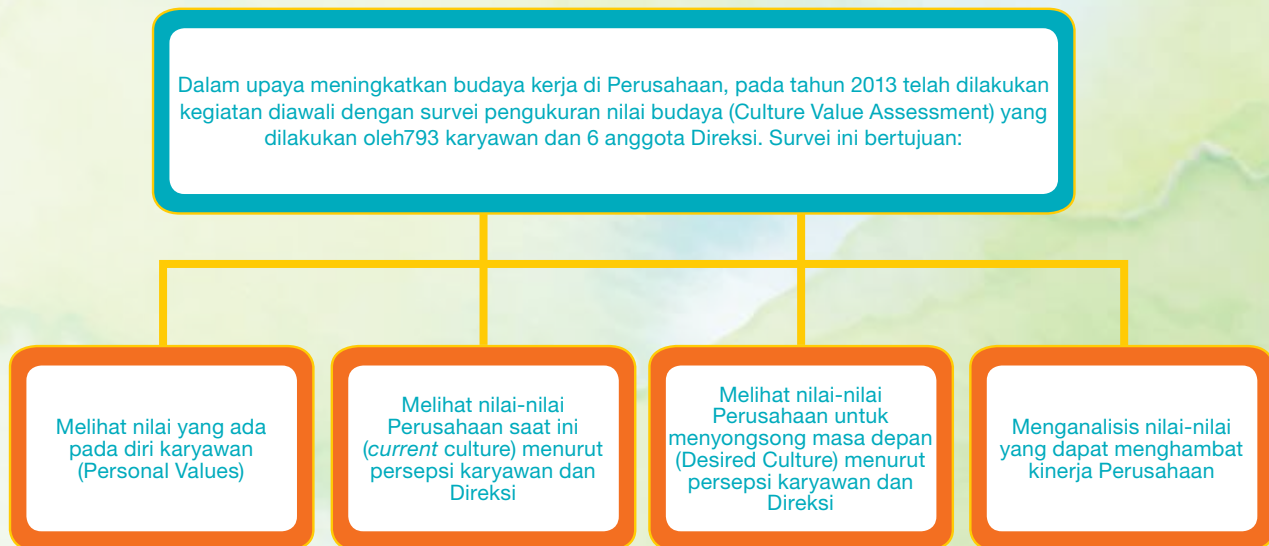
1. Data mengenai kebutuhan karyawan Bio Farma terhadap organisasi Bio Farma.
2. Data mengenai kelemahan-kelemahan organisasi berdasar penilaian karyawan.
3. Rekomendasi kebijakan organisasi terkait dengan kebutuhan karyawan dan kelemahan organisasi yang ditemui *sumen*, dan *stakeholder*.

KODE ETIK

Pasca pengukuran nilai budaya (Culture Value Assessment) akan dirancang program internalisasi nilai-nilai perusahaan secara sistematis dan komprehensif dengan berlandaskan kepada nilai-nilai yang muncul dari internal Perusahaan. Dengan proses tersebut diharapkan nilai-nilai yang dibangun, mampu melekat kuat pada setiap pribadi karyawan dan menjadi budaya yang positif untuk tumbuh-kembangnya Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN

1. Organ Perusahaan dan insan Bio Farma melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan
2. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi dan insan Bio Farma melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan
3. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.



KERAHASIAAN INFORMASI

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham serta Insan Bio Farma harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Pemegang Saham serta Insan Bio Farma dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham
3. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Insan Bio Farma, serta Pemegang Saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM - WBS) MERUPAKAN SISTEM YANG MENGELOLA PENGADUAN/ PENYINGKAPAN MENGENAI PERILAKU MELAWAN HUKUM, PERBUATAN TIDAK ETIS/TIDAK SEMESTINYA SECARA RAHASIA, ANONIM, DAN MANDIRI

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan, yang dilakukan oleh insan Bio Farma atau Pimpinan Bio Farma kepada Pimpinan Bio Farma atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (*confidential*), iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System – WBS*) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Bio Farma dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

YANG TERMASUK DALAM AKTIVITAS PELANGGARAN

1. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, perusakan barang.
2. Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.
3. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum
4. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.

5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial
6. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja

Pada dasarnya Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari Perusahaan (pihak internal), tetapi tidak menutup kemungkinan pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Sistem ini dilaksanakan berlandaskan pada nilai budaya perusahaan yang menyatakan bahwa setiap organ Perusahaan yang bersikap dan berpikir secara profesional, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam suatu tim, penuh inovasi dan berorientasi terhadap pelayanan konsumen. Dengan demikian, *Whistle Blowing System* ini merupakan bukti nyata dilaksanakannya nilai-nilai budaya perusahaan tersebut.

Nilai tambah yang dicapai oleh perusahaan melalui penerapan program ini adalah adanya sistem pengawasan dan pengendalian internal Perusahaan yang dapat mendeteksi kejadian risiko operasional khususnya kejadian kecurangan (*fraud*) secara dini dan memungkinkan Perusahaan untuk dapat mengatasi kejadian risiko tersebut secara cepat.

PERBEDAAN ANTARA SAKSI DENGAN PELAPOR

Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.

Pelapor adalah orang yang melaporkan adanya tindak pelanggaran, tetapi mungkin ia tidak melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.

MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

DASAR HUKUM PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

1. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 9 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e. dan telah diperbaharui dengan

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.

3. PP No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6.
4. UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 39 s/d 43.
5. PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf l dan pasal 158 ayat (1) huruf i.
7. Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Lembaran Negara RI Nomor 4297).
8. UU No.7 tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Section 33 UNCAC.
9. Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 1.
10. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
12. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.
13. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN.
15. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.



KEBIJAKAN PERUSAHAAN TENTANG PENERAPAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

1. Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).
2. PKB PT Bio Farma (Persero) dengan Serikat Pekerja Periode Tahun 2012-2014, tanggal 31 Mei 2012.
3. SK Bersama Dekom dan Direksi PT Bio Farma (Persero) No. KEP-04/DK/BF/II/2013 – No. 01023/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Penerapan GCG di PT Bio Farma (Persero).
4. Surat Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-05/DK/BF/II/2013, Nomor : 01024/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) PT Bio Farma (Persero) yang telah diperbaharui dengan SKB Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-07/DK/BF/III/2014, Nomor : 01103/DIR/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT Bio Farma (Persero).
5. Surat Keputusan Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di PT Bio Farma (Persero).

Tujuan Ditetapkannya Kebijakan

1. Sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran dari internal dan eksternal Perusahaan untuk menjamin mekanisme sistem pelaporan eksternal Perusahaan untuk menjamin mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) berjalan secara efektif.
2. Sebagai upaya dalam pengungkapan pelanggaran di Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika dan hukum.
3. Melalui sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) akan muncul persepsi apabila melakukan Kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya maka ada potensi untuk dapat terdeteksi dan dilaporkan sehingga mencegah melakukan pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.

5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum keselamatan kerja dan reputasi.

RUANG LINGKUP PENERAPAN PEDOMAN

Kebijakan ini berlaku bagi Insan Bio Farma dengan ketentuan pengaturan sebagai berikut:

1. Pelapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya.
2. Terlapor Pelanggaran adalah Insan Bio Farma yang diduga melakukan pelanggaran.

Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila pengaduan/penyimpangan dianggap tidak efektif bila disampaikan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

KRITERIA UMUM PELAPORAN PELANGGARAN

1. Pelapor dapat mengungkapkan identitas dengan jelas (nama, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi) ataupun anonim.
2. Pelaporan dilakukan melalui sarana pelaporan yang telah tersedia.
3. Isi laporan dugaan pelanggaran dapat berupa:
 - a. Jenis pelanggaran yang dilaporkan
 - b. Pelaku pelanggaran dan pihak yang terlibat
 - c. Lokasi kejadian pelanggaran
 - d. Waktu kejadian pelanggaran
 - e. Kronologis kejadian pelanggaran
 - f. Nilai kerugian/dampak pelanggaran
 - g. Bukti yang mendukung pelaporan

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) SECARA LANGSUNG

1. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran
2. Pembentukan Admin Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*)
3. Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing* System (WBS)
4. Pembentukan Tim Investigasi

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

5. Komunikasi dengan Pelapor
6. Pemantauan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan yang diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 sebagai berikut:

1. Mekanisme pengaduan pelanggaran pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu atasan langsung dan fungsi terkait yaitu Divisi SDM dan SPI. Akan tetapi, apabila Pelapor memandang sarana pengaduan tersebut tidak efektif atau ada keraguan, maka Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS).
2. Dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) adalah: korupsi, kecurangan, pencurian, menyuap dan atau menerima suap, gratifikasi, benturan kepentingan, melanggar hukum dan kebijakan/prosedur Perusahaan. Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertnetu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
3. Pelaporan pelanggaran adalah Karyawan (Pihak Internal) akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat).
4. Pelapor pelanggaran dapat bertindak menjadi Saksi apabila ia melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan Terlapor.
5. Pelapor dalam menyampaikan laporan pelanggaran (*Whistleblowing*) dapat mencantumkan identitas (nama, alamat rumah/kantor, alamat e-mail, faksimili, nomor kontak yang dapat dihubungi), atau dapat juga tanpa mencantumkan data diri (anonim).
6. Laporan harus disertai dengan bukti pendukung mengenai pelanggaran yang disampaikannya, meliputi:
 - a. Pokok masalah yang diadukan;
 - b. Pihak-pihak yang terlibat. yaitu siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran yang diadukan termasuk pihak-pihak yang dirugikan/diuntungkan dari kasus yang terjadi;

- c. Waktu dan lokasi kejadian yaitu kapan kasus pelanggaran terjadi dan di unit atau fungsi mana di perusahaan kasus pelanggaran yang diadukan terjadi;
- c. Kronologis kasus;
- d. Dokumen pendukung atas kasus yang diadukan.

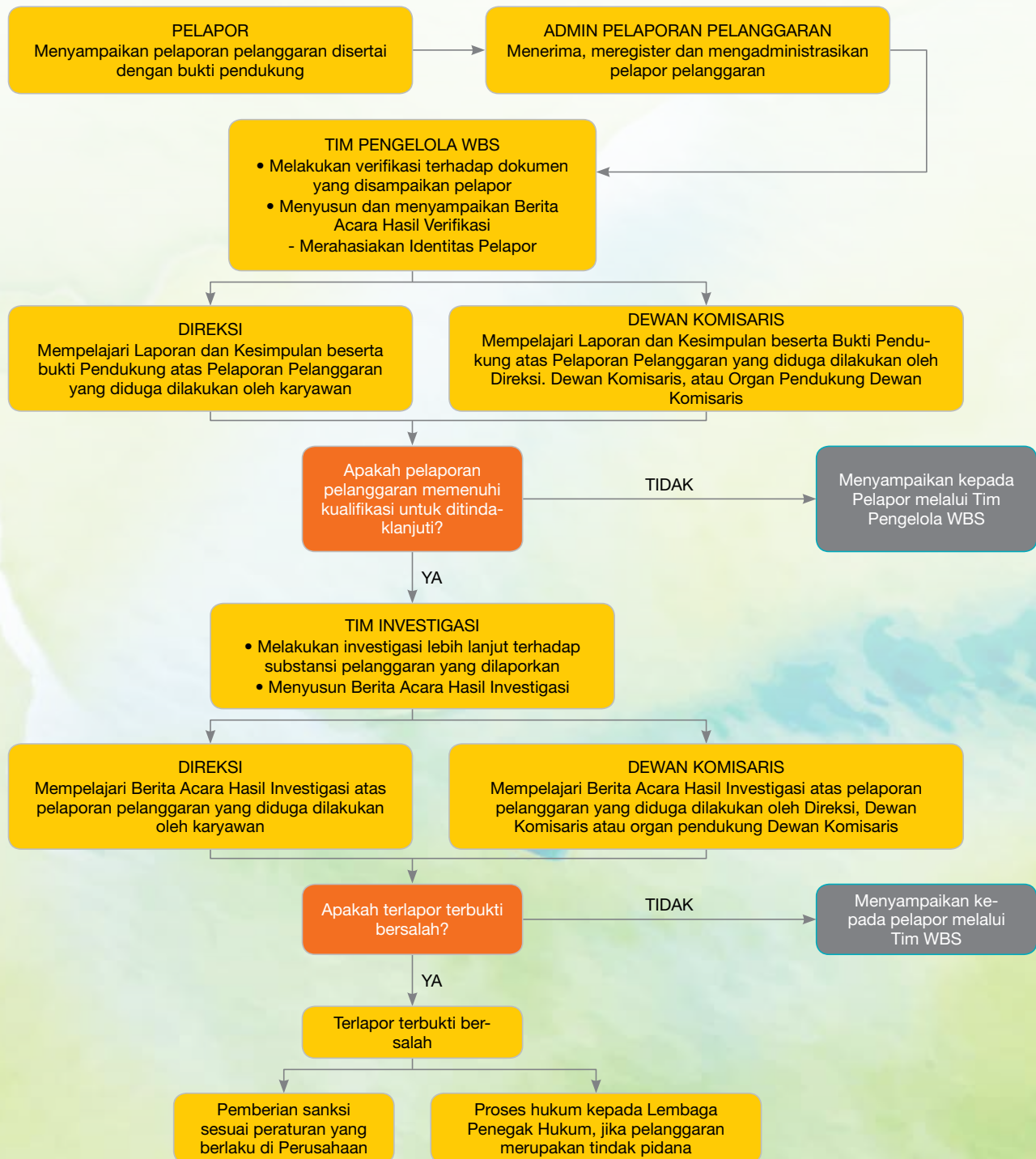
7. Petugas Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) menerima, meregister, dan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang masuk baik melalui e-mail, surat maupun drop box untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi sebagai Tim Pengelola WBS yang diduga dilakukan oleh karyawan atau kepada Dewan Komisaris sebagai Tim Pengelola WBS yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris. Jika Pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola WBS, maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada Direktur Utama untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau kepada Komisaris Utama untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) BERBASIS WEBSITE

Di tahun 2015, Bio Farma mulai membangun sistem pelaporan pelanggaran berbasis Website dengan nama Aplikasi WBS (*Whistleblowing System*).

Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya Bio Farma untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan.

Pelapor dapat melaporkan secara online melalui sistem berbasis web dengan alamat <http://aplikasi.biofarma.co.id/gcg>. Mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) sbb:



PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER)

Dalam penerapan WBS, Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (Whistleblowing) sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan kerahasiaan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di Bio Farma dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.
 2. Semua laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Bila pelapor menyertakan identitasnya secara jelas ia juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini sebagai bukti komitmen Perusahaan dalam melindungi pelapor.
 3. Bagaimana seorang pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya dari terlapor
 4. Perlindungan dari pemecatan, penurunan jabatan atau grade, penundaan kenaikan grade atau berkala, tekanan, tindakan fisik
 5. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya
- d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; dan/atau
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Bila dirasakan perlu, pelapor dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai UU No.13 tahun 2006. Lampiran 1 Pedoman ini memuat panduan berupa checklist hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan perlindungan pelapor.

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal Perusahaan.

PENANGANAN PENGADUAN

Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran diatur dalam SK Direksi Nomor: 01026/DIR/II/2013 tanggal 22 Februari 2013.

PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

1. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditujukan kepada Direksi yang disampaikan melalui :
 - a. Email ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
 - b. Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat:
 - Direksi PT Bio Farma (Persero)
 - Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
 - Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
 - c. Drop Box di kantor Perusahaan
1. Pasal 43 UU No.15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
 2. Pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang. Perlindungan Saksi dan Korban.
 3. Pasal 5 PP No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata.
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.
 - c. Perlindungan terhadap harta Pelapor.

Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beriktikad baik, Perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada



2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditujukan kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui :
 - a. Email ke : pelaporan.wbs@biofarma.co.id
 - b. Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris dengan cara diantar langsung atau melalui pos dengan alamat :
 - Dewan Komisaris PT Bio Farma (Persero)
 - Up : Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
 - Jalan Pasteur No. 28 Bandung 40161
 - c. Drop Box di kantor Perusahaan
3. Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang ditunjuk oleh Perusahaan akan menerima, meregistrasi dan meneruskan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) sesuai dengan jalur yang ditentukan. Apabila penerima Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di luar jalur yang ditentukan maka berkewajiban untuk meneruskan sesuai dengan jalur pelaporan yang ditetapkan. Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) bertanggung jawab atas kerahasiaan identitas Pelapor. Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
4. Direksi atau Dewan Komisaris akan mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) beserta bukti pendukung untuk kemudian menetapkan apakah Pengaduan Pelanggaran perlu untuk ditindak lanjut ke tahap Investigasi atau tidak perlu (ditutup).
5. Pelaksanaan verifikasi oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) terhadap Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang masuk dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
6. Dalam hal Direksi/Dewan Komisaris memutuskan bahwa Pelaporan Pelanggaran tidak cukup bukti sehingga proses pemeriksaan pelaporan dihentikan, maka keputusan tersebut akan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS). Selanjutnya Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) akan menginformasikan keputusan tersebut kepada Pelapor.
7. Dalam hal Direksi/Dewan Komisaris memutuskan bahwa Pelaporan Pelanggaran cukup bukti untuk ditindaklanjuti kepada tahap investigasi, maka Berita Acara Hasil Verifikasi beserta dokumen-dokumen pendukung akan disampaikan kepada Tim Investigasi.

PROSES PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) menerima pelaporan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pelapor.
2. Menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi yang didalamnya antara lain memuat resume dan rekomendasi kepada Direktur Utama/ Dewan Komisaris (sesuai jalur pelaporan) apakah pelaporan yang disampaikan oleh Pelapor cukup bukti untuk ditindaklanjuti kepada tahap berikutnya atau tidak.
3. Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Direktur Utama/Dewan Komisaris (sesuai jalur pelaporan) dan jika diperlukan melakukan presentasi kepada Direktur Utama/Dewan Komisaris.

TINDAKAN LANJUTAN PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Tim Investigasi

- a. Tim Investigasi menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*.
- b. Tim investigasi kemudian akan melakukan investigasi. Pelaksanaan Investigasi oleh Tim Investigasi terhadap Pelaporan Pelanggaran yang diterima dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya.
- c. Membuat Berita Acara Hasil Investigasi dan melaporkan kepada Direktur Utama (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Dewan Komisaris (untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pendukung Dewan Komisaris) jika diperlukan Tim Investigasi dapat mempresentasikan hasil kerjanya kepada Direksi/Dewan Komisaris.

- d. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

2. Direksi

- a. Direksi menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* atas dugaan pelanggaran.
- b. Direksi menugaskan tim investigasi untuk melakukan investigasi.
- c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Investigasi, Direksi akan mempelajari dan memutuskan.
- d. Keputusan atas hasil investigasi akan disampaikan oleh Direksi kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* sesuai dengan jalur pelaporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Terlapor.
- e. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

3. Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris menerima laporan dari Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris
- b. Selanjutnya Dewan Komisaris akan melakukan investigasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Sistem Pedoman Dugaan Pelanggaran.
- c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Investigasi, Dewan Komisaris akan mempelajari dan memutuskan.
- d. Keputusan atas hasil investigasi akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* sesuai dengan jalur pelaporan untuk selanjutnya disampaikan kepada Terlapor.
- e. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

Komunikasi Dengan Pelapor

1. Komunikasi dengan Pelapor akan dilakukan melalui Tim Pengelola *Whistleblowing System*. Dalam komunikasi ini, Pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak
2. Bila pelapor adalah karyawan Perusahaan maka Perusahaan memberikan informasi perkembangan penanganan hasil Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) tersebut. Pemberian informasi ini dilakukan dengan mengingat azas kerahasiaan antara pelapor dengan Perusahaan. Pembocoran sifat kerahasiaan ini oleh Pelapor akan menghapuskan kewajiban Perusahaan atas jaminan kerahasiaan yang diberikan kepadanya dan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan kepada Pelapor.
3. Dalam hal Pelapor orang luar dan bukan Karyawan Perusahaan, kebijakan komunikasi dengan Pelapor ini dapat diberikan kepadanya. Hal ini berlaku bila ia bersedia menandatangani kesepakatan tertulis tentang kerahasiaan informasi baik yang ia terima dari Perusahaan, maupun yang disampaikan kepada Perusahaan.

HASIL PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Atas rekomendasi oleh Tim Investigasi, Direksi mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, Apabila hasil investigasi terbukti bersalah maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum. Apabila hasil investigasi tidak terbukti adanya pelanggaran oleh Terlapor maka dinyatakan tidak bersalah.
2. Atas rekomendasi oleh Dewan Komisaris, apabila menyangkut Direksi, Komisaris menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila menyangkut Komisaris, Pemegang Saham menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.



3. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan akan ditutup dan dituangkan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Selesai.

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pemanfaatan penanganan Pelaporan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS).
2. Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* membuat laporan secara berkala kepada Direksi/ Dewan Komisaris sesuai dengan jalur pelaporan mengenai Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang masuk, yang diinvestigasi dan yang telah selesai diproses.
3. Direksi melaporkan secara berkala perkembangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada Dewan Komisaris.
4. Ringkasan perkembangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dilaporkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Pelaporan Dugaan

Pelanggaran secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan sistem ini dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perseroan maupun peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan sendiri oleh Direksi melalui Satuan Pengawasan Intern atau menggunakan pihak luar yang independen. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi perbaikan. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

Perusahaan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) kepada seluruh Insan Bio Farma untuk memberikan pemahaman atas kebijakan Pelaporan Pelanggaran (WBS). Sosialisasi dilakukan juga kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya melalui situs (*website*) Perusahaan.



Whistleblowing System (WBS), memungkinkan setiap karyawan Bio Farma dan para pemangku kepentingan lainnya, dapat menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (*fraud*) dan bentuk pelanggaran etika lainnya dilakukan oleh karyawan Bio Farma.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Pihak yang mengelola pengaduan / Pelaporan Dugaan Pelanggaran diatur dalam SK Direksi Nomor: 01729/DIR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperbaharui dengan SK No. : KEP-16/DK/BF/X/2014, No. : 05021/DIR/X/2014 tentang Penunjukan Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*).

PEMBENTUKAN ADMIN PELAPORAN PELANGGARAN

1. Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang diduga dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.
2. Susunan dan tugas Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) menerima, meregister dan mengadministrasikan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang masuk baik melalui email, surat maupun drop box untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi sebagai Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang diduga dilakukan oleh Karyawan atau kepada Dewan Komisaris sebagai Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris.
4. Dalam hal Pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh Tim *Whistleblowing System* (WBS) maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada Direksi Utama Perusahaan (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan) atau kepada Komisaris Utama (untuk dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris).
5. Admin Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) kerahasiaan identitas Pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan Pelapor.

Struktur Pengelolaan

1. Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang diduga dilakukan oleh Karyawan
 - a. Direksi membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan level pelaku pelanggaran, dengan susunan sebagai berikut:

Terduga Pelaku Pelanggaran	Tim Pengelola WBS
Karyawan yang bertugas sebagai Tim Pengelola WBS	Koordinator : Direktur Utama Anggota: Direksi
Karyawan selain tim Pengelola WBS	Koordinator : Kepala SPI Anggota : Pejabat di SPI, Divisi <i>Compliance & Risk Management</i> dan Divisi SDM

- b. Susunan dan tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang diduga dilakukan oleh Karyawan ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor : 1390/DIR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang telah diperbaharui dengan SK No. : 04043/DIR/IX/2014 tanggal 4 September 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* Untuk Pengaduan Pelanggaran Yang Diduga Oleh Karyawan.
2. Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - c. Dewan Komisaris membentuk Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) dimana Komisaris Utama sebagai Koordinator yang beranggotakan Dewan Komisaris lainnya dan dari Komite Audit sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
 - d. Susunan dan tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris.

- e. Apabila Terlapor atau pihak terlibat dengan pelanggaran yang dilaporkan adalah salah seorang Dewan Komisaris atau Organ Pendukung Dewan Komisaris maka yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam proses tindak lanjut pelaporan pelanggaran.

TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Tim melakukan pengelolaan atas laporan pelanggaran dan melakukan perlindungan terhadap pelapor. Tim ini menerima pelaporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh tim investigasi tanpa membuka identitas pelapor. Tim ini bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan pengelolaan laporan dan perlindungan pelapor, tim mendapatkan bantuan hukum, keuangan dan operasional bila diperlukan. Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 01390/DIR/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang telah diperbaharui dengan SK No. 04043/DIR/IX/2014 tanggal 04 September 2014 yang diketuai oleh Direktur Utama.

TUGAS TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

1. Menerima laporan atas adanya dugaan pelanggaran dari pelapor.
2. Menjaga kerahasiaan pelapor dan menyimpan identitas pelapor pada tempat yang aman.
3. Memverifikasi laporan atas dugaan pelanggaran yang masuk, dengan cara memastikan bahwa laporan tersebut telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan kategori yang ditetapkan.
4. Membuat berita acara hasil verifikasi laporan dugaan pelanggaran dan rekomendasi tindak lanjut.
5. Memfasilitasi perlindungan kepada pelapor.
6. Membuat laporan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi, yang meliputi jumlah pengaduan, kategori pengaduan, status pelaporan dugaan pelanggaran serta media yang digunakan oleh pelapor.

Tim Investigasi

Tim investigasi bertugas mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk memastikan bahwa memang telah terjadinya pelanggaran. Jika sudah terdapat bukti-bukti yang mencukupi, maka Tim Investigasi membuat rekomendasi kepada Direktur Utama untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Tetapi bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, maka proses investigasi dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan. Untuk keperluan investigasi tim mendapatkan bantuan hukum, keuangan dan operasional terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

TUGAS TIM INVESTIGASI

1. Melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran.
2. Memastikan terjadinya tindakan pelanggaran dengan bukti-bukti yang mencukupi.
3. Menentukan nilai kerugian/dampak atas tindakan pelanggaran.
4. Berkoordinasi dengan investigator eksternal, penegak hukum dan/atau instansi lainnya, bila diperlukan dengan persetujuan Direksi.
5. Membuat Laporan Hasil Investigasi yang di dalamnya memuat rekomendasi dan/atau sanksi atas tindakan pelanggaran kepada Direksi.
6. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Tim yang menangani pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris.

TUGAS DEWAN KOMISARIS

1. Menerima Laporan dari Tim Pengelolaan Laporan dan Perlindungan Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris.
2. Memastikan terjadinya tindakan pelanggaran oleh Direksi/Komisaris dengan bukti-bukti cukup.
3. Menentukan nilai kerugian/dampak atas tindakan pelanggaran Direksi/Komisaris.

PENGUNGKAPAN MENGENAI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

4. Berkoordinasi dengan investigator eksternal, penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
5. Membuat Laporan Hasil Investigasi yang di dalamnya memuat rekomendasi dan dilaporkan kepada Komisaris Utama atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan kepada Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Komisaris.
6. Mendokumentasikan seluruh proses investigasi terkait bukti pendukung, kertas kerja, berita acara maupun dokumen lainnya.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Perusahaan maupun Insan Bio Farma sehingga tidak disajikannya jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun 2016.

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN 2016

Pada tahun 2016 Tim Pengelola WBS tidak menerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Organ Perusahaan maupun Insan Bio Farma dengan demikian tidak disajikannya sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah diproses pada tahun 2016.

Sebagai perwujudan terciptanya penyelenggaraan *Good Corporate Governance* yang efektif dan baik maka sosialisasi dan penegakan penerapan terhadap Whistle Blowing System akan selalu terus ditingkatkan dan akan dilaksanakan secara berkala penyempurnaan sistem dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.



Penerapan WBS yang sudah dimulai sejak tahun 2013, menjadi langkah positif bagi Bio Farma untuk tetap menjalankan bisnisnya secara baik dan benar, sehingga diharapkan tidak ada tindakan melawan hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh Direksi.



KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

URAIAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM PENDIDIKAN (BIDANG STUDI), PENGALAMAN, USIA

PEDOMAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pedoman Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sebagai berikut:

Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris BUMN

KEBIJAKAN PERUSAHAAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Bio Farma mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu kepada sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero)
2. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bio Farma (Persero) Nomor: KEP-06/DK/BF/II/2013, Nomor: 01025/DIR/II/2013 Tentang Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT Bio Farma (Persero).

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan daya saing Perusahaan untuk menghadapi persaingan dunia usaha yang kompetitif terutama di era global seperti saat ini, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal untuk menempati posisi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang harus memenuhi persyaratan Materiil sebagai berikut:

1. Integritas
2. Dedikasi
3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
4. Manajemen
5. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero dimana yang bersangkutan dicalonkan
6. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bio Farma memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki keberagaman usia, pendidikan (Bidang Studi), pengalaman kerja.

Pada tahun 2016, keberagaman komposisi Dewan Komisaris Bio Farma sebagai berikut:

Nama	Ahmad M. Ramli
Jabatan	Komisaris Utama
Masa Jabatan	12 April 2013 & 23 Januari – 11 April 2018
Usia	55 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung (1985). 2. Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Studi Hukum Internasional (1992) 3. Doktor dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum Internasional Unpad (1999).
Pengalaman Kerja	1. Asisten Dosen di Fakultas Hukum Unpad (1986) 2. Anggota Tim Penyusun RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan anggota Tim Penelaahan Perundang-undangan (Tim Reformasi Hukum) Departemen Kehakiman RI (1998-1999), 3. Dosen Pascasarjana di Universitas Padjajaran (1995-sekarang) 4. Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Teknologi Sistem Informasi ITB (1998) 5. Pembantu Dekan II (1999-2001) 6. Pembantu Dekan I (2001-2004) 7. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2002-sekarang) 8. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI (2004-2007) 9. Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 2004 – sekarang 10. Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi – BRTI (2005-2007). 11. Ketua Tim Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika – Departemen Hukum dan HAM (2006) 12. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum & HAM (2007-2010) 13. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI (2010) 14. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (2010 – 2015) 15. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemkumham (2015 – 2016) 16. Bulan Oktober 2016 dilantik sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo
Keahlian / Sertifikasi	Pakar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan <i>cyber law</i> (hukum siber) Pemegang Certificate on Industrial Property Rights, Japan Institute of Invention and Innovation
Nama	Paruli Lubis
Jabatan	Komisaris
Masa Jabatan	5 November 2012 – 4 November 2017
Usia	63 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. S1, Insitutut Ilmu Keuangan Jakarta (1980) 2. S2, Program Master of Business Administration di Washington University – Saint Louis, Amerika Serikat (1986).
Pengalaman Kerja	1. Kementerian Keuangan RI 2. Kepala Kantor Wilayah X X VII Direktorat Jenderal Anggaran di Manado (2002), 3. Direktur Pelaksanaan Anggaran (2004) 4. Direktur Sistem Perbendaharaan (2008) 5. Direktur Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2009).
Keahlian / Sertifikasi	Bidang Keuangan & Anggaran



Nama	Nizar Yamani
Jabatan	Komisaris
Masa Jabatan	28 Mei 2012 & 4 Februari 2013 – 27 Mei 2017
Usia	64 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. S1, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya 2. Dokter Spesialis Saraf di Universitas Indonesia (1994) 3. Pendidikan Spesialis Saraf Konsultan di Universitas Indonesia (2003) 4. Pernah kuliah di Oxford University-Inggris (1991-1992).
Pengalaman Kerja	1. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, 2. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta, 3. Masih aktif bertugas di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya. 4. Anggota tim penasihat pada Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia (PERPEI) 5. Anggota Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk. (2010-2012) 6. Anggota Dewan Komisaris PT Surveyor Carbon Consulting (2011-2015) 7. Anggota Komisaris Rumah Sakit Sanglah Bali (2011-2016)
Keahlian / Sertifikasi	Bidang Kedokteran/Specialis Syaraf

Nama	Ihsan Setiadi Latief
Jabatan	Komisaris
Masa Jabatan	1 Mei 2013 – 30 April 2010
Usia	44 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. S1, Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 1996. 2. S2, Magister Program Studi Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran tahun 2004. 3. S3, Program Pascasarjana S3 Unpad Buku Kajian Utama Ilmu Komunikasi
Pengalaman Kerja	1. Aktif berorganisasi di ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Perhimpunan Masyarakat Madani, Komunitas Konsultasi Komunikasi (Konklusi) dan Persatuan Islam. 2. Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAI Persis) 3. Ketua III Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam (STKIP Persis) dari (1998-2002) 4. Ketua STKIP Persis sampai sekarang 5. Dosen luar biasa Komunikasi dan Konseling di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani (Stikes Unjani) Bandung 6. Dosen luar biasa Komunikasi dan Negoisasi di Universitas Al- Azhar Indonesia Jakarta dan Universitas Bung Karno. 7. Mendirikan Yayasan Cita Insani Mandiri yang bergerak dalam dakwah, sosial dan kemasyarakatan.
Keahlian / Sertifikasi	Bidang Ilmu Komonikasi

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Heridadi
Jabatan	Komisaris
Masa Jabatan	23 Januari 2014 – 22 Januari 2019
Usia	64 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Pendidikan	1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1997) 2. Sekolah Perwira Wajib Militer ABRI 3. S-2 Perencanaan dan Manajemen Kesehatan - Fakultas Pascasarjana UI 1985-1987 4. Pendidikan Seskoad (1992) 5. Pendidikan Lemhannas (2007) 6. Program S-3 di Fakultas Kedokteran UGM Di Bidang Biodefense (2013)
Pengalaman Kerja	1. Perwira TNI AD di Kesda II/Sriwijaya dengan pangkat Letnan Satu CKM sebagai Dokter Pusat Latihan Tempur (Puslatpur). 2. Dokter di Direktorat Kesehatan TNI AD - Kesda II/Sriwijaya 3. Wakil Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad tahun 1990 4. Komandan Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri 1 Kostrad. (1994-1995) 5. Komandan Kontingen Garuda XIV/A untuk tugas PBB di Bosnia Herzegovina 6. Kepala Kesehatan Kostrad 7. Kepala Kesehatan Kodam Jaya 8. Komandan Pusat Pendidikan Kesehatan TNI AD 9. Direktur Kesehatan TNI AD (2004-2008). 10. Kepala Pusat Kesehatan TNI (2008-2010). 11. Aktif sebagai Dosen S2 di Universitas Pertahanan 12. Aktif sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial PPAD Jakarta 13. Aktif sebagai Ketua Umum Purna Warga Kesehatan TNI AD 14. Aktif sebagai Ketua Ikatan Alumni FKUI 1977
Keahlian / Sertifikasi	Bidang Kesehatan



Nama	H.M. Subuh
Jabatan	Komisaris
Masa Jabatan	22 Juni 2015 – 21 Juni 2020
Usia	54 tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Pendidikan	1. S1, Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia Jakarta (1988) 2. S2, School of Public Administration, Qualification Master Public Policy (MPPM) di University of Southern California (1999)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Rumah Sakit Umum Sultan Syarief Mohamad Alkadrie Kalimantan Barat (2004-2009) 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (2009-2010) 3. Direktur Pengendalian Penyakit Menular (2010-2013) 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (2013-2014) 5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI (2014-2016) 6. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI
Keahlian / Sertifikasi	Bidang Kesehatan

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Perusahaan diperlukan adanya terobosan inisiatif dalam segala aspek, termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia.

Dalam menghadapi persaingan global dan menyiapkan pimpinan Perusahaan yang mampu memenangkan persaingan dibutuhkan sistem yang transparan berdasarkan asas profesionalitas, cepat dan efisien, untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia andal dan kompetitif untuk menempati posisi Direksi

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di

dalam maupun di luar pengadilan maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang harus memenuhi persyaratan Materiil sebagai berikut:

1. Keahlian
2. Integritas
3. Kepemimpinan
4. Pengalaman
5. Jujur
6. Perilaku yang baik
7. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan

Seluruh Anggota Direksi Bio Farma memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki keberagaman usia, pendidikan (Bidang Studi), pengalaman kerja.

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2016, keberagaman komposisi Direksi Bio Farma sebagai berikut:

Nama	Iskandar
Jabatan	Direktur Utama
Masa Jabatan	07 Juli 2012 & 12 April 2013 – 06 Juli 2017
Usia	61 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. Sarjana Farmasi (1980) dan Profesi Apoteker (1981) dari Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. 2. Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan diperoleh dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tahun 2004.
Pengalaman Kerja	1. Kepala Bagian Produksi Infus (1988), 2. Kepala Bagian Produksi Lain (1994), 3. Kepala Divisi Logistik (2002), 4. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan (2005), 5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan (2007). 6. Aktif di berbagai forum industri vaksin dunia, 7. Saat ini menjadi salah satu anggota Board of Trustees di International Vaccine Institute (IVI) Korea, sebagai Chairman program Self Reliance Vaccine Production – Islamic Development Bank (SRVP – IDB) 8. Anggota Dewan Riset Vaksin Nasional. 9. Direktur Utama Bio Farma sejak tanggal 17 September 2009 dan ditunjuk untuk masa jabatan kedua pada 12 April 2013.
Keahlian / Sertifikasi	

Nama	Juliman
Jabatan	Direktur Produksi
Masa Jabatan	12 April 2013 – 11 April 2018
Usia	54 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. Sarjana Farmasi (1988) dan Profesi Apoteker (1989) dari Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. 2. Magister Manajemen, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
Pengalaman Kerja	Meniti karir di Bio Farma hingga menempati berbagai posisi penting seperti Kepala Bagian Penunjang Vaksin Polio dan Campak (1994-1997), Kepala Bagian Produksi Vaksin Campak (1998-2001), Kepala Divisi Teknik dan Pemeliharaan Produksi (2002-2003), Kepala Divisi Pemasaran Ekspor (2003-2009) dan Kepala Divisi Logistik (2012-2013). Aktif sebagai trainer pada program Global Training Network (GTN)/Third Country Training Program (TCTP) dan mengikuti berbagai forum yang diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO) dan Global Alliance for Vaccine Immunisation (GAVI). Ditunjuk sebagai Direktur Produksi Bio Farma sejak tanggal 12 April 2013. Usia per 31 Desember 2015 adalah 53 tahun.
Keahlian / Sertifikasi	



Nama	Sugeng Raharso
Jabatan	Direktur Perencanaan & Pengembangan
Masa Jabatan	12 April 2013 – 11 April 2018
Usia	57 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. Sarjana Kedokteran Hewan (1983) dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (1984), Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. 2. Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Operasi dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung (2004)
Pengalaman Kerja	1. Mengikuti berbagai Program Workshop Mengenai Biosimilar dan Vaccine Technology di Finlai. 2. Kepala Bagian Pemeliharaan Hewan (1985-1989) 3. Staff Direksi Bio Farma (2002-2007) 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (2007-2010) 5. Kepala Divisi Hewan Laboratorium (2010-2012).
Keahlian / Sertifikasi	· Certified Professional Internal Auditor (CPIA) dari Center for Development of Accountancy and Finance – The Association of Internal Auditor

Nama	Mahendra Suhardono
Jabatan	Direktur Pemasaran
Masa Jabatan	07 Juli 2012 & 12 April 2013 – 06 Juli 2017
Usia	54 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	Sarjana Farmasi (1986) dan Profesi Apoteker (1988) dari Departemen Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Gelar Magister Manajemen diperoleh dari Program Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen Bandung (STMB)/Institut Manajemen Telkom Bandung tahun 2009
Pengalaman Kerja	1. Kepala Bagian Pengemasan (1994-1997), 2. Kepala Divisi <i>Quality Assurance</i> (2002-2007) 3. Direktur Produksi (2007-2012). 4. Aktif sebagai anggota Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI). 5. Salah satu key person Bio Farma untuk berperan aktif di berbagai kegiatan World Health Organization (WHO). 6. Presiden DCVMN (Developing Countries Vaccine Manufacturers Network) periode 2012-2014. 7. Presiden DCVMN (Developing Countries Vaccine Manufacturers Network) periode 2014-2016.
Keahlian / Sertifikasi	

KEBIJAKAN MENGENAI KEBERAGAMAN KOMPOSISI
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Nama	Pramusti Indrascaryo
Jabatan	Direktur Keuangan
Masa Jabatan	12 April 2013 – 11 April 2018
Usia	51 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. S1 di Universitas Diponegoro Semarang tahun 1989 2. Magister Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998
Pengalaman Kerja	1. Kepala Cabang Bank Ekspor Impor Indonesia sebelum penggabungan empat bank pemerintah menjadi Bank Mandiri pada tahun 1999. 2. Senior Manager pada Corporate Risk Management dan Corporate Banking (2003) di Bank Mandiri 3. Assistant Vice President di Bank Mandiri (2009) 4. Vice President di Bank Mandiri (2012).
Keahlian / Sertifikasi	· Ahli Manajemen Keuangan

Nama	Andjang Kusumah
Jabatan	Direktur SDM
Masa Jabatan	07 Maret 2012 – 06 Maret 2017
Usia	63 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pendidikan	1. Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1979) 2. Magister Manajemen dari Program Pasca Sarjana Manajemen Keuangan di Jakarta (2002).
Pengalaman Kerja	1. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur (2010-2012) 2. Asisten Deputi Urusan Usaha Telekomunikasi (2007-2010) 3. Komisaris PT Kawasan Berikat Nusantara (2001-2007) 4. Komisaris PT Dahana (2007-2011) 5. Komisaris PT Jakarta Llyod (2007-2011) 6. Komisaris PT Sucofindo (2010-2012).
Keahlian / Sertifikasi	

Sepanjang tahun 2016, komposisi anggota Dewan Komisaris Dirkesi Bio Farma sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
2015	6	6
2016	6	6

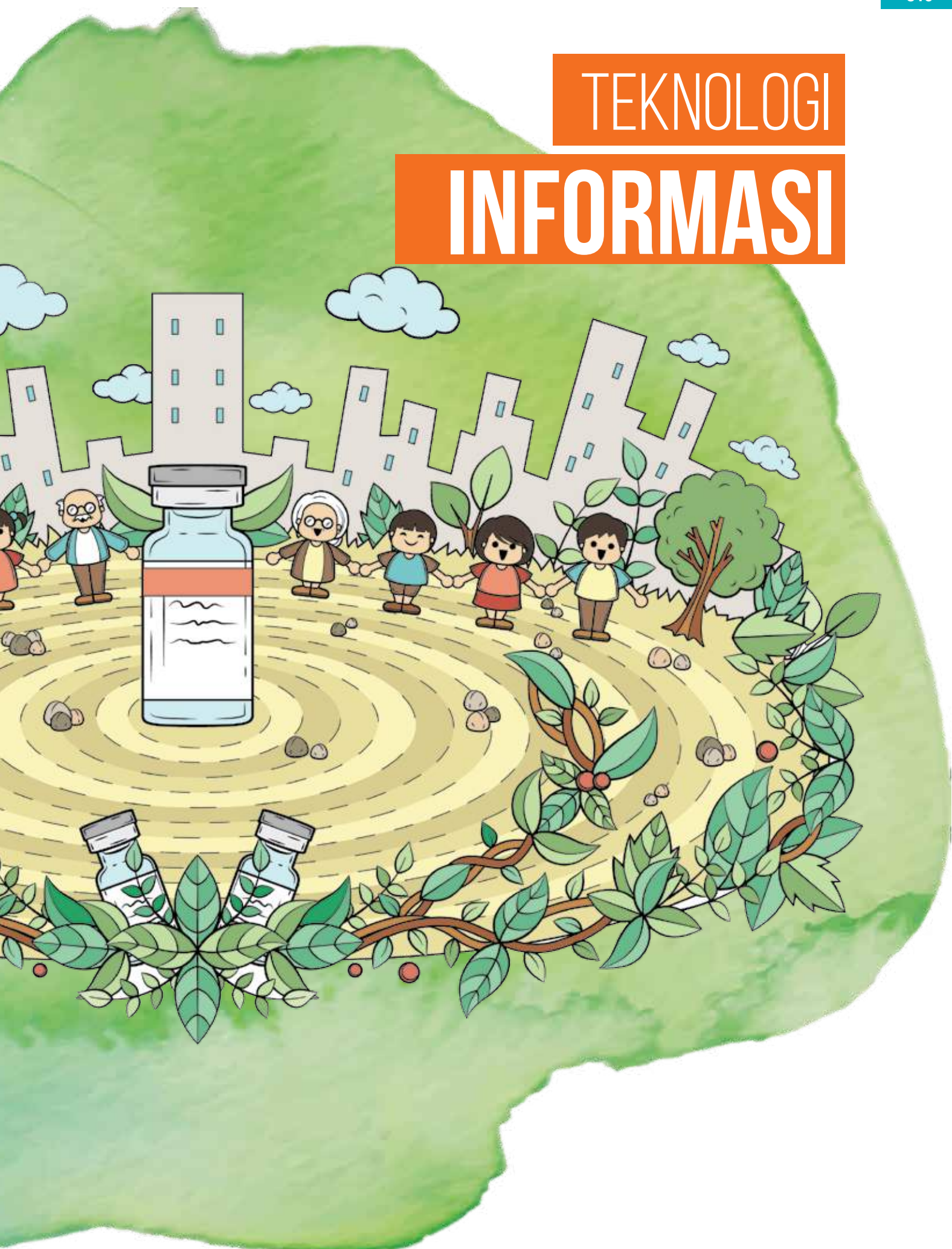
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa per tanggal 31 Desember 2016, jumlah dan komposisi Anggota Komisaris dan Direksi masing-masing sebanyak enam orang sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



ICT FOR CORPORATE SOLUTIONS

Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, sesuai dengan karakteristik bisnis Bio Farma dapat memberikan solusi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat dan efektif.

TEKNOLOGI INFORMASI





Tata kelola teknologi informasi merupakan tanggungjawab pihak manajemen didalam Perusahaan, sehingga Teknologi Informasi dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses bisnis yang dijalankan tersebut.

Tata Kelola Teknologi Informasi bertujuan untuk mengontrol penggunaannya dalam memastikan bahwa kinerja teknologi informasi memenuhi dan sesuai dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi Perusahaan serta realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari penerapan teknologi informasi
2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan pemanfaatan TI dalam memaksimalkan keuntungan dari penerapan TI tersebut.
3. Bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya TI.
4. Manajemen resiko-resiko yang ada terkait teknologi informasi secara tepat.

AREA FOKUS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kami fokus dalam proses pengelolaan teknologi Informasi, kami fokus pada lima area utama:

1. **Strategic Alignment** : mencapai visi dan misi dari Bio Farma yang selaras dengan tujuan bisnis Perusahaan.
2. **Value Delivery**: mengoptimalkan nilai tambah dari teknologi informasi dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.
3. **Resources Management**: sumber daya dan infrastruktur dapat mencukupi dalam penggunaannya yang optimal, berkaitan pada investasi yang optimal dari penggunaan TI yang ada. Melakukan manajemen yang sesuai, adapun sumber daya teknologi informasi yang kritis,

meliputi: aplikasi, informasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan hal-hal yang penting berkaitan dengan optimalisasi pengetahuan dan infrastruktur yang ada.

4. **Risk Management**: melakukan identifikasi kemungkinan resiko-resiko yang ada, serta bagaimana mengatasi dampak dari resiko-resiko tersebut.
5. **Performance Measurement**: mengukur serta mengawasi kinerja dari teknologi informasi dan menyesuaikan penggunaan dari TI sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

PEDOMAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pedoman teknologi Informasi di Bio Farma merujuk pada:

1. Anggaran Dasar Perusahaan
2. Peraturan Menteri BUMN NOMOR PER-02/1VIBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN Sebagaimana Diubah Terakhir Melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN

Kami telah menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi hingga tahun 2017 mencakup pengembangan perangkat dan aplikasi khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dan proses produksi.

INFORMASI TEKNOLOGI

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 05345/DIR/VIII/2006, Tanggal 7 Agustus 2006 Tentang Kebijakan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Bio Farma (Persero) Yang Telah Diperbaharui Dengan SK Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi Nomor: KEP-04/DK/BF/II/2013, 01023/DIR/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 Tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di PT Bio Farma (Persero).
2. Dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan tata kelola teknologi informasi Bio Farma adalah:
 1. Manual Bio Farma MBF2 sub bab tentang Kebijakan Teknologi Informasi.
 2. IT Master Plan Tahun 2013-2017.
 14. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak *Training Record*.
 15. Prosedur Baku Pengujian Perangkat Lunak
 16. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak *Physical Monitoring*.
 17. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak *Environment Monitoring*.
 18. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak Formulir Data.
 19. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak DEVCC-CAPA.
 20. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak Sistem Dokumentasi.
 21. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak *Raw Material*.
 22. Kualifikasi, Instalasi, Operasional, dan Performansi Aplikasi BioQA Online.



KAMI MENERAPKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (IT GOVERNANCE) SEBAGAI TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN AGAR TEKNOLOGI INFORMASI LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, DAN MENDUKUNG PROSES BISNIS YANG DIJALANKAN.

3. Pedoman *Backup dan Restore Data*.
4. Pedoman penanganan masalah komputer.
5. Pengembangan Perangkat Lunak.
6. Kualifikasi Infrastruktur IT
7. Prosedur Baku Pengelolaan Email.
8. Prosedur Baku *Backup dan Restore Data*.
9. Prosedur Baku Antivirus Komputer.
10. Prosedur Baku Penanganan Masalah Terkait IT.
11. Prosedur Baku Penggunaan Intranet Aplikasi Dokumen *Online* untuk *User*.
12. Prosedur Baku Penggunaan Intranet Aplikasi Dokumen *Online* untuk Administrator.
13. Prosedur Baku Penggunaan Perangkat Lunak *Batch Record*.
23. Kualifikasi Instalasi, *Operational* dan Performansi Aplikasi *Batch Record*.
24. Kualifikasi Desain (DQ) Aplikasi *Val-Cal Manager*.
25. Kualifikasi Desain Aplikasi *Batch Record*.
26. Kualifikasi Desain Aplikasi *Environment Monitoring*.
27. Kualifikasi Desain Perangkat Lunak *Training Record*.
28. Kualifikasi, Instalasi, Operasional dan Performansi *Val-Cal Manager*.
29. Prosedur *Business Continuing Plan*.



MASTER PLAN (ROADMAP) TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi sangat besar manfaatnya dalam pengembangan usaha Perusahaan, sehingga perlu dikembangkan secara terarah dan terukur di Bio Farma guna mendukung strategi bisnis Bio Farma sejalan dengan tujuan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh Perusahaan.

Agar Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi di Perusahaan harus berdasarkan pada suatu sistem tata kelola, termuat dalam sebuah master plan, dan dikembangkan secara bersinergi sesama BUMN.

Dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI Bio Farma menyusun *Master Plan (Roadmap)* Teknologi Informasi:

1. Master plan teknologi informasi disusun dan ditetapkan oleh Direksi
2. Master plan teknologi informasi disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan.
3. Master plan teknologi informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Direksi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan master plan teknologi informasi secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan master plan teknologi informasi.
5. Hasil monitoring dan evaluasi berkala menjadi bagian dari Laporan Manajemen Perusahaan yang disampaikan kepada RUPS setiap triwulan dan hasil evaluasi tahunan.
6. Direksi melakukan pengkajian ulang dan melakukan perubahan master plan teknologi informasi yang telah ditetapkan apabila diperlukan untuk mengantisipasi perubahan bisnis dan perkembangan teknologi informasi.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bio Farma terus mengembangkan sistem aplikasi bisnis yang terintegrasi untuk mendukung operasional antar unit kerja di lingkungan Bio Farma. Dengan merancang aplikasi TI yang efektif dan efisien, sistem teknologi informasi dapat menjadi salah satu penunjang keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan dan pengembangan bisnis ke depan.

Perusahaan telah menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi hingga tahun 2017 mencakup pengembangan perangkat dan aplikasi khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dan proses produksi.

Pada tahun 2015 sudah dikembangkan aplikasi baru yang terintegrasi meliputi kebutuhan Direktorat Pemasaran, Direktorat Produksi, Direktorat Sumber Daya Manusia, Bagian Gudang, dan *Quality Assurance*. Pengembangan aplikasi untuk direktorat pemasaran adalah berupa aplikasi CRM – *Customer Relationship Management*. Pengembangan aplikasi pada Direktorat Produksi, Gudang dan QA adalah aplikasi *Bio Production Managements* (BioPM) yang merupakan kolaborasi beberapa modul *production Forecast & Schedule*, *Master Formula*, *Inventory*, *Raw Material Managements*, *Production*, *Quality Control*, *Quality Assurance*, *Label*, *Product Sales* dan *Preventive Managements*. Aplikasi pada Direktorat Sumber Daya Manusia yaitu pengembangan aplikasi ERP-HR yang mengintegrasikan aplikasi HR (*Human Resource*) dan Aplikasi Payroll dengan ERP (*Enterprise Resource Planning*). Semua perangkat dan aplikasi disesuaikan dengan *standard operating procedure* (SOP) dalam rangka menyediakan layanan informasi yang terintegrasi, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Aplikasi proses bisnis yang dikembangkan dikategorikan dalam aplikasi utama, aplikasi penunjang, aplikasi *E-Office* dan aplikasi *work flow* dokumen sebagai berikut:

INFORMASI TEKNOLOGI



APLIKASI UTAMA

1. Aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP).
2. Aplikasi *Human Capital Management System* (HCMS).
3. Aplikasi *Laboratorium Information Management System* (LIMS).

Sumber Daya Manusia yaitu pengembangan aplikasi ERP-HR yang mengintegrasikan aplikasi HR (*Human Resource*) dan Aplikasi Payroll dengan ERP (*Enterprise Resource Planning*). Semua perangkat dan aplikasi disesuaikan dengan *standard operating procedure* (SOP) dalam rangka menyediakan layanan informasi yang terintegrasi, tepat waktu, dan tepat sasaran.

4. Aplikasi BioQA.
5. Aplikasi Deviasi.
6. Aplikasi *Change Control*.
7. Aplikasi CAPA.
8. Aplikasi *Raw Material* dan *Vendor Management*.
9. Aplikasi *Environment Monitoring*.
10. Aplikasi *Physical Monitoring*.
11. Aplikasi Form Data.
12. Aplikasi Validasi Kalibrasi.
13. Aplikasi *Customer Relationship Management* (CRM).

APLIKASI PENUNJANG

1. Aplikasi Training Record
2. Aplikasi Filling System
3. Aplikasi Bio Anggaran
4. Aplikasi Inventory (SIAAP)
5. Aplikasi e-procurement (Bioeproc)
6. Aplikasi Biosis
7. Aplikasi Pelayanan Jasa
8. Aplikasi Hewan Laboratorium (Bioware)
9. Aplikasi SMS Gateway

APLIKASI E-OFFICE

1. Aplikasi Intranet, media komunikasi dan publikasi internal.
2. Aplikasi Internet www.biofarmacoid.com, media publikasi website Perusahaan.
3. *Mail Server*, untuk sistem layanan surat-menyurat elektronik korporat.
4. Admin Klipping Berita, aplikasi internal perusahaan untuk mendokumentasikan klipping berita terpilih berkaitan dengan Perusahaan.
5. *File server*, file dokumentasi dan data terpusat.

APLIKASI WORK FLOW DOKUMEN

Dalam rangka menunjang aktivitas Perusahaan yang mengutamakan konsep *Go Green Industry*, maka Divisi Teknologi Informasi mengimplementasikan aplikasi yang dapat mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dalam aktivitas administrasi internal, diantaranya:

1. Aplikasi *Database e-Korespondensi*
2. Aplikasi Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) *Online*
3. Aplikasi Surat Cuti *Online*
4. Aplikasi Slip Gaji
5. Aplikasi *Work Flow* Dokumen Logistik
6. Aplikasi *User Access Control*.

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2016

Sampai dengan akhir tahun 2016, pengembangan sistem, jaringan maupun infrastruktur TI di Bio Farma telah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan aplikasi-aplikasi baru, baik yang dikerjakan oleh pihak internal perusahaan (*internal development*) maupun yang dikerjakan oleh pihak konsultan (*external development*) sesuai dengan SDLC (*Software Development Life Cycle*), meliputi antara lain:
 - a. Aplikasi ESS (*Employee Self Service*)
 - b. Aplikasi Trivia

- c. Aplikasi *Customer Care*
- d. Aplikasi *Asset Management*
- e. Aplikasi SPPD (*Travel management*)
- f. Aplikasi RMM (*Raw Material Management*)
- g. Aplikasi *Validation & Calibration*
- h. Aplikasi *Document Management System*
- i. Aplikasi *Electronic Procurement*
- j. Aplikasi LIMS (*Laboratory Information Management System*)
- k. Aplikasi e-QMS (*Quality Management System*)
- l. Aplikasi EHS (*Electronic Environment Health & Safety*)
- m. Aplikasi *Bio Legal*
- n. Aplikasi e-Faktur Pajak
- o. Aplikasi *Registration Order*
- p. Aplikasi *Bio-HR*
- q. Aplikasi *Production Planning*
- r. Aplikasi *Production QA*
- s. Aplikasi *RA Document Library*

2. Melakukan maintenance aplikasi - aplikasi lama antara lain aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), *Modul Material Resource Planning* (MRP), Aplikasi *e-Correspondence*, aplikasi Bio QA, aplikasi Bio Anggaran dan aplikasi pelayanan jasa kesehatan.
3. Melakukan pemasangan perangkat baru.
4. *Maintenance* rutin infrastruktur TI dan telepon.
5. *Monitoring* dan *review* proses tata kelola di Divisi TI meliputi *follow up* temuan audit TI yang dilaksanakan oleh internal audit QA dan audit internal SPI.
6. Membuat dan review IT policy dan IT prosedur baik internal divisi maupun bagian-bagian lainnya.
7. Monitoring kegiatan pengembangan aplikasi *Electronic Batch Record*.
8. Melakukan pemantauan investasi dan biaya TI tahun 2016.

INFORMASI TEKNOLOGI

TATA KELOLA SISTEM INFORMASI

Investasi teknologi informasi saat ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kecepatan kerja, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Untuk itu, tanggung jawab pengelolaan TI tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke unit yang hanya khusus menangani TI secara teknis (*IT Function*), melainkan juga harus menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen.

Hal ini merupakan paradigma baru dalam mengelola teknologi informasi yang disebut dengan tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*). Tata kelola TI merupakan suatu komitmen, kesadaran dan proses pengendalian manajemen organisasi terhadap seluruh sumber daya TI, yang mencakup sumber daya komputer (*software, brainware, database* dan sebagainya) hingga ke teknologi informasi dan jaringan LAN/Internet. Selanjutnya, penerapan kebijakan TI diarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk mewujudkan tata kelola TI di Bio Farma, Perusahaan telah menyusun

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI**1. Kebijakan Pengembangan Perangkat Lunak dan Validasi Sistem Komputerisasi.**

- Perangkat lunak atau *Software*. Yaitu kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. *Software* dapat mengolah masukan dan menghasilkan suatu keluaran yang akan digunakan sebagai informasi.
- Sistem Komputerisasi (*Computerized System*). Merupakan gabungan beberapa *software*, perangkat keras (*hardware*), jaringan komputer (*networking*), sistem prosedur (Prosedur Standar Pengoperasian - SOP), User, interkoneksi proses masukan dan keluaran informasi yang digunakan dalam pelaporan atau kontrol sistem informasi.
- Validasi Sistem Komputerisasi atau *Computer System Validation* (CSV). Proses pengujian *software* atau sistem komputerisasi untuk memastikan *software* atau sistem komputerisasi telah sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna.

- Kualifikasi *Hardware*. Proses untuk memastikan *hardware* yang akan digunakan pada sistem komputerisasi sudah dijamin konfigurasi dan performansinya.
- Pembuatan dan pengembangan perangkat lunak atau *Software* dikelola dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan konsep SDLC (*System Development Life Cycle*).
- Proses validasi *software* atau sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memberi jaminan kualitas.

2. Kebijakan Keamanan Informasi.

- Perusahaan memiliki wewenang penuh terhadap penerapan keamanan sistem informasi untuk melindungi aset informasi perusahaan dan menjamin kelangsungan bisnis perusahaan.
- Aset informasi Bio Farma adalah milik Perusahaan yang diadakan untuk keperluan usaha/operasional Perusahaan dan untuk menjamin konfidensialitas, integritas, dan ketersediaan informasi serta efektivitas, dan efisiensi layanan TI.
- Risiko TI dikelola oleh perusahaan untuk menjamin keamanan pada tata kelola TI Bio Farma.

3. Kebijakan Data Elektronik (Electronic Record) dan Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signature).

- Data Elektronik (*Electronic Record*). Data elektronik merupakan kombinasi dari teks, grafik, angka, audio, gambar, atau informasi lain dalam bentuk digital yang dapat dibuat, dimodifikasi, diperbaharui, disimpan, diambil atau didistribusikan oleh sistem komputer.
- Tanda Tangan Elektronik (*Electronic Signature*). Tanda Tangan Elektronik merupakan kompilasi *data computer* dari simbol-simbol yang dieksekusi, diadopsi atau diotorisasi yang dilegalisasi setara dengan tanda tangan manual.



- c. Data atau informasi berupa data elektronik (*electronic record*) yang merupakan output pengolahan dari sistem komputerisasi dan tanda tangan elektronik (*electronic signature*) di Bio Farma diberlakukan penggunaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan data proses manual dan tanda tangan manual yang selama ini berlaku.

Bio Farma menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks dan penuh dengan iklim kompetisi khususnya di bidang vaksin dan antisera. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi sesuai dengan karakteristik bisnis Perusahaan dapat memberikan solusi perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat dan efek.

Sebaliknya, kesalahan penerapan sistem TI dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, **Perusahaan telah menetapkan strategi terkait teknologi informasi sebagai berikut:**

1. Membangun aplikasi bisnis yang terpadu dan terintegrasi yang melibatkan seluruh fungsi yang ada di perusahaan.
2. Mengembangkan organisasi TI yang memiliki keseimbangan harmonis antara kebijakan terpusat dan tersebar (otonomi), yang disertai *process change management* yang baik.
3. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga (*outsourcing*) untuk pengembangan dan pemeliharaan, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi biaya, waktu, kualitas solusi, kualitas produk dan jasa, serta fleksibilitas.
4. Pengembangan infrastruktur TI untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis masa kini dan masa mendatang.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI

Pelatihan dan pengembangan SDM TI di tahun 2016 mulai mengarah kepada IT as *Business Enabler*. Tim TI Bio Farma tidak hanya mengikuti pelatihan yang bersifat teknis namun mulai mengarah pelatihan yang berhubungan dengan aspek bisnis Bio Farma. Adapun pelatihan pelatihan yang sudah diikuti adalah:

PELATIHAN TEKNIS

1. Pelatihan ERP untuk Pemrograman dan Pengadministrasian *database*.
2. Pelatihan ERP Untuk semua modul yang diimplementasikan seperti Finance & Accounting, Procurement, *Inventory*, dan *Sales*.
3. Pelatihan Infrastruktur.
4. Pelatihan Bahasa Pemrograman sesuai dengan IT *Master Plan* seperti VB.Net.
5. Pelatihan *Networking Essential and TCP/IP Fundamentals*.
6. *Training & Workshop VMP and Risk Base Assessment Workshop HP*.
7. Pelatihan *Microsoft Exchange 2010*.

PELATIHAN NON-TEKNIS

1. Akuntansi Dasar.
2. *Public Speaking*.
3. *Control Objective for Information and Related Technology-COBIT 5*.
4. *Software Validation*.
5. *HP Solution and Product Knowledge*.
6. *Work Load Analysis*.
7. *Risk Analysis*.
8. *Software Validation*.
9. *Executive Presentation for Staff*.
10. *Smart and Effective Presentation*.
11. *Business Process Mapping*.
12. Pelatihan *pengelolaan Big Data, data mining*.

INFORMASI TEKNOLOGI

Sepanjang tahun 2016, SDM Teknologi Informasi telah mengikuti berbagai program pelatihan sebagai berikut:

Peserta	Topik Pelatihan	Jumlah Hari	Nilai
Kepala Bagian, Kepala Seksi, Staf	Sharepoint 2010 application development	3	-
Kepala Divisi	Leadership development program for top talent telkom	5	-
Staf	IT Security "Security Today 2016"	1	-
Staf	Environmental monitoring system and GMP solutions	1	-
Staf	International conference on ICT	3	-
Staf	Teknologi IBM	1	-
Staf	IT Governance	2	-
Staf	Cloud computing	4	-
Kepala Bagian	Intrapreneur dan entrepreneur handal	1	-
Staf	IT Business analysis	3	-
Kepala Bagian	Microsoft sharepoint 2013 administration	5	-
Staf	Microsoft sharepoint 2013 administration	5	-
Kepala Divisi	Cyber security: global trends and opportunities	1	-



Bio Farma aktif mengikutsertakan mitra UKM unggulan mengikuti pameran pada berbagai acara di luar negeri, pada tahun 2016 di Inggris dan Aljazair untuk meningkatkan promosi UKM memasuki pasar global.



MAKE THE WORLD A HEALTHIER PLACE

Bio Farma menjalankan konsep solusi kemakmuran menggunakan pendekatan yang melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan potensi Biodiversity Indonesia, menggunakan sumber daya terbarukan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN





Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki makna strategis bagi Bio Farma sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan sasaran Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang merupakan program semua negara di dunia, termasuk pemerintah Indonesia telah meratifikasinya.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kesadaran Bio Farma sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Kepedulian Bio Farma terhadap tanggung jawab sosial tidak terlepas pula dari kenyataan bahwa dimensi sosial memberikan pengaruh terhadap setiap aktivitas bisnis, dimensi sosial bukan sesuatu yang terpisah melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan proses bisnis perusahaan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kami terus berupaya menyempurnakan strategi dan kebijakan CSR antara lain melalui penyusunan *Roadmap* CSR berbasis ISO 26000. Dalam *roadmap* ini, kami meluruskan definisi dan cakupan CSR, yaitu bukan hanya merupakan aktivitas filantropis semata, tetapi lebih luas dari pada itu, yang mencakup aspek; lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, praktik-praktik bisnis yang sehat dan tanggung jawab produk. Semuanya ini sejalan dengan elemen-elemen CSR menurut ISO 26000.

Berikut ini kami sampaikan ringkasan laporan CSR yang terdiri dari: (a) lingkungan hidup, (b) ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, (c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, (d) tanggung jawab kepada konsumen. Sedangkan Laporan CSR secara lengkap dan rinci, kami sampaikan dalam Laporan keberlanjutan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan tahunan perusahaan.

CSR - LINGKUNGAN HIDUP

KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bio Farma memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan yang pro lingkungan. Dalam setiap proses pembuatan keputusan, dampak lingkungan akibat operasi perusahaan merupakan isu penting yang harus dipertimbangkan.

Bio Farma mendukung komitmen warga dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menyusun berbagai langkah strategis dalam program mitigasi emisi GRK, baik yang dilakukan dalam kegiatan operasional Perusahaan maupun yang dilakukan di luar kegiatan operasional Perusahaan seperti program penanaman pohon. Program pengurangan emisi dari kegiatan operasional Perusahaan dilakukan dengan efisiensi dan inovasi proses produksi di samping melakukan penghematan energi.

Dalam konteks *green company*, Bio Farma telah merumuskan kebijakan kelestarian lingkungan, yang dibagi dalam 5 (lima) area utama. Pertama; *Green Process*, yaitu menerapkan prinsip *green* pada seluruh proses bisnis mulai dari pemilihan bahan baku melalui seleksi vendor yang peduli lingkungan sampai proses produksi, formulasi, pengisian, pengemasan hingga penanganan produk jadi. Kedua; efisiensi dalam penggunaan energi. Ketiga; efisiensi dan konservasi air dengan menerapkan prinsip 4R (*reduce, reuse, recycle, recovery*). Keempat; pengelolaan limbah dan pemilahan sampah dalam lima kategori. Kelima; upaya melibatkan karyawan dan keluarga mereka, agar memiliki budaya dan sikap kerja yang pro lingkungan.

Bio Farma menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) secara terpisah. Informasi komprehensif terkait tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditemukan di laporan keberlanjutan Bio Farma.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUPPENGHEMATAN ENERGI SEBAGAI UPAYA
MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA
(GRK)

Bio Farma berupaya melakukan efisiensi penggunaan energi pada seluruh kegiatan operasional Perusahaan melalui berbagai kebijakan, seperti pemanfaatan energy terbarukan, melakukan improvisasi peralatan, melakukan *re-design* proses produksi dan pengaturan pola operasi produksi. Selain melalui inovasi proses produksi, Bio Farma juga melakukan berbagai kebijakan untuk pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengurangan konsumsi listrik di fasilitas pendukung, serta peningkatan kinerja pengelolaan kendaraan operasional.

Dalam aspek energi, sejak 2013 Bio Farma berhasil menurunkan emisi karbon CO₂ atas produk Vaksin Pentabio dari tahun ketahun. Bio Farma melakukan efisiensi dalam berbagai aspek seperti pemakaian listrik dan air, penggunaan kemasan, penghematan *waste* (biaya jarum suntik/dosis, penghematan biaya *cold chain/vial*). Dengan adanya efisiensi ini, maka tingkat emisi karbon CO₂ dari setiap produk Vaksin Pentabio semakin rendah.

Program efisiensi energi dilakukan bukan saja pada aktivitas manufaktur tetapi di semua unit kerja termasuk unit kerja pendukung. Kegiatan yang telah dilakukan dalam Program Efisiensi Energi sepanjang tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Pemasangan *Timer Control* pada 32 cooling system AHU, sehingga pada malam hari cooling system AHU pada kondisi *off*
2. Pemasangan inverter pada *pompa Chiller* di gedung Polio-Campak dan gedung Pengemasan
3. Pemasangan *inverter* dan *night mode* pada 25 Laminar Air Flow
4. Penggunaan media pendingin yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi pada 2 Cold Room dan AC Split, semula R22 menjadi *Musicoil Hidrokarbon*
5. Penggantian lampu TL menjadi lampu hemat energi LED

6. Penggantian Lampu halaman (taman) dengan penggunaan *Solar cell* dan Lampu LED dilengkapi *Photo cell*
7. Memasang *timer control* pada 70 dispenser air minum
8. Pemanfaatan kembali (*Recovery*) Energi Exhaust Air dari Ruangan Produksi Vaksin HIB dan Pertusis
9. Pemasangan Pompa *solar cell* dari Raw Water ke bak penampungan
10. Pemasangan Lampu LED, Sensor Gerak dan *Solar Cell* di gedung Publik 2 basement 1, 2 dan 3
11. Pemasangan *Selective Control* pada elevator di gedung Publik 2

PENGELOLAAN LIMBAH SECARA
BERTANGGUNG JAWAB

Limbah oli bekas yang dihasilkan dari kegiatan Bio Farma seluruhnya (100%) diproses dan dimanfaatkan kembali melalui kerjasama dengan Pihak ketiga. Rasio rata-rata pemanfaatan oli bekas terhadap timbunan periode 2015 sebesar 4,12%.

PROGRAM SUBSTITUSI SISTEM DEIONISASI
DARI RESIN BASED ION EXCHANGER
MENJADI CONTINUOUS ELECTRO

De-Ionization (CEDI) berhasil mengeliminasi timbunan limbah B3 resin bekas setiap periode maintenance (2 tahun sekali). Dari penggantian sistem ini, total 4.192kg dan 5240kg dengan rasio terhadap total timbunan 4,64% dan 3,77% resin bekas berhasil dieliminasi sejak periode 2010 sampai 2015.

PENGELOLAAN AIR MELALUI PROGRAM 3R
(REDUCE, RECYCLE, REUSE)

Usaha penghematan air melalui program 3R, dapat menghasilkan penghematan air sekitar 232 m³ pada tahun 2016 atau setara dengan pencapaian persentase efisiensi sekitar 17.32% terhadap total pemakaian air. *Recovery* air tanah yang dilakukan selama 5 tahun terakhir, telah berhasil dilakukan. Walaupun pemakaian air terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan laporan Pendugaan Geolistrik Bio Farma, cadangan air tanah tetap terjaga dan ketebalan air tanah mengalami kenaikan rata-rata 3,53%.



Jumlah total air limbah yang dihasilkan Bio Farma sebesar 24.502 m³/tahun, dengan rincian 23.277 m³/tahun untuk air limbah produksi dan 1.225 m³/tahun untuk air limbah domestik. Telah dilakukan penurunan beban pencemaran air melalui program *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R) sebesar 0.14Ton/Tahun dengan persentase efisiensi sekitar 13,17% terhadap total air limbah yang dihasilkan.

PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Komitmen Bio Farma terhadap lingkungan hidup tercermin dengan diperolehnya beberapa penghargaan selama 2016, sebagai berikut:

1. Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Emas, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. *Global Green Award* dari *Otherways Association Management & Consulting France* di Berlin.
3. The Best Indonesia Green Award 2014-2016 yang diselenggarakan oleh *The La Tofi School of CSR* didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perindustrian.
4. Best Green CEO 2016 dari Warta Ekonomi
5. Penghargaan Efisiensi Energi Nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. *Green Era Award* - Berlin

CSR – KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PENGHORMATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DAN ASAS KESETARAAN

Bio Farma menghormati hak asasi manusia dan menerapkan asas kesetaraan antar gender, agama, suku dan ras. Ini merupakan modal utama kami dalam memelihara hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dengan seluruh karyawan. Sebagai penghormatan kepada kaum difabel, Bio Farma juga telah membuka kesempatan kerja bagi mereka.

Dalam upaya untuk mewujudkan disiplin karyawan, Perusahaan menetapkan 3 jenis pelanggaran dan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan, yakni pelanggaran/ hukuman ringan, sedang dan

berat. Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Perusahaan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS) yang terdiri dari wakil Perusahaan dan perwakilan karyawan yang berfungsi memberikan saran dan pendapat apabila Direksi akan menjatuhkan hukuman disiplin sedang atau berat kepada karyawan, maka karyawan dapat mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bio Farma merancang dan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan secara terus menerus untuk menjaga kualitas kinerja dan produktivitas perusahaan. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Ada berbagai bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara *in-house* maupun di lembaga pendidikan/pelatihan luar yaitu berupa pelatihan kompetensi, keterampilan teknis/fungsional, dan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugasnya (*mandatory training*), pelatihan manajerial serta berbagai sesi berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).

SISTEM REMUNERASI YANG KOMPETITIF

Bio Farma menetapkan bahwa remunerasi yang diterima oleh karyawan merupakan formulasi sistem remunerasi dalam peringkat (*grade*) dan level jabatan tertentu. Bio Farma menjamin bahwa karyawan golongan terendah memperoleh upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan pemerintah. Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, dan pemeringkatan (*grading*) yang ditetapkan. Bagi karyawan yang meninggal dalam menjalankan tugas Perusahaan diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dan bagi karyawan yang memasuki usia pensiun diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam sistem remunerasi yang diterapkan, Perusahaan menetapkan standar gaji pokok yang relatif tinggi dibandingkan standar upah minimum. Selain itu, Perusahaan juga tidak membedakan perlakuan remunerasi terhadap karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh level jabatan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bio Farma memberikan kesejahteraan di luar dari gaji, seperti memberikan tunjangan lain sebagai bagian dari remunerasi kepada karyawan, yaitu Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Kesejahteraan, uang cuti tahunan, uang cuti panjang, uang pakaian dinas dan bonus (jasa produksi). Selain tunjangan, kepada karyawan diberikan pula fasilitas seperti pengobatan (rawat jalan dan rawat inap).

Perusahaan juga memberikan tunjangan hari tua, antara lain dalam bentuk iuran pasti dengan benefit diperoleh pada saat pensiun berupa penghasilan bulanan, tabungan hari tua, asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan pensiunan (Prokespen).

PERPUTARAN PEKERJA (TURNOVER)

Satu dari beberapa fungsi pendukung utama visi, misi dan strategi Bio Farma adalah fungsi *Human Capital* yang di dalamnya terdapat “*People, Skills & Roles*.” Melalui pengelolaan yang tepat, karyawan Bio Farma menjadi modal utama yang menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Jenis Kelamin	2016	2015	2014
Pria	12	11	11
Wanita	2	9	7
Total	14	20	18

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

Bio Farma terus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang sejalan dengan standar internasional; OHSAS 18001:2007. Manajemen K3 dikelola oleh Bagian Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan. Bagian ini berfungsi memantau implementasi sistem manajemen K3 dan lingkungan di Bio Farma. Di samping itu Bio Farma juga membentuk Tim Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja (P2K3) serta Tim Tanggap Darurat (TTD).

Untuk melihat efektivitas sistem tanggap darurat, maka prosedur penanganan keadaan darurat secara berkala diujicobakan, dengan maksud agar dimengerti, dipahami dan seluruh karyawan mampu

menjalankannya apabila terjadi keadaan darurat. Simulasi tanggap darurat (*Emergency Drill and Simulation*) dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan melibatkan seluruh personil yang ada di perusahaan dan masyarakat sekitar Perusahaan.

Untuk menjamin kesehatan karyawan, dilakukan pemantauan kesehatan yang diatur di dalam Prosedur Baku 100K-SIS-08 tentang Pemantauan Kesehatan Karyawan, yang diterapkan untuk mengeliminasi potensi sumber kontaminasi yang berasal dari karyawan dan juga untuk melindungi karyawan dari hal-hal yang membahayakan selama berada di lingkungan Bio Farma.

Selain pemantauan kesehatan karyawan, dilakukan juga pemantauan catering makanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan makan karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tata cara tersebut diatur dengan Prosedur Baku 236K-MonC-01. Pengukuran lingkungan kerja dilakukan di seluruh area perusahaan. Parameter yang diukur adalah kebisingan dan intensitas cahaya.

Bio Farma menerapkan tiga pendekatan utama dalam melaksanakan kegiatan CSR, yaitu Biodiversitas, Geodiversitas, dan Kulturdiversitas. Bio Farma menjaga pemuliaan untuk setiap spesies yang dikembangkan, melindungi segala bentuk keanekaragaman di sumber daya hayati, dan melestarikan segala bentuk kebudayaan warisan masyarakat.



Jam kerja aman adalah jam kerja dimana tidak terjadi kecelakaan. Jam kerja aman pada tahun 2013 = 2.653.644, tahun 2014 = 2.839.393, tahun 2015 = 2.922.811 dan pada tahun 2016 = 2.583.263.

CSR – PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN.

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan melalui Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat marginal yang dilaksanakan melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Disamping itu, Program ini juga dilaksanakan melalui Program CSR.

Program Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang dilakukan melalui Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk; (1) Bantuan peningkatan kesehatan, (2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, (3) Bantuan pelestarian alam, (4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, (5) Bantuan sarana ibadah, (6) Bantuan korban bencana alam, (7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan (8) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Bantuan Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan dalam tahun 2016 meliputi:

1. Bantuan untuk kegiatan HUT RI 71 “BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2016” di Provinsi Jawa Barat antara lain:
 1. Bedah rumah veteran
 2. Siswa mengenal nusantara
 3. Jalan sehat
 4. BUMN mengajar,
 5. Pembangunan MCK dan sarana air bersih
 6. Pemasangan instalasi listrik.
2. Bantuan untuk korban bencana banjir di Kab. Bandung dan Kab. Garut. Bantuan untuk korban bencana longsor di Kab. Sumedang dan bencana alam Gunung Sinabung di Kab. Karo Sumatera Utara serta bencana alam gempa bumi di Kab. Pidie Jaya Nangroe Aceh Darussalam.

3. Bantuan sarana pendidikan berupa perlengkapan untuk kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan, sarana untuk kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah serta bantuan beasiswa SMART DKM AN-NUR.
4. Bantuan kesehatan antara lain berupa kegiatan pemberian pengobatan gratis, vaksinasi gratis, dan kegiatan donor darah.
5. Bantuan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum antara lain bantuan pembangunan kantor RW dan pembangunan jembatan di Jasinga Kabupaten Bogor.
6. Bantuan dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana ibadah serta bantuan peralatan untuk kegiatan ibadah lainnya.
7. Bantuan pelestarian alam berupa bantuan bibit pohon di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dan program pelepasliaran satwa di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Kabupaten Sukabumi.
8. Bantuan kepada kelompok usaha kuliner Geopark Ciletuh Pelabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, kelompok Bio Tani untuk budidaya pepaya Calina di Kabupaten Bogor dan bantuan kepada kelompok usaha lainnya.
9. Bantuan pendidikan dan pelatihan, pemasaran dan promosi berupa pelatihan kewirausahaan UKM dan koperasi mitra binaan serta kegiatan pameran di Jakarta, Indonesia dan di Alger, Aljazair.
10. Bantuan alat kesehatan dalam rangka HUT BUMN Bersama Sinergi BUMN untuk Indonesia di Labuan Bajo.

Disamping itu, Bio Farma terus melaksanakan program kredit lunak kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnisnya. Penyaluran Program Kemitraan dalam tahun 2016 mencapai Rp5.726.500.000 yang disalurkan kepada 240 Mitra Binaan yang terdiri dari 238 Usaha Kecil dan 2 Koperasi.

1. Program Pilar Kesehatan
 - a. Pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah melalui kegiatan *fogging* ke beberapa wilayah di sekitar Perusahaan. Bantuan ini diberikan kepada wilayah yang telah terkena kasus demam berdarah.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- b. Sejalan dengan *core business* Perusahaan dan dalam upaya ikut serta mengkampanyekan pentingnya imunisasi untuk anak, Perusahaan bekerja sama dengan UPT Puskesmas Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Tahun 2016.
 - c. Peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan (*Access to Medicine and Healthcare*), salah satunya bantuan peningkatan kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat adat Baduy di Lebak, Provinsi Banten
 - d. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi para pemudik lebaran merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh perusahaan setiap tahun dengan membuka posko Lebaran di jalur mudik. Pada Tahun 2016, Perusahaan membuka Posko Mudik Lebaran di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut.
 - e. Peningkatan *Access to Healthcare* tidak hanya diberikan Perusahaan kepada warga masyarakat yang membutuhkan akses langsung terhadap pelayanan kesehatan namun juga melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan. Pada Tahun 2016, Perusahaan bekerja sama dengan Yayasan Asgar Muda dalam mengembangkan sistem informasi dan penguatan kader kesehatan di Kabupaten Garut.
2. Program Pilar Pendidikan
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, diantaranya adalah Studi Banding Masyarakat Lokal Pengelola Geosite ke Desa Wisata Kandungan di Temanggung, Kegiatan *Workshop* Pengintegrasian Materi Geopark Ciletuh – Palabuhanratu dalam Kurikulum Geografi dan IPS bagi Guru di Kabupaten Sukabumi, Pelatihan Pengolahan Menu Lokal dengan Berbahan Dasar Hasil Pertanian di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, dan Sertifikasi Pemandu Wisata.
 - b. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan konservasi mangrove dengan memberikan Pelatihan Konservasi & Rehabilitasi Hutan Mangrove di Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu
 - c. Pelestarian seni tradisional dan budaya sunda di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
 - d. Peningkatan kapasitas untuk pengembangan program pemuliaan Domba Garut dengan memberikan Pelatihan Manajemen Budidaya Ternak Domba di Kampung Pemuliaan Domba Garut, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut.
 - e. Perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam bidang pendidikan, seperti pengembangan pendidikan melalui seminar, kegiatan olahraga, kegiatan seni budaya dan kegiatan pendidikan lainnya
 3. Program Pilar Lingkungan
 - a. Pelestarian keanekaragaman hayati melalui Pemuliaan Domba Garut
 - b. Pelestarian lingkungan wilayah perkotaan di sekitar Perusahaan bersama masyarakat Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung melalui kegiatan Pasteur *Ecotour*.
 - c. Perusahaan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Bandung dalam upaya sosialisasi pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah dan pengembangan tanaman hidroponik kepada kader PKK di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung.
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui kegiatan pengembangan Bank Sampah di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.
 - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan limbah tani dan ternak menjadi kompos di Desa Wanajaya, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut.
 4. Program Pilar Ekonomi
 - a. Pengembangan usaha kecil berbasis potensi pertanian lokal melalui pengembangan usaha keripik buah-buahan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

- b. Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pembukuan serta Pelatihan *Packaging*, *Branding*, dan *Marketing* bagi Kelompok Mitra Usaha Kecil di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
- c. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil berbasis potensi lokal melalui kegiatan pendampingan usaha diantaranya adalah produk pangan olahan dari hasil pertanian seperti keripik mangga dan pepaya, dan pembesaran ikan sidat di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DI GEOPARK CILETUH PALABUHANRATU

Bio Farma mendorong agar Kawasan Geopark Ciletuh yang berada di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, mendapatkan perhatian khusus dari *UNESCO Global Geoparks* sehingga Kawasan Geopark Ciletuh dapat menjadi bagian dari *UNESCO Global Geoparks*. Untuk mencapai hal tersebut maka Kawasan Geopark Ciletuh harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam *Guideline* yang ditetapkan oleh *UNESCO*, termasuk diantaranya adalah penyusunan *dossier* pengajuan.

PAPSI merupakan Mitra CSR Bio Farma dalam mengembangkan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Pada awalnya PAPSI berjalan sendiri dalam kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang di dukung oleh CSR Bio Farma, namun sekarang PAPSI memiliki mitra sebanyak 6 (enam) kelompok yang bergerak di masing-masing potensi yang dimiliki oleh Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu.

Mitra PAPSI yang dimaksud yaitu Kelompok Batik Pakidulan, POKMASI (Kelompok Masyarakat Konservasi) yang memiliki dua kegiatan yaitu Konservasi Mangrove dan Pembesaran Ikan Sidat, kemudian Kelompok Raflesia Fatma yang bergerak di bidang pengolahan buah mangga menjadi keripik, Kelompok *Geofood* yang bergerak di bidang kuliner makanan khas daerah, Kelompok Tani Cupumanik yang bergerak dibidang pertanian padi hitam dan

yang terakhir yaitu Kelompok Guay yang kegiatannya meliputi kesenian dan kerajinan pemuda sekitar.

Di Kawasan Ciletuh terdapat potensi dari keanekaragaman budaya yang terinspirasi dari keindahan bentang alam, filosofi masyarakat dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Potensi tersebut adalah kerajinan *Batik Pakidulan* yang terletak di Desa Purwasedar, Kecamatan Sukabumi. Sebagai Perusahaan yang memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan, program yang dilaksanakan oleh Bio Farma dalam rangka memberdayakan pengrajin Batik Pakidulan ini adalah dengan mengembangkan proses produksi batik yang ramah lingkungan melalui penggunaan bahan pewarna dengan *nano technology* dan instalasi pengolahan air limbah (Mini IPAL). Kelompok Batik Pakidulan telah berkembang dari awalnya hanya 2 orang, saat ini menjadi 35 orang, sehingga menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat Desa Purwasedar.

Kelompok Batik Pakidulan menciptakan teknik pewarnaan batik dari bahan alam secara alami yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Terobosan ini menandakan bahwa konsep industri hijau telah merubah perilaku masyarakat.

Program *community development* yang dilaksanakan oleh Bio Farma pada Pengembangan Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu telah membawa dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016 warga yang beralih profesi dari penambang emas aktif sebanyak 22 orang (67%). Sebanyak 8 orang (30%) warga telah beralih profesi menjadi pemasok rebon & sidat dari perambah hutan dan pemburu benur lobster. Di Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu lapangan kerja baru sebagai pemandu wisata mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 140 orang. Pada tahun 2016 pengunjung juga mengalami kenaikan menjadi 3200 orang. Untuk jumlah homestay pada tahun 2016 menjadi 33 unit. Di Tahun 2016 adanya peningkatan omset dari pengrajin batik pakidulan menjadi Rp162.000.000 (seratus enam puluh dua juta rupiah) yang awalnya hanya Rp48.550.000 (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

**Program Membangun Kampung Pemuliaan Domba Garut**

Sebagai indukan domba garut, telah didapat 20 ekor indukan domba garut jantan dan betina yang memiliki morfologi domba garut unggul. Selain daripada itu, dilakukan analisis *DNA* pada seluruh indukan untuk mengetahui potensi genetik unggul domba garut. Berdasarkan hasil analisis *DNA* tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh indukan domba jantan dan betina yang berada di Kampung Pemuliaan Domba Garut merupakan Domba Garut dengan kategori unggul secara genetik. Sehingga telah diketahui bahwa domba-domba tersebut unggul secara fenotip dan genotip.

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak CSR Bio Farma dilakukan melalui metode pendampingan, diantaranya adalah dengan Melakukan FGD dengan peternak di Desa Wanajaya terkait sumber daya alam dan manusia yang ada di Desa Wanajaya, Menerapkan SOP manajemen pemeliharaan domba garut kepada pegawai kandang, dan Memberikan transfer pengetahuan kepada peternak mengenai pembibitan ternak domba. Dari kegiatan pendampingan yang

dilakukan dapat membentuk kelompok inti dan plasma peternak domba garut, meningkatnya keinginan peternak untuk melakukan usaha pembibitan karena sebelumnya kebanyakan peternak hanya melakukan penggemukan dengan alasan penggemukan lebih cepat menghasilkan keuntungan dibanding pembibitan, dan tersedianya pasar baik untuk penjualan bibit domba unggul maupun untuk produk utama domba (daging dan kulit).

Telah dilakukan kerjasama Bio Farma dengan akademisi, BPPT, Pemerintah Provinsi Jawa barat, Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah desa terkait dengan Pengembangan Program membangun kampung pemuliaan Domba Garut diantaranya :

1. Karakterisasi Genetik menggunakan Penanda *DNA* Mikrosatelit
2. Terbentuknya kelompok wanita tani yang memproduksi kompos
3. Pengembangan kelompok plasma

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka pemuliaan Domba Garut adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Kesehatan Ternak Secara Rutin
2. Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak



3. Pemberdayaan kepada Ibu – ibu dan Pemuda dalam mengolah kompos dari kotoran ternak
4. Pelaksanaan Pelatihan kepada Peternak

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jasinga

Kegiatan yang dilakukan dalam program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jasinga, diantaranya:

1. Pengolahan Keripik dengan Memanfaatkan Potensi Produk Pertanian Lokal di Jasinga
Pada awalnya program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan masyarakat Kecamatan Jasinga dalam mengolah buah cempedak (buah yang banyak ditemui di Kecamatan Jasinga) menjadi berbagai macam makanan olahan dalam hal ini adalah produk keripik yang memiliki nilai lebih dibandingkan nilai mentah dari buah cempedak jika langsung dijual. Namun demikian program ini berkembang tidak hanya dalam pengolahan keripik cempedak saja, tapi juga pengolahan produk pertanian lokal lainnya, misalnya adalah buah rambutan tangkue.
2. Kegiatan Pelestarian Seni dan Budaya di *Life Science Park* Jasinga.
3. Penanaman Bibit Pohon Bambu
4. Program Budi Daya Pepaya Calina bersama Kelompok Biotani
5. Bantuan Kegiatan Donor Darah
6. Bantuan Sarana Ibadah
7. Bantuan Sarana dan Prasarana Umum berupa perbaikan jembatan di Desa Cikopomayak Kecamatan Jasinga.
8. Kegiatan *Fogging* Kampung Ciangkrih Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
Kegiatan *fogging* dilakukan untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah di Kecamatan Jasinga dan merupakan kegiatan ini termasuk dalam salah satu pilar Program CSR yaitu pilar Kesehatan.
9. Kegiatan Bersepeda Santai Kelompok Masyarakat Toker Jasinga.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperlancar dan menjalin tali silaturahmi dengan komunitas yang ada di lingkungan masyarakat dan menjangkau aspirasi yang berkembang di masyarakat

10. Kegiatan Kelompok Bank Sampah Tirta Kahuripan
Kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat melalui konsep pemanfaatan Limbah 3R (*Reduce – Reuse – Recycle*) sehingga dapat menghasilkan sampah daur ulang yang dapat menjadi peluang dalam ekonomi kreatif
11. Partisipasi dalam mendukung kegiatan masyarakat Kecamatan Jasinga yang sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Contoh kegiatan seperti Kegiatan Lasara 2016, Kegiatan tournament Sepak Bola “Bupati Cup” dan Kegiatan Isra Miraj di Kecamatan Jasinga)

Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Perusahaan melaksanakan program konservasi mangrove di kawasan Pantai Karangsong, Kab. Indramayu dan kawasan Bulaksetra, Kab. Pangandaran, Jawa Barat. Sejak tahun 2012, perusahaan telah melakukan penanaman mangrove jenis *Avicennia sp.*, *Rhizophora sp.*, *Bruguiera sp.* dan *Sonneratia sp.* di kawasan Karangsong 30.709 ribu dengan luas mencapai ± 9.5 Ha. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan LSM Siklus, masyarakat desa Karangsong, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indramayu, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Indramayu, Badan Lingkungan Hidup Kab. Indramayu serta Walhi Jabar. Program ini berhasil mengurangi abrasi di kawasan Pantai Utara Jawa Barat dengan menggunakan Alat Pemecah Ombak (APO) dari bambu dan ban bekas berasal dari sumbangan karyawan perusahaan telah mencapai sepanjang 860 m untuk menahan laju dan mengurangi arus ombak laut.

Berdasarkan hasil monitoring terakhir di 2016 oleh PPSDAL-UNPAD, Indeks Diversitas Zooplankton dan Benthos masing-masing sebesar 2,243 dan 1,654. Hal ini menunjukkan bahwa revegetasi mangrove yang dilakukan oleh Bio Farma, berdampak positif baik secara ekologis dalam menginisiasi terbentuknya ekosistem perairan laut (payau) maupun secara ekonomis meningkatkan hasil budidaya tambak masyarakat.

Pada tahun 2013, perusahaan menambah area lahan Konservasi Mangrove di Kawasan Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat pada kawasan Bulaksetra, Kab. Pangandaran. Kawasan ini dikembangkan bukan hanya menjadi kawasan konservasi mangrove

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

tapi juga menjadi kawasan ekowisata pendekatan ekosistem hutan mangrove. Untuk pelaksanaan program ini perusahaan bekerjasama dengan HPA Ilalang dan masyarakat sekitar kawasan Bulaksetra. Dalam kerjasama selama ini perusahaan telah memberikan pelatihan konservasi mangrove, bantuan pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove dan penanaman mangrove sebanyak $\pm$ 17.600 ribu mangrove dengan luas mencapai $\pm$ 6,5 Ha.

Berdasarkan status keterancaman yang dikeluarkan oleh IUCN Red List, terdapat 73 hewan asli Indonesia yang berada dalam status keterancaman tertinggi yaitu status *Critically Endangered* (Kritis). Dengan status keterancaman tertinggi dan masuk ke dalam posisi yang terancam punah menjadikan hewan ini langka di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, perusahaan ikut serta berpartisipasi dalam program konservasi dan rehabilitasi fauna bekerjasama dengan PPSC Cikananga, Kab. Sukabumi. Dalam kurun waktu 5 tahun, program ini berhasil mengadopsi dan merehabilitasi sebanyak 304 ekor dari 15 spesies fauna. Selain itu, perusahaan telah berhasil mengembalikan sebanyak 18 ekor dari 6 species primata untuk dikembalikan ke habitat asal. Ada 2 species primata yang berhasil diadopsi, rehabilitasi dan kemudian di-release dengan status *Critically Endangered* (Kritis) dan 2 species primata merupakan fauna endemik khas Indonesia.

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Pengeluaran biaya untuk kegiatan pengembangan masyarakat melalui Program Bina Lingkungan selama tahun 2016 berjumlah Rp13.438.109.093 dengan rincian sbb:

Peningkatan kesehatan	Rp1.618.837.944
Pendidikan dan/atau pelatihan	Rp2.289.970.404
Pelestarian alam	Rp266.595.524
Pengembangan prasarana/ sarana umum	Rp2.361.912.714
Sarana ibadah	Rp2.261.906.500
Korban Bencana Alam	Rp354.984.717
Sosial Kemasyarakatan	Rp3.830.890.550
Bantuan Diklat & Promosi	Rp453.010.740
Jumlah	Rp13.438.109.093

Selain pendanaan berasal dari Program Bina Lingkungan, kegiatan pengembangan sosial dan kemasyarakatan juga dilaksanakan melalui Program CSR yang dianggarkan oleh perusahaan. Jumlahnya dalam tahun 2016 mencapai Rp 2.712.807.330 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan Sektor Kesehatan	Rp248.329.502
2. Bantuan Sektor Pendidikan	Rp1.842.073.398
3. Bantuan Sektor Ekonomi	Rp119.234.000
4. Bantuan Sektor Lingkungan Hidup	Rp503.170.430
Jumlah	Rp2.712.807.330

CSR – TANGGUNG JAWAB PADA
KOSUMEN

Tanggungjawab kepada konsumen dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen terintegrasi sesuai dengan persyaratan pelanggan dan persyaratan/peraturan yang tertuang dalam Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Praktek Manufaktur yang Baik (*Good Manufacturing Practices - GMP*) ASEAN, WHO GMP dan persyaratan produk yang tertuang dalam Seri Acuan dari WHO diantaranya Laporan Teknis (*Technical Report Series*), Praktik Laboratorium yang Baik (*Good Laboratory Practices - GLP*), Praktik Klinis yang Baik (*Good Clinical Practices - GCP*), Praktik Distribusi yang Baik (*Good Distribution Practices - GDP*), sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja karyawan (OHSAS 18001), Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance - GCG*), Manajemen Risiko Perusahaan (*Corporate Risk Management - CRM*), ISO 17205 khusus untuk laboratorium pengujian di Divisi Imunisasi dan Klinik, serta sistem dan regulasi lain yang terkait dengan perbaikan kinerja Bio Farma.

LULUS UJI BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN (BPOM)

Di dalam tahapan proses formulasi pembuatan produk, kami juga menerapkan pengawasan di tengah proses (*inprocess control*). Sebelum dipasarkan, produk akhir kami diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk yang ada



di masyarakat adalah produk yang telah lulus uji BPOM, memenuhi standar mutu dan sesuai dengan spesifikasi Nasional dan Internasional. Pelanggan kami akan selalu memperoleh data akurat perihal informasi produk yang diterimanya karena data-data yang tersaji terkait produk merupakan data yang telah mendapatkan persetujuan dari BPOM dan WHO. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi produk pada laman situs Perusahaan yang dapat diakses kapanpun. Informasi lain yang terkait kesehatan dapat didiskusikan secara langsung melalui media sosial yang dikelola oleh karyawan yang kompeten di bidangnya.

LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

Bio Farma menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk menindaklanjuti setiap keluhan atau pengaduan konsumen. Bio Farma terus melakukan sosialisasi melalui distributor, dokter dan petugas kesehatan untuk memanfaatkan mekanisme pelaporan KIPI sehingga apabila terjadi, tim independen yang telah ditunjuk akan bergerak untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen tersebut, sehingga segala keluhan dapat segera diatasi. Selama tahun 2016 Bio Farma tidak pernah menerima komplain atau keluhan mengenai pelanggaran dalam menyediakan informasi produk maupun pelanggaran kekeluasaan pribadi.

AKSES KOMUNIKASI KONSUMEN

Bio Farma menyediakan akses komunikasi melalui saluran-saluran komunikasi berikut: Bio Farma melakukan pertemuan dan berbagi informasi (*sharing*) secara rutin dengan pelanggan di berbagai daerah. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Subdit Imunisasi, Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, Promosi Kesehatan, serta berbagai organisasi terkait kesehatan antara lain Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi).

Hal ini ditujukan demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit melalui vaksin untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pertemuan ini juga berguna untuk para Peserta yang hadir terdiri dari praktisi kesehatan, bidan, juru imunisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, penggerak posyandu serta masyarakat umum sebagai sarana edukasi terhadap pentingnya vaksin sebagai bagian dari pencegahan penyakit bagi masyarakat.

Bio Farma secara berkala melakukan kegiatan Temu Pelanggan di berbagai wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan tersebut kami mendapatkan umpan balik (*feedback*) berupa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin serta membantu pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Secara berkala, Bio Farma melakukan kegiatan pengumpulan informasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menyediakan informasi perkembangan kebutuhan, keinginan, harapan, preferensi, perilaku dan kepuasan pelanggan agar dapat digunakan untuk menetapkan dan merealisasikan kebijakan perusahaan, perbaikan berkesinambungan serta menyempurnakan kinerja sistem mutu Bio Farma.

Pelanggan memiliki peran besar, seperti halnya sumber-sumber lain yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kepuasan pelanggan. Agar survei kepuasan pelanggan mendapatkan data yang akurat, mekanisme pelaksanaannya diatur dalam suatu pedoman dan prosedur baku perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab Bagian Manajemen Produk (*Product Management Department*). Untuk hasil yang akurat dan menyeluruh, survei tersebut dilakukan oleh suatu lembaga independen dan melibatkan pelanggan nasional dan internasional.

LAPORAN KEUANGAN

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
dan Laporan Auditor Independen**

FINANCIAL STATEMENTS

***For The Years Then Ended December
31, 2016 and 2015
and Independent Auditors' Report***

PT. BIO FARMA (Persero)

Jl. Pasteur No. 28 Bandung 40161 Indonesia, PO. Box 1136, Telp. 022 2033755, Fax 022 2041306

email : mail@biofarma.co.id – [http : //www.biofarma.co.id](http://www.biofarma.co.id)



PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir

Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS

For The Years Then Ended December 31, 2016 and 2015

AND INDEPENDENT AUDITORS' *REPORT*

PT. BIO FARMA (Persero)

Jl. Pasteur No. 28 Bandung 40161 Indonesia, PO. Box 1136, Telp. 022 2033755, Fax 022 2041306

email : mail@biofarma.co.id – [http : //www.biofarma.co.id](http://www.biofarma.co.id)

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	6	<i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
DIRECTORS' STATEMENT LETTER RELATING TO
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENT**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 / for the Year Ended December 31, 2016 and 2015

PT. BIO FARMA (PERSERO)

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

We the undersigned :

1.	Nama Alamat kantor Alamat domisili/sesuai KTP atau identitas lain Nomor Telepon Jabatan	Iskandar Jl. Pasteur No.28 Bandung 40161, Jawa Barat Komplek Bio Farma No. 17 Bandung 40184 (022) 2033 755 Direktur Utama/President Director	Name 1. Office address Residential address/as stated in ID card or other identity card Phone Title
2.	Nama Alamat kantor Alamat domisili/sesuai KTP atau identitas lain Nomor Telepon Jabatan	Pramusti Indrascaryo Jl. Pasteur No.28 Bandung 40161, Jawa Barat Kav. Lestari II/63 RT/RW 012/007 Lebak Bulus, Cilandak – Jakarta (022) 2033 755 Dir. Keuangan/ Finance Director	Name 2. Office address Residential address/as stated in ID card or other identity card Phone Title

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;	1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;	2. The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian financial accounting standards;
a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;	a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan	b. The Company's financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan	3. We are responsible for the Company internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statement letter is made truthfully

Bandung, 24 Februari 2017 / Bandung, February 24, 2017

PT. BIO FARMA (Persero)

 Iskandar Direktur Utama / President Director	 Pramusti Indrascaryo Direktur Keuangan / Finance Director

PT. BIO FARMA (Persero)

Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161, Indonesia, P.O. Box 1136, Telp. 022-2033755, Fax. 022 2041306
e-mail : mail@biofarma.co.id - http : //www.biofarma.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 408/LAI.16.BF-5/DWR/2017

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Number : 408/LAI.16.BF-5/DWR/2017

Kepada Yth.,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bio Farma (Persero)

To :
The Shareholders, Board of Commissioners, and
Directors PT Bio Farma (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bio Farma (Persero), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)

Nomor : 408/LAI.16.BF-5/DWR/2017

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bio Farma (Persero) tanggal 31 Desember 2016 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami Nomor 061A/LAK.16.BF-5/DWR/2017 dan Nomor 061B/LAK.16.BF-5/DWR/2017 tanggal 24 Februari 2017.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (continued)

Number : 408/LAI.16.BF-5/DWR/2017

In making those assessments the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

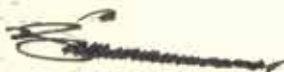
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bio Farma (Persero) as of December 31, 2016 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Report on the Company's compliance with laws and regulations and internal control

We have also tested the Company's compliance with certain laws and regulations and internal control. Compliance with laws and regulations and internal control are the responsibility of the management of the Company.

Our report relating to the compliance of the Company with laws and regulations and internal control are submitted separately to the Company's management in our reports Number 061A/LAK.16.BF-5/DWR/2017 and Number 061B/LAK.16.BF-5/DWR/2017 dated February 24, 2017.

Rekan/Partner,



Djoemarma Bede, CPA

Nomor Ijin Akuntan Publik: AP.0190/License of Public Accountant No. AP.0190

Bandung, 24 Februari 2017/February 24, 2017

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET	31 Desember 2016 December 31, 2016	Catatan/ Notes	31 Desember 2015 December 31, 2015	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	447.950.326.268	2.e., 2.g., 3	555.939.258.294	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp346.011.041 pada 31 Desember 2016, dan Rp312.622.025 pada 31 Desember 2015)	288.626.423.903	2.e., 2.f., 4	507.746.089.376	Trade Receivables (Net of provision for impairment of Rp346.011.041 on December 31, 2016, Rp312.622.025 on December 31, 2015)
Piutang Lain-Lain (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp1.302.637.458 pada 31 Desember 2016 dan 2015)	446.140.212	2.e., 2.f., 5	822.213.060	Other Receivables (Net of provision for impairment of Rp1.302.637.458 on December 31, 2016 dan 2015)
Persediaan (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp5.053.143.454 pada 31 Desember 2016 dan Rp5.891.672.358 pada 31 Desember 2015)	708.564.467.943	2.h., 6	462.557.268.255	Inventories (Net of provision for impairment of Rp5.053.143.454 on December 31, 2016, Rp5.891.672.358 on December 31, 2015)
Uang Muka	54.052.291.312	2.e., 2.f., 7	102.353.243.161	Advances
Pajak Dibayar Dimuka	298.816.989.377	2.m., 8.a.	242.720.019.469	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar Dimuka	12.136.509.861	2.k., 9	10.163.126.875	Prepaid Expenses
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	800.058.011	2.k., 10	1.591.887.435	Accrued Income
Aset Lancar Lainnya	38.162.196.231	11	111.887.970.120	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	1.849.555.403.118		1.995.781.076.044	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Pajak Tangguhan	23.585.022.896	2.m., 8.e.	22.086.828.515	Deferred Tax Assets
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp984.824.550.647 pada 31 Desember 2016, Rp845.014.518.670 pada 31 Desember 2015)	3.998.187.096.331	2.i., 12	3.605.537.013.968	Property, Plant and Equipment (Net of accumulated depreciation of Rp984.824.550.647 on December 31 2016, Rp845.014.518.670 on December 31, 2015)
Aset Takberwujud (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp18.918.302.793 pada 31 Desember 2016, Rp11.358.121.029 pada 31 Desember 2015)	38.633.597.058	2.j., 13	36.005.019.563	Intangible Assets (Net of accumulated amortization of Rp18.918.302.793 on December 31, 2016, Rp11.358.121.029 on December 31, 2015)
Aset Tidak Lancar Lainnya (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp3.869.122.375 pada 31 Desember 2016, Rp2.049.474.625 pada 31 Desember 2015)	12.493.203.788	14	21.253.299.538	Other Non-Current Assets (Net of accumulated amortization of Rp3.869.122.375 on December 31, 2016, Rp2.049.474.625 on December 31, 2015)
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.072.898.920.073		3.684.882.161.584	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET	5.922.454.323.191		5.680.663.237.628	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements taken as a whole

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2016 December 31, 2016	Catatan/ Notes	31 Desember 2015 December 31, 2015	LIABILITY AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Utang Usaha	259.234.466.062	2.f., 15	208.598.099.578	Trade Payables
Utang Pajak	47.624.361.238	2.m., 8.b.	46.518.287.182	Taxes Payable
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	113.405.208.247	2.e., 2.k., 16	170.307.683.566	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	44.130.371	2.e., 2.f., 17	898.715.051	Unearned Revenue
Liabilitas Lancar Lainnya	32.860.809.624	2.e., 18	30.340.629.712	Other Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	453.168.975.542		456.663.415.089	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Non Current Liabilities
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja	167.133.074.162	2.o., 19	152.021.928.119	Estimated Post-Employment Benefits Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya	-	20	27.846.382.388	Other Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	167.133.074.162		179.868.310.506	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	620.302.049.704		636.531.725.595	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham	2.000.000.000.000	21	1.650.000.000.000	Share Capital
Modal dasar 8.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2016 dan 5.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2015. Nominal Rp1.000.000 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2016 dan 1.650.000 lembar saham pada 31 Desember 2015				Authorized capital 8,000,000 shares on December 31, 2016 and 5,000,000 shares on December 31, 2015 par value Rp1.000.000 per share. Issued and fully paid 2,000,000 as on December 31, 2016, and 1,650,000 on December 31, 2015
Saldo Laba (Rugi)				Retained Earnings
Dicadangkan	899.824.236.342	22	816.422.044.549	Appropriated
Belum Dicadangkan	-	22	(2.483.699.452)	Unappropriated
Laba Periode Berjalan	501.040.990.083		670.592.891.245	Profit (Loss) for the year
Komponen Ekuitas Lainnya	1.901.287.047.062	34	1.909.600.275.690	Other Equity Components
JUMLAH EKUITAS	5.302.152.273.487		5.044.131.512.033	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.922.454.323.191		5.680.663.237.628	TOTAL LIABILITY AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements taken as a whole

PT BIO FARMA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
PENJUALAN BERSIH				NET SALES
Produk Perusahaan	2.222.314.909.863	2.k., 23	2.329.623.846.051	<i>The Company's Product</i>
Barang Dagangan	88.128.847.750	2.k., 24	11.435.935.050	<i>Merchandise Product</i>
Jasa	5.315.256.509	2.k., 25	4.858.488.851	<i>Services</i>
Jumlah Penjualan Bersih	2.315.759.014.122		2.345.918.269.952	Total Net Sales
BEBAN POKOK PENJUALAN				COST OF GOODS SOLD
Produk Perusahaan	(931.879.043.389)	2.k., 26	(852.361.076.333)	<i>The Company's Product</i>
Barang Dagangan	(68.453.563.181)	2.k., 27	(11.164.800.347)	<i>Merchandise Product</i>
Beban Jasa	(4.961.523.057)	2.k., 28	(3.961.990.073)	<i>Services</i>
Jumlah Beban Pokok Penjualan dan Jasa	(1.005.294.129.627)		(867.487.866.753)	Total Cost of Good and Services Sold
LABA (RUGI) KOTOR	1.310.464.884.495		1.478.430.403.199	GROSS PROFIT (LOSS)
Penghasilan Lain-lain	164.727.714.782	2.k., 2.o., 29	129.064.005.350	<i>Other Income</i>
Beban Administrasi dan Umum	(402.001.646.756)	2.k., 31	(421.759.427.184)	<i>General and Administrative Expenses</i>
Beban Penjualan	(133.996.397.992)	2.k., 30	(126.818.100.027)	<i>Selling Expense</i>
Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans	(114.481.354.438)	2.l., 32	(93.442.569.518)	<i>Research, Developments and Surveillance Expenses</i>
Beban Lain-Lain	(139.745.154.390)	2.l., 35	(66.200.735.869)	<i>Other Expenses</i>
Jumlah	(625.496.838.794)		(579.156.827.247)	<i>Total</i>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	684.968.045.701		899.273.575.951	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Pajak Kini	(185.425.250.000)	2.m., 9	(232.893.457.000)	<i>Current Tax</i>
Pajak Tangguhan	1.498.194.382	2.m., 9	4.212.772.294	<i>Deferred Tax</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(183.927.055.618)		(228.680.684.706)	<i>Total Tax Expenses</i>
LABA (RUGI) BERSIH	501.040.990.083		670.592.891.245	NET PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		34		OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi				Items not to be reclassified to profit or loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap	-		1.980.781.821.592	<i>Surplus from asset revaluation</i>
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	(8.313.228.628)		(828.225.876)	<i>Actuarial Gain (Loss)</i>
Pos Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi				Items to be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(8.313.228.628)		1.979.953.595.716	Total Other Comprehensive Income For
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	492.727.761.455		2.650.546.486.961	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements taken as a whole

PT BIO FARMA (PERSERO)

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

For the Years Ended December 31, 2016 and 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan	Saldo Laba / Retained Earnings		Komponen		Jumlah Ekuitas / Total Equity	Description
	Modal Saham / Share Capital	Dicadangkan / Appropriated	Belum Dicadangkan / Unappropriated	Ekuitas Lain / Other Equity		
Saldo awal per 1 Januari 2015	1.250.000.000.000	786.074.860.369	577.590.042.383	(69.976.027.177)	2.543.688.875.576	Beginning balance as of January 1, 2015
Pembagian laba						Distribution of income
Dividen			(145.015.000.000)		(145.015.000.000)	Dividend
Cadangan		435.058.741.834	(435.058.741.834)		-	Appropriated
Bina Lingkungan		(4.711.557.655)			(4.711.557.655)	Community development
Kapitalisasi cadangan						Capitalization of appropriated
ke setoran modal	400.000.000.000	(400.000.000.000)			-	earnings to share capital
Penghasilan komprehensif lain				1.979.953.595.716	1.979.953.595.716	Other comprehensive income
Keuntungan belum direalisasi atas kepemilikan				(377.292.849)	(377.292.849)	Unrealized gain on
efek tersedia untuk dijual					-	available for sale securities
Laba (Rugi) tahun 2015			670.592.891.245		670.592.891.245	Profit (Loss) for the year 2015
Saldo akhir per 31 Desember 2015	1.650.000.000.000	816.422.044.549	668.109.191.794	1.909.600.275.690	5.044.131.512.033	Ending balance as of December 31, 2015
Saldo awal per 1 Januari 2016	1.650.000.000.000	816.422.044.549	668.109.191.794	1.909.600.275.690	5.044.131.512.033	Beginning balance as of January 1, 2016
Pembagian laba						Distribution of income
Dividen			(234.707.000.000)		(234.707.000.000)	Dividend
Cadangan		435.885.891.245	(435.885.891.245)		-	Appropriated
Kapitalisasi cadangan						Capitalization of appropriated
ke setoran modal	350.000.000.000	(350.000.000.000)			-	earnings to share capital
Penghasilan komprehensif lain				(8.313.228.628)	(8.313.228.628)	Other comprehensive income
Konversi Cadangan						Conversion of implementation of PSAK 24
Akibat Penerapan PSAK 24						(Revised 2013) "Employee Benefits" to
Tahun 2015		(2.483.699.451)	2.483.699.451		-	appropriated earning
Laba (Rugi) tahun 2016			501.040.990.083		501.040.990.083	Profit (Loss) for the year 2016
Saldo akhir per 31 Desember 2016	2.000.000.000.000	899.824.236.342	501.040.990.083	1.901.287.047.062	5.302.152.273.487	Ending balance as of December 31, 2016

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements taken as a whole

PT BIO FARMA (PERSERO)

PT BIO FARMA (PERSERO)

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASHFLOWS

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

For the Years Ended December 31, 2016 and 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASHFLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	2.334.948.019.707	2.106.477.757.097	Cash received from customers
Penerimaan pajak (restitusi)	124.792.315.311	28.875.864.464	Tax refund
Penerimaan bunga	7.960.352.308	37.422.478.103	Interest receipts
Pembayaran bunga	(9.342.500.000)	-	Interest Payment
Penerimaan hibah/donasi WHO	13.588.013.999	800.000.000	Cash received from grant/WHO's donation
Penerimaan (Pembayaran) lainnya - bersih	1.238.151.952	(23.773.912.439)	Other receipts (payments) - net
Pembayaran tantiem	(14.750.000.000)	(13.736.823.371)	Payment of tantiem
Pembayaran pajak	(391.829.178.802)	(326.409.408.708)	Payment for taxes
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.519.679.069.057)	(1.584.190.616.971)	Cash paid to suppliers and employees
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	546.926.105.418	225.465.338.176	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASHFLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian aset tetap	(393.169.903.706)	(535.174.882.134)	Purchase of property, plant and equipment
Efek tersedia untuk dijual	-	25.000.000.000	available for sale securities
Pembayaran untuk aset takberwujud	(11.172.646.329)	(3.962.389.925)	Payment for intangible assets
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(404.342.550.035)	(514.137.272.059)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASHFLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek	235.000.000.000		Short Term Loans Received
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek	(235.000.000.000)		Payments of Short Term Loans
Pembayaran dividen	(234.707.000.000)	(145.015.000.000)	Payment of dividend
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	(4.711.557.655)	Payment for Partnership and Development Program
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(234.707.000.000)	(149.726.557.655)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(92.123.444.617)	(438.398.491.538)	Net Increase (Decrease) in Cash
Pengaruh Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	(15.865.487.408)	22.620.703.832	Effect of Foreign Exchange Rate Changes
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	555.939.258.294	971.717.046.000	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	447.950.326.268	555.939.258.294	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements taken as a whole

1. UMUM**a. Pendirian Perusahaan**

PT Bio Farma (Persero) ("Perusahaan"), pada awalnya bernama "Parc Vaccinogene" yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda No. 14 tanggal 6 Agustus 1890. Mulai tahun 1955, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 14 tahun 1955 Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pasteur. Pada tahun 1961, Perusahaan berubah menjadi PN Bio Farma berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Bio Farma. Sesuai Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara, status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian dan Anggaran Dasar atas perubahan bentuk Perusahaan tersebut telah dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 3 Februari 1997, Akta No. 188 tanggal 20 Juni 1997, dan Akta No. 30 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat oleh notaris Muhani Salim, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 tanggal 5 Maret 1998 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Juli 2002 No. 57 Tambahan No. 6884. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 34 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat oleh notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), serta sebagaimana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0109923 tanggal 21 Desember 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero).

b. Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan pemasaran produk biologi, produk farmasi dan alat kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

1. GENERAL**a. The Company's Establishment**

PT Bio Farma (Persero) ("the Company"), formerly "Parc Vaccinogene", was established based on Decree No.14 dated August 6, 1890 of the Governor of Netherlands Indies. In 1955, under Emergency Law No.14 year 1955, the legal status of the Company was changed to a state-owned company named Perusahaan Negara (PN) Pasteur. In 1961, based on the Government Regulation No.80 year 1961, the Company's name changed to PN Bio Farma. Later in 1978, based on the Government Regulation No. 26 year 1978 regarding the Transformation of the State-Owned Company (PN) Bio Farma, the Company status was changed to a Public Company (Perum).

Based on Government Regulation No. 1 year 1997 regarding the Transformation status of Bio Farma as a Government Company (Perum) was changed into a state-owned Limited Liability Corporation (Persero). The Article of Association of the Company's transformation was stated in notarial deed No.1 dated February 3, 1997, No.188 dated June 20, 1997, and No.30 dated October 21, 1997 of Muhani Salim, S.H., Notary. It has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C2-1423 HT.01.01.Th.98 dated March 5, 1998, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 Supplement No. 6884 dated July 16, 2002. The Company's Articles of Association has been amended several times, the most recent amendment was made through notarial deed No. 34 dated December 14, 2016 of Fathiah Helmi, S.H., Notary, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0024481.AH.01.02 dated December 21, 2016, regarding the Approval of Amendment of the State-Owned Limited Liability Corporation of PT Bio Farma (Persero), as received and recorded in Legal Entity Administration System based on the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0109923 dated on December 21, 2016 Regarding Receipt of Article of Association Amendment Notice of PT Bio Farma (Persero).

b. The Company's Objective

According to the Company's Articles of Association, the Company's objectives are to make the efforts in research, development, production, and marketing of biological products, pharmaceutical products, and medical equipments, and optimization of the Company's resources to produce high quality and strong competitive products and services to seek profits that enhance the Company's value by applying the principles of the Limited Liability Corporation.

1. UMUM (lanjutan)**b. Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan (lanjutan)**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- a. Penelitian dan pengembangan produk biologi dan farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- b. Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain;
- c. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik;
- e. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada huruf a,b, c, dan d.

Sifat usaha Perusahaan adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan global, sebagai berikut :

- a. Pasar Pemerintah, yaitu melayani kebutuhan Pemerintah untuk program imunisasi dasar/reguler yaitu Vaksin BCG, DT, TT, Polio, Campak, Hepatitis B, Td dan Vaksin DTP-HB-Hib.
- b. Pasar swasta nasional, yaitu melayani para distributor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin diluar program imunisasi rutin Pemerintah yaitu vaksin BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Campak, Polio, Hepatitis B, PentaBio, anti sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia), PPD 2 TU.
- c. Pasar internasional, terutama untuk melayani kebutuhan UNICEF dan institusi lain yang telah melakukan kerjasama bilateral. Vaksin yang digunakan merupakan vaksin yang telah memenuhi prakualifikasi WHO baik dalam bentuk produk jadi maupun bulk, yaitu vaksin TT, Td, BioTT, DTP, Polio, Campak, Pentabio, *bulk* Polio, *bulk* Difteri, *bulk* Pertusis, dan *bulk* Tetanus.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2016/
December 31, 2016**

Dewan Komisaris

Komisaris Utama ¹⁾	: Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, MH
Komisaris ²⁾	: Drs. Paruli Lubis, MBA
Komisaris ⁵⁾	: Dr. H. Mohamad Subuh
Komisaris ³⁾	: dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)
Komisaris ⁴⁾	: Ihsan Setiadi Latief, M.Si
Komisaris ¹⁾	: dr. Heridadi, M.Sc

Komisaris Independen ⁵⁾

: Drs. Paruli Lubis, MBA
: dr. Heridadi, M.Sc

1. GENERAL (continued)**b. The Company's Objective (continued)**

To achieve the objectives mentioned above, the Company performs major activities as follows:

- a. Research and development of biological and pharmaceutical products, both performed by the Company itself and by cooperation with other parties;
- b. Production of biological and pharmaceutical products, both from the Company's own production and from cooperation with other parties;
- c. Marketing, trading and distribution of biological and pharmaceutical products and medical equipments including general products, for domestics and international markets;
- d. Health care laboratory and clinic services;
- e. Providing services related to a, b, c, and d activities.

The nature of the Company is to serve domestic and global market needs as follows:

- a. Government market, provides the Government with BCG, DPT, DT, TT, polio, measles, hepatitis B, Td and DTP-HB-Hib vaccines for basic/regular immunization programs.
- b. National private market, provides domestic distributors with BCG, BioTd, BioTT, FluBio, Measles, Polio, Hepatitis B, Pentabio, anti-sera (BioSAT, BioADS, BioSAVE, ABU II (Australia) and PPD2TU vaccines for non-regular Government immunization programs.
- c. International markets, provides particularly the need of UNICEF and other parties who have bilateral cooperation with the Company, with TT, Td, BioTT, DTP, Polio, Measles, Pentabio, Polio bulk, Diphtheria bulk, Pertusis bulk, and Tetanus bulk vaccines. The vaccines are those that meet the pre-qualification of the WHO, both in finished products and bulk.

c. Boards of Commissioners, Directors, Committees, and Employees

The Company's Board of Commissioners, Directors and Committees as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

**31 Desember 2015/
December 31, 2015**

Prof. Dr. Ahmad Ramli, SH, MH
Drs. Paruli Lubis, MBA
Herman Ladjidja Djuni, ST
dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)
Ihsan Setiadi Latief, M.Si
dr. Heridadi, M.Sc

Board of Commissioners

President Commissioner ¹⁾
Commissioner ²⁾
Commissioner ⁵⁾
Commissioner ³⁾
Commissioner ⁴⁾
Commissioner ¹⁾

Independent Commissioners ⁵⁾

Drs. Paruli Lubis, MBA
dr. Heridadi, M.Sc

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan (lanjutan)

31 Desember 2016/
December 31, 2016**Direksi**⁶⁾

Direktur Utama	: Drs. Iskandar, Apt. MM
Direktur Pemasaran	: Drs. Mahendra Suhardono, Apt. MM
Direktur Produksi	: Drs. Juliman, MM
Direktur Keuangan	: Drs. Pramusti Indrascaryo, MM
Direktur Perencanaan dan Pengembangan	: Drh. Sugeng Raharso, MM
Direktur Sumber Daya Manusia	: Drs. Andjang Kusumah, MM

Komite Audit⁹⁾

Ketua	: Drs. Paruli Lubis, MBA
Wakil Ketua	: Ihsan Setiadi Latief, M.Si
Anggota	: Drs. Abu Bakar Ak, CA
Anggota ⁸⁾	: Drs. Asawir Harahap Ak, CA

Komite Pengembangan, Risiko dan GCG⁹⁾

Ketua	: dr. Heridadi, M.Sc
Wakil Ketua I	: dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)
Wakil Ketua II	: Dr. H. Mohamad Subuh
Anggota	: dr. Judi Jaenudin Endjun Sp. OG
Anggota	: Afrizal, SE.Msi.Ak

- ¹⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-17/MBU/2014 tanggal 23 Januari 2014.
- ²⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP 392/MBU/2012, tanggal 5 November 2012
- ³⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-204/MBU/2012 tanggal 28 Mei 2012.
- ⁴⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK 235/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- ⁵⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-97/MBU/2015 tanggal 22 Juni 2015.
- ⁶⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-221/MBU/2013 tanggal 12 April 2013.
- ⁷⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK 116/MBU/2012 tanggal 7 Maret 2012.
- ⁸⁾ Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/BF/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014.
- ⁹⁾ Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-03/DK/BF/02/2016, tanggal 4 Februari 2016.

Susunan Direksi Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 86 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17236 tanggal 3 Mei 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero).

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners, Directors, Committees, and Employees (continued)

31 Desember 2015/
December 31, 2015**Board of Directors**⁶⁾

Drs. Iskandar, Apt. MM	President Director
Drs. Mahendra Suhardono, Apt. MM	Director of Marketing
Drs. Juliman, MM	Director of Production
Drs. Pramusti Indrascaryo, MM	Director of Finance
Drh. Sugeng Raharso, MM	Director of Planning and Development
Drs. Andjang Kusumah, MM	Director of Human Resource Development

Audit Committee⁹⁾

Drs. Paruli Lubis, MBA	Chairman
Herman Ladjidja Djuni, ST	Vice Chairman
Drs. Abu Bakar Ak, CA	Member
Drs. Asawir Harahap Ak, CA	Member ⁸⁾

Committee of Development, Risk, and GCG⁹⁾

dr. Heridadi, M.Sc	Chairman
dr. Nizar Yamani, Sp.S (K)	Vice Chairman
Ihsan Setiadi Latief, M.Si	Vice Chairman II
Dadang Epi Sukarsa, SH., MH	Member
Afrizal, SE.Msi.Ak	Member

- ¹⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-17/MBU/2014 dated January 23, 2014.
- ²⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No.KEP- 392/MBU/2012 dated November 5, 2012.
- ³⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 204/MBU/2012 dated May 28, 2012.
- ⁴⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 235/MBU/2013 dated Mei 1, 2013.
- ⁵⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 97/MBU/2015 dated June 22, 2015.
- ⁶⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 221/MBU/2013 dated April 12, 2013.
- ⁷⁾ Based on Decision Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 116/MBU/2013 dated March 7, 2012.
- ⁸⁾ Based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-15/DK/BF/VII/2014 dated July 1, 2014.
- ⁹⁾ Based on Decision Letter of the Board of Commissioners No. KEP-03/DK/BF/02/2016 dated February 4, 2016.

The last Company's Board of Directors is based on Notary Deed No. 86 dated April 26, 2013 of Fathiah Helmi, SH, Notary, and has been accepted and recorded in database system of Legal Entity Administration at the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, according to letter of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia No. AHU-AH.01.10-17236 dated May 3, 2013 regarding the Notification of Data Change of PT Bio Farma (Persero).

1. UMUM (Lanjutan)**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Karyawan (lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0949789 tanggal 9 Juli 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bio Farma (Persero).

Pada 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing 1.171 dan 1.127 karyawan.

d. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perincian gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut:

	2016
Dewan Komisaris	12.754.354.575
Direksi	29.612.080.261
Jumlah	42.366.434.836

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan PT Bio Farma (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratannya.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historical cost method*), kecuali beberapa akun tertentu menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akrual (*accrual basis*), kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Pada tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan penyesuaian dan amandemen atas beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta mengesahkan Standar dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang relevan dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 4 "Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas Dalam Laporan Keuangan Tersendiri".

1. GENERAL (continued)**c. Boards of Commissioners, Directors, Committees, and Employees (continued)**

The last Company's Board of Commissioners is based on Notary Deed Number 12, dated July 9, 2015 of Fathiah Helmi, SH, Notary, and has been accepted and recorded in database system of Legal Entity Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia according to letter of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0949789 dated July 9, 2015, regarding the Notification of Data Change of PT Bio Farma (Persero).

As of December 31, 2016 and 2015 the Company had 1.171 and 1.127 employees, respectively.

d. Remuneration of Board of Commissioners and Directors

The details of salaries and allowances of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 2016 and 2015 are as follows:

	2015	
	13.244.952.004	Board of Commissioners
	33.083.093.971	Directors
	46.328.045.975	

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES**a. Statement of Compliance**

The financial statements of PT Bio Farma (Persero) for the year ended December 31, 2016 and 2015 have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia and have met all its requirements.

b. Basis for Preparation of the Financial Statements

The measurement basis in preparing the financial statements is the historical cost method, except for several accounts which use other measurement basis as explained in the accounting policies applied for those accounts. The financial statements, except for statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Amendments and Improvements of PSAKs and ISAKs

In 2015, the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK IAI) has issued the improvement and amendment on several PSAKs, as well as issued a new ISAK which is relevant and effective for the period started from or after January 1, 2016, as follows:

- Amendment PSAK 4 "Separate Financial Statements regarding the Equity Method in Separate Financial Statements".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).**

- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode Yang Diterima Untuk Penyusutan dan Amortisasi".
- Amandemen PSAK 19 "Aset Takberwujud tentang Metode Yang Diterima Untuk Penyusutan dan Amortisasi".
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja tentang Program Iuran Pasti : Iuran Pekerja".
- PSAK 5 (Penyesuaian 2015) "Segmen Operasi".
- PSAK 7 (Penyesuaian 2015) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015) "Properti Investasi".
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015) "Aset Tetap".

- PSAK 19 (Penyesuaian 2015) "Aset Takberwujud".
- PSAK 13 (Penyesuaian 2015) "Properti Investasi."
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan."
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015) "Pengukuran Nilai Wajar."

Penerapan standar-standar tersebut tidak mempunyai pengaruh material terhadap jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan.

Amandemen dan penyesuaian standar dan interpretasi baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan."
- ISAK 31 Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi."
- Amandemen PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi : Penerapan Pengecualian Konsolidasi."
- PSAK 69 "Agrikultur" (berlaku efektif 1 Januari 2018)

Perusahaan sedang mengevaluasi penerapan standar-standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

d. Penentuan Tingkat Materialitas Suatu Pos

Berdasarkan SM-S15 Pedoman Akuntansi Keuangan sebagai ukuran objektif, suatu akun dinyatakan material dan karenanya harus disajikan tersendiri di dalam laporan keuangan jika:

- 5 % dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset;
- 5 % dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban;
- 5 % dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas;
- 10 % dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi; dan
- 10 % dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**c. Amendments and Improvements of PSAKs and ISAKs**

- Amendment PSAK 16 "Property, Plant, and Equipment regarding the Clarification of the Acceptable Methods of Depreciation and Amortization".
- Amendment PSAK 19 "Intangible Assets regarding the Clarification of the Acceptable Methods of Depreciation and Amortization".
- Amendment PSAK 24 "Employee Benefits regarding the Contribution Benefit Plans: Contribution from Employees".
- PSAK 5 (Improvement 2015) "Operating Segments"
- PSAK 7 (Improvement 2015) "Disclosures of Related Parties".
- PSAK 13 (Improvement 2015) "Investment Property."
- PSAK 16 (Improvement 2015) "Property, Plant and Equipment".

- PSAK 19 (Improvement 2015) "Intangible Assets."
- PSAK 13 (Improvement 2015) "Investment Property."
- PSAK 25 (Improvement 2015) "Accounting Policies, Change in Accounting Estimates."
- PSAK 68 (Improvement 2015) "Fair Value Measurement."

The implementation of these standards did not have a material effect to the amounts and disclosures in the Company financial statements.

Improvements and Amendments of standard and new interpretation that will be effective for the period started from or after January 1, 2017 and 2018:

- Amendment PSAK 1 "Presentation of Financial Statements Disclosures About Initiative"
- ISAK 31 Interpretation of the Scope of PSAK 13 "Investment Property."
- Amendment PSAK 65 "Consolidated Financial Statements of Investment Entities: Application of Consolidation Exception."

PSAK 69 "Agriculture." (will be effective january 1, 2018)

The Company is evaluating the implementation of accounting standards and has not determined the impact on the financial statements.

d. Determination of Materiality Level

Based on SM-S15 Financial Accounting Guide as the objective measurement, an account is considered material and, therefore, is presented separately in the financial statements if

- 5% of total assets for asset accounts;
- 5% of total liabilities for liability accounts;
- 5% of total equity for equity accounts;
- 10% of revenues for profit and loss accounts; and
- 10% of income before taxes for the effect of an event or transaction.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah. Transactions involving foreign currencies are translated to Rupiah at the rates of exchange prevailing at the transaction date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut, sebagai berikut :

	31 Desember 2016
Dollar Amerika Serikat (USD)	13.436,00
EURO (EUR)	14.161,55
Dollar Singapore (SGD)	9.298,92
Dollar Australia (AUD)	9.724,31
Yen Jepang (JPY)	115,40
Poundsterling Inggris (GBP)	16.507,51
Danish Krone Denmark (DKK)	1.905,09
Frank Swiss (CHF)	13.177,76

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjabaran aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan.

f. Aset dan Liabilitas Keuangan**Aset Keuangan**

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali telah ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)

At the end of the financial reporting period, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah by using the prevailing Bank Indonesia middle rate on such date, as follows:

	31 Desember 2015	
	13.795,00	United States Dollar (USD)
	15.069,67	EURO (EUR)
	9.751,19	Singapore Dollar (SGD)
	10.064,16	Dollar Australia (AUD)
	114,52	Japan Yen (JPY)
	20.451,11	Poundsterling (GBP)
	2.019,32	Danish Krone Denmark (DKK)
	13.951,29	Frank Swiss (CHF)

Gains or losses arising from transactions of monetary assets and liabilities denominated in foreign exchange currencies are presented in the current year's statement of comprehensive income.

f. Financial Assets and Liabilities**Financial Assets**

Financial assets are classified into 4 categories: (i) financial assets measured at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets, and (iv) available-for-sale financial assets. This classification depends on the purpose of acquisition of the financial assets at initial recognition.

- (i) Financial assets measured at fair value through statement of profit or loss

Financial assets measured at fair value through statement of profit or loss are financial assets which are held for trading. A financial asset is classified as trading if it obtained particularly for the purpose of selling or repurchasing it in the near term, and for which there is evidence of recent actual pattern of short-term profit taking. Gains or Losses arising from changes in fair value are recognized in the statement of profit or loss. Derivatives are also categorized as held-for-trading, unless they are designated and effective as hedging instruments.

As of December 31, 2016, the Company has no financial asset classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

- (ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**f. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****Aset Keuangan (lanjutan)**

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Pencatatan atas penyisihan piutang ragu-ragu dilakukan pada setiap triwulan. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha dan Piutang Lain-Lain.

(iii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, selain:

- (a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- (b) Investasi yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- (c) Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

(iv) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki selama periode yang tidak ditentukan, dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas, atau perubahan suku bunga, valuta asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar diakui sebagai pendapatan (beban) komprehensif lain dan disajikan tersendiri pada bagian ekuitas hingga terealisasi, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dibawah nilai perolehan yang bersifat non-temporer dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**f. Financial Assets and Liabilities (continued)****Financial Assets (continued)**

Provision for impairment of receivables is determined based on management's estimate to collected level of the receivable balances. This provision is recorded on a quarterly basis. Receivables are written off in the period when they are determined to be uncollectable.

As of December 31, 2016, the Company's financial assets that are classified as loans and receivables consist of cash and cash equivalent, accounts receivables, and other receivables.

(iii) Held-to-maturity

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company's management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- (a) investments which are designated as financial assets measured at fair value through profit or loss at initial recognition;*
- (b) investments that are designated as available for sale category; and*
- (c) investments that meet the definition of loans and receivables.*

At the time of initial recognition, held-to-maturity investments are recognized at fair value plus transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

As of December 31, 2016, the Company has no financial asset classified as held-to-maturity.

(iv) Available for sale

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for indefinite period of time, which might be sold in response to liquidity needs or changes in interest rates or foreign exchanges, or which are not classified as loans or receivables, investments that are classified as held to maturity, or financial assets that measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, available for sale of financial assets are recognized at fair value plus transaction costs, and subsequently measured at fair value.

Gains or losses arising from changes in fair value are recognized as other comprehensive income (expense) and presented separately as part of equity until realized, except for impairment losses below the acquisition cost of a non-temporary and gains or losses arising from changes in exchange rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**f. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pada 31 Desember 2016, tidak ada aset keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori :

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada tahun 2016 dan 2015 Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tahun 2016 dan 2015, Perusahaan mempunyai utang usaha, biaya masih harus dibayar, dan liabilitas lancar lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian (*quoted price*) pada tanggal pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu yang meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi nilai wajar instrumen keuangan lainnya yang serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**f. Financial Assets and Liabilities (continued)**

As of December 2016, the Company has no financial asset classified as available for sale.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in categories of :

- (i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. Financial liabilities are classified as held for trading if acquired particularly for the purpose of selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a pattern of short-term profit taking. Derivatives are classified as liabilities for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

In 2016 and 2015, the Company has no financial liabilities measured at fair value through statement of profit or loss.

- (ii) Financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss fall into this category and measured at amortized cost using the effective interest rate method.

In 2016 and 2015, the Company has trade payables, accrued expenses and other current liabilities are classified as financial liabilities at amortized cost.

Estimation of Fair Value

Fair value of financial instruments that are traded in active markets is determined based on quoted market price at the reporting date.

Fair value of financial instruments that are not traded in active markets is determined using appropriate valuation techniques such as current fair market transactions, reference to fair value of other financial instruments that are substantially similar, and a discounted cash flow analysis or other valuation models.

Termination of Recognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive cash flows from these assets have ceased, or when the assets have transferred and substantially all risks and benefits of the ownership of the assets are transferred. If, all the risks and benefits have not substantially transferred, the Company conducts an evaluation to ensure the ongoing involvement of the existing controls does not prevent the termination of recognition. Financial liabilities are derecognized when redeemed or expired.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**f. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****Penurunan Nilai dari Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai diakui jika, dan hanya jika, terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai terjadi sebagai akibat dari adanya peristiwa merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut. Peristiwa yang merugikan tersebut dapat diestimasi secara handal dan berdampak negatif pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang bersangkutan.

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi penurunan nilainya diukur dari selisih antara nilai tercatat dan nilai kini estimasi arus kas di masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

g. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, sesuai dengan PSAK No.7 (Penyesuaian 2015).

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri BUMN yang merupakan pemegang saham Perusahaan, dan BUMN lain yang memiliki hubungan afiliasi melalui Penyertaan Modal Pemerintah.
- Perusahaan menempatkan dana atau memiliki pinjaman dana pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN/D dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Mempunyai anggota pengurus (komisaris dan direksi) yang sama dengan Entitas Anak.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha dengan BUMN lain maupun Entitas Anak BUMN serta badan/lembaga-lembaga Pemerintah.

h. Persediaan**1. Penilaian Persediaan**

Nilai persediaan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan sebesar yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak atau rata-rata sederhana bergantung pada jenis persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual persediaan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**f. Financial Assets and Liabilities (continued)****Impairment of Financial Assets**

At each reporting date, the Company evaluates whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired. A financial asset is impaired and an impairment loss is recognized if, and only if, there is any objective evidence that the impairment occurred as the result of one or more loss events occurred after the initial recognition. The loss events can be estimated reliably and have adverse impact on estimated future cash flows for the financial assets.

Impairment of a financial asset carried at amortized cost is measured as the difference between its carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate.

g. Transactions with Related Parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related party is a person or entity related to the entity that is preparing its financial statements in accordance with PSAK 7 (Improvement 2015).

The nature of the relationship with related parties are as follows:

- Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister for State-Owned Enterprises as the shareholder of the Company, and other state-owned Companies that have affiliated relationships through government investments.
- The Company invests its funds at or has loans from banks owned by the government or state/provincial-owned companies with normal terms and interest rates as applicable to third party customers.
- The Company has same board members (commissioners or directors) as its subsidiaries.
- The Company entered into business agreements with other state-owned entities or their subsidiaries, and Government institutions or agencies.

h. Inventories**1. Inventory valuation**

Inventory value stated in the financial position statement is lower between cost and net realizable value. Inventory cost is determined by the method of moving average or simple average depend on the type of inventory. Net realizable value is the estimated selling price of inventory in the ordinary business activities less the estimated costs to make and completes the sale of inventories.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**h. Persediaan (lanjutan)****2. Biaya Perolehan Persediaan**

Biaya perolehan *persediaan* meliputi harga beli, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (*present location and condition*), kecuali untuk persediaan produk dalam proses dicatat sebesar persentase beban pokok barang dalam proses terhadap beban pokok barang jadi, yaitu :

- Produk dalam proses untuk barang curah (*bulk*) penilaiannya disamakan antara yang akan diformulasi menjadi produk akhir atau yang akan dijual.
- Produk dalam proses untuk produk akhir dilakukan berdasarkan rata-rata beban pokok produksi (HPP) tanpa bahan kemasan terhadap HPP Vaksin terapan dikurangi persentase produk *reject* saat dikemas, sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Direksi No.07841/DIR/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010.

3. Persediaan Bahan Baku, Penolong dan Perlengkapan

Persediaan bahan baku, penolong dan perlengkapan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average method*).

4. Persediaan Produk Dalam Proses

Biaya persediaan produk dalam proses dihitung setiap triwulan berdasarkan beban pokok produksi terapan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana.

Persediaan produk dalam proses terdiri dari :

- *Bulk* hasil produksi yang telah lulus uji (*quality control*) dengan kondisi siap untuk diformulasi menjadi produk akhir dan siap untuk dijual sebelum dilakukan pengemasan.
- Produk akhir hasil produksi yang telah dikemas dalam wadah (botol/ampul/vial/ *uniject blank*) dan telah lulus uji (*quality control*) sebelum diberi etiket, *leaflet* dan dimasukkan ke dalam dus.

5. Persediaan Produk Jadi

Persediaan produk jadi terdiri dari persediaan produk perusahaan dan persediaan barang dagangan. Biaya persediaan produk Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana, sedangkan biaya persediaan barang dagangan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak.

6. Persediaan Dalam Perjalanan

Persediaan dalam perjalanan adalah persediaan bahan baku/bahan penolong/perlengkapan/barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima/tiba di pelabuhan dan sesuai syarat penyerahan barang sudah menjadi milik Perusahaan. Khusus untuk barang yang berasal dari impor dibuat Nota Perhitungan Barang Impor (NPI) sementara sebagai dasar mencatat nilai "Persediaan dalam Perjalanan".

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**h. Inventories (continued)****2. Cost of Inventory**

Cost of the inventories, which includes such purchase price, the VAT that cannot be credited, conversion costs, and other costs incurred in bringing inventories to present location and conditions, except for inventories of products in process which are recorded at the percentage of cost of goods in process on cost of finished goods, those are :

- The valuation of work in process of bulk goods (*bulk*) is measured equivalent to which will be formulated to final products or products to be sold.
- Work in process for end products are valued based on the average of production cost without package materials to the applied production cost of Vaccines less the percentage of reject products incurred at packaging, as stated in the Directors Memorandum No.07841/DIR/XII/ 2010 dated December 8, 2010.

3. Raw Materials, Auxiliary Materials and Supplies

Raw and auxiliary materials and supplies are stated using the moving average method.

4. Work In Process

Work in process inventories are computed at quarterly basis based on the applied production cost and using a simple average method .

Work in process inventory consists of :

- Bulk products which are already passed the quality control tests and ready to be formulated and converted to finished goods inventory and available for sale, prior to packing process.
- Final products which have been packaged in bottle, ampul, vial, blank *uniject* and passed the quality control tests before putting label, brochure and loading into the boxes.

5. Finished Goods

Inventories consists of finished goods of the company's products and merchandise inventory. Cost of the Company's products are determined using the simple average method, while the cost of merchandise inventories is determined by the moving-average method.

6. Inventory in Transit

Inventories in transit are raw materials/auxiliaries/ supplies/merchandises that have been arrived/ received at the port and. According to the delivery terms, have to be the belongings of the Company. Particularly for imported goods are made a temporarily Memorandum of the Calculation of Imported Goods as the basis for recording the value of "Inventories in Transit".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**h. Persediaan (lanjutan)****7. Persediaan dalam Karantina**

Persediaan dalam karantina merupakan persediaan bahan baku, bahan penolong, perlengkapan maupun barang dagangan yang pada akhir periode pelaporan barangnya sudah diterima atau tiba di Perusahaan, tetapi belum memenuhi syarat penyerahan barang karena belum lulus uji. Persediaan dalam karantina dikelompokkan ke kelompok Aset Lancar Lainnya.

8. Penurunan Nilai Persediaan

Penurunan nilai persediaan menjadi sebesar nilai realisasi bersih diakui sebagai beban dalam periode terjadinya penurunan nilai. Pemulihan kembali nilai persediaan setelah terjadi penurunan nilai diakui sebagai pengurangan beban dalam periode terjadinya pemulihan.

Provisi untuk penurunan nilai persediaan diakui jika nilai tercatat melebihi nilai realisasi neto. Provisi ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa depan.

i. Aset Tetap**1. Pengukuran Aset Tetap Selain Tanah**

Aset tetap pemilikan langsung, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset tetap, kecuali Tanah, disusutkan sesuai tabel berikut:

Kelompok Aset Tetap	Metode Penyusutan <i>Depreciation Method</i>	Manfaat Keekonomian <i>Economic Benefit</i>
Bangunan	Garis Lurus	10 - 20 tahun
Inventaris Pabrik	Saldo Menurun	8 - 16 tahun
Inventaris Kantor	Saldo Menurun	4 - 8 tahun
Inventaris Lainnya	Saldo Menurun	8 - 16 tahun
Kendaraan Bermotor	Saldo Menurun	4 - 5 tahun

Pengeluaran setelah perolehan untuk menjaga manfaat keekonomian aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang dapat meningkatkan manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dan bernilai material dikapitalisasi.

2. Perubahan Model Pengukuran Aset Tetap Tanah

Kebijakan akuntansi untuk aset tetap kelompok Tanah didasarkan model revaluasi secara prospektif. Nilai Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar jumlah revaluasian yang dilakukan pada 31 Desember 2015. Selisih yang timbul akibat revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi akan dialihkan ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

3. Aset Dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan disajikan tersendiri dalam kelompok aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**h. Inventories (continued)****7. Inventory in Quarantine**

Inventories in quarantine are raw materials, auxiliary materials, supplies, or merchandises that have received by the Company at the end of reporting period but they have not met the delivery terms yet because they are still in the test process. Inventories in quarantine are classified into Other Current Assets.

8. Impairment of Inventory

Impairment of inventory value to be as net realizable value is recognized as expense in the period in which it is incurred. The recovery of inventory value after impairment is recognized as expense reduction in the period in which it is incurred.

Provision for impairment of inventories is recognized if the carrying value exceeds the net realizable value. Provisions are determined based on estimated usage or sale of each inventory item in the future.

i. Property, Plant and Equipment (PPE)**1. Measurement of PPE Unless Land**

Direct ownership of PPE, unless land, are stated at acquisition cost less accumulated depreciation and impairment. PPE, unless land, are depreciated according to the following table:

Tarif Penyusutan <i>Depreciation Rate</i>	Category of PPE
5 % - 10 %	Building
12,5 % - 25 %	Factory Equipment
25 % - 50 %	Office Equipment
12,5 % - 25 %	Others Equipment
25 % - 50 %	Vehicle

Expenditures after acquisition to maintain economic benefit of a fixed asset are expensed as they are incurred. Expenditures that improve economic benefit in the future and material are capitalized.

2. Change of Measurement Model for Land

Accounting policy for all lands based on prospective revaluation model. At the reporting date December 31, 2016, the carrying value of lands is stated at revaluation amount at December 31, 2015. The difference between their cost and revaluation amount is recognized as revaluation surplus of fixed assets, and presented in both other comprehensive income and equity. The amount of revaluation surplus will be transferred to profit or loss when the asset is terminated.

3. Asset in Construction

Fixed assets in construction are presented separately as part of fixed assets and are stated at cost. The accumulated costs of construction will be reclassified to the respective fixed asset when it is complete or ready for use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**i. Aset Tetap (lanjutan)****4. Aset Tetap Tidak Produktif**

Aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau usang dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan disajikan pada pos aset tetap tidak produktif dalam kelompok aset tidak lancar lainnya sebesar nilai wajarnya. Jika akan dijual dalam periode pendek maka aset tersebut disajikan dalam kelompok aset lancar sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau Dewan Komisaris.

j. Aset Takberwujud

1. Biaya yang berhubungan dengan penyempurnaan sistem dan prosedur yang dapat diidentifikasi, dikendalikan serta memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset takberwujud. Biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 4 (empat) tahun.
2. Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu meliputi biaya-biaya yang terkait dengan penemuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan *bulk*, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut yang dilakukan oleh pihak eksternal. Biaya pengembangan *upstream* vaksin flu diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

l. Beban Penelitian, Pengembangan dan Surveilans

Biaya - biaya yang dikeluarkan dari tahapan penelitian (atau tahapan penelitian pada proyek internal) uji klinis, surveilans produk dan lingkungan serta pemantauan produk yang sudah dijual di pasar.

m. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Pajak kini diakui berdasarkan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Property, Plant and Equipment (PPE) (continued)****4. Unproductive Fixed Assets**

Unused fixed assets because of damage or obsolete are disposed from fixed assets section, and are presented at their fair value in other non-current assets section. These assets are reclassified to current assets at their fair value when they will be sold in the short period. Gain or loss incurred is recognized as expenses in the period of incurred.

Unproductive assets are written off by approval from Shareholders in Shareholders General Meeting or Boards of Commissioners.

j. Intangible Assets

1. Costs associated with refinement of systems and procedures that can be identified, controlled and provide economic benefits for more than one year are recognized as intangible assets. These costs are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 4 years.
2. Development costs of upstream flu vaccines represent costs associated with research findings or knowledge of production of egg-based flu vaccines from egg preparation, bulk manufacture, clinical trials to registration of such products performed by external parties. The development costs of upstream flu vaccines are recognized as intangible assets and will be amortized using straight line method over the useful life of 8 (eight) years.

k. Revenue and Expense Recognition

Revenues are recognized when the transaction incurred, which is the deliver of goods or services to customers have been completed. Expenses are recognized as incurred (the accrual method).

l. Research, Development and Surveillance Expenses

Expenses used in research phases (or research phases at internal research projects), clinical trial, product and environmental surveillance for monitoring of sold products as well.

m. Income Tax

All temporary differences between the tax based of assets and liabilities and their carrying amounts are recognized as deferred taxes using liability method. Deferred tax is measured by enacted tax rate. Current tax is recognized based on taxable income for the year, in accordance with current tax regulations.

Corrections of tax liabilities are recognized when tax assessment letter (SKP) is received, or if the Company appealed, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**n. Imbalan Kerja**

Perusahaan melaksanakan imbalan manfaat karyawan dan menyelenggarakan program pensiun/imbalan pasca kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Program pensiun karyawan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Perusahaan membukukan imbalan manfaat karyawan lainnya untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

Perusahaan mengakui beban dan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Perhitungan beban jasa kini, jasa lalu dan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Perusahaan mengakui komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut :

- a. Biaya jasa dan bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti dalam laba rugi; dan
- b. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan imbal hasil atas aset program dalam penghasilan komprehensif lain.

Selain imbalan manfaat karyawan, Perusahaan juga menyelenggarakan program pensiun untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat dan karyawan kontrak. Program ini memberikan imbalan manfaat karyawan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. Pendanaan dana pensiun berdasarkan ketentuan terakhir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan Himpunan Karyawan (HIKA) periode 2015-2017 pasal 66, yaitu 15% dari gaji dasar dengan komposisi 60% ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 40% ditanggung oleh karyawan masing-masing.

o. Pendapatan Hibah

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan melakukan penerapan lebih awal terhadap PSAK 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah" sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 6 "Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas", ISAK 1 "Penentuan Harga Pasar Dividen", ISAK 2 "Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemegang Saham" dan ISAK 3 "Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan". Penerapan PSAK ini dilakukan secara retrospektif.

Hibah terkait dengan aset, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai penghasilan ditangguhkan atau dicatat sebagai pengurang jumlah tercatat aset. Hibah terkait dengan penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam pos umum seperti "penghasilan lain-lain" atau alternatif pengurang dalam beban terkait.

Hibah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**n. Employee Benefits**

The Company performs employee benefits and has a pension plan/postretirement benefits in accordance with labor law No.13 Year 2003 "Employment". The pension plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya, a financial institution of pension fund ("DPLK"). The company posts another employee rewards in accordance with the Act.

The Company recognizes expense and postretirement benefit and other long-term benefit liabilities in accordance with the PSAK 24 (Revised 2013) "Employee Benefits".

The calculation of current and past service costs and present value of postretirement and other long-term benefits are conducted by an independent actuary using "projected unit credit" method.

The Company recognizes the following defined benefit cost components :

- a. Service cost and net interest on defined benefit liability (asset) in profit or loss, and
- b. Actuarial gain or loss and return on plan assets in other comprehensive income.

In addition to employee benefits, the Company also provides a pension plan for all eligible permanent employees and contract workers. This program provides employee benefits based on pension basic income and working period of the employees. The pension plan is managed by the Financial Institution of Pension Plan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya. The pension plan funding is based on the latest decree that stipulated in the agreement between the Company and the Association of the Company's Employees (HIKA) for the period of 2015-2017 article 66, which is 15% from basic salary with the composition of 60% of which is supported by the Employer and the other 40% is charged to the respective employee.

o. Grant

Since January 1, 2011, the Company applied early the PSAK 61, "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance" in relation to the enforcement of PPSAK 6, "Revocation of PSAK 21 "Accounting for Equity", ISAK 1 "Determination of Market Price Dividend", ISAK 2: "Presentation of Capital in the Balance Sheet and Receivable to Shareholders" and ISAK 3: "Accounting for Donations or Grant". The application of those SFASs are done retrospectively.

Grants related to assets, including non-monetary grants at fair value, are presented in the statement of financial position as deferred income, or recorded as reduction of the carrying amount of the assets. Grants related to income are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income in a general heading such as "other income", or as reduction of the related costs.

Grants are recognized in profit or loss with a systematic basis during the period the entity recognizes as expense the related costs that will compensated with the grants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**p. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, mensyaratkan Perusahaan untuk memakai estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan dalam periode mendatang mungkin didasarkan atas jumlah-jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

Sejak 1 Januari 2011, Perusahaan telah mengadopsi PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi", yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif.

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap, aset takberwujud dan penyisihan untuk piutang. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (continued)**p. Use of Estimates**

The preparation of financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia requires the Company to make estimates and assumptions that affects the amounts reported in the financial statements. Due to inherent uncertainty in determination of estimation, the actual amount reported in the future might possibly be different from these estimates.

Since January 1, 2011, the Company adopted PSAK 57 (Revised 2009) "Provision, Contingent Liability, and Contingent Asset" that was effective for the financial reporting periods beginning on or after January 1, 2011 and applied prospectively.

The preparation of financial statement requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial reporting. The significant accounts related to the estimates and assumptions include carrying value of fixed assets and intangible assets and allowance for uncollectible receivables. The actual results might possibly be different from these estimates.

3. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Kas	189.469.748
Bank	
Pihak Berelasi - Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.652.564.844
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	963.195.298
PT Bank Jabar Banten Tbk	356.476.633
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	702.082.538
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.192.935.828
Pihak Berelasi - Valas	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
2016 : USD 5,833,970.30	78.385.224.951
2015 : USD 16,656,140.82	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
2016 : EUR 5,596,645.06	79.257.168.849
2015 : EUR 7,127,955.08	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
2016 : USD 45,068.76	605.543.859
2015 : USD 45,086.30	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	
2016 : USD 439,669.57	5.907.400.343
2015 : USD 122,596.26	
PT Bank BRI (Persero) Tbk	
2016 : USD 51,196.53	687.876.577
	<u>175.710.469.720</u>
Sub Jumlah Kas dan Bank	<u>175.899.939.468</u>

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	182.759.333	Cash
		Bank
		Related Parties - Rupiah
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	5.246.858.764	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	420.464.428	PT Bank Jabar Banten Tbk
	869.406.146	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	306.561.705	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	411.050.060	Related Parties - US Dollar
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		2016 : USD 5,833,970.30
	229.771.462.612	2015 : USD 16,656,140.82
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		2016 : EUR 5,596,645.06
	107.415.930.830	2015 : EUR 7,127,955.08
		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
		2016 : USD 45,068.76
	621.965.509	2015 : USD 45,086.30
		Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
		2016 : USD 439,669.57
	1.691.215.407	2015 : USD 122,596.26
		PT Bank BRI (Persero) Tbk
		2016 : USD 51,196.53
	<u>346.754.915.461</u>	
	<u>346.937.674.794</u>	Total Cash and Bank

PT BIO FARMA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Jumlah pindahan	175.899.939.468
Setara Kas	
Pihak Berelasi	
<i>Deposit on call - Rupiah</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.000.000.000
<i>Deposito Berjangka - Rupiah</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	24.000.000.000
PT BTN Syariah (Persero) Tbk	20.000.000.000
<i>Deposito Berjangka - Valas</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
2016: USD 471,300.00	6.332.386.800
2015: USD 471,300.00	-
Pihak Ketiga	
<i>Deposito Berjangka - Rupiah</i>	
PT Bank Jabar Banten Tbk	7.000.000.000
PT Bank Mega	7.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Taspen Pos	5.000.000.000
<i>Deposito Berjangka - Valas</i>	
PT Bank Jabar Banten Tbk	
2016: USD 500,000.00	6.718.000.000
Sub Jumlah Setara Kas	<u>272.050.386.800</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>447.950.326.268</u>

Tingkat Bunga Deposito :

Deposit On Call - Rupiah

Deposito Berjangka : Rupiah

Deposito Berjangka : US Dollar

Nisbah Bagi Hasil

Deposito Bank Muamalat

4,25 % - 5,5 %

6,75 % - 8,75 %

0,5 % - 1,25 %

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
	346.937.674.794
Cash Equivalents	
<i>Related Parties</i>	
<i>Deposit on call - Rupiah</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	92.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
<i>Time Deposit - Rupiah</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.000.000.000
PT BTN Syariah (Persero) Tbk	60.000.000.000
<i>Time Deposit - US Dollar</i>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
2016: USD 471,300.00	-
2015: USD 471,300.00	6.501.583.500
<i>Third Parties</i>	
<i>Time Deposit - Rupiah</i>	
PT Bank Jabar Banten Tbk	-
PT Bank Mega	-
PT Bank Mandiri (Persero) Taspen Pos	-
<i>Time Deposit - US Dollar</i>	
PT Bank Jabar Banten Tbk	
2016: USD 500,000.00	-
Total Cash Equivalents	<u>209.001.583.500</u>
Total Cash and Cash Equivalents	<u>555.939.258.294</u>

Brought forward

Cash Equivalents*Related Parties**Deposit on call - Rupiah*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Time Deposit - Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT BTN Syariah (Persero) Tbk

Time Deposit - US Dollar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2016: USD 471,300.00

2015: USD 471,300.00

*Third Parties**Time Deposit - Rupiah*

PT Bank Jabar Banten Tbk

PT Bank Mega

PT Bank Mandiri (Persero) Taspen Pos

Time Deposit - US Dollar

PT Bank Jabar Banten Tbk

2016: USD 500,000.00

2015: USD 471,300.00

Total Cash Equivalents**Total Cash and Cash Equivalents**

Interest Rate on Time Deposits

*Deposit on Call - Rupiah**Time Deposit - Rupiah**Time Deposits - US Dollar*

Sharing portion of

Deposit on Muamalat Bank

4. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Pelanggan Dalam Negeri	
Pihak Berelasi :	
PT Rajawali Nusantara Indonesia	6.991.961.405
PT Indofarma Global Medika	5.288.616.407
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	898.855
Jumlah	<u>12.281.476.667</u>
Pihak Ketiga	
PT Merapi Utama Pharma	9.184.354.665
PT Sagi Capri	5.207.137.650
PT Bumi Paradise	-
PT Pamor Baru	250.000.000
Aventis Pharma	137.220.000
Jumlah	<u>14.778.712.316</u>
Sub Jumlah	<u>27.060.188.983</u>

4. TRADE RECEIVABLES

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
	10.956.104.182
	6.341.950.926
	-
	<u>17.298.055.108</u>
	11.436.314.957
	7.337.007.994
	9.662.400.000
	250.000.000
	-
	<u>28.685.722.950</u>
	<u>45.983.778.058</u>

Domestic Customers*Related Parties*

PT Rajawali Nusantara Indonesia

PT Indofarma Global Medika

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

Total

Third Parties

PT Merapi Utama Pharma

PT Sagi Capri

PT Bumi Paradise

PT Pamor Baru

Aventis Pharma

Total

Sub-total

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pelanggan Luar Negeri	
Pihak Ketiga	
UNICEF	
2016 : USD 955,950.00	12.844.144.200
2015 : USD 5,271,110.40	-
Bionet	
2016 : USD 18,061,019.5	242.667.858.002
2015 : USD 19,208,555.65	-
Universal - Exim	
2016 : USD 425,950.00	5.723.064.200
2015 : USD 8,214,387.50	-
Paho	
2015 : USD 27,284.50	-
Arabio	
2015 : USD 604,532.10	-
Hospitec	
2015 : USD 93,000.00	-
WHO	
2015 : USD 38,750.00	-
Sub Jumlah	261.235.066.402
J a s a	677.179.559
Jumlah	288.972.434.944
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai	346.011.041
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	288.626.423.903

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tahun) adalah :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Sampai dengan 1 Tahun	288.580.853.841
1 s.d. 2 Tahun	18.037.702
2 s.d. 3 Tahun	281.137.679
3 s/d 4 Tahun	83.874.024
Lebih dari 4 Tahun	8.531.697
Jumlah	288.972.434.944

Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal	312.622.025
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	49.865.427
Penghapusan Tahun Berjalan	(16.476.412)
Saldo Akhir	346.011.040

Piutang usaha senilai Rp35.000.000.000 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) No.PBD/SP3/30/2016 tanggal 6 Juni 2016 untuk perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 24 Juni 2017. (catatan 37.h)

Piutang usaha senilai Rp183.496.626.930,24 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) No.R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 1 Desember 2016 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 18 Desember 2017. (catatan 37.i)

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

31 Desember 2015
December 31, 2015

		Overseas Customers
		Third Parties
		UNICEF
	2016 : USD 955,950.00	
	2015 : USD 5,271,110.40	
		Bionet
	2016 : USD 18,061,019.50	
	2015 : USD 19,208,555.65	
		Universal - Exim
	2016 : USD 425,950.00	
	2015 : USD 8,214,387.50	
		Paho
	2015 : USD 27,284.50	
		Arabio
	2015 : USD 604,532.10	
		Hospitec
	2015 : USD 93,000.00	
		WHO
	2015 : USD 38,750.00	
	Sub-total	
	461.547.869.969	
	527.063.374	Services
	508.058.711.401	Total
	312.622.025	Less : Allowance for Impairment
	507.746.089.376	Total Trade Receivables - net

The aging (year) of trade receivables is as follows :

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	507.630.266.684	Up to 1 Year
	313.718.159	1 up to 2 Years
	48.439.375	2 up to 3 Years
	66.287.183	3 up to 4 Years
	-	more than 4 Years
	508.058.711.401	Total

The movements of provision for impairment losses:

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	122.481.675	Beginning Balance
	201.221.055	Provision for Impairment Losses
	(11.080.706)	Written-off
	312.622.025	Ending Balance

Trade receivables amounting to Rp35.000.000.000 have been pledged as fiduciary collateral for credit facility obtained from the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) based on Letter of Approval for Extended Financing Facility No.PBD/ SP3/30/2016 dated June 6, 2016 for the extension of loan period until June 24, 2017. (notes 37.h)

Trade receivables amounting to Rp183.496.626.930,24 have been pledged as fiduciary collateral for credit facility obtained from the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk based on Letter of Approval for Extended Financing Facility No.R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016 dated December 1, 2016 for the extension of loan period until December 18, 2017. (notes 37.i)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang.

Adanya hubungan berelasi mungkin mengakibatkan persyaratan transaksi tersebut di atas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pihak Berelasi :	
Piutang PT Iglas (Persero)	1.302.637.458
Pihak Ketiga :	
Piutang Lainnya	446.140.212
	1.748.777.670
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai	(1.302.637.458)
Jumlah Piutang Lain-Lain	446.140.212
Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai :	
	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal	1.302.637.458
Pemulihan Tahun Berjalan	-
Saldo Akhir	1.302.637.458

6. PERSEDIAAN

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Bahan Baku/ Penolong	272.003.212.496
Perlengkapan	756.064.386
Produk Dalam Proses	357.924.068.324
Produk Jadi	81.857.215.656
Barang Dagangan	1.077.050.535
	713.617.611.397
Dikurangi : Penyisihan Penurunan Nilai	5.053.143.454
Jumlah Persediaan-Bersih	708.564.467.943
Mutasi Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan :	
	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal	5.891.672.358
Pembebanan Tahun Berjalan	3.368.325.466
Pemulihan Tahun Berjalan	(4.206.854.370)
Saldo Akhir	5.053.143.454

Persediaan produk jadi dan bahan baku yang rusak atau kadaluarsa tahun berjalan dibebankan pada kelompok beban pokok penjualan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk selisih kurang atau lebih harga pokok terapan - aktual dibebankan ke beban (penghasilan) lainnya. Penyisihan dilakukan atas saldo persediaan yang telah dikurangkan dengan yang rusak atau kadaluarsa.

Pada bulan April 2016 World Health Organisation (WHO) mendeklarasikan penghentian penggunaan, pengedaran, penyimpanan dan produksi vaksin polio tipe 2 (trivalent Oral Polio Vaccine/tOPV) secara global terhitung 1 Mei 2016, dan menggantinya dengan bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Atas putusan tersebut Perusahaan telah mengambil langkah-langkah menghentikan produksi tOPV dan bulk polio tipe 2 serta menarik tOPV dari peredaran dan menggantinya dengan bOPV.

4. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the amount of provision for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible trade receivables.

A related party may result in difference terms of the transactions with those of similar transactions to third parties.

5. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	1.302.637.458	Related Parties : PT Iglas (Persero)
	822.213.060	Third Parties : Others
	2.124.850.518	
	(1.302.637.458)	Less : Allowance for Impairment
	822.213.060	Total Other Receivables
Movement of Allowance for Impairment :		
	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	1.302.637.458	Beginning Balance
	-	Bad Debt Recovery
	1.302.637.458	Ending Balance

6. INVENTORIES

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	205.935.635.178	Raw Materials/Auxiliaries
	4.866.037.913	Products in progress
	222.475.046.209	Finished Products
	33.161.706.767	Equipments
	2.010.514.545	Merchandises
	468.448.940.613	
	5.891.672.358	Less: impairment of value
	462.557.268.255	Total Inventories - Net
The movement of provision for impairment		
	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	4.056.315.911	Beginning Balance
	4.442.058.615	Provision for the Year
	(2.606.702.168)	Current Year's Impairment Recovery
	5.891.672.358	Ending Balance

Inventories of finished products and raw materials that are damaged or expired at the current year are charged to cost of sales in the group income statement and other comprehensive income, except for the difference of more or less than the cost of applied - the actual charged to operating expenses (income) others. Provision is made for that the balance of inventories was reduced by a damaged or expired.

In April 2016 the World Health Organisation (WHO) declared discontinuation of use, circulation, storage and production of type 2 polio vaccine (trivalent Oral Polio Vaccine / tOPV) globally as of May 1, 2016, and replace it with a bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV). Based on the declaration, the Company has taken steps to stop tOPV production and bulk polio type 2 as well as recall tOPV from circulation and replace them with bOPV.

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada tanggal laporan posisi keuangan 31 Desember 2016, Perusahaan memiliki persediaan bulk polio tipe 2 sejumlah 2.882,5 liter dengan nilai tercatat sebesar Rp22.214.885.705,00. Pertimbangan manajemen menyimpan bulk polio tipe 2 adalah :

- Diperlukan untuk keperluan produksi sabin Inactivated Polio Vaccine (sIPV).
- Diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung program Pemerintah jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) / outbreak atau wabah virus polio tipe 2 mengingat wilayah Indonesia masih berisiko tinggi terjadi KLB polio tipe 2.
- Telah mendapat dukungan dari Pemerintah cc. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah meminta kepada WHO melalui representatif di Indonesia agar Perusahaan (PT Bio Farma) diberi wewenang sebagai rekanan nasional stockpile untuk monovalent Oral Polio Vaccine type 2 (mOPV2).
- Diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung program WHO jika terjadi outbreak di luar Indonesia mengingat masih ditemukannya indikasi dan outbreak virus polio polio tipe 2 di Afganistan, Pakistan, Laos, Guinea, Nigeria, Chad, dan negara –negara di West Africa serta keterbatasan persediaan IPV.
- WHO telah merekomendasikan Perusahaan untuk komunikasi dengantim WHO Pre Qualification(PQ) dan memproses mOPV2 sesuai prosedur PQ untuk merespon jika terjadi outbreak virus polio tipe 2 di luar Indonesia dan WHO berencana berkunjung ke Perusahaan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk membicarakan hal tersebut pada bulan Maret 2017.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan bulk polio tipe 2 sebesar Rp22.214.885.705,00 telah mencerminkan nilai realisasi neto setelah mempertimbangkan aspek kegunaan dan mengkaji jumlah kebutuhannya di masa depan sesuai dengan butir a, b dan d di atas.

Persediaan tahun 2016 telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Polis No.1006010916030001); PT Mandiri AXA General Insurance (Polis No.1030109031600006) dan PT Asuransi Jasa Tania (Polis No.IP050116000033) terhadap semua risiko kecuali gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu untuk periode pertanggungan 20 Maret 2016 sampai dengan 20 Maret 2017 dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp295.085.709.277,40; Rp158.307.827.897,53 dan Rp104.205.477.536,88.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian.

Persediaan barang senilai Rp60.000.000.000 dijadikan jaminan secara fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan (SPPFP) No.PBD/SP3/30/2016 tanggal 6 Juni 2016 untuk perpanjangan jangka waktu kredit sampai dengan 24 Juni 2017. (catatan 73.h)

6. INVENTORIES (continued)

At the statement of financial position date December 31, 2016, the Company has a bulk of polio supply type 2 amounting to 2,882.5 liters with carrying value of Rp.22.214.885.705,00. The considerations of Management to keep the bulk polio supply type 2 are:

- Needed for production purposes sabin Inactivated Polio Vaccine (sIPV).
- Needed as a backup to support the Government in case of Extraordinary Events or an outbreak of polio virus type 2 remember parts of Indonesia are still at high risk of type 2 polio outbreaks.
- Has received the support of the Government of cq. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, which has been requested to WHO through the representative in Indonesia for the Company (PT Bio Farma) was authorized as a national partner stockpile of monovalent Oral Polio Vaccine type 2 (mOPV2).
- Required reserve to support the WHO program if the outbreak outside Indonesia given the discovery of indications and outbreaks of polio virus type 2 polio in Afghanistan, Pakistan, Laos, Guinea, Nigeria, Chad, and the nation-state in West Africa as well as the limited supply of IPV.
- WHO has recommended the Company's to communicate with WHO Pre Qualification (PQ) teams and process mOPV2 according to the PQ procedure to respond in case of outbreak of polio virus type 2 outside Indonesia and WHO plans to visit the Company and the Agency for Food and Drug Administration (BPOM) to talk about it in March 2017.

The Management believes that the carrying value of bulk supplies of type 2 polio amounting to Rp22.214.885.705,00 reflect net realizable value after considering aspects of usability and assess the amount of need in the future in accordance with items a, b and d above.

Inventories in 2016 have been insured to PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Polis No.1006010916030001); PT Mandiri AXA General Insurance (Polis No.1030109031600006) and PT Asuransi Jasa Tania (Polis No.IP050116000033) against loss by certain policy packages for period March 20, 2016 until march 20, 2017 with coverage value of Rp.295.085.709.277,40; Rp.158.307.827.897,53 and Rp.104.205.477.536,88.

The management believes that the amount of insurance coverage is adequate to cover potential losses from the insured risk.

Inventories amounting to Rp.60.000.000.000 have been made as fiduciary collateral for credit facility obtained from the Indonesia Eximbank (LPEI), based on Letter of Approval of Extended Financing (SPPFP) No.PBD/ SP3/30/2016 dated Juni 6, 2016 for the extension of credit period until June 24, 2017. (notes 37.h)

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan barang senilai Rp 176.077.094.546,5 dijadikan jaminan yang bersifat fidusia atas fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. R.II.291-ADK/DKR-2/12/ 2016, tanggal 1 Desember 2016 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 18 Desember 2017 (catatan 37.i).

7. UANG MUKA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pembelian Lokal	2.205.788.311
Pembelian Barang Impor	42.995.436.451
Impor Dalam Penyelesaian	7.471.766.551
Uang Muka Kaca Mata	1.700.000
Jasa Produksi	-
Uang Muka Monitoring	1.250.000.000
Uang Muka Diklat	90.500.000
Uang Muka Lainnya	37.100.000
Jumlah	54.052.291.312

Uang Muka pembelian lokal sebesar Rp2.205.788.311 terutama dari pembangunan istal kuda di Cisarua sebesar Rp834.000.000.

Uang muka pembelian barang impor terdiri dari :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Upstream Tetanus Toxoid Vaccine	
Production Equipment	24.046.311.900
Antibody to Poliovirus Type1-3	4.039.000.000
Vaksin MENINGITIS ACYW 0,5 ML	4.010.527.763
Fermentor 150 L (volume 207 L) Complete	
With Accessories	3.835.010.608
Heatmarker VVM2	2.080.865.701
CEDI+Tangki Feed dan Permeated RO	1.122.510.680
Autoclave for Desinfection	849.693.000
Autoclave for Sterilization	808.058.043
Integrated Filling Line 3 Vial	
Integrated Filling Line 4 (Vial Filling Line For	
PentaBio Liquid Product)	-
Multitray CS 40	-
Heatmaker for OPV	-
Fermentor 150 L	-
Pembelian lainnya	2.203.458.756
Jumlah	42.995.436.451

Uang Muka Impor dalam penyelesaian sebesar Rp7.471.766.551 merupakan pembayaran biaya asuransi, biaya bongkar muat, biaya inklaring, dan pajak terkait proses penanganan barang impor dari pelabuhan dalam negeri ke lokasi Perusahaan.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	225.907.519.874
Pungutan/Potongan PPN - Keluaran WAPU	-
PPH Pasal 22	467.020.625
Estimasi PPH Badan	72.442.448.878
Jumlah	298.816.989.377

7. INVENTORIES (continued)

Inventories amounting to Rp.176.077.094.546,5 have been pledged as fiduciary collateral for credit facility obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , based on Letter of Approval of Financing (SPPFP) No.R.II.291-ADK/DKR-2/12/ 2016 dated december 1, 2016 for the extension of credit period until December 18, 2017. (notes 37.i)

7. ADVANCES

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	17.309.454.864	Domestic Purchases
	58.096.388.624	Purchases of Imported Goods
	2.293.407.746	Import in Progress
	-	Glasses
	20.142.840.366	Bonuses
	1.600.000.000	Monitoring
	-	Training
	2.911.151.562	Others
Jumlah	102.353.243.161	Total

Advances for local purchase of Rp2.205.788.311 mainly from the construction of stables in Cisarua Rp834.000.000.

Advance for purchases of imported goods consist of :

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	-	Upstream Tetanus Toxoid Vaccine
	4.343.571.504	Production Equipment
	-	Antibody to Poliovirus Type1-3
	-	Vaksin MENINGITIS ACYW 0,5 ML
	-	Fermentor 150 L (volume 207 L)
	-	Complete With Accessories
	-	Heatmarker VVM2
	-	CEDI+Tangki Feed & Permeated RO
	-	Autoclave for Desinfection
	-	Autoclave for Sterilization
	35.897.084.165	Integrated Filling Line 3 Vial
	-	Integrated Filling Line 4 (Vial Filling
	10.789.883.720	Line For PentaBio Liquid Product)
	1.540.461.784	Multitray CS 40
	1.468.759.444	Heatmaker for OPV
	1.431.810.640	Fermentor 150 L
	2.624.817.366	Others
Jumlah	58.096.388.624	

Advances for import in progress amounting of Rp7.471.766.551 represent payments in advance for insurance, unloading, and inklaring expenses and taxes related to the process of handling the imported goods from the port to the Company's location.

8. TAXES

a. Prepaid Taxes

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	239.924.469.571	Value Added Tax (VAT) - Input
	2.771.329.518	Withholding VAT - Output
	24.220.380	Income Tax - Article 22
	-	Income Tax - Article 29
Jumlah	242.720.019.469	Total

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar Dimuka (lanjutan)

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2016 setelah memperhitungkan restitusi PPN Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp41.919.562.727,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80054/051-00054-2016 tanggal 4 Januari 2016; restitusi PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2014 sebesar Rp40.195.806.361,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80055/051-00055-2016 tanggal 10 Pebruari 2016; restitusi PPN Masa Pajak September 2014 sebesar Rp17.784.958.518,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 00019/4071/14/051/2016 tanggal 21 Maret 2016 dan restitusi PPN Masa Pajak Desember 2014 sebesar Rp24.891.987.705,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80392/051-00392-2016 tanggal 13 September 2016.

Saldo PPN Masukan per 31 Desember 2015 setelah memperhitungkan restitusi PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2013 sebesar Rp28.875.864.464,00 sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 80034/051-00034-2015 tanggal 27 Januari 2015.

b. Utang Pajak

	31 Desember 2016 December 31, 2016
PPN Wapu	8.578.384.336
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)	302.413.308
Pajak Penghasilan Pasal 21	17.987.801.926
Pajak Penghasilan Pasal 22	407.189.034
Pajak Penghasilan Pasal 23	183.631.313
Pajak Penghasilan Pasal 25	20.164.941.321
Pajak Penghasilan Pasal 29	-
Jumlah	47.624.361.238

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pajak Kini	(185.425.250.000)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	1.498.194.382
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(183.927.055.618)

d. Rekonsiliasi antara laba komersial dan laba fiskal :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi	684.968.045.701
Beda Waktu	
Beban imbalan pasca kerja	6.797.917.415
Penyisihan penurunan nilai piutang	33.389.016
Penyisihan nilai persediaan	(838.528.904)
Pemulihan biaya dibayar dimuka	-
Jumlah Beda Waktu	5.992.777.527

8. TAXES (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The balance of input-Value Added Tax (VAT) as of December 31, 2016 has taken into account the amount of VAT refund for the period of July to December 2013 amounted to Rp41.919.562.727,00, in accordance with Order Letter of Payment of Tax Overpayment (SPMKP) No.80054/05-00054-2016 dated January 4, 2016; VAT refund for the period of January to June 2014 amounted to Rp40.195.806.361,00, in accordance with Order Letter of Payment of Tax Overpayment (SPMKP) No.80055/051-00055-2016 dated February 10, 2016; VAT refund for the period of September 2014 amounted to Rp17.784.958.518,00, in accordance with Order Letter of Payment of Tax Overpayment (SPMKP) No.800019/4071/14/051/2016 dated March 21, 2016; VAT refund for the period of December 2014 amounted to Rp24.891.987.705,00, in accordance with Order Letter of Payment of Tax Overpayment (SPMKP) No.80392/051-00392-2016 dated September 13, 2016.

The balance of input-Value Added Tax (VAT) as of December 31, 2015 has taken into account the amount of VAT refund for the period of January to June 2013 amounted to Rp28.875.864.464, in accordance with Order Letter of Payment of Tax Overpayment (SPMKP) No.80034/051-00034-2015 dated January 27, 2015.

b. Taxes Payable

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	7.604.700.883	Withholding VAT - Output
	733.674.778	Income Tax - Final
	11.426.370.886	Income Tax Article 21
	1.169.311.152	Income Tax Article 22
	349.265.374	Income Tax Article 23
	17.228.940.681	Income Tax Article 25
	8.006.023.428	Income Tax Article 29
Total	46.518.287.182	

c. Income Taxes Benefit (Expense)

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	(232.893.457.000)	Current tax
	4.212.772.294	Deferred Tax Benefit (Expense)
Income Tax Expense - Net	(228.680.684.706)	

d. Reconciliation between commercial and taxable income :

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	899.273.575.951	Income before income tax as shown in statement of profit or loss
		Temporary Differences
	14.825.592.378	Employees benefit expense
	190.140.350	Provision for impairment of receivables
	1.835.356.447	Provision for impairment of inventories
	4.767.416.002	Recovery of prepaid expenses
Total Temporary Differences	21.618.505.177	

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi antara laba komersial dan laba fiskal :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Beda Permanen	
Tantiem	13.275.000.000
Beban Pajak Lainnya	-
Koreksi pajak dan denda pajak	10.924.295.638
Penghargaan dalam bentuk barang	1.112.146.820
Sumbangan sosial masyarakat	13.358.249.158
Bantuan sosial karyawan, direksi dan komisaris	10.530.780.335
Beban HUT Perusahaan, olah raga dan paket ramadhan	4.166.338.898
Penyusutan mobil direksi (50%)	-
Tunjangan Komunikasi Direksi (50%)	58.684.399
Beban Jamuan Tamu Perusahaan	3.691.586.542
Langganan perpustakaan dan surat kabar	85.896.000
Beban promosi yang tidak dapat dibiayakan	401.303.977
Bunga jasa giro dan deposito yang dikenakan PPh Final	(6.820.215.334)
Penyusutan Mobil Non Direksi	177.486.328
Sewa ruangan dan bagi hasil yang dikenakan PPh Final	(221.375.000)
Jumlah Beda Permanen	50.740.177.761
Laba Kena Pajak	741.701.000.989
Laba Kena Pajak (Dibulatkan)	741.701.000.000
Taksiran Beban Pajak Penghasilan	
25% x 741.701.000.000	185.425.250.000
25% x 931.573.828.000	
Dikurangi : Pajak Dibayar Dimuka	
Pasal 22	15.825.799.593
Pasal 23	62.603.433
Pasal 25	241.979.295.852
	257.867.698.878
(Lebih) Kurang Bayar PPh Badan	(72.442.448.878)

e. Pajak Tangguhan

Rekonsiliasi antara taksiran pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 25% dari laba akuntansi sebelum taksiran beban (manfaat) pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 :

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Laba sebelum pajak penghasilan	684.968.045.701
Beban Pajak dengan Tarif Pajak Maksimum	171.242.011.425
Pengaruh Pajak atas Beda Permanen	12.685.044.193
Pemulihan Biaya Dibayar Dimuka	-
Beban Pajak Perusahaan	183.927.055.618
Beban Kini	185.425.250.000
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(1.498.194.382)

8. TAXES (continued)

d. Reconciliation between commercial and taxable income :

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Permanent Different Management bonus	16.540.204.371
Other tax expenses	24.333.750
Tax and tax penalty corrections	352.238.893
Rewards in goods	341.701.090
Public social donations	4.497.462.006
Social aids for employee, directors and commissioners	13.869.376.472
The Company's anniversary, sports and ramadhan packages	3.880.861.129
Depreciation of Director's Cars (50%)	84.590.964
Director's Communication Allowance	80.877.904
Entertainment	4.884.585.811
Subscription of newspapers and library	131.912.199
Non-deductible promotions	2.861.087.000
Interests of bank deposits accounts subject to final tax	(36.901.605.304)
Depreciation of Cars	277.458.863
Room rent and profit sharing subject to final tax	(243.337.500)
Total Permanent Differences	10.681.747.647
Taxable Income	931.573.828.776
Taxable Income (rounded-off)	931.573.828.000

Permanent Different Management bonus	16.540.204.371
Other tax expenses	24.333.750
Tax and tax penalty corrections	352.238.893
Rewards in goods	341.701.090
Public social donations	4.497.462.006
Social aids for employee, directors and commissioners	13.869.376.472
The Company's anniversary, sports and ramadhan packages	3.880.861.129
Depreciation of Director's Cars (50%)	84.590.964
Director's Communication Allowance	80.877.904
Entertainment	4.884.585.811
Subscription of newspapers and library	131.912.199
Non-deductible promotions	2.861.087.000
Interests of bank deposits accounts subject to final tax	(36.901.605.304)
Depreciation of Cars	277.458.863
Room rent and profit sharing subject to final tax	(243.337.500)
Total Permanent Differences	10.681.747.647
Taxable Income	931.573.828.776
Taxable Income (rounded-off)	931.573.828.000

Estimated Income Tax Expense	
25% x 741.701.000.000	
25% x 931.573.828.000	232.893.457.000

Less : Prepaid Taxes	
Article 22	15.825.799.593
Article 23	62.603.433
Article 25	241.979.295.852

Income Tax (Over) Under Payment

e. Deferred Tax

The reconciliation between estimated income tax expense computed using the prevailing tax rate of 25% of the income before income tax expense (benefit) and the tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows :

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Income before income tax	899.273.575.951
Tax Expense based on Maximum Rate	224.818.393.988
Tax Impact on Permanent Differences	2.670.436.718
Prepaid Expense Recovery	1.191.854.000
Corporate Tax Expense	228.680.684.706
Current Tax	232.893.457.000
Deferred Tax Expense (Asset)	(4.212.772.294)

Income before income tax	899.273.575.951
Tax Expense based on Maximum Rate	224.818.393.988
Tax Impact on Permanent Differences	2.670.436.718
Prepaid Expense Recovery	1.191.854.000
Corporate Tax Expense	228.680.684.706
Current Tax	232.893.457.000
Deferred Tax Expense (Asset)	(4.212.772.294)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dari dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2014	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Profit or Loss	2015	Dibebankan ke Laba Rugi Komprehensif/ Charged to Profit or Loss	2016	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Asset
Imbalan Kerja	16.503.697.460	3.706.398.095	20.210.095.554	1.699.479.354	21.909.574.908	Employee Benefit
Penyisihan Piutang Ragu-ragu	356.279.783	47.535.088	403.814.871	8.347.254	412.162.125	Impairment of Receivables
Penyisihan Persediaan	1.014.078.978	458.839.112	1.472.918.089	(209.632.226)	1.263.285.863	Impairment of Inventories
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	17.874.056.221	4.212.772.294	22.086.828.515	1.498.194.382	23.585.022.896	Total Deferred Tax Asset

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Asuransi	3.120.461.278
Sewa	9.016.048.583
Jumlah	12.136.509.861

Asuransi dibayar dimuka terdiri dari :

Asuransi karyawan	156.937.288
Asuransi persediaan	175.199.558
Asuransi kebakaran bangunan dan aset tetap didalamnya	2.780.127.930
Asuransi kendaraan	8.196.503
Jumlah	3.120.461.278

Asuransi dibayar di muka tersebut merupakan saldo premi asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), BNI Life, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Saldo Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.016.048.583,25 terutama berasal dari bagian lancar sewa dibayar dimuka yang jatuh tempo di tahun 2017 atas lahan Barang Milik Negara (BMN) aset eks BPPN di Jasinga Bogor sebesar Rp20.821.344.000 dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun. Perusahaan menggunakan tanah yang saat ini masih dalam proses PMN tersebut sebagai persiapan rencana pengembangan bisnis perusahaan ke arah life science. Saat ini dilakukan kegiatan CSR sebagai jaring pengaman sosial seperti access to medicine dan pengolahan air bersih, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat menerima keberadaan PT Bio Farma (Persero). (lihat catatan 14)

8. TAXES (continued)

e. Deferred Tax

Deferred tax is computed based on the effect of the temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities of their respective tax bases.

Details of the Company's deferred tax assets and liabilities are as follows:

9. PREPAID EXPENSES

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Asuransi	2.744.307.875
Sewa	7.418.819.000
Jumlah	10.163.126.875

Insurances

Rents

Total

Prepaid insurance consist of :

Employee insurance

Inventories insurance

Fire of buildings and related fixed assets

Vehicle insurance

These prepaid insurances represent insurance premiums paid in advance to PT Asuransi Jiwasraya (Persero), BNI Life, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Bumiputera Muda 1967, PT Mandiri AXA General Insurance, PT Asuransi Jasa Tania, PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

The balance of prepaid rent as of December 31, 2016 amounting to Rp9.016.048.583,25 particularly deals with rental cost of Government-owned land (BMN) ex. BPPN at Jasinga Bogor. The rental cost is of Rp20.821.344.000 for three years. The Company uses the land, which is in the process to be the Government investment in the Company, to prepare its business development plan toward life science. Currently, at this location the Company performs CSR activities as social safety net such as access to medicine and processing clean water, with the result that the local Government and its society accept the existence of the Company. (see notes 14).

10. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Bunga Deposito	463.705.026
Sewa dan Bagi Hasil	221.375.000
Pendapatan Lainnya YMA diterima	114.977.985
Jumlah	800.058.011

11. ASET LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Persediaan dalam Perjalanan	3.235.039.000
Persediaan dalam Karantina	34.387.620.196
Persediaan Dalam Proses Penggantian	539.537.034
Jumlah	38.162.196.231

Persediaan dalam karantina berasal dari pembelian bahan baku vaksin dan sera dan bahan perkemasan yang sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masih dalam status karantina karena sedang dalam proses pengujian. (Lihat Catatan 2i)

Persediaan dalam perjalanan per 31 Desember 2016 dan 2015 merupakan pembelian impor yang masuk dalam kategori persediaan dalam perjalanan karena pada tanggal tersebut posisinya masih berada di pelabuhan (lihat catatan 2i). Persediaan dalam perjalanan per 31 Desember 2016 merupakan pembelian Impor disposable media bag (ukuran 20 liter).

Persediaan dalam proses penggantian per 31 Desember tahun 2016 terutama dari persediaan bahan kemasan yang dinyatakan tidak lulus uji, supplier telah menyetujui mengganti seluruhnya di tahun 2017.

10. ACCRUED INCOME

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Interests on Time Deposits	1.591.887.435
Rent and Profit Sharing	-
Other Incomes	-
Total	1.591.887.435

11. OTHER CURRENT ASSETS

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Inventories in Transit	19.527.456.058
Inventories in Quarantine	89.150.074.099
Inventories in Exchange Process	3.210.439.963
Total	111.887.970.120

Inventories in quarantine are derived from the purchase raw materials of Vaccine, Sera and packaging materials that are in quarantine for testing process. (See Notes 2i)

Inventories in transit per December 31, 2016 and 2015 are the purchase of imports into the category of inventory on its way because on such date the position is still in port (see notes 2i). Inventories in transit per December 31, 2016 is the purchase of Import media disposable bag (size 20 liters).

Inventory in exchange process per December 31, 2016 are primarily from the supply of packaging material which did not pass the test, the supplier has agreed to replace entirely in 2017.

12. ASET TETAP

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

	31 Desember 2016/ December 31, 2016					
	Saldo Awal Beginning Balance	Penambahan Addition	Pengurangan Deduction	Reklasifikasi Reclassification	Saldo Akhir Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	2.059.183.000.000	-	-	-	2.059.183.000.000	Land
Bangunan	557.669.974.701	-	-	73.826.095.977	631.496.070.678	Building
Peralatan Pabrik	1.186.837.114.721	81.796.646.030	-	8.470.956.750	1.277.104.717.501	Factory Equipment
Peralatan Kantor	110.847.807.836	15.055.718.100	-	4.119.697.607	130.023.223.543	Office Equipment
Peralatan Lainnya	70.318.621.945	1.426.000.000	-	26.394.473.750	98.139.095.695	Utilities Equipment
Kendaraan	4.670.890.000	30.043.750	-	-	4.700.933.750	Vehicles
Aset Dalam Penyelesaian						Assets in Construction
Bangunan	241.052.601.947	114.297.867.194	-	(73.826.095.977)	281.524.373.167	Building
Mesin Pabrik, Utility	219.971.521.489	319.853.839.260	-	(38.985.128.107)	500.840.232.644	Factory Equipment, Utility
Jumlah	4.450.551.532.639	532.460.114.334	-	-	4.983.011.646.978	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	148.287.188.859	30.332.905.554	-	-	178.620.094.412	Building
Peralatan Pabrik	587.905.586.503	80.296.418.018	-	-	668.202.004.521	Factory Equipment
Peralatan Kantor	70.918.026.467	21.261.899.865	-	-	92.179.926.332	Office Equipment
Peralatan Lainnya	34.201.520.496	7.416.395.436	-	-	41.617.915.932	Utilities Equipment
Kendaraan	3.702.196.345	502.413.104	-	-	4.204.609.449	Vehicles
Jumlah	845.014.518.670	139.810.031.977	-	-	984.824.550.647	Total
Nilai Tercatat	3.605.537.013.968	-	-	-	3.998.187.096.331	Carrying Value

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

31 Desember 2015/ December 31, 2015						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir	
	<i>Beginning Balance</i>	<i>Addition</i>	<i>Deduction</i>	<i>Reclassification</i>	<i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	17.139.884.957	2.042.043.115.043	-	-	2.059.183.000.000	Land
Bangunan	503.283.794.797	172.606.890	6.561.705.609	60.775.278.622	557.669.974.701	Building
Peralatan Pabrik	1.076.051.116.977	74.972.682.330	1.116.106.105	36.929.421.519	1.186.837.114.721	Factory Equipment
Peralatan Kantor	79.289.422.623	10.255.147.460	1.480.905.406	22.784.143.160	110.847.807.836	Office Equipment
Peralatan Lainnya	67.353.504.185	1.428.735.000	165.617.240	1.702.000.000	70.318.621.945	Utilities Equipment
Kendaraan	5.209.520.100	383.600.000	922.230.100	-	4.670.890.000	Vehicles
Aset Dalam Penyelesaian						Assets in Construction
Bangunan	75.539.261.716	226.288.618.856		(60.775.278.622)	241.052.601.947	Building
Mesin Pabrik, Utility	62.566.134.126	218.820.952.041		(61.415.564.679)	219.971.521.489	Factory Equipment, Utility
Jumlah	1.886.432.639.481	2.574.365.457.620	10.246.564.461	-	4.450.551.532.639	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	123.407.099.292	27.805.546.702	2.925.457.134	-	148.287.188.859	Building
Peralatan Pabrik	509.219.356.056	79.617.295.900	931.065.453	-	587.905.586.503	Factory Equipment
Peralatan Kantor	57.354.835.224	15.033.918.490	1.470.727.247	-	70.918.026.467	Office Equipment
Peralatan Lainnya	29.440.544.079	4.926.593.655	165.617.238	-	34.201.520.496	Utilities Equipment
Kendaraan	3.537.559.855	1.086.866.580	922.230.089	-	3.702.196.345	Vehicles
Jumlah	722.959.394.505	128.470.221.326	6.415.097.161	-	845.014.518.670	Total
Nilai Tercatat	1.163.473.244.976	-	-	-	3.605.537.013.968	Carrying Value

Rincian Aset Dalam Pelaksanaan :

Details of Assets in Construction

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Bangunan			Buildings
Gedung Fasilitas Produksi Vaksin dan Pengemasan	183.611.624.155	114.640.811.657	Vaccine Production and Packaging
Renovasi Gedung Distribusi	48.370.120.838	49.093.263.181	Renovation of Distribution Building
Gedung Fasilitas Vaksin Rekombinan Berbasis Yeast (Gedung No. 16)	27.327.274.842	1.031.044.842	Building Facilities-Based Vaccines Recombinant Yeast (Building No. 16)
Renovasi Ruang BSL2+	8.957.375.500	233.625.000	Renovation of BSL2+ Room
Sentral Hewan Laboratorium - Animal House 2 (SHL-AH2) Building	7.677.061.500	7.674.611.500	Sentral Hewan Laboratorium - Animal House 2 (SHL-AH2) Building
Fasilitas Downstream Vaksin BCG	1.516.467.750	1.473.017.750	Downstream Vaccine BCG Facilities
Gedung Fasilitas Gedung No.3 (Media, Surveillance, Pengujian Mutu)	1.329.758.750	169.250.000	Building Facilities No.3 (Media, Surveillance, Quality Control)
Ruang Penyimpanan Barang dan Spareparts Produksi Vaksin Campak	1.020.964.200	36.800.000	Storage of Goods and Spareparts Measles Vaccine Production
Renovasi Koridor General Fasilitas Produksi Vaksin Tetanus	-	1.828.115.000	Renovation Corridor General Facility Tetanus Vaccine Production
Renovasi Ruangan Produksi Vaksin Influenza	-	31.192.000	Renovation Tetanus Vaccine Production Room
Renovasi Ruang Berkelas Produksi Vaksin Pertusis	-	38.486.400	Class room renovation Production Pertusis Vaccine
Bak Sentral Air Baku	-	15.823.046.636	Liquid Central Tub
Renovasi Gedung Utama Untuk Kawasan Heritage	-	41.638.610.004	Renovation of Main Building Heritage
Fasilitas Ruang Trafo	-	6.032.399.140	Voltage Regulator Room
Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar)	1.713.725.632	1.308.328.837	Others (under Rp1 billion)
Jumlah	281.524.373.167	241.052.601.947	Total

12. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Mesin, Pabrik dan Utility Dalam Pelaksanaan	
Filling Line BCG	119.362.615.929
Integrated WTP	101.996.896.326
Integrated Filling Line 3 Vial	
For Lyo (M) MR Vaccinne (Gedung 43)	93.475.499.356
Integrated Filling Line For Filling Line 4	51.723.952.481
Packaging Line	36.348.107.363
Utilitas Listrik Gedung Vaksin Pengemasan	35.042.536.070
Vial Ampoule Packaging Line	18.349.032.204
Sistem Kromatografi Kolom	8.001.000.000
Water Chiller	5.977.245.025
Autoclave Acellular Pertusis	4.477.507.901
Autoclave For Sterilization And Drying	
Rubber Stopper/PV BCG	4.357.926.623
Autoclave/PMVV	4.250.677.222
Isolator	4.129.665.128
Bioreactor 150L	3.261.929.763
Mesin Boiler	-
TFF System	1.855.000.000
Gardu Hubung PLN	1.673.341.150
URS SIPV	1.568.756.550
Aset Pabrik/ Mesin/ Utility/ Kantor Eks. IHU	1.441.702.625
FFF URS Documents FFPV	1.063.601.200
Kompresor Udara	-
Lainnya (di bawah Rp 1 Milyar)	2.483.239.728
Jumlah	<u>500.840.232.644</u>

Pada bulan Desember 2015, Perusahaan mengubah kebijakan untuk pengukuran aset tetap tanah yang semula diukur berdasarkan model biaya menjadi model revaluasi dengan nilai semula sebesar Rp17.139.884.957 menjadi sebesar Rp2.059.183.000.000.

Selisih antara nilai tercatat dan nilai revaluasi (nilai wajar) setelah dikurangi pajak terkait diakui sebagai surplus revaluasi aset tetap di kelompok penghasilan komprehensif lain. Aset tanah yang direvaluasi meliputi tanah yang berlokasi di Jalan Pasteur Nomor 28 dan jalan Kolonel Masturi Cisarua. Penilaian dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Karmanto dan Rekan dengan laporan Nomor 256-A/KMT&R-LP/XII/2015 dan Nomor 256-B/KMT&R-LP/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

Pada tahun 2009 Perusahaan menyediakan lahan untuk digunakan sebagai fasilitas vaksin flu burung oleh Departemen Kesehatan RI. Lahan tersebut berlokasi di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat seluas 5.145 m² dan di Jalan Pasteur seluas 3.953 m². Sejak tahun 2011 proyek tersebut terhenti dan sampai dengan tanggal laporan ini lahan tersebut masih tertutup dan belum dapat digunakan oleh Perusahaan.

Sebagian aset tetap yang terdiri dari mesin, inventaris dan peralatan pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung senilai Rp180.000.000.000 dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berdasarkan berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No. PBD/SP3/30/2016 tanggal 6 Juni 2016 untuk jangka waktu kredit sampai dengan 24 Juni 2017 (catatan 37.h)

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
Machinery, Factory and Utility in Construction	
BCG Filling Line	67.850.959.363
WTP Integrated	54.203.823.960
Integrated Filling Line 3 Vial	-
For Lyo (M) MR Vaccinne (Gedung 43)	-
Integrated Filling Line For Filling Line 4	-
Packaging Line	21.009.883.508
Utility - Electricity of Vaccine Packaging	43.344.066.926
Vial Ampoule Packaging Line	14.482.911.884
Chromatography Colom System	-
Water Chiler	-
Autoclave Acellular Pertusis	4.477.507.901
Autoclave For Sterilization And Drying Rubber Stopper/P.V BCG	-
Autoclave/PMVV	-
Isolator	-
Bio Reactor 150L	-
Boiler	1.985.500.000
TFF System	-
Substation PLN	-
URS SIPV	1.568.756.550
Utility/Ex. IHU Office	1.662.238.625
FFF URS Documents	1.063.601.200
Air Compressor	3.998.055.000
Others	4.324.216.573
Total	<u>219.971.521.489</u>

On December, 2015 the Company changed the measurement policy for its land. The land, which was previously measured based on cost model with the carrying value of Rp17.139.884.957, was changed to be measured by revaluation model with the value of Rp2.059.183.000.000.

The difference between the carrying value and revaluation value (fair value) after deducted with related tax is recognized as revaluation surplus in other comprehensive income section. The land that was revaluated comprise land located at Jalan Pasteur No.28 and Jalan Kolonel Masturi, Cisarua. Valuation of the assets was carried out by Kantor Jasa Penilai Publik Karmanto dan Rekan with his report No.256-A/KMT&R-LP/XII/2015 and No.256-B/KMT&R-LP/XII/2015 dated December 17, 2015.

In 2009 the Company provided certain areas on its owned lands for use by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to build bird flu vaccine facilities. The areas located at Kertawangi, Cisarua, District of West Bandung in the area of 5,145 m² and at Jalan Pasteur of 3,953 m². Since 2011 the project has been suspended, and until this reporting date the areas are roped off and have not used by the Company.

Several property, plant and equipment consist of machinery, office and manufacture equipments located at Jalan Pasteur No.28 Bandung amounting to Rp180.000.000.000 have been placed as fiduciary collateral for credit facility from an export financing agency named the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) based on the Letter of Approval for Extended Financing Facility (SPPFP) No.PBD/SP3/30/2016 dated June 6, 2016 for the extension of loan period until June 24, 2017.(notes 37.h)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Sebagian inventaris mesin yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung senilai Rp265.000.000.000 juga dijadikan jaminan atas fasilitas KMK sub limit non cash loan, Treasury Line dan Bills Purchasing Line dan tambahan fasilitas KMK sublimit NCL dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CBG.CB1/SPPK/SPD.003/2016 tanggal 24 Mei 2016 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Agustus 2017 (catatan 37.g)

Kendaraan telah diasuransikan terhadap risiko All Risk dan Total Loss Only (TLO) kepada PT Asuransi Parolamas dan PT Asuransi Jasa Tania dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp2.689.911.859,92.

Aset tetap kecuali tanah dan kendaraan, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Bumiputera Muda 1967 (Cover Note : 083-E/T/Bmd-Bdg/XII/2016); PT Mandiri AXA General Insurance (Cover Note : CN/PAR/BDG-001674 & 001675/12/2016/NDN); PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Polis No. 401.297.110.16.00023); PT Asuransi Kredit Indonesia (Cover Note : 44 & 45/BF/XII/2016) dan PT Asuransi Jasa Tania (Polis No. IP050316000175) terhadap semua risiko kecuali gempa bumi berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp2.082.028.772.328,81. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas risiko kerugian.

Beban penyusutan aset tetap tahun 2016 dan 2015 dialokasikan sebagai berikut :

	31 Desember 2016	31 Desember 2015	
	December 31, 2016	December 31, 2015	
Beban Produksi	94.063.940.863	91.252.162.057	Production Expense
Beban Jasa	175.203.364	228.728.122	Service Expense
Beban Administrasi dan Umum	22.253.869.462	19.648.209.985	General and Administration Expense
Beban Penjualan	4.824.807.641	1.794.042.048	Selling Expense
Beban Penelitian			Research, Development
Pengembangan dan Surveilans	18.492.210.647	15.547.079.115	and Surveillance Expense
Jumlah	139.810.031.977	128.470.221.326	Total

13. ASET TAKBERWUJUD**12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)**

Other machinery equipments located at Jl. Pasteur 28 Bandung at the amount of Rp 265.000.000.000 have also been placed for non-cash loan facilities which consist of the issuance of Import LC (sight, usance & UPAS); treasury line; and bills purchasing line from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on Letter of Credit Offering (SPPK) No.ICBG.CB1/SPPK/SPD.003/2016 , dated May 24 ,2016 for one year from August 14, 2016 until August 14, 2017.(notes 37.g)

Vehicles have been insured against All Risks and Total Loss Only (TLO) from PT Asuransi Parolamas and PT Bumiputera Muda 1967 with coverage value of Rp2.689.911.859.

Property, plant and equipment, except land, have been insured against fire and other risks, unless the earthquake, from PT Asuransi Bumiputera Muda (Cover Note : 083-E/T/Bmd-Bdg/XII/2016) PT Mandiri AXA General Insurance (Cover Note : CN/PAR/BDG-001674 & 001675/12/2016/NDN); PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (Polis No. 401.297.110.16.00023); PT Asuransi Kredit Indonesia (Cover Note : 44 & 45/BF/XII/2016) and PT Asuransi Jasa Tania (Polis No. IP050316000175) under certain policy packages with coverage value of Rp2.082.028.772.328,81. The management believes that the amount of insurance coverage is adequate to cover potential losses from the insured risk.

Depreciation expenses of property, plant and equipment for 2016 and 2015 were allocated to as follows:

13. INTANGIBLE ASSETS

31 Desember 2016					
Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir	
Beginning Balance	Addition	Deduction	Reclassification	Ending Balance	
Nilai Bruto					The gross Value
Pengembangan Upstream Vaksin					Development of Upstream
Flu dalam Penyelesaian	13.677.686.708	960.720.000	-	14.638.406.708	Flu Vaccine in progress
Perangkat Lunak	30.065.551.789	-	-	39.593.341.639	Software
Perangkat Lunak dalam Penyelesaian	3.619.902.095	9.228.039.259	-	3.320.151.504	Software in Progress
Jumlah	47.363.140.592	10.188.759.259		57.551.899.851	Total
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Perangkat Lunak	11.358.121.029	7.560.181.764	-	18.918.302.793	of Software
Jumlah	11.358.121.029	7.560.181.764	-	18.918.302.793	Total
Nilai Buku	36.005.019.563			38.633.597.058	Book Value

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

13. INTANGIBLE ASSETS (continued)

31 Desember 2015						
Saldo Awal <i>Beginning Balance</i>	Penambahan <i>Addition</i>	Pengurangan <i>Deduction</i>	Reklasifikasi <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>		
Nilai Bruto						The gross Value
Pengembangan Upstream Vaksin						<i>Development of Upstream</i>
Flu dalam Penyelesaian	12.338.806.708	1.338.880.000	-	-	13.677.686.708	<i>Flu Vaccine in progress</i>
Perangkat Lunak	29.629.901.789	-	-	435.650.000	30.065.551.789	<i>Software</i>
Perangkat Lunak dalam Penyelesaian	278.760.500	3.880.341.595	103.550.000	(435.650.000)	3.619.902.095	<i>Software in Progress</i>
Jumlah	42.247.468.997	5.219.221.595			47.363.140.592	Total
Akumulasi Amortisasi						<i>Accumulated Amortization</i>
Perangkat Lunak	4.392.006.950	6.966.114.079	-	-	11.358.121.029	<i>of Software</i>
Jumlah	4.392.006.950	6.966.114.079			11.358.121.029	Total
Nilai Buku	37.855.462.048				36.005.019.563	Book Value

Biaya pengembangan *Upstream* Vaksin Flu dicatat sebagai aset takberwujud sesuai Nota Dinas No.09698/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009. Biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan penerapan temuan riset atau pengetahuan produksi vaksin flu yang berbasis telur dari penyiapan telur, pembuatan *bulk*, uji klinis sampai registrasi dari produk tersebut.

Biaya Pengembangan Upstream Vaksin Flu Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2016 sebesar Rp14.638.406.708 merupakan biaya yang terkait dengan transfer teknologi upstream flu dengan BIKEN - Jepang yang meliputi aktivitas pengembangan vaksin flu pada skala pilot (5000 telur), optimalisasi proses produksi pada skala pilot untuk menghasilkan yield (hasil) yang ekonomis, produksi preclinical lot, uji pra klinis (uji immunogenisitas pada hewan coba mencit), hingga produksi clinical lot untuk vaksin flu prepandemik, ujiantang (challenge study) pada hewan uji ferret dan uji preklinis immunogenicity.

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan mulai tahun 2017 untuk vaksin flu (pre-pandemik) meliputi Uji klinis fase 2 dan 3 serta lisensi/registrasi produk ke BPOM diharapkan dapat diselesaikan hingga tahun 2017.

Biaya pengembangan *Upstream* Vaksin Flu ini akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat 8 (delapan) tahun sejak vaksin tersebut diproduksi secara komersial.

Cost of development of Upstream Flu Vaccines is recorded as intangible assets in accordance with the Office Memo No.09698/XII/ 2009 dated December 21, 2009. This cost represents cost incurred related to the application of research findings or egg-based production knowledge of flu vaccine from egg preparation, bulk manufacture, clinical trials, to registration of the product.

The development cost of upstream flu vaccine in progress as of December 31, 2016 amounting to Rp14.638.406.708 represents costs related to transfer of upstream flu technology from Biken - Japan that include activities of flu vaccine development at a pilot scale (5000 eggs), optimization of production process at the pilot scale to meet economic yields, preclinical production lots, pre-clinical trials (immunogenicity trials at experimental mice animals), until production of clinical lots for prepandemic flu vaccine and challenge study at experimental ferret animals.

Phase 2 and 3 of clinical trials and licence/ registration of the product to BPOM can be completed on year of 2017.

Cost of development of upstream flu vaccine will be amortized based on a straight-line basis over its economic benefits of 8 (eight) years since the vaccines are produced commercially.

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Beban Tangguhan	9.024.791.000	9.024.791.000	<i>Deferred Charge</i>
Dikurangi :			<i>Less :</i>
Akumulasi Amortisasi Beban Tangguhan	(3.869.122.375)	(2.049.474.625)	<i>Accumulated Amortization Deferred Charge</i>
Jumlah Beban Tangguhan Bersih	5.155.668.625	6.975.316.375	<i>Total Deferred Charges - Net</i>
Setoran Jaminan	3.288.940.496	3.288.940.496	<i>Guarantee Deposits</i>
Sewa Dibayar Dimuka	4.048.594.667	10.989.042.667	<i>Prepaid Rent</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	12.493.203.788	21.253.299.538	Total Other Non-Current Assets

Beban tangguhan merupakan biaya sistem jaringan listrik PLN ditanggihkan yang diamortisasi selama 4 tahun.

Deferred charge represents cost of installation of PLN electricity system which were deferred and amortized over 4 years.

PT BIO FARMA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Saldo sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2016 terutama berasal dari bagian tidak lancar sewa dibayar dimuka lahan BMN eks BPPN di Jasinga Bogor sebesar Rp20.821.344.000 untuk jangka waktu selama 3 tahun. (lihat catatan 9)

Setoran jaminan merupakan jaminan yang diberikan untuk penambahan daya listrik, sewa gedung Pakarti Center (Kantor Perwakilan Perusahaan) dan jaminan gas elpiji.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Balance of prepaid rent as of December 31, 2016 is a non-current section of rental BMN land ex.BPPN at Jasinga, Bogor amount to Rp20.821.344.000 for three years (see notes 9).

Guarantee deposits represent deposits provided for additional electric power, rental of Pakarti Center Building (Directors' Representative Office) and LPG.

15. UTANG USAHA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Pihak Berelasi	
Bahan Baku/Penolong	14.523.438.820
Investasi	10.581.424.945
	<u>25.104.863.765</u>
Pihak Ketiga	
Bahan Baku/Penolong	98.449.962.061
Investasi	122.288.208.903
Pengadaan Jasa	13.391.431.334
	<u>234.129.602.297</u>
Jumlah Utang Usaha	<u>259.234.466.062</u>

Rincian Pihak Berelasi

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Bahan Baku/Penolong	
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	12.735.214.926
CV Karya Cahya Abadi	1.627.232.908
PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	160.990.986
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	-
Jumlah	<u>14.523.438.820</u>

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Investasi	
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	8.351.209.045
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)	2.133.994.250
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	-
PT INTI	71.221.650
CV Karya Cahya Abadi	25.000.000
Jumlah	<u>10.581.424.945</u>

Rincian Pihak Ketiga

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Bahan Baku/Penolong	
Rupiah	
PT Merck Sharp & Dohme Indonesia	5.507.502.934
PT MGI ASIA PACIFIC	4.937.337.045
PT Bakti Mega Lestari	4.447.207.500
Sanofi	3.000.000.000
CV EMS	3.475.630.740
CV Pop Grafika	2.715.756.250
PT Pall Filtration Indonesia	2.285.820.700
CV Sinar Gemilang	1.992.623.000
PT Sabil Huda Utama	1.631.131.916
jumlah dipindahkan	<u>29.993.010.085</u>

15. TRADE PAYABLES

	31 Desember 2015 December 31, 2015

	7.729.733.346
	7.206.226.224
	<u>14.935.959.570</u>

	156.071.710.697
	31.238.122.285
	6.352.307.027
	<u>193.662.140.009</u>

	<u>208.598.099.578</u>

Related Parties
Raw Materials/Auxiliary
Investment

Third Parties
Raw Materials/Auxiliary
Investment
Services

Total Trade Payables

Details of Related Parties

Raw Materials/Auxiliary
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)
CV Karya Cahya Abadi
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Total

Investasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero)
Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PT INTI
CV Karya Cahya Abadi
Total

Details of Third Parties

Raw Materials/Auxiliary
Rupiah
PT Merck Sharp & Dohme Indonesia
PT MGI ASIA PACIFIC
PT Bakti Mega Lestari
Sanofi
CV EMS
CV Pop Grafika
PT Pall Filtration Indonesia
CV Sinar Gemilang
PT Sabil Huda Utama
Carried forward

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. TRADE PAYABLES (continued)

34

PT BIO FARMA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Investasi/Pembelian Aset (lanjutan)	
Mata Uang Asing	
MGI	
2016 : EUR 4,671,596.11	66.073.254.231
Azbil Telstar Technologies, S.L.U	
2016 : EUR 797,500.00	11.293.836.125
Melchers Techexport Gmbh	
2016 : CHF 270,840.00	3.569.064.518
Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar)	-
Jumlah - Mata Uang Asing	80.936.154.875
Jumlah Investasi	<u>122.288.208.903</u>
Pengadaan Jasa	
Jasa Audit Manajemen dan Riset	8.262.850.330
Biaya Impor	5.128.581.004
Jumlah Pengadaan Jasa	<u>13.391.431.334</u>

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Beban Karyawan dan Lainnya	19.663.061.885
Jasa Produksi Karyawan	75.290.000.000
Beban Angkutan dan Embalage	2.449.122.398
Jasa Profesional	1.358.453.255
Keagenan Ekspor, Royalti dan Insentif Penjualan	7.985.174.769
Beban Kantor	5.689.177.303
Pemeliharaan dan Perbaikan	-
Monitoring Kualitas Produk	-
Bangunan, Mesin dan Pabrik Dalam Penyelesaian	-
Lainnya (di bawah Rp 1 Miliar)	970.218.637
Jumlah	<u>113.405.208.247</u>

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Swasta Dalam Negeri	44.130.371
Berna Propam	-
Biological Ltd	-
Jumlah	<u>44.130.371</u>

18. LIABILITAS LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2016 <u>December 31, 2016</u>
Titipan Potongan Karyawan	165.872.829
Tantiem	18.849.515.000
Taksasi Ongkos angkut dan embalage	12.937.959.640
Lainnya	907.462.156
Jumlah	<u>32.860.809.624</u>

15. TRADE PAYABLES (continued)

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
Investment/Acquisition of Assets (continued)	
Foreign Currencies	
MGI	
2016 : EUR 4,671,596.11	-
Azbil Telstar Technologies, S.L.U	
2016 : EUR 797,500.00	-
Melchers Techexport Gmbh	
2016 : CHF 270,840.00	-
Others (less than Rp1 billion)	181.563.905
Total - Foreign Currencies	181.563.905
Total Investment	<u>31.238.122.285</u>

16. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
Employee and Others Expenses	
Employee Bonus	11.729.481.207
Freights and Embalage	100.122.000.000
Professional Services	10.324.775.117
Export Agencies, Royalties and Sales Incentives	1.676.995.600
Office Expenses	10.485.597.035
Repair and Maintenance	1.060.482.599
Monitoring of Product Quality	3.346.196.797
Building, Machinery, and Factory Equipment in Progress	3.699.527.065
Others (less than Rp1 billion)	24.819.174.229
Total	<u>170.307.683.566</u>

17. UNEARNED REVENUE

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
Domestic Private	45.604.661
Berna Propam	529.728.000
Biological Ltd	323.382.390
Total	<u>898.715.051</u>

18. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2015 <u>December 31, 2015</u>
Employee Deposits	757.910.368
Management Bonus	20.324.515.000
Estimated Freights and Embalage	7.691.035.092
Others	1.567.169.252
Total	<u>30.340.629.712</u>

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menerapkan liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2013). Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh karyawan tetap dan kontrak ke dalam program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya.

Uraian berikut ini merupakan rangkuman perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tahun 2016 dan 2015 yang diakui pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Perhitungan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan per 31 Desember 2016 dilakukan oleh berdasarkan proyeksi perhitungan tahun 2016 yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria dalam laporan No.3472/KIS/LA/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Beban Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Beban Jasa Kini	10.891.724.096
Beban Bunga	13.833.995.459
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	(12.436.507.984)
Pembayaran GSH (beban langsung)	5.041.776.979
Jumlah	17.330.988.550

Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal Nilai Kini	
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	152.021.928.119
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	(12.436.507.984)
Dampak Perubahan Asumsi Aktuarial	10.121.564.306
Beban Jasa Kini	10.891.724.096
Beban Bunga	13.833.995.459
Pembayaran GSH	(5.491.294.156)
Laba (Rugi) aktuarial atas kewajiban	(1.808.335.678)
Saldo Akhir	167.133.074.162

Perubahan Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal	152.021.928.119
Beban Imbalan Pasca Kerja Tahun Berjalan	17.330.988.550
Pembayaran Pensiun	(3.750.178.135)
Pembayaran GSH (sesuai cadangan)	(1.741.116.021)
Pembayaran GSH (beban langsung)	(5.041.776.979)
Penghasilan Komprehensif Lain	8.313.228.628
Saldo Akhir	167.133.074.162

19. ESTIMATED POST EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The Company accounts for post employment benefits liabilities in conformity with PSAK 24 (Revised 2013). In addition, the Company arranges a defined contribution pension plan covering both its permanent and contract employees. The plan is managed by Financial Institutions of Pension Fund (DPLK) PT Asuransi Jiwasraya.

The following information is the summary of computation of post employment benefit expenses and liabilities which were recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statement of financial position. The amount of estimated post employment benefit liabilities for December 31, 2016 and 2015 and post employment benefit expenses for the years ended December 31, 2016 and 2015 were computed using "Projected Unit Credit" method by independent actuary of PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial as mentioned in its report No. 3472/KIS/LA/12/2016 dated December 30, 2016.

Pos Employment Benefit Expense

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	9.878.758.594	Current Service Cost
	10.909.448.789	Interest Expense
	-	Change Impacts curtailment and settlement
	3.216.471.283	Payments of GSH (direct charges)
	24.004.678.666	Total

Estimated Pos Employment Benefit Liabilities

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	136.368.109.865	Beginning Balance of Present Value of Post-Employment Liability
	(17.841.900.282)	Change Impacts curtailment and settlement
	9.878.758.594	Effect of Changes in Actuarial Assumption
	10.909.448.789	Current Service Cost
	(5.962.615.005)	Interest Expense
	18.670.126.158	Payment of GSH
	152.021.928.119	Actuarial Gain (Loss) on Liability
		Ending Balance

Changes in Estimated Post Employment Benefit Liabilities

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	136.368.109.865	Beginning Balance
	24.004.678.666	Employee Benefit Expense of the Year
	(5.224.344.058)	Payments of Pension
	(738.270.947)	Payments of GSH (reserved)
	(3.216.471.283)	Payments of GSH (direct charges)
	828.225.876	Other Comprehensive Income
	152.021.928.119	Ending Balance

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)**Asumsi Utama Yang Digunakan**

	2016
Usia Pensiun Normal	56 Tahun
Tingkat Diskonto	9,10%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8%
Tabel Mortalita	TMI III 2011
Tingkat Cacat	1% dari Mortalita 0 %
Tingkat Pengunduran Diri	0 % - 2 %

20. LIABILITAS TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Grant	-
	-

Pada tahun 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian untuk melaksanakan suatu proyek riset dan pengembangan yang dibiayai dengan Grant sebesar US\$2,918,998.00. Perjanjian ini berlaku sejak 17 November 2014 sampai dengan 31 Juli 2017 dengan evaluasi berkala. Pada 31 Desember 2016 proyek telah diselesaikan seluruhnya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian dan telah disetujui. Oleh karena itu perusahaan telah mengakui seluruh grant sebagai pendapatan hibah pada tanggal 31 Desember 2016.

21. MODAL SAHAM

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Modal Ditempatkan dan Disetor Pada Awal Tahun	8.000.000.000.000
Kapitalisasi Cadangan ke Modal Disetor	(6.000.000.000.000)
Modal ditempatkan dan disetor pada akhir tahun	2.000.000.000.000

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No 34, tanggal 14 Desember 2016, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0024481.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bio Farma (Persero), modal dasar Perseroan meningkat dari semula Rp5.000.000.000.000,00 (terdiri dari 5.000.000 lembar saham) menjadi Rp8.000.000.000.000,00 (terdiri dari 8.000.000 lembar saham).

Modal ditempatkan dan disetor Perusahaan meningkat dari semula Rp1.650.000.000.000 (terdiri dari 1.650.000 lembar saham) menjadi Rp2.000.000.000.000 (terdiri dari 2.000.000 lembar saham) dengan mengkapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp350.000.000.000.

19. ESTIMATED POST EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

	2015
Usia Pensiun Normal	56 Tahun
Tingkat Diskonto	9,10%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	8%
Tabel Mortalita	TMI III 2011
Tingkat Cacat	1% dari Mortalita 0 %
Tingkat Pengunduran Diri	0 % - 2 %

The Principal Assumptions Used

Normal Pension Age
Discount Rate
Projection of Salary Increase Rate
Mortality Table
Disability Rate
Resignation Rate

20. OTHER NON-CURRENT LIABILITY

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Grant	27.846.382.388
	27.846.382.388

In 2014, the Company entered into an agreement to perform a research and development project that funded by grant amounting to US\$2,918,998.00. The agreement is in effect since November 17, 2014 and will be due on July 31, 2017 with regular evaluation. On December 31, 2016 the project has completed entirely in accordance with the terms of the agreement and has been approved. Therefore, companies have recognized the entire grant as income grant on December 31, 2016.

21. SHARE CAPITAL

	31 Desember 2015 December 31, 2015
Share Capital Issued and Paid at Beginning of Year	5.000.000.000.000
Capitalization of Appropriated Earnings to Share Capital	(3.350.000.000.000)
Share Capital Issued and Fully Paid at End of Year	1.650.000.000.000

In accordance with the Statement of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) No. 34, dated December 14, 2016, and the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia No. AHU 0024481.AH.01.02 2016 dated December 21, 2016, regarding Approval of Amendment of Articles of Association Limited Liability Company PT Bio Farma (Persero), the Company's authorized capital increased from Rp5.000.000.000.000,00 (consisting of 5,000,000 shares) to Rp8.000.000.000.000,00 (consisting of 8,000,000 shares).

the issued and fully paid shares was increased from Rp1.650.000.000.000 (consist of 1.250.000 shares) to Rp2.000.000.000.000 (1.650.000 shares) through capitalization of some portion of the appropriated earnings as of December 31, 2015 amount to Rp350.000.000.000

22. SALDO LABA DAN PENGGUNAAN LABA

a. Saldo Laba - Dicapangkan

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Awal Tahun	816.422.044.549
Pembentukan Cadangan	435.885.891.245
Kapitalisasi Cadangan ke Setoran Modal	(350.000.000.000)
Alokasi untuk	
Bina Lingkungan	-
Konversi Cadangan Akibat Penerapan PSAK 24 Tahun 2015	(2.483.699.451)
Saldo laba dicadangkan	
Akhir Tahun	899.824.236.342

Sesuai dengan PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan mengalokasikan dana cadangan untuk bina lingkungan.

b. Saldo Laba - Belum Dicapangkan

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Saldo Laba Pada Awal Tahun	668.109.191.794
Pembagian Laba :	
Dividen	(234.707.000.000)
Cadangan	(435.885.891.245)
Konversi Cadangan Akibat Penerapan PSAK 24 Tahun 2015	2.483.699.451
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	501.040.990.083
Saldo laba belum dicadangkan	
Akhir Tahun	501.040.990.083

Penggunaan Laba

Pembagian atas laba bersih tahun 2015 dan 2014 ditetapkan dalam RUPS tentang persetujuan laporan keuangan tahunan, pengesahan perhitungan tahunan, dan pembagian laba bersih tahun buku 2015 dan 2014 pada tanggal 10 Juni 2016 dan 13 Mei 2015.

	Laba Tahun Buku 2015 Profit for the Year of 2015	
	Jumlah Total	Persen Percent
Dividen	234.707.000.000	35,00%
Cadangan	435.885.891.245	65,00%
Jumlah	670.592.891.245	100,00%

Sesuai surat Menteri BUMN No.S-25/DI.MBU/8/2015 tanggal 4 Agustus 2015 dan No.S-805/MBU/2014 tanggal 23 Desember 2014, merubah keputusan RUPS dengan memutuskan mengeluarkan dana Bina Lingkungan yang berasal dari cadangan tahun buku 2014 sebesar Rp4.711.557.655 untuk tahun 2015 dan tambahan dividen sebesar Rp57.247.000.000 untuk tahun 2014.

22. RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTION OF INCOME

a. Retained Earnings - Appropriated

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	786.074.860.369	Beginning Balance
	435.058.741.834	Establishment of Appropriated
	(400.000.000.000)	Capitalization to Share Capital
		Allocation to
	(4.711.557.655)	Community Development Program
	-	Conversion of implementation of
		PSAK 24 to appropriated earning
Retained Earnings -		
Appropriated at End of Year	816.422.044.549	

Based on PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 regarding Partnerships and Community Development Program of the State-Owned Enterprises, the Company allocated fund from appropriated earnings for Community Development.

b. Retained Earnings - Unappropriated

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	577.590.042.383	Beginning Balance
		Distribution of Income :
	(145.015.000.000)	Dividend
	(435.058.741.834)	Appropriated
		Conversion of implementation of
	-	PSAK 24 to appropriated earning
	670.592.891.245	Profit (Loss) for the Year
Retained Earnings -		
Unappropriated at End of Year	668.109.191.794	

Distribution of Income

The distribution of net income for the years of 2015 and 2014 was decided in the General Meeting of the Company's Shareholders regarding the approval of the annual financial statements and distribution of net income for the years of 2015 and 2014 on June 10, 2016 and Mei 13, 2015, respectively.

	Laba Tahun Buku 2014 Profit for the Year of 2014		
	Jumlah Total	Persen Percent	
	145.015.000.000	25,00%	Dividend
	435.058.743.000	75,00%	Appropriated
Total	580.073.743.000	100,00%	Total

The letter of the Ministry of State-Owned Enterprises No.S-25/DI.MBU/8/2015 dated August 4, 2015 and No.S-805/MBU/2014 dated December 23, 2014 changed the decision of the above Shareholders' General Meeting and decided to allocate from Appropriated Earnings year 2014 for Community Development Program amount to Rp4.711.557.655 and for additional dividend year 2014 amount to Rp57.247.000.000.

23. PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

23. SALE OF THE COMPANY'S PRODUCTS

2016					
	Pemerintah Government	Swasta / Private		Jumlah Total	
		Lokal / Local	Ekspor / Export		
Vaksin Bakteri	157.149.991.400	232.065.117.014	143.650.102.476	532.865.210.890	Bacterial Vaccines
Vaksin Virus	274.617.304.400	57.062.606.898	1.104.717.566.674	1.436.397.477.972	Virus Vaccines
Vaksin Kombinasi	185.243.559.000	15.451.346.226	-	200.694.905.226	Combination Vaccines
Sera & Diagnostika	-	74.695.936.900	-	74.695.936.900	Sera and Diagnostics
Jumlah	617.010.854.800	379.275.007.038	1.248.367.669.150	2.244.653.530.988	Total
Dikurangi :					Less :
Potongan Penjualan	-	(22.338.621.125)	-	(22.338.621.125)	Sales Discount
Jumlah Bersih	617.010.854.800	356.936.385.913	1.248.367.669.150	2.222.314.909.863	Total - Net
2015					
	Pemerintah Government	Swasta / Private		Jumlah Total	
		Lokal / Local	Ekspor / Export		
Vaksin Bakteri	137.172.040.320	6.748.047.465	161.368.475.222	305.288.563.007	Bacterial Vaccines
Vaksin Virus	191.216.166.040	47.576.135.760	1.466.512.198.564	1.705.304.500.364	Virus Vaccines
Vaksin Kombinasi	242.230.811.900	3.264.845.220	7.908.542.987	253.404.200.107	Combination Vaccines
Sera & Diagnostika	-	80.664.022.440	25.251.360	80.689.273.800	Sera and Diagnostics
Jumlah	570.619.018.260	138.253.050.885	1.635.814.468.134	2.344.686.537.279	Total
Dikurangi :					Less :
Potongan Penjualan	-	(15.062.691.228)	-	(15.062.691.228)	Less: Sales Discount
Jumlah Bersih	570.619.018.260	123.190.359.657	1.635.814.468.134	2.329.623.846.051	Total - Net

24. PENJUALAN BARANG DAGANGAN

24. SALE OF MERCHANDISE PRODUCT

	2016	2015	
Pemerintah			Government
Vaksin IPV 5 ds	18.376.875.000	-	Vaccines IPV 5 ds
Vaksin IPV 10 ds	45.988.150.000	-	Vaccines IPV 10 ds
Swasta			Private
Vaksin HPV	22.803.750.000	-	Vaccines HPV
Imovac Rabies Vero	-	8.528.400.000	Imovac Rabies Vero
Polyvalent Snake Anti Venom	1.125.360.000	3.393.270.000	Polyvalent Snake Anti Venom
Jumlah	88.294.135.000	11.921.670.000	Total
Dikurangi : Potongan Penjualan	(165.287.250)	(485.734.950)	Less: Sales Discount
Jumlah Bersih	88.128.847.750	11.435.935.050	Total - Net

25. PENJUALAN JASA

25. SALE OF SERVICES

	2016	2015	
Imunisasi	3.974.742.832	3.529.375.894	Immunization
Laboratorium	1.660.380.480	1.329.312.707	Laboratorium
Jumlah	5.635.123.312	4.858.688.601	Total
Dikurangi : Potongan Penjualan	(319.866.802)	(199.750)	Less: Sales Discount
Jumlah Bersih	5.315.256.509	4.858.488.851	Total Sales of Service-Net

Hasil penjualan imunisasi diperoleh dari jasa imunisasi vaksin dan serum, sedangkan hasil penjualan laboratorium diperoleh dari jasa pengujian mutu dan pemeriksaan laboratorium.

Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2015 unit pelayanan jasa diubah statusnya menjadi *Strategic Business Unit* (SBU) dengan nama Unit Bisnis Klinik dan Imunisasi.

Sales of immunization obtained from vaccine and serum immunization services, whereas sales of laboratory obtained from providing the laboratory and quality testing services.

Since August 6, 2015, the status of the services unit has changed to be a strategic business unit named Clinical and Immunization Business Unit.

PT BIO FARMA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. BEBAN POKOK PENJUALAN PRODUK PERUSAHAAN

	2016
Beban Produksi	
Pemakaian Bahan baku	499.823.977.308
Pemakaian Bahan Penolong	169.623.828.954
Karyawan	176.057.198.069
Sosial Karyawan	6.516.956.525
Perjalanan Dinas	3.880.814.195
Jasa Profesional	2.205.416.798
Pemeliharaan dan Perbaikan	150.225.162.776
Asuransi	2.372.476.078
Penyusutan dan Amortisasi	99.906.185.480
Kantor	10.662.356.362
Peningkatan dan Pengembangan SDM	3.654.482.732
Total Beban Produksi	1.124.928.855.277
Persediaan Produk Dalam Proses	
Awal Tahun	222.475.046.209
Akhir Tahun	(357.924.068.324)
Beban Pokok Produksi	989.479.833.161
Persediaan Produk Jadi	
Awal Tahun	33.161.706.767
Kadaluarsa/Rusak	(6.396.852.325)
Promosi, Disumbangkan, Penggantian, dan Pemakaian Sendiri	(1.829.814.530)
Beban Pokok Barang Tersedia Untuk Dijual	1.014.414.873.074
Dijual untuk Imunisasi	(678.614.028)
Akhir Tahun	(81.857.215.656)
Jumlah	931.879.043.389

27. BEBAN POKOK PENJUALAN BARANG DAGANGAN

	2016
Persediaan Awal Tahun	2.010.514.545
Pembelian	69.323.220.015
Tersedia untuk Dijual	71.333.734.560
Kadaluarsa/rusak	(469.961.502)
Digunakan untuk Promosi, Penggantian, Pemakaian Sendiri dan Disumbangkan	(907.950.034)
Digunakan untuk Imunisasi	(425.209.308)
Persediaan Akhir Tahun	(1.077.050.535)
Jumlah	68.453.563.181

28. BEBAN JASA

	2016
Pemakaian Produk Jadi untuk Imunisasi	678.614.028
Pemakaian Barang Untuk Imunisasi	425.209.308
Pemakaian Bahan Baku dan Penolong	80.542.435
Karyawan	2.492.880.473
Perjalanan Dinas	171.205.907
Jasa Profesional	410.402.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	150.922.812
Penyusutan Aset Tetap	175.203.364
Asuransi	2.012.006
Beban Kantor	273.151.725
Peningkatan dan Pengembangan SDM	101.379.000
Jumlah	4.961.523.057

26. COST OF GOODS SOLD OF THE COMPANY'S PRODUCTS

	2015
380.912.218.668	
178.517.469.375	
156.483.416.763	
6.932.315.372	
4.256.820.789	
1.360.224.048	
117.567.176.606	
2.266.428.552	
95.550.245.007	
11.264.457.601	
7.496.843.836	
962.607.616.619	

Production Costs	
Raw Materials Used	
Auxiliary Materials Used	
Employees	
Social Employee	
Business Travelling	
Professional Fees	
Maintenance and Repairs	
Insurance	
Depreciation and amortization	
Office	
Improvement and Development of HR	
Total Production Costs	
Inventory of Products in Progress	
At Beginning of Year	
At End of Year	
Cost of Goods Manufactured	
Inventory of Finished Products	
at Beginning of the Year	
Expired/Damaged	
Promotion, Donated, Replacement, and Self Consumptions	
Cost of Products	
Available for Sale	
Sold for Immunization	
At End of Year	
Total	

27. COST OF GOODS SOLD OF MERCHANDISE PRODUCT

	2015
1.313.359.545	
13.175.592.864	
14.488.952.409	
-	
(1.089.259.779)	
(224.377.738)	
(2.010.514.545)	
11.164.800.347	

Inventories at Beginning of Year	
Purchases	
Available for Sale	
Expired/Damaged	
Used for Promotion, Replacement, Self Consumption and Donation	
Used for Immunization	
Inventories at End of Year	
Total	

28. COST OF SERVICES

	2015
702.599.302	
224.377.738	
44.686.952	
1.866.433.676	
148.087.750	
481.448.967	
46.005.750	
228.728.122	
2.494.687	
182.128.129	
34.999.000	
3.961.990.073	

Products used for Immunization	
Merchandise Used for Immunization	
Raw Materials and Auxiliaries used	
Employees	
Business travelling	
Professional Services	
Repairs and Maintenance	
Depreciation of Fixed Assets	
Insurance	
Office Expenses	
Improvement and Development of HR	
Total	

PT BIO FARMA (PERSERO)**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****31 Desember 2016 dan 2015**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS****December 31, 2016 and 2015**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. PENGHASILAN LAIN-LAIN

	2016
Penjualan Sampingan	437.723.305
Pendapatan Bunga Deposito	6.100.342.074
Pendapatan Jasa Giro	719.873.260
Pendapatan Bunga Investasi	-
Hasil Sewa Ruangan dan Bagi Hasil	221.375.000
Pendapatan Denda dari Pemasok dan Pelanggan	1.382.822.931
Royalti	-
Keuntungan Selisih Kurs	98.339.421.776
Pendapatan Hibah	42.086.241.496
Pemulihan Penyisihan Piutang	16.476.412
Pemulihan Penyisihan Persediaan	4.206.854.370
Kapitasi BPJS	728.304.000
Pendapatan Jasa Importasi	1.603.521.942
Penghasilan Lainnya (di bawah Rp 1 milyar)	8.884.758.217
Jumlah	164.727.714.782

29. OTHER INCOME

	2015
	1.487.693.701
	34.338.748.047
	605.407.257
	1.957.450.000
	243.337.500
	636.391.149
	33.939.506
	78.787.808.691
	800.000.000
	34.973.845
	2.603.133.373
	410.752.000
	1.108.692.000
	6.015.678.281
Total	129.064.005.350

Other Sales
Interest from Time Deposits
Interest from Deposit Accounts
Interest from Investment
Room Rent and Profit Sharing
Penalties from Distributors and Customers
Royalties
Gains on Foreign Exchange
Donation Revenue
Recovery of Receivable Impairment
Recovery of Inventory Impairment
Capitation BPJS
Fee Importation
Others (less than Rp1 billion)
Total

30. BEBAN PENJUALAN

	2016
Karyawan	26.338.936.758
Perjalanan Dinas	2.569.626.461
Jasa Profesional	1.585.800.000
Pemeliharaan dan Perbaikan	1.904.745.936
Asuransi	34.209.742
Penyusutan Aset Tetap	5.278.049.188
Beban Kantor	3.514.079.743
Peningkatan dan Pengembangan SDM	469.372.279
Keagenan Ekspor	3.121.962.336
Ongkos Angkut	29.608.784.256
Embalage	18.648.774.133
Promosi dan Periklanan	18.182.334.592
Monitoring Produk	10.918.268.981
Insentif Penjualan	900.623.993
Jaminan dan Kerugian Penjualan	1.994.250.717
Royalti	8.666.019.375
Penyisihan Penurunan Nilai Piutang	49.865.427
Pemakaian Bahan Baku & Penolong	6.484.609
Pajak	204.209.466
Jumlah	133.996.397.992

30. SELLING EXPENSES

	2015
	22.110.655.752
	3.546.385.751
	749.112.500
	489.527.755
	12.719.408
	1.794.042.048
	3.301.289.841
	395.105.484
	2.242.633.127
	34.421.044.628
	15.089.687.612
	17.969.987.666
	9.618.653.448
	3.774.035.443
	305.275.926
	10.775.555.450
	222.388.188
	-
	-
Total	126.818.100.027

Employees
Business travelling
Professional Services
Repairs and Maintenance
Insurance
Depreciation Expense
Office Expenses
Human Resource Development
Export Agency Services
Transportation
Embalage
Promotion and Advertising
Monitoring of Products
Sales Incentives
Sales Warranty
Royalties
Impairment of Receivables
Raw Materials and Auxiliaries Usage
Taxes
Total

31. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2016
Karyawan	202.344.740.738
Dewan Komisaris dan Direksi	42.366.434.836
Beban Kantor	45.866.546.121
Pemeliharaan dan Perbaikan	31.413.171.647
Penyusutan Aset Tetap	22.253.869.462
Peningkatan dan Pengembangan SDM	12.308.462.663
Perjalanan Dinas	6.255.459.573
Jasa Profesional	11.670.053.213
HUT Perusahaan dan Olahraga	4.166.338.898
Jamuan Tamu	3.691.586.542
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan	2.732.650.737
jumlah dipindahkan	385.069.314.429

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2015
	230.759.482.395
	46.328.045.975
	44.606.987.152
	29.127.874.982
	19.648.209.985
	16.203.957.322
	7.998.925.560
	6.451.035.515
	3.880.861.129
	4.884.585.811
	3.191.645.068
	413.081.610.894

Employees
Directors and Commissioners
Office Expenses
Repairs and Maintenance
Depreciation Expense
Human Resources Development
Business Travelling
Professional Services
Company's Anniversary and Sports
Entertainment
Land and Buildings and
Vehicle Taxes
Carried forward

PT BIO FARMA (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BIO FARMA (PERSERO)

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2016 and 2015

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2016
jumlah pindahan	385.069.314.429
Asuransi	373.656.854
Amortisasi Beban Tangguhan dan Aset Takberwujud	3.084.343.350
Kemitraan dan Bina Lingkungan	10.686.678.646
Lain-lain	2.787.653.477
Jumlah	402.001.646.756

31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2015	
	413.081.610.894	Brought forward
	247.255.824	Insurance
		Amortization of Deferred Charges and Intangible Assets
	3.044.064.087	Community Development Program
	1.288.442.345	Others
	4.098.054.034	Total
Jumlah	421.759.427.184	

32. BEBAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN SURVEILANS

	2016
Pemakaian Bahan Baku dan Bahan Penolong	26.850.010.656
Jasa Profesional	35.114.038.007
Karyawan	24.787.380.972
Penyusutan Aset Tetap	18.492.210.647
Pemeliharaan dan Perbaikan	4.008.787.093
Perjalanan Dinas	2.189.323.192
Beban Kantor	459.907.143
Peningkatan dan Pengembangan SDM	2.261.971.272
Asuransi	317.725.454
Jumlah	114.481.354.438

32. RESEARCH, DEVELOPMENT AND SURVEILLANCE

	2015	
	21.954.249.660	Raw Materials and Auxiliaries Usage
	22.112.742.854	Professional Services
	22.475.869.376	Employees
	15.547.079.115	Depreciation
	2.864.149.588	Repair and Maintenance
	3.900.017.055	Business Travelling
	729.278.328	Office Expense
	3.594.869.409	Human Resource Development
	264.314.132	Insurance
Jumlah	93.442.569.518	Total

33. BEBAN LAIN-LAIN

	2016
Kerugian Selisih Kurs	115.652.270.297
Koreksi Pajak dan Denda Pajak	10.924.295.638
Beban Bunga Pinjaman	9.342.500.000
Denda Selain Pajak	-
Beban Penurunan Nilai Aset	-
Beban Lainnya (di bawah Rp1 milyar)	3.826.088.455
Jumlah	139.745.154.390

33. OTHER EXPENSES

	2015	
	55.718.571.670	Loss on Foreign Exchange
	352.238.893	Tax Corrections and Penalties
	-	Loan Interest
	125.992	Other penalties
	3.831.467.299	Loss on Impairment of Assets
	6.298.332.014	Others (less than Rp1 billion)
Jumlah	66.200.735.869	Total

34. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

	31 Desember 2016 December 31, 2016
Surplus Revaluasi Aset Tetap - Net	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	(8.313.228.628)
Jumlah	(8.313.228.628)

34. OTHER EQUITY COMPONENTS

	31 Desember 2015 December 31, 2015	
	1.980.781.821.592	Revaluation Surplus - Net
	(828.225.876)	Actuarial Gain (Loss)
Jumlah	1.979.953.595.716	Total

Keuntungan (Kerugian) Aktuaria timbul akibat perubahan kebijakan akuntansi terkait penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja".

Actuarial Gain (Loss) represents improvement of PSAK 24 (revised 2013) "Imbalan Kerja".

35. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset	Mata Uang Asing Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah Rupiah Equivalent
Kas dan Setara Kas	USD 7.341.205,16	98.636.432.529,76
	EUR 5.596.645,06	79.257.168.849,44
Piutang Usaha	USD 19.442.919,50	261.235.066.402,00
Piutang Lainnya	USD -	-
Uang Muka	USD 784.815,17	10.544.776.624,12
	EUR 1.902.085,28	26.936.475.796,98
	GBP 68.892,00	1.137.235.378,92
	JPY 37.928.497,24	4.376.948.581,50
Jumlah Aset		482.124.104.162,72

35. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

	Mata uang Asing Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah Rupiah Equivalent	
	17.295.123,38	238.586.227.027,10	Cash and Cash Equivalent
	7.127.955,08	107.415.930.830,42	
	33.457.620,15	461.547.869.969,25	Trade Receivable
	17.142,00	236.473.890,00	Other Receivables
	748.486,18	10.325.366.784,13	Advances
	3.165.316,80	47.700.279.621,46	
	4.110,00	84.054.062,10	
	1.269.644,00	145.404.963,38	
Total Assets		866.041.607.147,84	

35. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

35. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

		Mata Uang Asing Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah Rupiah Equivalent	Mata uang Asing Foreign Currency	Ekuivalen Rupiah Rupiah Equivalent	
Liabilitas						Liabilities
Uang Muka Penjualan	USD	-	-	61.842,00	853.110.390,00	Advanced Receipts
Utang Usaha	USD	3.322.164,16	44.636.597.653,76	5.966.041,21	82.301.538.491,95	Trade Payables
	EUR	5.789.274,81	81.985.104.685,56	68.922,04	1.038.632.398,53	
	GBP	1.692,00	27.930.706,92	-	-	
	JPY	602.488,00	69.527.115,20	3.776.598,00	432.511.864,67	
	CHF	270.840,00	3.569.064.518,40			
	AUD	19.000,00	184.761.890,00			
	SGD	52.026,00	483.785.611,92	-	-	
Biaya YMH Dibayar	USD	28.800,00	386.956.800,00	72.000,00	993.240.000,00	Accrued Expenses
	AUD	-	-	60.000,00	603.849.600,00	
Liabilitas Lainnya	USD	218.797,23	2.939.759.549,83	107.942,24	1.489.063.200,80	Other Liability
Jumlah Liabilitas			134.283.488.531,59		87.711.945.945,95	Total Liabilities
Aset (Liabilitas) Bersih			347.840.615.631,14		778.329.661.201,89	Asset (Liability) - Net

36. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

36. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi - transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

The Company has transactions with related parties. The Company's policy of pricing for these transactions as the same with third parties.

a. Saldo akun dengan pihak berelasi terdiri dari :

a. Account balances with related parties are as follow :

Akun	31 Desember 2016 December 31, 2016		31 Desember 2015 December 31, 2015		Accounts
	Jumlah/ Amount	Persen/Percent	Jumlah/ Amount	Persen/ Percent	
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)	441.042.856.520,38	7,42%	555.939.258.293,67	9,79%	Cash and Cash Equivalent (Note 3)
Piutang Usaha (Catatan 5)	12.280.577.812,52	0,21%	17.298.055.107,46	0,30%	Trade Receivables (Note 5)
Piutang Lain-lain (Catatan 6)	1.302.637.458,00	0,02%	1.302.637.458,00	0,02%	Other Receivables (Note 6)
Uang Muka Pembelian Lokal (Catatan 8)	834.000.000,00	0,00%	16.044.202.628,73	0,28%	Advance - Local Purchases (Note 8)
Pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 11)	221.375.000,00	0,00%	1.591.887.435,25	0,03%	Unearned Revenue (Note 11)
Utang Usaha (Catatan 16)					Trade Payables (Note 16)
Koperasi Karyawan Bio Farma	14.869.209.175,93	0,25%	8.174.576.205,00	0,14%	Koperasi Karyawan Bio Farma
CV Karya Cahya Abadi	1.652.232.908,17	0,03%	1.180.481.302,50	0,02%	CV Karya Cahya Abadi
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	8.351.209.044,71	0,14%	4.392.144.317,00	0,08%	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk
PT Wijaya Karya (Persero)	-	-	769.068.182,00	0,01%	PT Wijaya Karya (Persero)
PT Kimia Farma, Tbk	160.990.986,00	0,00%	419.689.563,00	0,01%	PT Kimia Farma, Tbk
PT INTI	71.221.650,00	0,00%	-	0,00%	PT INTI
Jumlah	25.104.863.764,81	0,42%	14.935.959.569,50	0,26%	Total

b. Sifat Hubungan

b. Nature of Relationships

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan dengan Perusahaan Relationship with the Company	Sifat Saldo Akun/Transaksi Nature of Accounts/Transactions
Bank Milik Negara/ Daerah	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Kas dan Setara Kas / Cash and Equivalent Cash
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Penjualan Produk / Sale of Product
PT Indofarma Global Medika	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Penjualan Produk / Sale of Product
PT Rajawali Nusantara Indonesia	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Penjualan Produk / Sale of Product
PT Iglas (Persero)	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Piutang Lain-lain / Other Receivables
PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Pembelian Investasi / Purchase of Investment
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Pembelian Investasi / Purchase of Investment
Koperasi Karyawan Bio Farma	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Pembelian Barang dan Investasi / Purchase of Goods and Investment
CV Karya Cahya Abadi	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Pembelian Barang dan Investasi / Purchase of Goods and Investment
Pihak Berelasi Lainnya	Entitas Sepengendali / Entity Under Common Control	Lain-lain dengan nilai dibawah Rp 1 milyar / Other transactions under Rp 1 billion

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

- a. Berdasarkan Kontrak Katalog Pelaksanaan Penyediaan Vaksin No.455 tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Bio Farma (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli pengadaan vaksin regular tahun 2016 dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor perjanjian No.KN.01.01/5/41-PK/2016, tanggal 10 Februari 2016. Disepakati bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan membeli berbagai jenis vaksin untuk program tersebut dari Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Vaksin <i>Vaccine Types</i>	Kemasan <i>Packing</i>	Kuantum <i>Quantity</i>	Harga Satuan <i>Unit Price</i>	Jumlah (Rp.) <i>Amount (Rp.)</i>
1	BCG	20 ds/amp	1.754.640	54.500	95.627.880.000
2	DT	10 ds/vial	730.730	16.180	11.823.211.400
3	Campak/Measles	10 ds/vial	3.283.390	25.640	84.186.119.600
4	b-OPV	10 ds/vial	2.947.520	18.140	53.468.012.800
5	Hep. B 0.5 ml	1 ds/puch	4.919.660	19.000	93.473.540.000
6	DTP-HB-Hib	5 ds/vial	1.883.420	69.350	130.615.177.000
7	Td	10 ds/vial	3.313.260	15.000	49.698.900.000
8	t-OPV	10 ds/vial	1.374.080	31.650	43.489.632.000
Total					562.382.472.800
PPN/VAT 10 %					56.238.247.280
Total - PPN/VAT					618.620.720.080

Persyaratan Perusahaan dalam memenuhi perjanjian tersebut antara lain:

1. Vaksin yang diproduksi harus memiliki spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli.
2. Semua jenis vaksin tersebut harus diserahkan di gudang tujuan paling lambat 21 November 2016 serta dianggap sah apabila sudah dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Barang di Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, ditandatangani oleh Penerima Barang dan diketahui oleh Pejabat Struktural Dinas Kesehatan di Provinsi, Bukti Penerimaan Barang di tingkat pusat ditandatangani oleh Penerima Barang di Gudang Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP & PL) dan diketahui Pejabat Struktural. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membuatkan rekap bukti penerimaan yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
3. Menyerahkan Surat Jaminan sebagai jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian (Surety bond) yang diijinkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp30.931.036.004 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

- a. Based on the Contract of Vaccine Procurement Catalog No.455 Year of 2015 dated on December 21, 2015 between the Company and Government Procurement Policy Institution, the Company entered into regular vaccine sale and purchase agreement in 2016 with the Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as mentioned in a letter of agreement No.KN.01.01/5/41-PK/2016 dated on February 10, 2016. The Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia will purchase the following various types of vaccines for the program from the Company :

The following are requirements the Company should meet the agreement :

1. Vaccines produced should have specifications as stated in the sale and purchase agreement.
2. All types of vaccines should be submitted at the designated warehouse no more than November 21, 2016, and will be valid when equipped by receiving report issued by the Provincial Health Office. At the Ministry Office, the receiving document is signed by recipient of goods at the Warehouse of Directorate General of of Disease Control and Environmental Healthcare (PP & PL), and known by the Official of the Directorate. The Committee for Receiving of Procurement of the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices provides a recapitulation of the receiving reports that known by the Official in Charge of the Directorate of Public Drugs and Health Supply.
3. Submit a letter of guarantee as performance bond issued by Bank or Guarantor or Insurance Company that have a Surety Bond Program licenced by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to 5% of the contract price, or equivalent to Rp30.931.036.004 and valid until December 15, 2016.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- b. Berdasarkan Kontrak Katalog Pelaksanaan Penyediaan Vaksin No.455 tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Bio Farma (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli pengadaan vaksin DPT-HB-HIB, ADS dan Safety Box tahun 2016 dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor perjanjian No.KN.01.01/5/279 -PK.GAVI/2016, tanggal 6 Oktober 2016. Disepakati bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan membeli vaksin untuk program tersebut dari Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Vaksin Vaccine Types	Kemasan Packing	Kuantum Quantity	Harga Satuan Unit Price	Jumlah (Rp.) Amount (Rp.)
1.	DTP-HB-Hib	5 ds/vial	787.720	69.350	54.628.382.000
Total					54.628.382.000
PPN/VAT 10 %					5.462.838.200
Total + PPN/VAT					60.091.220.200

Persyaratan Perusahaan dalam memenuhi perjanjian tersebut antara lain:

1. Vaksin yang diproduksi harus memiliki spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli.
 2. Semua jenis vaksin tersebut harus diserahkan di gudang tujuan paling lambat 15 Desember 2016 serta dianggap sah apabila sudah dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Barang di Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, ditandatangani oleh Penerima Barang dan diketahui oleh Pejabat Struktural Dinas Kesehatan di Provinsi. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membuat rekap bukti penerimaan yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen PHLN Satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 3. Menyerahkan Surat Jaminan sebagai jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian (Surety bond) yang diijinkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.731.419.100 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
- c. Berdasarkan Kontrak Katalog Pelaksanaan Penyediaan Vaksin No.875 tahun 2016, tanggal 7 Oktober 2016 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Bio Farma (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli pengadaan vaksin regular tahun 2016 (Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV)) dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor perjanjian No.KN.01.01/5/458 -PK/2016, tanggal 1 November 2016.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Based on the Contract of Vaccine Procurement Catalog No.455 Year of 2015 dated on December 21, 2015 between the Company and Government Procurement Policy Institution, the Company entered into a sale and purchase agreement of DPT-HB-HIB vaccines; ADS and Safety Box in 2016 with the Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as mentioned in a letter of agreement No.KKN.01.01/5/279 -PK.GAVI/2016 dated October 6, 2016. The Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia will purchase the vaccines for the program of the Company, with details as follows:

The following are requirements the Company should meet the agreement :

1. Vaccines produced should have specifications as stated in the sale and purchase agreement.
 2. All types of vaccines should be submitted at the designated warehouse no more than December 15, 2016, and will be valid when equipped by receiving report issued by the Provincial Health Office. At the Ministry Office, the receiving document is signed by recipient of goods at the Warehouse of Directorate General of Disease Control and Environmental Healthcare (PP & PL), and known by the Official of the Directorate. The Committee for Receiving of Procurement of the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices provides a recapitulation of the receiving reports that known by the Official in Charge of the Directorate of Public Drugs and Health Supply.
 3. Submit a letter of guarantee as performance bond issued by Bank or Guarantor or Insurance Company that have a Surety Bond Program licenced by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to 5% of the contract price, or equivalent to Rp2.731.419.100 and valid until January 31, 2017.
- c. Based on the Contract of Vaccines Procurement Catalog No.875 Year of 2016 dated October 7, 2016 between the Company and Government Procurement Policy Institution, the Company entered into a sale and purchase agreement for Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV) in 2016 with the Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the as mentioned in a letter of agreement No.KN.01.01/5/458-PK/2016 dated November 1, 2016.

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Disepakati bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan membeli vaksin untuk program tersebut dari Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Vaksin <i>Vaccine Types</i>	Kemasan <i>Packing</i>	Kuantum <i>Quantity</i>	Harga Satuan <i>Unit Price</i>	Jumlah (Rp.) <i>Amount (Rp.)</i>
1.	SIPV	5 ds/vial	65.225	139.000	9.066.275.000
2.	SIPV	10 ds/vial	20.575	247.500	5.092.312.500
Total					14.158.587.500
PPN/VAT 10 %					1.415.858.750
Total + PPN/VAT					15.574.446.250

Persyaratan Perusahaan dalam memenuhi perjanjian tersebut antara lain :

1. Vaksin yang diproduksi harus memiliki spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli (kontrak).
 2. Semua jenis vaksin tersebut harus diserahkan di gudang tujuan paling lambat 15 Desember 2016 serta dianggap sah apabila sudah dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Barang di Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta yang bersangkutan, ditandatangani oleh Penerima Barang dan diketahui oleh Pejabat Struktural yang bersangkutan. Bukti Penerimaan Barang dari Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta direkap oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 3. Menyerahkan Surat Jaminan sebagai jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau , Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian (Surety bond) yang diijinkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp778.722.312,50 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
- d. Berdasarkan Kontrak Katalog Pelaksanaan Pengadaan Vaksin No. 875 tahun 2016, tanggal 7 Oktober 2016 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Bio Farma (Persero), Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli pengadaan vaksin IPV, ADS 0,5 ml, dan Safety Box tahun 2016 dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan nomor perjanjian No. KN.01.01/5/314-PK.GAVI/2016, tanggal 10 November 2016. Disepakati bahwa Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan membeli vaksin untuk program tersebut dari Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia will purchase vaccine for the program of the Company, with details as follows:

No.	Jenis Vaksin <i>Vaccine Types</i>	Kemasan <i>Packing</i>	Kuantum <i>Quantity</i>	Harga Satuan <i>Unit Price</i>	Jumlah (Rp.) <i>Amount (Rp.)</i>
1.	SIPV	5 ds/vial	65.225	139.000	9.066.275.000
2.	SIPV	10 ds/vial	20.575	247.500	5.092.312.500
Total					14.158.587.500
PPN/VAT 10 %					1.415.858.750
Total + PPN/VAT					15.574.446.250

The following are requirements the Company should meet the agreement :

1. Vaccines produced should have specifications as stated in the sale and purchase agreement.
 2. All types of vaccines should be submitted to the designated warehouse no more than December 15, 2016, and will be valid when equipped by receiving report issued by the D.i Yogyakarta Provincial Health Office. At the Ministry Office, the receiving document is signed by recipient of goods at the Warehouse of Directorate General of of Disease Control and Environmental Healthcare (PP & PL), and known by the Official of the Directorate. The Committee for Receiving of Procurement of the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices provides a recapitulation of the receiving reports that known by the Official in Charge of the Directorate of Public Drugs and Health Supply.
 3. Submit a letter of guarantee as performance bond issued by Bank or Guarantor or Insurance Company that have a Surety Bond Program licenced by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to 5% of the contract price, or equivalent to Rp778.722.312,50 and valid until December 31, 2016.
- d Based on the Contract of Vaccines Procurement Catalog No.875 Year of 2016 dated October 7, 2016 between the Company and Government Procurement Policy Institution, the Company entered into a sale and purchase agreement of Inactivated Poliomyelitis Vaccine (IPV), ADS 0,5 ml, and Safety Box in 2016 with the Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the as mentioned in a letter of agreement No.KN.01.01/5/314-PK.GAVI/2016 dated November 10, 2016.The Directorate of Public Drugs and Health Supply of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia will purchase vaccine for the program of the Company, with details as follows:

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

No.	Jenis Vaksin <i>Vaccine Types</i>	Kemasan <i>Packing</i>	Kuantum <i>Quantity</i>	Harga Satuan <i>Unit Price</i>	Jumlah (Rp.) <i>Amount (Rp.)</i>
1.	SIPV	5 ds/vial	265.625	139.000	36.921.875.000
2.	SIPV	10 ds/vial	53.675	247.500	13.284.562.500
Total					50.206.437.500
PPN/VAT 10 %					5.020.643.750
Total + PPN/VAT					55.227.081.250

Persyaratan Perusahaan dalam memenuhi perjanjian tersebut antara lain:

1. Vaksin yang diproduksi harus memiliki spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli (kontrak).
 2. Semua jenis vaksin tersebut harus diserahkan di gudang tujuan paling lambat 29 Desember 2016 serta dianggap sah apabila sudah dilengkapi dengan Bukti Penerimaan Barang di Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, ditandatangani oleh Penerima Barang dan diketahui oleh Pejabat Struktural Dinas Kesehatan di Provinsi. Bukti Penerimaan Barang di pusat diterima dan ditandatangani oleh Penerima Barang dan diketahui oleh salah satu Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan membuat rekap bukti penerimaan barang dari Pusat dan Dinas Kesehatan Propinsi yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen PHLN Satker Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 3. Menyerahkan Surat Jaminan sebagai jaminan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi yang memiliki Program Asuransi Kerugian (Surety bond) yang diijinkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.510.321.875,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
- e. Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengembangan produk dengan pihak ketiga yaitu *University of Melbourne*, *Artes Biotechnology GmbH*, *PATH Vaccine Solution (PVS)*, dengan *IVI (The International Vaccine Institute)*, *Lipotek Pty.Ltd*, *Iwate Medical University* dan *Japan Poliomyelitis Research Institute (JPRI)*.
- f. Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli produk Perusahaan dengan beberapa pelanggan di luar negeri sebagai berikut:
- 1 Perjanjian No.04394/DIR/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan Universal Exim tentang perjanjian pemasaran yang meliputi penjualan Monovalent Poliomyelitis Bulk dan DTP Bulk, yang berlaku hingga 31 Maret 2014, yang telah dilakukan amandemen IX sesuai perjanjian No.08905/DIR/VII/ 2013 tanggal 12 Juli 2013 yang memperbaharui masa berlaku hingga sampai 31 Maret 2016,

The following are requirements the Company should meet the agreement :

1. Vaccines produced should have specifications as stated in the sale and purchase agreement.
 2. All types of vaccines should be submitted to the designated warehouse no more than December 15, 2016, and will be valid when equipped by receiving report issued by the Provincial Health Office. At the Ministry Office, the receiving document is signed by recipient of goods at the Warehouse of Directorate General of of Disease Control and Environmental Healthcare (PP & PL), and known by the Official of the Directorate. The Committee for Receiving of Procurement of the Directorate of Pharmaceutical and Medical Devices provides a recapitulation of the receiving reports that known by the Official in Charge of the Directorate of Public Drugs and Health Supply.
 3. Submit a letter of guarantee as performance bond issued by Bank or Guarantor or Insurance Company that have a Surety Bond Program licenced by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to 5% of the contract price, or equivalent to Rp52.510.321.875,00 and valid until December 31, 2017.
- e. The Company entered into cooperation agreements for product development activities with third parties, those are *University of Melbourne*, *Artes Biotechnology GmbH*, *PATH Vaccine Solution (PVS)*, dengan *IVI (The International Vaccine Institute)*, *Lipotek Pty.Ltd*, *Iwate Medical University*, and *Japan Poliomyelitis Research Institute (JPRI)*.
- f. The Company entered into agreements with overseas customers for sale and purchase of its products as follows:
- 1 Agreement No.04394/DIR/VI/2010 dated June 30, 2010 with the Universal Exim regarding the agreement of marketing of selling Monovalent Poliomyelitis Bulk and DTP Bulk, which is valid until March 31, 2014. This agreement was amended by amendment IX No.08905/DIR/VII/2013 dated July 12, 2013 that renew the period of the agreement until March 31, 2016,

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

amandemen X sesuai perjanjian No.06724/DIR/XII/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 yang memperbaharui nilai perjanjian, dan amandemen XI sesuai perjanjian No.01512/DIR/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang memperbaharui nilai perjanjian dan masa berlaku hingga 31 Maret 2019.

- 2 Perjanjian No.06384/DIR/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dengan BioNet Asia Ltd tentang penjualan DPT Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Pada tanggal 14 Mei 2012 dilakukan amandemen II atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.03098/DIR/V/2012, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016. Pada tanggal 17 November 2014 dilakukan amandemen III atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.05664/DIR/XI/2014, yang memperbaharui masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2019.
- 3 Perjanjian No.06383/DIR/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dengan BioNet Asia Ltd tentang penjualan Monovalent Poliomyelitis Bulk, yang berlaku hingga 31 Desember 2015. Perjanjian telah diubah dengan amandemen I sesuai perjanjian No.03097/DIR/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2017, amandemen II sesuai perjanjian No.05265/DIR/ IX/2013 tanggal 30 September 2013 yang merubah nilai perjanjian, dan amandemen III dengan perjanjian No.05663/DIR/XI/2014 tanggal 17 November 2014 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2019.
- 4 Perjanjian No.09439/DIR/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 dengan Bionet Asia Co.Ltd tentang pemasaran produk Bio Farma berupa *bulk* dan *finished Product* (Vaccine), yang berlaku hingga 31 Desember 2014, dan telah dilakukan amandemen II dengan perjanjian No.02956/DIR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 5 Perjanjian No.02051/ DIR/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 dengan BioNET ASIA CO.LTD tentang penjualan Poliomyelitis *Bulk*, yang berlaku hingga 30 Maret 2013, telah dilakukan amandemen II sesuai perjanjian No.02957/DIR/ V/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 6 Perjanjian No.02305/DIR/ IV/2010 tanggal 8 April 2010 dengan BioNET ASIA CO.LTD tentang penjualan DPT *Bulk*, yang berlaku hingga 8 April 2013, dan telah dilakukan amandemen II sesuai perjanjian No.02958/DIR/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2016.
- 7 Perjanjian No.07444/DIR/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan BioNet-Asia Co. Ltd tentang penjualan *Ready-to-fill Final Bulk Td Vaccine*, yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal registrasi dari produk akhir di wilayah Thailand.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

amendment X No.06724/DIR/XII/ 2013 dated December 17, 2013 that change the price included in the agreement, and amendment XI No.01512/DIR/III/2015 dated March 9, 2015 that change the price and renew the period of the agreement until March 31, 2019.

- 2 *Agreement No.06384/DIR/XI/2011 dated November 7, 2011 with the Bionet Asia Ltd, regarding the sale of DPT Bulk, which is valid until December 31, 2015. On May 14, 2012 the agreement was amended by agreement (amendment II) No.03098/DIR/V/2012 that renew the period of the agreement until December 31, 2016. Later, on November 17, 2014 the agreement was amended again by agreement (amendment III) No.05664/DIR/XI/ 2014 that renew the period of the agreement until December 31, 2019.*
- 3 *Agreement No.06383/DIR/XI/2011 dated November 7, 2011 with the Bionet Asia Ltd., for the sale of DPT Bulk, valid until December 31, 2015. This agreement was amended by agreement (amendment I) No.03097/DIR/ V/2012 dated May 14, 2012 that renew the period of the agreement until December 31, 2017, agreement (amendment II) No.05265/ DIR/IX/2013 dated September 30, 2013 that change the contract price, and agreement (amendment III) No.05663/DIR/XI/2014 dated November 17, 2014 that renew the period of the agreement until December 31, 2019.*
- 4 *Agreement No.09439/DIR/XII/2009 dated December 10, 2009 with the BioNET Asia Co.Ltd regarding the marketing of the Company's products of bulk and finished products (vaccines), which is valid until December 31, 2014, and was amended on May 9, 2012 by amendment II No.02956/DIR/V/2012 that renew the period of the agreement until December 31, 2016.*
- 5 *Agreement No.02051/DIR/III/2010 dated March 30, 2010 with the BioNET ASIA CO.LTD for the sale of Poliomyelitis Bulk, which is valid until March 30, 2013. On May 9, 2012, this agreement was amended by amendment II No.02957/DIR/V/2012 that renew the period of the agreement until December 31, 2016.*
- 6 *Agreement No.02305/DIR/IV/2010 dated April 8, 2010 with the BioNET ASIA CO.LTD for the sale of DPT Bulk, which is valid until April 8 2013. This agreement was amended on May 9, 2012 by amendment II No.02958/DIR/V/2012 that renew the period of the agreement until December 31, 2016.*
- 7 *Agreement No.07444/DIR/XII/2012 dated December 20, 2012 with Bionet-Asia Co. Ltd. for the sale of Ready-to-fill Final Bulk Td Vaccines. The agreement is valid for 5 years since registration date of the end products in Thailand territory.*

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- 8 Perjanjian No.01391/ DIR/II/2013 tanggal 16 Maret 2013 dengan Biological E Limited tentang penjualan *Measles Bulk*, yang berlaku hingga 16 Maret 2018. Pada 5 Desember 2013 dilakukan amandemen atas perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian No.06511/DIR/ XII/2013, yang memperbaharui masa berlaku hingga 31 Desember 2018.
- 9 Perjanjian jangka panjang dengan UNICEF untuk pengadaan vaksin-vaksin berikut ini, yang ditandatangani pada tanggal :
- 23 November 2012, untuk *supply* Vaksin Campak 10 ds. dari tahun 2013 sampai 2016.
 - 28 November 2012, untuk *supply* Vaksin TT-10 ds., Td-10 ds., dan DTP-10 ds. dari tahun 2013 sampai 2015.
 - 11 Desember 2012, untuk *supply* tOPV 20 ds dan bOPV 20 ds dari tahun 2013 sampai 2016.
 - 1 April 2015 dan 19 Mei 2015 untuk penambahan *supply* vaksin TT-10 dosis tahun 2015.
 - 18 Maret 2016, untuk *supply* Vaksin DTP - 10 ds dari tahun 2016 sampai 2018;
 - 7 April 2016, untuk *supply* Vaksin TT - 10 ds dan Td - 10 ds dari tahun 2016 sampai 2017.
- 10 Perjanjian No.05887/DIR/XI/2014 tanggal 3 Desember 2014 dengan Propharm (M) SDN.BHD tentang penjualan *Finished Product (Vaccine)* yang berlaku hingga tanggal 30 April 2018.
- 11 Perjanjian No.05900/DIR/XI/2014, tanggal 19 Januari 2015, dengan Arabio tentang penjualan produk, bulk final dan vaksin yang berlaku hingga 31 Desember 2024.
- g. Perusahaan melakukan penandatanganan perpanjangan & peningkatan plafond fasilitas pembiayaan Fasilitas Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) dengan rincian fasilitas sebagaimana tercantum pada SPPK No.CBG.CB1/SPPK/SPD.003/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK). Fasilitas kredit meliputi *non cash loan* untuk penerbitan LC Impor/SKDN (Sight, Usance & UPAS)/BG dengan sub limit *Trust Receipt, Fasilitas Treasury Line, dan Purchasing Line*. Jaminan berupa Mesin, Inventaris, dan Peralatan Pabrik yang berlokasi di Jl.Pasteur No.28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar IDR265.000.000.000 yang diikat secara fidusia.
- h. Perusahaan melakukan penandatanganan perpanjangan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank sesuai dengan Surat Persetujuan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Pembiayaan No.PBD/SP3/30/2016 tanggal 6 Juni 2016 . Fasilitas kredit meliputi kredit modal kerja ekspor (KMKE) transaksional dan atau fasilitas non-cash loan (pembukaan LC Sight/ Usance/UPAS dan/atau pembiayaan LC Impor (Post Import Financing) dan/atau pembukaan SKBDN dan /atau pembiayaan SKBDN dan/atau Trust Receipt dan/atau pembelian tagihan ekspor/SKBDN dan/atau pembelian tagihan atas dasar non LC/SKBDN);

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- 8 Agreement No.01391/DIR/II/2013 dated March 16, 2013 with the Biological E Limited for the sale of *Measles Bulk*, which is valid until March 16, 2018. On December 5, 2013 the agreement was amended by agreement No.06511/DIR/XII/2013 for renew the period of the agreement until December 31, 2018.
- 9 Long term arrangements with UNICEF for the procurements of the following vaccines, which were signed on:
- November 23, 2012, to supply *Measles Vaccines* 10 ds from 2013 until 2016.
 - November 28, 2012, to supply the *TT-10 ds, Td-10 ds, and DTP-10 ds vaccines* from 2013 until 2015.
 - December 11, 2012, to supply *tOPV 20 ds and bOPV 20 ds* from 2013 until 2016.
 - April 1 and May 19, 2015 to additional supply of vaccine *TT-10 dosage* for 2015.
 - March 18, 2016 to supply of vaccine *DTP-10 dosage* from 2016 until 2018.
 - April 7, 2016 to supply of vaccine *TT-10 dosage* from 2016 until 2017.
- 10 Agreement No.05887/DIR/XI/2014 dated December 3, 2014 with the Propharm (M) Sdn.Bhd concerning the sale of *Finished Product (Vaccine)*. The agreement is valid until 30 April 2018.
- 11 Agreement No.05900/DIR/ XI /2014 , dated January 19, 2015, with Arabio on product sales, and a final bulk vaccine that is valid until December 31, 2024.
- g The Company entered into Agreement of Working Capital Credit Revolving No.CCBG.CB1/SPPK/SPD.003/2016 dated May 24, 2016 with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk . This credit includes a non-cash loan facility for the issuance of LC Import/SKDN (Sight, Usance & UPAS)/BG with sub limit *Trust Receipt, Treasury Line Facilities, and Purchasing Line*. The loan is fiducially secured by machineries, office equipments, and factory equipments which are located at Jalan Pasteur No.28 Bandung with the value of IDR265.000.000.000.
- h The Company entered into an agreement of the extension of the Export Working Capital Credit (KMKE) from the Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - LPEI) in accordance with Letter of Acceptance for Financing Facility (SPPP) No.PBD/SP3/30/2016 dated June 6, 2016. The credit facility, includes Export Working Capital Credit Facility (KMKE) Transactional and/or Non Cash Loan Facility (Opening LC Sight/Usance/ UPAS) and/or LC Import Financing (Post Import Financing) and/or Opening SKBDN and/or SKBDN Financing and/or Trust Receipt and/or Export Bills Purchase/SKBDN and/or Bill Purchase on the basis of Non LC/SKBDN);

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Kredit dijamin oleh Piutang Usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp35.000.000.000, Persediaan Barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp60.000.000.000 dan Mesin, Inventaris, dan Peralatan Pabrik yang berlokasi di Jl. Pasteur No.28 Bandung dengan nilai penjaminan sebesar IDR180.000.000.000 yang diikat secara fidusia.

- i. Perusahaan melakukan penandatanganan perjanjian kredit modal kerja (KMK) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sesuai dengan surat No.R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016, tanggal 15 Desember 2016. Fasilitas kredit meliputi kredit modal kerja yang meliputi : Interchangeable dengan fasilitas Penanguhan Jaminan Impor (PJI) (LC/SKBDN), Fasilitas Trade Line, Fasilitas Comercial Line dan Fasilitas Forex Line .

Kredit dijamin oleh Piutang Usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp183.496.626.930,24, Persediaan Barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp176.077.094.546,50.

- j. Atas dasar putusan Mahkamah Agung RI No.397K/Pdt.Sus/2009 tanggal 30 Juli 2009, Jo No.01/Pailit/2009/PN Niaga Sby tanggal 30 September 2009 yang menyatakan status PT Iglas (Persero) (dalam pailit), Perusahaan melakukan penyisihan 100% atas pokok piutang PT Iglas (Persero) sebesar Rp4.894.737.040 dari jumlah kewajibannya sebesar Rp6.503.458.205 yang terdiri dari :

- Pokok Piutang	Rp 4.894.737.050
- Akumulasi Bunga	Rp 1.398.732.896
- Akumulasi Denda	Rp 209.988.269

Perusahaan belum mengakui pendapatan bunga dan denda atas piutang tersebut karena pendapatan dan denda atas piutang tersebut dapat diakui pada saat diterima (*cash basis*).

Namun, sesuai dengan Putusan Perdamaian per tanggal 13 Januari 2010 yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Perusahaan sebagai Kreditur Konkuren PT Iglas (Persero) berhak untuk memperoleh pembayaran atas piutang mulai bulan April 2010, sehingga terbuka kembali kemungkinan untuk tertagihnya piutang tersebut.

Posisi Piutang PT Iglass (Persero) sebagai berikut :

Total Piutang PT Iglass (Persero) pada saat pailit :

Pembayaran :

Sumber dana dari PT Iglass (Persero)

Tahun 2010	Rp 681.057.000
Tahun 2011	Rp 302.691.939
Tahun 2012	Rp 50.000.000
Tahun 2013	Rp 25.000.000
Sub Total	Rp 1.058.748.939

Sumber dana dari

PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) Rp 2.533.350.643

Jumlah Pembayaran

Saldo Piutang

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

This loan is fiducially secured by Trade Receivables with a guarantee value of Rp35.000.000.000, and Inventories with a guarantee value of Rp60.000.000.000 and Machinery, Office Equipments and Factory Equipments with a guarantee value of IDR180.000.000.000 located at Jalan Pasteur No.28 Bandung.

- i. The Company entered into Agreement of Working Capital Credit (KMK) with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.R.II.291-ADK/DKR-2/12/2016 dated December 15, 2016. This credit includes Interchangeable with facilities Suspension Import Guarantee (PJI) (LC / SKBDN), Trade Line Facility, facilities and amenities Comercial Line Forex Line.

The loan is fiducially secured by trade receivables with the value of IDR183.496.626.930,24. Inventories with a guarantee value of Rp176.077.094.546,50.

- j. Based on the decision of the Supreme Court No.397K / Pdt.Sus / 2009 dated July 30, 2009, Jo No.01 / Pailit / 2009 / PN Niaga SBY September 30, 2009 stated of PT Iglas (Persero) (bankruptcy), the Company puts 100% allowance on the principal receivable PT Iglas (Persero) amounting to Rp4.894.737.040 of total liabilities amounted Rp6.503.458.205 consisting of :

Principal -
Accumulated Interests -
Accumulated Penalties -

The Company has not recognized the interests and penalties on such receivable as revenues as the admission is cash basis .

However, in accordance with Decision Peace on January 13, 2010 decided by the Commercial Court in Surabaya District Court that the companies as Concurrent PT Iglas (Persero) are entitled to receive a payment on accounts starting in April 2010, thus it has opened for uncollectible accounts.

The position of receivable to PT Iglas (Persero) is as follow :

Rp 4.894.737.040

Total receivable at the time of bankrupt

Payments :

Source of fund from PT Iglas (Persero)

Year 2010

Year 2011

Year 2012

Year 2013

Source of fund from

PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA)

Total Payments

Balance as of December 31, 2016

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Sisa dana PPA sebesar Rp999.690.769 akan segera diselesaikan berdasarkan Notulen Rapat tentang Piutang PT Iglas (Persero) antara PT Iglas (Persero) dengan PT Bio Farma (Persero) tanggal 14 September 2012, namun sampai saat ini pembayaran tersebut belum diterima perusahaan.

PT Iglas (Persero) melalui surat No.0736/Q-12-2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal Penyelesaian Pinjaman dan No.0084/Q-2-2012 tanggal 6 Pebruari 2012 perihal Konfirmasi Data Hutang PT Iglas (Persero) telah mengajukan permohonan pembebasan denda dan bunga pinjaman sebesar Rp1.608.721.165 dan telah dijawab oleh Perusahaan melalui surat No.02316/TUK/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Pembebasan Bunga dan Denda Piutang PT Iglas (Persero) bahwa permohonan tersebut belum dapat dikabulkan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris melalui surat No.15/DK.BF/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.

Pada tanggal 11 Juni 2013 PT Iglas (Persero) mengirimkan surat ke PT Bio Farma (Persero) dengan surat No.0214/D-06-2013 perihal Penundaan Sementara Pembayaran Kewajiban, yang isinya menerangkan tentang pembayaran angsuran yang tersendat karena adanya mesin yang rusak yang harus diperbaiki sehingga mempengaruhi cash flow di PT Iglas (Persero).

Pada tanggal 30 Desember 2013 PT Iglas (Persero) mengirimkan surat ke PT Bio Farma (Persero) dengan surat No.0489/D-12-2013 perihal Kewajiban PT Iglas (Persero) yang menyatakan bahwa pembayaran PT Iglas (Persero) ke PT Bio Farma (Persero) tahun 2013 adalah benar sebesar Rp25.000.000 dan belum dapat melakukan pembayaran kewajiban pada PT Bio Farma (Persero) tepat waktu sesuai kesepakatan.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan melalui surat No.03307/TUK/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 dan surat No.04581/TUK/IX/2014 tanggal 30 September 2014, dan telah ditanggapi oleh PT Iglas (Persero) melalui surat No.0328/D-10-2014 tanggal 9 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa saat ini PT Iglas (Persero) masih berupaya memperbaiki mesin-mesin baik secara mandiri maupun dalam rencana dikerjasamakan dengan PT Petrosida Gresik dengan cara Kerjasama Operasi (KSO) sehingga belum dapat menyelesaikan kewajiban kepada PT Bio Farma (Persero).

PT Bio Farma (Persero) mengirimkan surat penagihan ke PT Iglass (Persero) dengan surat No.04442/TUK/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015 perihal konfirmasi penagihan atas penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan ke PT Iglass (Persero) melalui surat No. 07769/TUK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 perihal konfirmasi lebih lanjut atas penyelesaian kewajiban pembayaran setelah dilakukannya perbaikan dan pemasangan mesin – mesin di pabrik PT Iglass (Persero) berdasarkan jawaban surat PT Iglass (Persero) sebelumnya No.0313/D-07/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang menyatakan hal – hal sebagai berikut :

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

Remaining funds amounting Rp999.690.769 PPA will be settled based on the Minutes of the Meeting of the Receivable PT Iglas (Persero) between PT Iglas (Persero) and PT Bio Farma (Persero) dated September 14, 2012, however we have not received any payment.

Through the letters PT Iglas (Persero) No.0736 / Q-12-2011 dated December 27, 2011 regarding the Settlement Loans and No.0084 / Q-2-2012 dated 6 February 2012 regarding of Debt Confirmation Data Debt PT Iglas (Persero) has applied for exemption penalties and interest loan of Rp1.608.721.165 and has been answered by the Company with reference No.02316 / TUK / IV / 2012 dated 13 April 2012 on the exemption from interest and penalties receivable PT Iglas (Persero) that the request can not be granted according to the recommendations of the Board Commissioner by letter No.15 / DK.BF / III / 2012 dated March 12, 2012.

On June 11, 2013 PT Iglas (Persero) has sent a letter to PT Bio Farma (Persero) No.0214 / D-06-2013 regarding Obligation Payment Delays which explains about the installment payments faltered because some of theirs machines were broken that need repaired so that affect cash flow in PT Iglas (Persero).

On December 30, 2013 PT Iglas (Persero) sent a letter to PT Bio Farma (Persero) No.0489 / D-12-2013 regarding Obligation PT Iglas (Persero) which states that the payment PT Iglas (Persero) to PT Bio Farma (Persero) in 2013 was Rp 25,000,000 and PT Iglas (Persero) has not been able to make any payments on the obligations on time as agreed.

PT Bio Farma (Persero) has asked the payment to PT Iglas (Persero) via letter No.03307 / TUK / VII / 2014 dated July 18, 2014 and letter No.04581 / TUK / IX / 2014 dated 30 September 2014, and has been responded through letter No.0328 / D-10-2014 dated October 9, 2014 which stated that at thies time PT Iglas (Persero) still keeps repairing the machines either independently or in cooperation with PT Petrosida Gresik by Joint Operation (KSO) and therefore has not been able to settle the obligations to PT Bio Farma (Persero).

PT Bio Farma (Persero) sent another billing letter to PT Iglass (Persero) reference No.04442 / TUK / VI / 2015 dated June 30, 2015 regarding a billing confirmation on the settlement of the payment obligation.

PT Bio Farma (Persero) has sent billing letters to PT Iglass (Persero) reference No. 07769 / TUK / XII / 2015 dated December 18, 2015, concerning a further confirmation on the settlement of payment obligations after repairing and installation of machineries based on the letter PT Iglass (Persero) No.0313 / D- 07/2015 dated July 15, 2015 which state as follows:

37. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

- a. PT Iglass (Persero) telah melakukan perbaikan dan pemasangan kembali mesin Emhart di line Dapur G-1.
- b. Melalui PPA telah merencanakan untuk memberikan pinjaman dana untuk pembelian /pembangunan Dapur G-2 beserta mesin – mesin lainnya.

PT Bio Farma (Persero) telah melakukan penagihan ke PT Iglass (Persero) melalui surat No. 01372/TUK/IV/2016, tanggal 7 April 2016 perihal konfirmasi lebih lanjut atas penyelesaian kewajiban pembayaran dan berdasarkan tanggapan yang diterima tanggal 20 April 2016 sesuai surat No. 0104/D-4- 2016 PT Iglass (Persero) menyatakan telah menghentikan kegiatan operasional Perusahaan sejak 31 Oktober 2015 dan di tahun 2016 oleh KBUMN telah dimasukkan dalam program Privatisasi Tahunan, sehingga belum bisa memastikan rencana pembayaran maupun penyelesaian kewajiban.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**a. Risiko Keuangan**

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Melalui pendekatan manajemen risiko, Perusahaan mencoba meminimalkan potensi dampak negatif dari risiko risiko di atas.

(i). Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.

Untuk risiko penjualan kredit, Perusahaan mensyaratkan adanya bank garansi atau LC dengan limit tertentu. Untuk risiko kredit yang berhubungan dengan bank, hanya bank dengan predikat baik yang dipilih. Selain itu, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak membatasi eksposur hanya kepada satu institusi tertentu, sehingga Perusahaan memiliki kas dan setara kas di berbagai bank.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit dan konsentrasi risiko yang dimiliki Perusahaan:

	Konsentrasi Risiko Kredit <i>Credit Risk Concentration</i>		Eksposur Maksimum <i>Maximum Exposure</i>	
	Institusi <i>Institution</i>	Lain-lain <i>Others</i>		
Piutang Usaha	288.626.423.903	-	288.626.423.903	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	1.302.637.458	446.140.212	1.748.777.670	Other Receivables
	289.929.061.361	446.140.212	290.375.201.573	

(ii). Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. Iglass PT (Persero) has made improvements and reassembling the machine EMHART in line kitchen G-1.
- b. PPA, has planned to provide loans for the purchase / construction of kitchen G-2 with machine - other machines.

PT Bio Farma (Persero) has sent a letter to PT Iglass (Persero) reference No. 01372 / TUK / IV / 2016 dated April 7, 2016 concerning further confirmation on the settlement of payment obligations and based on the response received on April 20, 2016 in accordance letter No. 0104 / D-4- 2016 PT Iglass (Persero) state that the operations of the Company has been suspended operations of the Company since October 31, 2015 and by KBUMN have been included in the Annual Privatization program thus the payment and settlement obligations can not be ensured in 2016.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**a. Financial Risk**

The main financial risks faced by the Company are credit risk, currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Company applies risk management to minimize the potential negative impacts of the risks.

(i) Credit Risk

Credit risk is the risk in which one party to a financial instrument will fail to meet its obligations and cause the other party to incur a financial loss. The Company's financial instruments that have the potential credit risk consist of cash and cash equivalents in the bank, accounts receivable and other receivables. The maximum credit risk exposure amount is equal to the carrying value of these accounts.

For credit sales risks, the Company applies the requirement of having bank guarantee or LC with certain limit. For credit risk associated with banks, the Company chooses only well-predicate banks. In addition, the Company's policy is not restrict the exposure to one particular institution only, therefore, the Company has cash and cash equivalents at various banks.

The following table shows the maximum exposure of credit risk and risk concentration of the Company:

(ii). Currency Risk

Currency risk represents the risk of value fluctuations of the financial instruments due to changes in foreign currency exchange rates.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii). Risiko Mata Uang (lanjutan)

Perusahaan menggunakan mata uang asing dalam transaksi pengadaan barang/jasa dan penjualan ekspor dengan pihak luar negeri serta pengeluaran biaya operasional sehingga terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah yang berlangsung sejak transaksi terjadi sampai dengan pembayaran dilakukan atau diterima.

Disamping terkena eksposur transaksi yang dapat menyebabkan kerugian arus kas dimasa yang datang pada saat menerima atau melakukan pembayaran, juga Perusahaan akan terkena eksposur ekonomi karena melakukan transaksi perdagangan internasional. Perusahaan akan menghadapi risiko penurunan nilai pendapatan atau peningkatan biaya akibat fluktuasi nilai tukar sehingga harga jual produk menjadi tidak kompetitif dibanding pesaing baik di pasar global atau pesaing asing di pasar domestik.

Penerimaan hasil penjualan ekspor yang didominasi oleh mata uang Dolar AS (USD) secara tidak langsung merupakan lindung nilai alami (*natural hedging*) terhadap eksposur fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, karena posisi penerimaan dalam valuta asing lebih besar dibanding kebutuhan (*long position*) serta terdapat pengeluaran untuk pengadaan barang impor dalam mata uang asing non USD, maka Perusahaan mempunyai eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar di atas, Perusahaan melakukan lindung nilai alami dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran mata uang asing dengan cara memelihara saldo mata uang asing sesuai kebutuhan, mengalihkan harga beli barang/jasa dengan Vendor Luar Negeri dari non USD ke USD, dan menjual sisa kebutuhan USD secara bertahap sesuai proyeksi kebutuhan arus kas dan harga pasar.

(iii). Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Tabel di bawah ini menggambarkan detail jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

bunga:

31 Desember 2016 / December 31, 2016					
	Suku Bunga Mengambang	Suku Bunga Tetap			
	Floating Interest Rate	Fixed Interest Rate			
	Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 1 tahun	Tdk dikenakan bunga	Jumlah	
	Less than 1 year	Less than 1 year	No interest charged	Total	
Aset					Asset
Kas dan Setara Kas	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548	Cash and Cash Equivalents
Jumlah aset keuangan	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548	Total financial assets
Jumlah gap suku bunga	175.710.469.720	272.050.386.800	189.469.748	272.239.856.548	Total interest rate gap

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii). Currency Risk (continued)

The Company uses foreign currency in performing transactions of procurement of goods/services from and of export selling to foreign parties, and disbursements for operating activities, so that there are risk of fluctuations in foreign currency exchange rates against the Rupiah since the transactions occurred until the payments are made or received.

In addition to be exposed to transactions that can lead to suffer losses of future cash flows when receives or making payments, the Company also will be affected by the economic exposures because of doing international trade transactions. The company faces risks of income impairment or increased costs due to exchange rate fluctuations so the selling price of the Company's products becomes uncompetitive both compared to competitors in global market and foreign competitors in the domestic market.

Cash receipts from export sales that are dominated by the US dollar {USD} indirectly represent a natural hedging against the exposure of exchange rate fluctuations. However, because the amount of cash receipts in foreign currencies is greater than that of the needs (*long position*), and there are expenditures for procurement of imported goods in foreign currencies other than USD, the Company has a significant exposure to foreign currency fluctuations.

To avoid risks of exchange rate fluctuations, the Company makes a natural hedging by maintaining the balance of foreign currency receipts and disbursements through maintaining cash balance as needed, changing the purchase price of goods and services from foreign vendors denominated in non-USD to USD, and gradually selling the remaining needs of USD in accordance with projected cash flows and the market price.

(iii). Interest Rate Risk

Interest rate risk is risk associated with value fluctuations of financial instruments due to changes in market interest rates.

The Company controls the impact of the fluctuations in interest rates in order to minimize their negative impact on the Company. The table below describes the detail of the maturity of the financial assets and liabilities that are affected by interest rates.

38. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**(iv) Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi komitmen kepada semua pihak dan melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

Menindaklanjuti program WHO tahun 2013-2018 terkait eradikasi Polio Global yang telah disetujui oleh Dewan Eksekutif WHO di tahun 2013. Dimana salah satu keputusannya yang harus dilaksanakan adalah melakukan penghapusan semua vaksin Polio Oral secara bertahap. Strategi untuk meminimalkan risiko adalah melalui penghentian produksi tOPV (trivalent Oral Polio Vaccine) secara bertahap oleh para produsen dan pembatasan produk tOPV sampai dengan switching produk tOPV ke bOPV (bivalent Oral Polio Vaccine) selesai dilakukan pada April 2016.

Komitmen Indonesia untuk eradikasi Polio Nasional tahun 2020 sudah ditindaklanjuti melalui edaran Kemenkes mengenai peralihan 95% pemakaian vaksin tOPV ke bOPV secara bertahap sampai batas waktu 4 April 2016, melakukan pengenalan produk pengganti IPV (Inactivated Polio Vaccine) pada program imunisasi rutin, pencabutan ijin edar dan penarikan tOPV serta pemusnahannya mulai tanggal 4 - 30 April 2016 diseluruh Indonesia baik di sektor swasta maupun pemerintah.

b. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi *arms-length*.

Perusahaan memperhitungkan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena pendiskontoan yang tidak signifikan.

Pada 31 Desember 2016, tidak ada liabilitas keuangan Perusahaan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman jangka panjang.

39. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2016.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**(iv) Liquidity Risk**

Liquidity risk is the risk in which the Company will suffer difficulties in acquiring funds to meet its commitments associated with its financial instruments.

The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and cash equivalents to enable the Company to meet the commitments to all parties, and continuously supervising the projected and actual cash flows, and monitoring the maturity date of its financial assets and liabilities.

Following up the WHO program in 2013-2018 related to the Global Polio eradication which has been approved by the WHO Executive Board in 2013. One of the decisions that must be done is to do the elimination of all Oral Polio Vaccine gradually. Strategy to minimize the risk is through the discontinuation of tOPV (trivalent Oral Polio Vaccine) production gradually by the manufacturer and limitation of tOPV product until switching tOPV product to bOPV (bivalent Oral Polio Vaccine) was completed in April 2016.

Indonesia's commitment to polio eradication National in 2020 has been followed up by a circular of Ministry of Health regarding the transition 95% vaccine use tOPV to bOPV gradually until its deadline on April 4, 2016, conducting the introduction of substitute products IPV (Inactivated Polio Vaccine) in the routine immunization program, the revocation of a distribution license and tOPV withdrawal and destruction began on 4 - 30 April 2016 throughout Indonesia in both the private and public sectors.

b. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, under the arms-length transactions.

The Company considers the fair value of its short-term financial assets and liabilities approximate to their carrying value as the impact of not significant discounting.

On December 31, 2016, the Company has not any financial liability that classified as long-term loans.

39. RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation of the financial statements that are authorized to issue on February 24, 2016.

REFERENSI KRITERIA
**ANNUAL REPORT
AWARD (ARA) 2016**

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
I. Umum			
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		√
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		√
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	√
4.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting			
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : c. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan d. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	41 - 43
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	20 - 24
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	25

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	26 (N/A)
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	26 (N/A)
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi			
1.	Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	45 – 51

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
2.	Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis; b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	52 - 61
3.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	62 - 63
IV. Profil Perusahaan			
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	65 - 68
2.	Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	72 - 73
3.	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	74 - 77
4.	Struktur Organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	78 - 79

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/ Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	80 - 81
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	82 - 86
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	88 - 93
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	94 - 113

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
9.	Komposisi Pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	114 (N/A)
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	114 (N/A)
11.	Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	114 (N/A)
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	114 (N/A)
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	115 (N/A)
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	115 (N/A)

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	116 - 123
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	115 (N/A)
17.	Informasi pada Website Perusahaan	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 1. Isi Kode Etik; 2. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 3. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 4. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 5. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	135
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	136 - 145
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	154 - 177

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	178 - 203
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	204 - 206
4.	Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/ sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	207 - 209
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	210 - 214
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	215 - 219
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	220 - 236
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	237 (N/A)

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	237 - 245
10.	Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	246 - 252
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	253 - 254
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	255 (N/A)
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	255 (N/A)
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	255 (N/A)
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	256 (N/A)

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain: 3. Perubahan kebijakan akuntansi; 4. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 5. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	257 - 264
17.	Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	265 - 269
VI. Good Corporate Governance			
1.	Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	Laporan Keuangan 295 - 316
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	317 - 321
3.	Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	322 - 344
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.	345 - 357

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN		HALAMAN
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	358 - 362
6.	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	363 - 383
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	384
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	384 - 386

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
9.	Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	387 - 403
10.	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	404 (N/A)
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	405 - 419
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	420 - 424
13.	Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	439 - 450

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
14.	Akuntan Publik	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	454 - 456
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	457 - 471
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil revidu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	472 - 478
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	529 - 532

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
18.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	532 - 534
19.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	534 - 539
20.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	539 - 540
21.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	479 (N/A)

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
22.	Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	480 - 486
23.	Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	487 - 497
24.	Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	498 - 509
25.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	510 - 517

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
VII. Informasi Keuangan			
1.	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	Laporan keuangan √
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan		Laporan keuangan i - ii
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	456 Laporan keuangan i - ii
4.	Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Laporan keuangan 1 - 54
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	170 - 172 Laporan keuangan 3
6.	Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	553 Laporan keuangan 19 - 22

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.	Laporan keuangan 9 - 19
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitasterkait.	Laporan keuangan 43 - 52
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Laporan keuangan 24 - 27
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Laporan keuangan 16 - 17 28 - 31

KRITERIA PENJELASAN			HALAMAN
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	156 – 179 Laporan keuangan 39 - 42
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Laporan keuangan 52 - 54
13.	Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	Laporan keuangan 54

REFERENSI KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD (ARA) 2016

Laporan Keberlanjutan ini dicetak di atas kertas bersertifikat FSC (*Forest Stewardship Council*) & Recycled



